KRONIK PENCULIKAN AKTIVIS DAN KEKERASAN NEGARA 1998

KRONIK PENCULIKAN AKTIVIS DAN KEKERASAN NEGARA 1998

[ɪ:bœkœ]
INDONESIA BUKU

IKOHI
IKATAN KELUARGA ORANG HILANG INDONESIA

GERPOLEK
PLOT

KRONIK
PENCULIKAN AKTIVIS DAN
KEKERASAN NEGARA 1998

Penyusun
Muhidin M. Dahlan

Perancang sampul
Pratama Pamungkas

Penata letak
Alfa Masmuja dan Fauzi Kencana

Tim dokumentasi
Gerpolek Project

Diterbitkan pertama kali Januari 2024
Cetakan kedua Februari 2024

15 cm x 23 cm; xii + 506 hlm.
ISBN: 978-979-1436-75-5

Diterbitkan oleh

[ɪ:bœkœ]
INDONESIA BUKU

IKOHI
IKATAN KELUARGA ORANG HILANG INDONESIA

GERPOLEK PLOT

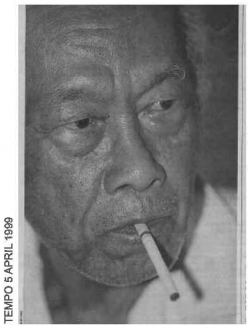

Ya, kalau kekuasaan nggak memperhatikan sejarah, publik yang memperhatikan. [...] Setiap terpelajar mulailah mendokumentasikan sejarah.

| ***Pramoedya Ananta Toer,*** *dalam Playboy Indonesia, edisi April 2006.*

Monumen Ingatan (Andi Achdian)

Reformasi adalah sebuah momen dalam sejarah Indonesia yang menciptakan garis batas memisahkan periode otoriterisme di bawah rezim Orde Baru dan kehidupan politik yang lebih demokratis setelahnya.

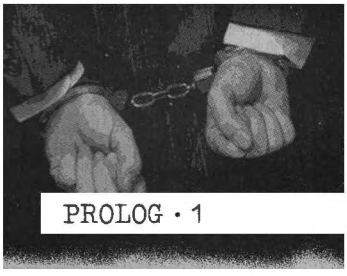

Apa dan Mengapa Buku Ini (Muhidin M. Dahlan)

Ingat kata "kliping"? Kata ini, pada masanya, akrab dalam obrolan mereka yang melewati bangku-meja sekolah dasar karena bagian dari "tugas".

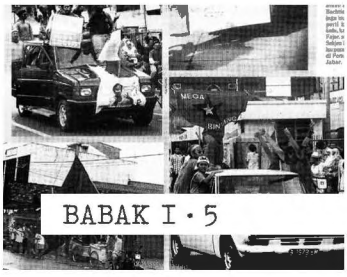

Alasan-Alasan Awal

Eskalasi pemilu 1997 yang sudah dimulai sejak peristiwa penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996 menjadi salah satu pemicu institusi ABRI mengetatkan "kewaspadaan" dan "siap siaga".

Prabowo Subianto: Bulan Separuh Bayang di Cijantung

Ibarat rembulan, Prabowo Subianto adalah bulan separuh bayang. Ada sisi gelap menutup permukaannya yang terang.

Teater Penculikan: Yang Hilang, Yang (Tidak) Kembali

Di Markas Kopassus di Cijantung, Selasa pagi di bulan Januari 1998, Mayor (Inf) Bambang Kristiono memanggil Kapten (Inf) Multhazar dan Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo Budi.

Pengakuan-Pengakuan: Tertusuk Padamu, Berdarah Padaku

Ada yang kembali. Ada yang tak pernah lagi berdiri di depan pintu rumahnya. Cerita, pengakuan, dan harapan yang terculik adalah kertas litmus sejarah 98.

Munir: Bayangkara Korban Kekerasan Negara

Ia ayah bagi mereka yang merasakan betapa sepi, betapa getir, betapa sakit, betapa langit nasib runtuh saat mendapatkan palu godam kekerasan negara.

Sebab Lupa Tak Bisa Membebaskan Kita

Surat kabar memang sumber tidak resmi, tapi ia menjadi “testamen jalanan”, semacam “dokumen rakyat”, yang kepadanya kita bisa menemukan wajah masa lalu.

PENGANTAR

Monumen Ingatan

OLEH ANDI ACHDIAN

Reformasi adalah sebuah momen dalam sejarah Indonesia yang menciptakan garis batas memisahkan periode otoriterisme di bawah rezim Orde Baru dan kehidupan politik yang lebih demokratis setelahnya. Belum ada kesepakatan kapan momen itu persisnya dimulai dan kapan ia selesai, tetapi orang tahu garis besar peristiwa yang menghidupinya.

Ia dimulai dari gejolak kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia yang kemudian melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), disusul penyerangan terhadap kantor PDIP yang kemudian diberi nama peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996, dan kemudian dinyatakannya Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang kerusuhan tersebut. Gejolak politik itu dalam

banyak hal telah menjadi pertanda keretakan dalam tubuh elit politik Orde Baru, terutama dalam tubuh militer dan pendukungnya dari kalangan sipil, yang tidak lagi menghendaki Suharto terus berkuasa.

Gejolak yang semula berpusar di kalangan elit politik bergerak menjadi gejolak yang dialami banyak orang ketika krisis keuangan melanda Asia Tenggara pada 1997. Krisis politik yang telah mewarnai kehidupan politik Indonesia mendapatkan momentum untuk lebih membara dalam krisis ekonomi tersebut.

Nilai rupiah terpuruk terhadap dollar, hutang luar negeri swasta dan negara membengkak yang membawa sejumlah industri kolaps, seperti sektor perbankan dan manufaktur yang berujung pada PHK massal. Krisis ekonomi menjadi kekuatan memukul rezim yang sekarat. Dalam hantaman krisis itu, sejumlah tokoh muncul ke permukaan mengisi panggung politik yang menawarkan alternatif kepemimpinan seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri dan termasuk Amin Rais. Usia rezim Orde Baru tinggal menghitung hari.

Namun, dalam tubuh rezim bukan berarti tidak ada perlawanan terhadap gerak sejarah tak terhindar, meski pada akhirnya sia-sia belaka. Perlawanan terhadap arus sejarah itu muncul melalui serangkaian tindakan aneh penculikan para aktivis yang dituding mengacaukan kehidupan politik Indonesia menjelang pemilu dan Sidang Umum MPR 1997. Publik akhirnya mengetahui bahwa pelaku adalah anggota Kopassus dalam Tim Mawar yang menjalankan operasi mereka sejak pertengahan tahun 1997 dan mulai melakukan aksi penculikan memasuki awal tahun 1998. Sembilan aktivis yang diculik selamat, tetapi tiga belas lainnya tetap tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

Kemudian *crème de la crème* rentetan peristiwa yang mewarnai momen-momen kejatuhan rezim Orde Baru terjadi dengan kerusuhan yang meluas pada Mei 1998 dengan penjarahan terhadap aset-aset milik etnis Tionghoa, dan kasus-kasus pemerkosaan yang menyebabkan ge-

lombang eksodus mereka ke luar negeri. Pada momen ini Suharto tidak lagi dapat bertahan dan memutuskan lengser *keprabon*.

***

Narasi masa lalu—apalagi yang sarat kontroversi—tak terhindar seringkali memuat sangkalan yang menegasikan dirinya sendiri. Para pelaku penuh semangat di masa lalu tiba-tiba berbalik badan dan mereka ulang sejarah yang pernah mereka ciptakan.

Maka sejarawan memilih cara terbaik dengan "mengatakannya melalui arsip" untuk memberikan "jejak analog" rangkaian peristiwa yang terjadi. Buku ini hadir dengan cara seperti itu. Ia menampilkan kliping berita dan wawancara suratkabar dan majalah yang terbit sepanjang momen-momen penting reformasi. Hasilnya adalah sebuah gambaran hidup tentang apa yang pernah terjadi pada masa dua puluh lima tahun yang silam.

Para sejarawan menyadari bahwa informasi suratkabar dan majalah memiliki gambaran berbeda dibanding dokumen resmi dalam bentuk arsip dalam penelitian sejarahnya. Karena alasan sulit dipegang pijakan perspektifnya, sarat bias dan sensasi, sejarawan konvensional cenderung meletakkan suratkabar dan majalah sebagai sumber terakhir dalam upayanya membangun rekonstruksi masa lalu.

Namun, mereka justru gagal memahami bahwa bias dan *"unrealibility"* pemberitaan suratkabar justru merupakan rekaman penting dalam lingkupnya sendiri. Suratkabar bukan hanya merekam peristiwa dalam waktu dan impak yang cepat, tetapi juga mengabadikan sikap-sikap dan bias sosio-kultural di dalam konteks sejarahnya sendiri.

Dengan cara demikian buku yang memuat kliping berita dan wawancara sepanjang periode reformasi ini memiliki nilai pentingnya tersendiri. Kita mendapatkan sikap, pandangan, dan perilaku orang yang menjalani fitrahnya sesuai konteks sejarah saat itu. Kita mendapatkan gambaran tentang bentuk asli watak dan bias-bias dari

orang-orang yang dahulu lawan dan sekarang menjadi kawan. Buku ini memuat 'semangat zaman' yang tidak bisa disangkal bahwa ia pernah hadir dan membentuk gerak sejarah negeri ini.

Lebih penting dari itu, penyusunan buku ini mewakili semangat yang layak diacungi jempol dalam menjaga masa lalu "seperti apa adanya". Bukan hal baru di Indonesia bila dokumen-dokumen masa lalu tiba-tiba hilang, atau tumpukan buku dan suratkabar dalam perpustakaan yang tercatat dalam katalog tetapi tidak pernah ada wujud fisiknya. Menegasikan sejarah lama dan membuat sejarah baru adalah bagian yang sering muncul dalam sebuah pertarungan politik.

Demikian yang terjadi dalam catatan babad dan serat ketika dinasti-dinasti baru muncul dan menyusun sejarahnya sendiri demi legitimasi kekuasaan mereka. Pengalaman itu tidak unik dalam sejarah yang lama. Kemunculan rezim Orde Baru juga memiliki proyek sejarahnya sendiri yang kemudian memunculkan "sejarah Indonesia berseragam", meminjam judul penelitian Katherine MacGregor tentang bagaimana narasi sejarah Orde Baru dibentuk.

Hal serupa terjadi di negeri tetangga Filipina ketika Ferdinand "Bongbong" Romualdez Marcos Jr. berhasil meraih tampuk kekuasaan sebagai presiden. Ketika kisah-kisah mengenai kediktatoran ayahnya mulai menghilang dari buku-buku pelajaran, para sejarawan di negeri itu bersatu menyuarakan kegelisahan mereka terhadap arus balik sejarah yang menegasikan kisah kelam kediktatoran Marcos.

| ***Andi Achdian,*** *sejarawan dan pengajar. Karya terbarunya,* Ras, Kelas, Bangsa: Politik Pergerakan Antikolonial di Surabaya Abad ke-20 *(2023)*

Inisiatif menerbitkan buku ini dengan demikian layak disambut hangat. Ia menjadi pengingat bahwa masa lalu terlalu penting untuk diabaikan, dan sekaligus memberikan jaminan bahwa apa yang pernah terjadi tidak hilang dari ingatan publik. Sekarang ini, orang bisa mengatakan beragam soal tentang masa lalu dengan beragam cara. Namun, cukup "katakan dengan arsip" untuk membuat masa lalu itu hadir dalam ingatan kita. Tabik.

PROLOG

Apa dan Mengapa Buku Ini

OLEH MUHIDIN M. DAHLAN

Ingat kata "kliping"? Kata ini, pada masanya, akrab dalam obrolan mereka yang melewati bangku-meja sekolah dasar karena bagian dari "tugas". Perlahan, kata ini lindap dan kemungkinan menjadi frase yang asing lantaran tak lagi hidup dalam "tradisi sekolah". Biasanya, sesuatu yang sudah jarang disebut dalam percakapan belajar perlahan musnah.

Kita pun secara malas-malasan mengetiknya di bilah kamus besar daring. Oh, itu artinya. Memotong/menggunting hal dianggap penting dalam surat kabar/majalah dengan "sistem tertentu".

Jika demikian artinya, kliping itu adalah *screenshot*. Gunting digital dalam tradisi *screenshot* adalah tiga jari (gunting dua jari). Di gajet merek tertentu bahkan dengan

telapak tangan sisi kelingking disapu dari kiri ke kanan, informasi di layar pun terpotong dan tersimpan.

Buku yang sedang Anda pegang ini adalah buku kliping dalam pengertian kamus secara *letterlijk*. "Memotong/menggunting bagian koran/majalah dengan "sistem tertentu".

Salah satu bagian penting dari "sistem tertentu" tersebut adalah memilih tema-topik dan disusun sedemikian rupa, dipresentasikan juga dengan pola yang khas.

"Sistem tertentu" itu juga bermakna suprastruktur. Bahwa, mengliping bukan sekadar tugas sekolah, "jadi gak jadi kumpul di meja Pak/Bu Guru"; mengliping adalah kerja politik. Ia bisa menjadi sangat penting untuk menyapu debu tebal (dis)informasi atas suatu peristiwa penting yang jauh dan berkepentingan sekali untuk "dibersihkan", baik oleh institusi atau sekelompok orang atau individu untuk maksud tertentu.

Sampai di sini, praktik mengliping adalah kerja daya budi agar tanah sejarah yang dipijak bukan tanah palsu, bumi artifisial. Praktik mengliping memberitahu dan menunjuk secara lebih jernih bahwa *tanah-yang-itu* adalah tanah bangkai mesiu, bukan seperti yang diucapkan berulang-ulang di atas mimbar: ini tanah organik dari sisa bangkai hewan dan sayuran yang subur untuk menanam singkong dan jagung ratusan ribu hektar luasnya.

Tetapi, ini bukan kliping soal tanah ratusan ribu hektar untuk singkong dan jagung di atas lahan raya gambut. Ini kliping politik kekerasan yang menyertai peralihan kekuasaan. Ini kliping tentang kekerasan politik dalam ruang gelap yang dilakukan sekelompok kaum bersenjata sangat terlatih. Mereka menculik, menyiksa, dan bahkan tak segan-segan menghabisi mangsanya.

Reformasi adalah episode sejarah Indonesia yang mengantarkan kita sampai di titik saat ini. Buku ini mengajak pembaca untuk berhenti di titik itu, tahun yang saya sebut dengan puncak-puncak kekerasan politik yang masif. Tidak semua brutalisme kekerasan politik itu ditampilkan di sini. Buku ini hanya menyoroti secara spesifik pada soal penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi.

Dan, inilah drama itu. Saya menyebutnya "drama" atau "teater" karena memang demikianlah adanya. Ada peristiwanya, ada tokoh-tokoh utama dan pendukung. Ada alur. Ada pula "hasil akhirnya". Tetapi, jika biasanya drama umumnya dua atau tiga babak, buku penculikan dan politik kekerasan 1998 ini terbagi dalam lima babak.

Seperti halnya drama, ada babak perkenalan tokoh utama (Prabowo Subianto); tampilan masalah dan alasan-alasan (lanskap politik militerisme beserta institusinya); jalannya cerita yang dijalin oleh banyak sekali tokoh pendukung (dari para jenderal hingga elite-elite politik sipil; dari korban penculikan hingga para bayangkara hukum yang setia menemani dan membuka pintu gelap "kapal selam" kekerasan yang membungkus wajah kemanusiaan); hingga antiklimaksnya ruang pengadilan.

Semua-mua cerita itu terjalin lewat operasi pengliping-an. Narasi utamanya adalah kliping. Sebut saja ini *pictorial book*. Namun, yang menjadi "pictorial"-nya bukan foto-foto indah dan/atau artistik dari seniman, melainkan guntingan kliping statemen, wawancara, sari peristiwa yang "digunting" dari pelbagai surat kabar dan majalah.

Pembaca diajak membaca dan meresapi serangkaian panjang kutipan yang diikuti "wajah ma(s)sa" dengan segenap-genap aksentuasinya.

Dengan demikian, spirit penyusunan buku ini adalah ketersediaan kliping mula-mula yang dipungut dari berbagai tempat, barulah bukit kliping yang acak itu disusun narasi ringkasnya sedemikian rupa dengan "sistem tertentu".

Ada tiga unsur yang selalu ada di setiap helai halaman buku ini: potongan kliping, kalender peristiwa, dan sari peristiwa (statemen/pendapat, wawancara, kejadian).

Khusus di Babak I dan III, kliping disusun bersandar pada kalender (waktu), kronologis; sementara pada II, IV, dan V, kliping tersusun dalam bentuk narasi yang semua kalimatnya diambil dari kliping.

Jika pembaca berjumpa dengan statemen tokoh, misalnya, selain diperlihatkan teks sumber, penampang kliping itu juga sekaligus dimunculkan (apa adanya); terkadang

ditampilkan seluruhnya, terkadang pula hanya potongan paragraf. Oleh Gerpolek Plot, lembaga pemilik arsip yang diinisiasi sahabat saya Zen RS, bahkan membagi secara gratis semua kliping yang jadi bahan baku penyusunan buku ini dalam sebuah portal khusus.

Tujuannya adalah sebuah ajakan masuk secara analog dalam "teater memori" sebuah masa, sebuah era, sebuah zaman yang disebut "Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998".

Kerja menyisir "jejak analog" dalam dunia digital yang serba cepat—meminjam istilah sejarawan dan penulis Andi Achdian di bagian pengantar buku ini—merupakan sebentuk ajakan kepada sidang pembaca untuk melambatkan sejenak langkahnya memasuki dunia semasa, portal dunia 1998, gundukan "polisi tidur" dari dunia yang menakutkan, berdarah, percakapan waswas, dan rintihan sakit dalam kamar gelap sempit.

Dari dunia seperti itulah kita hadir di sini, melanjutkan hayat keindonesiaan agar tetap sekuat tenaga untuk tidak memberikan jalan bagi potensi lahirnya sistem politik (terlihat) baru (tetapi purba) yang membikin bandul hayat peradaban kita dilempar kembali ke semesta tahun busuk itu. Buku ini mengambil jalan lewat operasi kliping. Itu.

| ***Muhidin M. Dahlan***, *Pendiri Radio Buku dan pengelola Warung Arsip. Dokumentator partikelir yang tinggal di Yogyakarta ini pernah memimpin riset dan melahirkan beberapa buku tebal, antara lain* Seabad Pers Kebangsaan *(1907–2007),* Seabad Kronik Kebangkitan Indonesia *(1908–2008),* Karya-Karya Lengkap Tirto Adhi Soerjo, Almanak Seni Rupa Jogja *(1999–2009), dan* 100 Konser Musik Penting di Indonesia.

BABAK I

Alasan-Alasan Awal

Kontestasi dan eskalasi pemilu 1997 yang sudah dimulai sejak peristiwa penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan akronim Kudatuli menjadi salah satu pemicu institusi ABRI mengetatkan "kewaspadaan" dan "siap siaga". Termasuk, secara resmi melakukan pelabelan "komunis" atas gerakan prodemokrasi. Ditambah lagi ditemukannya bom di sebuah rumah susun oleh mereka yang dicurigai sebagai "gerakan radikal" menjadi alasan-alasan awal operasi penculikan dilakukan secara klandestin, tetapi justru menjadi "malapetaka" karena arus politik berbalik arah.

Paron
26 April 1997

Sekarang kalau kita lihat kelompok radikal di dalam negeri juga mencoba mengaitkan, menarik simpati, dan bantuan dari kelompok- kelompok di luar négri. Kita tidak menutup kemungkinan masih ada pihak-pihak luar yang memancing di air keruh. Mungkin melempar puntung rokok di padang ilalang yang sudah kering. Kita harus bekerja keras, tetap waspada, dan siap-siaga.

| ***Letjen TNI Prabowo Subianto,*** *Komandan Jenderal Kopassus, dalam wawancara Paron ("Mayjen (TNI) Prabowo Subianto: Tiada Maaf Kalau Gagal", 26 April 1997).*

MASSA MEGA-BINTANG. Diarangdan belum tentu menambah suara.

Paron
24 Mei 1997

MEI 1997

Pada kampanye putaran terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 14 Mei 1997, di Jakarta Timur, ditemukan selebaran yang menarik perhatian karena isinya benar-benar lain dari biasanya. Di selebaran tersebut terpampang foto Megawati Soekarnoputri dan Ismail Hasan Metareum. Ismail adalah ketua umum DPP PPP. Di atas foto keduanya tertulis: "Koalisi Mega-Bintang-Rakyat". Selebaran itu ditemukan di tengah maraknya pawai Mega-Bintang. Selebaran itu diisukan membawa kedua tokoh Mega-Bintang hendak menjatuhkan pemerintah yang sah.

PPP bereaksi keras atas isu "Mega-Bintang-Rakyat" ini. Apa yang ingin dicapai PPP adalah perubahan secara demokratis dan konstitusional melalui lembaga perwakilan

Paron
31 Mei 1997

rakyat, bukan melalui selebaran dan fitnah.

Pada kampanye putaran terakhir kampanye itu, isu kerusuhan besar menyelimuti seantero Jakarta. Aparat keamanan bersiaga penuh. Satuan Unit Reaksi Cepat (URC) melakukan patroli. Di jalanan, pasukan anti huru hara Kodam Jaya, pasukan Marinir, Kostrad, dan Brimob hilir mudik di jalanan. Pasukan berjaga-jaga sepanjang jalan, di depan pertokoan, bank, pasar, dan mulut gang. Sejumlah panser ikut pula berpatroli. Sementara, 6 buah helikopter meraung-raung dengan terbang rendah di atas kota Jakarta. Massa PPP sudah diimbau untuk jangan keluar rumah, tetapi massa tidak menggubris.

Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, segerombolan anak muda turun ke jalan. mereka menari hingga membawa spanduk dan bedug.

Di Ciputat, ribuan massa memadati Jalan Juanda hingga Ciputat Raya. Masyarakat di sepanjang jalur tersebut keluar karena mendengar isu akan adanya serangan balik dari Pemuda Pancasila dan massa Golkar sehubungan dengan aksi mahasiswa IAIN dan masyarakat setempat sebelumnya. Karena yang ditunggu tidak datang, akhirnya ada sebagian massa yang menyerbu rumah biliar.

Kerusuhan di Kota Jakarta terjadi di Kebayoran Baru. Ribuan massa yang melakukan arak-arakan melempari sejumlah toko dan bank. Bahkan, meluas hingga Ciledug. Begitu juga di kompleks Roxy Masa dan pusat perbelanjaan ITC. Ratusan massa melakukan *long march*.

Yang lebih mencekam terjadi di Tangerang. Seratus ribu massa PPP yang dijadwalkan kampanye mengadakan pawai di jalan-jalan utama. Kerusuhan meletus. Massa melempari toko-toko, kantor instansi pemerintah, rambu-rambu lalu lintas, pot bunga di trotoar.

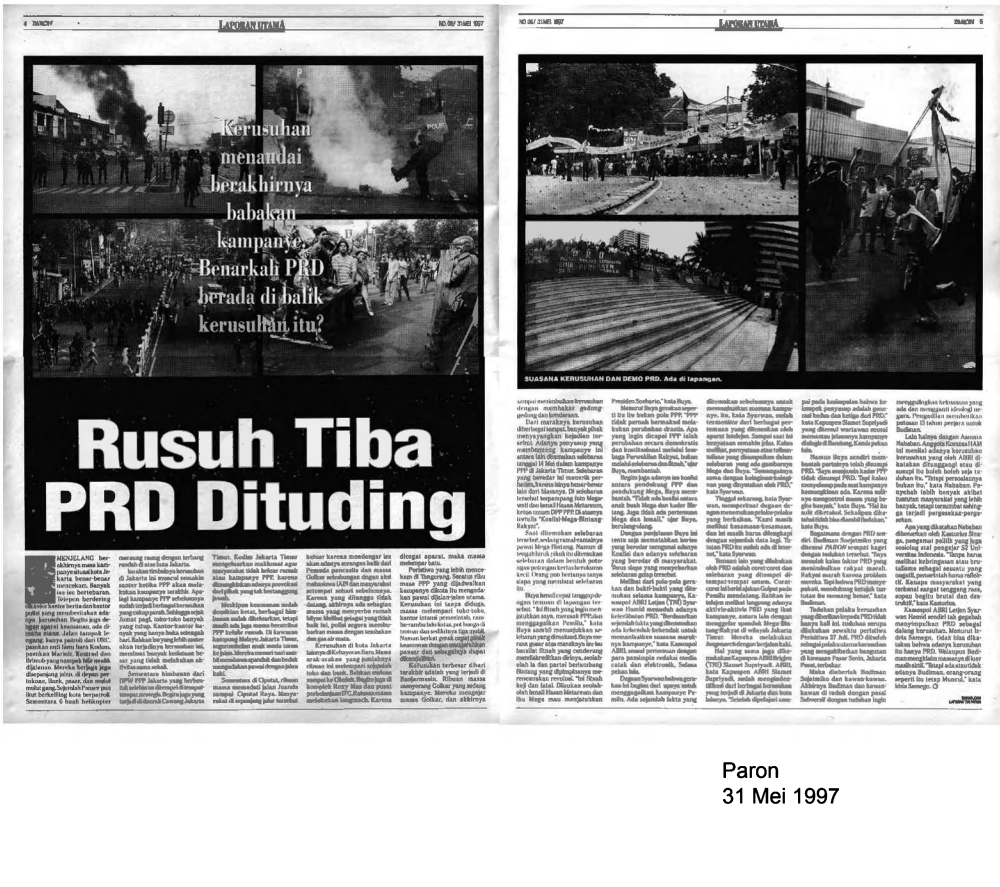

LAPORAN UTAMA

Kerusuhan menandai berakhirnya babakan kampanye. Benarkah PRD berada di balik kerusuhan itu?

Rusuh Tiba PRD Dituding

SUASANA KERUSUHAN DAN DEMO PRD. Ada di lapangan.

Paron
31 Mei 1997

Paron
31 Mei 1997

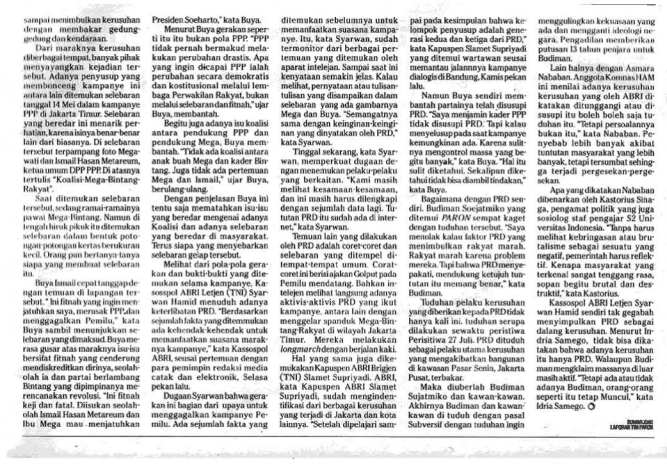

sampai menimbulkan kerusuhan dengan membakar gedung-gedung dan kendaraan.

Dari maraknya kerusuhan diberbagai tempat, banyak pihak menyayangkan kejadian tersebut. Adanya penyusup yang membonceng kampanye ini antara lain ditemukan selebaran tanggal 31 Mei dalam kampanye PPP di Jakarta Timur. Selebaran yang beredar ini menarik perhatian, karena isinya benar-benar lain dari biasanya. Di selebaran tersebut terpampang foto Megawati dan Ismail Hasan Metareum, ketua umum DPP PPP. Di atasnya tertulis "Koalisi-Mega-Bintang-Rakyat".

Saat ditemukan selebaran tersebut, sedang ramai-ramainya pawai Mega-Bintang. Namun di tengah hiruk pikuk itu ditemukan selebaran dalam bentuk potongan kertas berukuran kecil. Orang pun bertanya-tanya siapa yang membuat selebaran itu.

Buya Ismail cepat tanggap dengan temuan di lapangan tersebut. "Ini fitnah yang ingin menjatuhkan saya, merusak PPP, dan menggagalkan Pemilu," kata Buya sambil menunjukkan selebaran yang dimaksud. Buya merasa gusar atas maraknya isu isu bersifat fitnah yang cenderung mendiskreditkan dirinya, seolah-olah ia dan partai berlambang Bintang yang dipimpinannya merencanakan revolusi. "Ini fitnah keji dan fatal. Disukan seolah-olah Ismail Hasan Metareum dan Ibu Mega mau menjatuhkan Presiden Soeharto," kata Buya.

Menurut Buya gerakan seperti itu itu bukan pola PPP. "PPP tidak pernah bermaksud melakukan perubahan drastis. Apa yang ingin dicapai PPP ialah perubahan secara demokratis dan kostitusional melalui lembaga Perwakilan Rakyat, bukan melalui selebaran dan fitnah," ujar Buya, membantah.

Begitu juga adanya isu koalisi antara pendukung PPP dan pendukung Mega. Buya membantah. "Tidak ada koalisi antara anak buah Mega dan kader Bintang. Juga tidak ada pertemuan Mega dan Ismail," ujar Buya, berulang-ulang.

Dengan penjelasan Buya ini tentu saja mematahkan isu-isu yang beredar mengenai adanya Koalisi dan adanya selebaran yang beredar di masyarakat. Terus siapa yang menyebarkan selebaran gelap tersebut.

Melihat dari pola-pola gerakan dan bukti-bukti yang ditemukan selama kampanye, Kassospol ABRI Letjen (TNI) Syarwan Hamid menuduh adanya keterlibatan PRD. "Berdasarkan sejumlah fakta yang ditemmukan ada kehendak kehendak untuk memanfaatkan suasana maraknya kampanye," kata Kassospol ABRI, sesusai pertemuan dengan para pemimpin redaksi media catak dan elektronik, Selasa pekan lalu.

Dugaan Syarwan bahwa gerakan ini bagian dari upaya untuk menggagalkan kampanye Pemilu. Ada sejumlah fakta yang ditemukan sebelumnya untuk memanfaatkan suasana kampanye. Itu, kata Syarwan, sudah termonitor dari berbagai pertemuan yang ditemukan oleh aparat intelejan. Sampai saat ini kenyataan semakin jelas. Kalau melihat, pernyataan atau tulisan-tulisan yang disampaikan dalam selebaran yang ada gambarnya Mega dan Buya. "Semangatnya sama dengan keinginan-keinginan yang dinyatakan oleh PRD," kata Syarwan.

Tinggal sekarang, kata Syarwan, memperkuat dugaan dengan menemukan pelaku-pelaku yang berkaitan. "Kami masih melihat kesamaan-kesamaan, dan ini masih harus ditengkapi dengan sejumlah data lagi. Tuduhan PRD itu sudah ada di internet," kata Syarwan.

Temuan lain yang dilakukan oleh PRD adalah coret-coret dan selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum. Coret-coret ini berisi ajakan Golput pada Pemilu mendatang. Bahkan intelejen melihat langsung adanya aktivis-aktivis PRD yang ikut kampanye, antara lain dengan menggelar spanduk Mega-Bintang-Rakyat di wilayah Jakarta Timur. Mereka melakukan *longmarch* dengan berjalan kaki.

Hal yang sama juga dikemukakan Kapuspen ABRI Brigjen (TNI) Slamet Supriyadi. ABRI, kata Kapuspen ABRI Slamet Supriyadi, sudah mengidentifikasi dari berbagai kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan kota lainnya. "Setelah dipelajari sampai pada kesimpulan bahwa kelompok penyusup adalah generasi kedua dan ketiga dari PRD," kata Kapuspen Slamet Supriyadi yang ditemui wartawan seusai memantau jalannnya kampanye dialogis di Bandung, Kamis pekan lalu.

Namun Buya sendiri membantah partainya telah disusupi PRD. "Saya menjamin kader PPP tidak disusupi PRD. Tapi kalau menyelusup pada saat kampanye kemungkinan ada. Karena sulitnya mengontrol massa yang begitu banyak," kata Buya. "Hal itu sulit diketahui. Sekalipun dikethaui tidak bisa diambil tindakan," kata Buya.

Bagaimana dengan PRD sendiri. Budiman Soejatmiko yang ditemui *PARON* sempat kaget dengan tuduhan tersebut. "Saya menolak kalau faktor PRD yang menimbulkan rakyat marah. Rakyat marah karena problem mereka. Tapi bahwa PRD menyepakati, mendukung ketujuh tuntutan itu memang benar," kata Budiman.

Tuduhan pelaku kerusuhan yang diberikan kepada PRD tidak hanya kali ini. tuduhan serupa dilakukan sewaktu peristiwa Peristitiwa 27 Juli. PRD dituduh sebagai pelaku utama kerusuhan yang mengakibatkan bangunan di kawasan Pasar Senin, Jakarta Pusat, terbakar.

Maka diuberlah Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan. Akhirnya Budiman dan kawan-kawan di tuduh dengan pasal Subversif dengan tuduhan ingin menggulingkan kekuasaan yang ada dan mengganti ideologi negara. Pengadilan memberikan putusan 13 tahun penjara untuk Budiman.

Lain halnya dengan Asmara Nababan. Anggota Komnas HAM ini menilai adanya kerusuhan kerusuhan yang oleh ABRI diatakan ditunggangi atau disusupi itu boleh boleh saja tuduhan itu. "Tetapi persoalannya bukan itu," kata Nababan. Penyebab lebih banyak akibat tuntutan masyarakat yang lebih banyak, tetapi tersumbat sehingga terjadi pergesekan-pergesekan.

Apa yang dikatakan Nababan dibenarkan oleh Kastorius Sinaga, pengamat politik yang juga sosiolog staf pengajar 52 Universitas Indonesia. "Tanpa harus melihat kebringasan atau brutalisme sebagai sesuatu yang negatif, pemerintah harus reflektif. Kenapa masyarakat yang terkenal sangat tenggang rasa, sopan begitu brutal dan destruktif," kata Kastorius.

Kassospol ABRI Letjen Syarwan Hamid sendiri tak gegabah menyimpulkan PRD sebagai dalang kerusuhan. Menurut Indria Samego, tidak bisa dikatakan bahwa adanya kerusuhan itu hanya PRD. Walaupun Budiman mengklaim massanya di luar masih aktif. "Tetapi ada atau tidak adanya Budiman, orang-orang seperti itu tetap Muncul," kata Idria Samego.

> **"Berdasarkan sejumlah fakta yang ditemukan ada kehendak untuk memanfaatkan suasana semaraknya kampanye. Kalau kita lihat statement atau tulisan yang disampaikan dalam selebaran yang bergambar Mega dan Buya sama dengan keinginan-keinginan yang dinyatakan oleh PRD."**

*| **Letjen TNI Syarwan Hamid**, Kasospol ABRI. Disampaikan dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik, 27 Mei 1997. Berita dipublikasikan Paron ("Syarwan Hamid (Kassospol ABRI): PRD Melakukan Kerusuhan", 31 Mei 1997).*

PARON LAPORAN UTAMA NO. 00/ 31 MEI 1997

KASSOSPOL ABRI, Letjen (TNI) Syarwan Hamid, adalah pejabat ABRI yang pertama kali mengatakan Partai Rakyat Demokrasi (PRD) terlibat dalam kerusuhan menjelang Pemilu. Bagaimana sebenarnya keterlibatan PRD menurut pengamatan Syarwan? Rika Condessy dari *PARON* mewawancarai Syarwan Hamid seputar keterlibatan PRD dalam kerusuhan seusai acara pertemuan dengan para peninjau media massa di Dephankam, Selasa pekan lalu. Petikannya:

SYARWAN HAMID (KASSOSPOL ABRI)

PRD Melakukan Kerusuhan

Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, apakah sudah ada kesimpulan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi selama itu dengan menemukan pelaku-pelaku yang berkaitan dengan ini.

Sejauh mana penyelidikan pihak aparat mengusut kasus selebaran itu?

Dalam sejumlah pelanggaran kampanye, di mana ada beberapa ribu yang sudah ditindak dan beberapa ratus yang diproses lebih lanjut. Mengenai siapa-siapa yang diusut, belum bisa kita sampaikan.

Kalau dilihat dari judul-judul selebaran mungkin orang bisa bilang 'wah ini dibikin.' Tetapi kalau kita berpikir dengan logika, siapa yang mau berbuat seperti Mega sendiri menyatakan bahwa itu bukan dari dia.

Banyaknya selebaran yang kemungkinan dibuat oleh PRD, kemudian berkembang isu bahwa itu sebenarnya dibuat oleh ABRI. Mohon dijelaskan agar isu itu tidak berkembang?

Memang ada yang berpikir begitu. Seperti film dan toko-toko yang dilempari bisa saja dibilang ABRI yang bikin. Kejadian kemarin seperti Mesjid dibakar bisa juga ABRI yang bikin, namanya isu. Tetapi orang yang berpikir logis, apakah masuk di akal? Mereka yang di lapangan. sudah dibantah semua. Yang mereka akui adalah bahwa mereka menerima massa yang masuk dari manapun. Jadi tidak ada koalisi Mega-Bintang itu karena Mega sendiri jelas-jelas membantah. Kalau bukan Mega sendiri, siapa yang paling berkepentingan dengan hal itu. Ini memang sempat bergulir dan baru belakangan dibantah. Mengapa lama dibantah, saya sendiri tidak tahu.

Berkaitan dengan PRD, apakah Pramoedya juga akan dimintai keterangan sehubungan dengan munculnya selebaran itu?

Bisa saja. Kalau nanti dalam penyelidikan perlu ada keterangan bisa saja diperiksa. Seperti dalam film itu (ditemukan di Australia; Red.) propagandanya jelas sekali.

Menghadapi minggu tenang dan tanggal 29 nanti, bagaimana persiapan dan langkah-langkah ABRI khususnya untuk pengamanan?

Tentunya kita ingin yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Kita programkan bahwa tahap-tahap berikutnya yang tinggal beberapa hari sampai dengan penghitungan suara dapat berjalan aman. ○

Paron
31 Mei 1997

"Kalau PRD membuat selebaran atau pernyataan politik, maka di bawahnya akan dicantumkan nama organisasi, yaitu PRD. Sedangkan selebaran-selebaran yang saya lihat, tidak ada satu pun yang mencantumkan nama PRD, meskipun program-program yang dibuat memiliki kesamaan dengan program-program yang ditawarkan oleh PRD."

| ***Andi Arief***, *Anggota PRD dan Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), dalam berita wawancara Paron (Andi Arief (Aktivis PRD): Ada Anggota di Lapangan", 31 Mei 1997)*

Paron
31 Mei 1997

ANDI ARIEF (AKTIVIS PRD)

Ada Anggota di Lapangan

ANDI Arief, 26 tahun, adalah ketua SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), salah satu organisasi di bawah bendera Partai Rakyat Demokratik (PRD). Anak muda kelahiran Tanjungkarang, 20 November 1970 ini, sejak SMP aktif berorganisasi. Semasa kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, aktivitas-nya semakin menonjol. Aksi terakhirnya di kampus adalah dengan menghidupkan kembali Lembaga Dema (Dewan Mahasiswa) UGM.

Apa tanggapan Andi tentang pernyataan dari Kassospol ABRI yang menyatakan PRD terlibat dalam aksi kerusuhan selama kampanye Pemilu? *PARON* berhasil mewawancari tokoh ini untuk sebuah wawancara Kamis pekan lalu. Petikannya:

Bagaimana komentar Anda tentang tuduhan bahwa PRD berada di belakang semua kerusuhan selama kampanye?

Tuduhan semacam ini sudah sangat sering kami terima. Kami dituduh sebagai kelompok yang berpaham komunis, kami juga dituduh mendalangi kerusuhan 27 Juli. Saat ini, kami pun dituduh sebagai dalang di balik kerusuhan selama masa kampanye. Terus terang saja, kami bosan dengan tuduhan semacam itu.

Menghadapi tuduhan kali ini, kami akan bersikap lebih dewasa dan tidak reaksioner. Hal itu tidak perlu ditanggapi. Saya kira, kerusuhan-kerusuhan ini merupakan gerakan yang bersifat struktural. Kami dapat melihat di mana-mana ada ketidakpuasan, tetapi tidak ada satu pun wadah yang dapat menampung ketidakpuasan tersebut.

Ada selebaran yang menyebutkan keterlibatan PRD. Benarkah?

Yang saya tahu dan kami lakukan, kalau PRD membuat selebaran atau pernyataan politik, maka di bawahnya akan dicantumkan nama organisasi yaitu PRD. Sedangkan selebaran-selebaran yang saya lihat, tidak ada satu pun yang mencantumkan nama PRD, meskipun program-program yang dibuat memiliki kesamaan dengan program-program yang ditawarkan oleh PRD.

Kalau pun bukan PRD yang membuat selebaran tersebut, apakah PRD terlibat dalam kerusuhan tersebut?

Wajar kalau ada anggota PRD yang ada di lapangan. Secara organisatoris tidak pernah ada instruksi untuk melakukan penyusupan ke dalam kampanye-kampanye PPP.

Benarkah fenomena Mega-Bintang merupakan rekayasa dari PRD?

Sejak awal, seperti pada manifesto kami, kami mendukung adanya koalisi-koalisi demokrasi. Ketika muncul fenomena Mega-Bintang, kami mendukung fenomena tersebut. Tetapi kita tetap harus jeli menyikapi fenomena Mega-Bintang. Fenomena Mega-Bintang ini bukanlah koalisi dari elit PPP dan elit PDI. Yang sebenarnya terjadi, adalah "koalisi senyum". Waktu Mudrick menghadap Megawati, Mega tidak menolak, juga tidak menerimanya. Dia hanya tersenyum. Itulah sebabnya saya menyebutnya sebagai koalisi senyum.

Ada pendapat bahwa PRD selalu mendompleng tokoh yang sudah jadi. Dulu kepada Megawati, sekarang mencoba ke PPP. Apa betul begitu?

Kita tidak pernah mendompleng pada tokoh-tokoh tersebut. Yang kita lakukan adalah *political support*. Artinya ada konsesi-konsesi politik, dan itu bukan hanya untuk PRD sendiri. ○

DOKPRON

KAMPANYE MEGA BINTANG. Berbagai cara untuk merangkul massa.

panye kemarin. Aliansi massa Megawati dengan Partai Persatuan Pembangunan tersebut

menggantikan dewan pembina dengan dewan penasihat. Jabatan dewan pembinalah

Keserbaterbatasan sumber daya tak mengurangi semangat para pendatang baru

D&R
7 November 1998

18 JANUARI 1998

Saat waktu buka puasa tiba, sebuah bom meledak di satu ruangan di lingkungan rumah susun Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Ledakan keras berasal dari Blok V Lantai 5. Seorang anak muda berlari sempoyongan keluar dari ruangan yang meledak itu. Agus Priyono, pemuda kurus itu, ditangkap warga.

Dari kamar itu, polisi menemukan dan menyita 10 botol bahan peledak, 11 detonator tombol bom, dan 10 bohlam kecil. Benda-benda ini menerbitkan kesimpulan petugas keamanan bahwa penghuninya merakit bom di ruangan itu.

Dari bukti-bukti yang ditemukan petugas keamanan, bom tersebut dirakit oleh penghuni ruangan itu. Karena salah rakit, bom pun meledak.

Dari ruangan itu, petugas keamanan bukan hanya mendapatkan bahan-bahan untuk membuat bom. Ada empat radio panggil, satu telepon genggam, satu laptop, paspor, kartu mahasiswa, kartu mahasiswa, kartu tanda penduduk, setumpuk dokumen, dan uang Rp280.000.

Petugas juga menemukan sejumlah buku, antara lain *Democracy of Death, Revolution and Counter Revolution in Central America and the Caribbean* yang diedit Donald Schult dan Douglas Graham.

Dari bukti dan dokumen itu, polisi meyakini para perakit bom itu aktivis Partai Rakyat Demokratik. Agus Priyono sendiri yang tertangkap saat ledakan mengaku anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang merupakan organisasi mantel PRD.

Tapi menurut dokumen yang ditemukan itu, PRD tak berdiri sendiri. Dokumen menyebutkan, bom itu hanya bagian dari sebuah jaringan yang bermaksud mengacaukan situasi untuk menentang pemerintah. Di belakang PRD ada kekuatan yang lebih besar. Disebut-sebut, misalnya, pengusaha Sofjan Wanandi menjanjikan uang untuk mendukung aktivitas itu. Sofjan adalah pengusaha sukses atau konglomerat. Pada masa muda, Sofjan adalah seorang aktivis, politikus yang turut memperjuangkan berdirinya Orde Baru.

Di belakang PRD ada kekuatan yang lebih besar. Disebut-sebut, misalnya, pengusaha Sofjan Wanandi menjanjikan uang untuk mendukung aktivitas itu.

DARI SIDANG UMUM HINGGA TANAH TINGGI

Munculnya peristiwa politik yang saling berangkai dalam setahun terakhir acap dikaitkan dengan Operasi Pengamanan Kepemimpinan Nasional. Apa targetnya?

ADA satu bingkai analisis yang belakangan laris dipakai, untuk memahami serangkaian peristiwa politik di negeri ini dalam setahun terakhir. Analisis ini, tentu, tak lepas dari misi "sakral" yang mesti digolkan ketika itu. Yakni, melempengkan jalan bagi terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden RI untuk kali ketujuh, dengan B.J. Habibie sebagai pendamping. Inilah misi politik yang — oleh banyak kalangan — lazim disebut sebagai Operasi Pengamanan Kepemimpinan Nasional (OPKN).

OPKN itu sendiri sebenarnya lumrah dilakukan, dan menjadi bagian dari Renstra ABRI setiap menjelang pemilu dan sidang umum (SU) MPR. Bedanya, kata sebuah sumber *Tajuk*, kali ini ada potensi ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan OPKN sebelumnya. Repotnya, ancaman paling krusial justru menyangkut soal paling dasar: ada arus kuat yang menentang pencalonan kembali Soeharto.

Soeharto bukan saja dianggap sudah waktunya turun takhta, setelah 32 tahun bertahan di singgasana kepresidenan. Tapi, Soeharto juga dituding sebagai faktor kunci dari terjadinya krisis ekonomi yang melilit erat leher rakyat. Ringkasnya, ada kekhawatiran, naiknya kembali Soeharto justru bakal kian memperparah krisis ekonomi.

Ancaman tak main-main itulah yang, kata sumber tadi, lantas diterjemahkan ke dalam skenario OPKN. Targetnya jelas: mengungkap "gerakan radikal" yang berpotensi mengganggu proses politik di elite kepemimpinan nasional itu. Maka, mudah dipahami jika — menjelang SU MPR 1998 — muncul aneka kejadian yang nuansa dan muaranya mengarah ke pencapaian target tersebut.

Skenario OPKN jelas tak cuma tampak secara fisik — seperti ketatnya pengamanan SU MPR 1998 — tetapi juga aneka kejadian yang masih terasa asapnya hingga kini. Sebut saja ledakan bom di Tanah Tinggi, penculikan sejumlah aktivis, bahkan juga kasus penembakan Trisakti yang memantik kerusuhan sosial dua hari berikutnya.

■ Pengamanan Sidang Umum MPR

Inilah fakta paling mencolok dari skenario OPKN. Selama 11 hari (1-11 Maret), bahkan sejak jauh hari sebelumnya, Kota Jakarta memang bak medan pertempuran. Tentara dan polisi berseliweran di sana-sini, lengkap dengan senjata dan amunisinya. Mereka berjaga di titik-titik rawan selama 24 jam nonstop.

Konsentrasi pengamanan tentu ada di lokasi kegiatan, gedung DPR/MPR. Tercatat, ada 25 ribu personel ABRI yang memagar betis gedung wakil rakyat itu. Sementara, beberapa panser bercokol di pintu masuk kompleks DPR. Untuk mendukung pengamanan Jakarta, Mabes Polri sampai-sampai menggunakan perangkat komunikasi dan komputer terpadu untuk menjalankan Sistem Pemetaan Cepat berbasis GPS via satelit.

Pengamanan yang seketat itu memang tak lepas dari bayangan kekhawatiran terhadap munculnya aksi unjuk rasa, yang bisa datang setiap saat. Maklum, hingga hari-hari terakhir menjelang SU dibuka, ada potensi ancaman yang cenderung mengarah pada upaya menggagalkan perhelatan politik lima tahunan itu.

Selain unjuk rasa yang dimotori mahasiswa atau buruh korban PHK, kekhawatiran juga datang dari kelompok pendukung PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri. Potensi ancaman juga datang dari kelompok "gelap", yang suka meneror aparat lewat telepon dengan isu bom, serta isu pengerahan satu juta massa untuk menggoyang gedung DPR.

Toh, hingga SU berakhir dan sukses mengantar sang pemimpin nasional sesuai skenario, kekhawatiran terhadap "gerakan radikal" itu tak terbukti. Tidak ada unjuk rasa, apalagi pengerahan massa besar-besaran seperti yang dikhawatirkan.

PASUKAN PENGAMAN SU MPR. Kekhawatiran terhadap munculnya aksi unjuk rasa, yang bisa datang setiap saat.

Tajuk
23 Juli 1998

■ Ledakan Bom di Tanah Tinggi

Bukan tanpa alasan kalau ada analisis yang mencoba menautkan kasus ledakan bom di Tanah Tinggi (18 Januari 1998) dengan OPKN. Dari cerita bom meledak, bisa dibilang, tak kelewat dramatis. Selain tak menelan korban jiwa, bom "salah pasang" itu hanya meluluhlantakkan tempat kejadian perkara (TKP). Yakni, sebuah kamar berukuran 3 x 5 meter, di Blok V lantai 5 rumah susun Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Korban luka ringan diderita Agus Priyono (yang langsung menjadi tersangka), serta dua sosok lain yang kabur sesaat setelah bom meledak. Kasus ini mulai berbobot politis setelah aparat keamanan menemukan petunjuk penting dari bukti-bukti yang disita — menunjuk pada upaya si penghuni kamar untuk merakit bom.

Selain 10 botol bahan peledak, polisi juga menemukan 11 detonator tombol bom, dan 10 bohlam lampu berukuran kecil. Benda-benda berbahaya itu berserakan di antara bukti-bukti penting lain: empat radio panggil, satu telepon genggam, satu *laptop* dengan disketnya, paspor, kartu mahasiswa, kartu tanda penduduk, uang Rp 280.000, dan setumpuk dokumen.

Dugaan politis menguat, menyusul ditemukannya bukti lain berupa buku-buku berjudul "seram". Misalnya, *Revolution and Counter Revolution in Central America and the Carribean*, dan *Democracy of Death*. Dari dokumen inilah, polisi ketika itu menyimpulkan: ada kaitan ledakan bom itu dengan kiprah Partai Rakyat Demokratik (PRD). Apalagi, kepada polisi, tersangka Agus kabarnya mengaku anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) — organisasi di bawah jaringan PRD.

Dari PRD, bidikan merembet ke sejumlah tokoh kritis, yang namanya disebut-sebut dalam *e-mail* (kotak surat di internet) yang terekam dalam *laptop* yang disita. Di situ, katanya, ada nama Hendardi, direktur eksekutif PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), duet aktivis CSIS (Center for Srategic and International Studies) Sofjan dan Jusuf Wanandi, serta Surya Paloh, bos Harian *Media Indonesia*.

Nama Sofjan dan Jusuf bahkan tak cuma disebut di *e-mail*. Ada dokumen lain — katanya juga ditemukan di TKP — yang berisi notulen pertemuan "kelompok pro demokrasi" di sebuah rumah di Leuwiliang, Bogor. Di notulen, Sofjan dan Jusuf dinyatakan sedang berupaya menggalang kelompok elite untuk mempromosikan nama-nama calon wapres dengan menggunakan kekuatan ekonomi. Keduanya juga disebut sebagai penyuplai dana bagi kegiatan unjuk rasa LSM.

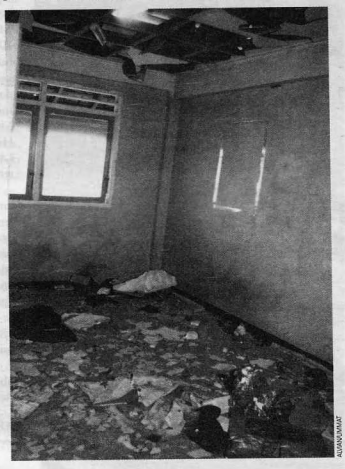

TKP TANAH TINGGI. Berbobot politis setelah aparat keamanan menemukan petunjuk penting dari bukti-bukti yang disita.

Buntutnya, Sofjan dan Jusuf Wanandi (juga Surya Paloh) dipanggil polisi untuk klarifikasi. Pada saat yang sama, kakak beradik itu juga ramai-ramai didemo sekelompok organisasi Islam, antara lain Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI). Mereka menuntut: Sofjan dan Jusuf diadili, dan CSIS dibubarkan. Kasus bom politik ini memang berakhir begitu saja. Cuma, dalam konteks OPKN, upaya mengaitkan ledakan bom Tanah Tinggi dengan nama-nama "radikal" itu rasanya masuk akal.

Sofjan Wanandi, misalnya, sejak lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha Tionghoa yang berani bersikap tegas terhadap pemerintah. Padahal, dengan posisi sebagai "juru bicara" kelompok pengusaha besar (umumnya Tionghoa) yang tergabung dalam Yayasan Prasetia Mulya, suara Sofjan cukup diperhitungkan.

Celakanya, ketika pemerintah mengimbau kalangan pengusaha untuk membantu mengatasi krisis lewat gerakan cinta rupiah, Sofjan tak tampak antusias menyambut. Ia bahkan tegas menolak menukarkan dolarnya dengan rupiah. Sikap Sofjan itu karuan membuat pemerintah gusar. "Sudah 13 konglomerat yang menyatakan siap membantu pemerintah, kecuali Sofjan," ujar Pangab (waktu itu) Jenderal Feisal Tanjung.

Tapi, cacat politis Sofjan bukan di situ. Menjelang SU MPR, ia sering melontarkan pernyataan seputar pencalonan wapres. Ada kesan, Sofjan tak setuju Habibie naik, dan cenderung memilih kembali Try Sutrisno, atau calon lain yang tetap dari ABRI. Sofjan juga disinyalir punya *link-up* dengan tokoh-tokoh macam Benny Moerdani.

Dari sudut OPKN, Sofjan — dengan segala atribut dan kekuatan ekonomi di sekelilingnya — dipandang sebagai berbahaya. Karena itukah, perlu rekayasa untuk menjeratnya? "Tidak betul. Bagaimana kita merekayasa. Nama Sofjan memang tercantum di dokumen. Ini justru rekayasa mereka, yang mencoba memproyeksikan peristiwa itu kepada kami," sergah Pangdam Jaya (ketika itu) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin. ▲

Tim Tajuk

Tajuk NO. 11, TH. I – 23 JULI 1998

▲ Alasan dan penangkapan aktivis prodemokrasi terangkum dalam kliping ini dan juga terserak di halaman berikutnya pada Babak I ini.

Gatra
25 Juli 1998

tu daerah asing selama jangka waktu tertentu dengan tugas khusus. Di masa perang, anggota Sandi Yudha diterjunkan lebih dulu di balik garis pertahanan musuh. Tugasnya, mengumpulkan data intelijen militer serta menggalang massa untuk melakukan gerilya melemahkan ketahanan lawan. Dalam operasi militer, gerakan pasukan komando atau pasukan reguler sangat tergantung hasil penyadapan Pasukan Sandi Yudha ini.

Di tiga daerah operasi militer ABRI — Aceh, Timor Timur, dan Irian Jaya— peran Pasukan Sandi Yudha sangat penting. Di sana, mereka menyusup sampai ke kampung-kampung, dan membentuk basis perlawanan terhadap GPK dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, kemampuan menggalang massanya sangat terlatih. Aksi Sandi Yudha Kopassus inilah yang membongkar jaringan pemasok senjata GPK Aceh pada tahun lalu. Di Irian Jaya, operasi Sandi Yudha berperan dalam operasi pembebasan sandera dari tangan GPK pimpinan Kelly Kwalik di Mapenduma pada 1996.

negara mana pun di dunia.

Dalam buku *Pergolakan di Perbatasan* karangan Mayor Jenderal Samsudin, misalnya, tertulis satu operasi Sandi Yudha yang dilakukan Kopassus, yang memasuki wilayah Papua Nugini secara diam-diam. Target operasi adalah membebaskan seorang perwira ABRI yang disandera Organisasi Papua Merdeka, pimpinan Marthen Tabu. Dengan referensi itu, tak mengherankan jika dalam menciduk para aktivis LSM dan mahasiswa, Pasukan Sandi Yudha pun menggunakan cara yang inkonvensional: menculik.

Kasus penculikan para aktivis itu agaknya, jika benar, dimulai setelah ABRI mencium munculnya gerakan teror yang berniat mengganggu program pemerintah dan membahayakan masyarakat. Salah satu gerakan teror itu terkuak setelah terjadi ledakan di sebuah rumah kontrakan di Demak, Jawa Tengah, September tahun lalu. Tempat itu ternyata digunakan Brigada Negra, kelompok radikal Fretilin, untuk merakit

TATAN AGUS RST

LATIHAN KOPASSUS DI BATUJAJAR. Kebenaran sedang diuji.

30 GATRA, 25 JULI 1998

"Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, mereka ada hubungannya dengan PRD. Yang bilang bukan saya, melainkan data yang ditemukan."

| ***Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin***, *Panglima Komando Daerah Militer Jaya, dalam berita Gatra ("Jaringan di Balik Ledakan Bom", 31 Januari 1998)*

WAWANCARA
SOFJAN WANANDI

SOFJAN WANANDI:

SOEHARTO HANYA MEMAKAI CINA SEBAGAI CUKONG

ADA alasan tersendiri bila Sofjan Wanandi tidak kedengaran suaranya kala mahasiswa menuntut Soeharto mundur pada Mei lalu. Sebagai salah seorang kemi (KAMI Jaya — yang menumpas aksi menentang Presiden Soekarno tahun 1966 — tentunya Sofjan masih punya urat nekat. Namun peristiwa pelebakan bom di Tanah Tinggi, yang oleh aparat keamanan dikaitkan dengan dirinya, membuat Sofjan harus berpikir ulang. "Saya memang jadi korban, biarlah itu menjadi bagian sejarah hidup saya."

Tudingan miring menuing menempel pada CEO Grup Gemala ini. Bersama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Sofjan dituduh berada di belakang aksi-aksi PRD (Partai Rakyat Demokratik) untuk mengganggu kepemimpinan nasional. CSIS, lembaga *think tank* bentukan Ali Moertopo, memang tl-dak bisa dipisahkan dengan keluarga Wanandi. Kakaknya, Jusuf Wa-nandi, salah satu pendolan CSIS.

Selama sepuluh tahun terakhir, Sofjan dikenal sebagai juru bicara konglomerat yang tergabung dalam Yayasan Prasetya Mulya (YPM). Sebenarnya, selama ihu hubungannya dengan Soeharto tidak "dekat" lagi. "Apa yang dia lakukan sudah tidak benar lagi." Padahal, sebelumnya mereka cukup dekat. Pada awal tahun 1970-an, Sofjan kerap mengikuti kunjungan Presiden Soeharto ke luar negeri. "Saya *Jadi advice group-nya.*" Kedekatan ihu bisa dipahami, karena kala itu dia menjadi sekretaris Soedjono Humardani, asisten pribadi (aspri) Presiden. Kepada Untung Widyanto, Didin Abldin Masud, dan Fotografer Dadang Tri dari *Tajuk*, Sofjan bicara blak-blakan mengenai reka-yasa untuk menyingkirkannya.

Dari negara-negara yang terkena krisis, tampaknya kita yang paling parah. Bagaimana persepsi Anda sebagai pengusaha terhadap masa depan Indonesia? Adakah titik cerah, atau tidak?

Dari sudut perekonomian, sesesatura ini saya belum melihat titik terang. Masih gelap. Problem utama adalah situasi politik, karena banyak yang mempersoalkan bahwa pemerintahan Presiden Habibie adalah pemerintahan transisi. Basis politik dan legitimasinya masih dipersoalkan. Beda dengan Korea Selatan dan Thailand, pemerintahan yang baru adalah pemerintahan tetap. Selain itu, beberapa tokoh dan kelompok masyarakat tidak bergabung di dalam pemerintahan Habibie. Misalnya Gus Dur, Amien Rais, Megawati, dan lainnya. Alhasil, kita merasakan, *political support* tidak ada pada pemerintah sekarang.

Di sisi lain, cara-cara lama yang ditentang mahasiswa dalam unjuk rasa juga diterapkan pemerintah kini. Contoh terakhir dalam Munaslah Golkar. Permainannya sama dengan yang dulu, cuma saat ini ada voting dan tanpa Soeharto. Lihat saja keterlibatan pemerintah dan ABRI di sana, lalu ada *money politics*.

Apa saran Anda mengatasi itu?

Perlu ada konsensus baru, dari mana pun inisiatifnya. Tujuannya mempersatukan pendapat dari tokoh-tokoh nasional dalam menentukan prioritas. Awal Orde Baru kan ditandai dengan adanya konsensus nasional. Nah, kenapa saat ini – di mana pemilu belum dilakukan – kita tidak membuat konsensus baru. Melalui konsensus itu, kita dukung pemerintah mengenai apa saja yang ingin mereka putuskan. Saya harap, semua tokoh terlibat, sehingga tidak ada lagi yang di luar, di jalanan. Selama ini kita takut, karena ada yang di jalanan. Semua tokoh itu harus melihat adanya *sense of crisis*. Tidak seperti sekarang, yang tidak ada bedanya dengan masa lalu, *business as usual*. Sebagai pengusaha, kami belum melihat adanya kestabilan politik dan masa depan yang pasti.

Agenda politik yang disusun pemerintah dan DPR kan sudah jelas, akan melakukan SI MPR akhir tahun ini, lalu pemilu medio tahun depan. Apa lagi yang belum pasti?

Time table itu kan masnya pemerintah dan DPR. Namun konsensus itu belum jelas buat kita. DPR mengatakan, SI MPR akan dilakukan pada 10 November 1998. Apakah semua sudah setuju dengan rencana itu. Sebab agenda pemain-pemain politik itu lain-lain. Misalnya dengan agenda Megawati, Amien Rais, dan Gus Dur.

SI MPR nanti kan perlu untuk mencabut Tap MPR 1998 tentang GBHN yang menjadikan pemilu mendatang pada tahun 2002.

Apanya yang belum jelas?

Saya tidak tahu, apakah agenda SI nanti cuma itu. Karena, dalam SI MPR, lembaga tertinggi negara ini punya hak apa saja.

Apa Anda melihat, ada indikasi bahwa SI nanti mengganti pemerintah?

Bisa saja. Kan bahwa Habibie diangkat sebagai presiden, itu belum resmi. Tap MPR yang lalu, dia cuma sebagai wakil presiden. Kalau dia diangkat sebagai presiden, bisa saja pada waktu itu diganti jadi presiden. SI MPR itu punya wewenang sepenuhnya. Sama seperti SI MPR tahun 1966/1967, kita ganti Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden.

Dengan kemenangan Akbar Tanjung di Golkar, kans menggantl Habibie sebagai presiden semakin mengecil?

Memang, tapi kemungkinan itu tetap masih ada. Pada saat itu bisa jadi ada yang usul kenapa bukan Akbar Tanjung yang diangkat sebagai presiden, karena dia yang memimpin partai mayoritas. Jadi, ini kan sdit. kelidiplomatlan.

Seandainya pada SI MPR nanti Habibie diganti, lalu apa?

Harus ditentukan juga kapan pemilu. Karena pada SU MPR 1998 pemilu nanti pada tahun 2002. Apa betul kita siap pemilu tahun depan? Saya merasa terlalu cepat. Sekarang ini kan partai yang terdaftar hampir 50. Bisa dibayangkan pemilu pertengahan tahun depan itu, yang diikuti puluhan partai, seperti apa kredaannya. Padahal, 100 juta rakyat kita di bawah garis kemiskinan. 20 juta orang menganggur, ekonomi sedang berantakan, pemerintah lemah, dan ABRI belum terkonsolidasi. Sedangkan selama Orba — pada saat pemerintahan stabil, kuat, dan ekonominya maju — partainya hanya tiga. Illusi, ekonomye juga besar. Contohnya kasus Kalimantan Selatan di Pemilu 1997. Saya tidak bisa bayangkan suasana pemilu tahun depan seperti apa. Bisa jadi akan *chaos* negara ini. Tidak tertutup kemungkinan, puluhan partai — demi mencapai kemenangan — mempolitisir jutaan rakyat kita yang di bawah garis kemiskinan dan menganggur. Kalau sudah begitu, apa tidak hancur negara kita. Ini yang saya paling takutkan. Saya ingin, kita menentukan situasi negara Indonesia, baru membuat *time table*.

Bukankah SI dan pemilu dipercepat itu yang diharapkan beberapa

Tajuk NO. 11, TH I - 23 JULI 1998
391

Tajuk
23 Juli 1998

"Skenario besarnya adalah meredam semua kelompok yang anti Soeharto. Pelaksananya melakukan sesuai dengan caranya masing-masing. Awal peristiwa itu kan dimulai dari dijatuhkannya Megawati Soekarnoputri. Itu titik start-nya sehingga setelah itu semua kelompok yang anti Soeharto dihajar. Orang tak boleh demonstrasi, anak-anak muda PRD dituduh komunis. Semuanya itu rekayasa untuk memperkuat Soeharto dan menghilangkan oposisi Soeharto sehingga dia bisa dipilih kembali pada Sidang umum MPR 1998."

*| **Sofjan Wanandi**, CEO Grup Gemala, Aktivis Penentang Sukarno Tahun 1966*

Aparat telah menemukan dokumen pada peristiwa meledaknya bom di Tanah Tinggi yang memperlihatkan nama saya. Dokumen itu menyebutkan saya sebagai pemberi dana untuk men-support PRD.

Panji Masyarakat
9 Februari 1998

Pada 26 Januari 1998, Sofjan Wanandi menghadap Ketua Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda), Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Pertemuan tersebut terjadi di Satgas Intel Kodam Jaya, Jalan Kramat V/16 Jakarta Pusat. Berikut pernyataan Sofjan di hadapan jurnalis seusai pertemuan:

Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya rasa hari ini, seperti saudara ketahui, saya sudah menghadap pada pukul sembilan pagi. Bakorstanasda Jaya meminta klarifikasi keterlibatan saya dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Aparat telah menemukan dokumen pada peristiwa meledaknya bom di Tanah Tinggi yang memperlihatkan nama saya. Dokumen itu menyebutkan saya sebagai pemberi dana untuk men-support PRD. Ini yang saya kira ingin diminta klarifikasi Bakorstanasda, apakah dokumen itu betul atau tidak.

Pertemuan tadi, saya jelaskan, sangat baik, sangat terbuka, dan pertemuan berlangsung selama satu jam. Dari semua pertanyaan, ada tiga yang pokok. Pertama, saya tidak kenal PRD; kedua, saya tidak pernah terlibat dengan segala kegiatan PRD; ketiga, saya tidak pernah membantu dana kepada PRD. Ini klarifikasi saya berdasarkan dokumen yang ditunjukkan Bakorstanasda Jaya. Dan, setelah tanya jawab, saya rasa kita mengambil kesimpulan, masalahnya sudah selesai. Terus terang, saya berterima kasih kepada Kodam Jaya, dalam hal ini Bakorstanasda Jaya, yang bisa secepat mungkin meng-clear-kan (dokumen tersebut) kepada saya, nama baik saya yang diduga terlibat dengan PRD. Ini suatu sangat positif bahwa klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Karena nama saya disebut-sebut, bisa langsung dipanggil dan diminta klarifikasi kepada saya.

PANJI UTAMA

Sofjan Wanandi

Kodam Menganggap Selesai

Wawancara: Sofjan Wanandi akhirnya memenuhi panggilan Bakorstanasda Jaya menyusul kasus "bom PRD". Katanya, Kodam Jaya menganggap masalahnya sudah selesai. Benarkah?

Kasus meledaknya bom di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, membuat Sofjan Wanandi tambah populer. Nama bos konglomerat Gemala ini ditemukan dalam salah satu dokumen yang terkait dengan organisasi terlarang Partai Rakyat Demokratik (PRD). Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jaya langsung meninda klanjuti temuan itu. Tulpan kelahiran Sumatra Barat ini dipanggil untuk klarifikasi kebenaran dokumen tersebut pada Senin, 26 Januari lalu. Dengan menggunakan mobil BMW warna biru, juru bicara konglomerat ini tiba di Satgas Inteldam Jaya, Jalan Kramat V/16 Jakarta Pusat. Ia tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Turut mengiringinya tim pengacaranya dan Grup Gemala, Todung Mulya Lubis serta Albert Hasibuan, meski akhirnya tidak dipersoalkan menemani sang tuipan selama pemeriksaan.

Saat pertama disodorkan dokumen hasil temuan aparat, kata Ketua Bakorstanasda Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Sofjan terkesan gugup. Selama 45 menit pemeriksaan bisa jadi merupakan pengalaman tak terlupakan. Usai pemeriksaan, Sofjan hanya melambaikan tangan kepada puluhan wartawan yang menunggu di luar kompleks Satgas Inteldam Setiba di rumah, baru diadakan konferensi pers. "Terus terang, saya berterima kasih kepada Kodam Jaya, dalam hal ini Bakorstanasda Jaya, yang bisa secepat mungkin meng-clear-kan (dokumen tersebut) kepada saya, nama baik saya yang diduga terlibat dengan PRD," katanya. Pernyataan Sofjan kepada wartawan itu secara lengkap terjadi berikut ini, yang terlebih dulu dibuka dengan penjelasannya. Dalam tanya jawab, wartawan berkali-kali mengajukan pertanyaan tentang pernyataan Sofjan bahwa masalah ini sudah dianggap selesai oleh Kodam Jaya.

Sofjan Wanandi: Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya rasa hari ini, seperti saudara ketahui, saya sudah menghadap pada pukul sembilan pagi. Bakorstanasda Jaya meminta klarifikasi keterlibatan saya dengan PRD. Aparat telah menemukan dokumen pada peristiwa meledaknya bom di Tanah Tinggi yang memperlihatkan nama saya. Dokumen itu menyebutkan saya sebagai pemberi dana untuk men-support PRD. Ini yang saya kira ingin diminta klarifikasi Bakorstanasda, apakah dokumen itu betul atau tidak.

Pertemuan tadi, saya jelaskan, sangat baik, sangat terbuka, dan pertemuan berlangsung selama satu jam. Dari semua pertanyaan, ada tiga yang pokok. Pertama, saya tidak kenal PRD; kedua, saya tidak pernah terlibat dengan segala kegiatan PRD; ketiga, saya tidak pernah membantu dana kepada PRD. Ini klarifikasi saya berdasarkan dokumen yang ditunjukkan Bakorstanasda Jaya. Dan, setelah tanya jawab, saya rasa kita mengambil kesimpulan, masa-

Sofjan Wanandi usai pemeriksaan: Dadah...

lahnya sudah selesai. Terus terang, saya berterima kasih kepada Kodam Jaya, dalam hal ini Bakorstanasda Jaya, yang bisa secepat mungkin meng-clear-kan (dokumen tersebut) kepada saya, nama baik saya yang diduga terlibat dengan PRD. Ini suatu yang sangat positif bahwa klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Karena nama saya disebut-sebut, bisa langsung dipanggil dan diminta klarifikasi kepada saya.

Jadi, sekali lagi, saya sangat berterima kasih, masalah ini sudah di-clear-kan. Saudara mengetahui, banyak sekali tulisan—mungkin dari saudara—yang menyatakan bahwa saya sudah lari, saya ditangkap, dan lain-lain. Saya jelaskan bahwa maksud Kodam Jaya adalah klarifikasi atas dokumen palsu itu. Saya betul-betul tidak terlibat. Saya senang masalahnya sudah selesai dan Kodam Jaya sudah menganggap selesai dengan klarifikasi (saya) itu. Untuk selanjutnya, saya rasa, kita berpacu kembali menyelesaikan krisis ekonomi yang melanda negeri kita dan tidak terganggu dengan masalah lain yang sebenarnya bukan bidang saya sama sekali.

Saya berterima kasih, Kodam Jaya telah mengizinkan nama baik saya dalam rangka keterlibatan ataupun apa yang disebut dalam dokumen itu bahwa saya memberi bantuan dana kepada PRD. Walaupun itu cuma berbentuk E-mail. Saya kira, cuma ini yang bisa saya katakan hari ini. Seharusnya Saudara Albert Hasibuan dan Pak Todung Mulya Lubis yang juga lawyer Grup Gemala (bisa membantu)—yang semula berkeberatan ingin mendampingi saya selama klarifikasi, ternyata tidak

5 FEBRUARI 1998

Tiras
30 Maret 1998

Menjelang Sidang Umum MPR, seorang tokoh bisnis minyak dengan bendera usaha Medco atau Meta Epsi Drilling Company, Arifin Panigoro, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kadispen Polri Brigjen Pol Da'i Bachtiar menjerat Arifin dengan pasal 107 KUHP dan pasal 154 KUHP tentang tindakan kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Berkas pemeriksaannya pun sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Bagaimana perkara ini "kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum" ini bermula?

Peristiwanya terjadi di Hotel Radisson, Gejayan, Yogyakarta, Kamis malam, 5 Februari 1998, antara pukul 20.00 hingga 22.00. Saat itu, berlangsung diskusi yang diselenggarakan Pusat pengkajian Strategi dan Kebijaksanaan (PPSK), dengan tema seputar reformasi ekonomi, politik, dan hukum. Isu reformasi politik dibawa-

BERITA UTAMA

MEMO

DARI DISKUSI KE SANGKAAN MAKAR ARIFIN PANIGORO

Arifin Panigoro disangka merencanakan tindakan makar. Tuduhan itu berawal dari sebuah diskusi di Hotel Radisson, di Yogyakarta.

Dari sinilah Amien Rais lantas mengetahui bahwa Prof. Dr. Sofjan Effendi – salah satu peserta diskusi – telah membuat laporan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie tentang diskusi tersebut.

kan pakar politik Universitas Gadjah mada (UGM), Affan Gaffar; ekonomi dibawakan dosen ekonomi UGM, Anggito Abimanyu; masalah hukum dibicarakan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Busyro Muqoddas.

Di samping pembicara tadi, hadir juga sejumlah dosen dan guru besar UGM yang sekaligus staf PPSK, seperti Amien Rais, Sofian Effendi, Safri Sairin, Ichlasul Amal, Chairil Anwar, Syafii Maarif. Di luar itu ada tamu dari Jakarta yang diundang Amien Rais, yakni Arifin Panigoro, Dedi Krisna, Jhoni Saleh, dan Zainal Arifin. Keempat orang tersebut alumni ITB. Jumlah total peserta diskusi 18 orang.

Diskusi ini sebenarnya merupakan agenda rutin PPSK. Namun, siapa sangka, diskusi tersebut ternyata menggegerkan kalangan intelektual Yogyakarta, khususnya di lingkungan kampus UGM. Pasalnya, lantaran diskusi itu, Amien Rais sampai dimintai keterangan oleh salah seorang direktur Badan Intelijen ABRI (BIA). Ketua Muhammadiyah ini ditanya berbagai hal menyangkut diskusi di Hotel Radisson. Dari sinilah Amien Rais lantas mengetahui bahwa Prof. Dr. Sofian Effendi–salah satu peserta diskusi–telah membuat laporan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie tentang diskusi tersebut. Selain dosen Fisipol UGM, Sofian memang menjabat Asmen V Menristek.

Raja Minyak Disangka Makar

Tiras
30 Maret 1998

Laporan Sofian itu menyebar ke mana-mana, termasuk internet. Laporan Sofian inilah yang dijadikan landasan pihak keamanan untuk mendakwa Arifin Panigoro. Dalam laporan empat halaman bertanggal 9 Februari itu, Sofian menulis bahwa Arifin cs. bermaksud memanfaatkan Amien Rais untuk menggerakkan *people power*.

“Para pengusaha dan kelompok politik yang diwakili oleh Pak Panigoro berang-gapan bahwa dukungan massa dari ber-bagai kelompok dan lapisan kepada Dr. Amien Rais membuktikan bahwa beliau adalah tokoh yang diterima oleh ber-bagai aliran masyarakat dan karenanya dapat menggerakkan people power. Saya khawatir Dr. Amien Rais sengaja di-pancing dengan sentimen-sentimen yang ditumbuhkan oleh kekuatan politik di belakang Pak Arifin dkk. Siapa pun me-reka, motifnya menurut saya cukup jelas yakni menggagalkan Sidang Umum MPR dan menjatuhkan pemerintahan yang sah.”

| ***Sofian Effendi**, Dosen dan guru besar UGM, dalam berita Tiras (“Dari Diskusi ke Sangkaan Makar Arifin Panigoro”, 30 Maret 1998)*

| ***Affan Gaffar,*** *Pakar Politik UGM, dalam berita wawancara Tiras (Sofian Membuat Laporan Palsu ...", 30 Maret 1998)*

"Arifin memang menyodorkan pemikiran yang kritis, tapi tidak ada tendensi sama sekali untuk melakukan makar. Sofian Effendi membuat laporan palsu mengenai hakikat pertemuan di Hotel Radisson 5 Februari."

Tiras
30 Maret 1998

■ WAWANCARA AFAN GAFFAR

Sofian Membuat Laporan Palsu ...

Dr. Affan Gafar terseret sebagai saksi dalam kasus Arifin Panigoro. Bersama Chairil Anwar, Rabu (18/3), ia memenuhi panggilan Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Affan tampaknya tidak bisa menerima begitu saja melebarnya kasus yang bersumber pada diskusi di Hotel Radisson 5 Februari itu. Ia menyangka, koleganya, Prof. Dr. Sofian Effendi, telah memutarbalikkan fakta sehingga acara diskusi itu kemudian berurusan dengan pihak keamanan. Terakhir Affan, yang merasa terganggu persiapannya untuk menunaikan ibadah haji karena dimintai keterangan polisi, Jumat (20/3), telah melayangkan somasi kepada Sofian, yang juga asisten Menristek. Berikut wawancara wartawan TIRAS, **Syahdan Nurdin**, dengan Dr. Affan Gafar, Kamis (19/3):

■ Bagaimana duduk soalnya sehingga Anda harus menjadi saksi pada kasus Arifin Panigoro ini?

Yang jelas pertemuan di Hotel Radisson adalah pertemuan dalam rangka menemukan konsep-konsep pemikiran untuk disampaikan dalam rangka usulan-usalan reformasi. Reformasi yang dialkukan secara perlahan-lahan, gradual, konstitusional. Kami tidak tahu bahwa, dari hasil pertemuan itu, Arifin Panigoro kemudian harus diadili. Ini yang menjadi pertanyaan kami, peserta diskusi di Jogyakarta itu. Bahwa ada seorang peserta yang mengkhianati dengan membuat laporan palsu yang sekarang menjadi asisten Pak Habibie yang bernama Sofian Effendi.

■ Jelasnya seperti apa?

Sofian Effendi membuat laporan palsu mengenai hakikat pertemuan di Hotel Radisson 5 Februari itu. Laporan tersebut memfitnah teman-temannya.

■ Bukankah diskusi itu bernuansa politis?

Diskusi kami adalah diskusi akademis dalam tataran tingkat konseptualisasi yang tinggi. *Paper* saya jelas sekali, bahwa usulan itu bersifat gradual dan juga sifatnya konstitusional. Di samping itu harus dalam rangka ke-Indonesia-an sebagai refleksi cinta kami kepada bangsa dan negara ini. Jadi tidak ada rencana-rencana aksi untuk menggulingkan pemerintah. Mau apa kami menggulingkan pemerintah? Apakah seorang seperti Ichlasul Amal, yang rektor UGM, punya potongan untuk menggulingkan pemerintah? Atau orang seperti Syafii Ma'arif? Atau orang seperti saya juga potongan menggulingkan pemerintah?

■ Menurut Anda, bagaimana pemikiran Arifin Panigoro dalam diskusi itu?

Pemikiran Arifin tersebut sifatnya informatif. Itu bukan pertemuan yang pertama dengan Arifin. Jadi apa yang tersebar itu sama sekali tidak benar, itu hanya interpretasi Sofian Effendi.

■ Berdasarkan laporan tersebut, benarkah hasil diskusi itu akan direalisasikan Amien Rais melalui konsep *people power*?

Itu interpretasi Sofian Effendi. Menurut kami, hasil diskusi akan disosialisasikan ke dalam bahasa Inggris untuk keperluan-keperluan masyarakat asing yang sering tanya apa maunya Amien Rais. Apakah Amien Rais punya *peole power*, itu *nonsense*

■ Tapi Amien Rais suatu ketika pernah mengatakan perlunya *people power*?

Ya, itu kan sekarang, setelah melihat terbentuknya kabinet ini. Itu dua hal yang berbeda sekali. Kita tidak percaya adanya *people power* pada waktu itu. Kita tidak percaya dengan itu.

■ Bukankah persoalan *people power* dibahas dalam diskusi itu?

Kita menganalisis kemungkinan ada atau tidaknya *people power* itu. Kita sepakat bahwa tidak mungkin akan muncul *people power* karena tidak ada faktor yang memicu.

■ Kembali soal pemanggilan Anda. Sebetulnya persoalan apa yang dijadikan dasar?

Ya, itu karena ada tuduhan kepada Arifin Panigoro. Saya tidak jelas apa tujuannya hanya disebutkan pasal-pasal saja. Saya sebagai saksi. Pemeriksaan itu hanya konfirmasi dari pertemuan itu, siapa yang bicara, apa yang dibicarakan, atas inisiatif siapa pertemuan itu, tujuannya apa. Jadi sangat bertentangan dengan laporan Sofian Effendi.

■ Anda yakin itu laporan Sofian Effendi?

Ya cuma itu satu-satunya laporan tertulis, tidak ada laporan lain. Tidak ada intel. Yang ada memo asisten menteri kepada menterinya. Dan laporan itu tidak sesuai sama sekali dengan pertemuan tersebut. T

"Sesungguhnya pertemuan di Hotel Radisson itu itu tidak ada yang perlu dicurigai, apalagi sampai menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak proporsional. Saya bisa dikatakan penanggung jawab dari pertemuan itu karena saya adalah ketua PPSK."

*| **Dr. Amien Rais**, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), dalam berita wawancara Tiras ("Pertemuan Itu Nggak Neka-Neka", 30 Maret 1998)*

■ WAWANCARA AMIEN RAIS

Pertemuan Itu Nggak Neka-Neka

Sangkaan perbuatan makar terhadap Arifin Panigoro dalam diskusi 5 Februari 1998 di Hotel Radisson, Yogyakarta, masih berkepanjangan dan terasa makin ruwet. Bahkan di antara peserta diskusi yang jumlahnya tak lebih dari 18 orang -- termasuk Arifin Panigoro dan yang ikut diundang -- juga muncul silang pendapat mengenai isi diskusi PPSK (Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan) itu. Menelikung kawan seiring, begitu istilah salah seorang pengamat di Yogyakarta. Sebagian pakar UGM dalam acara tersebut menyayangkan sikap Prof. Dr. Sofian Effendi, selaku asmen Menristek B.J. Habibie saat itu, yang mengirimkan memo bak intel kepolisian kepada atasannya. Dr. Amien Rais, selaku ketua PPSK merasa, dialah yang paling bertanggung jawab atas terselenggaranya acara itu. Ketua Umum PP Muhammadiyah ini sampai sekarang ternyata masih cukup tenang menghadapi kecurigaan pihak berwajib. "Kita punya rekaman videonya," begitu kata Amien meyakinkan.

Seusai membuka *workshop* dan *expo* Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah se-Indonesia di Graha Wisata Remaja TMII, Jumat (20/3), **Ardiansyah Harjumantio** dari TIRAS dan beberapa wartawan melemparkan pertanyaan seputar diskusi di Radisson kepada Amien Rais. Pefikannya:

■ Arifin Panigoro diperiksa yang berwajib, sebagai buntut diskusi di Radisson itu. Tanggapan Anda?

Sesungguhnya pertemuan di Hotel Radisson itu tidak ada yang perlu dicurigai, apalagi sampai menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak proporsional. Saya bisa dikatakan penanggung jawab dari pertemuan itu, karena saya adalah ketua PPSK.

■ Apa sebenarnya yang dibicarakan dalam diskusi itu?

Setiap bulan kita mengadakan FORTA (Forum Wartawan) yang menggelar diskusi-diskusi mengenai masalah mutakhir. Di samping itu, sebulan sekali, mengadakan *intellectual exercises* atau pertemuan anggota-anggota PPSK untuk membahas berbagai masalah strategis. Pertemuan di Hotel Radisson membahas tiga macam platform yang diperlukan untuk membangun masa depan bangsa. Ada platform ekonomi, politik, dan hukum. Tiga tokoh diminta untuk menyajikan pikiran mereka. Affan Gafar bicara dalam platform politik, Anggito Abimanyu berbicara untuk bidang ekonomi, dan Busyro Muqoddas bicara tentang masalah hukum. Dalam perdebatan itu memang diselingi *ger-geran* seperti biasanya. Dan terus terang, memang sesuatu yang sesungguhnya biasa-biasa saja itu kok menjadi luar biasa lantaran saudara Sofian Effendi membuat laporan dalam kapasitas sebagai asisten menteri kepada Profesor Habibie. Tentang laporan itu, saya sendiri tidak tahu dari mana sumbernya, hingga bisa ke mana-mana. Wartawan punya, tiap anggota organisasi punya, dan sekarang telah menjadi berita yang cukup luas.

■ Bagaimana dengan dugaan makar yang akan dilakukan Arifin Panigoro dalam diskusi itu?

Kita punya rekaman video yang komplet dari detik pertama dimulai sampai detik akhir. Jadi insya Allah kalau itu diputar seluruhnya tidak ada lagi sangkaan bahwa pertemuan itu berencana melakukan makar, apalagi punya unsur subversi dan lain-lain. Jadi, saya kira ini cuma kesalahpahaman dari sang pelapor, dan ditangkap secara agak berlebihan karena menjelang SU MPR. Saya usul, daripada bertele-tele, lebih baik melihat rekaman itu bersama-sama. Tidak ada yang aneh-aneh dan neka-neka, apalagi seperti yang dikhawatirkan, seolah-olah itu pertemuan rahasia. Pertemuan itu terbuka dan terekam dengan bagus sekali.

■ Anda yakin bahwa itu cuma kesalahpahaman. Apakah tidak ada motif politik di balik tindakan Pak Sofian itu?

Saya tidak sejauh itu.

GUNTUR

■ Sikap Anda terhadap memo yang dibuat Sofian?

Saya sudah membaca memonya, dan ada distorsi-distorsi. Itu jelas sekali. Sayang sekali.

■ Apa yang akan Anda lakukan melihat adanya distorsi itu?

Biasa saja. Saya tidak menanggapinya secara serius.

■ Setelah diskusi di Radisson itu, ada pertemuan antara Anda, Sofian Effendi, dan Syafii Maa'rif. Apa yang dibicarakan?

Anda tidak tahu jangan mengacau, tidak ada sama sekali.

■ Sudah diminta konfirmasi, dan benar Anda hadir dalam pertemuan itu?

Ya... tapi Anda *ngawur* kalau di Radisson. Tidak di Radisson itu.

■ Apakah soal surat Sofian itu juga hasil dari pertemuan itu?

Sudah segitu saja, cukup ya bicaranya soal Panigoro. T

FIRMAN A.J.

Arifin Panigoro

"Siapa Sih yang Tidak Peduli Situasi?"

Wawancara: Surat Prof. Sofian Effendi kepada Prof. B.J. Habibie membuahkan tuduhan makar bagi pengusaha Arifin Panigoro. Benarkah? Arifin, bos kelompok Medco itu, bicara tuntas kepada *Panji*.

Sebagai pengusaha besar, nama Arifin Panigoro tidak termasuk yang berkibar-kibar, kendati bisnisnya terus melesat maju. Orang banyak tahu soal Medco, bendera kelompok bisnis Arifin, sarjana teknik elektro lulusan ITB. Tapi, Arifin sendiri jarang muncul di depan publik. Dia lebih suka diam. Bicaranya pun pendek-pendek saja.

Belakangan, nama anggota MPR dari Golongan Karya itu justru populer berkaitan dengan sebuah diskusi di Yogyakarta, yang membuat Arifin terpaksa mondar-mandir ke kantor polisi. Dia bahkan sudah dapat embel-embel "tersangka" atas dugaan ingin makar. Orang bertanya-tanya, pers memburunya. Arifin memilih diam. Sampai pekan ini, rupanya Arifin merasa sudah saatnya harus bicara. Ditemui di kediamannya, di kawasan Jakarta Selatan, Senin sore pekan ini, Arifin tampak tenang. Berikut petikan perbincangannya dengan Uni Z. Lubis dari *Panji*.

Ke mana saja Anda ketika Sidang Umum MPR lalu? Apakah dilarang ikut hadir?

Nggak. Saya sedang sakit.

Seringkah Anda ikut diskusi yang diadakan oleh Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK)?

Nggak juga. Tapi sebelum diskusi tanggal 5 Februari 1998 di Hotel Radisson itu, sebelumnya saya pernah juga datang dan ikut diskusi di PPSK, sekitar awal 1997. Saya *sih* senang ikut diskusi-diskusi untuk menambah wawasan. Nah, dalam diskusi di Hotel Radisson Yogya itu, saya memang diundang oleh Amien Rais.

Anda tertarik datang ke diskusi di Radisson itu, apakah topiknya sudah diberitahu sebelumnya?

Seingat saya, diskusi itu membahas perkembangan situasi terakhir. Kemudian ada pula Amien Rais yang hangat pemunculannya di mana-mana. Pemunculannya juga diharapkan membawa suatu konsep. Jadi tidak asal muncul. Bahwa kemudian konsep-konsep itu ditawarkan sebagai suatu reformasi, itu memang istilah yang tengah populer. Ada reformasi ekonomi, ada reformasi politik. Pokoknya orang sedang suka bicara reformasi. Jadi, saya tertarik untuk mendengarkannya. Saya kan aktif di Persatuan Insinyur Indonesia (PII), sebagai ketua umum. Saya perlu tahu juga perkembangan yang terjadi di masyarakat sebagai bahan masukan bagi saya. Ketua PII kan tidak hanya perlu wawasan keteknikan semata.

Jadi, Anda ke Yogya dan ikut diskusi itu untuk menunjukkan kepedulian atas situasi terakhir?

Kalau soal kepedulian, siapa *sih* yang tidak peduli situasi? Wajar-wajar saja kan, kalau kita prihatin terhadap situasi.

Pernahkah Anda berpikir bahwa diskusi di Radisson itu akan berbuntut panjang seperti sekarang?

M. ZAKY SALIM

Arifin Panigoro: *Harus "kena"*

Wooooo, sama sekali *nggak* terpikir. Soalnya saya pikir diskusi itu tertutup, dan dihadiri kaum intelektual. Objektivitasnya jelas, yakni kami membahas sesuatu topik yang disiapkan orang. Dalam hal ini ada *paper* reformasi politik yang disiapkan oleh ahli politik, yakni Afan Gaffar. Jadi, meskipun bahasannya ke mana-mana, kami ngomong ke sana-ke sini, kemungkinan ini, kemungkinan itu, *nggak* terbayang bahwa kata-kata kami di situ dicatat, bahkan dijadikan bahan laporan yang sangat merugikan. Sangat membahayakan, malah!

Membahayakan bagaimana?

Ya, kan jadinya orang-orang yang ikut diskusi dituduh macam-macam. Saya dituduh ingin menggulingkan pemerintah.

Apakah betul Anda sering membantu pendanaan untuk kegiatan PPSK?

Bantuan saya lebih kepada kegiatan Muhammadiyah. Ketika Pak Amien jadi ketua umum PP Muhammadiyah, saya membantu mensponsorinya. Itu yang mengatur pemerintah. Lewat Pak Habibie (B.J. Habibie, *red.*) kami diminta membantu. Kami juga membantu pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah, dan kalau bulan puasa kami menyalurkan zakat lewat kegiatan Muhammadiyah.

Dari mana Anda tahu ada surat dari Sofian Effendi kepada bosnya, Pak B.J. Habibie, yang menceritakan soal pertemuan di Radisson dan keterlibatan Anda?

Tahu-tahu saya dikasih fotokopi surat itu. Belum lama *sih*. Lantas kan muncul juga di internet. Saya juga kaget.

Tapi, *posting* di internet kan belum lama. Sementara Anda dikabarkan diperiksa sebelum surat itu muncul di internet. Bagaimana ini?

Ya, memang. Saya baru tahu ada surat Sofian Effendi setelah saya dipanggil polisi pertama kali. Jadi, waktu dipanggil itu saya belum tahu, ini ada apa? Serba bingung jadinya. Setelah dapat fotokopian surat itu, oooo jadi lebih jelas buat saya. Jadi, Sofian Effendi melaporkan, dan ada motivasi untuk melaporkan. Terus ada niatan, keinginan, agar saya harus "kena"-lah begitu. Mungkin juga ini bukan pekerjaan Sofian sendiri. Tentu ada kelompok di belakangnya. Saya kan *nggak* kenal sama dia (Sofian, *red.*).

Anda sama sekali belum kenal sama Sofian Effendi?

Sama sekali belum kenal. Saya kenal baik sama Amien Rais, Afan Gaffar, dengan Anggito Abimanyu saya pernah ketemu. Juga dengan rektor UGM yang baru, Prof. Ichlasul Amal, saya sudah pernah ketemu.

Siapa-siapa yang Anda maksud dengan "kelompok" itu?

Saya belum bisa katakan. Tapi saya sudah punya bukti-bukti untuk itu. Suatu saat saya akan bicara.

Menurut Anda, siapa sebenarnya target utama dari meledaknya kasus ini, Anda ataukah Amien Rais?

Bisa saja. Gara-gara kasus saya ini, kan Amien Rais jadi ikut terpojok juga. Pokoknya surat Sofian Effendi kepada Pak Habibie itu merugikan bagi semua orang, terutama yang hadir pada diskusi di Radisson itu.

Di surat Sofian kepada B.J. Habibie dikatakan bahwa Anda membuat aksi mengajak Amien Rais menggalang sejuta massa untuk menggagalkan sidang umum. Benar *nggak*?

"Kalau sampai saya melakukan kejahatan di negara sendiri, ya di negara mana pun saya pasti diragukan kredibilitasnya. Apakah saya itu disangka pemberontak, makar, mencuri, dan sebagainya. Siapa yang mau berhubungan dengan orang yang tersangkut urusan begituan? Bahaya. Saya kan ada bisnis minyak. Investornya dari mana-mana. Mereka baca koran berbahasa Inggris. Di situ tertulis bahwa saya jadi tersangka karena pasal ini, pasal itu, dengan ancaman hukuman sekian tahun, langsung dia kirim faksimili dari Houston, AS. Menanyakan ini ada apa? Di sini saya kan punya bank. Begitu diberitakan, Arifin Panigoro jadi tersangka, langsung banknya di-rush. Jadi, saya sangat dirugikan."

*| **Arifin Panigoro**, Anggota MPR Fraksi Golkar, Pengusaha Minyak, dan Sarjana Teknik Elektro ITB '72, dalam berita wawancara Panji Masyarakat ("Arifin Panigoro: Siapa Sih yang Tidak Peduli Situasi?", 30 Maret 1998)*

Panji Masyarakat
30 Maret 1998

BABAK II

Prabowo Subianto: Bulan Separuh Bayang di Cijantung

Ibarat rembulan, Prabowo Subianto adalah bulan separuh bayang. Ada sisi gelap menutup permukaannya yang terang. Bahwa ia arogan dan temperamental, iya. Karakter itu diakui sendiri ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo. Tetapi, ia juga cerdas dan punya kemampuan manajemen dalam membangun kelompok. Dia ksatria rembulan separuh bayang.

Forum
24 Agustus 1998

Bagai Bulan Separuh Bayang

Riwayat Prabowo penuh kontroversi. Sebagai komandan, ia cakap membangun pasukan, hingga diakui sebagai pasukan elite kelas dunia. Tapi, begitulah, ia cenderung menuruti kemauannya sendiri.

PRABOWO DAN PRAJURIT KOPASSUS. *Ogah menjadi panglima kodam.*

DALAM buku kenangan taruna Akabri 1974, tertulis: "Keberanian untuk menghadapi segala tantangan akan selalu diuji dan ujian itulah yang menentukan kita akan berdiri tegak dan teguh penuh kehormatan." Yang mencantumkannya bernama Prabowo Subianto, kini berpangkat letnan jenderal dan hari-hari ini tengah dihadapkan pada sebuah dewan yang mempersoalkan kehormatannya sebagai perwira.

Agaknya, urusan itu tak semudah membalik tangan. Sebab, sejak awal, sosok mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat itu selalu baik bulan menjelang purnama: separuh bayang. Ada sisi gelap menutup permukaannya yang terang.

Pada 1975, misalnya, rapat para instruktur Kursus Dasar Sandhi Yhuda sempat berlangsung lama saat menentukan lulus-tidaknya pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 itu. Nilai rata-rata akademisnya tinggi: di atas 80. Namun, untuk kemampuan fisik, hanya berkisar 55-70. Selain itu, para pelatih juga memberi serangkaian catatan khusus tentang penampilan Prabowo. Antara lain, kendati berkemauan kuat dan memiliki kemampuan manajemen yang baik, ia cenderung bertindak dengan cara dan nalurinya sendiri.

Toh, akhirnya sidang itu bersepakat meluluskan Prabowo.

Namun, kontroversi seputar sosoknya berlanjut. Pada 1976, ia mengalami pertempuran pertamanya bersama dengan Tim Nanggala 10 di Timor Timur. Tapi, saat itu, tak ada prestasinya yang menonjol. Padahal, api perang saudara di sana tengah hebat-hebatnya berkobar. Dua tahun kemudian, ketika kembali terjun di wilayah itu, Letnan Satu Infanteri Prabowo mencetakkan tinta emas dalam sejarah Kopassus: Pada 31 Desember 1978, Tim Nanggala XXVIII yang dipimpinnya menembak mati Presiden Fretilin Nicolao Davies Lobato.

#1

Prabowo Subianto masuk Akabri pada 1970. Bersamaan dengan itu, ia sesungguhnya diterima juga di tiga universitas ternama sekaligus di Amerika Serikat: Colorado University, George Washington University, dan satu lagi kampus yang terletak di Rhode Island. Tetapi, ia tetap memilih Akabri.

Saat menempuh pendidikan di Akabri itu, Prabowo sering bikin pusing pengajar dan komandannya. Pasalnya karena kendala bahasa, ia sering kurang bisa menangkap instruksi atasan yang oleh karena itu sering dihukum. Menghabiskan waktunya di luar negeri (Singapura, malaysia, Thailand, Hong Kong, Swiss, dan Inggris), mengikuti "pelarian" ayahnya yang terlibat pemberontakan PRRI/

KO/JAKARTA POST

Rapor Merah. Ada yang mengaitkan penggantian Prabowo dengan jatuhnya Pak Harto dari kursi kekuasaan, setelah 32 tahun menjadi presiden. Orang juga bertanya, adakah karier Prabowo yang cemerlang itu akan terganjal sampai di sini? Catatan gemilang yang dibukukan dalam operasi militer yang ditangani Prabowo selama di pasukan baret merah, selama ini, kini mulai luntur tintanya. Rapor merah Prabowo mulai muncul ke permukaan. Ketika tes masuk akademi militer di Magelang, Prabowo yang berayahkan Prof. Sumitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi dan berkali-kali jadi menteri ekonomi itu, sebenarnya gagal melewati ujian masuk. Fisik suami dari Siti Hediati Soeharto itu lemah. Hasil psikotes menunjukkan, Prabowo punya kecenderungan "mabuk kekuasaan". "Jika diberi kekuasaan, dia cenderung menyelewengkan kekuasaan itu," ujar sumber *Panji*, yang terlibat dalam seleksi masuk calon taruna Akabri. Selama menjadi taruna, dia juga pernah dihukum karena desersi.

mari
arta
n de-
na di
yang
alam
ang-
gapa
alau
dari
AD.
tkan
tana
kkan
Me-
ama
ıkan

◀ Panji Masyarakat
1 Juni 1998

▼ Paron
26 April 1997

FOTO/FOTO WAHYUDIWADI

PASUKAN KOPASSUS. Beraksi

TATAN AGUS RST

LATIHAN KOPASSUS DI BATUJAJAR. Kebenaran sedang diuji.

Gatra
25 Juli 1998

Permesta, membuat dia banyak menguasai bahasa asing dengan fasih. Gara-gara itu bahasa Indonesianya jadi belepotan dan untuknya perlu diberi les khusus bahasa Indonesia. Dia jadi sering salah dalam memahami perintah atasan, lebih-lebih kalau sang komandan menggunakan istilah daerah. Karena salah memahami itulah, terutama semasa duduk di tingkat satu, sering Prabowo mendapat hukuman. Para komandannya kerap kesal, dan menghukum, karena gaya hidupnya yang dianggap "kebarat-baratan" untuk menyebut Prabowo "sulit diatur" dan "suka mendebat".

Bukan cuma itu saja. Ia juga pernah diturunkan pangkatnya satu tingkat gara-gara keluar dari garnisun. Itu terjadi saat para taruna mendapat cuti ke Yogyakarta. Bukannya ke Yogya, Prabowo malah memanfaatkan kesempatan cuti itu untuk mudik ke Jakarta. Lantaran penurunan pangkat itu, ia telat lulus satu tahun. Yang jelas, Prabowo bukan tipe prajurit standar. Dia sosok yang melampaui sifat-sifat keprajuritannya. Para pendukungnya bilang ia orang sangat baik, pemurah, solider. Tapi bagi lawan-lawannya, ia "anak macan"" yang jika dipelihara bisa memangsa pengasuhnya kelak.

Pada 1975, rapat para instruktur Kursus Dasar Sandhi Yudha sempat berlangsung lama saat menentukan lulus tidaknya Prabowo Subianto. Nilai rata-rata akademisnya tinggi: di atas 80. Namun, untuk kemampuan fisik, hanya berkisar 55-70.

Saat itu, Prabowo mengikuti pendidikan Komando di Batujajar Bandung; mulai dari memanjat tebing, merambah hutan, hingga latihan pendaratan laut. Kegiatan komando ini diakhiri dengan "long march" sembilan hari dari Lembang sampai Cilacap.

Dalam bidang teori, Prabowo terkenal cerdas dan mempunyai nilai tinggi, tetapi memiliki kekurangan di bidang fisik. Ia cepat lelah dan sering tertinggal siswa lain apabila melakukan latihan lari.

Hasil psikotes juga menunjukkan Prabowo punya kecenderungan "mabuk kekuasaan". Jika diberi kekuasaan, dia cenderung menyelewengkan kekuasaan itu.

Para pelatih memberi catatan khusus tentang penampilan Prabowo. Kendati berkemauan kuat dan memiliki kemampuan manajemen yang baik, Prabowo cenderung bertindak dengan cara dan nalurinya sendiri.

(*) Disarikan dari Forum Keadilan *("Bagai Bulan Separuh Bayang", 24 Agustus 1998),* Panji Masyarakat *("Saat-Saat Genting Jenderal Prabowo, 1 Juni 1998), dan* Pos Kota *("Prabowo Akui Diperintah Atasan", 11 Agustus 1998).*

Dalam bidang teori, Prabowo terkenal cerdas dan mempunyai nilai tinggi tapi memiliki kekurangan di bidang fisik. Ia cepat lelah dan sering tertinggal siswa lain apabila melakukan latihan lari.

Ketika diadakan penilaian untuk masuk Kopassus, Tim persidangan mengalami masalah cukup pelik. Bahkan dalam membahas nilai Prabowo, Tim ini bersidang mulai dari pukul 14.00 hingga pukul 02.00 dinihari (keesokan hari).

Adanya informasi bahwa yang bersangkutan akan menjadi menantu Presiden Soeharto (waktu itu), barulah Tim dapat menyelesaikan tugas dan mempertimbangkan kelulusan Prabowo Subianto. (ip/bs/cg/10)

Pos Kota
11 Agustus 1998

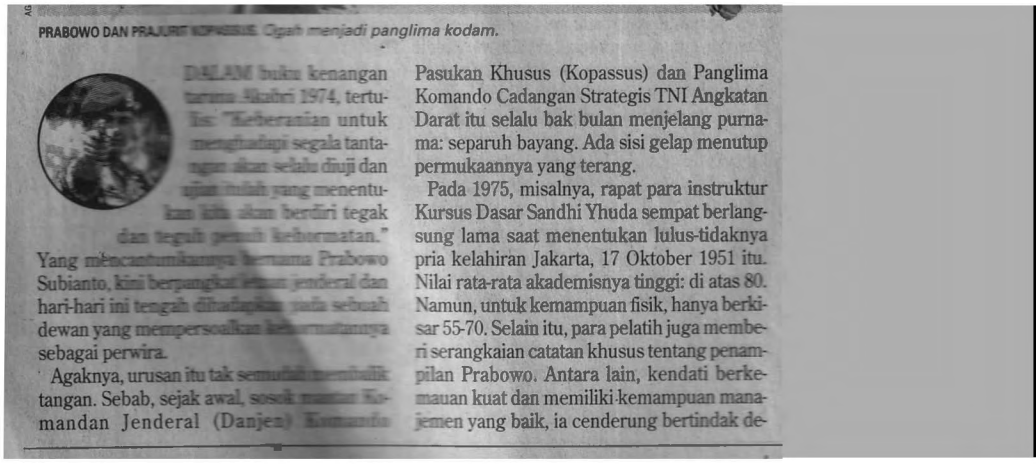

PRABOWO DAN PRAJURIT KOPASSUS: Ogah menjadi panglima kodam.

DALAM buku kenangan [illegible] 1974, tertulis: "Keberanian untuk menghadapi segala tantangan akan selalu diuji dan ujian itulah yang menentukan kita akan berdiri tegak dan teguh penuh kehormatan." Yang mencantumkannya bernama Prabowo Subianto, kini berpangkat letnan jenderal dan hari-hari ini tengah dihadapkan pada sebuah dewan yang mempersoalkan kehormatannya sebagai perwira.

Agaknya, urusan itu tak semudah membalik tangan. Sebab, sejak awal, sosok mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat itu selalu bak bulan menjelang purnama: separuh bayang. Ada sisi gelap menutup permukaannya yang terang.

Pada 1975, misalnya, rapat para instruktur Kursus Dasar Sandhi Yhuda sempat berlangsung lama saat menentukan lulus-tidaknya pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 itu. Nilai rata-rata akademisnya tinggi: di atas 80. Namun, untuk kemampuan fisik, hanya berkisar 55-70. Selain itu, para pelatih juga memberi serangkaian catatan khusus tentang penampilan Prabowo. Antara lain, kendati berkemauan kuat dan memiliki kemampuan manajemen yang baik, ia cenderung bertindak de-

Forum
24 Agustus 1998

#2

Pada 1976, Prabowo Subianto mengalami pertempurannya yang pertama dengan Tim Nanggala 10 di Timor Timur. Saat itu, tak ada prestasinya yang menonjol. Barulah dua tahun kemudian, ketika kembali terjun di wilayah itu, Letnan Satu Infanteri Prabowo Subianto menorehkan tinta emas dalam sejarah Kopassus. Pada 31 Desember 1978, Tim Nanggala XXVIII yang dipimpinnya menembak mati Presiden Fretilin Nicolau Davies Lobato.

Merek dan prestasi yang disandang Prabowo itu kemudian tergugat 20 tahun kemudian. Letjen Muhammad Yunus Yosfiah yang di kabinet Habibie sebagai Menteri Penerangan menyebut bahwa penembak Lobato adalah anggota Batalyon 744 yang dipimpinnya.

Kapten Prabowo yang berada di bawah koordinasi Yunus Yosfiah memang memberikan informasi mengenai kegiatan kelompok Lobato yang dicari-cari ABRI dengan melancarkan "Operasi Betis" dan melibatkan banyak pasukan.

Ketika Yon 744 memburu dan melakukan "pembersihan", kelompok Fretilin melawan. Kontak senjata jarak dekat pun tak tercegah. Usai pertempuran, beberapa mayat tergeletak. Salah seorang anggota Yon 744 melapor ke

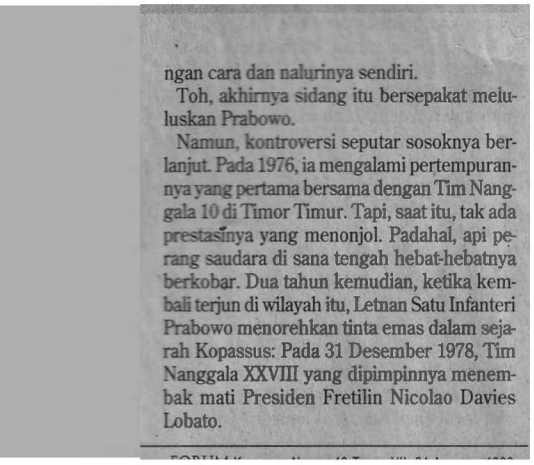

ngan cara dan nalurinya sendiri.

Toh, akhirnya sidang itu bersepakat meluluskan Prabowo.

Namun, kontroversi seputar sosoknya berlanjut. Pada 1976, ia mengalami pertempurannya yang pertama bersama dengan Tim Nanggala 10 di Timor Timur. Tapi, saat itu, tak ada prestasinya yang menonjol. Padahal, api perang saudara di sana tengah hebat-hebatnya berkobar. Dua tahun kemudian, ketika kembali terjun di wilayah itu, Letnan Satu Infanteri Prabowo menorehkan tinta emas dalam sejarah Kopassus: Pada 31 Desember 1978, Tim Nanggala XXVIII yang dipimpinnya menembak mati Presiden Fretilin Nicolao Davies Lobato.

Yunus, "Pak, Lobato kena." Sang komandan balik bertanya, "Dari mana kamu tahu itu Lobato?"

Si prajurit langsung menjawab, "Dia bekas guru saya."

Tak ada yang tahu siapa si penembak Lobato. Yang diketahui persis adalah peletonnya: Yon 744.

Dampak dari "prestasi" dan "merek" kesuksesan "Operasi Betis" ini adalah Menhankam/ Panglima ABRI Jenderal M. Jusuf datang ke Timtim untuk menyematkan kenaikan pangkat luar biasa pada Prabowo dan semua anggota pasukannya.

(*) Disarikan dari Forum Keadilan *("Bagai Bulan Separuh Bayang", 24 Agustus 1998) dan* Buana Minggu *("Berstatus menantu presiden tak menjadi beban Prabowo berkiprah", 23 Agustus 1998).*

Belakangan, salah satu "merek" yang disandang Prabowo selama hampir 20 tahun itu tergugat. Dalam wawancara dengan FORUM (edisi 27 September 1997), Letjen Muhammad Yunus Yosfiah (kini Menteri Penerangan) menyebutkan bahwa penembak Lobato adalah anggota Batalyon 744 yang dipimpinnya. Kapten Prabowo, yang berada di bawah koordinasi Yunus, memang memberikan informasi mengenai kegiatan kelompok Lobato yang dicari-cari ABRI dengan melancarkan "Operasi Betis" dan melibatkan banyak pasukan. Nah, pada saat Yon 744 memburu dan melakukan "pembersihan", kelompok Fretilin itu melawan. Mereka terlibat kontak senjata jarak dekat (sekitar 10 meter). Usai pertempuran, tampak beberapa mayat yang tergeletak. Nah, salah seorang anggota Yon 744 melapor ke Yunus, "Pak, Lobato kena." Sang komandan balik bertanya: "Dari mana kamu tahu itu Lobato?" Si prajurit langsung menjawab. "Dia bekas guru saya, Pak."

Jadi, siapa sebetulnya yang menembak Lobato? "Enggak ketahuan siapa yang menembak langsung. Yang diketahui cuma peletonnya," kata Yunus. Yang jelas, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI waktu itu, Jenderal M. Jusuf, datang ke Timtim untuk menyematkan kenaikan pangkat luar biasa pada Prabowo dan semua anggota pasukannya.

Forum
24 Agustus 1998

Kabut di seputar Prabowo muncul lagi sekitar 1983. Ketika itu, ia kembali bertugas di Timtim, meninggalkan Siti Hediati Hariadi, putri Presiden (waktu itu) Soeharto, yang baru tiga bulan dinikahinya. Dalam sebuah operasi, ia dikabarkan hilang setelah pasukannya terkepung gerilyawan Fretilin. Tetapi, 12 jam kemudian, ia muncul kembali. Konon, ia berhasil menyelamatkanm diri dari kepungan karena bersembunyi di sebuah lubang di padang ilallang yang dibakar pasukan Fretelin.

Sampai saat ini tidak ada klarifikasi resmi mengenai peristiwa itu. Sebuah sumber FORUM menyebutkan, Prabowo memang sempat ditawan Fretilin. Ia dihajar habis. Lalu, Fretilin meminta uang tebusan Rp 50 juta, yang kemudian dipenuhi ayahnya, begawan ekonomi Indonesia, Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Setelah itu, Prabowo pun dijemput di sebuah dusun, lalu diterbangkan ke Surabaya untuk selanjutnya dibawa ke Jepang untuk menyembuhkan luka-lukanya.

Forum
24 Agustus 1998

#3

Pada 1983, Prabowo Subianto kembali bertugas di Timtim. Ia meninggalkan Siti Hediati Hariyadi, putri Presiden Soeharto, yang baru tiga bulan dinikahinya. Dalam sebuah operasi, ia dikabarkan hilang setelah pasukannya terkepung gerilyawan Fretilin. Tetapi, 12 jam kemudian, ia muncul kembali. Konon, ia berhasil menyelamatkan diri dari kepungan karena bersembunyi di sebuah lubang ilalang yang dibakar Fretilin.

Menurut satu versi, Prabowo sempat ditahan Fretilin. Ia dihajar habis. Lalu, Fretilin meminta uang tebusan Rp50 juta yang kemudian dipenuhi ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Setelah itu, Prabowo dijemput di sebuah dusun, lalu diterbangkan ke Surabaya untuk selanjutnya dibawa ke Jepang untuk menyembuhkan luka-lukanya.

Versi lain yang kontroversial dituturkan mantan Pangkostrad Letjen Leo Lopulisa. Menurutnya, saat itu Prabowo bukan hilang atau ditawan, melainkan memang sengaja disimpan atasannya supaya tidak diketahui posisinya oleh musuh. Prabowo tidak dikeluarkan karena dia menantu Presiden Soeharto.

"Kalau terjadi apa-apa sama dia, nanti kita yang kacau," jelas Leo Lopulisa. Setelah pasukan Leo ditarik ke Jawa, Prabowo juga ikut kembali ke Jakarta.

(*) Disarikan dari Forum Keadilan *("Bagai Bulan Separuh Bayang", 24 Agustus 1998).*

#4

Kemampuan Prabowo Subianto—ini tak perlu diragukan sebagaimana penilaian para instruktur kursusnya—adalah mengatur pasukan. Saat ia dipindahkan dari Den-81 ke Korps Baret Hijau Kostrad, sebagai Wakil Komandan Batalyon 328/Kujang II.

Selama kurun waktu 1987—1991, ia berhasil mengangkat kembali citra pasukan yang dianggap berperan besar dalam penumpasan PKI. Belakangan, prestasi batalyon ini merosot. Saat masuk Prabowo Subianto melengkapi batalyon lintas udara itu dengan berbagai fasilitas dan peralatan perang yang dirogoh dari kantongnya sendiri. Maklumlah, Prabowo datang dari keluarga makmur. Ia memperkenalkan taktik pemburu. Hasilnya, tatkala diterjunkan ke Timtim pada 1988—1989, Yon 328 tercatat sebagai pasukan yang paling banyak menangkap musuh dan paling banyak menyita senjata musuh.

Pada 1989, Yon 328 terpilih sebagai Batalyon Terbaik di Seluruh Indonesia. Atas prestasi ini, Prabowo pun naik sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad.

Empat tahun kemudian, ia ditarik ke Kopassus. Di sini, Prabowo hanya butuh waktu dua tahun untuk menggenggam tongkat komando sebagai Danjen Kopassus pada November 1995.

(*) Disarikan dari Forum Keadilan *("Bagai Bulan Separuh Bayang", 24 Agustus 1998).*

dituturkan mantan Pangkostrad Letjen Leo Lopulisa. Menurut dia, saat itu Prabowo bekas hilang atau ditawan, melainkan memang sengaja disimpan atasannya supaya tidak diketahui posisinya oleh musuh. "Dia tidak kita kasih keluar karena dia menantu Pak Harto. Kalau terjadi apa-apa sama dia, nanti kita yang kacau," kata pembina berbagai olah raga bela diri yang kini aktif di gereja itu kepada Victoria Sijabat dari FORUM. Nah, menurut Leo, setelah pasukannya ditarik ke Jawa, Prabowo juga ikut kembali ke Jakarta.

Cerita mana yang benar? Tidak jelas. Maklum, setiap medan pertempuran pasti memiliki versi sebanyak pasukan yang terlibat dan tidak tewas dalam kancah itu.

Yang tidak bisa diragukan adalah—sebagaimana penilaian para instruktur-nya dulu—kemampuan Prabowo mengatur pasukan. Ini terlihat jelas saat ia dipindahkan dari Den-81 ke Korps Baret Hijau Kostrad, sebagai Wakil Komandan Batalyon 328/Kujang II. Selama kurun waktu 1987-1991, ia berhasil mengangkat kembali citra pasukan yang dianggap berperan besar dalam penumpasan G30S/PKI itu. Namun, belakangan, prestasi batalyon tersebut merosot. Menurut Mayor Jenderal Adang Ruchiatna, mantan Panglima Divisi I/Kostrad yang membawahi Yon 328, ketika Prabowo masuk kondisi pasukan tengah parah-parahnya. "Tapi, setelah dia masuk, semua prajurit seakan bangkit lagi. Sampai saat ini, mereka bangga menjadi anggota Yon 328," kata Adang kepada FORUM, tiga tahun lalu.

Menurut sebuah sumber FORUM, Prabowo melengkapi batalyon lintas udara itu dengan berbagai fasilitas dan peralatan perang yang dibeli dengan uangnya sendiri. Maklumlah, ia datang dari keluarga yang makmur. Hasilnya, ketika Yon 328 diterjunkan di Timtim pada 1988-1989, ia tercatat sebagai pasukan yang paling banyak menangkap musuh sekaligus paling banyak menyita senjata musuh. Pada 1989, Yon 328 terpilih menjadi "Batalion Terbaik di Seluruh Indonesia". Prabowo pun naik sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad.

Empat tahun kemudian, ia ditarik kembali ke "sarang"-nya: Kopassus. Di sini, ia hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk dilantik sebagai Danjen pada November 1995.

Sebagaimana di Yon 328, Prabowo kembali menunjukkan bakatnya sebagai komandan yang cekap. Salah satunya adalah prestasi Kopassus di Mapenduma, Irianjaya, pada 1996. Ketika itu, dunia dikejutkan peristiwa penyanderaan yang dilakukan GPK Organisasi Papua Merdeka terhadap tim ekspedisi Lorenz. Dari 26 anggota ekspedisi flora dan fauna itu, tujuh di antaranya warga negara asing (Jerman, Belanda, dan Inggris). Kelompok penyandera pimpinan Kelly Kwalik itu lalu menuntut kemerdekaan Irja dari pemerintah Indonesia. Kalau tidak, para sandera akan dibunuh satu per satu.

Prabowo langsung mengusulkan ke Pang-

ANGGOTA KOPASSUS DI MOUNT EVEREST. *Ingin memamerkannya kepada dunia.*

lima ABRI Jenderal Feisal Tanjung agar melakukan operasi pembebasan. Tapi, karena ada permintaan dari pemerintah Jerman, Inggris, dan Belanda agar Jakarta melakukan negosiasi dengan Kelly Kwalik dkk., Pangab menolak usul itu. Lagipula, medan lokasi penyanderaan dinilai amat sulit, sehingga operasi militer diperkirakan sulit berhasil.

Kendati demikian, diam-diam, Feisal memerintahkan Prabowo menyusun rencana operasi penyerbuan dan menunjuknya sebagai komandan untuk aksi itu.

Benar saja. Ternyata, setelah empat bulan berjalan, negosiasi yang diwakili oleh Komisi Internasional Palang Merah Dunia, ICRC, tidak mencapai hasil maksimal. Sampai akhir April 1996, GPK tetap menahan 11 orang sandera.

Prabowo pun kembali menghubungi Feisal. Kali ini, Pangab langsung menyetujui gagasannya. Diperkirakan, sandera bisa dibebaskan dalam waktu sepuluh hari. Tapi, ternyata, Prabowo dan Kopasssus hanya butuh sepekan, kendati sempat diwarnai insiden Sanurip yang meteswakan 13 anggota ABRI dan 3 orang sipil di hanggar Timika, markas komando operasi itu. Kecuali dua orang yang sem-

15

Forum
24 Agustus 1998

PANJI UTAMA

Selain itu, Prabowo juga memendam ambisi yang amat besar. Sasarannya tidak tanggung-tanggung, yakni posisi tertinggi di negeri ini. Itulah, yang oleh beberapa kalangan dibidik Prabowo selama lima tahun belakangan, dan dipersiapkan dengan membangun jaringan termasuk ke kalangan Islam. "Dia mengincar posisi tahun 2003," ucap seorang pati ABRI. Dalam membangun loyalitas anak buah di pasukan, Prabowo tak segan-segan mengobral duit dari kocek pribadi. Tidak heran, karena istri dan saudaranya aktif mengelola bisnis berkelas konglomerat.

Ketika meletus insiden Santa Cruz, 12 Desember 1991, sebenarnya Prabowo tidak punya tugas apa pun di sana. Tapi, kehadirannya hampir setiap akhir pekan di Dili cukup mencolok. "Dia selalu datang dengan pesawat khusus," kata sumber *Panji*. Yang disambangi Prabowo adalah komandan satgas intel operasi di sana, yakni Sjafrie. Kabarnya, bersama Sjafrie, rekan Prabowo semasa bertugas di Timor Timur tahun 1976-an, Prabowo merekrut sekitar 600 intel, hanya untuk kota Dili. Ini dibiayai dari kocek pribadi. Pasukan intel Prabowo ini, yang direkrut dari rakyat sipil, kemudian dikenal sebagai pasukan "ninja". Mereka menjalankan apa yang disebut "operasi hitam-putih", karena Prabowo tidak percaya terhadap operasi "cinta-kasih" yang dijalankan Panglima Komando Lapangan Operasi Timtim, Brigjen Rudolf Warouw. Pasukan intimidasi yang dilakukan pasukan ninja ini sempat membuat masyarakat lokal melawan, dengan membentuk kelompok pertahanan lingkungan. Akibatnya bentrokan sering terjadi, dan situasi Dili amat mencekam. Culik-menculik terjadi hampir setiap hari.

Modus operandi culik-menculik ini yang membuat orang berpaling kepada Prabowo, ketika terjadi serangkaian penculikan terhadap aktivis beberapa waktu lalu. Apalagi disebut-sebut keterlibatan dua kolonel pimpinan grup di pasukan ini. Pius Lustrilanang, salah satu terculik yang sudah dilepas, dalam keterangannya di hadapan Komnas HAM dan Kongres AS, bahkan menyebut indikasi keterlibatan pasukan elite ABRI. Siapa pun tahu, sebutan pasukan elite selalu digunakan untuk Kopassus. Menurut Pius, salah seorang penculiknya bahkan mengaku lulusan Akabri. Sebuah tempat milik militer di kawasan Bogor, diduga kuat sebagai tempat penyekapan.

Belum ada konfirmasi resmi soal ini, karena Pangab Wiranto masih mengelak, dengan alasan bukti-bukti belum lengkap. Komandan Puspom ABRI Mayjen Syamsu yang juga menjadi ketua tim pencari fakta membenarkan ucapan Wiranto. Mereka, kata Syamsu, sudah mendengar keterangan Pius, via Komnas HAM. Sementara Desmon J. Mahesa, ketua LBH Nusantara yang sempat diskap dan kini bebas, didengar keterangannya pada Senin ini, di kantor LBH, Jakarta. Bahan-bahan masukan dari polisi, yang mengaku menerima Andi

Peristiwa Trisakti: *Tak dihekali peluru timah*

Arief, dari seseorang, baru diterima pekan ini. "Semua fakta masih kami analisis," kata Syamsu. Ketika ditanyakan soal keterlibatan aparat militer dalam penculikan, Syamsu tidak membantah. Tapi, dia juga tidak mengiyakan. "Kalau sudah final, dan itu dalam waktu dekat akan kami ungkap. Kami tidak takut, meskipun itu menyangkut perwira tinggi. Kalau memang terlibat, di mata hukum posisinya sama saja," tegas Syamsu.

Kasus penculikan aktivis yang oleh kalangan ABRI dikaitkan dengan-tindak-tanduk dan kebiasaan operasi Prabowo itu sudah selayaknya segera diungkap oleh Pangab Wiranto. Menunda pengungkapan, sama saja dengan menunda masalah yang bagaikan bara dalam sekam. Belum lagi dengan kasus penembakan mahasiswa Trisakti yang sempat dikaitkan dengan Prabowo. Soalnya, polisi mengaku tak membekali anggotanya dengan peluru timah. Belakangan, sumber resmi menyeburkan, keterlibatan sebuah satuan Polri, kemungkinan besar satuan gegana dalam kasus itu. Bagi Pangab, penggantian mendadak Prabowo dari jabatan pangkostrad, isu penculikan, dan penembakan mahasiswa Trisakti adalah pekerjaan rumah jangka amat pendek yang harus ditunaskan.

Prabowo telah meninggalkan "bom" yang bisa meledak sewaktu-waktu di masa belum stabil seperti sekarang. Jika Pangab Wiranto tak segera berani mengungkapnya, dia akan menuai badai. Wallahu a'lam. ■

TIM PANJI

#5

Panji Masyarakat
1 Juni 1998

Ketika meletus insiden Santa Cruz, 12 Desember 1991, sebenarnya Prabowo Subianto tidak punya tugas apa-apa di sana. Tapi, kehadirannya setiap akhir pekan di Dili cukup mencolok. Dia selalu datang dengan pesawat khusus. Yang disambangi Prabowo adalah komandan satgas intel operasi, yakni Sjafrie Sjamsoeddin. Kabarnya, bersama Sjafrie, rekan Prabowo semasa bertugas di Timor Timur tahun 1976, Prabowo merekrut sekitar 600 intel, hanya untuk Kota Dili. Ini dibiayai dari kocek pribadi. Pasukan intel Prabowo ini, yang direkrut dari rakyat sipil, kemudian dikenal sebagai pasukan "ninja". Mereka menjalankan apa yang disebut "operasi hitam-putih" karena Prabowo tidak percaya terhadap "operasi cinta kasih" yang dijalankan Panglima Komando Lapangan Operasi Timtim, Brigjen Rudolf Warouw. Pasukan intimidasi yang dilakukan pasukan ninja ini sempat membuat masyarakat lokal melawan dengan membentuk kelompok pertahanan lingkungan. Akibatnya, bentrokan sering terjadi dan situasi Dili sangat mencekam. Culik menculik terjadi nyaris setiap hari.

Prabowo memang memiliki potensi yang besar menggalang dukungan dari anak buah dan masyarakat. Rakyat Timor Timur begitu kesengsem dengan Prabowo. Menurut tokoh prointegrasi Timtim yang sudah mengenal Prabowo sejak 1975, sosok Prabowo punya perhatian yang luar biasa. Salah satunya adalah ia mengambil puluhan bocah daerah itu sebagai anak angkatnya. Beberapa dari anak angkat ini akhirnya berhasil masuk Akabri.

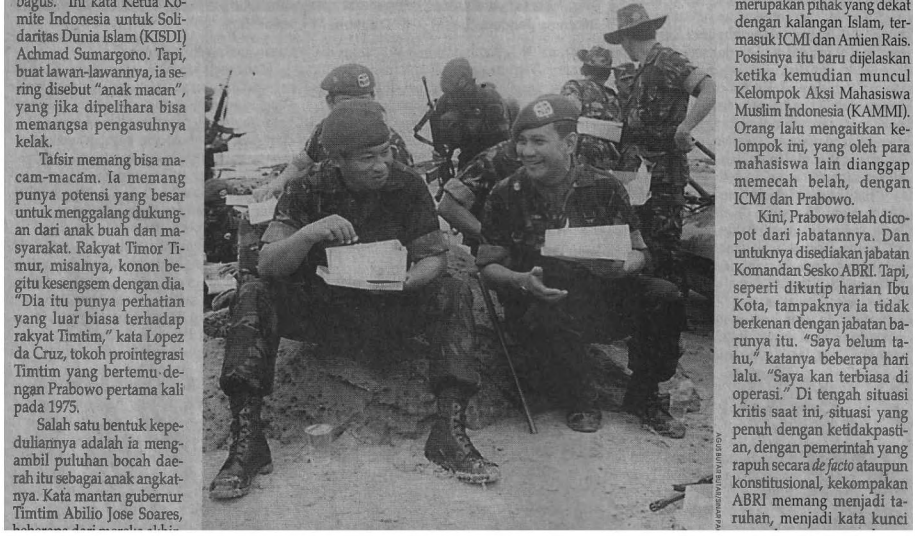

bagus. Itu kata Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) Achmad Sumargono. Tapi, buat lawan-lawannya, ia sering disebut "anak macan", yang jika dipelihara bisa memangsa pengasuhnya kelak.

Tafsir memang bisa macam-macam. Ia memang punya potensi yang besar untuk menggalang dukungan dari anak buah dan masyarakat. Rakyat Timor Timur, misalnya, konon begitu kesengsem dengan dia. "Dia itu punya perhatian yang luar biasa terhadap rakyat Timtim," kata Lopez da Cruz, tokoh prointegrasi Timtim yang bertemu dengan Prabowo pertama kali pada 1975.

Salah satu bentuk kepeduliannya adalah ia mengambil puluhan bocah daerah itu sebagai anak angkatnya. Kata mantan gubernur Timtim Abilio Jose Soares,

merupakan pihak yang dekat dengan kalangan Islam, termasuk ICMI dan Amien Rais. Posisinya itu baru dijelaskan ketika kemudian muncul Kelompok Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Orang lalu mengaitkan kelompok ini, yang oleh para mahasiswa lain dianggap memecah belah, dengan ICMI dan Prabowo.

Kini, Prabowo telah dicopot dari jabatannya. Dan untuknya disediakan jabatan Komandan Sesko ABRI. Tapi, seperti dikutip harian Ibu Kota, tampaknya ia tidak berkenan dengan jabatan barunya itu. "Saya belum tahu," katanya beberapa hari lalu. "Saya kan terbiasa di operasi." Di tengah situasi kritis saat ini, situasi yang penuh dengan ketidakpastian, dengan pemerintah yang rapuh secara *de facto* ataupun konstitusional, kekompakan ABRI memang menjadi taruhan, menjadi kata kunci

Panji Masyarakat
1 Juni 1998

Ketika meruncing konflik terkait Referendum Timtim, Prabowo Subianto membentuk Gardapaksi yang prointegrasi. Waktu itu, kata Prabowo, banyak pemuda drop out tidak punya pekerjaan. Kita harus membuat integrasi ini menguntungkan Timor Timur. Maka, mereka harus diberi keterampilan, pekerjaan yang bisa segera menghasilkan uang. Inilah gagasan Gardapaksi yang menurut Prabowo dibiayai Bappenas. Gardapaksi adalah saham bagi Republik Indonesia. Mereka tidak pernah dilatih militer.

"Karena berjasa terhadap RI, mereka dianggap ancaman. Tentara dianggap melakukan okupasi. Tapi, tentang politik bumi hangus dan sebagainya saya tidak tahu," jelas Prabowo.

(*) Disarikan dari Panji Masyarakat *("Saat-Saat Genting Jenderal Prabowo", 1 Juni 1998 dan "Dua Kubu yang Beradu", 25 Agustus 1998),* Tempo *("Aceh Sudah Lampu Merah", 29 November 1999).*

Panji Masyarakat
25 Agustus 1999

Letnan Jenderal Prabowo sampai menjelang

PERSPEKTIF

Kasus Letnan Jenderal Prabowo

negara yang berlebih-lebihan ke industri mobil Timor, milik Tommy | madona.

D&R
30 Mei 1998

#6

Prabowo Subianto adalah komandan yang bisa menyiram jiwa anak buahnya tatkala diliputi resah. Ia tahu kapan menjadi seorang "bapak" yang penuh perhatian atas kesejahteraan anak buahnya. Ia sangat dekat dengan prajurit-prajurit level bawah seperti prajurit dua. Alkisah, saat para serdadu yang ditugaskan di Timor Timur dilanda frustasi karena terlalu lama di sana, sementara prajurit pengganti tak kunjung datang, maka kerap mereka dengan spontan menembakkan senjata ke berbagai arah. Untunglah Prabowo dapat menentramkan mereka kembali.

Prabowo sangat memperhatikan kesejahteraan prajurit-prajurit tempur berpangkat rendah itu. Jika punya uang lebih, semuanya Prabowo gunakan untuk kesejah-

teraan dan fasilitas anak buahnya. Itu pengakuan Mayjen TNI Adang Ruchiatna yang pernah menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana. Prabowo tidak hanya bisa memberi, tetapi juga mampu mendatangkan uang. Pangdam Jaya Mayjen TNI Sutiyoso tak bisa menampik kalau Prabowo adalah sosok yang bisa mengurus uang; entah dari mana dana itu berasal.

Selain dicibir sebagai "mentang-mentang menantu", Prabowo juga luas dibisikkan sering tidak sabar dengan prosedur organisasi. Bahwa Prabowo bisa membeli dan memasukkan senjata dan fasilitas untuk pasukannya di luar ketentuan markas besar.

Saking royalnya, Prabowo sering dikritik dan dicibir bahwa ia hanya memancing loyalitas mereka saja.

(*) Disarikan dari D&R *("Kasus Letnan Jenderal Prabowo", 30 Mei 1998), Panji Masyarakat ("Jika Meteor Bertumbuk", 1 Juni 1998).*

"Itu tuduhan gila. You, pernah perang, tidak? Tidak mungkin ada orang yang mau mati hanya untuk uang."

| Letjen TNI Prabowo Subianto

Kong, Swiss, dan Inggris. Pengembaraan itu bermula dari tuduhan bahwa ayahnya bersekongkol dengan PRRI/Permesta. Selain itu, sang ayah memilih ke luar negeri gara-gara berselisih paham dengan Presiden Sukarno.

Prabowo bersama orangtuanya baru mudik ke Indonesia pada 1967, saat Sukarno sudah lengser keprabon. Tapi, gara-gara lama di negeri orang, dia sempat kesulitan belajar bahasa Indonesia. Faktor bahasa ini ikut memperlama masa belajarnya di Akabri. Tapi, sekali lagi, terdengar suara sumbang mengenai perpanjangan masa belajar ini. Ada yang menganggap otak Prabowo kurang encer.

Prabowo membantah anggapan ini secara tidak langsung. Pada 1980, saat mengikuti pendidikan infantri di Amerika Serikat, dia termasuk lulusan terbaik (*distinguished graduate*). Selepas itu, dia mengikuti pendidikan antiteroris di satuan khusus Jerman, GSG-9. Di situ dia pun tercatat sebagai salah seorang peserta terbaik.

Hebatnya, Prabowo tak mau melejit sendiri. Buktinya, pada 1996, dia bekerja sama dengan University of Hull di Inggris Utara. Dari situ, para perwira Kopassus boleh mengikuti program pendidikan setara S2 di Pusat Kajian Indonesia di universitas tersebut. Walhasil, tujuh perwira Kopassus menggondol ijazah setara master pada 1997. Ini juga bukti betapa sifat suka membantu mengalir dalam darah Prabowo.

Di mata para kaum arif dan bijaksana, yang suka memberi pasti murah rezeki. Ini pas buat Prabowo yang cepat melejit dalam karier kemiliterannya. Dia tercatat sebagai perwira pertama lulusan Akabri (1974) yang menyandang bintang tiga saat ditunjuk menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Dia pun perwira pertama di angkatannya yang menjadi brigadir jenderal saat menjadi Danjen Kopassus.

Prabowo melejit setelah merintis dengan susah payah dari medan pergolakan di Timtim. Apa boleh buat, ada pula suara sumbang mengenai kenaikan karier itu. Ada orang yang menganggap kenaikan itu gara-gara hubungan khusus dengan mantan Presiden Soeharto. Prabowo memang menikah dengan Siti Hedijati, putri Soeharto. Faktor kedekatan itu barangkali ikut "bermain". Tapi, kalau mau *fair*, kemampuan Prabowo mesti masuk hitungan pula.

Faktor kedekatan itu kini menjadi ujian buat Prabowo yang menurut wasiat Cina kuno bersifat kukuh. Barangkali dia mampu menangkis isu bahwa dia ikut bermain dalam kasus penculikan aktivis demi kepentingan Soeharto. Jangan-jangan dia justru emosional lalu dibelit kesulitan seperti tercantum dalam sifat zodiaknya. ■

Firmus Madhu Dhengi

SINAR Nusantara, 28 Juli 1998

#7

Prabowo Subianto adalah orang pertama di angkatannya yang meraih bintang saat ia dilantik sebagai komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 4 Desember 1995. Saat Kopassus dimekarkan pada Juni 1996, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat menjadi mayor jenderal dengan jabatan sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Berarti, dalam waktu kurang dari satu tahun, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat dua kali: dari semula kolonel menjadi brigadir jenderal (1995), lalu mayor jenderal (1996).

Di era Prabowo Subianto, Kopassus dimekarkan, dari tiga grup menjadi lima grup. Grup IV Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur ditujukan untuk spesialis intelijen. *Combat intelligence*. Kopassus di Serang dan Kartasura, Grup I dan II, untuk parakomando. Grup III di Bandung untuk pusat dan diklat. Sementara Grup V di Cijantung dikhususkan untuk antiteror.

Pemekaran Kopassus itu sendiri diresmikan Kasad

TERBIT 8 HALAMAN

1 Jumadil Ula 1419 H/29 Bakdomulud 1931 Alip - No: 1 - Thn Ke : XXVII

"THE RISING STAR" TIBA-TIBA REDUP

Berstatus menantu presiden tak menjadi beban Prabowo berkiprah

Jakarta Buana Minggu

MEMBUAT TROBOSAN BISNIS UNTUK ANGKAT KESEJAHTERAAN PRAJURIT -■- PERNAH USUL OTONOMI LEBIH LUAS UNTUK TIMTIM, TAK DIKABULKAN OLEH PAK HARTO -■- 27 JULI 1996 KERAHKAN KOPASSUS DI SEKITAR CENDANA, DIKIRA AKAN MENGKUP SANG MERTUA -■- PERNAH TURUN PANGKAT, TETAPI JUGA PERNAH SETAHUN DUA KALI NAIK PANGKAT

* *Prabowo Subianto, Letnan Jenderal TNI "the rising star".*

SERENTETAN peristiwa sejak tumbangnya Pak Harto, 21 Mei, memojokkan posisi Letjen TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus.

Peristiwa itu antara lain "perang di tengah kota" 30 jam setelah Prof BJ Habibie dilantik jadi Presiden.

Beberapa hari kemudian ia "melepaskan" jabatan Pangkostrad dan menjadi Dan Sesko ABRI yang menurut Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto, untuk memberikan suasana baru, agar Prabowo tak hanya berpengalaman lapangan saja.

Serangkaian peristiwa itu seakan membenamkan nama Prabowo yang selama ini sering disebut sebagai *the rising star* di lingkungan ABRI.

Anak ke-empat Prof Soemitro Djojohadikusumo yang lahir di Jakarta 17 Oktober 1951, selama ini menjadi sorotan di kalangan ABRI karena statunya menjadi menantu Pak Harto setelah menikah dengan anak ke-empat Pak Harto, Siti Hediati (Mbak Titiek).

Ide otonomi khusus bagi Timtim yang akan diterapkan oleh Pemerintah Habibie, sebenarnya sudah lama disampaikan oleh Prabowo kepada Pak Harto, namun tak pernah dikabulkan.

Dalam majalah *Time*, Mei 1997, ditulis, Pak Harto pernah hilang kepercayaannya kepada Prabowo. Ketika terjadi kerusuhan 27 Juli 1996, peristiwa pengambilalihan markas PDI kubu Mega oleh kubu Suryadi yang dibantu oleh aparat, Prabowo bersama pasukan Kopassus bergerak di sekitar Jl. Cendana, kediaman Pak Harto. Saat itu Pak Harto mencurigai gerakan Prabowo itu sebagai kemungkinan kudeta.

Konon, Prabowo tanpa persetujuan Mabes ABRI berani membeli perlengkapan senjata untuk Kopassus. Ia juga sering dikunjungi oleh sejumlah pati yang lebih senior, yang bisa diartikan "menghadap". Konon Prabowo memiliki kelompok dan yang disebut-sebut adalah mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi, Mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Syamsudin, dua rekan Prabowo selama bertugas di Timtim.

TPF ABRI

Dalam upaya pengungkapan kasus penculikan para aktivis yang dilakukan oleh Kopassus,

(Bersambung ke hal VIII kol 1)

Buana Minggu
23 Agustus 1998

Jenderal TNI R. Hartono dan mengundang kritik dari berbagai pihak lantaran dianggap tidak proporsional. Tubuh Kopassus yang mekar dianggap tidak cocok dengan sebutannya sebagai pasukan elite yang ringkas dan ramping.

Namun, Prabowo menampik semua itu dengan mengatakan bahwa kedudukannya sebagai menantu Presiden Soeharto tidak menjadikannya diistimewakan dan sebaliknya tidak menjadi bebannya dalam berkiprah. "Iktikad saya baik. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa saya, untuk angkatan bersenjata saya, sedangkan mengenai penilaian, saya serahkan kepada orang lain," kilah Prabowo.

Memang, jika dilihat dari pengalamannya di pasukan, bintang pertama yang diraihnya setelah ia 20 tahun lulus dari Akademi Militer Nasional dan di usia ke-44 tahun, tidaklah istimewa. Sebab, masih ada yang meraihnya lebih cepat, yakni Jenderal TNI (Purn) Benny Moerdani yang meraih bintang satu pada usia 37 tahun. Atau, Edi Sudrajat yang menjadi brigadir jenderal pada umur 41 tahun.

Yang menarik juga dengan naiknya Prabowo Subianto di pucuk pasukan elite adalah Kopassus punya lini bisnis. Demi kesejahteraan prajurit. Dan, atas nama kesejahteraan prajurit itulah lahir Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah (Kobame). Kobame tampak bekerja sangat agresif. Mula-mula untuk tujuan sosial, merambah bisnis properti.

Adalah Ketut Abdurrahman Masagung melalui Graha Masagung Corporation menjajal kerja sama dengan Yayas-

PANJI UTAMA

Graha Cijantung: Untuk kesejahteraan prajurit

Geliat Kobame Pun Mandek

Bisnis Kopassus: Melalui Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah, mereka merambah bisnis properti. Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, kata Prabowo Subianto.

Personil adalah aset utama bagi pasukan komando. Dan karena pentingnya, kesejahteraan prajurit pun mesti dipenuhi. Tapi ini perlu dana yang tidak sedikit. Mengandalkan dana dari pemerintah jelas tak mungkin, karena itu harus mencari sendiri. Maka, Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah (Kobame) pun digerakkan lebih agresif. Yayasan yang awalnya untuk tujuan sosial, dalam sekejap berubah menjadi pelaku bisnis. Pemilik modal pun mulai melirik untuk bekerjasama.

Ketut Abdurrahman Masagung melalui Graha Masagung Corporation, termasuk yang aktif melakukan kerjasama dengan Yayasan Kobame. Boleh jadi karena dia melihat bisnis bersama tentara bakal mendatangkan untung seperti yang telah dilakukan rekan-rekannya. Sukses Liem Sioe Liong, bos Grup Salim, misalnya, tak lepas dari peran Soeharto. Atau Tomy Winata, bos Grup Artha Graha yang sukses setelah menggandeng Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat. Tak salah bila Ketut Masagung merangkul yayasan di bawah pasukan elit Indonesia itu. Ia juga menggandeng Ronny Handropriyono dan Puskopalmar untuk membangun Plaza Cilandak.

Selain dengan Ketut, kabarnya yayasan Kopassus itu sudah merambah ke Vietnam untuk terjun ke bisnis pertambangan. Tetapi, sumber *Panji* membantah hal itu. "Tidak pernah saya dengar ada bisnis Kopassus atau Prabowo Subianto di sana. Kalau Benny Moerdani bersama Sofyan Wanandi dan Robby Sumampaow, mereka memang punya bisnis tambang batu bara di sana. Namanya Ueng Bi," katanya. Hasil pelacakan *Panji* juga tidak menemukan bisnis mereka di Vietnam, kecuali tambang batubara Adaro Indonesia milik Hashim Djojohadikusumo.

Yang jelas kerjasama Ketut Masagung dengan Kobame telah melahirkan PT Kobame Propertindo. Usaha patungan ini menjadi *holding*. Mal Graha Cijantung adalah proyek perdana yang resmi dibangun pada Januari 1997. Pada pemasaran perdana Graha Cijantung kala itu, Danjen Kopassus Mayjen Prabowo Subianto sendiri ikut terjun memasarkan ruang-ruang mal senilai Rp63 miliar itu. Boleh jadi, itu pertanda gong dimulainya ekspansi bisnis Kobame. Prabowo sendiri mengakuinya, tetapi pembangunan Graha Cijantung itu bukan semata-mata bertujuan bisnis. "Ini salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan para prajurit," katanya kepada wartawan.

Kesejahteraan prajurit yang dimaksudkan Prabowo itu adalah dengan menyediakan pusat perkulakan murah dan fasilitas sosial yang bisa dinikmati prajurit dan keluarganya di mal tersebut. Tak lama kemudian, manajemen Kobame Propertindo mengumumkan rencana pembangunan gedung perkantoran, Graha Chandrasha di Jalan MT Haryono dengan investasi Rp52 miliar dan apartemen di Jalan D.I. Panjaitan senilai Rp30 miliar.

Strategi pemasaran yang ditempuh boleh dibilang luar biasa. Ketika pemasangan atap terakhir, Graha Cijantung sudah hampir terisi penuh. Sedangkan Graha Chandrasha 50% adalah *captive market*, sehingga tugas tim pemasarannya tinggal memasarkan separonya. Direktur Operasi Kobame Propertindo, Djohan Pahlawan yakin, dalam setahun sejak pembangunan dimulai, seluruh ruang kantor bakal terjual. Dengan harga sewa ruangan US$13 per meter persegi per bulan, diperkirakan dalam enam bulan sudah sampai titik impas. Demikian juga dengan apartemen yang bisa memiliki berjumlah 100 unit. Fokus tetap untuk kelas menengah ke bawah dengan tipe 75 meter persegi sampai 150 meter persegi. Harga jual tertinggi US$1.000 per meter persegi.

Dalam kerjasama dengan Ketut, selain komposisi sahamnya sama 50:50, juga ada pembagian pembiayaan. Untuk investasi Graha Cijantung, misalnya, dibutuhkan dana Rp63 miliar. Disepakati modal setor sebesar 30% atau sekitar Rp20 miliar yang seluruhnya ditanggung Ketut. Sedangkan, Kobame hanya menyetor lahan seluas 1,6 hektar berupa sertifikat hak guna bangunan. Di atas lahan itu sebelumnya berdiri Toro Supermarket. Untuk Graha Chandrasha, Kobame juga menyetor lahan seluas 4.000 meter persegi, yang sebelumnya tanah bekas Departemen Perhubungan.

Bisnis Kobame memang berjalan mulus. Perbankan nasional juga memberi kepercayaan kepadanya. BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan Bank Pelita (milik Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto) berani menyalurkan pinjaman sindikasi sebesar Rp45 miliar. Suku bunga ditawarkan menarik dan berjangka enam tahun serta dengan waktu tenggang satu tahun. Kepercayaan bank ini pula yang membuat manajemen Kobame Propertindo makin yakin bisnisnya bakal lancar. Dukungan dari pemerintah DKI juga besar. Ini terlihat dari diizinkannya mereka membangun gedung perkantoran di jalan MT Haryono sampai 26 lantai.

Bagaimana perkembangan dua gedung itu kini? "Tidak kami turuskan," kata Isye, humas Kobame Propertindo. Boleh jadi Kobame hanya menekuni bisnis properti yang menjanjikan keuntungan besar. Atau karena Prabowo tak lagi menjabat Danjen Kopassus? ■

RIZAGANA
LAPORAN: KIKI MOHAMMAD HIKMAT

30 PANJI MASYARAKAT NO. 15 TAHUN II • 29 JULI 1998

Panji Masyarakat
29 Juli 1998

an Kobame. Mungkin Masagung terpengaruh oleh kesuksesan Liem Sioe Liong (Grup Salim) atau Tomy Winata (Grup Artha Graha) yang berbisnis dengan tentara. Bukan hanya dengan pasukan elite ini Masagung menanamkan modal, tetapi juga dengan Pusat Koperasi Angkatan Laut Marinir (Puskopalmar) membangun Plaza Cilandak. Yayasan Kopassus juga menjalin kerja sama dengan tambang batubara Adaro Indonesia yang dalam kepemilikan sahamnya ada nama Hashim Djojohadikusumo.

Dari kerja sama antara Kobame dan Graha Masagung Corporation lahirlah Mal Graha Cijantung, proyek perdana yang resmi dibangun pada Januari 1997. Pada pemasaran perdana Graha Cijantung, Danjen Kopassus Mayjen Prabowo Subianto sendiri ikut terjun memasarkan ru-

Panji Masyarakat
30 Desember 1998

ang-ruang mal senilai Rp63 miliar itu. Ini permulaan dan gong dari ekspansi bisnis Kobame.

Semuanya dimaksudkan bukan sekadar bisnis, tetapi kesejahteraan prajurit. Kesejahteraan prajurit yang dimaksudkan Prabowo adalah dengan menyediakan pusat perkulakan murah dan fasilitas sosial yang bisa dinikmati prajurit dan keluarganya di mal tersebut. Tak lama kemudian, manajemen Kobame Propertindo mengumumkan rencana pembangunan gedung perkantoran: Graha Chandrasha di Jalan MT. Haryono dengan investasi Rp52 miliar dan apartemen di Jalan D.I. Panjaitan senilai Rp30 miliar.

Tatkala pemasangan atap terakhir, Graha Cijantung sudah hampir terisi penuh. Sedangkan, Graha Chandasha 50% adalah captive market sehingga tugas tim pemasarannya tinggal memasarkan separuhnya.

Bila ruang kantor yang dibanderol sewa US$13 per meter persegi per bulan dan diperkirakan enam bulan sudah kembali impas, apartemen terus digenjot pemasarannya. Apartemen Graha Chandrasha tersedia dalam 100 unit dengan fokus kelas menengah ke bawah dengan tipe 75 me-

ter persegi hingga 150 meter persegi. Harga jual US$1.000 per meter persegi.

Model perjanjian dengan Ketut adalah pihak Kobame, misalnya, menyediakan lahan di Cijantung seluas 1,6 hektar berupa sertifikat hak bangunan. Sementara Ketut memberi modal setor Rp20 miliar atau 30%.

Mulus betul bisnis Kobame Propertindo ini. Bersama BRI, Bank Pelita yang dimiliki adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, berani menyalurkan pinjaman sindikasi sebesar Rp45 miliar. Apalagi, pemerintah DKI mengizinkan membangun gedung perkantoran Graha Chandrasha hingga 26 lantai di Jalan MT Haryono.

(*) Disarikan dari Panji Masyarakat *("Medan Tempurnya di Ladang Bisnis", 7 Oktober 1998; "Geliat Kobame Pun Mandek", 29 Juli 1998; "Duit Si Cukong yang Turun dari Langit", 30 Desember 1998),* Tajuk *("Ketika ABRI Jadi Sasaran Tembak", 23 Juli 1998),* Sinar *("Antara Kelinci dan Libra", 28 Juli 1998),* Buana Minggu *("The Rising Star Tiba-Tiba Redup: Berstatus menantu ...", 23 Agustus 1998),* D&R *("Prabowo, the Rising Star yang Pudar", 30 Mei 1998).*

KERAJAAN BISNIS ABRI

ANGKATAN DARAT

INKOPAD
- Westin Hotel

YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
- Dhanayasa Arthatama (properti, Tommy Winata)
- Bank Artha Graha (bank, Tommy Winata)
- Sempati Air (penerbangan, Tommy Soeharto dan Bob Hasan)
- International Timber Corp. of Indonesia (Bambang Trihatmodjo dan Bob Hasan)

YAYASAN TRI USAHA BHAKTI
- Membawahi 22 perusahaan, termasuk Asuransi Cigna Indonesia

ANGKATAN LAUT

INKOPAL

YAYASAN BHUYAMCA
- Admiral Lines (pelayaran)
- Yala Trading (impor)
- Bank Bahari (sudah dijual)
- Bhumyamca Film (produksi dan distribusi)

ANGKATAN UDARA

INKOPAU

YAYASAN ADI UPAYA
- Bank Angkasa
- Aerokarto Indonesia
- Dirgantara Air Service (cargo)
- Angkasa Puri (pelayanan pelabuhan udara)
- Cardig (ground handling)

KEPOLISIAN

INKOPOL

YAYASAN BHAYANGKARA
- Asuransi Bhakti Bhayangkara (asuransi)

YAYASAN BHARATA BHAKTI
- Perusahaan kecil: Tansa Trisna, Bharata Induk dan Sapta Pursa Mandiri

KOPASSUS

YAYASAN KOBAME
- Kobame Propindo (properti, Ketut Masagung)
- Tribuana I (Pelayaran Jawa-Sumatra)
- HPH (Jusuf Hamka)
- Distribusi Methanol

DEPHANKAM
- Bank Yudha Bhakti (bank, Hendra Gunawan)
- Asabri (asuransi)

◄ Tajuk
23 Juli 1998

▼ Panji Masyarakat
7 Oktober 1998

◄ *Kliping bagan ini menunjukkan Prabowo Subianto membangun bisnis dalam institusi ABRI bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Tradisi berbisnis dan membikin yayasan ini dan itu sudah membudaya dan tampaknya dianggap normal. Salah satu tuntutan reformasi, "Usut Harta Cendana (Soeharto)", bagian dari gurita bisnis ini.*

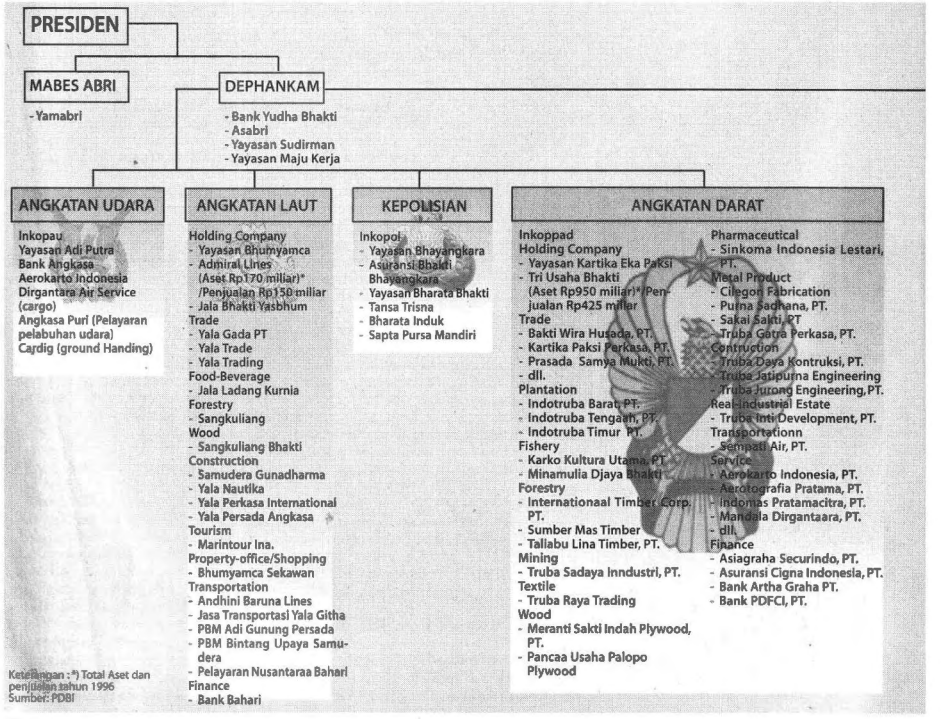

OPERASI MAPENDUMA DI IRIAN JAYA. Kalau perlu, tak hormat atasan.

GENOT WIDJOSENO

Gatra
25 Juli 1998

#8

Tahun 1996, dunia dikejutkan peristiwa penyanderaan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka terhadap tim ekspedisi Lorentz. Dari 26 anggota ekspedisi flora dan fauna itu, tujuh di antaranya warga negara asing (Jerman, Belanda, Inggris). Kelompok penyandera pimpinan Kelly Kwalik itu lalu menuntut kemerdekaan Irian Jaya (Papua) dari pemerintah Indonesia. Kalau tidak, para sandera akan dibunuh satu per satu.

Prabowo mengusulkan ke Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung agar melakukan operasi pembebasan. Usulan itu ditolak lantaran ada permintaan dari negara-negara yang warganya disandera agar Jakarta menempuh jalan negosiasi dengan Kelly Kwalik. Belum lagi, medan penyanderaan yang sulit diperkirakan persentase keberhasilan operasi militer sangat kecil.

Saat Komite Palang Merah Dunia, ICRC, gagal mengemban misi negosiasi sandra, Jenderal Feisal Tanjung langsung menyetujui tatkala Prabowo kembali menghubungi.

Di atas kertas, waktu dibutuhkan untuk pembebasan sepuluh hari. Namun, Prabowo dan Kopassus hanya butuh lima hari. Korban yang jatuh sejumlah 13 orang dari ABRI dan 3 dari kalangan sipil di markas komando operasi, hanggar Timika.

Kesuksesan ini mengundang decak kagum Perdana Menteri Inggris John Major. Dalam suratnya kepada Presiden Soeharto, Major berterima kasih atas selamatnya sandera asal Inggris dan menyejajarkan Kopassus dengan SAS Inggris dan Special Force Inggris.

(*) Disarikan dari Gatra *("Batu Sandungan dari Baret Merah", 25 Juli 1998),* Panji Masyarakat *("Jika Meteor Bertumbuk", 1 Juni 1998).*

MAJALAH BARET MERAH

ANGGOTA KOPASSUS DI MOUNT EVEREST. *Ingin memamerkannya kepada dunia.*

▲ Forum Keadilan
24 Agustus 1998

▼ Panji Masyarakat
1 Juni 1998

MONZA P.

Prabowo saat menerima jabatan Pangkostrad: Easy come, easy go

#9

Prabowo Subianto menunjukkan tangguhnya Kopassus saat pasukan Dakibu (Daki Serbu) sukses mengibarkan Merah Putih di puncak Everest, Nepal. Pendakian itu dilakukan dengan bekerja sama dengan pendaki sipil dari Wanadri dan Mapala Universitas Indonesia.

Obsesi menaklukkan Everest itu muncul setelah pihak Malaysia mengumumkan mengirim tim penakluk gunung tertinggi di dunia itu. Prabowo ingin Indonesia harus menjadi negeri ASEAN pertama yang berhasil menancapkan benderanya. Dan, itu terwujud di bulan keempat tahun 1996 setelah persiapan lima bulan lamanya.

(*) Disarikan dari Forum Keadilan *("Bagai Bulan Separuh Bayang", 24 Agustus 1998).*

#10

Sukses mewujudkan obsesinya kerap membawa Prabowo Subianto berselisih dengan atasannya. Salah satunya dengan Jenderal Feisal Tanjung. Gara-garanya, Prabowo mendesak Panglima ABRI itu mempercepat pengangkatannya menjadi Komandan Kopassus. Jenderal Feisal marah dan mengulur-ulur waktu penandatanganan surat pengangkatan.

Akhir 1997, tersiar kabar Prabowo berselisih dengan KSAD R. Hartono. Saat itu, Hartono mempromosikan Prabowo sebagai Pangdam III/Siliwangi. Prabowo menolak. Hartono lalu menasehati Prabowo bahwa pemindahannya ke Kodam Siliwangi justru untuk kemajuan karier Prabowo di masa depan. Prabowo tidak mau. Dia sudah puas membina kelompok pemuda Gardapaksi Timor Timur. Jenderal Hartono beralasan, tugas Pangdam jauh lebih luas dari itu, pembinaan teritorial. Prabowo mau dipindahkan, hanya jika menjadi Panglima Kostrad. Hartono tidak bisa menerimanya.

(*) Disarikan dari Forum Keadilan *("Bagai Bulan Separuh Bayang", 24 Agustus 1998).*

Panji Masyarakat
1 Juni 1998

#11

Prabowo Subianto, sebagaimana halnya dengan Ali Moertopo, orang yang amat dekat dengan Soeharto antara 1966 hingga 1974 menganggap penting untuk ikut menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan sosial politik di luar ABRI. Tetapi, bila Ali Moertopo menjalankan politik yang "mencurigai Islam", Prabowo sebaliknya. Mungkin karena ia melihat posisi strategis umat Islam dalam politik Indonesia, mungkin karena ia tidak suka kepada jenderal Benny Moerdani, jenderal yang juga pernah sangat dengan Soeharto. Atau, bisa saja Prabowo menganggap Benny beragama Katolik menyingkirkan perwira-perwira beragama Islam, ia mengambil sikap "curiga Kristen". Prabowo menjalin hubungan dengan organisasi Islam seperti Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan punya sekelompok wartawan dan cendekiawan yang mendukungnya yang membawa sikap partisan Islam yang agresif. Menurut Sumargono atau Gogon dari KISDI, "Saya merasakan betul iklim yang kondusif bagi umat Islam merealisasikan ajaran islam sejak Prabowo dan kawan-kawan, termasuk (Pangab Jenderal TNI) Wiranto yang peduli Islam jadi pimpinan ABRI.

mantan Pangdam Jaya yang kini menjadi nya, ia sering kurang bisa menangkap instruksi kesal, dan menghukum, karena gaya hidupnya

Prabowo dan Ormas Islam

Ada yang merasa kehilangan dengan penggantian Letjen Prabowo Subianto sebagai Pangkostrad: sebagian kalangan ormas Islam. Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) Achmad Sumargono menduga-duga, itu gara-gara ia dituduh terlibat dalam penculikan para aktivis prodemokrasi dan tragedi Trisakti. Jadi, kalau ternyata dia tidak terbukti terlibat, katanya, "Ya dia mestinya dikembalikan ke posisi semula."

Prabowo memang sangat dekat dengan kalangan Islam. Bukan hanya dengan KISDI, tapi juga dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Angkatan Muda Muslimin Indonesia (AMII), Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, Generasi Pemuda Mathla'ul Anwar, dan lain-lain. Konon, ia dekat pula dengan kalangan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Dia pun sempat mendekati Amien Rais dan Emha Ainun Nadjib, dua orang yang punya basis massa cukup luas.

Ketika Amien Rais mundur dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pakar ICMI karena tekanan suprastruktur tahun lalu, Prabowo datang ke kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta. "Saya datang ke sini sebenarnya karena ingin menjenguk kawan lama, Pak Amien Rais," katanya. Sayang, maksudnya itu tak kesampaian karena Amien sedang berada di Jakarta. Ia hanya ditemui Affan Gafar, Nasruddin Madjid, dan fungsionaris PP Muhammadiyah lainnya. Namun, setidaknya ia sudah menjelaskan kepada para fungsionaris mengenai latar belakang tekanan oleh suprastruktur. Dan esoknya, ia datang ke pesanggrahan Emha untuk melihat latihan Kiai Kanjeng. Dengan gaya simpatik ia menyatakan tertarik dan bermaksud mengundang kelompok kesenian ini dalam pesta ulang tahun Kopassus.

Ngomong-ngomong, sejak kapan ia dekat dengan kalangan Islam? "Itu sudah berlangsung belasan tahun," kata Hartono Mardjono, mantan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurut dia, Prabowo orang yang objektif, ingin menegakkan demokrasi. Dia tidak rela umat mayoritas dimarginalkan. "Saya merasakan betul iklim yang kondusif bagi umat untuk merealisasikan ajaran Islam sejak Prabowo dan kawan-kawan, termasuk (Pangab Jenderal) Wiranto yang peduli Islam jadi pimpinan ABRI," kata Sumargono.

Menurut sumber yang tak mau disebut namanya, sejak ia berpangkat kapten, ia sudah sering menemui M. Natsir, tokoh Masyumi. Sementara dengan kalangan aktivis muslim ia sudah kerap melakukan kontak sejak masih letnan. "Ia sudah sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam," ungkapnya.

Namun, beda lagi pendapat sumber *Panji* lainnya yang tidak mau disebut namanya. Menurut dia, pendekatan itu dalam rangka menggalang massa dukungan. Jadi, tidak murni muncul karena panggilan keislamannya. Bukti lainnya, dia cukup selektif memilih kalangan Islam untuk didekati. Hanya yang benar-benar punya basis massa yang besar. Makanya, dia dekati pula tokoh-tokoh semacam Adnan Buyung Nasution, yang notabene tidak digolongkan tokoh Islam. "Dia pasang kuda-kuda juga di tempat lain," katanya.■

HAMID AHMAD DAN IQBAL SETYARSO

Panji Masyarakat
1 Juni 1998

Ya, bukan hanya dengan KISDI, Prabowo juga dekat dengan Dewan Dakwah islamiyah Indonesia (DDII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Angkatan Muda Muslimin Indonesia (AMII), Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, gerakan Pemuda Mathla'ul Anwar, dan lain-lain. Konon, ia dekat pula dengan kalangan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dia pun sempat mendekati Amien Rais dan Emha Ainun Nadjib, dua orang yang punya basis massa cukup luas.

Tatkala Amien Rais mundur dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pakar ICMI karena tekanan suprastruktur pada 1997, Prabowo datang ke kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Menjenguk kawan lama dalam istilah Prabowo. Sayang, saat itu Amien Rais sedang berada di Jakarta. Ia hanya ditemui Affan Gaffar, Nasruddin Madjid, dan fungsionaris PP Muhammadiyah lainnya. Namun, setidaknya ia sudah menjelaskan kepada para fungsionaris mengenai latar belakang tekanan oleh suprastruktur. Besoknya, Prabowo datang ke pesanggrahan Cak Nun untuk melihat latihan Kiai Kanjeng. Dengan gaya simpatik, ia me-

Hartono Mardjono

Dia Memang Dekat

Objektif: Kedekatan Letjen TNI Prabowo Subianto dengan kelompok-kelompok Islam sudah lama berlangsung. Ini dinilai Hartono sebagai hal yang objektif.

Hartono Mardjono, aktivis organisasi Islam dan mantan anggota DPA, ditemui oleh wartawan *Panji* Iqbal Setyarso baru-baru ini. Ketika Pemilu 1977, PPP menang di DKI. Ketua wilayah PPP DKI ketika itu adalah Hartono. Dia ternyata sudah lama kenal dekat dengan Prabowo. Penilaian objektif itu, menurut Hartono, karena umat Islam Indonesia

Apa itu kata-kata dia sendiri?

Ya. Dia bilang, "Saya tidak bisa membiarkan hal itu. Apa jadinya negeri ini, kalau itu dibiarkan."

Itu sudah lama dia katakan?

Ya, belasan tahun lalu. Saya kenal dia.

Apa dia terpengaruh ayahnya dalam hal ini?

Nggak. Tidak ada kaitan sama sekali.

Apakah penyingkiran terhadap dia tak

dengan umat sejak lama.

Itu yang juga perlu klarifikasi, sebab ada isu bahwa Prabowo main dengan kelompok lainnya, bagaimana?

Tidak. Tidak benar. Komunikasinya dengan kita intens.

Lantas pencopotan jabatan dia, kan berdampak pada ikhtiar proporsionalisasi tadi?

Kita harapkan tidak terjadi begitu. Umat Islam takkan jadi diktator mayoritas. Di seluruh dunia, umat Islam paling toleran. Malah di negara lain, seperti Amerika, jenderal Islam *nggak* ada. Di sini, jenderal Kristen ada. Tetapi jangan sampai itu menjadikan terbentuknya tirani minoritas.

Kira-kira apa dampak dari pencopotan ini?

Saya kira, kalau terjadi lagi tirani minoritas, umat Islam tidak akan membiarkannya. Umat Islam tidak mau terima kalau disingkirkan lagi.

Berarti yang dilakukan Prabowo bukan upaya mendominasi, tetapi mendudukkan pada keharusan sejarah?

Bagaimanapun, kalau melihat masa depan

Panji Masyarakat
1 Juni 1998

nyatakan tertarik dan bermaksud mengundang kelompok kesenian ini dalam pesta ulang tahun Kopassus.

Sudah belasan tahun Prabowo "dekat" dengan kalangan Islam ini. Itu diakui Hartono Mardjono, mantan wakil ketua Dewan pertimbangan Agung (DPA). Sejak Prabowo berpangkat kapten, Prabowo sudah sering menemui M. Natsir, tokoh Masyumi. Sementara dengan kalangan aktivis Islam, ia sudah kerap melakukan kontak sejak masih letnan.

Mungkin karena pengaruh Prabowo pula (sebagai orang yang tidak pernah dibantah kalangan ABRI), soal "Islam" dan "non-Islam" dalam kriteria promosi telah masuk ke tubuh TNI Angkatan Darat. Ada dugaan bahwa digantinya Mayor Jenderal TNI Lumintang sebagai Pangkostrad secara cepat untuk menjaga agar tidak ada kesan "kembalinya kristenisasi Benny". Dan inilah yang tampak dalam kasus Prabowo: untuk pertama kalinya dalam sejarah ABRI sejak Orde Baru, masalah beda agama jadi menentukan. Dengan sikap partisannya, Prabowo dinilai justru tak menjaga kekompakan ABRI.

(*) Disarikan dari Panji Masyarakat *("Prabowo dan Ormas Islam" dan "Hartono Mardjono: Dia Memang Dekat", 1 Juni 1998).*

▼ Foto Keluarga Cendana (tanpa Prabowo)

Tempo
4 Januari 1999

Liberty
11 Agustus 1998

#12

Saat kekuasaan Presiden Soeharto di ujung cerita, posisi Prabowo Subianto terkucil dalam lingkaran keluarga Cendana. Sekalipun ia menantu penguasa Orde Baru, Prabowo dituding ikut terlibat dalam skenario menjatuhkan Soeharto dalam singgasana kekuasaan. Ia dianggap membiarkan aksi-aksi gerakan mahasiswa menguasai DPR. Ataupun menyokong gerakan reformasi yang dimotori Amien Rais dari Yogyakarta. Tak pelak, cap pengkhianat keluarga Cendana pun sempat dijatuhkan pada dirinya.

Buruknya hubungan antara Soeharto dengan Prabowo–tatkala Soeharto masih berkuasa–tampaknya sudah menjadi "rahasia umum". Suami dari Siti Hediati atau Titiek ini jarang sekali hadir dalam acara-acara intern keluarga.

Semisal, suatu kali ketika Tien Soeharto masih ada, seluruh keluarga Cendana makan di restoran Cahaya Kota, Prabowo lebih memilih tinggal di rumah. Prabowo lebih memilih menerima tamu-tamunya ketimbang mengikuti

MUCHDI, PRABOWO, SOEHARTO: Apakah melepaskan korban penculikan merupakan kesalahan analisis?

Detak
1-7 September 1998

acara tersebut. Padahal, kala itu, semua menantu, anak, serta keluarga besar Soeharto hadir.

Meruncingnya keretakan antara mertua dengan sang menantu mencapai puncaknya saat terjadi kerusuhan Mei 1998. Prabowo yang melihat kuatnya tuntutan rakyat agar Soeharto lengser berusaha memberikan yang terbaik bagi mertuanya. Ia berusaha membuat suatu konsolidasi. Tujuannya, jika Soeharto harus turun, prosesnya akan secara baik.

Oleh karena itu, ia berusaha merangkul sejumlah kekuatan politik yang berseberangan dengan Soeharto. Pertemuan-pertemuan dengan Amien Rais, Adnan Buyung Nasution, serta beberapa tokoh politik kritis lainnya, kerap dilakukan. Menurutnya, ia tidak mungkin konfrontasi dengan mertua. Tetapi, ia juga tidak mungkin melawan keinginan rakyat. Prabowo justru dituding menyokong gerakan reformasi. Ujung-ujungnya, ia dituduh ikut andil dalam menjatuhkan mertuanya.

(*) Disarikan dari Adil *("'The Rising Star' di Tangan Tiga Penguasa", 12 Mei 1998),* Liberty *("Prabowo 'Gigit' Pak Harto", 11 Agustus 1998),* Buana Minggu *("The Rising Star Tiba-Tiba Redup: Berstatus menantu ...", 23 Agustus 1998).*

menggantikan Jenderal TNI Subagyo HS.

Tentang karirnya yang mulus, Prabowo Pernah berujar. "Kedudukan sebagai menantu presiden tak menjadikan saya diistimewakan dan sebaliknya juga tak menjadi beban berkiprah!" (sy/bm/ dari berbagai sumber) ***

Berstatus .....

(Sambungan dari hal I)

TTS BERHADIAH

Buana Minggu
23 Agustus 1998

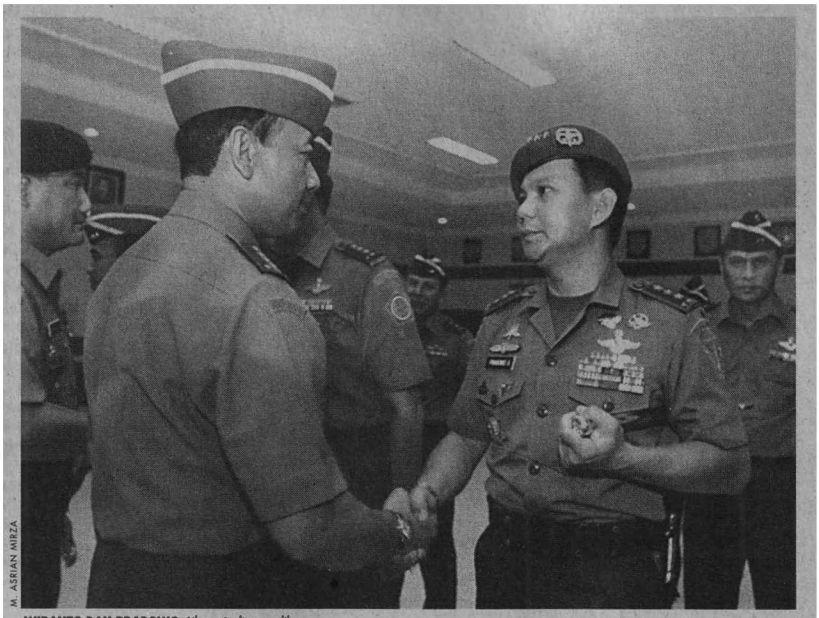

M. ASRIAN MIRZA

WIRANTO DAN PRABOWO. Lihat saja di pengadilan.

Langkah Pangab Jenderal Wiranto mengumumkan tujuh anggota Kopassus terlibat penculikan puluhan aktivis adalah pengakuan getir. Kapan Dewan Kehormatan Militer dibentuk?

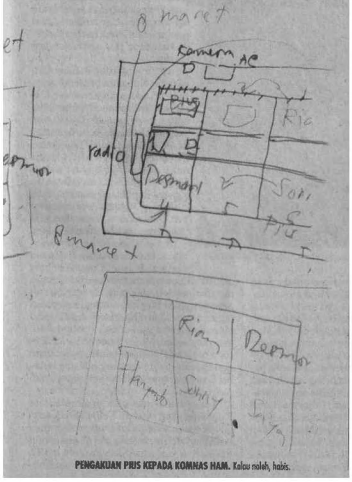

PENGAKUAN PRIS KEPADA KOMNAS HAM. Kalau salah, hakis.

Gatra
25 Juli 1998

Jawa Pos
26 Agustus 1998

LAPORAN KHUSUS

Membunuh Satu Matahari Bernama Prabowo

Pangab Jenderal TNI Wiranto tahu pasti: tidak boleh ada dua matahari di satu hari. Tidak boleh ada dua nakhoda dalam satu bidak. Karenanya, salah satu harus kalah atau dikalahkan. Dan, itulah yang benar-benar dilakukan Wiranto. Ia membunuh satu matahari di ABRI yang sangat potensial menyaingnya: Letjen TNI Prabowo Subianto.

BANYAK yang tidak menyangka Wiranto akan sedekat itu. Tanpa ragu-ragu, ia menghabisi Prabowo dengan memecat-nya (katanya secara terhormat) dari ABRI. Duet kawan akrab Prabowo: Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono dan Kol Chairawan, dikeluarkan dari struktur ABRI, kendati tidak dipecat.

Wiranto tampaknya tidak punya pilihan lain, kecuali menyikat Prabowo. Kalau tidak, menantu Soeharto ini akan menjadi kerikil tajam di sepatu Wiranto dan sangat potensial merongrong terus kepemimpinannya. Pada akhirnya, tidak mustahil Wiranto akan tersungkur tersandung batu Prabowo.

Kesempatan emas tidak akan datang dua kali. Itu yang ada di benak Wiranto. Senyampang kesempatan menghantam Prabowo ada, hal itu tidak boleh terlewatkan begitu saja. Prabowo pun KO. Wiranto menang telak.

Selesaikah episode ini? Tunggu dulu. Dengan keputusan itu, posisi Wiranto memang makin mantap dan tidak tertandingi. Konsolidasi di tubuh ABRI juga terlihat makin mulus. Dengan demikian, program-program Wiranto untuk membuat ABRI lebih profesional sekaligus membersihkan citra ABRI dari kesalahan-kesalahan di masa lalu yang mematikan diperkirakan akan lebih lancar.

Tetapi, benarkah demikian? Segampang itukah Prabowo menyerah? Betulkah ia tidak akan membalas dendam dengan sisa-sisa kekuatannya? Semuanya masih menjadi pertanyaan besar.

Ada banyak persoalan yang menghadang Wiranto. Salah satunya, tuntutan masyarakat agar Prabowo dimahmilkan tampaknya tidak bisa diabaikan oleh Wiranto. Ada kemungkinan dalam forum pengadilan itulah Prabowo akan blak-blakan dan akan "menggigit" atasan-atasannya. Inilah ujian bagi Wiranto. Akankah ia siap jika Prabowo mengungkapkan semuanya? Siapkah ia seandainya dalam pengadilan nanti terbukti ada tokoh di atas Prabowo yang terlibat dan berarti yang bersangkutan harus diperiksa? Ini juga persoalan besar yang merisaukan Wiranto.

Tuntutan masyarakat dan tokoh-tokoh militer senior juga sangat kuat agar Prabowo segera dimahmilkan. Menurut penganut ABRI Masyen (Pur) Syamsudin, sanksi di ABRI itu hanya ada dua: diberhentikan dengan hormat dan secara tidak hormat. Prabowo mestinya layak mendapat sanksi yang kedua, diberhentikan secara tidak hormat dan langsung diajukan ke mahmil. "Bukti-bukti untuk menyeret Prabowo ke mahmil sudah cukup kuat," kata mantan Pangdam XI/Lambung Mangkurat yang juga orang Kopassus ini.

Pangab masih menyiratkan dalam pernyataannya, Prabowo bisa dimahmilkan jika ada data-data kuat dan sebelas tersangka yang sedang diadili bahwa mereka mendapat perintah dari Prabowo.

Lalu, mengapa Wiranto tidak tegas saja. Apa ia masih menghitung-hitung (sisa-sisa) kekuatan Prabowo? "Dnong kosong kalau Prabowo masih punya kekuatan untuk melakukan perlawanan," sergah Syamsudin.

Menurut dia, kalau Prabowo mempunyai kekuatan riil, mestinya ia bisa melakukan sesuatu saat peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie, Mei lalu.

Risiko itu, menurut Syamsudin, mestinya harus siap dihadapi Wiranto. "Bukan Prabowo musuh di pengadilan. Siapa yang disebut Prabowo ikut terlibat penculikan, bukan saja. Itu kan keadilan. Buka saja semua biar urusannya selesai. Kalau bisa pengadilan Prabowo ke ABRI, misalnya, dengan memperuhi orang-orangnya yang masih ada di ABRI? Banyak yang menyangsikan juga.

Memang, ada yang menyebut-nyebut Prabowo ini sedikit banyak mempunyai kapasitas seperti Benny Moerdani, yang mampu terus mempengaruhi ABRI melalui orang-orangnya, kendati secara formal ia sudah dibabat Soeharto.

Tetapi, hal itu dibantah banyak penganut. Dalam bincang-bincang dengan *Jawa Pos* beberapa waktu lalu, pengamat politik Dr Nurcholish Madjid (yang mengutip pernyataan salah seorang tokoh Islam yang dekat dengan Benny Moerdani) mengatakan bahwa Prabowo ternyata jauh di bawah Moerdani. Manuver politiknya ketika menemui Habibie dan mengatakan siap membantu asal diberi jabatan sebagai Pangab (malam sebelum penyerahan kekuasaan Soeharto) menunjukkan bahwa Prabowo belum canggih dalam berpolitik. Kecil kemungkinan ia bisa merongrong Wiranto dari luar struktur.

Selesaikah persoalan Wiranto? Tentu belum. ABRI tidak bisa membersihkan citranya hanya dengan menyelesaikan kasus Prabowo. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Wiranto. Dan, itu tidak mudah. Sebab, ia harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang sangat besar. Dan, kekuatan-kekuatan itu tidak bisa dianggap remeh. (*)

Prabowo saat dilantik menjadi Dansesko oleh Pangab Jend. TNI Wiranto.

Sambungan dari Halaman Satu

Tak Dipecat, tapi Diberhentikan dengan Hormat

Sambungan dari Hal 1

"Saya kira bergantung pimpinan ABRI. Kalau yakin tidak melibatkan pejabat lain sebaiknya dimahmilkan saja," tandasnya.

Namun, Hasnan mengingatkan, Pangab sendiri punya hak prerogatif terhadap nasib anak buahnya. Apakah Pangab meneruskan tuntutan ke mahmil atau sekadar memberikan sanksi administratif. "Pangab tentu punya keyakinan sendiri terhadap apa yang dilakukan anak buahnya. Dan, itu hak dia (Pangab)," ingatnya.

Prabowo ke pengadilan. Bentuk pengadilannya bisa pengadilan umum atau mahmil.

"Karena ini menyangkut masalah pidana, mestinya juga berkait dengan itu. Saya menilai, ya boleh dibilang (sekarang) masih setengah-setengah," ujar Edi Sudradjat menanggapi keputusan Pangab memecat Prabowo dan menonjobkan Muchdi Pr serta Chairawan.

Edi menyatakan, DKP memang hanya berwenang memberikan rekomendasi sanksi administratif. Namun, karena tindakan Prabowo cs adalah perbuatan pidana, maka keadilan seluruh masyarakat yang menjadi ukurannya," tegasnya.

Edi yang merupakan alumnus AMN angkatan pertama dan banyak dibesarkan di Kopassus itu menilai, tindakan Prabowo sangat kental dengan urusan pidana. Karena itu, tidak ada alasan jika kasusnya sampai pada pemecatan semata. "Dilanjutkan saja ke pengadilan," tegasnya.

Mengenai bentuk pengadilan yang pas, Edi menyebut, meski kini sudah jadi orang sipil, Prabowo bisa diadili di mahmil. Pertimbangannya, saat kejadian yang bersangkut-

Untung Saya Tak Diculik

TOKOH satu ini memang harus berkomentar soal pencopotan Prabowo. Siapa dia? Sofyan Wanandi, mantan juru bicara Kelompok Jimbaran yang pernah diculik membicarai para aktivis korban penculikan. Berikut ini kutipan komentarnya:

Sofyan Wanandi

Prabowo diberhentikan dari kedinasannya di ABRI. Apa komentar Anda?

Apa pun itu, pasti ada alasan dari DKP (Dewan Kehormatan Perwira) maupun Pangab untuk memberhentikan Prabowo. Cuma saya pikir, masyarakat ingin tahu lebih banyak. Lagi pula menurut kita, *kan* harus lebih transparan. Jadi, menurut saya sebaiknya ada pengadilan militer terhadap Prabowo yang terbuka, misalnya, supaya yang menyiruh. Semua orang *kan* bertanya-tanya.

Pandangan Anda terhadap penculikan?

Apa pun alasannya, penculikan itu sebenarnya merupakan kesalahan yang besar, apalagi tidak ada yang hilang dan ditemukan. Apa ini bisa diselesaikan secara intern, tanpa hukum yang berlaku untuk semua orang? Itu, menurut saya, yang sebenarnya harus ditegaskan. Saya percaya, kalau melibatkan pun yang diperbuat Prabowo, masih ada alasannya. Prabowo sedikit dia mengetahui, kalau tidak memerintah. Saya percaya bahwa semua yang dilakukan Prabowo itu diketahui Pak Harto (mantan presiden).

Dari mana keterangan Anda itu?

Pertama, yang dilakukannya adalah menyuruh Om Liem (Sioe Liong) memecat saya dari jabatan ketua pelaksana Pramuka dan dari juru bicara Kelompok Jimbaran. Setelah itu, *dikerjain*. Om Liem sendiri yang bercerita kepada saya. Kedua, karena Soeharto *ngotot* sensor, sama saya, karena *saya* pernah statemen, sehingga *saya* dimintai untuk dipecat. Jadi, kalau sensasi pekerjaan diserahkan kepada saya, saya percaya pencopotan penculikan itu Pak Harto juga tahu. Sebab, bisnya sama. Mungkin karena beruntung saja saya tidak diculik. Sebagian besar yang diculik *kan* juga ditanya, berapa besar saya memberi uang kepada mereka? Pada Pius Lustrilanang dan lainnya, saya dibantu.

Apa harapan Anda?

Saya kira, presiden saat ini harus bertanggung jawab di depan MPR. Ini *ngotak* bisa dilakukan oleh DKP. Jadi, saya pikir bahwa MPR akan menentukan sikap, apakah presidennya diperiksa atau tidak. Sebab, apa pun yang terjadi, presiden harus di bawah MPR.

Anda kan dekat dengan Prabowo?

Saya *sudah* dekat dengan dia, tapi saya kenal dia. Saya mengadakan diskusi bersama dia. Dan, saya pernah datang ke dia untuk *ngomong* dalam rangka pemilihan tahun. Kan ada ucapan selamat tahun baru. Saya diskusi sama dia, tapi ada yang lain dari itu. (bik)

* *Jenderal TNI Wiranto.*

KERUSUHAN SEPUTAR DI JAKARTA MENURUT ASIAWEEK:

Wiranto menolak izin unit pasukan elite turun di ibukota

PRABOWO MEMBANTAH DIRINYA BERSETERU DENGAN WIRANTO -■- WIRANTO DATANGKAN PASUKAN DARI JAWA TENGAH UNTUK AMANKAN IBUKOTA -■- SEPEKAN SEBELUM KASUS TRISAKTI MUNCUL, EMPAT ANGGOTA BRIMOB RAIB BERSAMA SERAGAMNYA -■- DUA PENGACARA SENIOR DI MARKAS KOSTRAD MENANYAKAN KE-TERLIBATAN PRABOWO DALAM PENCULIKAN AKTIVIS

BAGIAN KE-DUA

* *Letjen TNI Prabowo Subianto.*

Jakarta (Buana Minggu)

SITUASI Trisakti pada 12 Mei sore semula tampak tenang. Setelah gagal menuju gedung DPR/MPR, mahasiswa yang kecewa menyulut aksi keributan. Jam 15.00, Adi Andoyo kembali ke kantornya. Setengah jam kemudian, asistennya menelepon bahwa polisi mengancam akan memakai kekuatan jika 200 lebih mahasiswa itu masih di jalanan menggelar aksi dan tidak mau kembali ke kampus.

Jam 16.15, kesepakatan pun tercapai. Mahasiswa dan polisi perlahan-lahan meninggalkan garis batas lima meter. Sebagian besar mahasiswa kembali ke kampus. Yang lain masih rileks di jalanan atau berkerumun di sekitar penjaja makanan yang ada di tepi jalan. Ketua Senat Mahasiswa Julianto Hendro tampak menenggak air kemasan.

Beberapa personel polisi juga memanfaatkan waktu dengan melepas ketegangan itu. Senjata-nya tampak tenang. Andi Andoyo pun bertolak pulang. Seperempat jam kemudian, 16.30, seorang pria yang berdiri di tengah kerumunan mahasiswa berteriak agar para mahasiswa menghentikan protes. Mahasiswa meneriaki pria itu sebagai agen intelijen dan mulai menggebukinya ketika dia berusaha lari sejauh 50 meter menuju garis polisi. Kemudian diketahui bahwa pria itu bernama Masud, mahasiswa *drop-out* Trisakti.

Polisi maupun militer tidak mengklaim Masud adalah orangnya.

Gara-gara Masud, suasana menjadi tegang kembali. Kepala Satpam Trisakti Arri Gunarsa dan Julianto meminggatkan rekan-rekannya agar tetap tenang dan kembali ke kampus. (Bersambung ke hal VIII kol 1)

Buana Minggu
8 Agustus 1998

#13

Pangab Jenderal TNI Wiranto tahu pasti: tidak boleh ada dua matahari di satu hari. Tidak boleh ada dua nakhoda dalam satu biduk. Oleh karena itu, salah satu harus kalah atau dikalahkan. Dan, itulah yang benar-benar dilakukan Wiranto. Ia "membunuh" satu matahari di ABRI yang sangat potensial menyainginya: Letjen TNI Prabowo Subianto.

Banyak yang tidak menyangka Wiranto akan senekat itu. Tanpa ragu-ragu, ia menghabisi Prabowo dengan memecatnya dari ABRI setelah Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengeluarkan rekomendasi. Wiranto tampaknya tidak punya pilihan lain kecuali menyikat Prabowo.

Ada yang menyebut Prabowo Subianto sedikit banyak punya kapasitas seperti Benny Moerdani yang mampu terus mempengaruhi ABRI melalui orang-orang binaannya yang masih aktif kendati secara formal ia sudah dihabisi Soeharto.

Tetapi, banyak yang menyangsikan kapasitas besar itu ada pada Prabowo. Nurcholish Madjid, misalnya, menganggap kapasitas Prabowo jauh di bawah Benny. Manuver politiknya ketika menemui Habibie dan menyatakan siap membantu asal diberi jabatan sebagai Pangab menunjukkan bahwa Prabowo belum canggih dalam berpolitik.

Wiranto tidak selesai begitu saja pekerjaannya setelah "berhasil menyelesaikan" (kasus penculikan) yang dilakukan Tim Mawar yang membuat Prabowo Subianto dipecat dari ABRI. Pekerjaan terbesarnya adalah membersihkan citra dirinya sendiri yang mulai diusik oleh publik. Misalnya, kasus Aceh yang memakan ribuan korban jiwa.

(*) Disarikan dari Jawa Pos *("Membunuh Satu Matahari Bernama Prabowo, 26 Agustus 1998),* Gatra *("Menunggu Sean Connery Menyibak Misteri", 25 Juli 1998),* Buana Minggu *("Kerusuhan Seputar di Jakarta Menurut Asiaweek: Wiranto menolak izin ...", 2 Agustus 1998),* Ummat *("Kenapa Prabowo Diganti?", 1 Juni 1998),* Forum Keadilan *("Dulu 'Hijau', Kini 'Merah Putih'", 25 Januari 1999).*

Ummat
1 Juni 1998

LAPORAN KHUSUS

KENAPA PRABOWO DIGANTI?

Politik adalah godaan besar bagi militer, dan berpotensi mencerai-beraikannya.

Ada sejumlah peristiwa "misterius" berkaitan dengan kalangan militer, akhir pekan silam. Satu hal yang jelas adalah pengumuman Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto pada Sabtu lalu tentang pergantian Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto.

Yang mencolok, jabatan Pangkostrad sempat berpindah tangan ke Mayjen Johny Lumintang (empat angkatan di atas Prabowo), tapi hanya sehari, sebelum akhirnya diserahkan ke Mayjen TNI Djamari Chaniago. Ada dua misteri: kenapa Lumintang hanya *"caretaker"* untuk sehari; dan yang lebih penting kenapa Prabowo diganti mendadak?

Pergantian itu, apalagi dilakukan hanya sehari setelah pengunduran diri Jenderal (Purn) Soeharto, memancing sejumlah spekulasi. Dalam usianya yang baru 47, menantu mantan presiden itu telah menyandang bintang tiga. Padahal, banyak kawan seangkatannya (ia alumnus Akabri 1974) yang masih berpangkat kolonel. Ada beberapa kawannya yang berbintang satu atau dua (brigjen dan mayjen).

Spekulasi lain memberikan indikasi bahwa "ABRI tidak satu". Meski, seperti dikatakan Prabowo sendiri di televisi beberapa hari sebelumnya, ABRI tetap satu "di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Wiranto".

Spekulasi terakhir itu sudah muncul pekan lalu. Sehari sebelum Ketua DPR/MPR Harmoko mengimbau "agar Presiden Soeharto mundur", sejumlah wartawan menerima sehelai *press-release* yang intinya ABRI mendukung seruan PB Nahdlatul Ulama tentang Sidang Istimewa MPR. Namun, rilis itu —yang muncul seusai konferensi pers Kapuspen Brigjen Abdul Wahab Mokodongan— tidak menggunakan kop resmi dan tanpa tanda tangan.

Malam harinya, sejumlah koran menerima "permintaan sangat" dari Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) agar rilis itu dianggap tidak ada. Yang tak kurang mengejutkan, Pangab Wiranto esok harinya "mementahkan" *statement* Harmoko beberapa jam sebelumnya. Tidakkah itu melukiskan pertarungan internal ABRI dalam meresponsi perkembangan politik menjelang kejatuhan Soeharto?

Spekulasi terakhir ini diperkuat oleh ketegangan mencekam pada Jumat malam, setelah siang harinya Prabowo dicopot dari Kostrad. Jumat malam hingga Sabtu dini hari itu, seperti diberitakan *Suara Pembaruan* (23/5), suasana Jakarta sangat mencekam.

Di bawah judul "Isu Meletusnya 'Perang' Kota", koran itu mengabarkan turunnya ribuan personel dari satuan-satuan Kostrad, Kodam Jaya, dan Kopassus ke tempat-tempat strategis seputar daerah Istana Merdeka, kawasan kota, Menteng, dan Jalan Thamrin. Mereka bersenjata peralatan siap tempur, serta melibatkan panser, tank, dan bahkan kanon.

Pemandangan seperti itu dikonfirmasi oleh warga Jakarta dan para wartawan asing yang menginap di seputar Jalan Thamrin. Isu akan meledaknya pertempuran juga sempat menjadi berita *CNN*. Saluran TV itu, diperkuat oleh sumber diplomatik di Jakarta, menyatakan perang akan pecah pada pukul 02.00 dini hari. Tapi perang dengan siapa?

UJANG/UMMAT

Simpatik. Seorang aktivis mahasiswa di Gedung DPR/MPR, yang belakangan dievakuasi secara damai, mengatakan kepada wartawan UMMAT bahwa pihaknya memperoleh informasi sejenis dari sebuah sumber di kepolisian. "Saluran kami itu menginformasikan bahwa di Cendana sedang terjadi tembak-menembak," kata Raymond, Koordinator Pengamanan dari Forum Komunitas Mahasiswa Se-Jabotabek, yang juga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia.

Tembak-menembak pasti tidak. Bahkan pada pukul 02.30, suasana di pusat kota sudah mengendur. Sejumlah panser dan persenjataan berat milik Kodam dan Kostrad mulai menyingkir. Pukul 04.00 suasana pulih.

Namun, informasi "tembak-menembak" itulah yang berhasil "membujuk" mahasiswa untuk akhirnya, pada pukul 03.00, mau dikeluarkan dari kompleks Gedung DPR/MPR —meski dengan syarat. Para mahasiswa, menurut Raymond, hanya mau dievakuasi oleh pasukan Marinir, yang dipandang simpatik dalam menangani setiap demonstrasi mahasiswa.

Satu hal yang jelas, sejumlah saksi melihat operasi evakuasi terhadap mahasiswa dilakukan oleh gabungan dari semua satuan dan dilakukan secara simpatik. "Untuk ukuran sebuah pembersihan yang melibatkan massa 5.000 mahasiswa, ini agak baik," kata Leopord, seorang pengacara LBH yang mendampingi mahasiswa, kepada UMMAT.

Spekulasi perpecahan itu juga dibantah oleh Kadispenad Brigjen TNI Dewa Putu Ray. Seperti dikutip *Jawa Pos*, dia menolak anggapan adanya dalih politik di balik pencopotan Prabowo dari Kostrad itu. "Pergantian itu kan biasa di ABRI. Itu hanya bagian regenerasi," katanya. Prabowo kini menjabat Dansesko ABRI.

Putu Ray juga membantah dugaan bahwa pergantian Prabowo itu berkaitan dengan kasus penembakan empat mahasiswa Trisakti dua pekan silam. Penyidikan meninggalnya para "Pahlawan Reformasi" itu, menurut Putu Ray, memang belum selesai.

Sejumlah pertanyaan masih menggantung. Termasuk apakah benar redanya ketegangan itu berkaitan dengan munculnya nama Chaniago sebagai pengganti Lumintang. U

Farid Gaban, Ali Anwar, dan Maifil Eka Putra

Forum
25 Januari 1999

MUTASI ABRI

Dulu "Hijau", Kini "Merah Putih"?

Mutasi besar-besaran terjadi di tubuh ABRI. Sekadar "tour of duty" yang rutin ataukah pergeseran "warna" dari hijau ke merah putih?

Perubahan posisi dan pergantian jabatan dalam organisasi ABRI semestinya tak istimewa. "Itu kan *tour of duty, tour of area*," ujar Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI.

Tetapi, mutasi besar-besaran yang melibatkan seratus perwira di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan, Mabes ABRI, ketiga Angkatan, dan Polri yang diumumkan Mayor Jenderal TNI Syamsul Ma'arif, Kapuspen Hankam/ABRI, Senin pekan silam, tak urung mengundang tanggapan kritis. K.H. Abdurrahman Wahid, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, misalnya. "Saya enggak percaya kalau Wiranto mengatakan mutasi itu hanya proses rutin," ujarnya kepada pers seusai menerima bantuan dari Pemerintah Singapura, 6 Januari 1999.

Ia melihatnya sebagai upaya menggeser para perwira tinggi yang berparadigma "kuno", yakni mereka yang masih melihat agama (Islam) sebagai alternatif dasar negara. Kelompok ini sempat disebut sebagai "ABRI hijau". Tergesernya Letnan Jenderal TNI Fachrul Razi, Kasum ABRI, dan Mayor Jenderal TNI Zacky Anwar Makarim, Kepala Badan Intelijen ABRI, seolah memperkuat analisis Gus Dur. Apalagi keduanya digantikan perwira yang selama ini dianggap "merah-putih" alias nasionalis, yakni Letnan Jenderal TNI Sugiono (menggantikan Fachrul) dan Mayor Jenderal TNI Tyasno Sudarto (menggantikan Zacky). Sementara, di Jawa Timur—salah satu wilayah vital di Republik ini—Mayor Jenderal TNI Joko Subroto, Panglima Komando Daerah Militer, digantikan Mayor Jenderal TNI Ryamirzad Ryacudu.

Menurut Gus Dur, dengan serangkaian pergantian itu kekuasaan Jenderal Wiranto semakin solid.

Selain perubahan warna, menurut Mochtar Pabottingi, pengamat politik dari LIPI, pergeseran itu juga merupakan upaya penguatan rezim Soeharto yang hingga kini dianggap masih memiliki pengaruh cukup besar di tubuh ABRI. Dugaan semacam itu cukup masuk akal mengingat Sugiono sempat empat tahun menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Artinya, cukup dekat "bergaul" dengan lingkungan Pak Harto.

Demikian pula dengan Tyasno. Konon, dialah satu-satunya pangdam yang melaporkan langsung jabatan barunya kepada Soeharto saat dianggkat menjadi Pangdam IV Diponegoro. Kedekatan itu agaknya tak lepas dari posisi Tyasno sebelumnya: Direktur C BIA yang mengawasi pengamanan presiden, Istana, serta kediaman presiden.

Namun, analisis pengotak-ngotakan berdasarkan kedekatan dengan Soeharto itu ditepis Indria Samego, pengamat militer dari LIPI. Ia menganggap semua pimpinan pucuk ABRI saat ini "dekat" dengan Soeharto. Sebab, mereka naik semasa Pak Harto berkuasa. Kalau dia tak setuju, mereka tak mungkin bisa berada di tempatnya sekarang. Selain itu, kalau militer terkesan terkotak-kotak, menurut dia, itu tak lepas dari kelihaian Soeharto. "Dia kan 32 tahun membawahi ABRI dan melakukan politik pecah-belah. Semoga upaya Wiranto ini untuk menyamakan gerak. Sehingga, yang dipilih memang mereka yang menurut Wiranto bisa sejalan," ujar Indria.

Hal senada juga dilontarkan Salim Said, pengamat militer lain. Kalaupun para perwira itu pernah menjadi ajudan dan pengawal Soeharto, itu hanyalah sebuah elemen. Alasan utama pengangkatan mereka, "Orang-orang seperti Sugiono itu pernah menjadi bawahan Wiranto di Kostrad. Tyasno pernah menjadi anak buah Wiranto di Kodam Jaya," katanya. Artinya, Wiranto memilih mereka karena memang kenal dan tahu kualitasnya.

Lagipula, untuk menganalisis pergerakan dalam organisasi ABRI harus hati-hati agar tak terjebak pada kesimpulan yang salah. Fachrul Razi yang *lengser* dari jabatan Kasum, misalnya, dianggap "habis" oleh para pengamat pun. Tapi, kini, ia menggantikan Soeyono sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan. Posisi ini tak kalah strategis. Karena dari situlah, konon, konsep tentang pembaruan visi ABRI digodok. Antara lain: Rakyat Terlatih serta persiapan pelepasan Polri dari ABRI.

Wahid Rahmanto

LETJEN TNI SUGIONO, MAYJEN TNI TYASNO SUDARTO, DAN MAYJEN TNI RYAMIRZAD. *Semuanya memperkuat Wiranto.*

FORUM KEADILAN: NOMOR 21, TAHUN VII, 25 JANUARI 1999

23

▲ *Dua kliping ini memberi konteks bagaimana sasus pergantian secara mendadak Pangkostrad yang dilakukan Jenderal (TNI) Wiranto berkembang sedemikian rupa riuhnya. Apalagi, hal itu dilakukan sehari setelah pengunduran diri Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai presiden RI. Spekulasi muncul: ABRI tidak satu. Meskipun, seperti ditegaskan Letjen TNI Prabowo Subianto, ABRI tetap satu "di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Wiranto".*

NASIONAL

Habibie Menyerang Prabowo, Sumitro Prihatin

Habibie mengungkap penggalan rekonstruksi peristiwa 22 Mei 1998. Manuver politik atau kebiasaan Presiden yang sering salah ucap?

Tempo
1 Maret 1999

#14

Di hadapan 150-an redaktur media pada Forum Editor Asia Jerman, di Istana Negara, 15 Februari 1999, Presiden B.J. Habibie berkisah tentang peristiwa peralihan kekuasaan pada Mei 1998:

"Saya diambil sumpah tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.05. Pada 01.30, tanggal 22 Mei 1998, saya terlebih dahulu mengungsikan istri, anak, dan cucu saya ke istana ini. Saya tinggal di belakang gedung ini.

Lalu, saya mem-*briefing* anggota kabinet, kecuali Menhankam/Pangab. Semua orang dipanggil, kecuali Wiranto.

Keesokan harinya sebelum berangkat ke Istana untuk mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan, saya berbicara dengan Wiranto: saya putuskan Anda tetap sebagai Menhankam/Pangab.

Setelah mengucapkan terima kasih, Wiranto meminta izin berbicara. Dia mengatakan bahwa pasukan di bawah komando seorang yang namanya tidak usah disembunyikan lagi, Jenderal Prabowo, sedang dikonsentrasikan di beberapa tempat. Termasuk di rumah saya, Kuningan.

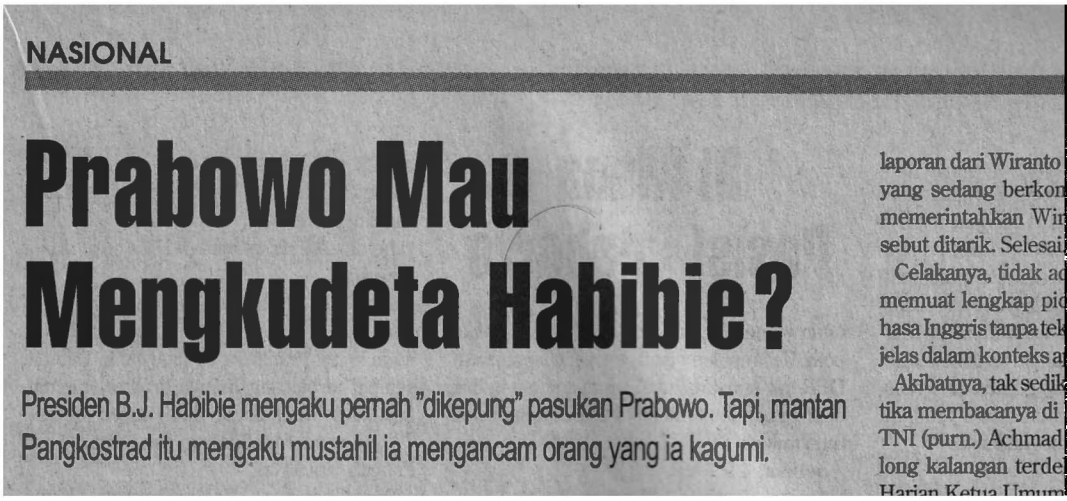

NASIONAL

Prabowo Mau Mengkudeta Habibie?

Presiden B.J. Habibie mengaku pernah "dikepung" pasukan Prabowo. Tapi, mantan Pangkostrad itu mengaku mustahil ia mengancam orang yang ia kagumi.

laporan dari Wiranto
yang sedang berkon
memerintahkan Wir
sebut ditarik. Selesai
Celakanya, tidak ad
memuat lengkap pid
hasa Inggris tanpa tek
jelas dalam konteks a
Akibatnya, tak sedik
tika membacanya di
TNI (purn.) Achmad
long kalangan terdel
Harian Ketua Umum

Forum
8 Maret 1999

Sebagai Panglima Tertinggi, saya perintahkan agar pasukan itu kembali ke barak. Saya tanya ke Anda: apa itu baik? Wiranto menjawab: Iya, Pak. Itu baik."

Perintah pencopotan Letjen TNI Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai pangkostrad itu keluar setelah Habibie mendapatkan informasi dari Pangab jenderal TNI Wiranto bahwa ada pasukan dari luar Jakarta menuju Ibu Kota, termasuk di sekitar kediaman Presiden B.J. Habibie yang baru saja dilantik. Pasukan itu berada di bawah kendali Panglima Kodam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin dan Kapolda Jaya Mayjen Hamami Nata.

Selain pasukan organik yang berkedudukan di Jakarta, juga banyak pasukan bantuan yang didatangkan dari daerah, termasuk unsur Kodam Siliwangi, yang bertugas hingga beberapa waktu setelah pelantikan Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998.

Belakangan, Wiranto meralat informasi sebagaimana yang ditangkap Presiden Habibie. Kata Wiranto, "Konsentrasi pasukan di sekitar rumah Habibie adalah hal biasa dan tidak perlu menimbulkan spekulasi politik."

(*) Disarikan dari Forum Keadilan *("Prabowo: Protes Jenderal di Pengasingan", 17 Oktober 1998; "Prabowo Mau Mengkudeta Habibie?" dan "Di Mana Posisi Prabowo", 8 Maret 1999),* Tempo *(Habibie Menyerang Prabowo, Sumitro Prihatin", 1 Maret 1999),* Gamma *("Prabowo pun Bicara Presiden", 28 Februari 1999).*

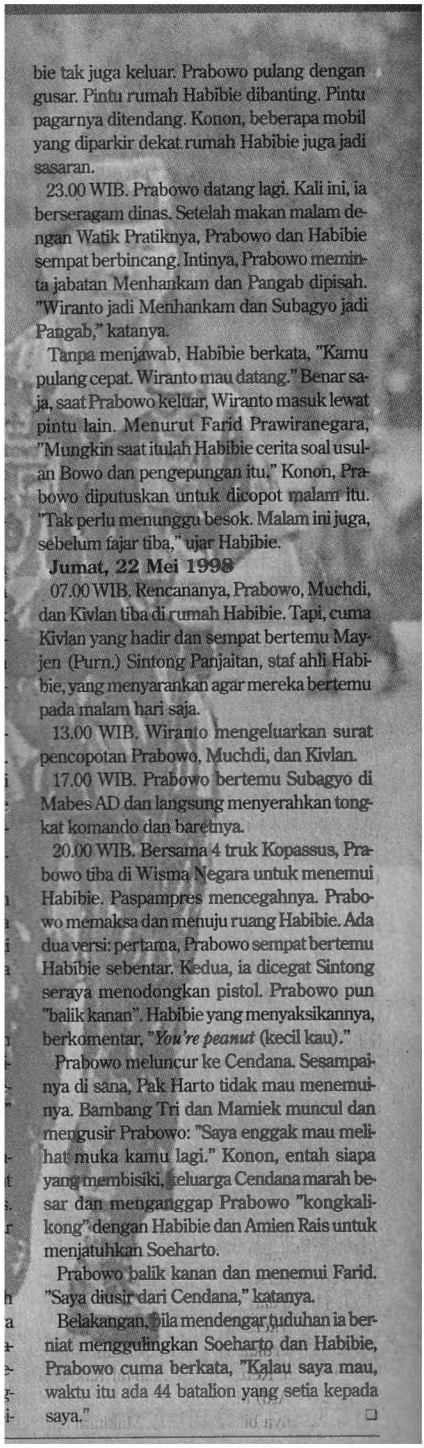

bie tak juga keluar. Prabowo pulang dengan gusar. Pintu rumah Habibie dibanting. Pintu pagarnya ditendang. Konon, beberapa mobil yang diparkir dekat rumah Habibie juga jadi sasaran.

23.00 WIB. Prabowo datang lagi. Kali ini, ia berseragam dinas. Setelah makan malam dengan Watik Pratiknya, Prabowo dan Habibie sempat berbincang. Intinya, Prabowo meminta jabatan Menhankam dan Pangab dipisah. "Wiranto jadi Menhankam dan Subagyo jadi Pangab," katanya.

Tanpa menjawab, Habibie berkata, "Kamu pulang cepat. Wiranto mau datang." Benar saja, saat Prabowo keluar, Wiranto masuk lewat pintu lain. Menurut Farid Prawiranegara, "Mungkin saat itulah Habibie cerita soal usulan Bowo dan pengepungan itu." Konon, Prabowo diputuskan untuk dicopot malam itu. "Tak perlu menunggu besok. Malam ini juga, sebelum fajar tiba," ujar Habibie.

Jumat, 22 Mei 1998

07.00 WIB. Rencananya, Prabowo, Muchdi, dan Kivlan tiba di rumah Habibie. Tapi, cuma Kivlan yang hadir dan sempat bertemu Mayjen (Purn.) Sintong Panjaitan, staf ahli Habibie, yang menyarankan agar mereka bertemu pada malam hari saja.

13.00 WIB. Wiranto mengeluarkan surat pencopotan Prabowo, Muchdi, dan Kivlan.

17.00 WIB. Prabowo bertemu Subagyo di Mabes AD dan langsung menyerahkan tongkat komando dan baretnya.

20.00 WIB. Bersama 4 truk Kopassus, Prabowo tiba di Wisma Negara untuk menemui Habibie. Paspampres mencegahnya. Prabowo memaksa dan menuju ruang Habibie. Ada dua versi: pertama, Prabowo sempat bertemu Habibie sebentar. Kedua, ia dicegat Sintong seraya menodongkan pistol. Prabowo pun "balik kanan". Habibie yang menyaksikannya, berkomentar, "*You're peanut* (kecil kau)."

Prabowo meluncur ke Cendana. Sesampainya di sana, Pak Harto tidak mau menemuinya. Bambang Tri dan Mamiek muncul dan mengusir Prabowo: "Saya enggak mau melihat muka kamu lagi." Konon, entah siapa yang membisiki, keluarga Cendana marah besar dan menganggap Prabowo "kongkalikong" dengan Habibie dan Amien Rais untuk menjatuhkan Soeharto.

Prabowo balik kanan dan menemui Farid. "Saya diusir dari Cendana," katanya.

Belakangan, bila mendengar tuduhan ia berniat menggulingkan Soeharto dan Habibie, Prabowo cuma berkata, "Kalau saya mau, waktu itu ada 44 batalion yang setia kepada saya." ❑

Jumat, 22 Mei:

20.00 WIB. Bersama 4 truk Kopassus, Prabowo tiba di Wisma Negara untuk menemui Habibie. Paspampres mencegahnya. Prabowo memaksa dan menuju ruang Habibie. Ada dua versi: pertama, Prabowo sempat bertemu Habibie sebentar; kedua, ia dicegat Sintong seraya menodongkan pistol. Prabowo pun "balik kanan". Habibie yang menyaksikannya berkomentar, *"You're peanut* (kecil kau)."

Forum
8 Maret 1999

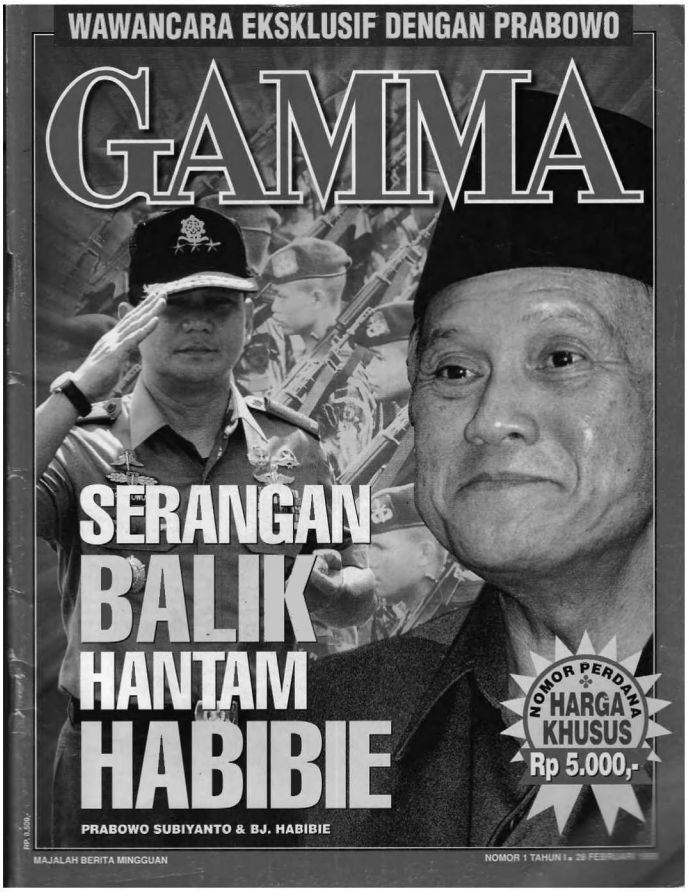

Gamma
28 Februari 1999

Prabowo pun Bicara Presiden

Bola yang dilemparkan Presiden B.J. Habibie ke arah Prabowo berbalik arah. Prabowo merasa perlu menjelaskan karena semua tuduhan itu tidak benar. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi?

SAYUP-sayup, di sebuah pojok Jakarta, terdengar suara telepon dari seberang jauh. Lalu, terjadi percakapan ringan antara dua sahabat, entah tentang apa. Antara Fadly Zon dan Letjen (Purn.) Prabowo Subiyanto yang tengah "magang" coba berbisnis di Yordania.

Wartawan GAMMA Agus Basri dan M. Asrian Mirza, yang kebetulan menyaksikan percakapan jarak jauh, coba-coba memanfaatkan peluang emas ini untuk sebuah wawancara. Dan, sambutan Prabowo pun oke. Berikut petikan wawancaranya yang berlangsung pada Sabtu sore pekan lalu.

Apa kabar Anda di Yordania?

Alhamdulillah baik-baik saja.

Tampaknya Anda sudah lama di Amman?

Ha... ha... ha... Saya ini kan sudah berhenti dari tentara. Saya *nggak* punya pekerjaan. Saya juga harus cari makan, ya toh. Saya memilih bidang bisnis. Kenapa? Ya, karena bangsa kita sekarang sedang kesulitan ekonomi. Ya, kita carilah pasar untuk Indonesia. Cari investasi kan susah. Jadi, bagi saya, ini juga medan perjuangan. Saya sedang berusaha menarik investor, membuka pasar untuk Indonesia di Timur Tengah. Potensi untuk itu memang ada. Terus terang, saya sedih, karena produk-produk Korea, Taiwan, Malaysia bisa hadir di sini. Sedan-sedan Proton banyak di sini.

Lalu, Anda di Yordania berbisnis apa?

Ha ha ha... Ya, aku coba belajarlah. Katakanlah aku magang. Pergi kerja untuk adik aku ini. (Maksudnya, Hasyim S. Djojohadikoesoemo-red).

Kalau punya potensi bisnis, Anda mengembangkan bisnis di Indonesia kan mestinya lebih bagus?

Saya nanti kalau di Indonesia akan banyak kontroversi lah. Bisa saja difitnah-fitnah lagi lah. Dituduh ini itu lagi.

Maksudnya?

Katanya kalau ada kucing hilang, Prabowo yang... (tertawa). Atau, ada kerusuhan di mana begitu, nanti dibilang Prabowo lagi... Difitnah lagi. Ini bukannya saya takut. Tapi saya berpikir, lebih baik saya konsentrasi pada keluarga saya. Saya juga punya anak satu, umur 14 tahun, tidak pernah saya urus, tidak pernah saya perhatikan. Sekarang, saya punya banyak waktu untuk itu. Memang, anak saya sekolah di AS. Jadi, ya saya bolak-balik. Kemarin, anak saya baru dari sini juga.

Kapan ada rencana kembali ke Tanah Air?

Ah, mau tahu saja kamu (tertawa).

Apa rasanya masih belum ingin?

Ah, kalau soal ingin, banyaklah yang diinginkan. Sikap saya tetap seorang prajurit. Yang namanya prajurit kalau dibutuhkan siap. Kalau tidak dibutuhkan, ya tidak apa. Tak ada masalah buat saya. Ah, saya tidak akan komentarlah.

Oh ya, Presiden B.J. Habibie membicarakan tentang Anda. Anda pun mengeluarkan keterangan pers. Kini bola kembali pada Pak Habibie?

Ada sinyalemen demikian, ya? Kalau saya kan didesak teman-teman, juga bekas anak buah saya, yang merasa resah. Jadi, saya didesak untuk memberi jawaban, ya saya beri jawaban. Itu aja. Saya sendiri sebenarnya tidak mau menimbulkan polemik. Tapi bagaimana. Itu sudah bergulir. Ada yang menuduh macam-macam, ya saya harus jawab dong. *Wong* itu *nggak bener* sama sekali, bagaimana, *hayo*. Saya tetap menghormati Pak Habibie.

Anda telah mengeluarkan *press release* setelah Pak Habibie menyatakan hal seperti itu. Dan, Pangab Jenderal Wiranto di Bandung kemarin juga menegaskan memang ada konsentrasi pasukan di tempat-tempat vital di Jakarta waktu itu, dan itu di bawah komando operasi Pangdam Jaya. Ini

M. ASRIAN MIRZA

PRABOWO SUBIYANTO. *Dituduh ini dan itu.*

Gamma
28 Februari 1999

sesuai keterangan pers Anda juga. Kalau begitu, dulu Anda dicopot dari jabatan Pangkostrad itu karena apa?

Namanya, barangkali itulah politik istana. Saya *nggak* tahu itu.

Anda menilai Pak Habibie sekarang bagaimana?

Saya juga heran. Saya sama sekali tidak mengerti, ya kenapa beliau sampai percaya laporan itu, ya. Mungkin laporan-laporan itulah yang beliau percaya. Tapi yang jelas itu tidak benar.

Jadi?

Sebenarnya waktu itu, saya mengharapkan, kalau beliau waktu itu langsung *manggil* saya, beliau kan bisa dengar sendiri, bisa klarifikasi. Dan, sebenarnya banyak orang yang dekat dengan beliau yang punya jalur ke saya. Saya *nggak* mengerti. Ada Jimly Ash-Shiddieqy, ada Watik Pratiknya yang sehari-hari di situ. Makanya, saya juga kurang mengerti. Saya jadi hanya menjelaskan saja bahwa semua itu tidak benar. Tidak ada pasukan Kostrad yang di sekitar rumahnya Pak Habibie. Yang ada itu pasukan Kopassus, dan itu bukan di bawah perintah saya. Itu semua ada protapnya, ada kendalinya. Itu bisa ditanya, bisa dicek.

Kan jadinya kasihan itu prajurit-prajurit—yang siang malam kehujanan menjaga—malah dinilai mengancam. Kasihan kan mereka. Jadi, saya kira persepsi itu keliru. Mungkin ada unsur yang sengaja melakukan disinformasi, saya kira. Apalagi, selaku Panglima Kostrad, saya juga tidak memiliki wewenang komando operasional atas apa pun. Terhadap pasukan Kostrad pun, saya tak memiliki wewenang komando operasional. Tugas saya hanya menyediakan pasukan secepat mungkin kepada komando pengguna, yang dalam hal ini adalah Komando Operasi Jaya sesuai dengan petunjuk pimpinan ABRI.

Apakah mungkin ada yang ingin menjatuhkan Anda?

Ya, biasalah. Mungkin dalam perebutan posisi atau apa, mungkin saya dianggap bahaya atau apa. Ya, saya harus disingkirkan. Ya, mungkin dalam politik biasa begitu, mungkinnya.

Apakah kondisi pada waktu itu memang ada semacam "permainan" pada elite militer?

Saya kira silakan saja nanti dinilai. Saya tak mau beri komentar.

Pertanyaannya kemudian, kira-kira, apakah pernyataan Pak Habibie baru-baru inilah yang melatarbelakangi pencopotan Anda dari jabatan Pangkostrad?

Ya, beliau yang *ngomong*, saya tidak tahu. Saya prajurit kan. Kalau memang saya mau berbuat tidak baik, mungkin bisa terjadi macam-macam kan. Tapi terbukti saya memang tidak berbuat. Semua orang tahu, 80 batalyon yang saya pimpin waktu itu. Tapi, saya prajurit kok, saya saptamargais, saya patuh.

Anda tahu, di depan teman-teman dan anak buah, saya selalu katakan sangat menghormati dan mengagumi Pak Habibie. Masa saya mau menelan ludah saya sendiri? Masa saya sudah ajarkan begitu pada anak buah saya, lalu saya *ngajak* mereka mau bikin *begituan* atau apa? Yang benar saja. Kan aneh itu. Justru, saya mau memberi contoh demi masa depan dan sejarah Indonesia bahwa ada budaya demokratis dan konstitusional di Indonesia. Peralihan pemerintahan adalah biasa, peralihan kekuasaan adalah biasa. Ya toh.

M. ASRIAN MIRZA

■ **BERSAMA PAK NASUTION DAN KIVLAN ZEIN.** *Tunduk pada kekuasaan sipil.*

Tentara harus tunduk pada kekuasaan konstitusional. Itu keyakinan saya, sejak kecil, dan itu saya buktikan.

Anda dekat Pak Habibie dan begitu pula sebaliknya. Pertanyaannya, kenapa Pak Habibie percaya orang atau laporan yang itu, dan kenapa kemudian berakibat pada Anda, dan itu berarti tak percaya pada Anda kan?

Ya, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Saya juga heran, dan saya sedih. *Wong* Anda juga tahu, saya ini sangat menghormati dan sangat mengagumi beliau. Sudah belasan tahun saya begitu. Saya merasa memang dekat, dan beliau juga dekat. Saya sering dipanggil beliau. Tiga kali seminggu. Dan sering sampai jam 11 malam. Yang saya sedih, kok pakai cerita-cerita saya mau berbuat mengancam, kan *gitu*. Ini kan cerita-cerita bagian dari disinformasi. Beliau mendapat laporan yang tidak benar. Jadi, saya sedih, orang yang saya hormati, yang saya bela dan junjung tinggi, malah punya persepsi seperti itu. Itu yang saya sedih. Tapi, saya yakin kebenaran akhirnya akan ketahuan juga. Tapi..., ya sudahlah. Saya kira kita harus cari hikmahnya. Yang penting kan **harus kepentingan bangsa, ya.**

Kalau begitu, sekarang apa yang perlu Anda lakukan?

Saya ini sebenarnya kan prajurit. Prajurit itu dibutuhkan siap, tidak dibutuhkan ya siap. Jadi, saya disuruh minggir, ya minggir. Dengan baik. Sebab, kami prajurit yang mengabdi kepada bangsa dan negara dan rakyat. Yang diajarkan oleh eyang-eyang saya itu *rame ing gawe sepi ing pamrih*. Jadi, saya sampai masuk liang kubur ya tetap prajurit. Walaupun tidak pakai seragam lagi, ya hati tetap prajurit.

Justru, kalau memang benar Anda, seperti juga Pak Wiranto mengatakan bahwa semua pasukan di bawah Komando Operasi, artinya semua sesuai prosedur, bukankah pencopotan jabatan Pangkostrad itu perlu dilihat lagi?

Ha...ha... Saya tak mengharapkan itu. Yang saya katakan, prajurit kalau dibutuhkan siap, kalau tidak dibutuhkan juga siap. Yang penting mengabdi. Saya orang yang selalu menjunjung tinggi konstitusi dan demokrasi, ya toh. Justru, itu saya buktikan bahwa saya tunduk kepada kekuasaan konstitusional. Saya dari dulu selalu mengatakan bahwa tentara harus tunduk pada kekuasaan konstitusional. Justru, tentara harus tunduk pada kekuasaan sipil, sebetulnya. Ya toh.

Sekali lagi, mengingat hubungan Anda dengan Pak Habibie sangat baik, berarti Anda akan terus mendukung Habibie dong?

Lo, Anda kan sudah tahu dari dulu bahwa saya ini memang sangat dekat, hormat, dan sangat mengagumi Habibie. Dalam berbagai kesempatan pada pertemuan-pertemuan juga saya kemukakan seperti itu. Makanya, saya pun mengharapkan beliau berhasil.

Berarti Anda juga senang kalau Habibie nanti terpilih lagi jadi presiden?

Ya, saya sudah lama berada di luar. Tidak tahu perkembangan di Tanah Air, ya. Jadi, ya saya belum mau berkomentar kalau soal-soal politik. Sudah ya, saya mau pergi nih. ■

▲ *Kliping ini adalah wawancara jarak jauh bantahan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto terhadap isu kudeta atas Presiden B.J. Habibie. Wawancara ini ada didahului bantahan dalam surat empat halaman yang dikirim dari Kota Amman, Yordania. Antara lain, Prabowo menyebut pengerahan pasukan dilakukan untuk mengamankan semua obyek vital, terutama demi keselamatan presiden dan wakil presiden. "Kalau saya mau (kudeta," tulis Prabowo, "waktu itu ada 44 batalion yang setia kepada saya."*

#15

Abdurrahman Wahid baru saja pulang dari Eropa untuk berobat pada Februari 1999. Di Belanda, Gus Dur diundang ceramah di Masjid Den Haag dan di KBRI di depan masyarakat Indonesia. Di Belgia, Gus Dur bertemu dengan dua orang penting, anggota parlemen Eropa yang sekaligus mantan Perdana Menteri Belgia dan sekjen serikat buruh di Belgia. Pada akhir perjalanan, Gus Dur mampir di Jerman. Di sanalah ia bertemu dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Tadinya mau bertemu Prabowo di jerman, tetapi tidak bisa karena ia berada di Kota Amman, Yordania. Ia cuma sempat berbicara lewat telepon. Dalam sambungan jarak jauh itu Prabowo menolak keras pernyataan Habibie yang menuduh Prabowo bersama pasukannya melakukan kudeta. Menurut Gus Dur, Prabowo sampai sumpah-sumpah menolak tuduhan itu. Gus Dur pun berpendirian biarlah hal itu diselesaikan lewat pengadilan saja. "Habis gimana? Habibie bilang ya, Prabowo bilang tidak. Kan, repot," cerita Gus Dur.

Prabowo juga meminta pandangan Gus Dur apakah sebaiknya dia pulang ke Indonesia atau tidak. Jawaban Gus Dur adalah sebaiknya tidak usah. "Saya bilang pada dia, kalau dia turun di Cengkareng, masih mending dia bisa pulang ke rumah. Kalau dia dicegat preman di Cengkareng lalu dibawa ke suatu rumah dan dipukuli atau *di-mek-mek* kata orang Jawa, kan repot. Sekarang kan banyak preman yang berani-berani. Orang yang marah sama dia kan banyak," cerita Gus Dur.

Hubungan dengan Gus Dur betul-betul meruncing saat Gus Dur menjadi presiden, terlontar ucapannya yang panas soal Prabowo Subianto pada Mei 2000. Gus Dur berkata,

"DI IRIAN JAYA DI MANA LEBIH DARI 100 ORANG DIBUNUH OLEH PRABOWO."

Gus Dur:

'Prabowo sampai sumpah-sumpah'

Tempat tinggal KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur akhir pekan lalu kembali ramai dikunjungi tamu, termasuk wartawan. Maklum tokoh yang disebut-sebut kontroversial ini baru pulang dari Eropa, sekaligus berobat mata.

Di Eropa, sesepuh Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] yang juga dijagokan sebagai calon presiden ke-4 ini mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh penting di sana. Tak heran, jika rumor yang beredar di Tanah Air mengatakan, kepergian Gus Dur untuk mencari dukungan politik. Benarkah? "Saya tidak membawa misi tertentu," tegas Gus Dur.

Jumat pekan lalu, Akhmad AR dari AKSI dan beberapa wartawan lainnya mewawancarai Gus Dur. Petikannya:

Apa saja yang Anda lakukan selama kelliing Eropa?

Saya jelaskan yang penting-penting saja. Pertama, saya sampai di Belanda pada hari Senin pagi [15/2]. Selama di sana saya bertemu dengan Menteri Negara Belanda, dirjen di Kementerian Kerjasama Pembangunan Belanda dan presiden Amro Bank. Dari sana saya pergi ke Kamar Dagang Belanda. Selama Di Belanda saya juga ceramah di Masjid Denhag dan di KBRI di depan masyarakat Indonesia yang ada di sana.

Saya juga bolak-balik ke Belgia yang bisa untuk istirahat dan berobat. Di Belgia saya ketemu dengan dua orang penting yaitu anggota parlemen Eropa yang juga mantan Perdana Menteri Belgia dan sekjen Serikat Buruh di Belgia. Pada akhir perjalanan, saya ke Jerman dan bertemu dengan empat orang dirjen dan seorang menteri Jerman. Di sana saya juga bertemu dengan Hashim [Djojohadikusumo], adiknya Prabowo [Subianto, mantan Pangkostrad]. Tadinya, saya mau ketemu Prabowo di Jerman, tapi sampai saya pulang *nggak* bisa karena dia ada di Amman. Saya cuma sempat berbicara dengan Parbowo lewat telepon.

Apa ada pembicaraan soal bantuan dengan menteri Belanda dan presiden Amro Bank?

Saya selalu mengatakan beberapa hal, pertama, bahwa Indonesia sekarang ini sedang siap-siap mengadakan pemilu. Kedua, meskipun ada ribut-ribut di Ambon dan di tempat lain, tetapi secara umum kondisi Indonesia masih baik. Artinya, pemerintah masih bisa jalan. Artinya, persiapan pemilu bisa dilangsungkan. Ketiga, kita perlu *international monitoring*, yaitu monitor internasional yang berfungsi untuk mengawasi pemilu. Keempat, kita perlu skala prioritas. Saya sudah bolak-balik *ngomong* begitu, *masak* kita mau menghabiskan semua waktu kita untuk *ngurusi* Soeharto saja.

Artinya, urusan pengadilan Soeharto itu bisa ditunda?

Kalau menurut saya, urusan Pak Harto itu menempati urutan yang kelima.

Maksud Anda?

Ya, ada skala prioritas. Skala prioritas yang pertama kan mengatasi krisis pangan. Kedua, mengatasi krisis ekonomi. Ketiga, menciptakan pemerintahan yang benar dan bersih. Keempat, bagaimana menjaga wilayah kesatuan negara ini. Nah, baru yang kelima itu kita *ngurusi* Pak Harto.

Bagaimana tanggapan mereka terhadap penjelasan Anda?

Sambutan mereka sangat baik. Malah mereka cukup kaget bahwa ternyata Indonesia itu tidak seburuk yang mereka duga.

Apakah soal teknis bantuan dijanjikan oleh mereka?

Tidak spesifik begitu. Mereka hanya mengatakan bahwa soal *international monitoring* akan dipikirkan lebih dalam dan sudah ada langkah-langkah ke arah itu. Kedua, soal ekonomi, mereka bilang tunggu dulu sampai pemilu. Saya bilang, jangan harus menunggu pemilu. Mulai sekarang harus sudah ada persiapan sehingga selesai pemilu bisa langsung jalan. Nah, bantuan ini ada dua sisi, yaitu pemberian bantuan *social safety net* dan penanaman modal.

Sebaiknya persoalan konsentrasi pasukan pada malam tanggal 21 Mei 1998 itu diselesaikan di pengadilan. Habis gimana? Habibie bilang, ya. Tapi, Prabowo bilang, tidak. Kan repot.

Tentang Prabowo

Beberapa hari setelah Gus Dur meninggalkan Tanah Air, nama Prabowo Subianto kembali menjadi pembicaraan. Adalah pernyataan Presiden BJ Habibie yang mengatakan, adanya konsentrasi pasukan di bawah [illegible] Prabowo yang mengepung kediamannya sehari setelah dilantik menjadi presiden. Rumor pun berkembang bahwa malam itu Prabowo bersama pasukannya akan melakukan kudeta.

Kemudian orang mendengar bagaimana Prabowo dari Amman membantah berita itu, termasuk Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto.

Lantas, pernyataan mana yang benar? "Sebaiknya, persoalana ini dibawa ke pengadilan saja," kata Gus Dur.

Selama di Eropa Anda sempat berbicara dengan Prabowo lewat telepon. Apa saja yang dibicarakan?

Dia bilang bahwa Pak Habibie dalam pidatonya menyebut-nyebut keterlibatannya dalam usaha kudeta. Tapi, Prabowo sampai sumpah-sumpah menolak tuduhan itu. Nah, pendirian saya, biarlah hal itu diselesaikan lewat pengadilan saja. Habis gimana? Habibie bilang ya, Prabowo bilang tidak, kan repot.

Apakah Prabowo memberitahukan kepada Anda bahwa dia akan pulang ke Indonesia untuk melakukan klarifikasi?

Memang, dia nanya pada saya, apakah sebaiknya dia pulang ke Indonesia atau tidak? Tapi, saya jawab *nggak* usah saja.

Apa alasaan Anda melarangnya pulang?

Ya, saya bilang alasannya. Saya bilang pada dia, kalau dia turun di Cengkareng, masih *mending* dia bisa pulang ke rumah. Kalau dia dicegat preman di Cengkareng lalu dibawa ke suatu rumah dan dipukuli atau di-*mek-mek* kata orang Jawa, kan repot. Sekarang kan banyak preman yang berani-berani. Orang yang marah sama dia kan banyak.

Tentang penyadapan telepon

Berita kontroversial lain yang beredar selama Gus Dur di Eropa adalah terbongkarnya percakapan mirip suara Presiden BJ Habibie dengan mirip suara Jaksa Agung Andi M Ghalib. Tak pelak, berbagai spekulasi pun beredar mengenai sindikat penyadapan telepon itu. Dugaan yang muncul ke permukaan pun menyebutkan adanya pihak tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintahan Habibie. Siapa? Jawaban pastinya masih sangat samar.

Namun, terbongkarnya percakapan itu telah membawa dampak pada kredibilitas Habibie yang semakin turun, dan buntutnya sejumlah anggota DPR sedang berupaya untuk memanggil Habibie.

Apa kata Gus Dur? Dalam beberapa kesempatan Gus Dur selalu mengatakan bahwa Habibie itu tidak memiliki *sense of politics*? "Mestinya, seorang presiden tidak boleh begitu," ujar Gus Dur kalem.

Apakah Anda juga mengikuti berita penyadapan telepon antara mirip suara presiden Habibie dengan mirip suara Jaksa Agung Andi M Ghalib?

Ya, saya mengikuti berita itu. Selama di luar saya dengar semua yang terjadi di sini.

Komentar Anda atas kasus ini?

Saya, bertanya dalam hati. Dalam hati saya bertanya, *lo kok* presiden sampai terlapdap? Yang kedua, *lo kok* presiden mesti *ngomong* begitu? Apa *nggak* ada lagi yang dibicarakan. Di telepon *kok* terbuka begitu? Mestinya, presiden *nggak* boleh begitu.

Menurut Anda pelaku penyadapan itu orang dalam sendiri?

Nggak ada. Orang dalam itu siapa? Salah-salah bisa militer dari salah satu gjudannya. Atau salah satu menteri. Orang-orang yang dekat dia Islam kanan itu. Ya, saya *nggak* tahu.

Apakah Anda sudah mendengar isi rekaman itu?

Belum.

Anehnya Habibie sudah mengakui bahwa itu suaranya, tapi Ghalib masih membantah?

Itulah susahnya di sini. Kita memang *nggak* tahu persis yang sebenarnya terjadi.

Ada usulan agar DPR memanggil Presiden Habibie?

Ya, saya tadi baca koran, ada anggota DPR yang mengusulkan sebaiknya Habibie dipanggil. Ya, panggil sajalah.

Artinya, Anda setuju Habibie dipanggil DPR?

Ya, bukan saya setuju atau tidak setuju. Ada yang bilang begitu. Saya kan *nggak ngerti* persoalan sebenarnya ■

Vol. 3, No. 122, 2 - 4 Maret 1999

Aksi
4 Maret 1999

Adil
18 Mei 2000

LAPORAN UTAMA

Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto, Mantan Pangkostrad

Masak Gus Dur Takut Sama Saya

Komentar Anda terhadap pernyataan Gus Dur bahwa Anda terlibat pembantaian 100 orang di Irian Jaya?

Saya kaget sedikit, tapi saya katakan saya hormat sama beliau. Saya harap ini cepat selesai. Hal ini saya sudah klarifikasi kepada Presiden Gus Dur melalui pembantu-pembantunya yang saya kenal baik. Mereka sudah menyampaikannya kepada Presiden Gus Dur.

Apa jawaban Gus Dur?

Yang saya terima dari salah satu pembantu Gus Dur. Katanya beliau sudah terima klarifikasi saya. Katanya, "Sudahlah, Anda Prabowo bekerja saja seperti biasa. Nggak usah begini dan begini." Itu pesan beliau.

Apa tuduhan ini sangat serius, sehingga membuat Anda perlu menggelar jumpa pers?

Ini sudah di atas hitam putih. Kita ini sudah kena global Barat, *western tradition*. Jadi kalau di Barat kalau ada tuduhan tidak dijawab berarti mengakui. Sedangkan di Jawa, Indonesia, bila ada tuduhan biar saja kita tidak perlu menjawab. Tetapi sekarang kalau saya tidak jawab berarti mengakui. Jadi saya terpaksa menjawab.

Apakah klarifikasi saja cukup atau ada rencana menggugat Gus Dur?

Sebenarnya saya siap bila dipanggil Gus Dur untuk klarifikasi. Saya bilang saya hormat sama beliau, saya sayang sama beliau. Saya tidak berusaha meneruskan persoalan ini. Ini hanya informasi tidak benar yang sampai ke Presiden Gus Dur?

Lalu yang benar bagaimana?

Saya menganggap itu kemungkinan salah masukan dan informasi kepada Gus Dur. Dengan berbagai motivasi. Bahwa itu tidak benar sama sekali.

Saya pernah tugas di Irian dua kali. Yang pertama 1982 akhir selama 2 minggu. Kemudian yang terakhir waktu operasi pembebasan sandera di Mapanduma dan Geselma. Pada saat itu semua pasukan yang saya pimpin tidak ada keterlibatan itu, laporan dan sebagainya.

Bukankah Anda dikenal keras dalam operasi militer?

Saya merasa selama melaksanakan tugas di daerah-daerah operasi telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebersih-bersihnya. Sejak letnan dan seterusnya banyak anak buah saya menjadi saksi bahwa kita selalu menjunjung tinggi tradisi-tradisi yang ada di bangsa kita, tradisi-tradisi kesatria. Di mana kita tidak boleh menyakiti pihak yang lemah. Terutama TNI punya tradisi sebagai tentara rakyat. Saya kira tugasnya tentara menjaga kedaulatan rakyat dan bangsa.

Misalnya kita bertugas di Timor, di Aceh, kalau kita menghadapi gerilya dan sebagainya kita harus merebut hati rakyat. Kita harus merebut simpati rakyat. Karena kita ingin menegakkan kedaulatan rakyat dan bangsa.

Jadi selama ini Anda tidak pernah membunuh orang?

Saya sebagai prajurit profesional dalam mempelajari profesi saya secara teknis ada di semua buku sejarah. Tidak ada perang antigerilya yang bisa dimenangkan kalau tidak ada dukungan rakyat. Jadi kalau perang konvensional kita merebut wilayah, kota, lapangan terbang. Tapi kalau perang antigerilya seperti separatis ini gerilya, perangnya ini tidak konvensional. Jadi perangnya tidak merebut la-

Dari awal saya cerita saya kenal Gus Dur sebelum jauh dia

ngat *concern* dan sangat risau kemungkinan terjadinya disintegrasi. Saya khawatir perpecahan bangsa. Kadang ada kekuatan-kekuatan di luar kendali. Itu yang saya khawatir. Dalam kehidupan suatu bangsa kita menghadapi proses transformasi. Proses transformasi itu mengandung risiko. Proses reformasi itu nanti bisa ada kekuatan-kekuatan energi di luar kontrol kita seperti pertikaian etnis, agama. Ini kan suatu tren dunia. Munculnya *tribalism*. Banyak futurolog sering menyampaikan seperti Naisbitt empat tahun yang lalu. Ya kita melihat Indonesia ke arah situ.

Apakah ada pembicaraan untuk mendongkel Gus Dur?

Wah, saya tidak ikut politik. Tidak ada pembicaraan itu sama sekali. Saya hanya berpandangan bahwa masalah disintegrasi harus diwaspadai. Amien sangat *concern* terhadap bangsa. Saya sampaikan juga kepada Gus Dur melalui orang-orang dekatnya. Begitu juga kepada Ibu Megawati. Juga kepada Akbar, ini kan pimpinan politik.

Apakah Anda akan menetap kembali di Indonesia?

Saya inginnya menetap di Tanah Air. Terus terang saja saya sekarang masuk di dunia bisnis. Saya lakukan itu dengan sadar. Ternyata bisnis itu tidak segampang yang dibayangkan. Katakan saja saya sedang belajar dan magang. Pengusaha-pengusaha itu bagaikan patriot-patriot yang akan membawa kemakmuran suatu bangsa.

Dulu pada masa Habibie, saya sudah pernah utarakan. Tapi dia menyarankan jangan dulu. Setelah itu Gus Dur juga menyarankan seperti itu. Pada waktu itu Gus Dur saya anggap sesepuh. Jadi saya bilang oke Gus saya manut saja. Beliau bilang nanti kalau kamu mau pulang nanti saya beri tahu kapan kamu boleh pulang. Jadi waktu ayah sakit sekitar Desember, saya minta tolong Gus Dur saya mau *nengok* ayah saya. Saya minta pulang turusan itu.

Selama 6 bulan Gus Dur memimpin bagaimana penilaian Anda?

Saya kan banyak bergerak di luar, hanya satu hal, beliau mendapat sambutan positif di dunia internasional kemudian pandangan-pandangan beliau banyak yang arif, beliau inklusif, beliau pemimpin Islam tapi tidak memberi suatu citra bahwa Islam itu menakutkan. Saya kira dia berusaha membawa kesejukan, sekarang bagaimana pembantu-pembantu beliau bisa lebih gigih menerjemahkan visi-visi beliau kepada hal yang operasional.

Tapi kan buktinya Gus Dur kadang membuat tindakan tidak arif. Misalnya tuduhan dia terhadap Anda?

Saya katakan itu kemungkinan salah informasi.

Saran Anda terhadap Gus Dur?

Saya tetap hormat sama Gus Dur. Dan saya berharap dan berdoa supaya beliau diberi kekuatan dan kesehatan untuk berhasil memimpin bangsa kita untuk keluar dari kesulitan dari krisis. Saya menganjurkan kepada semua orang yang sayang sama Gus Dur ikut membantu dan mengamankan jangan sampai beliau terima masukan-masukan yang salah. Jadi perlu ada filter. Saya berharap demikian. Saya sudah berpengalaman beberapa kali, sering pemimpin-pemimpin kita diberi masukan-masukan yang tidak benar. Itu di zaman modern disebut disinformasi. Kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Akibatnya yang rugi banyak pihak. Saya kira itu bisa diatasi dengan komunikasi yang baik.

Kenapa tidak pernah klarifikasi secara tuntas berbagai tudingan kepada diri Anda?

Prabowo Subianto memang punya jejak langkah di Papua. Sebagai prajurit, Prabowo pertama kali diterjunkan ke "medan perang" Irian Jaya selama dua pekan pada akhir 1982 seiring dengan meningkatnya gangguan keamanan di wilayah tersebut. Kedua, saat terjadi penculikan 26 anggota Tim Ekspedisi Lorentz 1995 oleh apa yang disebut pemerintah sebagai OPM atau Organisasi Papua Merdeka. OPM pada 8 Januari 1996 di Desa Mapenduma, Tiom, Jayawijaya menuntut pengakuan atas berdirinya Republik Papua Barat.

Untuk memburu para penyandera dari kelompok Daniel Yudas Kagoya yang berada di bawah pengaruh tokoh OPM Kelly Kwalik, saat itu Kodam Trikora langsung menggelar pasukan. Mereka terdiri dari satuan Batalyon 751 dari Sentani Jayapura, Yonif 752 dari Nabire, Yonif 753 Sorong, dan pasukan dari Yon Kostrad Ujungpandang.

Di luar pasukan reguler itu, ABRI masih merasa perlu mengerahkan sekompi (lebih kurang 90 orang) anggota Kopassus langsung dari markasnya di Cijantung, Jakarta. Pasukan elite baret merah ini dikenal berpengalaman di medan hutan Irian Jaya. Sebagai Danjen Kopassus, Brigjen TNI Prabowo Subianto turut mengantar anak buahnya sampai Wamena. Prabowo merupakan satu dari tiga perwira yang ditugaskan di markas Kodim Wamena. Dua orang lainnya adalah Brigjen TNI Zacky Anwar Makarim dan Brigjen TNI Suaidi Marasabessy. Mereka mendampingi Pangdam Trikora Mayjen TNI Dunidja D. sebagai panglima operasi untuk menyelamatkan sandera yang disekap gerombolan berkekuatan sekitar 200 laskar dengan 6 pucuk senjata api.

Ketika negosiasi berjalan tersendat-sendat, Mabes ABRI membentuk satuan tugas pembebasan sandera dengan menunjuk Prabowo Subianto sebagai komandannya. Kota Timika ditetapkan sebagai markas komando. Lebih kurang 600 personel dari berbagai kesatuan dikerahkan. Di antaranya satuan anti teror Kopassus dengan seragam hitam, pasukan Kostrad dari Yon 330, 328, dan 327 (Jawa Barat). Ada juga Yon 514 (Brawijaya) dan Yon 742 (Trikora). Pasukan ini dibagi dalam dua peran, yakni sebagai tim pemburu dan pasukan penyekat untuk menghadang gerakan musuh. Gerak pasukan dikendalikan dari pos komando di bawah Letkol TNI Chaerawan dari Kopassus yang berada di Desa Kenyam, tak jauh dari Mapenduma.

Setelah enam hari memburu, pasukan bersandi Pandawa 1 dan Kasuari 1 (unit pasukan anti teror Kopassus) berhasil menjepit gerombolan di sebuah lereng berhutan lebat dekat Desa Sika, Tiom, Jayawijaya.

(*) Disarikan dari Aksi *("Gus Dur: 'Prabowo sampai sumpah-sumpah'", 2 Maret 1999),* Adil *("Gaya Gus Dur Membidik Prabowo"; "Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto: Masak Gus Dur Takut Sama Saya", 12 Mei 2000), Tekad ("Prabowo Subianto: Saya Menyusun Kekuatan Apa?", 28 Februari 2000).*

Tekad
28 Februari 2000

Prabowo Subianto, Mantan Pangkostrad

Saya Menyusun Kekuatan Apa?

Ditemui pekan lalu di sebuah penginapan di Kuala Lumpur, Malaysia, **Prabowo Subianto** tak berubah dari biasanya. Bicaranya tetap ceplas-ceplos, meski obrolan sudah sampai menjelang pagi. Berikut petikan curahan hatinya kepada wartawan *Tekad* **Nasihin Masha**:

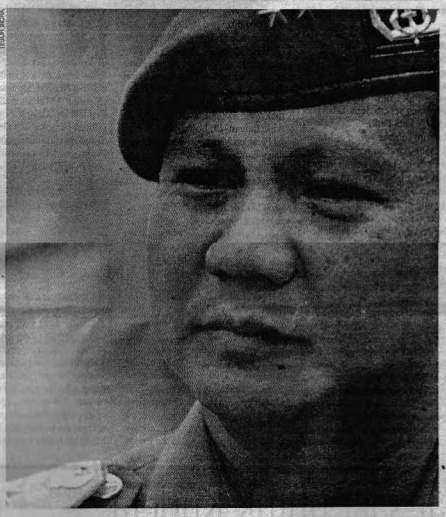

Wiranto dinonaktifkan mengesankan berakhirnya peran politik militer. Bagaimana masa depan hubungan sipil-militer di Indonesia?

Saya selalu melihat bahwa tentara itu suatu alat negara. Para pemimpin negara yang telah diberi mandat oleh rakyat itulah yang harus menentukan tentara macam apa yang dikehendaki. Itulah konsep dari supremasi sipil. Kalau kita lihat TNI dari awalnya adalah tentara yang selalu menjunjung tinggi supremasi sipil. Walaupun ada keputusan-keputusan pemerintah RI yang sebetulnya cukup menyakiti hati TNI, tapi TNI selalu patuh. Jadi kalau ditanya tentang masa depan tentara Indonesia saya melihat TNI harus dilihat dari sisi ini.

Ke depan tentunya saya masih berpendapat bahwa RI tetap perlu suatu tentara yang kuat dan profesional. Tentunya sekarang, dengan budaya demokrasi yang sedang dibangun, tentaranya yang profesional jelas harus ke luar dari politik. Itu akan lebih baik. Tentara di negara-negara demokrasi tidak berpolitik. Saya kira munculnya peran politik itu juga akibat dari kevakuman peran politik sipil sendiri. Itu juga masalah-masalah perkembangan sejarah, perang ideologi yang begitu keras pada tahun 1950-an dan 1960-an. Sekarang saya kira banyak generasi muda di TNI yang lebih yunior dari saya juga sependapat bahwa mereka mendukung TNI tidak berpolitik. Dan tentara yang profesional jelas tuntutannya, kita sangat *concern* terhadap keutuhan negara RI.

Apakah tentara tidak kaget jika tidak berpolitik? Bukankah banyak keuntungan ekonomi maupun kekuasaan yang bisa digapai lewat politik?

Saya kira tidak. Sebetulnya kalau objektif dilihat secara graduasi, khususnya yang saya rasakan waktu itu, perwira-perwira seperti seangkatan saya, apalagi di bawah saya, merasa bahwa ikut berpolitiknya tentara banyak ruginya bagi tentara sebagai institusi maupun sebagai individu.

Tapi walaupun banyak isu ini, isu kudeta, sebetulnya kalau dilihat, beberapa kali TNI membuktikan dirinya bahwa TNI tidak mengambil jalan-jalan inkonstitusional. Jadi bukan soal kaget. Saya kira TNI sudah tepat dan pada waktunya melarikan diri dari peran politik.

Ini pendapat saya dan saya kira didukung yang lainnya. Dan ini sebetulnya sudah lama dibicarakan. Mungkin masyarakat sipil tidak tahu, karena hanya dibicarakan di dalam TNI. Sudah enam tahun dibicarakan. Kita kan bukan masyarakat sipil yang bisa diskusi terbuka. Kita cuma di dalam, didiskusikan.

Apakah akan termasuk menghapus lembaga teritorial seperti yang diusulkan Agus Wirahadikusumah. Masyarakat juga menyorot keberadaan Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa, yang khas Indonesia?

Saya tidak setuju pendapat bahwa sistem teritorial itu khas Indonesia. Hampir di setiap negara mereka mempunyai sistem teritorial. Jangan salah. Saya kira kita pun dalam menyusun doktrin mencontoh Yugoslavia dan negara-negara lain. Jadi kita jangan mencampuradukkan antara peran politik dengan sistem teritorial. Sistem teritorial adalah sistem pertahanan yang dianut oleh negara-negara miskin, negara-negara yang tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki tentara yang berteknologi tinggi. Terpaksa melakukan sistem pertahanan teritorial. Ini soal organisasi yang, menurut saya, tak ada sangkut-paut dengan peran politik tentara. Jangan salah, di AS ada Kodam, di Australia ada Kodam, ada *military district*. Di Rusia ada. Di mana-mana ada.

Nyatanya tentara dan elite sipil saling memanfaatkan untuk kekuasaan lewat lembaga teritorial itu?

Nah itu tergantung penguasa politik dalam menggunakan tentara. Jangan keliru. Kita harus hati-hati dalam berbicara sistem pertahanan dan masalah peran politik tentara.

Yang mengusulkan pembubarannya justru tentara sendiri?

Salah satu perwira tinggi, iya tokh? Yang lain belum tentu. Sikap beberapa rekan saya harus kita kaji lebih dalam. Kalau saya pikir, selama kita masih miskin, sistem pertahanan teritorial masih relevan.

Lalu apa maksud Anda dengan tentara ke luar dari politik?

Saya kira tidak perlu ada tentara di DPR, DPRD. Dan tentara tidak boleh berpihak kepada parpol apa pun. Harus netral. Kalau perlu seperti tentara di luar negeri yang saya tahu masalah politik itu pun tak boleh dibicarakan di ruang makan perwira. Jadi itu tradisi-tradisi tertentu. Harus netral. Itu paling baik.

Dalam menanggapi rekomendasi KPP HAM yang berakibat penonaktifan Wiranto dari Menko Polkam, sejumlah alumni AMN 1965 melihat itu bukan soal Wiranto pribadi tapi TNI sebagai institusi?

Terus terang saja saya merasa prihatin dengan perkembangan yang berkait dengan Timtim. Tapi sebagaimana Anda tahu, saya kan selama ini berada di luar negeri, di luar struktur TNI. Saya terus terang saja minta maaf karena tidak punya bahan-bahan dan data-data yang akurat sehingga saya tidak bisa mengambil suatu kesimpulan. Tapi jelas saya sangat prihatin. Pertama, saya sangat kecewa dengan Pak Habibie yang memasukkan opsi merdeka dalam referendum. Para pemimpin Pretilin saja tidak meminta referendum dilaksanakan tahun itu. Mereka menerima opsi otonomi daerah selama 10 tahun, baru referendum. Kalau tidak salah Ramos Horta opsinya lima tahun. Bekas tujuh tahun, bahkan Xanana 10 tahun atau lebih. Saya pikir tak ada pemikiran yang strategis di pemerintahan Habibie saat itu. Nah, ini yang saya sangat kecewa.

Dan juga saya dengar pemerintah kita tidak benar-benar memperjuangkan pelaksanaan jajak pendapat yang objektif. Sehingga terjadi banyak kecurangan terhadap kelompok pro integrasi. Satu hal juga, jangan kita lupa pada pejuang-pejuang pro-Indonesia. Mereka merasa seolah-olah ditinggalkan. Ya memang terjadi rasa kecewa yang sangat mendalam bahwa seolah-olah mereka ditinggal. Bila dikatakan mereka dikorbankan. Sedangkan selama 25 tahun lebih mereka berjuang untuk Merah Putih kemudian ditinggal begitu saja, sehingga mungkin mereka mengamuk tidak terkendali.

Gus Dur mengakui salah satu alasan pencopotan Wiranto karena ditekan asing. Apakah pihak asing memiliki target melengserkan militer dalam politik?

Saya kok melihatnya, ee ... saya tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu cepat ke arah itu.

Dubes AS untuk PBB Richard Holbrooke mensinyalir adanya upaya kudeta militer di tengah isu pencopotan Wiranto ini

Kalau Holbrooke sangat *concern* terhadap kehidupan bangsa Indonesia, mungkin kita lihat positifnya saja. Tapi kalau dia terlalu campur tangan saya kira kita prihatin.

Selama Anda di luar negeri, banyak pihak asing berupaya menemui Anda?

Saya sebetulnya sekarang konsentrasi di bidang bisnis. Makanya saya juga heran kok Anda terus mengejar untuk mewawancarai saya. Anda mungkin hanya mencari untuk menaikkan oplag saja.

Dalam menghadapi tekanan terhadap militer, semua kekuatan militer berupaya bersatu. Apakah Anda juga didekati?

Terus terang saja, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin sipil juga harus benar-benar objektif dalam melihat. Tentara kan suatu alat, alatnya negara. Negara dipimpin oleh siapa, iya tokh? Jadi tentara, seperti kata ahli, adalah cermin dari masyarakatnya, *an army is mirror of society*. Anda mau tentara macam mana, ya Andalah yang menentukan. Rakyat yang menentukan, melalui wakil-wakilnya. Makanya kita perlu sistem demokrasi yang hidup, demokrasi yang benar. Tapi kalau demokrasi kita masih yang *zero sum game*, pokoknya kalau menang maka musuh saya babat habis, itu tidak dewasa. Kita menghendaki demokrasi yang benar-benar hidup dan berbudaya. Sehingga pergantian pemerintahan itu lancar, aman, damai, dan tentara menjaga keamanan.

Bagi Anda apa sih demokrasi itu?

Saya kira kita sudah sepakat secara universal, bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, walaupun tidak sempur-

▲ *Kliping ini adalah wawancara dengan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto di Kuala Lumpur Malaysia. Salah satu yang ditekankan di kliping ini adalah Prabowo membantah dengan lugas semua tudingan Gus Dur kepadanya ihwal isu "Irian Jaya".*

Prabowo Inginkan Semua Kasus Terkait Dirinya Disidik Ulang

Jakarta, Kompas

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen (Purn) Prabowo Subianto (48) menginginkan semua kasus yang dikait-kaitkan dengan dirinya, seperti kasus penculikan, penembakan Trisakti, kasus kerusuhan Mei 1998, dilakukan penyidikan ulang dan diselesaikan hingga tuntas, sehingga jelas kepastian hukumnya. Prabowo sendiri tidak berambisi aktif kembali sebagai prajurit TNI, namun menginginkan adanya pemulihan terhadap kehormatan dan martabat dirinya. Oleh karena itulah, melalui kuasa hukumnya, Prabowo meminta Pemerintah Indonesia menyatakan permintaan maaf dan merehabilitasi nama baik serta kedudukannya.

Harapan dan keinginan Prabowo tersebut disampaikan Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo, dan Amir Syamsuddin sebagai kuasa hukum Prabowo, Selasa (19/10), di Jakarta. Hadir pada forum itu, kawan-kawan dekat Prabowo, Fadly Zon, Farid Prawiranegara, Maher, Janus Hutapea, serta Nurhasyim Ilyas dan Henry Yosodiningrat sebagai kuasa hukum.

Penyidikan ulang

Sumitro menguraikan, sebagai ayah Prabowo maupun sebagai warga negara biasa, dirinya sangat menginginkan adanya penyidikan ulang mengenai peristiwa yang menyedihkan di Trisakti, Semanggi, maupun sebelum itu, misalnya kejadian lain seperti di Tanjungpriok, yang sekarang ini belum tuntas. "Supaya jelas di mana letaknya opini-opini yang menyebutkan seakan-akan ada keterlibatan anak saya. Karena saya yakin, anak saya dan anggota keluarga saya tidak pernah melibatkan diri dalam keadaan-keadaan tersebut," ungkapnya.

Sebagai ayah Prabowo, Sumitro menyatakan mendukung apa yang dilakukan anaknya tersebut, serta ikhtiar yang dilakukan pihak mana pun juga untuk menciptakan adanya keadilan. "Kami merasa bahwa keadilan itu berlaku untuk semua warga, tidak hanya pada mereka yang diberi kekuasaan, dan pada mereka yang bisa mempengaruhi saluran lembaga-lembaga hukum. Karena ini, dalam kasus Prabowo, dari mulanya sudah terdapat kesan kuat yang kemudian dibuktikan serentetan kejadian, bahwa asas keadilan ini dalam kasus Prabowo sudah kabur," ungkapnya.

Mengenai mengapa tidak sejak dulu Prabowo mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, Sumitro menambahkan, bukan soal berani atau tidak beraninya Prabowo. "Masalahnya dia sebagai pribadi merasa bahwa dia harus mematuhi beberapa kaidah, untuk menjaga sopan santun, baik terhadap mantan atasannya, maupun terhadap **orang-orang tuanya yang dianggap masih keluarganya. Itu adalah soal pribadi, saya tidak bisa menjawab dalam hal ini. Lebih baik kalau nanti dia sudah datang, pertanyaan itu disampaikan. Saya yakin dia akan membuka," jelasnya.**

Bocoran surat

Hutapea menjelaskan, permintaan maaf dari pemerintah terhadap kliennya itu didasarkan isi surat Mensesneg RI No B-597/M.Sesneg/09/1999 tertanggal 13 September 1999 kepada Komnas HAM, yang bocorannya diperoleh pihak Prabowo akhir September 1999. Oleh karena itulah "somasi" tersebut baru disampaikan saat ini.

Menurut Amir Syamsuddin, dalam surat tersebut, disebutkan bahwa "Tentang dugaan keterlibatan Letjen Prabowo Subianto dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998, yang dimulai adanya pertemuan di Makostrad, berdasarkan penyelidikan yang kami lakukan, ternyata tidak terdapat cukup bukti yang memperkuat dugaan tersebut.

Walaupun demikian, sebagai pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab akan keamanan dan keselamatan negara, maka dengan terjadinya kerusuhan tersebut, pemerintah telah memberhentikan Letjen TNI Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad dan mempensiunkan sebagai anggota TNI AD."

Alasan hukum

Berdasarkan isi surat tersebut, jelas Amir Syamsuddin, jelas bahwa pemberhentian Prabowo tidak didasarkan pada alasan-alasan yang benar menurut hukum. Tindakan Pemerintah Republik Indonesia, cq Presiden Republik Indonesia **tersebut dengan segala konsekuensi logisnya telah merusak karier Prabowo sebagai anggota TNI, mencemarkan nama baik, menurunkan martabat dan kredibilitas klien kami beserta keluarganya.**

Amir Syamsuddin menambahkan, secara pribadi Prabowo juga menyatakan sangat berkeinginan agar kasus-kasus yang dikaitkan dengan dirinya dilakukan penyidikan ulang dan diselesaikan secara tuntas. Prabowo juga siap untuk diperiksa kembali. (eki)

Kompas
20 Oktober 1999

Detak
8 September 1998

#16

Setelah hampir setahun di luar negeri, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto muncul kembali. Tetapi, kali ini yang tampil adalah ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo. Lewat ayahnya yang didampingi sejumlah kolega dan kuasa hukum menggelar sebuah forum sebagai jawaban atas bocoran surat Mensesneg RI No. B-597/M. Sesneg/09/1999 tertanggal 13 September 1999 kepada Komnas HAM. Prabowo memperoleh surat tersebut pada akhir September 1999 dan memberikan jawaban pada 19 Oktober.

Dalam somasi yang disampaikan Sumitro Djojohadikusumo, antara lain Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto menginginkan semua kasus yang dikait-kaitkan dengan dirinya, seperti kasus penculikan, penembakan Trisakti, kasus kerusuhan Mei 1998, dilakukan penyidikan ulang dan diselesaikan hingga tuntas sehingga jelas kepastian hukumnya.

(*) Disarikan dari Kompas ("Prabowo Inginkan Semua Kasus Terkait Dirinya Disidik Ulang", 20 Oktober 1999; "Pernyataan Pers Prabowo Subianto", 23 Desember 1999), Tempo ("Saya Bukan Godfather", 5 April 1999), Sinar ("Antara Kelinci dan Libra", 28 Juli 1998).

Kompas
23 Desember 1998

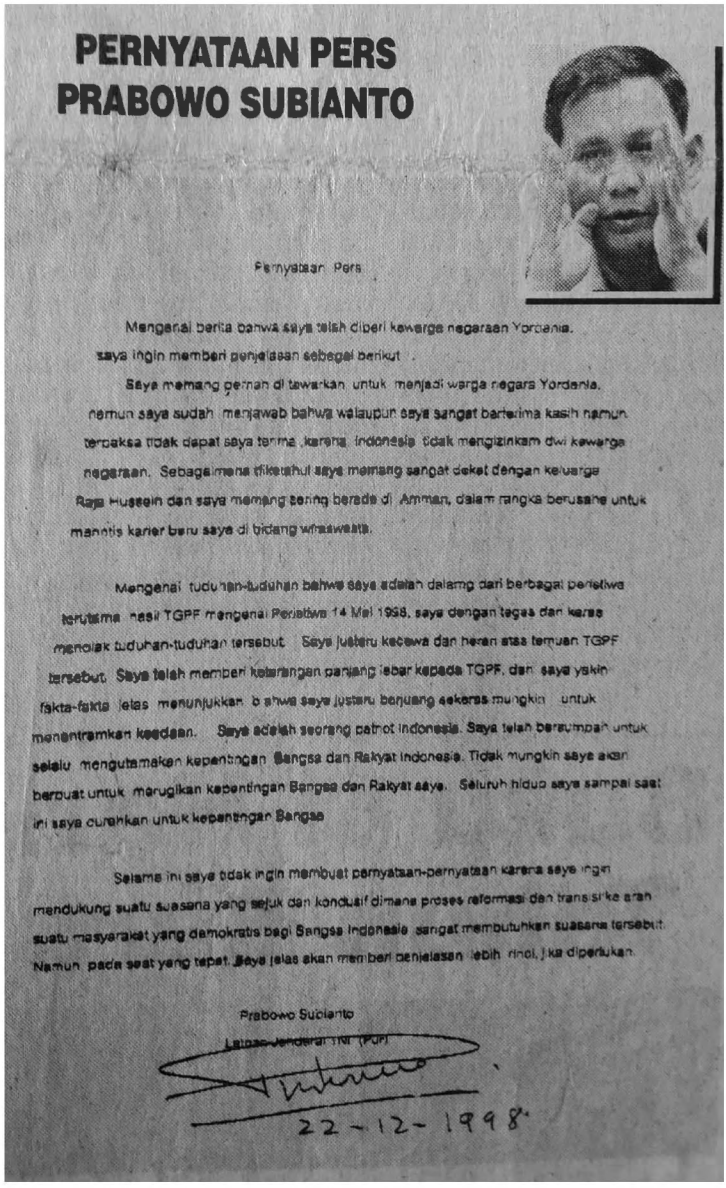

PERNYATAAN PERS
PRABOWO SUBIANTO

Pernyataan Pers

Mengenai berita bahwa saya telah diberi kewarga negaraan Yordania, saya ingin memberi penjelasan sebagai berikut :

Saya memang pernah di tawarkan untuk menjadi warga negara Yordania, namun saya sudah menjawab bahwa walaupun saya sangat berterima kasih namun terpaksa tidak dapat saya terima ,karena Indonesia tidak mengizinkan dwi kewarga negaraan. Sebagaimana diketahui saya memang sangat dekat dengan keluarga Raja Hussein dan saya memang sering berada di Amman, dalam rangka berusaha untuk mencari karier baru saya di bidang wiraswasta.

Mengenai tuduhan-tuduhan bahwa saya adalah dalang dari berbagai peristiwa terutama hasil TGPF mengenai Peristiwa 14 Mei 1998, saya dengan tegas dan keras menolak tuduhan-tuduhan tersebut. Saya justeru kecewa dan heran atas temuan TGPF tersebut. Saya telah memberi keterangan panjang lebar kepada TGPF, dan saya yakin fakta-fakta jelas menunjukkan bahwa saya justeru berusaha sekeras mungkin untuk menentramkan keadaan. Saya adalah seorang patriot Indonesia. Saya telah bersumpah untuk selalu mengutamakan kepentingan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Tidak mungkin saya akan berbuat untuk merugikan kepentingan Bangsa dan Rakyat saya. Seluruh hidup saya sampai saat ini saya curahkan untuk kepentingan Bangsa

Selama ini saya tidak ingin membuat pernyataan-pernyataan karena saya ingin mendukung suatu suasana yang sejuk dan kondusif dimana proses reformasi dan transisi ke arah suatu masyarakat yang demokratis bagi Bangsa Indonesia sangat membutuhkan suasana tersebut. Namun pada saat yang tepat, saya jelas akan memberi penjelasan lebih rinci, jika diperlukan.

Prabowo Subianto
Letnan Jenderal TNI (Purn)

22-12-1998

▲ *Surat ini dikirimkan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto via faksimili kepada Kompas untuk menanggapi dua hal sekaligus. Salah satunya terkait dengan tuduhan Tim Gabungan Pencari Fakta ihwal kerusuhan Mei 1998, lebih spesifik lagi "Peristiwa 14 Mei".*

mertuanya sendiri. Sudahlah, saya tidak mau memperpanjang. Nanti dikira dendam.

Dikhianati bagaimana?

Sebenarnya ide untuk melepaskan Prabowo dari pasukannya itu berasal dari panglimanya, jadi dari Wiranto. Kita tahu, Wiranto dan Prabowo seperti ini (*mengadu kedua kepalan tangan*). Bowo bilang, "Waduh, orang yang saya bela kok melepaskan saya dari pasukan begitu saja." Ia dilepaskan dari Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) dan ditempatkan di Bandung. Itu sangat mengecewakan Bowo.

Bukankah Prabowo juga dianggap berkhianat oleh Keluarga Cendana?

Pak Harto adalah Panglima Tertinggi (Pangti) ABRI. Jadi, kalau ada apa-apa, Bowo harus membela Pangti. Tapi, waktu itu, Bowo akhirnya mengatakan, bila rakyat menghendaki, Pak Harto akan turun, tapi harus konstitusional. Nah, itu yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh Keluarga Cendana.

Banyak tuduhan terhadap Prabowo, dari penculikan hingga usaha kudeta. Mana yang Anda percayai?

Tidak ada yang saya percayai. Bahwa Bowo itu arogan, iya. Kesannya memang begitu. Bahwa dia temperamental, iya. Tentang penculikan, dia memang menculik sembilan orang itu. Tapi perintah penculikan itu kan dia dapat dari atasannya.

Siapa atasannya?

Ada tiga: Hartono, Feisal Tanjung, dan Pak Harto. Banyak jenderal yang tahu, tapi tidak berani berbicara. Nanti di pengadilan bisa dibuka asalkan pengadilannya benar-benar adil. Dari segi kemanusiaan, penculikan memang tidak bisa diterima. Tapi, dari sudut ketentaraan, ini adalah perintah. Saya sendiri sulit melihatnya dari sudut pandang mana.

WAWANCARA

Sumitro Djojohadikusumo:

"Saya bukan Godfather"

Tempo
5 April 1999

"Bahwa Bowo itu arogan, iya. Kesannya memang begitu. Bahwa dia tempramental, iya. Tentang penculikan, dia memang menculik sembilan orang itu. Tapi perintah penculikan itu kan dia dapat dari atasannya."

*| **Sumitro Djojohadikusumo**, Ayahanda Prabowo Subianto, dalam berita Tempo ("Saya Bukan Godfather", 5 April 1999)*

PRABOWO DAN KELUARGA SUMITRO: Sempat mengembara di negeri seberang.

Sinar
9 Agustus 1998

Babak III

Teater Penculikan: Yang Hilang, Yang (Tidak) Kembali

JANUARI 1998

Di Markas Kopassus di Cijantung, Selasa pagi di bulan Januari 1998, Mayor (Inf) Bambang Kristiono memanggil Kapten (Inf) Multhazar dan Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo Budi. Ia membawa informasi penting intelijen bahwa ada kelompok yang mengadakan pertemuan di GRM Jayakarta, Jakarta Selatan. Kemudian, ia memberikan suatu dokumen penting yang berisi rencana makar dalam bentuk sabotase ekonomi. Tujuan akhirnya menggagalkan Sidang Umum MPR pada Maret 1998.

"Tangkap para aktivis!" perintah Bambang Kristiono.

M MAWAR

DRAMA pelanggaran hak asasi manusia (HAM) — penculikan aktivis— melibatkan pasukan elit TNI AD (Kopassus) dan sempat menampar wajah Indonesia di dunia internasional, akhirnya digeber di Mahkamah Militer II-08 Jakarta. Sebelas tentara *mbetik* dijewer di meja hijau. Sayangnya, lagi-lagi mereka —oknum aparat— menjadi korban permainan 'kekuasaan'. Kenapa? Mereka masih kroco-kroco. Kemana jenderalnya? Ada konspirasi apa dibalik drama peradilan yang mendapat sorotan pers lokal dan asing ini? Bagaimana dengan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto?

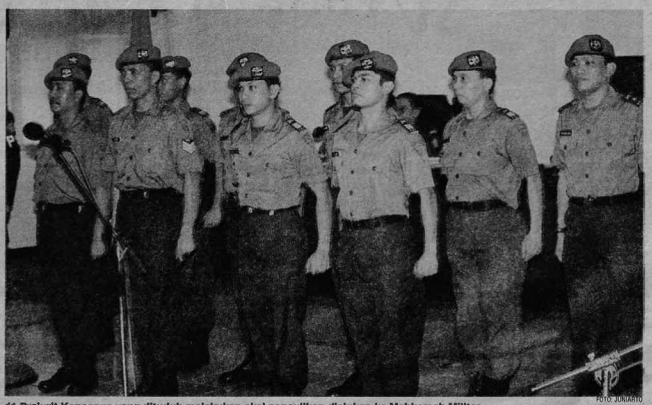

11 Prajurit Kopassus yang dituduh melakukan aksi penculikan diajukan ke Mahkamah Militer.

FOTO: JUNIANTO

JUNIANTO SETYADI
RUDY HARTONO
ACHMAD SUBECHI

POSTUR tubuh mereka tegap dan kekar. Fatai annya rapi dan masing-masing mengenakan baret merah. Mereka betul-betul gagah sebagai prajurit Indonesia. "Tapi sayang, perbuatan dan tindakannya tak mencerminkan seorang prajurit kesatria," celetuk seorang pengunjung sidang di Mahmil Jakarta, pekan lalu.

Mengapa? Mereka main culik, menyiksa dan mengrangkeng kebebasan hak asasi manusia: kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran.

Modus operandi penculikannya dilakukan secara rapi, tersusun dan terkonsep. Bahkan, ada dugaan terorganisir dan melibatkan sejumlah jenderal. Ironisnya, mereka yang disecret ke pengadilan adalah para *kroco*/prajurit. Sama seperti kasus penembakan Trisakti. Mereka yang dijadikan kambing hitam adalah para perwira pertama dan bintara. Sedang 'otak intelektual' sekaligus pelaku penembaknya masih gelap. Semuanya serba hitam dan tak bisa diraba.

"Peradilan kemarin sama dengan peristiwa Trisakti dulu. Polisi yang diadili. Jadi ini bukan rekayasa, tapi dagelan. Endingnya? mereka —sebelas terdakwa— akan dihukum. Tapi jenderal-jenderalnya tidak diapa-apakan. Ini pola orde baru dari dulu," kata George Aditjondro kepada *Bangkit*.

Benarkah para prajurit itu jadi korban kambing hitam? Apa ada tawar menawar dibalik itu? "Kalau menurut saya itu tak ada gunanya. Sebab proses DKP (Dewan Kehormatan Perwira) Prabowo sudah mengakui. Jadi tak ada gunanya mereka memasang badan sebab tidak dapat memotong jalur ke atas. Artinya ke atasnya tetap kena karena DKP nya sudah mengiyarakan itu," tegas Munir SH, dari Kontras.

Andai saja, ke 11 terdakwa mengajukan JPU Sidik dkk. Orang DKP nya lebih dahsyat. Jadi tak relevan. "Sekali lagi saya tekankan 11 orang itu tak mempunyai posisi untuk menolak. Mereka orang yang disangkakan melakukan tindak pidana. Mereka menjadi bagian yang ikut serta perbuatan tindak pidana itu," tambah Munir, *arek* Malang.

Mengapa kesebelas oknum Kopassus itu tiba-tiba bertindak brutal? Mungkinkah mereka sudah terbius dengan suntikan 'anjing gila'? Bermula dari 'ide gila' Mayor Bambang Krisantiono. Waktu itu, Juli 1997, Bambang membayangkan kondisi negara yang begitu gawat. *Masak!*

Ancaman demonstrasi dan kerusuhan meletus di mana-mana. Aksi demonstrasi yang menuntut Soeharto agar turun dari kursi emasnya, tak juga reda. Belum lagi, ada segudang teror melalui telepon dan peledakan rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta.

Ditengah panasnya suhu politik itulah —mendekati SU MPR 1998— ide gila tersebut mulai dirancang.

Sayang Oditur Militer Kol CHK Hasan siapa orang yang berada di belakang Bambang. Apa Prabowo, Soeharto atau jenderal-jenderal lainnya yang kini masih aktif duduk di Kabinet Orde Reformasi? Tak jelas. Lagi-lagi gelap! Hanya dikatakan: Bambang melakukan itu —penculikan— karena nurasinya merasa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman beberapa aktivis radikal di Jakarta. Hebat betul nuraninya!

Secara rahasia, Bambang —Oditur tak menyebut identitas lainnya, selain Perwira Menengah Denma Kopassus— membentuk satgas. Namanya Tim Mawar. Bersifat sangat rahasia dan tertutup. Operasi menggunakan metoda hitam dengan posko berdiri sendiri.

Selasa, Januari 1998. Di Markas Kopassus di Cijantung, jam menunjukkan pukul 09.00. Mayor Bambang memanggil Kapten Inf FS Mutasyar dan Kapten Inf Nugroho Sulistio. Ada kelompok yang mengadakan pertemuan di ORM Jayakarta, Jakarta Selatan, kata Bambang. Kemudian ia memberikan suatu dokumen penting yang berisi rencana makar dalam bentuk sabotase ekonomi. Tujuan akhirnya menggagalkan Sidang Umum MPR, Maret 1998. "Tangkap para aktivis," perintah Bambang, bos Tim Mawar.

Mendapat perintah, Mutasyar dan Nugroho segera mengumpulkan seluruh anggota Tim Mawar. Seluruhnya sebelas orang. Seorang berpangkat mayor, tujuh kapten dan tiga bintara. Mereka mengadakan *briefing*.

Kesimpulannya, tangkap Desmond Junaidi Mahesa, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta. Kemudian, disusunlah operasi penculikan. Mayor Bambang memerintahkan Kapten Julius Stepanus, Kapten Untung Budiarto, Kapten Dandang Hendra Yudha dan Kapten Jaka Utama untuk menjalankan operasi.

Operasi berjalan mulus tanpa ada rintangan. Cuma, akibatnya mereka 'babak belur' lantaran didakwa melakukan penculikan. Mereka diancam hukuman maksimal tujuh tahun. Kemungkinan mereka —dihitan sejak 14 Juli— juga dipecat dari pasukan elit TNI AD.

***

TAK disembunyikan nama Prabowo dalam persidangan di Mahmil kemarin, menimbulkan asumsi baru bahwa ada skenario agar Prabowo tak dijerat hukum. Padahal, ketika dimintai keterangan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) beberapa bulan lalu, Prabowo mengaku telah melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis. Sedang mengenai 13 aktivis lainnya yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, ia lepas tangan tidak tahu menahu alias mengaku tak menculik mereka. "Jangan korbankan sebelas terdakwa. Dia yang bertanggungjawab atas kasus penculikan ini. Pemerintah harus memanggil paksa Prabowo," cetus Jhonson Panjaitan SH, Wakil Ketua Tim Advokasi dan Pelayanan Hukum PBHI.

Benarkah Prabowo kebal hukum? Ada apa Prabowo tak diadili? Akankah *elite* militer lainnya takut belang mereka terbongkar? Termasuk Feisal Tanjung? "Saya kira kemungkinan itu akan terjadi di dalam persidangan, tapi kalau belum itu *kan* masih duga-dugaan saja. Jadi kita tunggu sajalah," kata pakar politik dari LIPI Dr Indria Samego.

"Kita lihat dulu perkembangan hasil persidangan 11 terdakwa. Apakah ada perintah langsung dari Prabowo atau hanya kreasi mereka saja. Kita belum bisa ambil kesimpulan sekarang, terlalu prematur," tutur Hamdan Zulfa SH, Ketua Asosiasi Pembela Islam (API) sekaligus Koordinator Tim Tanjung Priok kepada *Bangkit*.

Beda dengan pendapat Indria. Dia menilai, bahwa peradilan terhadap 11 oknum anggota Kopasus adalah persidangan politik. Jadi ada masalah yang memang harus diungkap, terutama menyangkut penyimpangan non teknis. ■

TANJUNG PRIOK CEMBURU

DIGULIRKANNYA kasus penculikan terhadap aktivis mahasiswa, LSM dan tokoh parpol, menimbulkan kecemburuan atau tanda tanya bagi para anggota Asosiasi Pembela Islam (API) yang menangani kasus pelenyapan manusia di Tanjung Priok. Mengapa mantan Pangab Jenderal TNI (Purn) Benny Moerdani dan Try Sutrisno —waktu itu menjabat Pangdam Jaya— tak diadili?

"Kasus Tanjung Priok harus dituntaskan. Benny Moerdani, Try Sutrisno harus bertanggung jawab secara hukum. Jangan hanya Prabowo yang terus dikejar-kejar," tegas Fasiun SH, anggota API sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Departemen Hukum dan Perundang-undangan Partai Bulan Bintang (PBB).

Padahal, kata Hamdan Zulfa SH, Ketua Asosiasi Pembela Islam (API) apa yang dilakukan Prabowo, pelanggaran hukumnya tidak separah dengan tindakan yang pernah dilakukan Benny Moerdani dan Try Sutrisno dalam kasus Tanjung Priok 1984. "Kalau *toh* ada penculikan, *kan* mereka semua yang diculik selamat. Kalau *toh* ada pelanggaran kemanusiaan, intensitasnya sangat kecil dibanding dengan pencembakan membabi buta dalam peristiwa Tanjung Priok," jelasnya.

Menanggapi keluhan mereka, Ketua Komnas HAM, Marzuki Darusman, mengungkapkan, bahwa Komnas tidak bermaksud menganaktirikan masalah. "Persoalannya, Tanjung Priok masih dielidi. Masih dalam proses. Komnas HAM terus bertemu dengan sumber-sumber informasi. Kita serius *kok*," ujarnya. ■ DAHLAN

Bangkit
3 Januari 1999

AKSI DI SIANG BOLONG

❑ **TANGGAL** 3 Februari, pukul 09.30. Tiga anggota tim, yakni Kapten Julius, Kapten Dadang dan Kapten Jaka meluncur dari Cijatung dengan menggunakan Kijang warna biru. Informasi awal, Desmond sedang di kantornya di Cililitan Kecil, Jakarta Timur.

Tiba di sasaran pukul 10.30 atau satu jam dari Cijatung. Jaka turun dari mobil, mendekati sasaran. Julius dan Dadang menunggu di mobil yang diparkir di ujung jalan, memantau dari kejauhan. Setengah jam berlalu, tiba-tiba Desmond J Mahesa ke luar kantor. Para prajurit tak mau bertindak gegabah. Begitu Desmond naik mikrolet ke arah Kampung Melayu, penculik membututinya.

Sesampai di Jl Salemba Raya, tepatnya di depan Kantor Departemen Pertanian, Desmond turun. Tanpa sadar ia terus diikuti Dadang. Jaka, mulai merapatkan mobilnya ke arah Desmond. Dengan cepat, Dadang mendorong Desmond ke arah mobil yang sudah dibuka pintunya. Julius menarik dari dalam dengan cepat. Sejurus kemudian, Desmon tak bisa bergerak karena tangannya diborgol. Matanya ditutup kain hitam.

Operasi nikstes. Tak ada kepanikan, meski penculik berniksi di siang bolong, di tepi jalan raya yang ramai. Mereka lalu menyusuri rute Salemba, Kramat, Cikini, Diponegoro, Tol Jagorawi, Cijantung. Setiba di Cijantung, Julius dan Dadang menggiring Desmond ke ruang *briefing* dan melapor kepada Mayor Bambang. Nugroho dan Julius bertugas menginterogasi Desmond. Materi pertanyaannya, berkisar soal kegiatan politik yang dilakukan Desmond: dituduh menggerakan massa demonstrasi.

Interogasi, penyiksaan, teror berjalan selama sebulan. Merasa isi kepala Desmond sudah habis dan tak ada yang tersisa, penculik mengantar Desmond ke Bandara Soekarno-Hatta, 2 April 1998, pukul 06.00.

❑ **SEHARI** setelah sukses menculik Desmond, Tim Mawar kembali sibuk. Sasarannya Pius Lustrilanang, aktivis LSM yang dianggap berbahaya, terutama dalam menentang pencalonan Soeharto. Pius, Sekjen Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) sudah sering diciduk gara-gara keinginan menolak Soeharto menjadi presiden, dianggap mencoki upaya status quo.

Bagaimana cara menculik Pius? Itulah yang dibahas Tim Mawar. Satu informasi intelijen sudah ada: Pius akan ke RSCM, membezuk orang tua temannya yang sakit. Bambang membentuk unit khusus, Untung sebagai ketua. Dengan sedan warna biru, Untung memimpin langsung operasi, dibantu Kapten Murtari dan tiga bintara.

Benar! Sekitar pukul 14.30, 4 Februari, Pius masuk RSCM. Ia dibuntuti penculik. Sesampai di pintu RSCM, Kapten Murtari langsung menculiknya. Tubuh Pius segera dimasukan ke dalam mobil. Seperti Desmond, mata Pius ditutup dengan kain hitam, tangan diborgol ke belakang.

❑ **SKENARIO** penculikan terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan Haryanto Taslam, berjalan rada unik. Penculikan berawal dari adanya tabrakan lalulintas di pertigaan Jl Arab Kampung Rambutan, Jakarta, 7 Maret 1998. Mobil Kijang dengan sengaja menabrak Panther. Merasa ditabrak, Haryanto Taslam menghentikan mobil. Ia kemudian keluar.

"Tak apa-apa," ujar Haryanto, Wakil Sekjen DPP PDI Megawati. Kendati ia dicurangi, Haryanto mengalah. Tapi para penabrak, terdiri dari beberapa orang berambut cepak, justru mendesak, "Ayo kita selesaikan di tempat lain".

Sekitar sebulan di tangan penculik, 14 April 1998, Haryanto dibawa ke Bandara Husein Sastra Negara, Bandung. Di tangannya tersedia tiket Merpati tujuan Surabaya. Tidak seperti Pius, Haryanto tak mau buka suara, setelah lepas dari tangan penculik, Hartas —panggilan akrabnya— lebih banyak tutup mulut. Ia khawatir anak istrinya menjadi korban. Mengapa? Pelaku mengancam akan menghabisi keluarganya kalau angkat bicara soal penculikan dan penyiksaan.

❑ **PENCULIKAN** terus berlangsung sampai detik-detik terakhir kekuasaan Soeharto. Setelah Desmond, Pius, Haryanto, Tim Mawar mengalihkan sasaran kepada Partai Rakyat Demokratik (PRD). Mereka menyebut PRD BT alias PRD bawah tanah. Anak-anak muda ini dituduh berada di belakang peledakan bom di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta. Mayor Bambang membentuk dua tim masing-masing dipimpin Kapten Mutasyar dan Kapten Julius.

Berturut-turut ditangkap Rahardjo Waluyo Djati dan Faizal Reza. Keduanya dikuntit di LBH Jakarta. Begitu keluar mereka dikejar, lari ke RSCM, terjebak, lalu diculik. Tanggal 25 April, Rahardjo dan Faizal dibebaskan. Waluyo dibawa ke Stasiun Kereta Api Jatinegara, Faizal ke Stasiun Kereta Api Gambir.

Sedang Andi Arif menyusul. Namun saat Tim Mawar ke Rusun Tanah Tinggi, aktivis SMID ini tak ada. "Selamat malam, saya Pak RT," Kapten Julius memberi salam. Begitu gaya penculik! Pintu dibuka, ia mengaku tangan-salaman. Tanpa curiga, Aan Rusdiyanto menyambut tamu asing. Dan betapa kagetnya: ia langsung ditarik keluar. Reza Satria dengan mudah diringkus di dalam kamar, lalu dibawa kabur para penculik. Baru pada tanggal 15 Maret 1998, penculik menyerahkan Aan Rudiyanto dan Reza Satria ke Polda Metro Jaya.

❑ **SKENARIO** penangkapan terhadap Andi Arief diburu sampai ke Bandarlampung, tanah kelahirannya. Rapat membahas operasi penangkapannya dipimpin Mayor Bambang. Singkat cerita, tujuh anggota Tim Mawar yang ditugaskan berhasil memboyong Andi dan membawanya ke Cijantung. Andi, 16 April, dibawa ke Mabes Polri. ■

DAHLAN/JUNIANTO SETYADI

DEBAT

PUSPOM MENGARAHKAN

Munir SH
(Koordinator Kontras)

ADA beberapa catatan. Catatan itu memang punya akibat ke depan. Catatan pertama: seolah-olah penculikan itu inisiatif mereka. Catatan kedua: penculikan itu hanya dilakukan tanpa perlakuan tidak manusiawi, hanya digambarkan orang dicomot dan dilepas begitu saja. Apa yang terjadi sejak korban dicomot dan dilepas tak disinggung dalam berkas dakwaan.

Penyiksaan-penyiksaan itu tak ada. Mengapa hal itu tidak dituangkan di dalam BAP? Sebenarnya sudah lama hal ini kami cermati, sejak di tingkat penyidikan di Puspom ABRI. Sudah tampak gejala Puspom akan mengarahkan, pertama: tidak akan pernah jelas 13 orang yang masih hilang, kedua: kekerasan terhadap korban tak akan pernah tersentuh. Ketiga: struktur komando keatas tak tersentuh. Mereka sudah mengarahkan *motif penculikan itu dilakukan orang-orang itu* sendiri yang mengambil inisiatif. Jadi prediksi saya, proses peradilan ini kedepan akan mengundang banyak kejanggalan.

Bisa jadi ada tiga kemungkinan. Pertama: bisa saja dalam persidangan akan ditemukan fakta-fakta lain, atau pelaku lain yang tidak didakwakan. Selanjutnya, penyidik masih bisa mengusut ulang dan disidangkan kembali. Tidak *nebis in idem*. Kedua: bila dakwaan tak terbukti atau ditolak. Nah itu tak bisa lagi dilakukan penuntutan. Tapi kemungkinannya ini terlalu kecil. Sebab dari berkas dakwaan oditur militer bahwa tindakan penculikan itu atas dasar kesadaran sendiri berarti mereka 11 orang itu sudah mengaku. Ketiga: bila dakwaan terbukti, para terdakwa akan menjalani hukuman. Nah ini yang menurut saya berbahaya. Bila sampai berhenti sampai disitu. Mereka yang 11 orang ini akan menjadi kambing hitam. ■

RUDY HARTONO

PANGDAM DAN PANGAB

Bambang Triantoro
(mantan Kassospol ABRI)

PRAJURIT-prajurit itu —sebelas terdakwa— yang dipimpin seorang Mayor, itu hanya melaksanakan tugas dan tidak mengada-ada. Jadi mayor —Mayor Infantri Bambang Kristiono— itu tidak punya pikiran melakukan penculikan ini-itu. Itu mesti terkait dengan tugas negara. Jadi kita bandingkan misalnya penculikan umum dimana motifnya uang, ini penculikan yang oleh pelakunya dianggap sebagai tugas negara: dari atasannya dari komandonya. Dan oleh karena itu kalau pembelaan para terdakwa itu benar, saya yakin ini bisa kita tarik ke atas. Siapa atasannya? Apakah Danjen Kopassus, Prabowo, Dan Grup Kol Chaerawan. Saya tidak bisa menerima kalau ada anggapan kalau mayor dan 10 terdakwa lain itu bertindak atas kemauan sendiri. Itu *tentu ada tugas yang besar dari atasannya, dalam hal* ini bisa diartikan sebagai operasi intelijen. Karena itu, meski 11 anggota itu mengaku membela diri menjalankan tugas, tapi dengan menganiaya orang, memaksa orang untuk dipindahkan kemana, menahan hingga beberapa hari, itu sudah tindak pidana yang harus dihukum. Jadi mereka bisa dihukum sebagai pelaku-pelaku kejahatan. Tapi saya pikir tidak akan berhenti sampai di sana saja. Sebab tindak kejahatan itu pasti ada sumbernya. Ini harus diusut terus. Tugas dari negara itu dari siapa. Kalau dibongkar saya yakin bahwa persoalan tidak hanya penculikan saja. Tapi mungkin kebijaksanaan pengamanan ibu kota. Yang menyangkut paling tidak Pangdam Jaya waktu itu. Dari sana bisa ditanya lagi darimana Pangdam Jaya mendapat tugas. Ini bisa jadi akan ke atas lagi, misalnya Panglima ABRI (Feisal Tanjung). Jadi saya kira kasus ini bisa meluas.■

RUDY HARTONO

BUAH KARYA SOEHARTO

Pius Lustrilanang
(korban penculikan)

SEJAK awal sudah jelas, semua saksi bilang ada penyiksaan. Dicelupkan di bak air, disundut rokok, pemukulan, setrum, berbaring di balok es. Saya bersedia menjadi saksi: saya ungkap ini agar ada keadilan bagi mereka yang diculik dan keluarganya. Sidang ini untuk mencari kejelasan bagi semuanya. Dakwaan oditur kurang lengkap. Padahal semuanya saya sudah beberkan secara rinci. Saya pikir semua saksi juga begitu. Tak mungkin luput. Dalam sidang saya akan bicara ada penyiksaan. Pengadilan dimulai ketika ada selubung tanda tanya besar: Mengapa sidang digelar ketika Prabowo ada di Yordania? Dan sudah jelas status warga negaranya. Artinya antara mereka yang menjadi pelaksana teknis terputus hubungannya dengan mereka yang memberi order pertama. Karena Prabowo ada di tengah semua. Kalau Prabowo dihilangkan, ditaruh di Yordan, berarti ada upaya atau kesengajaan untuk mengisolir kasus ini menjadi semata-semata kasus kriminal. Tapi semua orang tahu, saya diculik karena aktivitas politik saya. Saya yakin. Kopassus tidak mungkin bertindak diluar komando. Yang berhak memberi komando adalah Pangab. Dan Soeharto punya hak prerogratif untuk menunjuk Danjen Kopassus dan Pangkostrad. Artinya dia juga punya jalur komando langsung. Saya yakin sejak awal, Soeharto ada di belakang semua ini. Dia yang memberi order. Sidang ini dimulai ketika Prabowo tidak ada di sini. Sudah empat bulan dia di sana—Yordania. Waktu saya ke luar negeri, mereka bilang saya tidak ksatria. Sekarang Prabowo bagaimana? Korban yang masih hilang sampai sekarang bukan lagi korban penculikan, tapi korban pembunuhan. Bagaimana cara mengadili? Harus berjenjang. Jangan seenaknya orang yang banyak tahu soal penculikan dibikin saja ke Yordania. Tanpa Prabowo motif politik di balik kasus ini tak akan terungkap. Saya ditangkap karena aktivitas politik saya. Apa yang saya lakukan: mengunggat pencalonan kembali Soeharto. Siapa yang paling merasa diganggu kepentingannya, ya Soeharto, bukan Prabowo. ■

DAHLAN/JUNIANTO SETYADI

BANGKIT ■ NO. 0 ■ TAHUN 1 ■ 28 DESEMBER 1998 - 3 JANUARI 1999

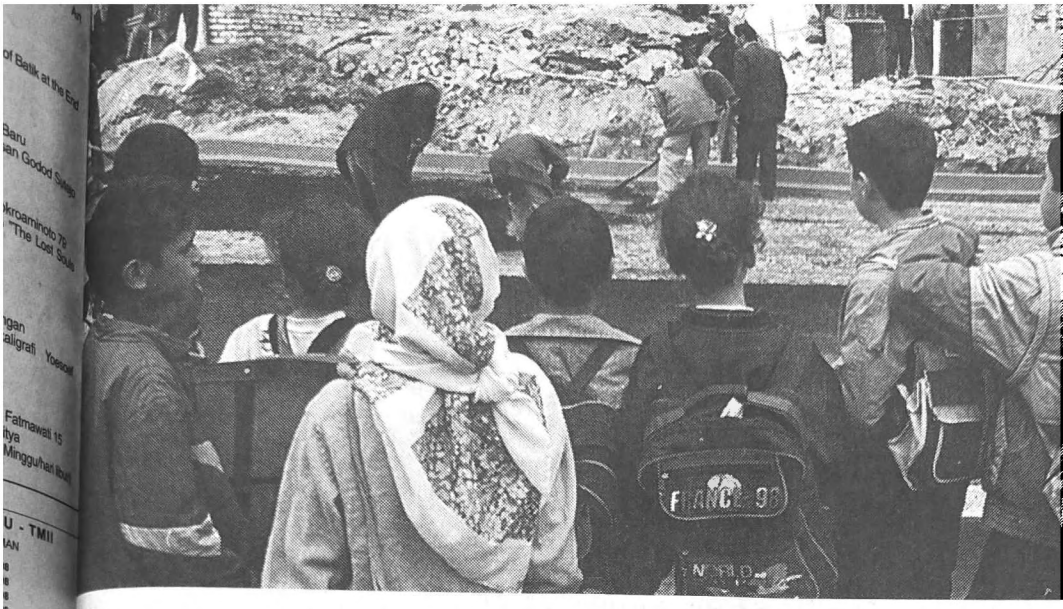

BAT GEMPURAN AS — *Sejumlah anak-anak di Baghdad hari u (23/12) menyaksikan buldoser dan para pekerja member- an halaman di dekat sebuah gedung yang hancur karena se- an rudal Amerika Serikat pekan lalu. Rakyat dan Pemerintah bersama-sama memulai aktivitas memperbaiki gedung dan menutup lubang yang diakibatkan gem rangan empat malam itu, tiga anggota (Cina, Rusia, dan Perancis) mendesak ag langsung delapan tahun dicabut. Namu menentang pencabutan embargo ekonom*

MEREKA YANG DIDAKWA MENCULIK

1. Mayor (Inf) Bambang Kristiono (terdakwa I)
2. Kapten (Inf) FS Multhazar (II)
3. Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo Budi (III)
4. Kapten (Inf) Yulius Selvanus (IV)
5. Kapten (Inf) Untung Budi Harto (V)
6. Kapten (Inf) Dadang Hendra Yudha (VI)
7. Kapten (Inf) Djaka Budi Utama (VII)
8. Kapten (Inf) Fauka Noor Farid (VIII)
9. Serka Sunaryo (IX)
10. Serka Sigit Sugianto (X)
11. Sertu Sukadi (XI)

Mendapat perin-tah, Multhazar dan Nugroho segera mengumpulkan seluruh anggota Tim Mawar yang dibentuk se-jak Juli 1997. Jumlah tim selu-ruhnya sebelas orang. Seorang berpangkat mayor, tujuh kapten, dan tiga bintara. Mereka mengadakan *briefing* penyusunan operasi pen-culikan.

Kompas
24 Desember 1998

Associated Press

epuran rudal. Setelah se-
Dewan Keamanan PBB
ar sanksi yang sudah ber-
n, AS dan Inggris masih
i atas Irak.

Timu
han p
luarg
kota
Per
Timo
ket a
nuari
pemb
tara l
Usku
lio S
Ulam
H A
Kom
Dil
bako
kota
quis
pake

Jak

tekn
data
agar
men
Luar
ranc
rang
terse
men
tuk

20 MARET 1998

Letjen TNI Prabowo Subianto diangkat sebagai Panglima Komando Pasukan Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrad. Ia menggantikan Letjen TNI Soegiono. Sebelumnya, ia adalah Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus). Upacara serah terima jabatan ini dirangkaikan dengan peringatan ulang tahun Kostrad ke 37. Hadir dalam acara serah terima jabatan yang dilaksanakan di Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat tersebut antara lain Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution dan para mantan Pangkostrad seperti Sahala Radjagukguk, Wahono, Leo Lopulissa, dan Soegito.

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

SUGIONO KE PRABOWO — *Letjen TNI Sugiono (kanan) menjalani penggantinya Letjen TNI Prabowo Subianto seusai upacara serah terima jabatan Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategis TNI AD) di Markas Kostrad, Jakarta, Jumat (20/3). Pada saat yang sama berlangsung pula perayaan HUT Ke-37 Kostrad, dengan Inspektur Upacara KSAD Jenderal TNI Subagyo HS. Sugiono kini menjabat Waksi KSAD.* Berita di halaman 3.

Kompas
21 Maret 1998

"Sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk, ancaman nonfisik dapat bersumber dari berbagai macam masalah. Karena itulah, kita menganut doktrin dan sistem pertahanan rakyat semesta. Pengalaman menunjukkan bahwa doktrin dan sistem tadi mampu menghadapi berbagai jenis ancaman yang dihadapi"

| ***H.M. Soeharto**, Presiden Republik Indonesia (Sambutan tertulis sertijab Pangkostrad dari Letjen TNI Soegiono ke Letjen TNI Prabowo Subianto dibacakan KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo)*

Letjen TNI Prabowo, Pangkostrad Baru

Jakarta, Kompas

Jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) diserahterimakan dari Letjen TNI Soegiono kepada penggantinya Letjen TNI Prabowo Subianto di Markas Kostrad, Jakarta, Jumat (20/3). Acara serah terima jabatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan ulang tahun Kostrad ke 37.

Soegiono, lulusan Akabri 1971, saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD). Sedangkan Prabowo, lulusan Akabri 1974, sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).

Hadir dalam cara serah terima jabatan tersebut antara lain Jenderal Besar TNI (Purn) AH Nasution dan para mantan Pangkostrad seperti Sahala Rajagukguk, Wahono, Leo Lopulissa, dan Soegito.

Presiden Soeharto, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk, ancaman nonfisik dapat bersumber dari berbagai macam masalah. Karena itulah, kita menganut doktrin dan sistem pertahanan rakyat semesta. Pengalaman menunjukkan bahwa doktrin dan sistem tadi mampu menghadapi berbagai jenis ancaman yang dihadapi.

Sementara itu, KSAD mengingatkan, Kostrad mempunyai tugas untuk membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya dan menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis sesuai kebijakan Panglima ABRI.

Menanggapi jabatan baru yang diemban Prabowo, Wakil KSAD menyatakan, Prabowo adalah orang yang pantas menerimanya. "Lihat saja prestasi kerjanya," ujar Soegiono singkat. **(jl/ama/uu)**

Kompas
21 Maret 1998

28 MARET 1998

Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono dilantik menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menggantikan Letjen TNI Prabowo Subianto, kini Pangkostrad, dalam upacara yang dipimpin KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur.

Muchdi yang lahir di Sleman, Yogyakarta, 15 April 1948 itu adalah lulusan Akademi Militer 1970. Pada 1972, dengan pangkat letnan dua, ia bergabung dalam pasukan elite Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) sebagai komandan peleton Para Komando (Danton

nya.

Namun, ada yang tak kalah penting dari sekadar mengusut dan mengadili para pelaku penculikan, penembakan, dan pemicu kerusuhan tersebut. Rangkaian peristiwa pahit yang memicu jatuhnya korban harta, kehormatan, dan jiwa, itu menjadi pelajaran sangat

gai perbandingan, pecahnya Skandal Watergate, yang *melengserkan* Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat, diikuti dengan pemantauan publik atas kiprah lembaga-lembaga intelijen seperti CIA, yang dinilai telah melanggar hak-hak sipil rakyat. Di negeri itu, ada Komite Intelijen Senat yang mengawasi

Tajuk
23 Juli 1998

ANTARA

pahit. Bukan cuma untuk ABRI, melainkan juga kita sebagai bangsa.

Itulah pelajaran bahwa sudah waktunya kita membatasi kewenangan lembaga-lembaga yang

MUCHDI, PRABOWO DAN SOEHARTO. Prabowo sukses menaikkan Muchdi ke posisi danjen Kopassus

dan mengendalikan kiprah lembaga-lembaga semacam itu.

Kini, sejalan dengan semangat memberdayakan DPR, mungkin perlu dipikirkan pula adanya

Parako). Lebih kurang 13 tahun bergelut di pasukan baret merah, dengan jabatan terakhir sebagai komandan Karsa Yudha I Grup IV, Letkol Muchdi disekolahkan ke Pusdik Intelijen, Ciomas, Bogor (1986). Seterusnya, ia menjabat Dandim Jayapura (1988), Kasrem 173/Biak (1991), Asops Kodam IX/Udayana (1993), Danrem 042/Garuda Putih (1995), dan Kasdam V/Brawijaya (1996).

Upacara pelantikan Muchdi menjadi orang nomor satu di Kopassus itu dihadiri mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Menhankam/Pangab Benny Moerdani, mantan Menhankam/Pangab M. Panggabean, mantan KSAD Wismoyo Arismunandar, Wakil Ketua DPR/MPR Syarwan Hamid, Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman, Mentrans dan Permukiman Perambah Hutan A.M. Hendropriyono, Menaker Theo Sambuaga, dan Menpora Agung Laksono, serta sejumlah petinggi militer.

KSAD Jenderal TNI Subagyo mengamanatkan agar Kopassus sebagai komando utama pembinaan dan operasional ABRI senantiasa memberikan yang terbaik bagi rakyat.

2 APRIL 1998

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengundang keluarga dari mereka yang dinyatakan hilang. Perwakilan keluarga ini memberikan testimoni dan pengakuan di hadapan jurnalis dengan didampingi Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI Munir. Keluarga yang hadir antara lain Ny. Hj. Ma'rufah, ibu dari Faisol Reza yang hilang sejak 12 Maret; Ny. Fransiska Sri Haryatni, ibu dari Pius Lustrilanang yang hilang sejak 4 Februari; dan Ny. Ani Agustina, istri dari Haryanto Taslam yang hilang sejak 15 Maret.

Tim pencatat fakta YLBHI menemukan banyak anggota masyarakat yang takut melaporkan hilangnya anggota keluarga mereka dalam kerusuhan 23 Mei 1997. Padahal, 16 dari 179 orang yang dilaporkan hilang telah kembali ke rumah. Mereka enggan melapor karena respons aparat keamanan yang represif.

Tim pencatat fakta YLBHI menemukan banyak anggota masyarakat yang takut melaporkan hilangnya anggota keluarga mereka dalam kerusuhan 23 Mei 1997. Padahal, 16 dari 179 orang yang dilaporkan hilang telah kembali ke rumah. Mereka enggan melapor karena respons aparat keamanan yang represif.

> **"Wartawan jangan hanya tanya-tanya dong. Doakan supaya anak saya kembali. Harapan saya enggak banyak. Saya cuma ingin tahu keberadaan anak saya. Kalau memang ia bersalah, saya meminta supaya diadili secara hukum. Tapi, jangan ma-in umpet-umpetan seperti ini. Bikin hati saya resah. Ia anak pendiam. Keluarga kami pas-pasan. Tidak tahu apa yang dilakukannya di perantauan sana. Kadang telpon sebulan dua kali. Reza itu masih sempat menelpon ke kampung (Probolinggo). Ia cuma minta maaf lahir batin karena Lebaran tidak bisa pulang dan akan berlebaran di tempat omnya di Jakarta."**
>
> | ***Ny. Hj. Ma'rufah**, Ibu dari Faisol Reza, dalam berita D&R (("Yang Pasrah, Berharap, dan yang Gembira", 11 April 1998)*

"Saya sudah biasa bila suami tinggal pergi lama. Dan, tak banyak bertanya. Saya mengetahui suami hilang saat 15 Maret teman-teman Bapak dari PDI mencari. Sudah beberapa hari tak ter-lihat di kantor. Saya menyembunyikan kabar hilang dari tiga anak yang se-ring menanyakan kok papa tak pulang-pulang. Mereka jadi tahu setelah koran memberitakan. Saya ingat, 25 Februari, saya dan suami memperhatikan ada orang mondar-mandir depan rumah. Mengaku namanya Suryo dari Blitar, ingin menyampaikan titipan surat. Tapi, langsung. Dia enggak mau menitipkan kepada saya. Padahal, tadi sewaktu Bapak ada, dia cuma bolak-balik di depan rumah."

| ***Ny. Ani Agustina***, *istri Haryanto Taslam, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI (Megawati Soekarnoputri), dalam berita D&R ("Yang Pasrah, Berharap, dan yang Gembira", 11 April 1998)*

D&R
11 April 1998

PERSPEKTIF

Orang-Orang Hilang

BEBERAPA TAHUN YANG LALU, KITA INGAT film *The Missing*, sebuah cerita tentang sebuah kejaman. Di bawah kekuasaan militer Chile, orang-orang yang dicurigai diculik oleh pasukan rahasia pemerintah; dan sejak itu tidak pernah diketahui rimba mereka. Film itu, dengan sutradara Costa Gravas, sekarang barangkali perlu diputar kembali di Indonesia. Kita pun sudah mulai menemukan bahwa ada anak-anak muda yang tiba-tiba sirna di tanah airnya sendiri. . .

Ada yang memang muncul kembali, seperti Pius Lustrilanang—salah satu aktivis Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega (Siaga), yang mendukung Amien Rais dan Megawati—yang mendadak tampak di Palembang pada pekan lalu, tanpa penjelasan, setelah dua bulan ibu kandungnya mencari. Ada yang, seperti Desmond, belum terdengar kabar beritanya. Dibunuhkah dia? Disekap di sebuah kamar yang dirahasiakan? Melarikan diri?

Ada sesekali dibisik-bi-

Tidak dapat dihindarkan kesan bahwa inilah kelanjutan dari brutalisasi kehidupan politik yang semakin meningkat sejak beberapa tahun terakhir ini. Brutalisasi itu terjadi karena orang mencari jalan pintas untuk menyelesaikan konflik: semakin ringkas semakin baik. Apa yang terjadi di tahun 1965 (pembunuhan para jenderal oleh pasukan militer yang pro-PKI dan pembalasannya, yakni pembasmian orang-orang PKI serta yang dituduh PKI) rupanya semakin merupakan sebuah pola. Kekerasan dan senjata bukan hanya digunakan "bila perlu", melainkan bisa digunakan meskipun tidak selamanya perlu. Apa yang terjadi di Jakarta dan yang kemudian disebut sebagai Peristiwa Tanjungpriok 1984; yang terjadi di Santa Cruz, Dili, di tahun 1991; juga apa yang terjadi dalam pengambilalihan kantor PDI Megawati di tahun 1996 menunjukkan gejala itu.

Otot dan Api

Aturan hukum dan penyelesaian konflik secara damai dianggap tidak efisien

11 APRIL 1998

D&R
11 April 1998

Suatu pelanggaran hak asasi manusia tidak senantiasa diakibatkan oleh intervensi paksa negara terhadap wilayah hak-hak warganya. Ia juga bisa terjadi karena justru negara tidak menjalankan kewajibannya melindungi hak-hak itu. Hak orang atas hidup, atas kebebasan, dan keselamatan dirinya, dan hak atas bebas dari penyiksaan adalah bagian dari rumpun hak-hak sipil dan politik mendasar yang harus dipastikan oleh negara untuk tidak diganggu. Jaminan itu tak sekali-kali boleh ditunda pemenuhannya untuk alasan apa pun.

Maka, bila tiba-tiba ada orang hilang tak tentu rimbanya, adalah negara yang memikul tanggung jawab untuk menemukan mereka dan mengembalikan kepada keluarganya dengan selamat. Sekali lagi, dengan selamat. Jika negara gagal melakukan itu, atau malah tidak menjalankan kewajibannya, seketika harus dikatakan bahwa suatu pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi

> **"Dalam terminologi hak asasi manusia, pelanggaran demikian disebut *violence by omission*. Bentuk paling keras dari pelanggaran jenis itu adalah *impunity*, yakni ketika negara membiarkan para pelaku pelanggaran itu bebas dari jamahan hukum – seperti apa yang dinikmati oleh para pelaku "penembak misterius."**

*|**Hendardi**, Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, dalam opini di D&R (11 April 1998)*

KOLOM

"Hilang"

INDONESIA BUKAN RUMAH YANG AMAN BAGI SEtiap orang. Hari-hari ini, orang bukan cuma bisa dengan mudah dan dalam sekejap mata kehilangan pekerjaan yang sudah bertahun-tahun ia tekuni. Bahkan, ia sendiri bisa "hilang".

Hari-hari ini orang juga bisa dengan mudah dan tanpa disangka kehilangan jiwanya. Menjadi korban dari suatu perbuatan kriminal yang belakangan kian sadistis dan tak perlu lagi cukup alasan. Atau karena persangkaan rasial dan keagamaan. Bahkan, hanya karena menderita penyakit jiwa, seperti yang pernah terjadi pada waktu lalu di Ujungpandang itu. Tapi, dalam kasus-kasus seperti itu, paling tidak, pelakunya diketahui. Karena itu, konsekuensi pertanggungjawaban hukumnya juga bisa dijalankan–meski, bisa saja, sering malah, dalam kasus-kasus tertentu hukuman sengja ditimpakan pada orang yang keliru. Jasad si korban juga masih bisa dikebumikan, dipujikan, dan dihormati untuk terakhir kali.

Tapi, mereka yang sekarang hilang itu: apakah mereka masih hidup? Kalau masih, di manakah mereka berada? Bagaimanakah keadaan mereka, sakitkah, atau terluka, atau tak kurang suatu apa? Atau *Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'un*, adakah mereka sudah tiada? Kalau begitu, kepada siapa jasad mereka yang malang itu bisa diminta? Apakah mereka sudah dikebumikan secara pantas, atau disia-siakan–dibuang ke laut atau dihancurkan dan dibakar seperti cerita horor yang pernah kita dengar dalam Peristiwa 27 Juli 1996? Siapakah mereka yang melakukan perbuatan keji itu yang tidak cukup hanya dengan merasa punya kewenangan untuk merampas kebebasan orang lain, tapi juga merasa berhak atas hidup-mati orang lain? Bahkan merasa berhak atas jasad si korban?

Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana, yang betapa pun juga, sah. Seperti pertanyaan sederhana ibunda Pius Lustrilanang yang kehilangan dan berduka itu: "Yang saya butuhkan hanya kepastian, apakah anak saya masih hidup. Karena, kalau tidak, saya akan berdoa untuk arwahnya...." Pertanyaan sederhana, namun tak dapat dijawab dengan gampang.

Dan, di manakah kita hidup di hari-hari ini? Apakah sesungguhnya yang sedang kita hadapi? Kepada siapakah sebenarnya kita mesti mempercayakan perlindungan dan keamanan diri? Bagaimanakah sebenarnya hubungan kita, warga negara, dengan mereka yang mengelola kekuasaan negara?

Pius, Desmon, Andi Arief, Haryanto Taslam, dan nama-nama lain yang mungkin masih akan bertambah jelas bukan tukang peras, tukang perkosa, perampok, tukang bunuh, atau tukang [illegible]. Masih segar dalam ingatan, orang-orang, yang pada suatu waktu, tiba-tiba hilang dan tahu-tahu ditemukan mati membusuk dalam karung dengan dua ibu jarinya diikat (lalu diam-diam sebagian orang merasa bersyukur dan mengira dunia bakal jadi lebih baik).

[illegible] "petrus" itu, suatu saat, kita yang merasa [illegible] bahwa mereka adalah korban [illegible]. Sampai akhirnya dusta itu terkelupas oleh [illegible] otobiografi Pak Harto, yang kemudian [illegible] bahwa mereka adalah korban yang direncanakan oleh suatu operasi "*shock therapy*" oleh aparat negara. Itu di awal dekade tahun 1980-an. Dan, sekarang kita masih hidup di bawah pemerintahan yang sama.

Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius, Desmon, dan semua yang sekarang "hilang" itu, pasti tidak sedang *nongkrong* di warung kopi. Orang tidak punya waktu berpekan-pekan hanya untuk menikmati secangkir kopi, sambil mengobrol *ngalor-ngidul* sekalipun. Mereka juga pasti tidak sedang sembunyi. Sebab, keberanian mereka selama ini telah membuat kebijaksanaan klasik itu tak sepenuhnya benar: "*When the wicked rise to power, the wise run for cover*". Mereka juga pasti tidak sedang berlibur di rumah seorang sanak dan saudara, karena di manakah tempat di dunia ini, kecuali di balik bui dan di ruang-ruang tahanan yang dirahasiakan, yang tidak terjangkau oleh koran, telepon, Internet, faksimile atau sekadar jalan setapak?

Blaming the victim: itulah persisnya yang sedang dilakukan dengan dalil-dalil yang kosong dan meremehkan itu. Sebuah cara membela diri yang kurang cerdas. Tapi, nanti dulu, bukankah kita dilarang berburuk sangka? Baiklah kalau begitu. Kita pastikan saja bahwa seluruh organ komando resmi ABRI tidak bersangkut-paut dengan "hilangnya" para aktivis prodemokrasi itu. Tetap, suatu pertanyaan resmi harus diajukan: bukankah tugas resmi ABRI, persisnya polisi, adalah menjamin dan memastikan keamanan serta keselamatan setiap warga dari negara ini?

Hendardi *)

Suatu pelanggaran hak asasi manusia tidak senantiasa diakibatkan oleh intervensi paksa negara terhadap wilayah hak-hak warganya. Ia juga bisa terjadi karena justru negara tidak menjalankan kewajibannya melindungi hak-hak itu. Hak orang atas hidup, atas kebebasan, dan keselamatan dirinya, dan hak atas bebas dari penyiksaan adalah bagian dari rumpun hak-hak sipil dan politik mendasar yang harus dipastikan oleh negara untuk tidak diganggu. Jaminan itu tak sekali-kali boleh ditunda pemenuhannya untuk alasan apa pun.

Maka, bila tiba-tiba ada orang hilang tak tentu rimbanya, adalah negara yang memikul tanggung jawab untuk menemukan mereka dan mengembalikan kepada keluarganya dengan selamat. Sekali lagi, dengan selamat. Jika negara gagal melakukan itu, atau malah tidak menjalankan kewajibannya, seketika harus dikatakan bahwa suatu pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi. Dalam terminologi hak asasi manusia, pelanggaran demikian disebut *violence by omission*. Bentuk paling keras dari pelanggaran jenis itu adalah *impunity*, yakni ketika negara membiarkan para pelaku pelanggaran itu bebas dari jamahan hukum–seperti apa yang dinikmati oleh para pelaku "penembakan misterius" (petrus), itu.

Jadi, adalah tugas ABRI, dan ini tak dapat disangkal dengan dalih apa pun juga, untuk mengembalikan mereka kepada keluarganya dengan selamat. Jika itu pun gagal dipenuhi, dasar pengakuan ABRI sebagai penjaga keamanan adalah kosong belaka. Bahwa seorang warga negara bisa hilang begitu saja, itu sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Apalagi jika diikuti dengan kegagalan mengembalikan korban kepada keluarganya dengan selamat.

Seluruh organ komando resmi ABRI, mungkin, memang tidak bersangkut-paut dengan hilangnya para aktivis prodemokrasi itu. Telah dinyatakan, tak seorang pun dari para aktivis itu ditemukan di jajaran kodam, korem, kodim, koramil, bahkan tidak di markas-markas kepolisian. Pernyataan resmi itu mesti ditengok sebagai sebuah upaya penjelasan dari ABRI atas sebuah kenyataan yang keras, bahwa ada sekelompok orang bersenjata yang melakukan penculikan–terhadap Andi Arief, misalnya.

Kalau begitu, mungkinkah penculikan itu dilakukan oleh suatu operasi di luar komando resmi ABRI? Adakah suatu "super-komando" yang mungkin menggunakan suatu "super- undang-undang", yang telah mengalahkan semua jalur komando resmi ABRI dan kuasa membuatnya tak lebih dari suatu upaya campur tangan? Apakah suatu operasi *shock therapy* yang lain dengan sasaran yang berbeda kini tengah berlangsung?

Jika itu benar, mulai sekarang berhati-hatilah Anda. Jangan berjalan sendirian, apalagi di tengah malam. Ada kawanan serigala dilepaskan berkeliaran di jalan raya.

**) Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia*

D&R
11 April 1998

Jadi, adalah tugas ABRI, dan ini tak dapat disangkal dengan dalih apa pun juga, untuk mengembalikan mereka kepada keluarganya dengan selamat. Jika itu pun gagal dipenuhi, dasar pengakuan ABRI sebagai penjaga keamanan adalah kosong belaka. Bahwa seorang warga negara bisa hilang begitu saja, itu sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Apalagi jika diikuti dengan kegagalan mengembalikan korban kepada keluarganya dengan selamat.

Seluruh organ komando resmi ABRI, mungkin, memang tidak bersangkut-paut dengan hilangnya para aktivis prodemokrasi itu. Telah dinyatakan, tak seorang pun dari para aktivis itu ditemukan di jajaran kodam, korem, kodim, koramil, bahkan tidak di markas-markas kepolisian. Pernyataan resmi itu mesti ditengok sebagai sebuah upaya penjelasan dari ABRI atas sebuah kenyataan yang keras, bahwa ada sekelompok orang bersenjata yang melakukan penculikan–terhadap Andi Arief, misalnya.

Kalau begitu, mungkinkah penculikan itu dilakukan oleh suatu operasi di luar komando resmi ABRI? Adakah suatu "super-komando" yang mungkin menggunakan suatu "super- undang-undang", yang telah mengalahkan semua jalur komando resmi ABRI dan kuasa membuatnya tak lebih dari suatu upaya campur tangan? Apakah suatu operasi *shock therapy* yang lain dengan sasaran yang berbeda kini tengah berlangsung?

Jika itu benar, mulai sekarang berhati-hatilah Anda. Jangan berjalan sendirian, apalagi di tengah malam. Ada kawanan serigala dilepaskan berkeliaran di jalan raya.

21 APRIL 1998

Enam pengamen yang tergabung dalam Serikat Pengamen Indonesia, Yogyakarta, mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Keenam pengamen ini adalah Wawan, Subroto, Miftachul Ulum, Ferdinandus Suhardono, Tofik Kustoro, dan Didik Setyarso Nugroho.

Kepada LBH mereka bercerita apa yang terjadi selama mereka hilang. Mereka diciduk dari tempat mangkalnya atau dijemput petugas berpakaian preman dari rumah masing-masing. Pola penangkapan itu sama: tanpa surat tugas atau surat perintah penangkapan. Setelah itu, mereka dikembalikan ke panti sosial yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hal itu berlangsung berulang-ulang selama tiga hari, sampai mereka dilepas. Selama itu, tak secuil pun kabar hingga ke telinga keluarga mereka. Bahkan, ketika orang tua Dono dan Wawan mencoba mencari anaknya ke mapolresta, mereka menerima jawaban begini: polisi tak tahu-menahu.

Khusus untuk Wawan, setelah dilepaskan, kembali ia diculik dan dibawa ke sebuah tempat yang ia tak tahu di mana itu. Di sana, Wawan mengalami interogasi dan penyiksaan, termasuk direndam di dalam air selama berjam-jam. Penyiksaan itu dilakukan karena petugas mendapat informasi bahwa para pengamen itu adalah demonstran bayaran. Mereka disangka turut dalam aksi demo karena memperoleh imbalan berupa uang. Tampaknya, para penculik ingin tahu siapa yang membayar mereka. Lantaran tak pernah menerima imbalan, para pengamen menolak tuduhan itu. Akibat penyiksaan itu, seorang pengamen mengalami luka dalam yang serius dan dua lainnya harus dijahit di sana-sini.

Khusus untuk Wawan, setelah dilepaskan, kembali ia diculik dan dibawa ke sebuah tempat yang ia tak tahu di mana itu. Di sana, Wawan mengalami interogasi dan penyiksaan, termasuk direndam di dalam air selama berjam-jam.

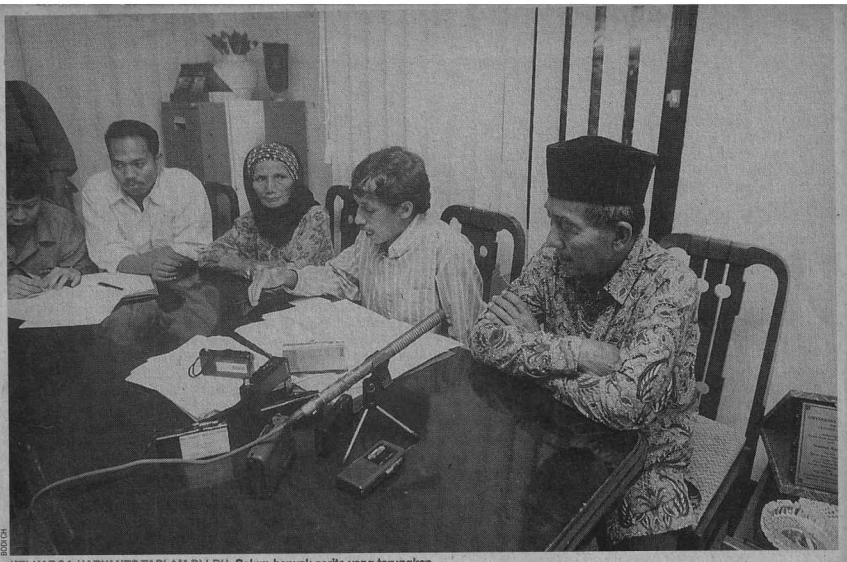

KELUARGA HARYANTO TASLAM DI LBH. **Belum banyak cerita yang terungkap.**

LIPUTAN UTAMA

Cerita Wewegombel dan Orang-Orang Hilang

Sejumlah yang "hilang" mulai pulang. Hanya pengamen di Yogya yang mengadu ke LBH, selebihnya enggan bercerita. Perlu menunggu resolusi Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB?

DI JAWA, DULU, KETIka pohon-pohon besar dan tinggi masih banyak, ada masanya orang tua bilang kepada anak-anak: "Jangan keluyuran di waktu *surup*, kamu nanti digondol *wewegombel*." *Surup*, itulah magrib; dan *wewe* adalah hantu berambut panjang, bisa terbang, dan suka menculik anak-anak yang kemudian, konon, anak itu ditemukan *nongkrong* di pohon tinggi. Konon, anak yang digondol *wewe*, setelah ditemukan, mulutnya seperti terkunci. Bila kemudian ia sadar lagi, biasanya ia lupa apa yang terjadi.

Kisah orang hilang di Tanah Air belakangan ini seperti kisah *wewe* itu. Yang hilang pun adalah "anak-anak nakal" yang suka "bikin onar". Juga, seperti kisah penculikan oleh *wewe* yang kemudian si anak yang diculik muncul lagi "di pohon tinggi", orang-orang yang muncul lagi kini juga berada di luar Jakarta, padahal konon "hilangnya" di Jakarta. Konon, biasanya, anak yang dibawa *wewe* ketika ditemukan mulutnya seolah terkunci. Barangkali, ia terteror oleh bentuk dan perilaku sang *wewegombel*. Siapa tahu, mereka yang muncul lagi dan tak mau bicara pun terteror oleh yang mereka alami selama "hilang".

Yang jelas, para orang tua kita tampaknya tak ingin mengetahui secara persis siapa dan apa itu *wewegombel*—memang hantu atau suatu ide untuk membuat anak-anak patuh duduk di rumah di kala magrib. Juga, di Indonesia sekarang sepertinya pihak kepolisian kurang proaktif, melainkan menunggu laporan. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkesan pasif. Misalnya, kenapa mereka tak menemui yang muncul lagi yang tak mau bercerita kepada wartawan sekalipun itu (Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, umpamanya)?

Sejauh ini, yang mencoba menemui me-

D&R
25 April 1998

“Pengamen ini bukan termasuk yang hilang. Kami tidak menahan mereka. Mereka hanya kami mintai keterangan.”

| ***Letkol Boedhi Santoso M.***, *Kepala Polresta Yogyakarta, tentang para pengamen, dalam berita D&R ("Cerita Wewe Gombel dan Orang-orang Hilang", 25 April 1998)*

“ABRI tak ada hubungannya dengan hilangnya sejumlah aktivis. Pimpinan bahkan memerintahkan seluruh jajarannya untuk turut mencari para aktivis itu.”

| ***Brigjen TNI Abdul Wahab Makodongan***, *Kepala Pusat Penerangan ABRI, dalam berita D&R ("Cerita Wewe Gombel dan Orang-orang Hilang", 25 April 1998)*

“ABRI wajib mencari para aktivis yang hilang itu. Soal berhasil atau tidak, itu urusan lain. *La, wong ilang karepe dhewe* **(hilang maunya sendiri).”**

| ***R. Hartono***, *Menteri Dalam Negeri, dalam berita D&R ("Cerita Wewe Gombel dan Orang-orang Hilang", 25 April 1998)*

D&R
25 April 1988

LIPUTAN UTAMA

reka yang muncul lagi itu adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dan, memang, mereka yang ditemui YLBHI itu, menurut Bambang Widjojanto, keluarga, belum bersedia bercerita apa pun. Pokoknya, diam.

Ada yang tertarik dan tampaknya bakal mencari tahu apa dan siapa di balik "hilang dan muncul kembalinya" sejumlah orang ini. Inilah yang bernama Komisi Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia Pemerintahan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss. Komisi ini, Senin, 21 April pekan ini, merencanakan merupakan perhelatannya membuat resolusi anti-Indonesia sehubungan dengan orang-orang hilang dan penculikan hak asasi manusia pada umumnya. Menurut anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Marzuki Darusman, "Terbuka kemungkinan sidang akan menjatuhkan resolusi anti-Indonesia."

Bila itu memang terjadi, citra Indonesia bakal buruk di mata internasional.

Dan, siapa tahu, itu bakal menghambat upaya reformasi ekonomi karena para penanam modal asing takut serta was-was.

Tapi, ada yang diberitakan hilang kemudian muncul lagi dan mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Itulah inner pengamen yang sering bang dalam Serikat Pengamen Indonesia- Yogyakarta. Mereka (Wiswan, Subroto, Mirfachul Ulum, Ferdinandus Sahardono alias Dono, Teffi Kustoro, dan Didik Setyarso Nugroho) kepada LBH bercerita yang terjadi selama mereka hilang. Mereka diculik dari tempat mengkliping atau di-jemput penjaga berpakaian preman dari rumah/kamar-kamar. Dan semua perangkat-an itu sama: tanpa surat tugas. "Mereka mencolik kami kami tanpa surat tugas atau surat perintah penangkapan," kata Budi Hartono dari LBH tersebut, kuasa hukum enam pengamen itu.

Demonstran Bayaran?

Menurut Dono, pada awalnya, mereka dibawa ke panti sosial milik Departemen Sosial di Bantul, di pinggir Yogya. Mengelang tengah malam, mereka dianggkut ke Markas Polisi Resor Kota (Mapolresta) Yogyakarta. Apa salah para pengamen itu?

Di mapolresta inilah mereka ditercegat, ditanya soal keterlibatan mereka dalam demonstrasi mahasiswa. Mereka tak cuma ditanya, tapi bergantian digebuki dan ditendang, dihajak. "Ada sinsan kami yang mati-lampu dicekoi pistol sambil ditancam. Jika tidak mau mengaku, mereka akan ma-sa tahanan tahun-tahun kami," tutur Dono.

Beberapa jam, mereka "dinterogasi". Setelah itu, mereka dikembalikan ke panti sosial yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hal ini berlangsung berulang-ulang, selama tiga hari, sampai mereka dilepas pada Selasa siang, 7 April lalu. Selama itu tak secuil pun kabar sampai ke telinga keluarga mereka. Bahkan, ketika orang tua Dono dan Wiswan mencoba mencari anaknya ke mapolresta, mereka menerima jawaban begini: polisi tak tahu-menahu.

Khusus untuk Wiswan tampaknya mereka-lahnya belum selesai. Setelah dilepaskan, kembali ia diculik dan dibawa ke sebuah tempat yang ia tak tahu di mana itu. Di sana, Wiswan lagi-lagi harus mengalami interogasi dan penyiksaan, termasuk disundutn (I dalam air selama berjam-jam. "Aparat keamanan telah memperlakukan mereka secara tidak manusiawi," kata Hilarion N.G. Memo, juga pengacara LBH Yogya.

Menurut Budi, penyiksaan ini dilakukan

Beberapa jam, mereka "diinterogasi". Setelah itu, mereka dikembalikan ke panti sosial yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hal ini berlangsung berulang-ulang, selama tiga hari.... Selama itu, tak secuil pun kabar sampai ke telinga keluarga mereka.

karena petugas mendapat informasi bahwa para pengamen adalah demonstran bayaran. Mereka disangka telah dalam aksi demo karena memperoleh imbalan berupa uang. Tampaknya, para petinggi ingin tahu siapa yang membayar mereka. Lantaran memang tak pernah mencetus imbalan, para pengamen itu pun menolak tudahan tersebut.

"Demi Tuhan, kami tidak dibayar siapa pun," ujar Dono. Akibat penyikaan itu, se orang pengamen mengalami luka dalam sedan dua lainnya harus dijahit di sana-sini.

Cerita selanjutnya belum jelas. Kepala Polresta Yogyakarta Letkol Boedhi Santoso M. tetap menggunjup para pengamen itu tak termasuk mereka yang hilang. Polisi juga menampik tudahan telah menahan mereka. "Mereka hanya kami mintai keterangan," kata Boedhi. Sebabnya: info dari seorang bocah tukang semir sepatu yang mengaku disuruh para pengamen untuk turut demo dan mendapat upah Rp 5.000. Setelah itu, polisi lantas menyerahkan mereka kepada

LIPUTAN UTAMA

MARZUKI DARUSMAN. Terkesan pasif.

nanya tentang hilangnya Haryanto Taslam, Pius, dan Desmond setidaknya, itu berarti pun penculik—satu kelompok atau lebih tak ada bedanya—terhasud menemani dia mereka tetap misterius. Dan, karena itu, bukan tak mungkin aktivitas mereka tanu berjalan. Lantrah bila kemudian ketakutan melingkupi siapa saja.

Tak jelas ada kaitannya dengan mereka yang hilang—dan kembali—atau tidak, ada sinyalemen aktivitas pencalkan terus berlangsung. Aktivis Suara Ibu Pedoli. Dr. Karlina Leksono-Supelli, misalnya, mengaku ke sempat dua kali dikuntit orang-orang ke-kar. "Mulanya, saya pikir saya GR (gede ri-sai saja," tuturnya. Tapi, setelah ada telepon dari seorang kenalannya, dosen Universitas Indonesia ini bam menyadari perisiwanya. (*Ihat Karlina Leksono "Nyarik" Hilang*).

Cerita Dua Tahun Lalu

Orang memang lumrah kalau mendapa bahwa pencalikan ini berkaitan dengan apa-rat keamanan. Alasannya: rosnjalankan pen-culikan dan tetap misterius perlu latihan Dan, latihan seperti ini agak sulit terpikirkan bisa terjadi di luar lingkungan aparat kea-manan.

Tapi, pagi-pagi, Kepala Pusat Penerangan ABRI Brigjen Abdul Wahab Mokodongan membantahnya dengan jelas dan tegas. "ABRI tak ada hubrigannya dengan hilangnya sejumlah aktivis," kata Abdul Wahab. Pimpinan ABRI bahkan telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk turut mencari para aktivis itu (lihat D&R edisi 11 April).

Menteri Dalam Negeri Hartono pun menegaskan pernyataan senada. ABRI, menurut Hartono, wajib turut mencari para aktivis yang hilang itu. Cuma, soal berhasil-tidaknya, itu urusan lain, Artinya, ABRI tak harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka. "*La, wong ilang karepe dhewe* (hilang maunya sendiri), kok, dibilang tanggung jawab ABRI. Cara *nganperi* seringgis di minah gabuk sina sambil ngopi kan menghilang," kata Hartono.

Sementara itu, Mayjen Syamsu D., Komandan Paspom ABRI juga meng tanpikan agar masyarakat tidak cepat-cepat membawa masalah orang hilang ke lembaga internasional karena akan rimcon-rong kredibilitas bangsa. "Seyogianya, kita selesaikan dengan aturan kita sendiri," kata Syamsu.

Baiklah, tapi apa talu tindakannya? Polisi pun sejauh ini tak terdengar menghubungi Pius atau Desmond untuk mendapatkan cerita kedua orang yang hilang dan muncul lagi itu. Pun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mestinya bisa lebih tanggap. Andai mereka ada ancaman kepada yang muncul lagi, bukankah polisi bisa memberikan perlindungan?

Wallaski, tetap merisaukan bahwa tak ada cerita apa yang telah terjadi itu. Ada

menang beberapa catatan di YLBHI, tipis-tis cerita dua tahun lalu. Misalnya, bekas Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Murif Lamjidi Mianif sempat hilang sekitar dua bulan, sesudi peristiwa kerusuhan pergantihalihan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta, 27 Juli 1996. Kepada YLBHI, ia bercerita penderitanya yang dialaminya selama ia hilang. Siapa membuatnya menderita? Ia tak bisa menatakan. Apakah ada hubungan antara hilang-nya Mianif (an orang-orang hilang belakang-an ini, pun tak jelas.

Yang jelas, kecemasan tentang hilang ini mendasari berdirinya Komisi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kontras). Tadak Kehirsaan dan Orang Hilang (Kontras), Kamis, 9 April, dua pekan lalu. Kontras didukung 10 lembaga swadaya masyarakat, antara lain YLBHI, Aliansi Jurnalis Independen, Komite Independen Pemantau Pemilu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Pusat Informasi dan Pengkajian Hak Asasi Manusia, Perpustakaan Mahasiswa Jayam Indonesia, LA-Pasip dan LP-HAM) dan tokoh-tokoh senior, seperti ulemaks/cawan Nurcholish Madjid, pengacara Harjono Tjitrosoebono, dan Trimoelja D. Soetjadi. Menurut Munir, pelaksana hariannya, Kontras memusatkan perhatiannya ke masyarakat yang, karena aktivitas politiknya dihilangkan atau menghilangkan diri akibat tekanan, mengalami perlakuan hukum yang tidak adil serta mengalami teror dan ancaman.

Barangkali, semakin banyak lembaga yang mengungkapkan soal orang hilang maka kin tak macah seorang warga negara di negeri mereka ini jiha-jiha tak dan jiha-jiha muncul dengan imulut terkunci. Apa kita perlu mencontoh resolusi Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dutangnya *special rapporteur*? Bukan cuma Dana Moneter Internasional (IMF) di bidang ekonomi dan moneter, juga untuk membuat warga negara Indonesia merasa aman dan terlindungi di negara sendiri perla lembaga asing ikut "ngerecoki"?

Di Jawa, kisah *wewegombel* tak lagi dipercaya anak-anak. Potong-potong besar sudah berganti menjadi istalasi Bintik, gedung-gedung, atau kawasan tempat potong tanahnah sudah menjadi wadok. Modernisasi telah mengusir takhyul dan sejenisnya. Mungkin, diperlukan modernisasi dalam menyelenggarakan negara agar orang hilang tak perlu ada lagi. Modernisasi di sini bisa diterjemahkan sebagai demokrasi, hadirnya oposisi, dan sebuah civil society atau masyarakat madani. Kata *civil* atau madani mengandung maksa berakih. Penghilangan orang jelas bukan sesuatu yang beradab.

Laporan Budi Kusnan, Sono Joko Suyono (Jakarta), L.N. Idayanie (Yogyakarta), Yanti Lubanaj Kilangsandangi, Dwi Arjanto (Solo)

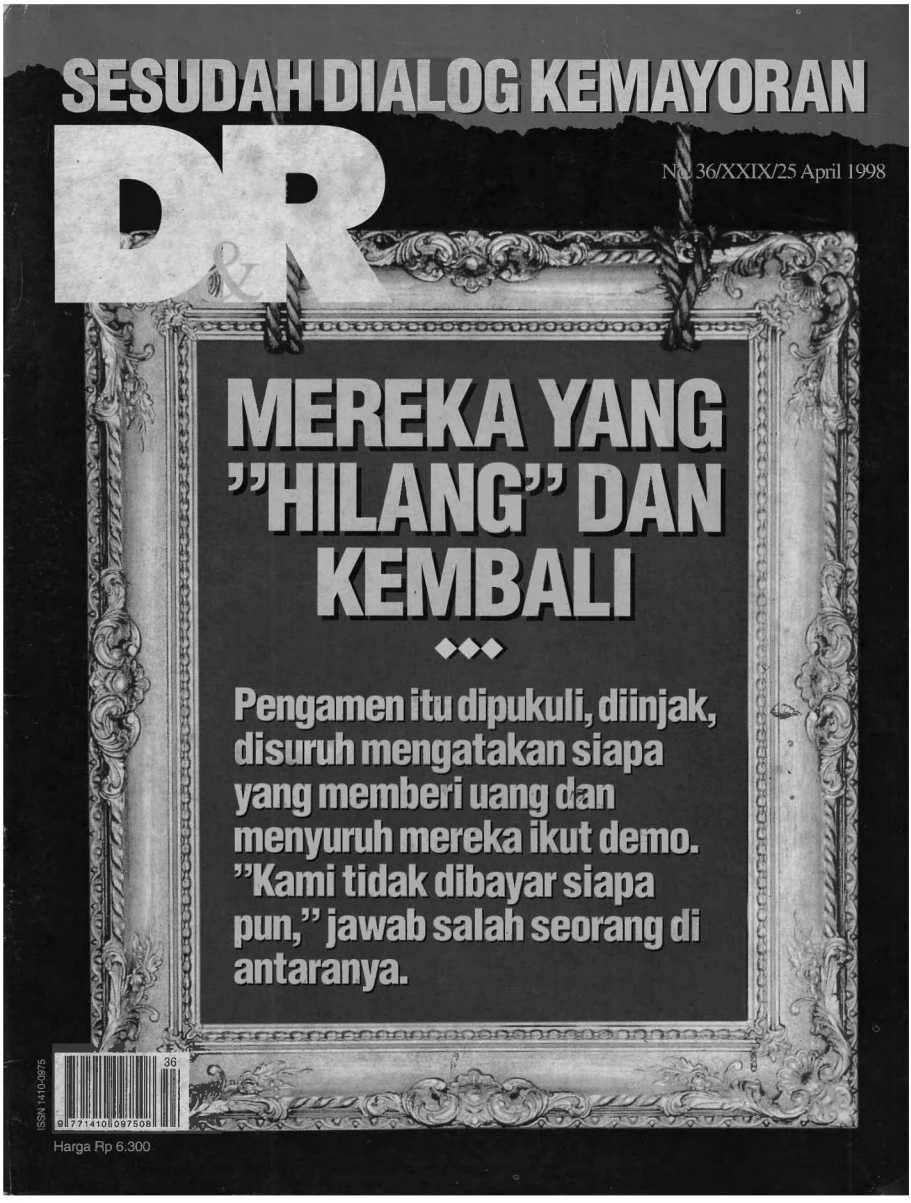

D&R
25 April 1998

27 APRIL 1998

Pius Lustrilanang, salah seorang korban penghilangan paksa yang telah dilepas pada 3 April, memberikan kesaksian di depan anggota Komnas HAM: Mayjen TNI (Purn) Samsuddin, Clementino dos Reis Amaral, dan Albert Hasibuan. Setelah memberikan kesaksian selama tujuh jam, sore harinya, Pius langsung terbang dengan pesawat KLM ke Belanda. Keberangkatan Pius ini direncanakan dengan hati-hati. Bahkan, keluarganya sendiri pun tidak tahu.

Komnas HAM sempat menyarankan Pius ke bandara dengan mobil Palang Merah Internasional. Akhirnya, Komnas HAM sendiri, yakni Bambang Soeharto dan A.R. Baramuli yang mengantarnya hingga ke pintu pesawat.

Alasan Pius berkampanye keluar negeri adalah untuk menunjukkan bahwa korban berani. Alasan lain adalah usaha apa pun di dalam negeri, meski porsinya sangat dominan, tetap memerlukan solidaritas internasional. Ini bukan nasionalisme sempit. Persoalan HAM bukan semata-mata persoalan domestik, tetapi sudah menjadi agenda dan standar hubungan internasional.

> **"Saya khawatir lima di antara mereka (korban penculikan) yang belum dikembalikan) telah meninggal. Dedy Omar Hamdun, Noval Said Alkatiri, Ismail, Sonny, Yanni Afri atau Ryan. Saya masuk ke sel tahanan 8 Februari. Saat itu Sonny dan Ryan sudah 9 bulan di sana. Menyusul Dedy Hamdun, Noval, dan Ismail. Tiga bulan kemudian, tiga orang ini dilepas atau dipindahkan ke tempat lain. Kemungkinan September atau Oktober 1997. Sementara, Sonny dan Ryan dikeluarkan 12 Maret 1998. Saya lihat**

sendiri keduanya dilepas. Namun, sekarang semua mereka itu belum pulang. Kalau selamat, seharusnya mereka sudah lebih dahulu berkumpul dengan keluarganya [...] Saya bicara begini dengan risiko mati, tetapi saya pilih itu karena saya ingin semua ini diakhiri."

| ***Pius Lustrilanang***, *korban penculikan, dalam berita Forum Keadilan ("Membentuk Tim, Mencari Penculik", 18 Mei 1998)*

Mayjen TNI (Purn.) Samsudin:

"Apa Mungkin Seorang Jenderal Bisa Melakukan Perbuatan Itu?"

PIUS LUSTRILANANG, salah seorang "mantan" orang hilang, akhirnya buka mulut. Masyarakat pun gempar. Sebab, dalam kesaksian yang dibeberkannya di Komnas HAM itu, tampaknya ia cenderung menuduh "aparat" sebagai pelaku penculikan dan penyiksaan yang dialaminya. Apa tanggapan Komnas HAM?

Pekan lalu, wartawan FORUM Tony Hasyim dan Ivan Haris merwawancarai Mayjen (Purn.) Samsudin, anggota Komnas HAM. Mantan anggota Kopassus berusia 61 tahun itu memang menjadi salah seorang anggota tim pemantau Komnas HAM. Dan, itu itulah yang biasanya terjun langsung dalam pengusutan-pengusutan kasus pelanggaran HAM. Berikut petikan wawancara dengan pria kelahiran Tanjungbalai, Sumatra Utara ini.

Komnas HAM tampaknya menilai kasus penculikan Pius sangat serius.

Sebetulnya, mengenai orang hilang itu, kami sudah lama minta kepada aparat agar segera menuntaskan masalah itu. Tapi, kok enggak juga dilakukan. Nah, akhirnya si Pius datang ke Komnas HAM. Dalam rangka pemantauan pertama, kami sudah mengirim orang menemuinya (beberapa hari setelah Pius muncul). Tapi, waktu itu dia masih belum berani mengatakan apa yang dialaminya selama hilang. Tapi, belakangan dia mau. Dengan syarat, ada jaminan keselamatan dari Komnas HAM. Kami bilang, "Oke, silakan datang." Begitulah. Akhirnya, kemarin dia memberikan keterangan.

Tapi kenapa menunggu lama sekali?

Dia menghilang 4 Februari, lalu muncul 3 April. Jadi, dia hilang selama dua bulan. Dan setelah lama keluar, baru memberi keterangan kemarin. Jadi, mula-mula dia tidak menggubris apa yang terjadi padanya selama dua bulan itu kepada Komnas HAM. Tapi, kami prosedur menanyakan, karena sebelumnya kan dia dibertakan hilang. Dan orang hilang (*missing person*) itu bagi Komnas HAM merupakan pelanggaran HAM yang bobotnya besar. Sebab, dampaknya bisa ke mana-mana, antara lain bisa timbul rasa ketakutan di masyarakat. Sehingga, timbul ketidakpastian, lalu suasana saling curiga. Itu kan suasana yang betul-betul tidak menguntungkan kita. Ke luar sana juga. Bagi dunia internasional, kasus itu bukan main besar bobotnya.

Pius berani bicara setelah ada jaminan keselamatan dari Komnas HAM?

Iya, secara moral kami jamin. Maksudnya, percayakanlah kepada kami.

Dia ke luar negeri itu juga dalam rangka perlindungan dari Komnas?

Oh, bukan. Begini. Awalnya dia itu mau minta suaka ke salah satu kedubes di sini. Tapi, saya bilang sama dia, "Pius, saya kira itu jalan kurang baik, bisa merusak hubungan negara kita dengan negara itu nanti. Kedua, Anda itu sebagai apa minta suaka sama mereka? Anda bukan orang hilang yang dicari karena politik. Anda kan dilepaskan. Selarang Anda orang bebas.." Lalu, dia bilang, "Kerana rasa keamanan saya tidak ada di sini."

Saya bilang lagi, kalau begitu, bagaimana kalau Komnas HAM menjaminkan keselamatan kamu kepada polisi? Sebab, polisilah yang paling berwenang menjaga setiap warga negara ini dari ancaman-ancaman keselamatan. Tapi, dia enggak mau juga. Lalu kami usulkan lagi, "Bagaimana kalau Anda tinggal di rumah salah satu anggota Komnas HAM?" Tapi Pius bilang, "Itu apalagi..." Dia bersikeras ke luar negeri. Ya, kami enggak bisa apa-apa lagi. Dia kan orang bebas, bukan orang yang dicekal, bukan orang yang dicari. Tapi, ntanya minta suaka ke salah satu kedubes kami cegah.

Dengan pergiya Pius itu, Komnas HAM akan sulit melakukan pengusutan bila harus ada pengecekan silang....

Justru itu, kami beri tahu, sebaiknya dia jangan ke luar negeri, karena kami mungkin masih perlu keterangannya. Sebab itu, kekuganya nanti bisa susah lagi. Waktu itu saya tanya, "Kamu ke luar negeri, orang tua kamu tahu enggak?" Dia bilang sudah diberi tahu. Ya, sudah, kami enggak bisa mencegah.

Pius itu jajur atau bohong?

Saya enggak berpretensi begitu, ya. Yang jelas, kan keterangan Pius itu disirkan ke mana-mana. Tapi, dari keterangan dia itu cenderung mengatakan itu tindakan aparat. Dan masyarakat juga cenderung memduh itu aparat.

Dari keterangan Pius itu, apa memang terkesan pelakunya aparat?

Begini, waktu itu kan saya tanya, "Apakah kamu berani mempertanggungjawabkan keterangan kamu ini. Sebab, kalau hal itu tidak benar, kamu bisa dituntut." Dia bilang, "Berani, bahkan saya memberi keterangan ini dengan risiko mati." Kenapa? Karena orang yang menculiknya mengancam dia: Pertama, dia harus mengatakan bahwa dia bukan ditahan, melainkan lari, bersembunyi diasuruh

MAYJEN TNI (PURN.) SAMSUDIN: *"Di Argentina, itu presidennya yang memerintahkan."*

orang PHD. Kedua, dia tidak boleh memberi keterangan kepada pers. Ketiga, kalau kedua persyaratan itu dilanggar, dia akan diburuh, kapan pun akan dicari.

Nah, waktu itu saya tanya sama dia, "Bisa tidak Anda mengidentifikasi siapa dan di mana?" Dia bilang, sama sekali tidak bisa. Sebab, begitu ditangkap dan dimasukkan ke mobil, matanya langsung ditutup. Tempat tahanan itu dia juga tidak tahu berada di mana.

Pius itu kan dianggap aktivis antipemerintah. Jadi, seharusnya sudah ketahuan, dong, siapa pelakunya?

Logikanya memang begitu. Tapi kan logika itu belum tentu benar.

Tapi, dari cerita Pius cara menculik dan menyiksanya sistematis begitu....

Yang namanya menculik, menyiksa, siapa pun bisa. Penjahat juga bisa. Cuma, kok, banyak orang yang berpersangka kepada ABRI. Hampir semua orang yang ketemu saya bilang, "Wah, ini mungkin ABRI, Pak .."

Jadi, apa menurut bapak mungkin pelakunya itu dari aparat kumsanas?

Begini. Sekarang kita lihat, ya. Saya tidak mengerti mengapa banyak yang menuduh itu dilakukan aparat. Tapi, saya yakin betul itu bukan merupakan suatu *policy* aparat.

Kenapa?

Karena saya kenal Pak Wiranto (Menhankam/Pangab). Dia bekas bawahan langsung saya. Dia tidak mungkin memerintahkan begitu. Orangnya melankolis, bahkan hampir romantisilah, ha-ha-ha.... Pak Zacky (Makaryo, Wakil Kepala BIA) juga saya kenal. Saya pernah berpersoni bersama dengan dia. Saya yakin, pikiran-pikiran begitu tidak ada sama mereka. Saya yakin betul-betul, itu bukan merupakan *policy* pimpinan ABRI. Tapi, karena banyak kecurigaan kepada aparat, adalah kewajiban bagi aparat untuk membongkar masalah itu. Cari siapa pelakunya. Tujuannya, pertama, untuk menimbulkan suasana aman, dan kedua, sekaligus membersihkan diri.

Anda kan bekas tentara, mungkinkah tentara berbuat begitu?

Kita jangan membicarakan itu dululah. Memang, tudahan banyak diarahkan kepada aparat. Kalau demikian halnya, berarti itu kewajiban aparat untuk mencari siapa pelakunya. Jadi, yang militer harusnya aparat sendiri. Seperti sewaktu tentara membersihkan diri dalam kasus Santa Cruz dulu (Insiden 12 November di Timor Timur). Memang saya, itu penyelesaian yang terbaik. Kalau ketahuan, langsung tuntut secara hukum. Buat apa melindungi anak buah yang ikki dan berakibat fatal seperti itu. Maka, kami minta supaya orang itu dicari. Harus dapat.

Mulai dari mana? Kan Pius tidak tahu siapa penculiknya dan di mana?

Kan bisa mulai dari Andi Arief itu. Dia kan diantar (oleh penculiknya) ke Mabes Polri. Unet saja dari situ. Tanya sama Mabes Polri, siapa yang mengantar dia ke situ, dari mana satuannya. Kan enggak mungkin polisi mau menerima begitu saja seorang tahanan kalau enggak jelas siapa yang menangkap orang itu dan dalam kasus apa. Pasti ada keterangan di situ, kan? Nah, dari situ saja diusut, terus dianglap sejelas-jelasnya, beraglar personalonya. Saya yakin, itu bisa dituntaskan.

Komnas sanggup menguatnya?

Kami bisa saja mengusut. Seperti kasus Marsinah, kemudian kasus Lapsus (Timor Timur). Jadi, kami beberkan, ini pelakunya, ini bukti-buktinya. Nah, kami cuma sampai begitu, enggak bisa sampai ke *punishment*.

Jadi, Pangab harus memberentuk Dewan Kehormatan Militer untuk itu?

Bisa dibentuk tim semacam itu, tapi bisa juga dilakukan secara fungsional saja. Misalnya, Mabes ABRI bikin tim dengan melibatkan aparat-aparat intel.

Anda yakin pimpinan ABRI tidak tahu-menahu soal ini?

Saya yakin, *hazad nazir*, itu bukan merupakan kebijaksanaan pimpinan ABRI. Paling tidak, saya yakin tidak ada perintah untuk itu. Sebab, kalau ada perintah dari pimpinan ABRI, tentunya kasus orang hilang ini bisa muncul di mana-mana, entah di Medan, Palembang, Lampung, Ujungpandang. Itu kan hanya di Jakarta.

Tapi, cara yang diterapkan ke Pius itu kok mirip *counter-insurgency*?

Ah, enggak. *Counter-insurgency* itu kan perang estigertiya. Itu teknik-teknik yang dipakai dalam negara polisional. Jadi, diciptakanlah suasana supaya orang-orang curiga satu sama lain, takut terus, dikiraki ke mana pun pergi. Itu jangan sampai terjadi di negara kita. Harus dicegah. Nah, kasus Pius ini belum sampai sejauh itu.

Kan, sudah ada yang terang-terangan mengaku diperlakukan seperti itu?

Walaupun itu terjadi, selama ini bukan *policy* asuan, tindakan tersebut belum dikatakan sebagai *counter-insurgency*. Kalau oknum mungkin bisa saja. Tapi, itu jelas bukan *policy*. Beda dengan yang terjadi di Argentina semasa rezim militer dulu. Kalau di Argentina kan memang presidennya yang memerintahkan. Kalau di republik ini enggak ada. Potong kuping saya nih, kalau benar ada *policy* dari Presiden atau Pangab untuk begitu.

Mengapa sampai sekarang belum ada langkah konkret dari ABRI?

Itulah. Komnas HAM sejak munculnya isu orang hilang ini sudah minta supaya aparat proaktif. Cari orang itu. Kalau sudah kembali, dilpanggil, minta keterangan, ke mana dia selama hilang. Tapi, sampai Pius dan Haryanto Taslam muncul pun enggak dipanggil. Malah orang hilang ini yang ditang ke Komnas. Akhirnya jadi ramai begini.

Akhirnya, rakyat percaya bahwa itu tindakan aparat?

Saya enggak bilang begitu. Yang jelas, ABRI terlanjur.

Tapi, mungkinkah kasus orang hilang ini hasil rekayasa?

Bisa saja itu untuk menyudutkan ABRI, untuk menyudutkan pemerintah. Tapi, siapa yang melakukan, kita enggak tahu.

Menurut Pius, dalam pemeriksaan itu ia ditanya keterkaitannya dengan Megawati dan Benny Moerdani, mengapa?

Bisa juga pertanyaan itu dirusuhkan supaya Pak Benny, dianggap memberontak. Katanya kan begitu. Bisa saja penculikan itu di-*create* untuk memukul seseorang.

Apa motknal penculikan itu, kalau seiama dua bulan Pius hanya diperiksa dua hari, dan pemeriksa tidak mengorek informasi detail, sampai dia dilepaskan?

Saya juga enggak mengerti apa maunya penculik itu. Apa maksudnya dia nanpo-sanya ke situ. Mungkin saja orang-orang itu punya tujuan yang tidak baik. Dia pasti tahu negara ini sedang dalam krisis. Dia pasti tahu kita sedang bertregelasi dengan IMF. Dia pasti tahu negara kita lagi disoroi oleh masyarakat dunia. Kok, di tengah-tengah situasi begini, dia tega melakukan tindakan tersebut. Di kan enggak berjiwa patriot. Sekarang kita menjadi tambah sulit kan? Dunia internasional bisa enggak percaya sama kita. Jadi, motif pelaku penculikan itu ancb. Maka, saya enggak percaya kalau itu perintah dari pimpinan ABRI.

Kalau dari pimpinan ABRI di bawah level Pangab?

Ah, enggak mungkin. Saya yakin tidak ada perintah atasan dalam kasus itu. Sebut sajalah, apakah Prabowo, Zacky, Sjafrie.... Mereka itu perwira tinggi dan orang pintar. Apa mungkin seorang jenderal, dalam kedudukan negara yang sulit begini, bisa melakukan perbuatan itu? Bisa bencur kan negara ini. Maka, enggak mungkin kalau itu perbuatan mereka. Saya cenderung itu dilakukan oleh orang-orang yang punya maksud tidak baik terhadap negara ini. Saya enggak tahu anak orang itu ke mana. □

Forum Keadilan
18 Mei 1998

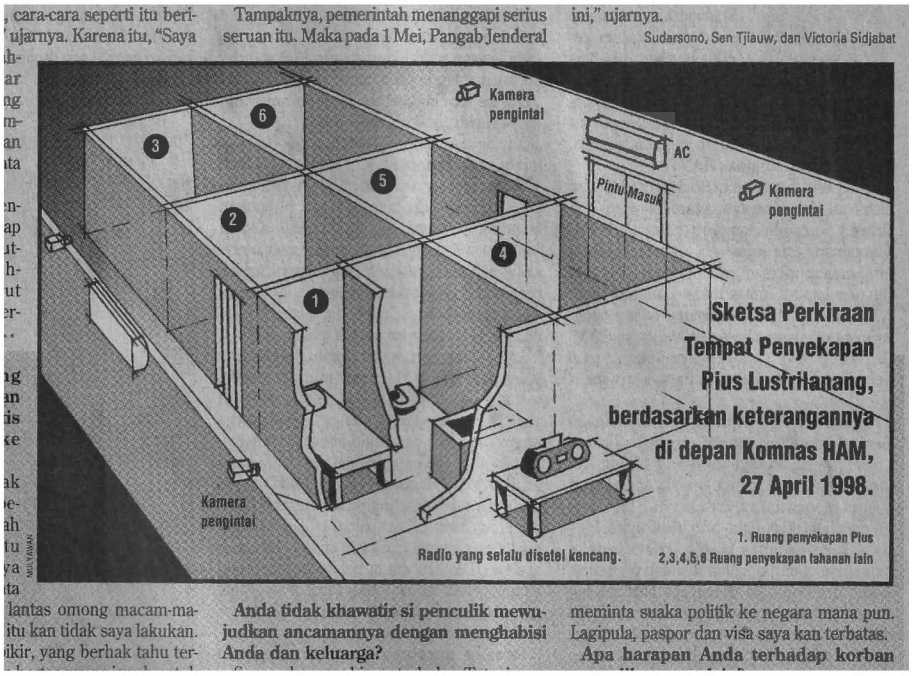

Forum Keadilan
18 Mei 1998

luarga mereka sudah melaporkan kepolisian, tapi belum ada tanggapan. Suyat hilang di Solo awal Februari 1998. Adapun Bimo lenyap di Jakarta sebulan kemudian.

Konon, Bimo ditangkap aparat karena diduga terlibat dalam kasus peledakan bom di Tanahtinggi. Namun, hingga kini ayahnya, Utomo Raharjo, yang tinggal di Malang, tak pernah tahu keberadaannya. "Saya berharap ia segera dibebaskan seperti aktivis lainnya," ujar Utomo kepada FORUM.

Menurut Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, sampai saat ini tidak ada kebijakan pemerintah dan politik ABRI untuk menghilangkan aktivis LSM maupun mahasiswa. "ABRI sadar betul, cara-cara seperti itu berisiko sangat berat," ujarnya. Karena itu, "Saya sudah memerintahkan Kapolri agar mencari orang-orang hilang itu dan memberikan penjelasan secara terbuka," kata Wiranto.

Komnas HAM tentu menyambut sikap Wiranto. Pengusutan yang sungguh-sungguh, menurut Komnas dalam pernyataannya, dapat menjernihkan syak wasangka masyarakat terhadap ABRI. Sejalan dengan itu, juga perlu dilakukan penuntutan hukum terhadap para pelaku dengan membentuk sebuah Komisi Penyelidik Nasional (KPN), seperti yang dibentuk pemerintah untuk mengungkap kasus Santa Cruz pada 1991.

Menurut Marzuki, pembentukan KPN penting karena kasus orang hilang di Indonesia kini disorot dunia internasional. Di mata dunia, menurut mantan anggota DPR itu, kasus HAM kadang lebih penting daripada perbaikan demokrasi. "Dampak internasional itu juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi negara kita," ujarnya.

Tampaknya, pemerintah menanggapi serius seruan itu. Maka pada 1 Mei, Pangab Jenderal Wiranto mengumumkan pembentukan tim kecil yang bertugas membantu untuk menuntaskan masalah orang hilang. Tim ini terdiri dari Komandan Polisi Militer, serta dua asisten Kepala Staf Umum ABRI; bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat dan bidang Intelijen.

Nah, siapa kira-kira pelakunya? Tidak jelas. Yang pasti, anggota Komnas HAM Samsuddin yakin, kalaupun dilakukan aparat, semua itu bukan kebijakan Pangab atau petinggi ABRI lainnya. "Enggak mungkin. Mereka itu perwira tinggi dan orang pintar. Saya cenderung yakin ini dilakukan mereka yang mempunyai maksud tidak baik terhadap negara ini," ujarnya.

Sudarsono, Sen Tjiauw, dan Victoria Sidjabat

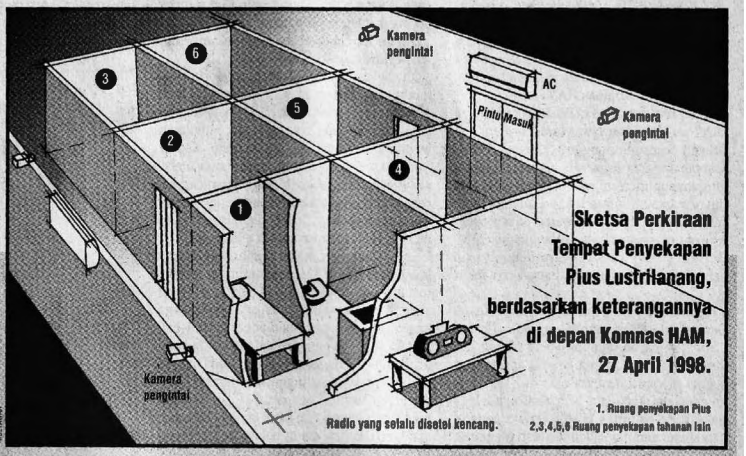

Sketsa Perkiraan Tempat Penyekapan Pius Lustrilanang, berdasarkan keterangannya di depan Komnas HAM, 27 April 1998.

Anda dituding tidak kesatria dan tidak nasionalistis karena pergi ke luar negeri....

Kalau saya tidak *gentlement* dan pengecut, saya sudah berangkat begitu dibebaskan. Saya bisa langsung minta suaka politik dan lantas omong macam-macam di sana. Tapi, itu kan tidak saya lakukan. Karena, saya berpikir, yang berhak tahu terhadap kasus ini dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Yang tidak nasionalistis itu justru mereka yang menculik dan menangkap tanpa prosedur, pada saat mata dunia sedang tertuju ke Indonesia. Mereka sengaja menjelek-jelekkan Indonesia di mata internasional dengan melakukan aksi-aksi semacam itu.

Lalu, mengapa Anda berkampanye ke luar?

Pertama, untuk menunjukkan bahwa saya berani. Kedua, karena usaha apa pun di dalam negeri, meski porsinya sangat dominan, tetap memerlukan solidaritas internasional. Nasionalisme saya tidak sempit. Persoalan HAM bukan semata-mata persoalan domestik, tetapi sudah menjadi agenda dan standar hubungan internasional.

Anda tidak khawatir si penculik mewujudkan ancamannya dengan menghabisi Anda dan keluarga?

Semua kemungkinan terbuka. Tetapi, masalah ini bukan cuma masalah saya atau keluarga saya. Sudah menjadi masalah seluruh rakyat Indonesia dan mendapat sorotan internasional. Jadi, sekarang tanggung jawab keamanan diri dan keluarga saya, keselamatan para saksi, sudah menjadi tanggung jawab publik.

Ada usul agar dibentuk komisi pencari fakta dalam kasus orang hilang....

Memang, perlu ada komisi yang betul-betul independen dan melibatkan banyak pihak untuk mengumpulkan fakta dan menyerahkannya ke sebuah pengadilan yang bebas dari intervensi.

Kalau komisi itu terbentuk dan bekerja, Anda mau pulang untuk bersaksi?

Saya pasti akan pulang. Saya WNI dan tak meminta suaka politik ke negara mana pun. Lagipula, paspor dan visa saya kan terbatas.

Apa harapan Anda terhadap korban penculikan yang lain?

Bagi yang sudah bebas, saya sarankan agar bicara terbuka dan sejujurnya mengenai pengalaman selama diculik. Toh, mereka tinggal mengonfirmasikan apa yang saya katakan saja. Risiko terberat kan sudah saya tanggung.

Menurut keyakinan Anda sendiri, siapa penculiknya?

Saya sendiri tidak mempunyai bukti.

Di sel Anda pernah bertatap muka dengan Andi Arief atau Haryanto Taslam?

Sel saya itu nomor enam. Saya tak pernah bertatap muka, hanya mendengar suara dan bicara dari balik jeruji. Kamar itu ada AC-nya dan warna dindingnya putih.

Sebelumnya, Anda pernah ditahan?

Belum pernah. Tapi, kalau diinterogasi, sih, sering. ❑

Forum Keadilan
18 Mei 1998

Kompas ►
26 Desember 1998

KILASAN PERISTIWA MARET-APRIL 1998

Pius: Saya Ingin Semua Ini Diakhiri

MISTERI penculikan aktivis akhirnya terkuak setelah aktivis Pius Lustrilanang, tampil memberikan testimoni di depan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Albert Hasibuan dan Samsudin, Senin 27 April 1998. Sehari sebelumnya, Pius tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dijemput Albert Hasibuan.

Di depan anggota Komnas HAM, Pius seakan mengkonfirmasi pengetahuan masyarakat. "Saya memang diculik oleh sekelompok orang tak dikenal, 4 Februari 1998 di depan RSCM Jakarta," ucap Pius yang juga mengaku dirinya disekap dalam sel dan disiksa. Dalam sel itulah, Pius bertemu dengan Haryanto Taslam (PDI Perjuangan) dan Desmond J Mahesa (LBH Nusantara).

Pius menceritakan kisah penculikannya dengan detail. Di bagian kesaksiannya ia mengatakan, jiwanya terancam setelah membeberkan peristiwa yang dialaminya. "Saya bicara begini dengan risiko mati, tetapi saya pilih itu karena saya ingin semua ini diakhiri," ucapnya.

Pius memang menjadi pionir. Meski ia pun tak mau konyol. Setelah memberikan kesaksian ia segera pergi ke luar negeri, diantar anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) AA Baramuli dan Bambang W Soeharto.

Setelah kesaksian Pius, korban-korban penculikan pun bermunculan dan memberikan kesaksian. Kasus penculikan yang melibatkan anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) pun, mulai digelar di Mahkamah Militer Tinggi. Bulan Maret-April bisa disebutkan bulan penculikan karena begitu banyak aktivis yang diculik.

Kompas/arb

BISIKAN — *Kuasa hukum Pius Lustrilanang, Hendardi, membisiki Pius agar tetap tenang menyampaikan kisah penculikan dirinya di Komnas HAM.*

10 Maret

Sebuah hajatan yang diberi nama Indonesian People's Summit atau Kongres Indonesia diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Acara itu dibubarkan aparat kepolisian sebelum dibuka. Koordinator acara, Ratna Sarumpaet, ditangkap aparat kemudian diadili dengan tuduhan melanggar UU No 5/PNPS/1963 tentang Kegiatan Politik.

12 Maret

Penghilangan paksa aktivis makin menjadi-jadi. Enam orang aktivis "diambil" dari tempat yang berbeda-beda, yaitu Herman Hendrawan, Feisol Reza, Rahardjo Waluyo Djati, Nezar Patria, Mugianto, dan Aan Rusdianto.

26 Maret

Kabar duka dan mengejutkan menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia. Dalam upaya pemulangan paksa oleh Pemerintah Malaysia terhadap imigran gelap asal Indonesia, terjadi kerusuhan di kamp penampungan Semenyih.

28 Maret

Satu lagi aktivis yang dicari-cari aparat keamanan, Andi Arief, akhirnya "diambil paksa" dari tempat kediaman kakak kandungnya di Lampung. Andi Arief diculik sekelompok aparat selama beberapa hari sebelum kemudian diserahkan ke Mabes Polri, 17 April. Namun, pejabat kepolisian membantah Andi Arief telah diculik karena mereka menyatakan merekalah yang telah menahan sang aktivis selama ini.

3 April

Setelah dikabarkan hilang sejak 4 Februari, Pius dan Desmond dipastikan sudah kembali ke rumah orangtua masing-masing. Pius "dikembalikan" ke Palembang (Sumsel), sedangkan Desmond pulang ke Banjarmasin (Kalsel). Saat kembali itu, baik Pius maupun Desmond belum siap mengungkapkan di mana keberadaan mereka selama dua bulan sejak "hilang" tersebut.

17 April

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan 1993/1998, Haryanto Taslam yang tidak jelas kabar beritanya sejak 2 Maret, mengabarkan kepada kawan-kawannya di Jakarta bahwa dia telah berada kembali di tengah keluarganya, di Surabaya.

22 April

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Kepailitan resmi diberlakukan untuk menggantikan Peraturan Kepailitan tahun 1906. Dalam Perpu Kepailitan itu ditetapkan pula pembentukan Pengadilan Niaga di Jakarta. **(oki)**

30 APRIL 1998

Komnas HAM secara resmi merilis pernyataan sikap terkait penculikan dan penghilangan paksa manusia di depan jurnalis nasional dan asing. Pernyataan sikap dibacakan Wakil Ketua II Komnas HAM Marzuki Darusman didampingi Wakil Ketua I Miriam Budiardjo, anggota Clementino dos Reis, Albert Hasibuan, Sugiri, dan Djoko Sugianto.

Aktivis prodemokrasi telah dihilangkan secara paksa oleh kelompok yang terorganisasi dan tidak menutup kemungkinan terlibatnya unsur aparatur keamanan.

Penghilangan orang secara paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kejahatan itu melanggar pasal-pasal Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Khususnya menyangkut hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas harkat manusia, hak untuk tidak disiksa dan tidak diperlakukan secara manusiawi, serta hak untuk bebas dari rasa takut.

Komnas HAM menilai pemerintah dan ABRI, khususnya kepolisian, kurang serius menangani kasus ini. Sudah dua bulan masyarakat meributkan adanya orang hilang, tetapi aparat malah menjawab dengan belum mendapat laporan.

Perlu dilakukan penuntutan hukum terhadap para pelaku dengan membentuk sebuah Komisi Penyelidik Nasional (KPN), seperti yang dibentuk pemerintah untuk mengungkap kasus Santa Cruz pada 1991. Pembentukan KPN penting karena kasus orang hilang di Indonesia kini disorot dunia internasional. Di mata dunia, kasus HAM kadang lebih penting daripada perbaikan demokrasi. Dampak internasional itu juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi negeri kita.

Kita jangan sampai berhenti menyuarakan agar yang bersalah diajukan ke pengadilan. Dan kita tidak boleh berhenti dalam menegakkan HAM dan menyuarakan kebenaran serta keadilan.

✦✦✦

Wawancara Prof. Dr. Arief Budiman:

"Kasus Orang Hilang Indikasi Penguasa Sudah Panik"

Sosiolog terkemuka **Prof.Dr.Arief Budiman**, 57 tahun, menggambarkan penguasa sekarang ibarat kerbau yang sudah terluka parah. Gambaran itu dia kemukakan sehubungan dengan gejala tersembunyi di balik hilang atau dihilangkannya sejumlah aktivis yang dikenal kritis dan vokal terhadap pemerintah. Kepada **Iwan Setiawan** dari **TEMPO** ***Interaktif***, dosen yang di"mantan"kan dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, ini menjelaskan bahwa penculikan terhadap aktivis itu dikarenakan penguasa sudah panik dan tidak tahu bagaimana mempertahankan kekuasaannya.

Lantas siapa yang menculik para aktivis itu? Kemungkinan besar adalah militer. Alasannya, sederhana. Menurut Guru Besar di Melbourne University, Australia ini, dalam setiap menangani permasalahan yang timbul, ABRI hanya diajar untuk menyelesaikannya dengan pendekatan represif, bukan dengan negosiasi.

Benarkah gejala orang hilang ini adalah tanda keruntuhan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto? Berikut penuturan lengkap Arief Budiman yang diwawancarai melalui telepon, Kamis, 30 April, seputar orang hilang itu.

Akhir-akhir ini di Indonesia banyak aktivis yang hilang, di negara semacam apa biasanya hal itu terjadi?

Penculikan terhadap aktivis yang berbeda pandangan politiknya dengan pemerintah biasanya terjadi di negara yang otoriter, di mana praktek penghilangan orang semacam itu sudah memanipulasi hukum. Selain otoriter, praktek penculikan itu terjadi di negara yang menggunakan kekuatan senjata untuk berkuasa.

Praktek penculikan seperti itu banyak terjadi di negara yang dikuasai oleh diktator militer, misalnya di negara-negara Amerika Latin, seperti Argentina, ketika Jenderal Jorge Videla menjadi presiden tahun 1976. Lantas di Chili, ketika Jenderal Augusto Pinochet mengkudeta presiden sipil Allende di tahun 1970-an. Setelah berkuasa, mereka biasanya menggunakan teror, termasuk penculikan dan pembunuhan lawan-lawan politik mereka untuk terus mempertahankan kekuasaannya.

Pemerintah selalu bilang bahwa Indonesia negara demokratis, mengapa kasus orang hilang dapat terjadi di sini?

Apa yang terjadi di Amerika Latin tidak ada bedanya dengan yang terjadi di Indonesia. Walaupun secara teori Indonesia menganut demokrasi, kenyataannya saluran untuk menyampaikan aspirasi rakyat tersumbat. Ada dua arus politik yang selama ini tidak bersentuhan di Indonesia, yaitu arus atas di mana pemerintah dan elit politik saling berproses tanpa menyentuh realita yang terjadi di masyarakat atau arus bawah. Lihat saja,

Tempo Interaktif
Mei-Juni 1998

selama krisis ekonomi ini rakyat sudah banyak mengeluh, tetapi sebaliknya DPR dan MPR sama sekali tidak bereaksi, bahkan omong pun takut. Ketika banyak rakyat yang tidak setuju dengan pencalonan Soeharto sebagai presiden, toh kenyataannya Soeharto terpilih menjadi presiden dengan suara bulat.

Jadi arus atas ini benar-benar mengambang di awang-awang, sementara arus bawah bergolak dengan hebatnya. Hingga akhirnya masyarakat habis kesabarannya dan mengambil tindakan sendiri, seperti terlihat lewat aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang banyak terjadi sekarang ini. Menghadapi aksi semacam ini, militer tak punya cara lain untuk mengatasinya, sehingga terjadilah penculikan aktivis itu.

Bukankah ABRI telah mengeluarkan pernyataan bahwa Mabes ABRI tidak pernah mengeluarkan perintah untuk menculik para aktivis?

Militer di Indonesia tidak punya koordinasi yang bagus antara satu kesatuan dengan yang lainnya. Saya ingat ketika tahun 1974, setelah berdemonstrasi, Hariman Siregar ditangkap aparat keamanan lewat suatu operasi khusus yang tidak diketahui oleh petinggi militer lainnya. Jika tindakan itu sudah terlanjur dilakukan salah satu kesatuan, maka ABRI terpaksa mengakuinya, karena mereka tidak ingin perpecahan di tubuh militer itu diketahui rakyat.

Ada kemungkinan bahwa kasus orang hilang yang sekarang terjadi juga dilakukan oleh kesatuan tertentu di militer yang merasa punya kekuasaan, dan walaupun operasi itu tidak disetujui oleh petinggi militer lainnya, ABRI terpaksa menyetujuinya. Tetapi bagaimanapun juga, Panglima ABRI adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kasus orang hilang ini.

Artinya penculikan aktivis ini bukanlah suatu perintah yang berasal dari Mabes ABRI?

Kemungkinan besar memang ada suatu kesatuan khusus yang melakukan operasi militer rahasia untuk menculik para aktivis itu. Dan sepertinya Panglima ABRI pun juga tidak mengetahui adanya operasi khusus ini. Jadi penculikan ini menurut saya bukanlah atas perintah Mabes ABRI.

Dari kesatuan mana yang melakukan ini?

Saya punya dugaan kuat mengenai kesatuan ini, tetapi karena saya tidak punya cukup data atau bukti mengenai keterlibatan mereka, untuk sementara waktu saya tidak dapat menyebut kesatuan mana yang melakukan penculikan ini. Yang jelas, kesatuan ini anggotanya bukan ABRI sembarangan, mereka telah terbiasa melakukan operasi-operasi militer rahasia dan tugas penculikan semacam itu. Anggota kesatuan ini adalah orang-orang pilihan dengan keahlian khusus. Antara lain mereka pernah bertugas dalam operasi militer di Timor-Timur.

Mungkinkah yang melakukan penculikan itu berasal dari kepolisian?

Setahu saya hubungan antara polisi dan militer tidak baik. Seringkali pejabat militer memandang polisi terlalu rendah, sebaliknya polisi menganggap militer itu sombong. Dan jika polisi melakukan penangkapan, mereka biasanya memakai prosedur, ada proses verbal, juga BAP. Sedangkan tentara menganggap cara polisi ini terlalu lembek, maunya militer main hantam saja, tanpa peduli hukum dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bahwa yang melakukan penculikan ini bukan polisi, tapi militer.

Apa yang dapat dilakukan oleh ABRI untuk "membersihkan dirinya" di mata masyarakat?

ABRI berada dalam posisi yang sulit. Dalam kondisi normal, cara terbaik yang dapat dilakukan ABRI adalah dengan cara menyelidiki dan menjatuhkan sanksi kepada anggota ABRI yang terlibat. Tetapi jika hal itu dilakukan dalam kondisi sekarang, posisi ABRI akan semakin lemah dan unjuk rasa akan semakin

gencar. Sedangkan bila ABRI menyangkal keterlibatannya dalam kasus orang hilang ini, wibawa ABRI di mata masyarakat akan jatuh, karena masyarakat tidak percaya lagi pada ABRI.

Dalam posisi demikian, biasanya ABRI akan memilih langkah yang mana?

Dari contoh-contoh yang terjadi selama ini, menurut saya ABRI akan cenderung menyangkal, atau setidaknya mengambangkan kasus ini. Jadi ABRI tidak akan secara terang-terangan menyangkal, tetapi mereka juga tidak mungkin mengakui.

Apakah langkah yang dilakukan ABRI untuk menyikapi kasus orang hilang ini sudah mencukupi?

Saya kira belum mencukupi sama sekali. Setelah kasus orang hilang ini, citra ABRI sudah rusak, terlebih dengan pengakuan Pius Lustrilanang kepada Komnas HAM. Saya kira ABRI saat ini sedang bingung bagaimana mencari cara untuk membersihkan diri.

Jika Anda berada dalam posisi Pius, apa yang akan Anda lakukan?

Saya terus terang merasa kagum dengan keberanian Pius untuk memberikan kesaksian bahwa dirinya telah diculik. Apalagi jika ia berani bilang bahwa salah seorang yang menginterogasinya adalah lulusan Akabri. Berarti dugaan saya bahwa aksi ini dilakukan militer memang benar. Jika akhirnya Pius memilih ke Belanda untuk menenangkan diri, saya bisa mengerti. Karena bagaimanapun juga Pius juga seorang manusia biasa yang punya rasa takut dan khawatir.

Artinya, Anda setuju dengan tindakan Pius yang memilih terbang ke Belanda setelah memberi kesaksian di Komnas HAM?

Ya. Soalnya siapa yang bisa menjamin keamanan Pius jika ia tetap berada di Indonesia. Idealnya memang Pius berada di Indonesia, tetapi kita tahu bagaimana lemahnya hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan di Indonesia. Saya yakin Pius pergi ke Belanda bukan untuk melarikan diri, ia tetap mencintai Indonesia. Dan Pius bisa tetap berjuang menegakkan demokrasi di tanah air, walaupun dari Belanda. Menurut saya, buat orang seperti Pius, ia tetap bisa berbuat sesuatu yang berguna untuk tanah airnya, di mana pun ia berada. Sampai kondisi aman, mungkin Pius baru bisa kembali ke Indonesia.

Mengapa kasus orang hilang ini baru terjadi sekarang?

Sebenarnya dalam pemerintahan Orde Baru, kasus orang hilang ini sudah terjadi sejak lama. Perbedaannya, jika dulu yang menjadi sasaran operasi militer semacam ini adalah gerakan perlawanan bersenjata seperti di Aceh, Irian, atau Timor-Timur, sekarang yang hilang adalah aktivis mahasiswa yang melawan pemerintah secara *non-violence*, yang tidak bersenjata.

Biasanya penculikan para aktivis itu terjadi ketika gerakan perlawanan rakyat sudah mulai meluas. Lihat saja yang terjadi di Indonesia sekarang, hampir setiap hari ada demonstrasi menuntut pergantian pemimpin negara. Akibatnya penguasa kebingungan dan melakukan teror dengan penculikan.

Apa tujuan dari penculikan aktivis tersebut?

Saya pikir militer yang melakukan penculikan itu tidak punya konsep lain untuk mengatasi gerakan yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi, kecuali dengan intimidasi dan tindakan represif. Bila gerakan perlawanan rakyat mulai meluas, biasanya aturan hukum yang ada tidak mampu mencegah gerakan itu. Tujuan dari penculikan pemimpin gerakan yang dianggap vokal dan kritis adalah untuk mematikan perlawanan rakyat tersebut. Karena penguasa menganggap bahwa keberadaan gerakan itu tergantung pada pemimpinnya. Hal ini benar jika kepemimpinan itu bersifat kharismatis, seperti gerakan keagamaan dalam sekte-sekte agama tertentu, misalnya aliran Islam yang menyimpang, yang dipimpin Mbah Suro.

1 MEI 1998

Dari Eropa via sambungan telepon internasional, Pius Lustrilanang di layar kaca Liputan 6 Petang SCTV, blak-blakan menceritakan penculikan dirinya. "Saya cuma mau menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Cuma mau menangkap fakta agar pihak internasional tahu.

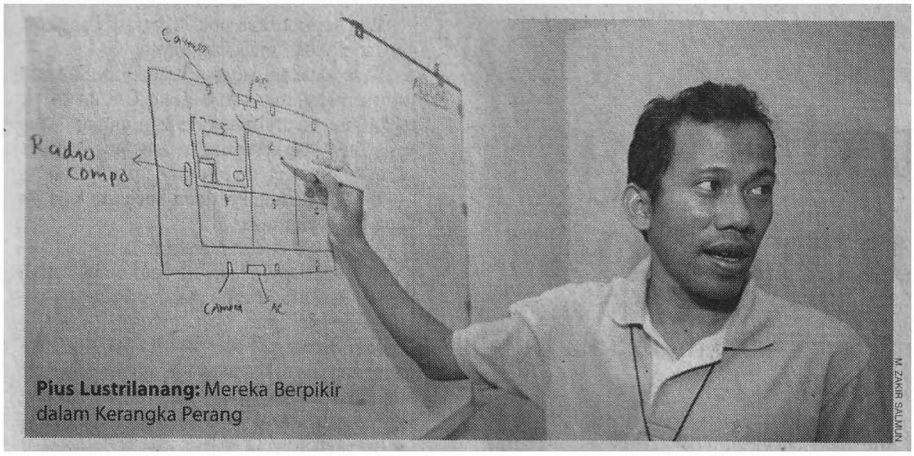

Pius Lustrilanang: Mereka Berpikir dalam Kerangka Perang

M. ZAKKI SAMAN

Panji Masyarakat
29 Juli 1998

"Yang menjelek-jelekkan negara justru para penculik itu."

| ***Pius Lustrilanang***, *korban Penculikan*

Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Hamami Nata menyangsikan kebenaran keterangan yang disampaikan Pius Lustrilanang saat di Den Haag, Belanda maupun di berbagai forum di Eropa dan Amerika. Ketika hilang, keluarganya melapor ke Polda, tapi setelah muncul kembali, ia tidak melapor. Padahal dari laporannya itu polisi bisa mengidentifikasi orang yang dilaporkan hilang.

"Menolak tudingan bila pihak kami tidak menanggapi laporan mengenai orang hilang. Dalam kasus Pius, sejumlah reserse diutus ke Bandung untuk mengusut.

Polisi berhasil menemui kekasih Pius dan mendapatkan fotonya, langkah selanjutnya polisi menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO)."

| ***Letkol Pol Edward Aritonang**, juru bicara Polda Metro Jaya, bbukan kutipan langsung dari ucapan dirinya, dalam berita Bernas ("Para Penculik Bikin Malu Negara", 2 Mei 1998)*

"Kami akan berusaha menjelaskan, kalau ada pihak asing bertanya, penculikan-penculikan itu bukan kebijakan pemerintah dan aparat keamanan RI."

| ***Ali Alatas**, Menteri Luar Negeri, bukan kutipan langsung dari ucapan dirinya, dalam berita Bernas ("Para Penculik Bikin Malu Negara", 2 Mei 1998)*

Bernas
2 Mei 1998

Pius: Penculik Bikin Malu Negara

* Pangab Bentuk Tim Kecil

Jakarta, Bernas

Pius Lustrilanang yang saat ini ada di Den Haag, Belanda akan membeberkan fakta seputar penculikan dirinya di Parlemen Inggris juga di berbagai forum di Eropa dan Amerika, sementara Menhankam/Pangab telah membentuk tim kecil untuk meneliti kemungkinan terlibatnya anggota ABRI dalam kasus penculikan dan hilangnya para aktivis.

Di tempat terpisah, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Hamami Nata menyangsikan kebenaran keterangan Pius baru-baru ini, padahal Pangab sendiri sudah memerintahkan Kapolri Jenderal untuk meneliti kasus orang hilang tersebut.

Dalam wawancara [illegible] telepon internasional pada siaran *Liputan 6 Petang SCTV*, Jumat (1/5), Pius menyatakan apa yang dilakukannya bukanlah untuk mencemarkan atau menjelek-jelekan Indonesia.

"Saya cuma mau menj[illegible]kan yang sebenarnya t[illegible] Cuma mau mengungkap[illegible] agar pihak internasional [illegible] Yang menjelek-jelekkan [illegible] justru para penculik itu[illegible]

mereka tak tahu bahwa informasi begitu mudah diakses di mana-mana," kata alumnus Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung itu.

Di Jakarta kemarin, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Hamami Nata menyangsikan kebenaran keterangan Pius. Karena itu, katanya, sebaiknya Pius memberi keterangan kepada penyidik sehingga kasus sebenarnya bisa terungkap dengan jelas.

Ketika hilang, keluarganya melapor ke Polda, tapi setelah muncul kembali, ia tidak melapor. Padahal dari laporannya itu polisi bisa mengindentifikasi orang yang dilaporkan hilang itu, kata Hamami.

Mengenai kesediaannya jika sewaktu-waktu dia diminta polisi untuk membantu memberikan keterangan, Pius menyatakan bersedia asal ada jaminan. "Sedapat mungkin saya akan bantu polisi. Saya juga akan pulang jika ada jaminan kongkret baik secara fisik maupun psikis dari ABRI," ujarnya.

Mengenai rencana setelah dari Den Haag, Pius mengungkapkan akan ke Brussel kemudian Jerman untuk menemui teman-teman Indonesia dan terakhir di Inggris untuk berbicara di parlemen. Menurut keterangan, pihak Amerika juga meminta Pius memberi kesaksian dalam sebuah sidang di kongres.

Mengenai petualangan Pius di luar negeri setelah bebas dari penculikan, Menteri Luar Negeri Ali Alatas kemarin di Jakarta mengatakan pihaknya akan berusaha menjelaskan -- kalau ada pihak asing yang bertanya -- bahwa penculikan-penculikan itu bukan kebijakan pemerintah dan aparat keamanan RI.

Sambil mengatakan bahwa Panglima ABRI sendiri sudah membentuk tim kecil untuk mengusutnya, Alatas menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu memang bisa membikin malu pemerintah kita di mata internasional.

Jenderal Wiranto mengatakan, ABRI telah membentuk sebuah tim kecil yang terdiri atas Komandan Puspom ABRI (Mayjen TNI Sjamsu D), Askamtibmas Kasum ABRI (Mayjen Pol Marwan Fariz) untuk meneliti apakah ada anggota ABRI yang terlibat dalam kasus itu.

Bersambung ke hal. 7 kol. 4

Pius: Penculik - - -

Sambungan dari hal. 1

Setelah menghadiri pertemuan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ Habibie dengan pimpinan DPR, unsur DPP ketiga Orsospol di Bina Graha kemarin, Wiranto menegaskan kembali bahwa tidak ada kebijaksanaan pemerintah termasuk ABRI untuk menghilangkan sesorang.

Menurut pengacara, Trimoelja D Soerjadi SH, kasus-kasus penculikan itu hendaknya segera diungkapkan untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada ABRI.

"Kalau ada unit-unit kecil dalam tubuh ABRI yang terlibat, saya kira perlu diungkap tanpa tedeng aling-aling, dan kasus orang hilang ini jangan dikecilkan," katanya kemarin.

"Tidak perlu takut tercoreng, malu dan gengsi segala. Kita akan memaklumi kok karena di dalam percaturan politik adanya kepentingan-kepentingan elit kekuasaan *out of control* lalu menculik," tambahnya.

Sementara itu, juru bicara Polda Metro Jaya Letkol Pol Edward Aritonang menepis tudingan bahwa pihaknya tidak menanggapi laporan mengenai orang-orang hilang itu.

Dalam kasus Pius, misalnya, ia menyatakan sejumlah reserse telah diutus ke Bandung untuk mengusut. Polisi antara lain berhasil menemui kekasih Pius dan mendapatkan fotonya, langkah selanjutnya polisi menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang).(yos/ant/ded/wip/jpg/*)

Bernas
2 Mei 1998

"Kalau ada unit-unit kecil dalam tubuh ABRI yang terlibat, saya kira perlu diungkap tanpa tedeng aling-aling, dan kasus orang hilang ini jangan dikecilkan."

| ***Trimoelja D. Soerjadi**, advokat, dalam berita Bernas ("Para Penculik Bikin Malu Negara", 2 Mei 1998)*

"Tidak ada kebijaksanaan pemerintah termasuk abri menghilangkan seseorang. Berisiko sangat berat. Saya sudah memerintahkan Kapolri agar mencari orang-orang hilang itu dan memberikan penjelasan terbuka."

| ***Jenderal TNI Wiranto**, Menhankam/Pangab, bukan kutipan langsung dari ucapan dirinya, dalam berita Bernas ("Para Penculik Bikin Malu Negara", 2 Mei 1998)*

2 MEI 1998

"Kalau yang melakukan penculikan ini benar adalah aparat keamanan, ini berarti sudah salah satu bentuk terorisme negara untuk membuat orang takut. Seperti kasus Marsinah yang pernah saya tangani, di mana orang-orang dituduh sebagai pembunuh setelah disekap selama 19 hari oleh militer. Saat itu, aparat keamanan membantah keterlibatan mereka dan mengatakan tidak tahu. Bentuk penyiksaan yang mereka terima di antaranya, kabel yang beraliran listrik dimasukkan ke telinga kiri dan kanan. Coba bayangkan bagaimana kalau otak tempurung yang disetrum. Lalu, mereka disuruh meminum air seni petugas dan sendiri. Mulut mereka disuruh dibuka dan diludahi oleh petugas kemudian disuruh ditelan. Memang bentuk penyiksaan seperti ini tidak sakit, tapi sangat merendahkan martabat manusia. Selain itu mereka disuruh membersihkan lantai dengan lidah mereka. Kemudian disuruh mencabuti rumput halaman dengan mulut dan harus dimakan."

| ***Trimoelja D. Soerjadi**, penerima Yap Thiam Hien atas kegigihannya membela sembilan orang yang tak bersalah dan kemudian dibebaskan Mahkamah Agung dalam kasus Marsinah, dalam Tempo Interaktif ("Jangan Pernah Berhenti Menyuarakan Kebenaran, Mei-Juni 1998)*

EDISI 09/III 02 MEI 1998

Wawancara Trimoelja D. Soerjadi, SH:

"Jangan Pernah Berhenti Menyuarakan Kebenaran"

Inilah kejadian aneh tapi nyata di negeri ini. Tiba-tiba saja ada orang hilang beberapa lama tanpa kabar berita, lalu mendadak muncul kembali di suatu tempat. Tidak jelas ke mana perginya si aktivis dan siapa yang membawanya. Hanya saja, mereka yang kebanyakan aktivis dan mahasiswa ini, tidak mau bercerita dan lebih banyak menutup mulut.

Cerita menjadi lain ketika seorang aktivis yang hilang dan telah kembali, Pius Lustrilanang, bercerita di mana dan kapan ia diculik kepada Komnas HAM, Senin 27 April lalu. Pius bercerita, selama disekap ia disiksa dan diinterogasi seputar aktivitasnya selama ini oleh orang-orang kekar dan mengenakan topeng. Ia juga diancam akan dihabisi kalau sampai bercerita kepada pers dan pihak lain setelah dilepas. Kini Pius telah meninggalkan Indonesia dan tinggal di Belanda, lantaran ia tidak yakin dengan keselataman dirinya setelah ia membuka kasus kehilangannya.

Menurut pengacara yang dikenal sebagai tokoh gigih dalam HAM, Trimoelja D. Soerjadi, sangat sulit membantah keterlibatan pihak militer dalam kasus orang hilang. Walaupun ada bantahan dari pimpinan ABRI, ini harus dibuktikan dengan menangkap siapa pelaku penculikan. " Ini seperti dalam kasus Marsinah, di mana sembilan orang sipil ditahan dan disekap oleh Detasemen Intelejen Kodam Brawija selama 19 hari sebelum diserahkan kepada kepolisian," ujarnya. Saat itu pihak Kodam dan Polda membantah telah menahan sembilan orang yang dituduh sebagai pembunuh Marsinah. " Kini semua orang sudah tahu keterlibatan ABRI dalam kasus itu," kata penerima penghargaan Yap Thiam Hien atas kegigihannya membela sembilan orang yang tak bersalah dan kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung dalam kasus Marsinah.

Kepada **Ali Nur Yasin** dari **TEMPO** ***Interaktif***, pengacara yang kerap mendampingi aktivis-aktivis politik di pengadilan, menjelaskan seputar kasus yang hingga kini masih misteri. Berikut petikannya:

Pius mengaku dia diculik dan disiksa di suatu tempat. Menurut Anda siapa yang melakukan penculikan?

Kita tidak bisa menduga, karena Pius sendiri tidak bisa mengidentifikasi siapa yang melakukannya. Saya melihat bahwa pengorganisasiannya rapi dan menggunakan senjata. Maka kalau kita objektif dan tanpa meninggalkan azas praduga tak bersalah, maka ada indikasi yang melakukan adalah aparat. Tapi apakah kasus ini benar atau tidak merupakan kewajiban pihak kepolisian untuk membuktikannya. Dan pihak ABRI juga perlu untuk mengklarifikasinya.

Saya pernah menulis surat terbuka kepada Menhankam/Pangab, tentang mengapa masyarakat tidak lagi percaya terhadap aparat keamanan. Saat ini semua institusi kekuasaan mengalami krisis kepercayaan. Sehingga bantahan saja tidak cukup. Seperti kasus Marsinah yang pernah saya tangani. Di mana ada penculikan orang sipil kemudian dibantah oleh pihak Kodam dan Polda. Tapi secara tiba-tiba mereka berada di tahanan Polda, maka terungkap bahwa 19 hari pertama mereka ada di Detasemen Intelejen Kodam Brawijaya. Jadi kalau kita kaitkan dengan bantahan, maka kita tahu bahwa bantahan itu tidak benar.

Tempo Interaktif
Mei-Juni 1998

Karena mereka memang menyekap dan menahan orang, tapi dibantahnya.

Selain itu peristiwa 27 Juli 1996, di mana yang melakukan penyerbuan adalah aparat keamanan seperti yang dilaporkan Komnas HAM. Jadi peristiwa orang hilang kan merupakan operasi militer. Seperti, penembakan misterius, kasus Tanjungpriok, di Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Semua ini berkaitan dengan operasi militer. Jadi dugaan orang kalau yang melakukan adalah militer, hal tersebut tidak bisa disalahkan. Karena logikanya memang ada. Nah, persoalannya apakah itu benar atau tidak, ABRI harus menjelaskannya.

Mungkin saja ada unit-unit komando dalam tubuh militer melakukan itu, tanpa komando dari Menhankam/Pangab atau komandan yang lebih tinggi. Ini ada kemungkinan. Untuk itu aparat keamanan harus menjelaskan secara transparan, kalau tidak ingin ada dugaan-dugaan akan seperti ini. Sebab sudah menjadi rahasia umum, banyak orang menduga yang melakukan adalah aparat.

Apakah pola yang dilakukan oleh penculik sangat terorganisir dan terencana?

Saya kira demikian. Sangat jelas betul, penculikan dilakukan untuk tujuan tertentu. Seperti para aktivis mahasiswa dan politik, yang dinilai selalu berseberangan dengan kekuasaan. Mereka yang dicap oposan, *dissident*, dan lainnya. Jadi penculikan merupakan suatu cara untuk meredam dan menakut-nakuti. Mereka ingin bilang, begitulah jadinya kalau para aktivis tetap melakukan aktivitasnya.

Jadi saya melihat ada semacam kegiatan terencana untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa takut. Karena kalau orang sudah takut, maka tercapailah tujuan orang-orang ini. Sehingga orang-orang yang vokal ini tidak berani melakukan apa-apa. Jadi sulit mengatakan bahwa penculikan itu tidak terencana. Apalagi kalau melihat semua orang yang hilang dikumpulkan jadi satu.

Apakah mungkin ada kekuatan lain atau *invisible hand* yang melakukan penculikan kepada para aktivis?

Di dalam eksepsi yang saya ajukan dalam perkara Yudi Susanto, dalam kasus Marsinah, saya punya pendapat, yang melakukan penyekapan entah dinas intelejen setingkat Koramil, Kodim, atau Korem, tapi mereka adalah dinas intelejen yang terkendali. Mereka berjalan sendiri dan menjalankan perintah tanpa komando pemimpin militer. Sebab, menurut saya hanya pemerintah dan militer yang mempunyai *resource* yang bisa melakukan cara itu. Di mana saja mereka mempunyai fasilitas yang memadai. Ada kemungkinan dana yang digunakan tak terbatas. Karena motivasi politiknya, jelas. Ini terlihat dari orang-orang yang hilang tidak diperas atau menjadi target pemerasan. Selain itu para penculik malah memberikan tiket pesawat dan uang saku untuk kembali ke rumah masing-masing.

ABRI membantah, bahwa tidak ada *policy* dari ABRI untuk menghilangkan orang dan ABRI juga memberikan jaminan kepada semua orang yang telah kembali akan keselamatannya, apakah jaminan ini bisa dipercaya?

Memang itu merupakan keharusan ABRI. Sayangnya ucapan pejabat tinggi ABRI tidak sinkron. Misalnya, ketika Haryanto Taslam kembali, Kapuspen ABRI mengatakan tanyakan saja ke Haryanto dan aparat keamanan tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada pengaduan. Penculikan bukan masuk delik pengaduan. Penculikan merupakan bentuk kejahatan yang serius dan menurut Pasal 33 KUHP dikenakan ancaman pidana penjara delapan tahun. Ini masalah berat dan melanggar HAM. Bukan delik aduan kok polisi pasif. Ini merupakan sikap yang tidak serius dan seolah-olah tidak penting, mengakibatkan tanda tanya. Mengapa tidak ada *concern* dari pihak aparat keamanan dan pemerintah. Baru setelah ada ancaman masalah orang hilang

Tempo Interaktif
Mei-Juni 1998

akan dibawa ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), satu persatu orang yang diculik mulai dilepaskan.

Apakah aparat kepolisian mampu mengungkap siapa yang telah melakukan penculikan?

Ini merupakan tugas berat aparat kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Persoalanya apakah aparat kepolisian mampu. Sebab kelihatan sekali polisi tidak profesional. Ini dapat dilihat dari kasus penyerahan Andi Arief ke Mabes Polri. Seharusnya orang yang menyerahkan itu harus ditangkap dan diinterogasi. Padahal semua orang sudah ribut mengenai hilangnya Andi Arief. Lalu, penyerahan aktivis ini berkaitan dengan kasus peledakan bom. Pertanyaanya, mengapa yang menyerahkan bilang seperti itu dan tidak diinterogasi oleh aparat kepolisian? Ada apa sebenarnya? Jadi, kalau orang curiga dan cemburu kepada aparat, hal ini sangat beralasan. Karena sikap-sikap yang tidak logis ini. Seharusnya hal ini tidak bisa terjadi kalau polisi kita profesional. Nyatanya, polisi kita memang tidak profesional.

Saya sering mengemukakan dalam setiap pertemuan, bahwa polisi bukan bagian dari ABRI. Karena selama polisi masih bagian dari ABRI, maka untuk kasus-kasus yang sarat muatan politiknya, sulit bagi polisi untuk bersikap profesional. Karena ada perintah komando dari luar. Padahal komando-komando tersebut tidak sesuai dengan cara-cara kepolisian. Contoh tidak profesionalnya polisi dalam kasus 27 Juli, di mana yang diajukan ke pengadilan dan dipenjara adalah 124 orang yang mempertahankan gedungnya. Tapi yang menyerbu dan sudah diadukan ke Komnas hingga ke DPR, sampai saat ini tidak diapa-apakan. Bahkan preman yang mengaku telah menyerbu kantor PDI dan menggugat Soerjadi ke pengadilan sudah mengakui perbuatannya, malah tidak diapa-apakan. Ini karena kepolisian kita sudah terkontaminasi oleh kepentingan luar, khususnya komando ABRI.

Apa yang menyebabkan orang hilang dan telah kembali tidak mau mengungkapkan kasus hilangnya?

Kalau yang melakukan penculikan ini benar adalah aparat keamanan, ini berarti sudah salah satu bentuk terorisme negara untuk membuat orang takut. Oleh karena itu saya salut kepada Pius dengan risiko mati. Dan saya yakin ancaman itu ada. Karena Haryanto Taslam sendiri tidak mau cerita. Seperti yang telah saya ungkapkan kepada Harian Surya, bahwa sebenarnya Haryanto diculik. Saya dapat dari satu sumber yang bisa dipercaya, tapi bukan dari Haryanto sendiri. Dia diculik ketika sedang mengendarai mobil dengan todongan senjata di kepala dan matanya. Kemudian ditutup matanya dan kejadiannya persis seperti Pius. Dan Pius sendiri kan mengaku bahwa Haryanto satu tempat dengannya. Si Haryanto sendiri juga diancam untuk tidak ngomong.

Akibatnya akan tercipta budaya takut pada masyarakat. Nah, ini semua harus diperangi dan harus berakhir. Sebab ini sangat mengerikan sekali kalau penculikan masih berlanjut. Dan ini bisa diperangi oleh orang yang pernah diculik lalu dibebaskan dengan jalan mengungkapkannya.

Apakah ini akibat ancaman mati kalau sampai mereka membuka mulut kepada pers atau pihak lain, seperti yang dinyatakan oleh Pius?

Pasti itu. Ini menunjukkan mereka *powerful* untuk mencabut nyawa seseorang. Tapi apa pun resikonya, orang harus berani buka mulut. Sebab kalau tidak, keadaan akan makin parah. Dan si penculik akan terus melakukan aksinya, karena yang mereka bebaskan tidak akan mau bicara.

Apa saja bentuk perlakuan yang diterima oleh mereka yang selama diculik?

Seperti kasus Marsinah yang pernah saya tangani, di mana orang-orang dituduh sebagai pembunuh setelah disekap selama 19 hari oleh militer. Saat itu, aparat keamanan membantah

Tempo Interaktif
Mei-Juni 1998

keterlibatan mereka dan mengatakan tidak tahu. Bentuk penyiksaan yang mereka terima di antaranya, kabel yang beraliran listrik dimasukkan ke telingan kiri dan kanan. Coba bayangkan bagaimana kalau otak tempurung yang disetrum. Lalu, mereka disuruh meminum air seni petugas dan sendiri. Mulut mereka disuruh dibuka dan diludahi oleh petugas kemudian disuruh ditelan. Memang bentuk penyiksaan seperti ini tidak sakit, tapi sangat merendahkan martabat manusia. Selain itu mereka disuruh membersihkan lantai dengan lidah mereka. Kemudian disuruh mencabuti rumput halaman dengan mulut dan harus dimakan.

Biasanya penculikan dan penyiksaan hanya terjadi di negara otoriter, sementara di Indonesia yang selalu mengatakan menjunjung demokrasi terjadi penculikan kepada para aktivis. Menurut Anda pertanda apakah hal ini?

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Tapi penegakkan hukum seringkali terjadi diskriminasi dan selektif. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa beberapa orang di Indonesia kebal hukum. Dan mereka yang masuk dalam lingkaran elite kekuasaan, boleh dikatakan apa yang mereka lakukan tidak perlu takut dengan hukum. Nah, inilah yang menyedihkan. Walaupun dalam UUD 45 Indonesia berdasarkan hukum, tetapi nyatanya hukum sudah menjadi alat kekuasaan. Selain itu penanganan *dissident* yang dengan mudah dijaring dengan UU Anti Subversi. Kalau pemimpin suatu bangsa tidak bisa tertawa kalau dirinya menjadi subjek karikatur, maka jiwa pemimpin bangsa sudah tidak sehat. Sebab jiwa yang sehat adalah yang bisa mentertawakan dirinya sendiri.

Apakah Anda melihat tanda-tanda ke arah otoriter?

Ya, tanda-tanda ke arah itu sudah ada. Makanya hal ini perlu ditentang, karena pemerintahan kita sudah mengarah otoriter. Untuk itu perlu rakyat bangkit dan menuntut agar hukum ditegakkan. Reformasi hukum perlu. Tapi yang lebih penting lagi adalah *mental attitude* harus dibangun. Betapapun perangkat hukumnya sempurna, tapi kalau dalam pelaksanaannya berlangsung secara diskriminatif dan selektif, maka yang terjadi adalah ketidakadilan.

Apakah ini menandakan pemerintah sudah menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengendalikan rakyatnya?

Oh ya. Kalau kita melihat cara penculikan, itu merupakan bagian dari kekerasaan. Cara pembubaran unjuk rasa yang masih menggunakan cara kekerasan, lalu penembekan peluru karet, dan lainnya. Ini semua adalah bentuk penggunaan kekerasan.

Cara-cara pemerintah menghadapi oposan, pers, dan lainnya, sudah mirip dengan negara-negara yang menganut sistem otoriter. Pelanggaran hukum oleh Mahkamah Agung (MA) dalam hal peninjauan kembali (PK). Seharusnya yang mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Tapi kejaksaan mengajukan PK malah dikabulkan oleh MA. Akibatnya, Muchtar Pakpahan (tokoh buruh yang kini dipenjara dan tengah menderita sakit) dihukum empat tahun. Lalu Sri Bintang Pamungkas yang harus masuk penjara akibat ucapannya di luar negeri yang belum tentu benar. Ini adalah cara-cara negara otoriter untuk meredam mereka yang tidak disenangi. Dengan tujuan memberikan pelajaran kepada yang lain.

Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Pangab, bahwa tidak ada kebijakan untuk menculik?

Itu bisa saja benar. Dengan mengatakan begitu mungkin saja ada unit-unit kecil dalam militer yang bertindak sendiri-sendiri. Misalnya, yang melakukan adalah kesatuan-kesatuan tanpa merasa perlu melapor. Apalagi, katanya, ada faksi-faksi di tubuh militer.

Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan bentuk-bentuk kekerasan ini?

ANALISA & PERISTIWA
EDISI 09/III 02 MEI 1998

Kita jangan sampai berhenti menyuarakan agar yang bersalah diajukan ke pengadilan. Dan kita tidak boleh berhenti dalam menegakkan HAM dan menyuarakan kebenaran serta keadilan.

✦✦✦

7 MEI 1998

Kontras menggelar jumpa pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta. Selain Munir, tampak dalam acara ini adalah Mulyana W. Kusuma, M.M. Billah.

Koordinator Kontras, Munir, membacakan surat Andi Arief yang dibawa oleh ayahnya, H. Arief Mahya, di mana ia bersedia memberikan kesaksian tentang kisah penculikan terhadap dirinya. Andi Arief dikenal sebagai ketua umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Andi bahkan siap disumpah di hadapan para tokoh agama dan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.

Pada momentum itu juga, Munir mengumumkan ihwal korban baru penculikan. Yakni, aktivis Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Garut, Jawa Barat. Namanya Chotibul Umam Wiranu. Ia adalah ketua I PB PMII.

Andi Arief Sedia Bersumpah Beberkan Penculikan

* Di hadapan Ormas Keagamaan

Jakarta, Bernas

Kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis politik memasuki babak baru. Salah-seorang korban penculikan, Andi Arief (27) siap memberikan kesaksian (*testimony*) tentang kisah penculikan terhadap dirinya. Bahkan Andi Arief yang dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi ini (SMID) bersedia bersumpah di hadapan para tokoh agama dan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.

Namun demikian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga mengumumkan lagi adanya korban baru penculikan. Menurut Kontras, korban baru itu ialah seorang aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Garut. Ketua I PB PMII, Chotibul Umam Wiranu membenarkan berita penculikan yang korbannya adalah anggota PMII. Namun Kontras dan PB PMII tak bersedia menyebutkan nama korban, karena permintaan keluarganya.

Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir SH dalam jumpa pers di kantor YLBHI Jakarta Kamis (7/5) kemarin menjelaskan adanya surat Andi dan sempat membacakan surat yang menyatakan bahwa Andi berse-

Bersambung ke hal 8 kol 5

Bernas
7 Mei 1998

11 MEI 1998

Desmond J. Mahesa dijemput Adnan Buyung Nasution, Hendardi, dan beberapa pengacara serta aktivis di Bandara Soekarno Hatta. Desmond tiba pukul 14.55 WIB dari penerbangan di Banjarmasin. Setibanya di Jakarta, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara dan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ujung Pandang ini langsung dibawa ke sebuah hotel di Jakarta.

Desmond akan Ungkap Penculikan Dirinya

* Dijemput Adnan Buyung di Bandara Soekarno-Hatta

Jakarta, Bernas

Salah seorang yang pernah dinyatakan hilang oleh keluarga dan lembaga tempat ia bekerja, namun kemudian diberitakan ada di Banjarmasin, Desmond Junaidi Mahesa (selama ini ditulis Desmond J Mahesa-**red**), Senin (11/5) kemarin tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pukul 14.55. Mantan aktivis HMI Cabang Ujung Pandang ini dijemput Adnan Buyung Nasution, Hendardi, dan beberapa pengacara serta aktivis.

Dalam keterangan persnya seusai pertemuan tertutup dengan para pengacara itu, Desmond menjanjikan akan memberikan apa yang dialaminya selama dalam penculikan, yang digambarkan Desmond mirip yang dialami oleh Pius. Pemberian itu, akan dilakukannya di depan beberapa lembaga yang bertanggungjawab atas kasus ini.

"Siapa lembaga itu, nanti besoklah teman-teman wartawan hadir dalam satu acara jumpa pers yang tempatnya belum kami bisa katakan, karena masih mencari tempat. Pokoknya, kami mengundang rekan-rekan," kata Desmond.

[illegible] gai Direktur LBH Nusantara itu, selain dijemput Adnan Buyung Nasution dan Hendardi, juga oleh Andi Rudiyanto Asaah darj PBHI dan beberapa aktivis mahasiswa. Para penjemput Desmond ini, langsung membawa Desmond ke sebuah hotel di Jakarta Selatan.

Di hotel itu, Desmond dan para penjemputnya serta lima orang pengacara Desmond dari Banjarmasin, langsung melakukan pertemuan tertutup tidak boleh diikuti oleh lima wartawan yang turut menjemput Desmond.

"Kami akan jumpa pers be-

dengan Desmond boleh saja, setelah pertemuan ini," kata Dadang, salah seorang rekan Desmond dari Kontras.

Desmond juga meyakinkan wartawan, ia akan membeberkan secara rinci tentang apa yang dialaminya, agar apa yang dialaminya itu tidak menimpa

Bersambung ke hal. 7 kol. 8

Bernas
12 Mei 1998

Desmond - - - *Sambungan dari halaman 1*

orang lain. Atau, cara-cara tak beradab itu tidak dipakai oleh pihak-pihak yang merasa telah menculik Desmond dan kawan-kawannya lain yang juga dinyatakan hilang.

Sementara Hendardi, dari PBHI mengaku bahwa pihaknya bersama rekan-rekannya dari lembaga-lembaga bantuan hukum akan membantu Desmond sekuat tenaga untuk berusaha mengingatkan kepada siapa saja, agar apa yang dialami oleh Desmond, Pius, Haryanto Taslam dan lain-lain tidak dialami oleh orang lain.

Selain itu, timpal Rudiyanto Asapah SH, kehadiran Desmond di Jakarta dan pengakuan diri Desmond nantinya, akan menjadi pertanggungjawaban moral Desmond kepada rakyat, bahwa ia memang diculik. "Agar rakyat tak menyalahkan Desmond yang terlanjur diketahui bahwa diculik, kemudian muncul berita bahwa dirinya hanya bersembunyi," sambung Rudiyanto.

Sebuah sumber di PBHI dan YLBHI, Desmond selain akan ke Komnas HAM, ke Puspom ABRI, juga akan ke DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban lembaga itu untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas apa yang terjadi pada dirinya. "Apa yang saya dan teman-teman alami itu, adalah tanggungjawab pemerintah," kata Desmond menegaskan.

Ketika d[illegible]nya apakah Desmond akan n[illegible]ngikuti jejak Pius ke luar negeri, sumber itu mengaku besar peluangnya terjadi, jika Desmond tidak memperoleh jaminan keamanan secara fisik. Desmond kini berada di Jakarta, karena mendapat ancaman keamanan di Banjarmasin. Menurut sumber itu, Keluarga Desmond dan keluarga kawan-kawan Desmond, tak henti-hentinya didatangi dan interogasi oleh pihak keamanan di Banjarmasin. **(tt/ii)**

12 MEI 1998

Bertempat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Desmond Junaidi Mahesa memberikan kesaksian. Ia adalah korban penculikan kedua yang berani mengungkapkan perihal keberadaan dirinya selama dua bulan raib. Desmond diketahui tiba-tiba saja berada di Banjarmasin pada 2 April. Sejak saat itu, ia berdiam diri. Karena merasa tidak aman di kampung halamannya, ia memutuskan kembali ke Jakarta. Di Bandara Soekarno-Hatta, Desmond dijemput Adnan Buyung Nasution, Hendardi, Rudiyanto Asapa, dan beberapa pengacara serta aktivis.

Hendardi mengaku bahwa pihaknya dari berbagai lembaga bantuan hukum membantu Desmond sekuat tenaga untuk mengingatkan kepada siapa saja agar apa

Bali Post
13 Mei 1998

Dari Hal. 1

Para penculiknya juga mengancam akan melenyapkannya apabila ia menceritakan pengalamannya. "Konsekuensinya saya akan dihabisi," ujarnya.

Untuk itu, kata Desmond, tidak ada alasan satu pun mengapa ia menceritakan semua pengalamannya tersebut, kecuali hanya untuk mengungkapkan kebenaran. "Saya ingin kasus ini dituntaskan," ungkapnya.

Rasa waswas terhadap ancaman para penculik selama ini, tidak hanya ditujukan kepadanya akan tetapi juga kepada pihak keluarga dan saudara serta teman-temannya di Banjarmasin.

Terhadap jaminan keselamatan yang diberikan kepadanya, Desmond hanya berpegang kepada pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto bahwa ABRI akan melindungi orang hilang yang telah [illegible]. "Yang pertama tentu saya [illegible]

[illegible] anggapan [illegible] akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Pius, yaitu pergi ke luar negeri. "Saya ingin tuntaskan hal ini di Indonesia," katanya.

Anggota Komnas HAM Albert Hasibuan mengatakan, pengalaman Desmond serupa dengan yang dialami Pius bahwa telah terjadi pelanggaran HAM.

Menyinggung tentang perlunya dibentuk Tim Penyidik Independen dalam kasus orang hilang, Albert menolak dengan alasan, pihak Komnas HAM akan menunggu hasil dari tim yang dibentuk ABRI.

Mengomentari kesaksian Desmond, koordinator Kontras Munir mengatakan, dengan segala risiko yang dihadapi Desmond, pihak Kontras akan mendukung kepentingannya selama di Jakarta. "Baik kepentingan hukum selama jaminan ABRI belum Kongkret maupun kepentingan fisik," ujar Munir.

Menurut rencana, Kontras juga akan mendampingi Desmond ke Puspom ABRI untuk memberikan keterangan pengalamannya tersebut. "Juga akan minta jaminan keselamatan [illegible] yang [illegible]

Munir S.H. [illegible] sampai saat ini jaminan kongkret dari aparat keamanan dalam menghadapi kasus orang hilang masih belum jelas.

Dikatakan, aparat keamanan khususnya Danpuspom ABRI sudah mendatangi Feisal Reza dan Waluyojati yang sudah kembali setelah beberapa waktu hilang karena diculik oleh orang yang tak diketahui identitasnya, akan tetapi keduanya belum bersedia memberikan keterangan sebelum ada jaminan yang kongkret.

Menurutnya, secara kongkret jaminan yang diberikan oleh aparat tidak ada, selain jaminan yang telah disampaikan oleh Menhankam/Pangab Wiranto. "Karena itu jaminan tersebut harus dibuktikan," ujarnya.

Karena jaminan keselamatan orang hilang ini masih belum kongkret, lanjutnya, pihaknya akan membentuk tim kecil yang akan berusaha memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang akan memberikan kesaksian selama dinyatakan menghilang. Diakui Munir, ia [illegible] masih belum [illegible] kerja timnya.

[illegible] Munir, pihaknya masih menunggu beberapa pengaduan dari tim kecil Namun, yang perlu dicatat, kan yang akan memberikan keterangan resmi di depan suatu proses penyidikan.

Hal ini, memurutnya, merupakan suatu hal yang penting. Lagi pula Desmond adalah tokoh kunci dari upaya kasus penculikan di samping Andi Arief, tuturnya. "Jadi, saya kira keterangan besok yang akan disampaikan ke Puspom ABRI akan mengikat Puspom untuk melakukan pelacakan lebih lanjut ke tempat pelaku penculikan, indikasi dan motif ke arah mana penculikan tersebut," tambah Munir.

Menurutnya, kehadiran Desmond ke Dispuspom ABRI bukan karena diundang oleh Puspom, akan tetapi merupakan salah satu upaya untuk mencari tahu pemecahan dalam menangani kasus orang hilang, tambahnya. Hal ini, menurut Munir, merupakan bagian dari proses untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas penculikan-penculikan tersebut.

Tentang rencana kesaksian Andi Arief, Munir berpendapat, sampai hari ini [illegible] pada Dispenpom ABRI untuk memeriksa Andi Arief, akan tetapi masih belum dilakukan. Sampai saat ini Andi Arief juga masih ada di Polda dan pemeriksaannya dihentikan menunggu sampai kasus pemeriksaan selesai.

Sebab, katanya, menurut kesepakatan segitiga antara Kapolda, Andi Arief, dan Kontras pemeriksaan dihentikan menunggu sampai ada kejelasan terhadap kasus penculikan tersebut. "Dan sampai hari ini Andi Arief memang bersikap tidak mau diperiksa," ujarnya lagi.

Ditanyakan apa yang sudah lepas dari penculikan juga akan memberikan kesaksian, "Saya nggak tahu, kita memang mengupayakan agar mereka memberikan kesaksian. Akan tetapi karena tingkat tekanan yang diterima orang berbeda-beda, keberanian mengungkapkan peristiwa yang dialaminya juga berbeda-beda," ungkapnya. (ryt/jar)

Telepon Penting

Permintaan Interlokal	: 100
Permintaan Internasional	: 101
Info SLI	: 102
Informasi waktu	: 103
Booking Internasional	: 104
Interlokal Tanpa Tunda	: 105
Penerangan Interlokal	: 106
Booking Intern untuk Wartel	: 107
Penerangan Lokal	: 108
Informasi Tagihan Telepon	: 109
Polisi	: 110
Polisi Militer	: 125
Pengaduan Anggota ABRI	: 126
Posko Kewaspadaan Nasional	: 122
Pemadam kebakaran	: 113
SAR	: 115
Gangguan Tlp /Tlp.Umum	: 117
Ambulance	: 118
Info Pelayanan Pos	: 161
Telemarketing Telkom	: 162
Info Pelayanan KB	: 163
Info Telegram/Phonogram	: 165
Info Pariwisata	: 166
Telkom Calling Card (TCC)	: 168
Informasi Pendidikan	: 572
Gangguan PLN	: 234888
[illegible]	[illegible]

Starko	: 13022
Easy Call	: 13033
Starpage	: 13099
Biz Call	: 234567

TRANSPORTASI

Praja Taxi	: 289090
Bali Taxi	: 701111
Ngurah Rai Taxi	: 724724
Pan Wirthi Taxi	: 723366

INFORMASI PENERBANGAN

Bandara Ngurah Rai	: 751011
Reservasi Garuda	: 235189
Reservasi Merpati	: 236368
Reservasi Sempati	: 237343
Reservasi Bouraq	: 241397
Reservasi Mandala	: 242933

RUMAH SAKIT

RSUP Sanglah	227912-15
PMI/RSUP Sanglah	: 227911
RSAD Udayana	: 228061
RSU Wangaya	: 232141
RSU Manuaba	: 426388
RSU Surya Husada	[illegible]

RSU Dharma Yadnya	: 462629
	: 462488
	Fax. : 462488
RSU Dharma Usadha	: 227560
	: 234824
RSU Bina Atma	: 425744
RSU Sadharma	: 227220
RSU Khusus Bedah GRAHA USADHA	: 423457
	: 426492
Klinik SOS Getottaca	: 223555
RS Bhakti Rahayu	: 430270
	: 430245
Nusa Dua Clinic (0361)	: 771324

Marisa PMI Cabang Badung
Jl. Imam Bonjol Denpasar : 464305

Pelayanan Ambulance
Gawar Darurat
PMI Cabang Badung : 464305

Pelayanan Usaha Transfusi Darah (PUTD) PMI Cabang Badung dan RSUP Sanglah Denpasar [illegible]

yang dialami korban penculikan ini tidak lagi dialami oleh orang lain. Bahwa, Desmond memang diculik, bukan bersembunyi, seperti "berita" yang beredar di masyarakat

Bali Post
13 Mei 1998

"Dengan segala risiko yang dihadapi Desmond, pihak Kontras akan mendukung kepentingannya selama di Jakarta. Baik kepentingan hukum selama jaminan ABRI belum konkret maupun kepentingan fisik. Secara konkret nggak ada jaminan yang diberikan aparat selain yang telah disampaikan Menhankam/Pangab Wiranto. Kehadiran Desmond ini ke Puspom ABRI nantinya merupakan salah satu upaya untuk mencari tahu pemecahan dalam menangani kasus orang hilang. Ini bagian dari proses mencari siapa tahu pemecahan dalam menangani kasus orang hilang. Ini bagian dari proses mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas penculikan-penculikan tersebut."

| ***Munir**, Koordinator Kontras, bukan kutipan langsung dari ucapan dirinya, dalam berita Bali Post ("Pengakuan Desmon Mahesa: 'Konsekuensinya Saya akan Dihabisi'", 13 Mei 1998)*

Waswas

Dari Hal. 1

Para penculiknya juga mengancam akan melenyapkannya apabila ia menceritakan pengalamannya. "Konsekuensinya saya akan dihabisi," ujarnya.

Untuk itu, kata Desmond, tidak ada alasan satu pun mengapa ia menceritakan semua pengalamannya tersebut, kecuali hanya untuk mengungkapkan kebenaran. "Saya ingin kasus ini dituntaskan," ungkapnya.

Rasa waswas terhadap ancaman para penculik selama ini, tidak hanya ditujukan kepadanya akan tetapi juga kepada pihak keluarga dan saudara serta teman-temannya di Banjarmasin.

Terhadap jaminan keselamatan yang diberikan kepadanya, Desmond hanya berpegang kepada pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto bahwa ABRI akan melindungi orang hilang yang telah kembali. "Yang pertama tentu saya [illegible] ada di tangan Tuhan," ujarnya.

Desmond menolak jika ada anggapan bahwa ia akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Pius, yaitu pergi ke luar negeri. "Saya ingin

14 MEI 1998

Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid mengundang Nurcholish Madjid atau Cak Nur ke Sekretariat Negara. Saat itu, Saadilah memberanikan diri mengutarakan ide Cak Nur ke Pak Harto langsung. Salah satu ide itu adalah Pak Harto mengakhiri masa jabatan secara damai dan konstitusional lewat pemilu yang dipercepat. Ancar-ancarnya 10 Januari 2000.

Saat Cak Nur bertemu Saadilah itu, kebetulan Letjen TNI Prabowo Subianto datang. Ketika diberitahu bahwa saat itu mereka lagi membicarakan usul pemecahan dari Cak Nur, Prabowo mengatakan bahwa dia sudah tahu apa usul Cak Nur. Rupanya, naskah yang disampaikan Cak Nur di Mabes ABRI sudah beredar ke mana-mana, termasuk sampai ke Prabowo.

Buana Minggu
2 Agustus 1998

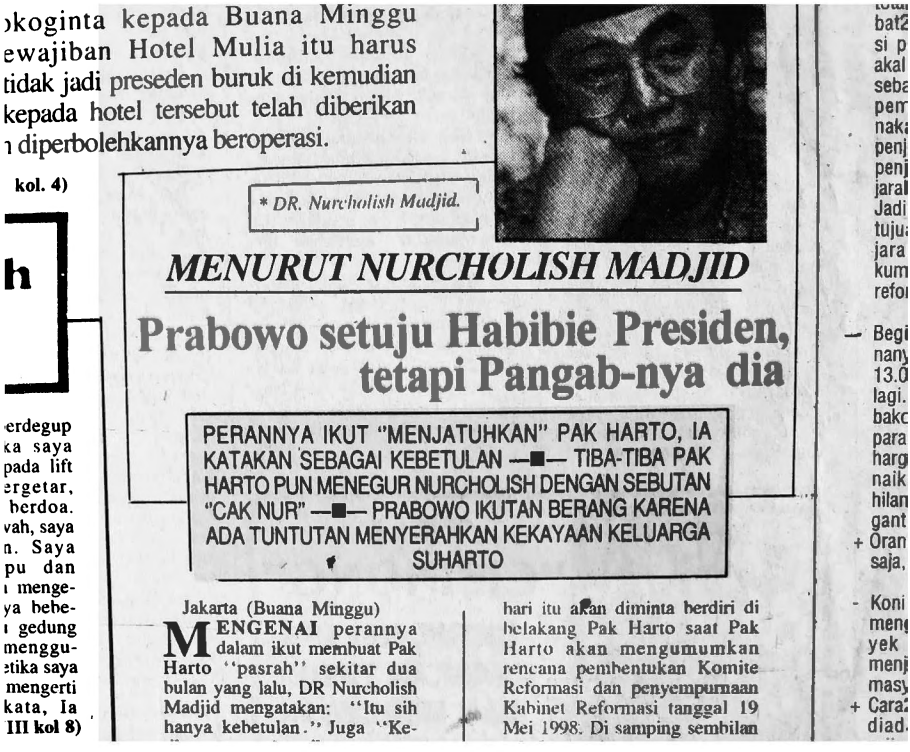

)koginta kepada Buana Minggu
ewajiban Hotel Mulia itu harus
tidak jadi preseden buruk di kemudian
kepada hotel tersebut telah diberikan
1 diperbolehkannya beroperasi.

kol. 4)

h

erdegup
ka saya
pada lift
ergetar,
berdoa.
vah, saya
n. Saya
pu dan
1 menge-
ya bebe-
1 gedung
menggu-
etika saya
mengerti
kata, Ia
III kol 8)

* DR. Nurcholish Madjid.

MENURUT NURCHOLISH MADJID

Prabowo setuju Habibie Presiden, tetapi Pangab-nya dia

PERANNYA IKUT "MENJATUHKAN" PAK HARTO, IA KATAKAN SEBAGAI KEBETULAN —■— TIBA-TIBA PAK HARTO PUN MENEGUR NURCHOLISH DENGAN SEBUTAN "CAK NUR" —■— PRABOWO IKUTAN BERANG KARENA ADA TUNTUTAN MENYERAHKAN KEKAYAAN KELUARGA SUHARTO

Jakarta (Buana Minggu)

MENGENAI perannya dalam ikut membuat Pak Harto "pasrah" sekitar dua bulan yang lalu, DR Nurcholish Madjid mengatakan: "Itu sih hanya kebetulan." Juga "Ke-

hari itu akan diminta berdiri di belakang Pak Harto saat Pak Harto akan mengumumkan rencana pembentukan Komite Reformasi dan penyempurnaan Kabinet Reformasi tanggal 19 Mei 1998. Di samping sembilan

bat
si p
akal
seba
pem
naka
penj
penj
jaral
Jadi
tuju
jara
kum
refo

— Begi
nan
13.0
lagi.
bako
para
harg
naik
hilan
gant
+ Oran
saja,

- Koni
meng
yek
menj
masy
+ Cara
diad

Ini usul gila! Masak harus menyerahkan seluruh kekayaan Pak Harto dan keluarga!"

| ***Nurcholish Madjid*** *menirukan reaksi Prabowo Subianto, dalam berita Buana Minggu ("Prabowo setuju Habibie Presiden tetapi Pangab-nya dia", 8 Agustus 1998)*

Buana Minggu
2 Agustus 1998

Wiranto.....
Prabowo.....
Dua.....
Sebelum praktek di Semarang mbak Retno di Buana Minggu
TTS BERHADIAH
KONSULTAN AGUNG
KYAI H. TB. AULIA
MEMBANTU PROGRAM HAJAT KEHIDUPAN
CINTA ASMARA PESONA KASIH
H.MAYA RISA
KI JOKO BOD
"MANUSIA 1000 ANEH"
POLISI YANG PARANORM
IMAM SUROSO
DENGAN RIDHO ILAHI KA
SIAP MEMBANTU ANDA DAL

"Langsung saja saya setuju Habibie jadi presiden! Tetapi, sampaikan kepada beliau saya jadi Pangab."

| ***Nurcholish Madjid*** *menirukan reaksi Prabowo Subianto, dalam berita Buana Minggu ("Prabowo setuju Habibie Presiden tetapi Pangab-nya dia", 8 Agustus 1998)*

Prabowo bersumpah tidak tahu menahu soal penculikan aktivis tersebut.

| ***Pengakuan Letjen TNI Prabowo Subianto*** *sbukan kutipan langsung ucapan Prabowo, kepada Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto di Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, dalam berita Buana Minggu ("Prabowo setuju Habibie Presiden tetapi Pangab-nya dia", 8 Agustus 1998)*

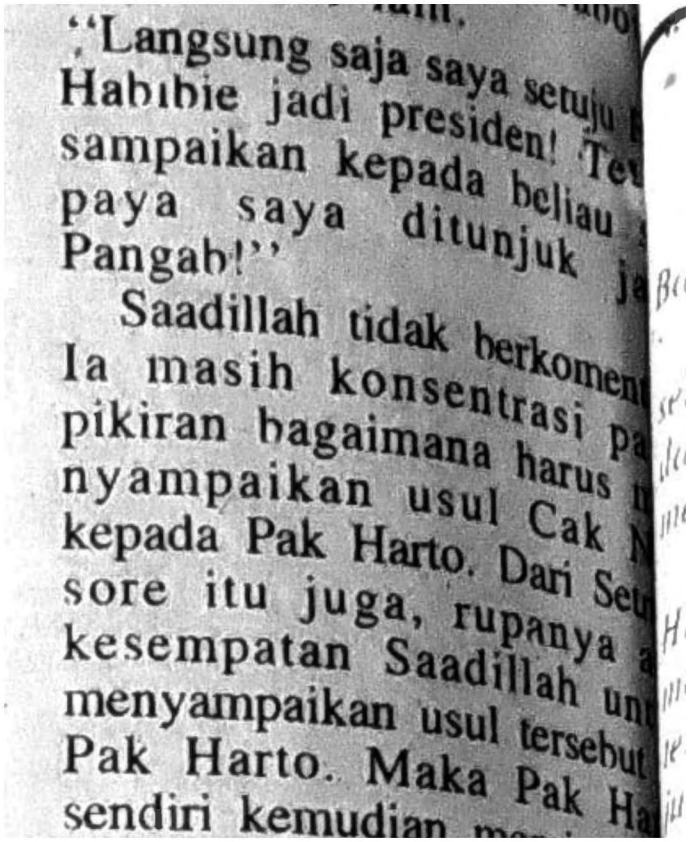
"Langsung saja saya setuju
Habibie jadi presiden! Te
sampaikan kepada beliau
paya saya ditunjuk
Pangab!"
Saadillah tidak berkomen
Ia masih konsentrasi pa
pikiran bagaimana harus
nyampaikan usul Cak
kepada Pak Harto. Dari Set
sore itu juga, rupanya
kesempatan Saadillah un
menyampaikan usul tersebut
Pak Harto. Maka Pak Ha
sendiri kemudian

Buana Minggu
2 Agustus 1998

Berikut ini nukilan penuturan Bambang Widjojato tentang penyangkalan Prabowo Subianto.

> **Pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998: Pertemuan itu sama seperti pertemuan yang lainnya. Saya ada di sana karena diajak oleh Adnan Buyung, ya, saya ikut. Prabowo orang hebat. Saya mau dengar (omongannya) saja. Lalu saya ketemu dia. Sebetulnya saya juga diminta teman-teman mendampingi Adnan Buyung. Mengawasi. Pada saat itu saya tidak tahu, kalau dia mau ketemu Prabowo. Dia bilang mau ke Makostrad saja. Nggak begitu penting bagi saya mau ketemu sama siapa.**
> **Kalau yang saya ingat, saya memperso-alkan kasus pencu-likan. Prabowo pada saat itu, beb-erapa kali mengatakan bahwa dia tidak terlibat kasus penculikan. Bahkan menyebut, "demi allah saya tidak terlibat". Dia mengatakan, tidak betul itu..**
>
> | ***Bambang Widjojanto**, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta tentang pertemuannya dengan Prabowo Subianto, 14 Mei 1998, dia kisahkan kepada Aksi (29 Desember 1998 - 4 Januari 1999)*

Aksi
29 Desember 1988-
4 Januari 1999

Bambang Widjojanto:

'Prabowo berkelahi dengan Hashim'

Bambang Widjojanto adalah salah satu orang yang ikut dalam pertemuan di Makostrad tanggal 14 Mei 1998. Di bawah ini wawancara **Sri Wulandari** dari **AKSI** dengan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta [TGPF] yang juga Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini:

Peluang Prabowo Subianto menggugat TGPF?

Saya sudah mendengar kabar ini sejak tiga bulan lalu, TGPF [Tim Gabungan Pencari Fakta] mau digugat. Tapi, *kok*, sampai sekarang tidak pernah digugat-gugat. Jangan sekadar *bluffing* [menggertak] saja. Bulan puasa *nggak* boleh *bluffing*. Omong kosong tidak boleh. Kalau mau gugat, cepatan gugat. Nanti, kalau anggota TGPF pada sakit, kan susah.

Probowo jelas sekali merasa kecewa dengan temuan TGPF dan kabarnya akan mengambil langkah hukum?

Semua orang punya hak untuk kecewa. Ya, sekarang kita tunggu saja. Masa kita harus menantang. Nanti terlalu takabur. Kita menunggu dengan bijaksana dan arif gugatan dia. Tapi, kalau *bluffing* saja kita sudah capek mendengarnya. Kita ini kan tukang mem-*bluffing*, *kok* di-*bluffing*.

Dalam temuan TGPF yang ditonjolkan adalah pertemuan di Makostrad, sebetulnya cerita pertemuan itu sendiri bagaimana?

Pertemuan itu sama seperti pertemuan yang lainnya. Saya ada di sana karena diajak oleh Adnan Buyung, ya, saya ikut. Prabowo orang hebat. Saya mau dengar [omongannya] saja. Lalu saya ketemu dia. Sebetulnya saya juga diminta teman-teman mendampingi Adnan Buyung. Mengawasi. Pada saat itu saya tidak tahu, kalau dia mau ketemu Prabowo. Dia bilang mau ke Makostrad saja. *Nggak* begitu penting bagi saya mau ketemu siapa saja.

Yang Anda bicarakan apa saja?

Aksi
29 Desember 1988-
4 Januari 1999

Kalau yang saya ingat, saya mempersoalkan kasus penculikan. Prabowo pada saat itu, beberapa kali mengatakan bahwa dia tidak terlibat kasus penculikan. Bahkan menyebut, "Demi Allah saya tidak terlibat." Dia mengatakan, tidak betul itu. Bahkan dia berkelahi dengan adiknya, Hashim [Djojohadikusumo]. Mereka berdebat keras. "Di luar bahwa Anda pelakunya," kata Hashim. Lalu perdebatan ini ditengahi oleh Buyung. Saya konsentrasinya pada kasus penculikan, karena saya memang berkepentingan.

Tapi, dalam perbincangan lain, yang saya ingat lagi bahwa pada saat itu [kerusuhan Mei] tidak ada publik *statement* dari pejabat kendati kerusuhan sudah merebak di mana-mana. Kita sangat kecewa sekali, mengapa itu sampai terjadi. Ini merupakan kesengajaan, kelalaian, keteledoran, atau apa. Kita minta supaya ada pejabat publik yang membuat *statement* untuk mengendalikan situasi pada saat itu. Tak ada *sense of crisis* dari pejabat. Sudah itu saja. Pertemuannya sendiri cuma satu jam, setelah itu kita pulang. Pertemuannya itu pada tanggal 14 Mei. Sedangkan kerusuhannya 13-14-15 Mei.

Dalam pembicaraan, ada indikasi tidak keterlibatan Prabowo?

Saya tidak tahu, karena pertemuan itu saya duga bukan hanya pertemuan saya [hadiri] saja. Mungkin ada banyak pertemuan lain, yang saya tidak tahu. Kenapa saya mengungkapkan hal ini, itu pun setelah saya di TGPF, saya baru tahu ada banyak pertemuan lain.

Mengapa pertemuan di Makostrad itu yang ditonjolkan dalam temuan TGPF?

Oh, itu tanya ketua [TGPF]. Saya tidak berhak mewakil teman-teman TGPF yang lain. Tapi itu sudah melalui proses perdebatan dan diskusi. Teman-téman mengatakan itu penting, lalu dicatat dan dilacak.

Anda ada dalam pertemuan itu, mengapa tidak dijelaskan?

Sudah, sudah saya jelaskan. Tapi, saya bukan satu-satunya informan yang bisa memberikan hal itu. Karena mereka juga punya informasi-informasi lain, berdasarkan klarifikasinya, yang saya tidak pernah tahu. Dan, itu hak mereka juga. ■

Rangkaian penjerat Prabowo

Prabowo semakin tersudut dan dicibir. Korban politik tingkat tinggi?

Mulanya, gelombang demonstrasi mahasiswa di kampus-kampus menggelegak tak tertampung. Aksi kekerasan sampai penghilangan nyawa sejumlah aktivis di beberapa tempat tak sanggup meredakan tuntutan-tuntutan reformasi. Tapi, tanggal 12 Mei bisa dikatakan sebagai masa pematangan — matang bagi aparat yang sudah 'terlalu' toleran membiarkan aksi mahasiswa. Maka, dor... dor... dor... beberapa mahasiswa Usakti ditembak oleh para petugas tak dikenal.

Nyatanya, hal itu mendorong radikalisasi mahasiswa hingga aksi-aksi yang menuntut agar Soeharto pun 'meloncat' dari kursi presiden. Setelah itu timbul kecurigaan: jangan-jangan semua kekacauan itu berasal dari rancangan yang *well organized*. Semua hasil rekayasa yang ditata dengan baik. Lalu, oleh siapa?

Korban penembakan Trisakti. Rekayasa.

TGPF

Menurut TGPF kerusuhan 13-15 Mei bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Semuanya merupakan rentetan dari peristiwa sebelumnya—misalnya penculikan aktivis, krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, dan yang paling memicu terjadinya kerusuhan adalah penembakan mahasiswa Usakti oleh aparat keamanan tanggal 12 Mei 1998.

TGPF mendesak pemerintah me-

TGPF mendesak pemerintah meneliti keterkaitan antarkasus dan mengumumkan buku putih soal peranan dan tanggung jawab serta keterkaitan satu sama lain dari semua pihak yang bertalian dengan kerusuhan tersebut. "Untuk itu pemerintah perlu menyelidiki pertemuan di Makostrad tanggal 14 Mei lalu," kata Marzuki Darusman selaku Ketua TGPF.

Sehari sebelumnya, tanggal 2 November, Komnas HAM meminta pemerintah termasuk ABRI mengusut tuntas adanya kelompok terorganisasi yang memulai [sekaligus menjadi pemicu] timbulnya perusakan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta.

Apa komentar aparat keamanan? Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin [saat itu Pangdam Jaya] menyatakan di balik kerusuhan itu memang ada kelompok massa yang dikendalikan untuk melakukan penjarahan dan pembakaran. Dia menuding mantan napi yang menjadi dai, Anton Medan, sebagai salah seorang penggeraknya. Tapi, nyatanya hingga kini sangkaan kepada Anton Medan itu ibarat ditelan bumi. Tak jelas.

Penjelasan Pangkostrad [waktu itu] Letjen Prabowo Subianto juga tak berbeda jauh. "Kalau kita lihat di lapangan, memang ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menggerakkan," ujarnya, senada dengan Sjafrie, salah seorang sahabatnya.

Didalangi Prabowo?

Ketidakjelasan itu, ujung-ujungnya malah mendudukkan Prabowo dan Kopassus dalam singgasana tersangka. Tak hanya itu, dia juga dituding telah menyiapkan rencana makar untuk menggulingkan sang mertua dari kursi kepresidenan. Tentu saja, semua itu dibantah Prabowo. Soal rencana makar, juga dibantah oleh Fadli Zon, salah satu orang dekat Prabowo."Kalau memang Prabowo mau mengambil alih kekuasaan, untuk apa dia sampai mengerahkan massa melakukan kerusuhan? Kalau dia mau, saat itu juga dia bisa melakukannya. Apa lagi, Kodam Jaya 'dia yang punya', karena Sjafrie temannya," ujarnya.

Karena itu, Fadli meyakinkan, pertemuan di Makostrad dengan berbagai tokoh semuanya bermuara demi memelihara keamanan. "Dan, saya pikir wajar kalau dia memberikan penjelasan soal situasi Jakarta kepada orang-orang yang datang kepadanya," tambah Fadli.

Pertemuan yang disebut Fadli Zon itu berlangsung hari Kamis sore tanggal 14 Mei 1998. Seperti yang dijelaskan Hashim Djojohadikusumo, di Makostrad itulah Prabowo bertemu sejumlah tokoh antara pukul 18:00 sampai 19:30. "Pertemuan di Makostrad diprakarsai Adnan Buyung Nasution dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat," katanya.

Namun, soal waktu pertemuan itu rupanya berbeda dengan pengakuan Fahmi Idris kepada *Media Indonesia*. Menurut dia, rapat dimulai sekitar pukul 20:00 dan berlangsung selama 2,5 jam. Perbedaan waktu antara yang dinyatakan Hashim dan penjelasan Fahmi bisa jadi karena di Makostrad memang dilangsungkan dua pertemuan berbeda.

Hal itu setidaknya pernah diungkapkan Romo Sandyawan. Menurut Romo, pertemuan Makostrad ada dua. Pertama, yang diikuti Adnan Buyung Cs. Kedua, pertemuan yang dilakukan di ruang lain. Kesaksian Sandyawan juga dibenarkan Fahmi Idris dan Bambang Widjojanto.

Soal tudingan keterlibatan Prabowo dalam penculikan terhadap aktivis politik, sebuah sumber mengatakan, semua itu tidak bisa dilepaskan dari siapa yang menyuruh atau meminta Prabowo melakukannya. Ditambahkan, pada mulanya dia memang terlibat. Tapi, penculikan terhadap Pius, Desmond, dan Haryanto Taslam tidak terjadi atas 'order' Prabowo.

Namun, sumber lain membantah hal ini. Menurut dia, semua fakta yang ada menunjuk pada Prabowo. Hanya, sumber ini juga membenarkan bahwa aktor di balik penculikan itu tidak hanya Prabowo seorang, alias ada pelaku kedua.

Dikorbankan?

Mengomentari posisi Prabowo saat ini, Fadli Zon bersinyalemen bahwa mantan 'bos' Kopassus ini menjadi korban *whispering campaign* [kampanye bisik-bisik] yang ampuh. Malangnya, lanjut dia, karena selama masih berseragam Prabowo terikat etik militer, maka dia tak bisa melawan serbuan opini buruk.

Akibat ketertutupan Prabowo, lanjut dia, tidak mengherankan jika opini menjadi sangat mudah digiring. Sikap pasif Prabowo, lanjutnya, hanya menjadikan dirinya sebagai sasaran 'tembak' yang empuk. Pihak tertentu mudah saja menciptakan disinformasi agar orang keliru memahami sosok Prabowo.

Sebuah sumber berasumsi, tersudutnya Prabowo tidak terlepas dari perseteruan abadinya dengan Benny Moerdani. "Sebelumnya, Prabowo ini anak emas Benny. Prabowo direkrut Benny karena berasal dari keluarga sekuler, ibunya Kristen sedang ayahnya sekuler. Tapi, sejak berpangkat kapten, Prabowo bersama beberapa nama lainnya kerap melawan perintah Benny. Konon, karena mereka mulai sadar bahwa Benny sering melakukan hal-hal yang salah."

Informasi lain juga menyebut-nyebut soal Prabowo yang hanya akan dijadikan korban kepentingan elite. Hanya saja, sumber ini tidak menyebut nama Benny Moerdani. Dikatakannya, Soeharto sebagai mertua Prabowo tahu betul bagaimana kondisi menantunya saat ini. Soeharto juga tahu dengan siapa Prabowo menjalin kontak-kontak di dalam negeri sebelum dirinya dilengserkan. Plus, dia pun tahu siapa-siapa yang bermain di balik kerusuhan-kerusuhan di tanah air. Siapakah mereka? ■

Seeno M Abdi

Mereka yang hadir di Makostrad

Berikut ini beberapa nama yang hadir dalam pertemuan Kamis sore [14Mei] di Makostrad bersama Letjen Prabowo Subianto: Mayjen Kiflan Zein, Mayjen Muhdi PR, Mayjen Sjafrie Sjamsoedin, Brigjen Adityawarman, Fahmi Idris, Hashim Djojohadikusumo, Adnan Buyung Nasution, WS Rendra, Setiawan Djody, Hotma Sitompul, Ruhut Sitompul, Fadli Zon, Iqbal Assegaf, dan Dien Syamsuddin.

Bambang Widjojanto:

'Prabowo berkelahi dengan Hashim'

Bambang Widjojanto adalah salah satu orang yang [ikut] dalam pertemuan di Makostrad tanggal 14 Mei 1998. Di bawah ini wawancara Siti Nuliadayi dari AKSI dengan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta [TGPF] yang juga Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini:

Peluang Prabowo Subianto menggugat TGPF?

Saya sudah mendengar kabar ini sejak tiga bulan lalu. TGPF [Tim Gabungan Pencari Fakta] mau digugat. Tapi, *kok*, sampai sekarang tidak pernah digugat-gugat. Jangan sekadar *bluffing* [menggertak] saja. Bulan puasa *nggak* boleh *bluffing*. Omong kosong tidak boleh. Kalau mau gugat, cepatan gugat. Nanti, kalau anggota TGPF pada sakit, kan susah.

Probowo jelas sekali merasa kecewa dengan teman TGPF dan kabarnya akan mengambil tangkah hukum?

Semua orang punya hak untuk kecewa. Ya, sekarang kita tunggu saja. Masa kita harus menantang. Nanti terlalu takabur. Kita menunggu dengan bijaksana dan arif gugatan dia. Tapi, kalau *bluffing* saja kita sudah capek mendengarnya. Kita ini kan tukang men-*bluffing*, *kok* di-*bluffing*.

Dalam temuan TGPF yang ditonjolkan adalah pertemuan di Makostrad, sebetulnya cerita pertemuan itu sendiri bagaimana?

Pertemuan itu sama seperti pertemuan yang lainnya. Saya ada di sana karena diajak oleh Adnan Buyung, ya, saya ikut. Prabowo orang hebat. Saya mau dengar [omongannya] saja. Lalu saya ketemu dia. Sebetulnya saya juga diminta teman-teman mendampingi Adnan Buyung. Mengawasi. Pada saat itu saya tidak tahu, kalau dia mau ketemu Prabowo. Dia bilang mau ke Makostrad saja. *Nggak* begitu penting bagi saya mau ketemu siapa saja.

Yang Anda bicarakan apa saja?

Kalau yang saya ingat, saya mempersoalkan kasus penculikan. Prabowo pada saat itu, beberapa kali menganggap bahwa dia tidak terlibat kasus penculikan. Bahkan menyebut, "Demi Allah saya tidak terlibat." Dia mengatakan, tidak betul itu. Bahkan dia berkelahi dengan adiknya, Hashim [Djojohadikusumo]. Mereka berdebat keras. "Di luar bahwa Anda pelakunya," kata Hashim. Lalu perdebatan ini ditengahi oleh Buyung. Saya konsentrasinya pada kasus penculikan, karena saya memang berkepentingan.

Tapi, dalam perbincangan lain, yang saya ingat lagi bahwa pada saat itu [kerusuhan Mei] tidak ada pubik *statement* dari pejabat kendati kerusuhan sudah merebak di mana-mana. Kita sangat kecewa sekali, mengapa itu sampai terjadi. Ini merupakan kesengajaan, kelalaian, keteledoran, atau apa. Kita minta supaya ada pejabat publik yang membuat *statement* untuk mengendalikan situasi pada saat itu. Tak ada *sense of crisis* dari pejabat. Sudah itu saja. Pertemuannya sendiri cuma satu jam, setelah itu kita pulang. Pertemuannya itu pada tanggal 14 Mei. Sedangkan kerusuhannya 13-14-15 Mei.

Dalam pembicaraan, ada indikasi tidak keterlibatan Prabowo?

Saya tidak tahu, karena pertemuan itu saya duga bukan hanya pertemuan saya [hadiri] saja. Mungkin ada banyak pertemuan lain, yang saya tidak tahu. Kenapa saya mengungkapkan hal ini, itu pun setelah saya di TGPF, saya baru tahu ada banyak pertemuan lain.

Mengapa pertemuan di Makostrad itu yang ditonjolkan dalam temuan TGPF?

Oh, itu tanya ketua [TGPF]. Saya tidak berhak mewakili teman-teman TGPF yang lain. Tapi itu sudah melalui proses perdebatan dan diskusi. Teman-teman mengatakan itu penting, lalu dicatat dan dilacak.

Anda ada dalam pertemuan itu, mengapa tidak dijelaskan?

Sudah, sudah saya jelaskan. Tapi, saya bukan satu-satunya informan yang bisa memberikan hal itu. Karena mereka juga punya informasi-informasi lain, berdasarkan klarifikasinya, yang saya tidak pernah tahu. Dan, itu hak mereka juga. ■

Vol. 3, No. 111, 29 Desember 1998 - 4 Januari 1999

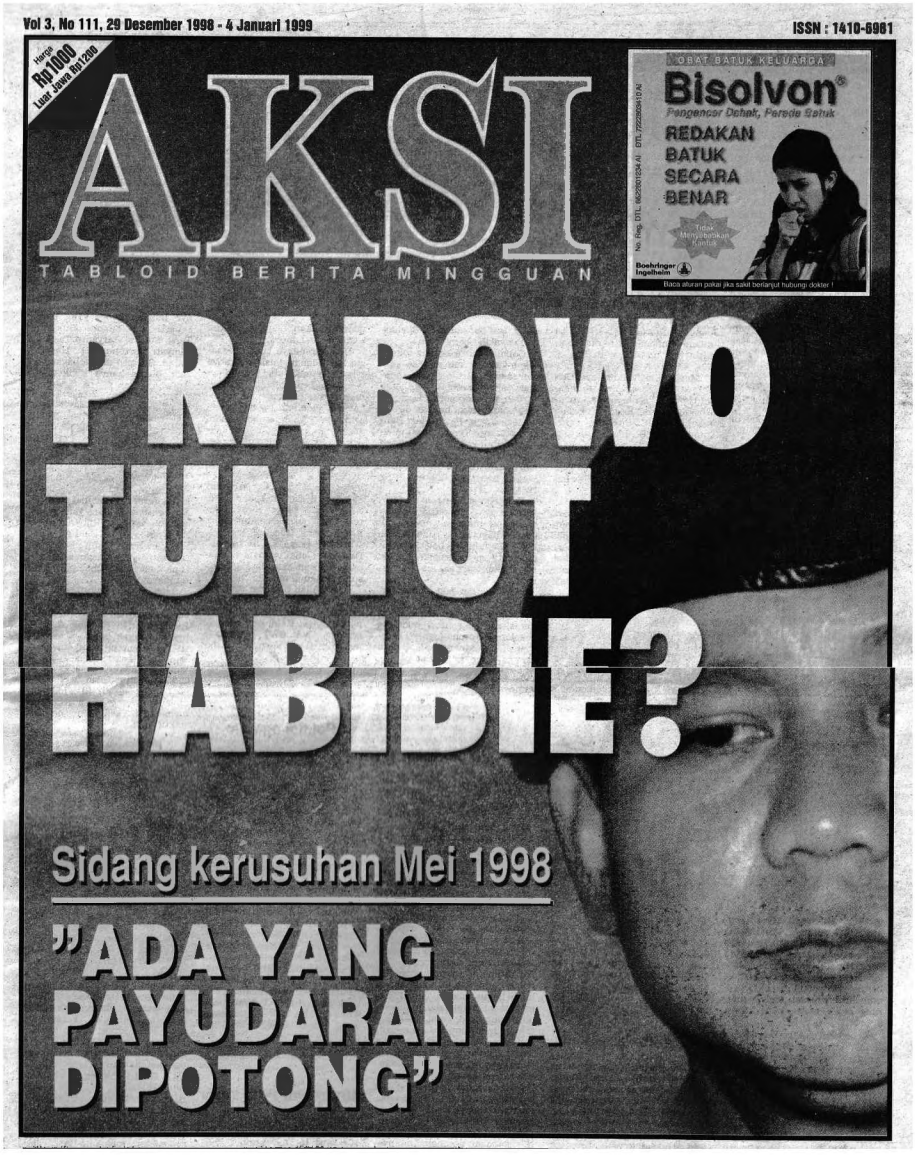

Aksi
29 Desember 1988-
4 Januari 1999

15 MEI 1998

"Mas prabowo kan aparat. Jadi sampeyan yang bisa menyelesaikan kerusuhan."

*| **K.H. Abdurrahman Wahid**, Ketua Umum PB NU, dalam berita Media Indonesia ("Gus Dur Ungkap Pertemuan dengan Prabowo 15 Mei", 11 November 1998)*

Setelah mengadakan pertemuan dengan tokoh ormas Islam, tokoh LSM, dan beberapa perwira tinggi ABRI, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto (PS) bergegas ke Ciganjur, rumah K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Prabowo ditemani Kaskostrad Mayjen TNI Kivlan Zen masuk ke dalam rumah. Pertemuan ini berlangsung selama lebih kurang satu jam.

Gus Dur: Malam-malam begini kok ke sini Mas Prabowo, ada apa?
PS: Begini, Gus, saya sedang patroli, teringat Gus Dur. Jadi saya ke sini. Obrolan masuk ke hal pokok eskalasi kerusuhan menanjak di Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
Gus Dur: Lo, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai aparat, ya, sampeyan yang tahu bagaimana mengatasinya. Habis, mereka tidak mau mendengarkan lagi.
PS: Gus Dur kan tokoh yang sangat berpengaruh.
Gus Dur: Ya, kalau saya berpengaruh mestinya orang-orang itu mau mendengar saya, pasti tidak terjadi kerusuhan seperti ini.
Prabowo Subianto juga mengeluhkan banyak pihak yang menuduh dirinya terli-

bat dalam aksi kerusuhan itu.
Gus Dur: Ya, kalau merasa tidak ter-
libat, Mas Prabowo tidak perlu takut.

| ***Laporan Media Indonedia**, Jumat 11 November 1998, "Gus Dur Ungkap Pertemuan dengan Prabowo 15 Mei*

Media Indonesia
11 November 1998

HARIAN UMUM

MEDIA INDONESIA

MEMBAWA SUARA RAKYAT

HOTLINE
Berlangganan & CustomerService
Telp/Fax: (021) 582-1303
http: //www.mediaindo.co.id/

Gus Dur Ungkap Pertemuan dengan Prabowo 15 Mei

■ Pangkostrad Minta Saran Atasi Kerusuhan

Gus Dur:
Kalau merasa tidak terlibat, Mas Prabowo tidak perlu takut.

Gus Dur

Marzuki: Tugas Pemerintah untuk Mengusutnya

■ AS Desak Habibie Tindak Lanjuti Temuan TGPF

Robby Djohan Pimpin Bank Mandiri

Moffett Diperiksa soal KK Freeport

TABUNGAN JUMBO 37%* Bank Bumi Daya

Media Indonesia
Kamis
11 November 1998

Pertemuan
/o 15 Mei
tasi Kerusuhan

JAKARTA (Media): ''Mas Prabowo kan aparat. Jadi *sampeyan* yang bisa menyelesaikan kerusuhan,'' kata KH Abdurrahman Wahid kepada *Media* kemarin, menuturkan dialognya dengan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto pada pertemuan 15 Mei dini hari.

Seperti diberitakan kemarin, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pada 14 Mei 1998 sore Prabowo mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh ormas Islam, tokoh LSM, dan beberapa perwira tinggi ABRI. Termasuk di antaranya Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoedin. Hashim sendiri hadir dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Kodam Jaya itu. Malam harinya, menurut Hashim, Prabowo menemui Abdurrahman Wahid di kediaman Ciganjur. Tetapi Hashim tidak ikut hadir.

Dikawal beberapa mobil lengkap dengan pasukan, sekitar pukul 01.15 dini hari yang senyap, Prabowo mengetuk pintu rumah Gus Dur —panggilan akrab Abdurrahman Wahid— di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gus Dur sendiri tengah terlelap dalam tidur.

Setelah dipersilakan masuk oleh staf pribadi Gus Dur, menantu Presiden Soeharto (waktu itu) masuk kamar tidur Gus Dur bersama Kaskostrad Mayjen TNI Kiflan Zein. Keduanya berseragam lengkap loreng-loreng. Semula Prabowo meminta kepada staf pribadi Gus Dur untuk tidak perlu membangunkan tuan rumah. Pelan-pelan Prabowo dengan ilmu bela diri yang dimiliki melakukan meditasi mencoba mengobati Gus Dur yang memang sedang sakit.

''Apa Bapak perlu dibangunkan?'' tanya staf pribadi Gus Dur.

''Tidak usahlah,'' jawab Prabowo dengan suara agak keras. Mendengar suara Prabowo, Gus Dur terbangun dan menanyai siapa tamunya. Mengetahui Prabowo yang datang, Gus Dur mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan.

''Malam-malam begini kok ke sini Mas Prabowo, ada apa?'' tanya Gus Dur.

''Begini Gus, saya sedang patroli, teringat Gus Dur. Jadi saya ke sini,'' jawab Prabowo.

Perbincangan kemudian semakin serius menyangkut kerusuhan. Intinya Prabowo minta saran Gus Dur, bagaimana mengatasi kerusuhan yang saat itu tengah marak berlangsung di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

18 MEI 1998

Yang prihatin dan sedih adalah anak atau ibu atau ayah mereka yang raib karena takut jangan-jangan mereka yang dikasihi itu sudah dikirim ke "sukabumi" – ungkapan yang dulu pernah populer untuk kata lain dari dibunuh – sehingga sirnalah kemungkinan untuk bertemu kembali dalam keadaan masih bernafas. Maklumlah, kira-kira tiga dekade yang lalu, cukup banyak orang yang sudah dikirim tanpa kehendak hati mereka sendiri, tanpa melalui suatu proses hukum yang benar, dijebloskan begitu saja ke "sukabumi". Yang berlaku pada waktu itu seolah-olah hukum rimba.

*| Nukilan Opini **J.E. Sahetapy**, Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya ("Hukum Rimba", Forum Keadilan, 18 Mei 1998)*

Hukum Rimba

Forum Keadilan
18 Mei 1998

Media massa akhir-akhir ini dengan gencar, hampir tiap hari, menyiarkan peristiwa atau nama dari orang(-orang) tertentu atau (para) mahasiswa tertentu yang seolah-olah raib dari muka bumi. Tentu saja peristiwa hilang atau dihilangkannya orang-orang itu menimbulkan geger di kalangan masyarakat awam. Yang prihatin dan sedih adalah anak atau ibu atau ayah mereka yang raib karena takut jangan-jangan mereka yang dikasihi itu sudah dikirim ke "sukabumi"—ungkapan yang dulu pernah populer untuk kata lain dari dibunuh—sehingga sirnalah kemungkinan untuk bertemu kembali dalam keadaan masih bernapas. Maklumlah, kira-kira tiga dekade yang lalu, cukup banyak orang yang sudah dikirim tanpa kehendak hati mereka sendiri, tanpa melalui suatu proses hukum yang benar, dijebloskan begitu saja ke "sukabumi". Yang berlaku pada waktu itu seolah-olah hukum rimba.

J.E. Sahetapy
Guru Besar Unair, Surabaya

Tidaklah mengherankan kalau fenomena hukum rimba ini—yang jelas memperkosa rambu-rambu hukum yang absah, bahkan nyata-nyata melanggar hak asasi manusia—oleh kaum awam dicari atau dikaitkan hubungannya dengan suatu peristiwa yang sedang bergolak. Lazimnya, masyarakat mengaitkannya dengan suatu problematik politik, atau bertalian dengan tuntutan pergulatan perubahan struktur masyarakat, atau yang dipandang dapat membahayakan keberadaan dari penyelenggara kekuasaan. Seperti di Argentina beberapa dekade yang lalu, ketika kediktatoran angkatan bersenjata merasa terpojok atau merasa seperti hendak dilemahkan, maka cara yang paling mudah, murah, dan aman, yaitu dengan "menghilangkan" begitu saja orang-orang atau tokoh-tokoh yang tidak disukai, yang vokal, atau yang dapat membahayakan eksistensi kekuasaan yang sedang berkuasa.

Dalam kondisi seperti menjepit itu, yang ditakuti atau yang dikhawatirkan oleh mereka yang berkuasa adalah kemungkinan kehilangan kekuasaan atau menghadapi tuntutan massa rakyat. Karena itu, mereka yang berkuasa itu atau juga suruhan mereka, entah lupa atau tidak, entah dengan persetujuan diam-diam pemimpin mereka atau tidak, menempuh jalan pintas saja melalui hukum rimba. Caranya, dengan mengirimkan orang-orang yang profesional—dan tentu sudah terlatih—untuk melakukan operasi kilat dan terselubung terhadap orang-orang yang tidak mereka sukai atau yang dibenci atau yang ditakuti *vis-a-vis* kekuasaan mereka. Operasi hukum rimba ini bisa bermotif ganda.

Melalui operasi hukum rimba ini diciptakan apa yang oleh Johann Galtung dinamakan "kekerasan struktural". Tujuan utama dari operasi terselubung kilat ini untuk me-

SELO SUMARSONO

nimbulkan ra
masyarakat, te
yang berma
berbangsa dan
orang) yang ti
selama-lamany
dunia luar nege
cuci tangan ala
ta seolah-olah
jain" oleh mus
alibi lainnya.

Oknum(-okn
mankan" dalan
house), kemud
teknik "kekerasan", tapi ti
penyiksaan berupa bekas-b
yang akan membekas seum

Pertanyaan yang mungkin
buatan seperti yang digamb
negara kita ini disebut negar
dengan berfalsafah dan ber-
bentuk dan sifat "penculik
hukum rimba, oleh siapa pun
terjadi. Dan bila hal itu terjad
aparat hukum dan aparat k
menyelesaikan hal itu sesu
Dalam hal ini, tidaklah dapat
yang mengatakan tidak tahu
hukum dan atau aparat keam
gakkan *law and order*.

Yang mengherankan, meny
ada oknum penguasa yang
tradiktif atau yang saling ti
berkuasa tampaknya seolah-

FORUM KEADILAN: NOMOR 3, TAHUN VII, 18 MEI 1998

lengan gencar, ham-
peristiwa atau nama
ı atau (para) maha-
ıib dari muka bumi.
hilangkannya orang-
alangan masyarakat
ah anak atau ibu atau
jangan-jangan mere-
n ke "sukabumi"—
r untuk kata lain dari
ıgkinan untuk berte-
ih bernapas. Mak-
lalu, cukup banyak
hendak hati mereka

J.E. Sahetapy
Guru Besar Unair, Surabaya

hukum yang benar, dijebloskan
rlaku pada waktu itu seolah-olah

nomena hukum rimba ini—yang
ıkum yang absah, bahkan nyata-
a—oleh kaum awam dicari atau
ıtu peristiwa yang sedang bergo-
ıannya dengan suatu problematik
tan pergulatan perubahan struk-
ng dapat membahayakan keber-
n. Seperti di Argentina beberapa
ı angkatan bersenjata merasa ter-
emahkan, maka cara yang paling
gan "menghilangkan" begitu saja
tidak disukai, yang vokal, atau
tensi kekuasaan yang sedang

t itu, yang ditakuti atau yang
kuasa adalah kemungkinan kehi-
tuntutan massa rakyat. Karena

nimbulkan rasa takut yang luar biasa di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpotensi atau yang bermaksud mempertanyakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang rancu. Apabila orang(-orang) yang tidak disukai itu dapat dihilangkan untuk selama-lamanya dan kemudian timbul pertanyaan dari dunia luar negeri, maka penyelenggara kekuasaan akan cuci tangan ala Pontius Pilatus dan justru melansir berita seolah-olah yang bersangkutan kemungkinan "dikerjain" oleh musuhnya sendiri, atau dengan merekayasa alibi lainnya.

Oknum(-oknum) yang dihilangkan itu biasanya "diamankan" dalam suatu tempat tertentu yang aman (*safe house*), kemudian diinterogasi dengan segala bentuk teknik "kekerasan", tapi tidak akan meninggalkan bekas-bekas penyiksaan berupa bekas-bekas luka, kecuali sindrom atau trauma yang akan membekas seumur hidupnya.

Pertanyaan yang mungkin akan diajukan ialah, apakah semua perbuatan seperti yang digambarkan di atas itu dapat ditoleransi? Kalau negara kita ini disebut negara hukum, apalagi kalau itu suatu negara dengan berfalsafah dan ber-*weltanschauung* Pancasila, maka semua bentuk dan sifat "penculikan terselubung" alias memberlakukan hukum rimba, oleh siapa pun atau lembaga apa pun, jelas tidak boleh terjadi. Dan bila hal itu terjadi juga, maka itu adalah tugas dari semua aparat hukum dan aparat keamanan untuk mentransparankan dan menyelesaikan hal itu sesuai rambu-rambu hukum yang berlaku. Dalam hal ini, tidaklah dapat dibenarkan kalau ada oknum penguasa yang mengatakan tidak tahu-menahu, atau itu bukan urusan aparat hukum dan atau aparat keamanan, apalagi lembaga yang harus menegakkan *law and order*.

Yang mengherankan, menyedihkan, bahkan sangat tidak lucu bila ada oknum penguasa yang memberi keterangan yang saling kontradiktif atau yang saling tidak serasi. Mereka yang kini sedang berkuasa tampaknya seolah-olah tidak mau belajar dari sejarah. Pada waktunya, apabila mereka yang berkuasa itu kemudian tidak berkuasa lagi, maka berita-berita praktek hukum rimba bertalian dengan dihilangkannya mahasiswa atau oknum-oknum tertentu lainnya, akan diungkapkan juga oleh media massa tanpa dapat ditahan oleh siapa pun yang berkuasa. Pada waktu itu, apabila oknum(-oknum) yang pernah berkuasa itu masih diberi usia lanjut oleh Tuhan, maka bukan saja dia akan malu dan atau dipermalukan, tetapi juga seluruh anggota keluarga akan ikut merasa malu atau dipermalukan. Lazimnya, hukum rimba itu hanya bertahan seumur jagung. Tuhan itu maha adil. ❑

Tajuk
18 Mei - 10 Juni
1998

22 MEI 1998

Sekira pukul 17.30, berlangsung pergantian jabatan Pangkostrad; dari Letjen Prabowo Subianto (Akabri 74) ke Mayjen Johny Lumintang (Akabri 70). Penjagaan sangat ketat. Jurnalis dilarang masuk. Padahal, biasanya dilakukan terbuka dan meriah. Sebab, pos Pangkostrad digadang-gadang sebagai pos prestisius di lingkungan ABRI. Saat proses pergantian itu, Prabowo masih sempat berkeliling memeriksa keamanan Jakarta dari udara bersama Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoedin. KSAD Jenderal Subagyo HS yang memberitahukan pergantian itu selepas Jumat kepada Prabowo. Datangnya perintah pergantian itu dari Pangab Jenderal Wiranto juga berlangsung kilat. Prabowo pun bersedia menyerahkan tongkat komando dan lencananya kepada Subagyo tanpa melakukan serah terima jabatan. Seterusnya, Prabowo ditugaskan menjadi Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI di Bandung menggantikan Letjen Arie J. Kumaat yang ditugaskaryakan di Departemen Kehutanan.

Setelah pergantian itu, malam harinya ribuan personel turun. Mereka berasal dari satuan-satuan Kostrad, Kodam Jaya, dan Kopassus ke tempat-tempat strategis seputar Istana Merdeka, Kota, Menteng, dan Jalan Thamrin. Mereka bersenjata peralatan siap tempur serta melibatkan panser, tank, dan bahkan kanon. Isu meledaknya pertempuran menjadi berita CNN. Saluran televisi itu diperkuat sumber diplomatik di Jakarta, menyatakan perang bakal pecah. Hingga subuh, "perang" itu tidak terjadi. Sebaliknya, jelang subuh, lima ribuan mahasiswa yang masih menduduki kompleks Gedung DPR/MPR mau dievakuasi oleh pasukan marinir bersamaan dengan menyingkirnya sejumlah panser dan persenjataan berat milik Kodam dan Kostrad.

D&R
30 Mei 1998

LAPORAN KHUSUS

KENAPA PRABOWO DIGANTI?

Politik adalah godaan besar bagi militer, dan berpotensi mencerai-beraikannya.

Ada sejumlah peristiwa "misterius" berkaitan dengan kalangan militer, akhir pekan silam. Satu hal yang jelas adalah pengumuman Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto pada Sabtu lalu tentang pergantian Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto.

Yang mencolok, jabatan Pangkostrad sempat berpindah tangan ke Mayjen Johny Lumintang (empat angkatan di atas Prabowo), tapi hanya sehari, sebelum akhirnya diserahkan ke Mayjen TNI Djamari Chaniago. Ada dua misteri: kenapa Lumintang hanya "*caretaker*" untuk sehari; dan yang lebih penting kenapa Prabowo diganti mendadak?

Pergantian itu, apalagi dilakukan hanya sehari setelah pengunduran diri Jenderal (Purn) Soeharto, memancing sejumlah spekulasi. Dalam usianya yang baru 47, menantu mantan presiden itu telah menyandang bintang tiga. Padahal, banyak kawan seangkatannya (ia alumnus Akabri 1974) yang masih berpangkat kolonel. Ada beberapa kawannya yang berbintang satu atau dua (brigjen dan mayjen).

Spekulasi lain memberikan indikasi bahwa "ABRI tidak satu". Meski, seperti dikatakan Prabowo sendiri di televisi beberapa hari sebelumnya, ABRI tetap satu "di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Wiranto".

Spekulasi terakhir itu sudah muncul pekan lalu. Sehari sebelum Ketua DPR/MPR Harmoko mengimbau "agar Presiden Soeharto mundur", sejumlah wartawan menerima sehelai *press-release* yang intinya ABRI mendukung seruan PB Nahdlatul Ulama tentang Sidang Istimewa MPR. Namun, rilis itu —yang muncul seusai konferensi pers Kapuspen Brigjen Abdul Wahab Mokodongan— tidak menggunakan kop resmi dan tanpa tanda tangan.

Malam harinya, sejumlah koran menerima "permintaan sangat" dari Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) agar rilis itu dianggap tidak ada. Yang tak kurang mengejutkan, Pangab Wiranto esok harinya "*me*mentahkan" *statement* Harmoko beberapa jam sebelumnya. Tidakkah itu melukiskan pertarungan internal ABRI dalam merespons perkembangan politik menjelang kejatuhan Soeharto?

Spekulasi terakhir ini diperkuat oleh ketegangan mencekam pada Jumat malam, setelah siang harinya Prabowo dicopot dari Kostrad. Jumat malam hingga Sabtu dini hari itu, seperti diberitakan *Suara Pembaruan* (23/5), suasana Jakarta sangat mencekam.

Di bawah judul "Isu Meletusnya 'Perang' Kota", koran itu mengabarkan turunnya ribuan personel dari satuan-satuan Kostrad, Kodam Jaya, dan Kopassus ke tempat-tempat strategis seputar daerah Istana Merdeka, kawasan kota, Menteng, dan Jalan Thamrin. Mereka bersenjata peralatan siap tempur, serta melibatkan panser, tank, dan bahkan kanon.

Pemandangan seperti itu dikonfirmasi oleh warga Jakarta dan para wartawan asing yang menginap di seputar Jalan Thamrin. Isu akan meledaknya pertempuran juga sempat menjadi berita *CNN*. Saluran TV itu, diperkuat oleh sumber diplomatik di Jakarta, me-
ngatakan perang

UJANG/UMMAT

akan pecah pada pukul 02.00 dini hari. Tapi perang dengan siapa?

Simpatik. Seorang aktivis mahasiswa di Gedung DPR/MPR, yang belakangan dievakuasi secara damai, mengatakan kepada wartawan UMMAT bahwa pihaknya memperoleh informasi sejenis dari sebuah sumber di kepolisian. "Saluran kami itu menginformasikan bahwa di Cendana sedang terjadi tembak-menembak," kata Raymond, Koordinator Pengamanan dari Forum Komunitas Mahasiswa Se-Jabotabek, yang juga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia.

Tembak-menembak pasti tidak. Bahkan pada pukul 02.30, suasana di pusat kota sudah mengendur. Sejumlah panser dan persenjataan berat milik Kodam dan Kostrad mulai menyingkir. Pukul 04.00 suasana pulih.

Namun, informasi "tembak-menembak" itulah yang berhasil "membujuk" mahasiswa untuk akhirnya, pada pukul 03.00, mau dikeluarkan dari kompleks Gedung DPR/MPR —meski dengan syarat. Para mahasiswa, menurut Raymond, hanya mau dievakuasi oleh pasukan Marinir, yang dipandang simpatik dalam menangani setiap demonstrasi mahasiswa.

Satu hal yang jelas, sejumlah saksi melihat operasi evakuasi terhadap mahasiswa dilakukan oleh gabungan dari semua satuan dan dilakukan secara simpatik. "Untuk ukuran sebuah pembersihan yang melibatkan massa 5.000 mahasiswa, ini agak baik," kata Leopord, seorang pengacara LBH yang mendampingi mahasiswa, kepada UMMAT.

Spekulasi perpecahan itu juga dibantah oleh Kadispenad Brigjen TNI Dewa Putu Ray. Seperti dikutip *Jawa Pos*, dia menolak anggapan adanya dalih politik di balik pencopotan Prabowo dari Kostrad itu. "Pergantian itu kan biasa di ABRI. Itu hanya bagian regenerasi," katanya. Prabowo kini menjabat Dansesko ABRI.

Putu Ray juga membantah dugaan bahwa pergantian Prabowo itu berkaitan dengan kasus penembakan empat mahasiswa Trisakti dua pekan silam. Penyidikan meninggalnya para "Pahlawan Reformasi" itu, menurut Putu Ray, memang belum selesai.

Sejumlah pertanyaan masih menggantung. Termasuk apakah benar redanya ketegangan itu berkaitan dengan munculnya nama Chaniago sebagai pengganti Lumintang. U

Farid Gaban, Ali Anwar, dan Maifil Eka Putra

Ummat
1 Juni 1998/5 Safar 1419 H

Forum Keadilan
15 Juni 1998

FORUM KHUSUS

Kisah Mutasi Panglima yang Unik

Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto mendadak diganti. Namun, penggantinya hanya sempat menjabat selama 16 jam, lalu diganti lagi. Gelombang reformasi juga bakal menyentuh ABRI?

Mutasi tentu bukan hal yang aneh bagi prajurit ABRI. Tapi, serah terima jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), pekan silam, sungguh-sungguh di luar kebiasaan: tanpa upacara militer yang meriah dan tertutup bagi wartawan.

Yang ada adalah keterangan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigadir Jenderal I Dewa Putu Rai, bahwa acara itu berlangsung pada Jumat, 22 Mei 1998, pukul 17.30 WIB. Jabatan bergengsi itu diserahterimakan dari Letnan Jenderal Prabowo Subianto kepada pejabat baru, Mayor Jenderal Johny Lumintang. Soal lokasi acara, ada dua versi yang beredar di kalangan wartawan. Yang satu di Markas Kostrad Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Satu lagi, di Markas Besar TNI AD Jalan Merdeka Utara.

Mana yang benar? Tak jelas. Yang pasti, dalam mutasi ini, Prabowo, menantu mantan Presiden Soeharto itu, lalu diserahi tugas baru, yakni sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) ABRI, menggantikan Letjen Arie J. Kumaat, lulusan AMN angkatan 1966 yang akan ditugaskaryakan. "Acara serah terima jabatan Pangkostrad berlangsung cukup sederhana," ujar Kadispenad. Acara dipimpin KSAD Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.

KRUS HARYANTO

LETJEN PRABOWO DAN PASUKAN KOSTRAD. *Lebih berkembang di lapangan.*

Pergantian ini tentu saja cukup mengagetkan bagi banyak kalangan. Soalnya, kedua perwira tinggi itu belum lama menduduki jabatan masing-masing. Prabowo (Akabri angkatan 1974) baru 63 hari menduduki posisi Pangkostrad. Adapun Johny (Akabri 1970) bahkan baru diangkat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI awal April 1998.

Kemeriahan acara serah terima itu amatlah kontras bila dibandingkan kala Prabowo menggantikan Letjen TNI Soegiono sebagai Pangkostrad, 20 Maret 1998. Maklumlah, kesempatan itu sengaja dirangkaikan dengan peringatan HUT Kostrad ke-37. Jadi, jangan heran bila banyak yang tak menduga penggantian itu terjadi dalam jangka waktu yang begitu dekat. Namun, keheranan itu segera ditepis Putu Rai. "Pergantian itu kan biasa di ABRI. Itu hanya bagian dari regenerasi," ujarnya.

Namun, sehari kemudian, seusai pelantikan Kabinet Reformasi Pembangunan, Sabtu, 23 Mei, berita tentang mutasi itu dikoreksi Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto. Kepada wartawan, Wiranto meluruskan bahwa jabatan Pangkostrad tidak diserahkan kepada Johny Lumintang, melainkan kepada Mayjen TNI Djamari Chaniago, lulusan Akbari 1971 yang masih menjabat Panglima Kodam III/Siliwangi.

Mutasi Prabowo ke pos barunya, menurut Menhankam/Pangab, adalah dalam rangka menambah pengalaman. "Jenderal Prabowo selama ini belum memiliki pengalaman di bidang staf dan pendidikan," ujarnya. Memang, selama kurang lebih 24 tahun karier militernya, Prabowo lebih banyak berkembang di lapangan sebagai perwira Kopassus dan kemudian Kostrad.

Wiranto pun menegaskan bahwa pergantian ini bukan perkara baru. "Serah terima komando di lingkungan TNI AD sudah lama direncanakan. Karena situasi nasional sedang tidak memungkinkan, baru sekarang ini dilakukan serah terima," ujarnya.

Soal Mayjen TNI Johny Lumintang yang sebelumnya diberitakan menjadi Pangkostrad, Wiranto menjelaskan bahwa sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi itu, ia sebetulnya bertindak sebagai *caretaker* alias pejabat sementara. Tugasnya adalah mengonsolidasi pasukan

Forum Keadilan
15 Juni 1998

23 MEI 1998

Pukul 10.30 WIB, Mayjen Johny Lumintang menyerahkan tongkat Pangkostrad ke Mayjen Djamari Chaniago (Akabri 71). Djamari, Pangdam III/Siliwangi, datang mendadak dari Bandung. Tidak seperti sertijab Prabowo Subianto, kali ini upacara

LIPUTAN KHUSUS

RILLY YESMA

JOHNY LUMINTANG DAN DJAMIRI CHANIAGO (Kanan). Banyak orang bertanya-tanya.

Pergantian yang MEN

Banyak "kebetulan" dalam pergantian Pangkostrad yang membuat orang bertanya-tanya, adakah sesuatu yang serius terjadi.

BELUM PERNAH TERjadi rasanya, pergantian di kalangan ABRI mengundang rumor begitu ramai. Jumat sore, 22 Mei, di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) diserahterimakan jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dari Letnan Jenderal Prabowo Subianto kepada Mayor Jenderal Johny Lumintang. Mestinya, ini alih tugas yang biasa, meski yang menggantikan Prabowo yang alumni Akademi ABRI angkatan 1974 itu adalah seniornya—Johny Lumintang lulusan Akademi ABRI angkatan 1970.

Tapi, memang, ada hal-hal yang tidak biasa. Serah-terima jabatan itu dilangsungkan sekitar pukul 17.30 dan tertutup untuk wartawan—meski pers telanjur tahu. Bahkan, kru Dinas Penerangan AD sendiri tak bisa meliput upacara itu. "Kami saja tidak boleh masuk," kata salah seorang anggota kru video Dinas Penerangan AD itu.

Soal waktu yang sore dan tertutup untuk pers, Kepala Staf AD Jenderal Subagyo tak menjelaskannya. Kepada wartawan, ia hanya mengatakan bahwa semuanya berlangsung resmi dan sah.

Yang menjadikan acara sore itu makin mengherankan, esok siang pukul 11.00, Sabtu, 23 Mei, di Mabes AD juga dilangsungkan serah-terima jabatan yang baru saja ditempati orang baru: jabatan Pangkostrad itu. Yakni, Johny Lumintang digantikan oleh Mayor Jenderal Djamari Chaniago, alumni Akademi ABRI angkatan 1971 yang sebelumnya adalah Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi. Akan halnya Johny Lumintang dikembalikan ke jabatan semula, Asisten Operasional Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI. Untuk acara ini terbuka bagi pers. Pada upacara itu tak tampak mantan Pangkostrad Letnan Jenderal Prabowo.

Entah ada kaitan alih tugas tersebut dengan yang kemudian diberitakan oleh harian *Suara Pembaruan* edisi 23 Mei. Harian sore yang terbit di Ibu Kota ini melaporkan isu akan pecahnya "perang" di Jakarta. Sabtu dini hari, wartawan harian tersebut mela-

berlangsung terbuka. Johny Lumintang diplot sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Umum (Asops Kasum) ABRI. Jadi, Johny menjabat sebagai Pangkostrad hanya 17 jam.

D&R
30 Mei 1998

LIPUTAN KHUSUS

porkan suasana mencekam karena ratusan pasukan dari Kostrad, PHH Kodam V/Jaya, dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ditempatkan dengan persenjataan lengkap tepat pada posisi strategis seputar daerah Istana Merdeka, kawasan Jakarta Kota, Menteng, dan Jalan Thamrin.

Namun tepat pukul 02.30 WIB dini hari, sejumlah panser dan kendaraan berat milik Kodam Jaya dan Kostrad mulai ditarik dari tengah kota. Enam tank melintas di Bundaran Hotel Indonesia dan empat panser pulang melintas di Jalan Diponegoro. Hingga pukul 04.00 WIB, suasana kota berangsur pulih dan sejumlah pasukan Kostrad dan PHH Kodam V/Jaya segera kembali ke markasnya masing-masing.

Tak ada penjelasan soal ini. Yang bisa diduga, waktu itu hampir bersamaan dengan penggusuran mahasiswa dari gedung DPR-MPR RI oleh aparata keamanan yang terdiri dari anggota marinir dan anggota pasukan Kodam Jaya. Tapi, seperti dilaporkan para wartawan, penggusuran berlangsung damai, tak terjadi konflik apa pun. Bahkan, mahasiswa sempat saling menepukkan tangan dengan anggota marinir.

Hari Kebangkitan Nasional

Bisa jadi, ini semacam penjagaan sedia pasukan sebelum terjadi apa-apa karena ABRI tak ingin sesal kemudian tak berguna. Ini dilakukan ABRI, umpamanya, ketika

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, melihat berhentinya Prabowo dari jabatan Pangkostrad dari dua hal. Pertama, secara politis... ada upaya dari pihak ABRI sendiri untuk membersihkan intervensi ABRI dalam politik, yang selama ini dianggap tidak arif.... Kedua, ini mungkin hanya soal regenerasi organisasi.

Washington Post, edisi 23 Mei, memberitakan bahwa sumber Amerika di Jakarta mendapatkan infomasi bahwa Prabowo disangka berada di belakang peristiwa penembakan terhadap peserta aksi mahasiswa yang sedi-

GHEBOHKAN

mengantisipasi gerakan masyarakat yang sedianya dilakukan di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, berkumpul di Lapangan Monumen Nasional (Monas) untuk melakukan doa bersama. Amien Rais, tokoh masyarakat yang kini paling populer, menjanjikan sejuta warga masyarakat bakal ikut. Tapi, ternyata, sejak dini hari 20 Mei, penjagaan sekeliling Monas diperketat, bahkan jalan sekitar Monas ditutup. Jalan protokol Sudirman yang bersambung lurus dengan Jalan Thamrin dan di ujungnya menyentuh pinggir kawasan Monas ditutup.

Cuma, membandingkan dua kebijakan antisipasi ABRI ini, tetap tak ada jawaban jelas. Bila penjagaan 20 Mei jelas mengantisipasi gerakan masyarakat, lalu apa yang diantisipasi pada tanggal 23 dini hari itu? Mahasiswa akan pawai menuju Monas di tengah malam yang dingin itu? Rasanya mustahil.

Yang menarik, surat kabar Amerika, *The* kitnya menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, 12 Mei lalu. Berita yang ditulis Dana Priest itu juga mengatakan, sumber yang sama pun menyampaikan informasi bahwa orang yang sama berada di balik penculikan para aktivis beberapa lama lalu.

Tapi, berita tersebut sulit dikonfirmasikan kebenarannya. Tim khusus ABRI yang ditugasi mencari fakta-fakta di seputar dua kasus tersebut belum memberikan penjelasan tuntas pada Senin pekan ini, 25 Mei. Tim yang langsung dipimpin Komandan Pusat Polisi Militer ABRI Mayor Jenderal D. Syamsu pada Senin pekan ini di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, menolak bila kasus penculikan dikaitkan dengan aparat keamanan, apalagi dihubungkan dengan pergeseran di Kostrad. "Tolong, jangan dihubung-hubungkan, kami masih menyelidiki kasus ini dengan saksama," katanya kepada wartawan. Dan, Syamsu langsung membuktikan keseriusannya menyelidiki kasus ini karena ia saat itu berdampingan dengan Desmond J. Mahesa, salah seorang korban penculikan. Acara siang itu: Syamsu dan timnya mendengarkan kesaksian Desmond.

"Jangan salahkan kami kalau lambat karena para saksi yang lambat," ujar Syamsu. Katanya, pertemuan dengan Desmond seharusnya dua minggu yang lalu, tapi Desmond baru bisa hari itu. Dan sehabis bertemu Desmond, tim Syamsu dan tim dari Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) akan ke Jawa Timur untuk mendengarkan kesaksian dua aktivis yang juga menjadi korban penculikan: Herma Hendrawan dan Feisol Rezha.

Akan halnya tentang penyidikan kasus penembakan di Trisakti, 12 Mei, tim khusus ABRI dipimpin Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel Hendardji. Ia pun belum bisa mengungkapkan tuntas kepada pers (lihat *Si Penembak di Jembatan Layang*).

Tapi dalam artikel berita di *Washington Post* itu, mengutip sumber Barat, pemerintah Amerika yakin bahwa oknum Kopassus diduga keras berada di belakang kasus penculikan. Sumber itu mendasarkan asumsinya pada keterangan para korban penculikan. Tak disebutkan siapa korban penculikan itu. Yang jelas, beberapa lama lalu, salah seorang korban, Pius Lustrilanang, memang diundang Kongres Amerika Serikat untuk memberikan penjelasan seputar penculikan dirinya.

Perang Gerilya

Tak cuma pemerintah Amerika. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kontras pun, berdasarkan kesaksian yang mereka kumpulkan dari para korban, menyimpulkan penculikan itu hanya dapat dilakukan oleh satu organisasi yang rapi dan punya kemampuan tinggi. Kedua hal itu mengindikasikan keterlibatan oknum aparat keamanan.

Keprihatinan pihak Amerika bisa dimaklumi karena, kalau benar terbukti, militer Amerika tentulah sedikit banyak merasa tidak enak. Sebab, sudah sejak lama, militer Amerika punya hubungan erat dengan Kopassus dan melatih sejumlah anggota Kopassus dalam perang gerilya.

Tapi, sejauh ini itu semua hanya dugaan. Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengatakan kepada pers bahwa analisis semacam itu tidak benar dan sebaiknya tidak dipercaya. Sebab, katanya, tidak ada kebijakan di ABRI untuk menghilangkan sejumlah aktivis. Lalu, bagaimana menjelaskan pergantian atau penggeseran yang mendadak dan kemudian diubah lagi itu?

Kata Kepala Staf AD Jenderal Subagyo, hal itu karena perubahan keadaan yang demikian cepat terjadi. "Karena cepatnya itu, jangan sampai masalah detik pun tidak ada

yang tersebar di seluruh wilayah DKI. "Pasukan Kostrad banyak sekali. Jadi, perlu seorang *caretaker* untuk mengonsolidasi satuan. Setelah itu, baru jabatan diserahkan kepada pejabat definitif, yaitu Djamari Chaniago," ujar Wiranto.

Seberapa gawat situasi ibu kota sehingga diperlukan *caretaker* untuk mengonsolidasi pasukan? Bukankah di Makostrad masih ada Kepala Staf Kostrad, Mayjen Kivlan Zein? "Yang jelas, selama 16 jam menjabat sebagai Pangkostrad, Johny baru sempat melakukan briefing kepada 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Jakarta," kata sumber FORUM.

Nah, rupanya, entah mengapa acara pergantian jabatan dari Prabowo kepada Johny tidak berlangsung menurut "tradisi". Menurut sumber FORUM, begitu mendapatkan surat keputusan dari Menhankam/Pangab, Prabowo segera menghadap KSAD Jenderal TNI Subagyo untuk menyerahkan tugas dan jabatan Pangkostrad kepada KSAD di Mabes TNI AD. Beberapa waktu kemudian, baru terjadi penyerahan tugas dan tanggung jawab Pangkostrad dari KSAD kepada Johny Lumintang di Makostrad. Peristiwa itu, menurut beberapa pejabat militer yang hadir, berlangsung mendadak dan sangat cepat. Hari itu Prabowo tak bertemu dengan Johny. "Tapi siang itu juga Johny sudah berkantor di Makostrad," ujar sumber FORUM.

Selang beberapa jam, setelah melihat perkembangan terakhir, tampaknya keputusan pimpinan ABRI bergeser. Entah mengapa surat keputusan Pangkostrad, yang semula berada di tangan Johny Lumintang, berbelok ke tangan Djamari Chaniago. Serah terima jabatan Pangkostrad dari Johny kepada Djamari dilakukan hari Sabtu, 23 Mei, sekitar pukul 11.30. "Meski tak sampai sehari, foto dan nama Johny Lumintang akan terpampang di Makostrad sebagai Pangkostrad ke-23," kata sebuah sumber FORUM.

Mutasi lain—meskipun tak seunik tadi—terjadi di lingkungan Korps Pasukan Khusus (Kopassus). Jabatan Komandan Jenderal Kopassus diserahterimakan dari Mayjen Muchdi Purwopranjono kepada Pangdam IX/Udayana, Mayjen Syahrir M.S. Pergantian ini pun juga mengejutkan. Sebab, Muchdi baru 55 hari menjabat, menggantikan Prabowo, 28 Maret 1998.

Isu pergantian juga sempat menerpa Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsuddin. Ia pun dikabarkan bakal mengisi salah satu pos staf operasional di Mabes ABRI. Namun, hal itu segera dibantah Pangab. "Itu belum," ujarnya.

Meski berbagai bantahan muncul dari para pejabat militer, pergantian Prabowo dan Muchdi mau tak mau memunculkan spekulasi tentang perpecahan di tubuh ABRI, menyusul berhentinya Presiden Soeharto. "Faktanya, mereka kan memang pecah, itu tak bisa ditutup-tutupi," ujar peneliti CIDES, Eggi Sudjana.

Namun, baik pengamat militer Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib maupun Dr. Salim Said membantah pernyataan Eggi. Menurut mereka, pergantian Pangkostrad dan Danjen Kopassus yang sangat mendadak itu bukan bukti perpecahan di tubuh ABRI. "Saya kira Wiranto punya *policy* baru untuk menangani berbagai hal sekarang. *Policy* baru itu kan memerlukan personalia baru," ujar Salim. Ia pun mengaku tidak heran dengan keputusan Wiranto untuk melakukan mutasi itu.

Senada dengan Salim, Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais pun menganggap bahwa pergantian dan mutasi di kalangan ABRI itu soal biasa. "Namun, kita tak menutup mata, pasti ada *raison d'etre* atau alasan-alasan khusus perihal mengapa secara mendadak terjadi perubahan besar-besaran itu," ujarnya.

Bagi Amien, semua rumor di belakang pergantian yang terjadi di kalangan militer itu menjadi bukti bahwa ABRI dalam berdwifungsi kini terlalu banyak menekankan fungsi sosial politiknya. "Arahnya pasti kepada konflik ke dalam, karena kodrat politik itu menimbulkan konflik kepentingan," ujarnya.

SETNEG

PANGAB WIRANTO DAN KEPALA STAF ABRI. *Kebijakan baru, personel juga.*

Padahal, itu seharusnya tak terjadi. Sebab, menurut Amien, bagaimanapun ABRI adalah salah satu tulang punggung negara. ABRI memang lahir dari rakyat. Sejak revolusi kemerdekaan, Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan laskar-laskar rakyat yang kemudian menjelma menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), senantiasa bahu-membahu merebut dan mempertahankan kemerdekaan bersama rakyat. Tampak jelas bahwa tentara adalah kekuatan pertahanan keamanan rakyat semesta.

Sejak perang kemerdekaan, peran sosial politik ABRI pun telah muncul. Contoh yang paling sering dikemukakan adalah penolakan Jenderal Soedirman terhadap perintah Presiden Soekarno untuk tetap tinggal di Yogyakarta pada saat Agresi Militer II tahun 1948. Padahal, tinggal di Yogya berarti menyerah kepada Belanda. Karena itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memilih mengungsi dan memimpin gerilya. Sikap inilah yang menjadi acuan bahwa militer Indonesia bukan sekadar alat bagi pemerintahan sipil.

Peristiwa 17 Oktober 1952 juga menjadi tonggak sejarah bagi kiprah TNI dalam masalah politik. Aksi pengarahan meriam ke Istana Negara menjadi ujung kekecewaan terhadap partai politik yang terlalu mencampuri urusan tentara. Saat itu tentara menuntut agar Presiden membubarkan DPRS. Namun, Soekarno menolak tuntutan itu, dan jatuhlah Nasution.

Kiprah ABRI di gelanggang sosial politik mulai mendapat pengesahan ketika pada Februari 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional. Dengan badan ini Soekarno

Forum Keadilan
15 Juni 1998

banyak memberikan kesempatan bagi opsir-opsir militer untuk berperan di bidan politik layaknya politikus. Bahkan, Soekarno pun mulai menempatkan perwira-perwira ABRI dalam pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan perusahaan negara.

Pemikiran ABRI untuk aktif di bidang sosial politik selain hankam mulai mengkristal saat wisuda taruna AMN di Magelang tahun 1958. Saat itu, Jenderal Abdul Haris Nasution mengemukakan pidato "Jalan Tengah Tentara", yang kemudian menjadi konsep dasar dwifungsi ABRI. "ABRI bukan sekadar alat sipil seperti di negara Barat, juga bukan rezim militer yang mendominasi kekuatan negara, melainkan salah satu dari banyak kekuatan dalam masyarakat," ujarnya.

GATOT SRI WIDODO

RAKYAT MENGGOTONG ABRI. *Apa pun manuvernya, bukan soal.*

Sejak Orde Baru, konsep dwifungsi pun bergeser: dari konsep jalan tengah yang lebih bersifat *tut wuri handayani* berangsur-angsur menjadi *ing ngarsa sung tulada*. ABRI lebih berfungsi sebagai pengontrol kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara. Ibarat dalam permainan sepak bola, ABRI menjelma menjadi kapten kesebelasan sekaligus penyerang, gelandang, kiper, bahkan anak gawang pemungut bola.

Dalam pemerintahan, ABRI mendominasi kabinet. Bahkan, pada Kabinet Pembangunan IV, 17 menteri berasal dari kalangan ABRI. Kursi gubernur, bupati, dan wali kota menjadi langganan perwira militer. Dalam mesin politik Orde Baru, yakni Golkar, ABRI pun mendominasi. Pada 1967, Fraksi ABRI mendapat jatah 43 kursi dari 350 anggota DPR. Setahun kemudian, bertambah menjadi 75 dari 414 kursi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, ABRI kebagian jatah 100 kursi dari 500 anggota dewan. Baru pada penyusunan anggota DPR tahun 1997, kursi anggota dari Fraksi ABRI turun lagi menjadi 75 orang.

Soal dwifungsi ABRI tentu akan menjadi salah satu masalah yang penting dibahas dalam agenda reformasi saat ini. Apalagi, setahun silam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah merekomendasikan agar ABRI menyurutkan peran sospolnya. Mantan Presiden Soeharto pun pernah mengisyaratkan agar ABRI kini hendaknya lebih mengambil sikap *tut wuri handayani*.

Namun, pembahasan soal dwifungsi ABRI dalam orde reformasi ini tampaknya bakal cukup panjang, terutama untuk mengakomodasi semua pendapat masyarakat tentang posisi ABRI dalam kancah perpolitikan. Berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat memang cukup beragam.

Pendapat yang paling ekstrem adalah mereka yang menginginkan agar ABRI sama sekali tidak perlu ikut campur dalam urusan politik. "Fraksi ABRI tak perlu ada lagi, itu kan fraksi mengada-ada," ujar pakar ilmu politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, kepada Irawati dari FORUM. Alasannya, masalah politik adalah urusan masyarakat sipil.

Ada pula yang masih menginginkan agar dwifungsi ABRI masih menempel erat di tubuh ABRI. Bahkan, jika perlu peran sospol semakin ditingkatkan mutunya. "Sebagai kekuatan sospol, ABRI melalui fraksinya di lembaga legislatif dan jabatan politiknya di lembaga eksekutif hendaknya mendinamisasikan kebekuan yang disinyalir terjadi sekarang ini, dengan aturan permainan konstitusional," ujar almarhum mantan Pangkopkamtib Jenderal TNI (Purn.) Soemitro kepada FORUM, seminggu sebelum wafat.

ABRI tentunya agak sulit menerima keinginan sebagian masyarakat agar ABRI sama sekali pamit mundur dari gelanggang politik, termasuk dari parlemen. Maklumlah, pengalaman selama lima puluh tahun telah mengajarkan ABRI untuk senantiasa bisa bermain cantik dalam dua fungsi itu. Namun, tuntutan untuk mereformasi lima paket UU politik jelas bakal mengubah konstelasi dwifungsi ABRI.

Yang agak moderat berpendapat bahwa menempatkan wakil ABRI hanya di MPR adalah solusi yang paling tepat. Mereka duduk di situ sebagai wakil golongan dengan jumlah yang proporsional. "Tapi, selain mereka, lebih baik jadi tentara yang profesional, digaji besar sesuai dengan bobot kerjanya," ujar Eggi Sudjana.

Meski juga menginginkan pengurangan jumlah anggota dewan, Amien Rais masih setuju jika dwifungsi ABRI tidak perlu diotak-atik dahulu. Namun, ia menekankan bahwa antara fungsi hankam dan fungsi sospol harus berimbang. Ia tak ingin fungsi hankam dipinggirkan sementara fungsi sospol malah menjadi *mainstream* ABRI.

Namun, syukurlah, ABRI pun ternyata sudah mulai membuka diri perihal redefinisi dwifungsi ABRI. "Dwifungsi ABRI bukanlah tujuan. Yang menjadi tujuan adalah bagaimana supaya bangsa dan negara kita bisa semakin baik," ujar Ketua Fraksi ABRI DPR yang juga Mendagri, Letjen TNI Syarwan Hamid. Menurut dia, dwifungsi ABRI adalah subsistem untuk menunjang sistem. "Kalau sistem menghendaki, dalam rangka perubahan reformasi, subsistem ya harus siap untuk diperbaiki," ujarnya.

Menurut Amien Rais, perubahan yang bertahap lebih bagus daripada yang drastis. Soalnya, perubahan yang drastis pasti menguncangkan. Padahal, kalau sudah guncang, stabilitas jadi terganggu. Bagi dia, apa pun manuver ABRI, bukan soal. Yang penting, "Rakyat dihargai," ujarnya.

Hanibal W.Y. Wijayanta, Munawar Chalil, dan Victoria Sidjabat

FOKUS TAJUK
POLITIK

Dan Letjen Prabowo

Mayjen Johny Lumintang hanya semalam menduduki kursi Pangkostrad, menggantikan Letjen Prabowo Subianto. Ia diganti lagi oleh Mayjen Djamari Chaniago. Mengapa Prabowo 'digeser', dan siapa saja yang akan ikut dalam 'gerbong' itu?

TAK ada upacara, tak ada jabat tangan , tak ada tumpukan karangan bunga dari para petinggi, pengusaha dan kalangan selebriti. Jumat sore (22/5) sekitar pukul 17.30, suasana di seputar Markas Komando Pasukan Cadangan Strategis (Makostrad) di Jl. Medan Merdeka Barat terasa tegang. Sejumlah panser dan kendaraan berat, yang merupakan bagian dari persiapan pengamanan Peristiwa 20 Mei, tampak berjaga di sekitarnya. Tak seperti biasa, markas satuan baret hijau itu tertutup untuk pers. Fotografer *Tajuk* Adek L. Berry yang datang meliput sore itu, dipersilakan untuk kembali lain waktu. Penjagaan lebih ketat juga tampak di sekitar kompleks istana.

Saat itu, rupanya tengah berlangsung upacara serah terima tugas dari KSAD Jend. Subagyo HS (Akabri 70) kepada Mayjen Johny Lumintang (Akabri 70) yang diangkat sebagai Pangkostrad. Acara yang berlangsung sangat singkat itu, bahkan sejumlah petinggi yang hadir sempat meragukan tujuan upacara itu, agak di luar kelaziman. Biasanya, pergantian Pangkostrad dilakukan terbuka dan meriah. Maklum, inilah salah satu pos prestisius di lingkungan ABRI, yang biasanya mengantarkan pejabatnya mendaki posisi yang lebih tinggi. Sebelum menjadi Pangab (dan Menhankam), Jend. Wiranto, misalnya, pernah memimpin satuan ini.

Tak pelak lagi, pergantian yang terjadi hanya sehari setelah mundurnya mantan Presiden Soeharto, dan cuma beberapa jam setelah pengumuman formasi Kabinet Reformasi Pembangunan itu, menghenyakkan banyak kalangan. Apalagi, yang diganti adalah Letjen Prabowo Subianto (Akabri 74), menantu Soeharto dan putra ekonom senior Prof. Sumitro Djojohadikusumo - yang menjabat Pangkostrad sejak 20 Maret lalu. Sebelumnya, Prabowo adalah Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), dan berperan penting dalam "pemekaran" satuan baret merah itu. Dengan karier yang bisa dibilang melejit di dua satuan elite, serta latar belakang keluarga yang sangat mendukung, Prabowo kerap disebut-sebut sebagai pemimpin masa depan ABRI.

Selain Prabowo, turut diganti Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR (Akabri 70). Serah terima jabatan dari Muchdi kepada pejabat baru, Mayjen Syahrir MS (Akabri 71) – kini Pangdam IX/Udayana – berlangsung Senin (25/5). Muchdi, yang menggantikan Prabowo, juga baru menduduki kursi Danjen Kopassus itu kurang dari dua bulan.

Kabarnya, Prabowo yang pada Jumat itu masih sempat berkeliling memeriksa keamanan Jakarta dari udara (bersama Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoedin), baru diberitahu tentang pergantian itu siang hari selepas salat Jumat, oleh KSAD Jend. Subagyo. Sementara, konon, perintah pergantian itu juga diberikan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto kepada Subagyo cuma beberapa jam sebelumnya. Sumber-sumber *Tajuk* menyebutkan, Prabowo hanya bersedia menyerahkan tongkat komando dan lencananya kepada Subagyo, tanpa melakukan serah terima jabatan. Seterusnya, Prabowo ditugaskan menjadi Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI di Bandung, menggantikan Letjen Arie J. Kumaat yang akan ditugaskaryakan ke Departemen Kehutanan.

Tapi, kejutan tak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, Sabtu (23/5), pada

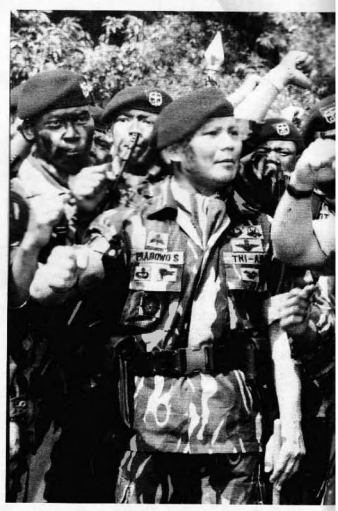

pukul 11.30, terjadi lagi serah terima jabatan Pangkostrad dari Mayjen Johny Lumintang kepada pejabat baru Mayjen Djamari Chaniago (Akabri 71). Djamari, Pangdam III/Siliwangi, datang mendadak dari Bandung, pagi itu juga. Tidak seperti sebelumnya, upacaranya berlangsung terbuka. Jadi, Johny Lumintang, Asisten Operasi Kepala Staf Umum (Asops Kasum) ABRI itu, praktis menjabat Pangkostrad hanya 17 jam. Menurut Pangab Wiranto, untuk sementara, mantan Pangdam VIII/Trikora itu akan tetap berada di posisinya.

Meski hari-hari belakangan ini kita sepegti hidup dalam *roller coaster* waktu, saking banyaknya kejutan dan perubahan yang terjadi, tak urung pergantian mendadak atas dua komandan satuan elite AD itu membetot perhatian: Apakah yang tengah terjadi di jajaran bhayangkari negeri ini?

Maklum. Di tengah situasi yang serba tak pasti seperti sekarang, berbagai selentingan muncul tanpa bisa dicegah. Mi-

Tajuk
28 Mei 1998

pun Diganti

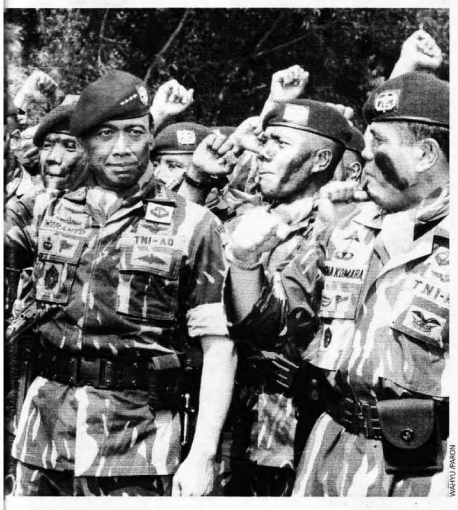

WAHYU PRAKOSO

PRABOWO DAN WIRANTO DI TENGAH PASUKAN KOPASSUS. Penugasan Prabowo untuk melengkapi wawasan jabatan.

salnya, ada sejumlah versi tentang pergantian yang terkesan "simpang siur" itu. Salah satunya menyebut, batalnya penunjukan Johny Lumintang, pria kelahiran Manado, akibat adanya "intervensi" dari kalangan dekat Presiden Habibie, yang merasa kurang *sreg* dengannya.

Sumber lain menyebut keputusan itu diambil Wiranto sendiri. Johny Lumintang, mantan Panglima Divisi I Kostrad itu, "dipasang" sementara untuk mengendalikan pasukan Kostrad yang pada Jumat malam itu "bertebaran" di Jakarta. Tapi, ada pula versi yang menunjuk adanya *bargaining* antara Wiranto dan Prabowo dalam soal posisi Pangkostrad itu. Djamari, mantan Panglima Divisi I Kostrad, dikenal dekat dengan Prabowo.

Ada pula kabar yang menyebut, pergantian ini tak berhenti sampai di sini. Selain Prabowo dan Muchdi, konon, akan turut diganti Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoedin (Akabri 74) dan Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI Letjen Fachrul Razie (Akabri 70). Disebut-sebut juga, rencana pergantian Kepala Badan Intelijen ABRI (Ka BIA) Mayjen Zaki Anwar Makarim (Akabri 70). Selentingan yang lebih "liar" bahkan menyebut, pergeseran itu akan merambat pula ke posisi KSAD. Disebut-sebut, Subagyo akan dipromosikan menjadi Wakil Pangab (Wapangab) - jabatan lama yang dihidupkan kembali - dan digantikan oleh Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (Akabri 73), yang kini Kassospol.

Sejumlah nama sempat diisukan sebagai pengganti Sjafrie. Yakni, Mayjen Ansyori Deas (Akabri 73), kini Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen Luhut Panjaitan (Akabri 72), Komandan Pusat Persenjataan Infantri AD dan Mayjen Syamsu D (AMN 65), kini Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom). Sementara pengganti Fachrul Razie, disebut-sebut adalah Johny Lumintang yang batal ke Pangkostrad itu. Namun belakangan beredar pula kabar, penggantian Sjafrie ditangguhkan atas saran sejumlah penasihat militer Presiden Habibie. Sjafrie, Pangdam Jaya termuda dan kawan akrab Prabowo, dikenal sebagai pati ABRI yang dekat dengan Pak Harto, Jend. Besar (purn.) A.H. Nasution dan mantan Menhankam/Pangab Jend. (purn.) M. Jusuf.

Lantas, apa alasan pergeseran besar-besaran (bila benar akan terjadi) tersebut? Serangkaian kabar yang beredar - Anda tentu boleh percaya, boleh pula tidak - mengaitkannya dengan kasus penculikan sejumlah aktivis dan bahkan penembakan di Universitas Trisakti yang memicu kerusuhan 14 Mei 1998. Koran prestisius *The Washington Post* – yang kondang karena berita-berita investigatifnya – misalnya, menyebut tentang keterlibatan satuan elite khusus Indonesia yang pernah mendapat latihan militer di Amerika dalam kasus penculikan itu. Kabarnya, itulah salah satu alasan pemerintah AS membekukan program E-IMET (*Expanded-International Military Education and Training Program*) ke Indonesia.

Namun, kalangan yang dekat dengan Prabowo tegas-tegas menampik tudingan itu. Kepada *Tajuk*, seorang pemuka agama yang dikenal dekat dengan kalangan itu, menceritakan bantahan mantan Danjen Kopassus Muchdi. "Dia bersumpah, tuduhan itu tidak benar. Karena atas nama apa pun, perbuatan semacam itu tak bisa dibenarkan," ujarnya, menirukan keterangan Muchdi. Muchdi, yang pernah menjadi aktivis Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) dikenal sebagai muslim yang taat.

Bantahan atas aneka versi itu juga datang dari Jend. Subagyo dan Jend. Wiranto. Pergantian Prabowo dan Muchdi, kata Wiranto di Istana Merdeka (23/5), sudah direncanakan sejak lama dan merupakan *tour of duty* biasa. Bagi Prabowo, penugasan staf kali ini adalah untuk melengkapi wawasan jabatan, karena selama ini ia lebih banyak menghabiskan waktunya di satuan tempur. Sementara pengangkatan Johny, yang cuma semalam itu, karena ia memang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana (*care taker*) untuk mengonsolidasikan pasukan Kostrad.

Sementara tentang selentingan akan adanya mutasi lanjutan, baik Pangab maupun KSAD menolak mengomentarinya. "Sampai saat ini belum ada rencana itu," ujar Wiranto. Mereka juga menampik isu tentang retak di tubuh ABRI. "ABRI tetap kompak dan bersatu. Wartawan jangan mudah terpancing isu," tegas KSAD Subagyo. Harapan kita semua, pun demikian adanya. Karena, jika ada retak di tubuh angkatan bersenjata, rakyat jualah yang akan menderita. ▲

Tatik S Hafidz, Eni Saeni

"Nyanyian Jiwa" ekspresi kebebasan. halaman 5

Kompetisi LI dihentikan. halaman 7

SELASA LEGI, 26 MEI 1998

Empat Jenderal Dampingi Desmon

Ditemukan Mayat Mahasiswa Tertembus 3 Peluru

Jakarta, Bernas

Kasus penculikan yang oleh Komnas HAM dinyatakan dilakukan kelompok terorganisir, mengalami perkembangan. Senin (25/5) kemarin, pada salah satu ruang di kantor YLBHI berlangsung pemeriksaan lagi oleh POM ABRI kepada Desmon J Mahesa, Direktur LBH Nusantara Jakarta, salah seorang korban penculikan.

Dalam pemeriksaan ini kemarin tampak Dan Puspom ABRI Mayjen D Syamsu dan tiga perwira tinggi yang menjadi anggota TPF ABRI. Keempat Mayjen tersebut adalah Danpuspom sendiri sebagai ketua tim, Kepala Babinkum ABRI Mayjen TNI Andi Nurghalib, Asintel Mabes ABRI Laksda Berty Eckel serta Kepala Kabidmas Polri Mayjen Pol Marwan

click the world with INDOSATnet
- Indonesia's premier Internet Provider -
Access: 520-001
Customer Service: 519-565

Paris.

Menurut Koordinator Badan Pekerja KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir, dengan diperiksanya Desmon kemarin, maka POM ABRI sudah memeriksa lima orang dari belasan yang dinyatakan hilang selama ini. Empat korban penculikan lain yang sudah diperiksa pihak POM ABRI yang sampai hari ini masih mendekam di Polda Metro Jaya ialah Andi Arief, Nezar Patria, Aan Rusdiyanto dan Mugiyanto. Dijelaskan pula, berdasarkan pengakuan pihak Polri sendiri, beberapa penyidik Polri juga sudah diperiksa POM ABRI.

"Prinsipnya pihak penyidik Polri mengaku bahwa bukan mereka yang melakukan penangkapan. Tapi menerima dari penculiknya, kemudian disetor kepada mereka," kata Munir.

Di tempat yang sama Munir juga menjelaskan hal yang masih memprihatinkan. Dikatakannya, di luar 7 aktivis yang tercatat pernah dilihat Desmon dkk di tempat penyekapan dan belum jelas keberadaannya. Sampai Senin kemarin, di seluruh Indonesia masih tercatat 56 aktivis mahasiswa lagi yang hilang.

KONTRAS juga menduga adanya mayat seorang mahasiswa Lampung yang meninggal, karena dijerat lehernya dan ditembak dahi dan dada-

Bersambung ke hal. 8 kol. 7

Bernas
24 Mei 1998

Empat Jenderal- - -

Sambungan dari hal. 1

nya.

Berikut pengakuan Desmon J Mahendra.

"Pertama-tama saya punya niat baik bantu ABRI selesaikan masalah ini. Ini direspon oleh Puspom. Mereka panggil saya ke POM. Saya jawab saya bukan pesakitan, bukan anggota ABRI yang harus datang ke POM. Niat baik saya ini direspon mereka dan mereka minta tempat netral. Tempat netral saya sampaikan, mereka bersedia di LBH ini.

"Penyidikan saya pada prinsipnya tak beda dengan *testimony* saya yang lalu. Tapi ada penekanan-penekanan, misalnya cerita orang yang ketemu saya Yani Afri dan Sonny. Mereka ditahan dengan tuduhan dalam kasus peledakan bom di kelapa gading 26 Mei tahun

Apa yang ditemukan dari pemeriksaan ini?

Untuk Desmon belum diperiksa, baru dimintai keterangannya. Karena ada hal yang khusus, butuh waktu lama. Saya meminta Desmon membuka dan memberikan keterangan yang sedetil-detilnya, supaya TPF dapat menindaklanjuti.

Siapa yang sudah diperiksa?

Yang sudah diperiksa Andi Arief. Pius belum sempat. Jadi baru dua orang yang beri keterangan secara langsung. Keterangan Pius kita anggap dari pihak ketiga, dari Komnas HAM.

Sudah ada kesimpulan awal?

Hari ini belum ada konklusi sementara. Tapi ini menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan pimpinan ABRI kepada tim

Mahendra. "Kepada [illegible] saya harapkan supaya [illegible] berilah keterangan [illegible] agar kami dapat segera [illegible] dak lanjuti," ujarnya.

Sementara itu [illegible] telah mengirim s[illegible] (25/5) kepada Har[illegible] yang juga salah [illegible] hilang, untuk dimi[illegible] rangan mengenai ka[illegible] hilang tersebut.

Mahasiswa

Dalam keterangan[illegible] saat mendampingi [illegible] seusai pemeriksaan, K[illegible] juga menjelaskan adan[illegible] muan tertutup antar[illegible] dengan Mabes ABRI [illegible] TRAS juga telah menyam[illegible] satu pas foto mayat y[illegible] mukan KONTRAS sete[illegible] haknya mendapat telep[illegible] pada tanggal 23 April

24 MEI 1998

Desmond J. Mahesa diperiksa Pusat Polisi Militer (POM) ABRI di kantor YLBHI, Jakarta Pusat. Dalam pemeriksaan itu, tampak Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal dan tiga perwira tinggi anggota Tim Pencari Fakta (TPF), yakni Kepala Banbikum ABRI Mayjen TNI Andi Nurghalib, Asintel Mabes ABRI Laksda Berty Eckel, serta kepala Kabidmas Polri Mayjen Pol Marwan Paris.

Dalam pemeriksaan POM ABRI ini, Desmond antara lain ditanyakan soal pertemuannya dengan Yani Afri dan Sonny yang ditahan dan diculik karena kasus peledakan bom di Kelapa Gading 26 Mei 1997 oleh Kodim Jakarta Utara. Juga, tentu saja kejadian selama ia diculik dan disiksa serta kronologi penangkapan. Juga soal, mengapa ia diculik yang dijawab Desmond terkait dengan kasus politik.

Dengan diperiksanya Desmond, total POM ABRI sudah memeriksa empat korban penculikan yang masih mendekam dalam tahanan Polda Metro Jaya: Andi Arief, Nezar Patria, Aan Rusdiyanto, dan Mugiyanto.

> **"Pihak penyidik polri mengaku bukan mereka yang melakukan penangkapan. Mereka menerima dari penculiknya, kemudian disetor kepada mereka."**
>
> | ***Munir**, Koordinator Badan Pekerja Kontras dalam Bernas ("Empat Jenderal Dampingi Desmond", 26 Mei 1998)*

25 MEI 1998

Danjen Kopassus Muchdi PR (Akabri 70). Ia digantikan oleh Mayjen Syahrir MS (Akabri 71). Muchdi sendiri yang menggantikan Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus pada 20 Maret 1998 baru memegang tongkat komando kurang lebih dua bulan.

Desmond J. Mahesa diperiksa oleh Polisi Militer di salah satu ruang kantor YLBHI, Jwakarta. Desmond adalah salah satu korban penculikan dan juga direktur LBH Nusantara. Polisi militer yang memeriksa Desmond, antara lain Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal yang didampingi tiga perwira tinggi yang menjadi anggota TPF ABRI. Yakni, Kepala Babinkum ABRI Mayjen TNI Andi Nurghalib, Asintel Mabes ABRI Laksda Berty Eckel, serta Kepala Kabid Mas Polri Mayjen Pol Marwan Paris.

> **"Desmond adalah korban penculikan kelima yang diperiksa POM ABRI dari belasan yang dinyatakan hilang. Empat korban penculikan lain yang diperiksa dan masih mendekam dalam tahanan Polda Metro Jaya adalah Andi Arief, Nezar Patria, Aan Rusdiyanto, dan Mugiyanto. Prinsipnya, pihak penyidik Polri mengaku bukan mereka yang melakukan penangkapan. Mereka hanya menerima dari penculiknya, kemudian disetor kepada mereka. Yang memprihatinkan, di luar 7 aktivis yang dilihat Desmond di tempat penyekapan, belum jelas keberadaannya. Ada 58 aktivis mahasiswa yang hilang di seluruh Indonesia."**
>
> | ***Munir**, Koordinator Badan Pekerja Kontras dalam Bernas ("Empat Jenderal Dampingi Desmond", 26 Mei 1998)*

30 MEI 1998

Berhentinya Prabowo dari jabatan Pangkostrad, secara politik, adalah upaya dari pihak ABRI untuk membersihkan intervensi ABRI dalam politik yang selama ini dianggap tidak arif. Mereka yang digeser dianggap ikut bertanggung jawab, langsung atau tak langsung, karena ada oknum bawahannya yang disangka terlibat masalah penculikan dan penembakan aktivis mahasiswa. Jadi, ABRI melakukan klarifikasi, tetapi tidak terbuka.

> **Barangkali ini adalah resultante dari kebijaksanaan ABRI untuk membersihkan tangannya dari apa yang selama ini dianggap sebagai keterlibatan terlalu dalam di politik.**

| ***Indria Samego**, peneliti LIPI, dalam D&R ("Pergantian yang Menghebohkan, 30 Mei 1998)*

D&R
30 Mei 1998

6 JUNI 1998

Dua terdakwa penembak mahasiswa Trisakti disidangkan di Mahkamah Militer II-08 Jakarta. Keduanya adalah Dan KI-II Yon B Resimen Satu Korps Brimob Lettu Pol. Agus Tri Heryanto, dan Dan Ton KI-II Letda Pol Pariyo.

Persidangan ini dipimpin Majelis Hakim Kolonel CHK Suji Suradi, Letkol CHH Payaman Pangaribuan, dan Letkol CHH Sarman Mulyono. Tampil sebagai Oditur Militer Kolonel CHK Sadji Purwono dan Kapten Bambang Ari Wibowo.

Keduanya didakwa salah menjalankan perintah sehingga pasukannya tak terkendali. Saat kejadian pada 12 Mei itu, Agus memerintahkan anak buahnya agar mendorong maju mahasiswa dan melempar gas air mata. Selain itu, memerintahkan Ton Tindak melakukan tembakan salvo dan mengejar mahasiswa. Padahal, Kapolres Jakarta Barat selaku pengendali wilayah bersama Dandim 0503/JB sudah mencegah. Tetapi, hal itu tak dihiraukan. Akibat tindakannya, korban tewas 4 orang, luka parah 12 orang, dan ringan 17 orang. Ia didakwa melanggar Pasal 103 ayat (1) dan ayat (3) ke-3 KUHPM (UU No. 39 Tahun 1947). Bunyinya: "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan".

17 JUNI 1998

Mahasiswa Fisipol UGM, Triyono, dinyatakan hilang. Ibu Triyono, Nyonya Nartin, membuat laporan ke Polres Sleman dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Triono dinyatakan hilang dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada 13--14 Mei 1998. Pihak LBH Yogyakarta yang diwakili Budi Hartono sudah melakukan investigasi di lapangan, sementara pihak kepolisian tidak menunjukkan sikap serius menangani kasus ini. Triyono diduga jadi korban penculikan dengan dibuktikan tanda bukti telegram yang diterima Ny. Nartin pada 2 Juni 1998. Telegram itu disebutkan dikirim rekan Triyono sesama mahasiswa Fisipol UGM. Namun, yang bersangkutan menampik pernah mengirim telegram. Telegram itu hanya rekayasa.

Pius Kembali, Triyono Hilang

Andi Arief dipanggil Puspom ABRI

Jakarta, Bernas

Sekjen Aliansi Demokratik Rakyat (Aldera) Pius Lustrilanang, salah seorang aktivis yang pernah diculik, dijadwalkan tiba di Jakarta, Minggu (19/7) siang, setelah beberapa bulan ini berada di luar negeri.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya mendesak Menhankam/Pangab membentuk tim pencari fakta (TPF) guna menangani kasus hilangnya para aktivis, termasuk mahasiswa Fisipol UGM, Triyono (23) yang 'lenyap' dalam aksi di Jakarta 13-14 Mei 1998.

Di lain pihak, Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief yang diculik beberapa waktu kemudian diserahkan kepada polisi, dan Selasa lalu dibebaskan, dipanggil oleh Puspom ABRI untuk memberi kesaksian.

Rencana Kedatangan Pius diungkapkan kuasa hukumnya yang tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) melalui Direktur Eksekutifnya, Hendardi, di Kantor PBHI Jakarta, Kamis (16/7) siang.

"Kami harapkan kedatangan Pius membuat pengungkapan masalah penculikan ini lebih transparan," kata Hendardi.

Sementara itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang bertindak sebagai kuasa hukum Andi Arief menjelaskan bahwa surat panggilan dari pihak Puspom ABRI bagi Andi Arief bertanggal 15 Juli itu meminta Andi untuk jadi saksi dalam kasus orang hilang pukul 09.00 Jumat pagi ini.

Selain panggilan itu, pihak Puspom ABRI juga menerbitkan surat keterangan bahwa Andi Arief sedang dalam pengawasan dan perlindungan Puspom ABRI untuk pengusutan kasus orang hilang.

Di Yogyakarta, Kepala Bidang Operasional LBH Yogyakarta, Budi Hartono SH, Kepada *Bernas* Kamis (16/7), menyatakan Triyono hilang dalam aksi di Jakarta 13-14 Mei 1998, dan kehilangan ini telah dilaporkan keluarganya pada 17 Juni 1998 ke Polres Sleman.

Bersamaan dengan itu laporan keluarga korban yaitu Ny

Bersambung ke hal. 8 kol. 1

Bernas
17 Juli 1998

25 JUNI 1998

Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dipindahtugaskan dari Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya menjadi Asisten Teritorial Kepala Staf umum (Aster Kasum) ABRI. Selanjutnya, tongkat komando Pangdam Jaya dipegang Mayjen TNI Djaja Suparman yang sebelumnya menempati pos Pangdam V/ Brawijaya (Jawa Timur dan Madura).

Di panggung besar pergantian kekuasaan pada Mei 1998, Sjafrie mendapatkan sorotan lampu luar biasa terang. Wajahnya kerap menghiasi layar kaca televisi nasional karena keamanan ibu kota Jakarta memang di bawah tanggung jawabnya. Dengan penampilan yang menarik, tak kurang ia menjadi idola baru.

Sjafrie yang memegang tongkat Pangdam Jaya sejak 15 September 1997 berasal dari keluarga militer. Ayahnya adalah Letkol TNI (Purn) Sjamsoeddin. Lelaki asal Makassar ini menjadi Pangdam Jaya saat berusia 46 tahun. Maklum saja, rata-rata jabatan Pangdam diduduki oleh mereka yang lulus Akabri pada 1970–1972. Sedangkan, ayah dua anak ini lulusan Akabri 1974. Sjafrie satu angkatan dan bersahabat dekat dengan Prabowo Subianto, bekas Danjen Kopassus, Pangkostrad.

Sebetulnya, jenderal yang gemar bermain piano dan menyukai lagu pop dan jazz ini cukup lama dibesarkan dalam korps Baret Merah, yaitu sejak 1975 hingga 1992. Di pasukan komando itu, berbagai jabatan pernah dipikulnya, mulai komandan peleton sampai Asisten Operasi Kopassus. Beragam operasi tempur sudah dilakoninya. Karirnya semakin bersinar tatkala ia ditunjuk menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden pada 1992.

Keberanian Sjafrie sebagai pengawal presiden teruji saat Presiden Soeharto berkunjung ke Bosnia-Herzegovina pada 1995. Selama kunjungan di negeri yang dilanda perang saudara itu, Sjafrie pasang badan, berjalan di depan melindungi Presiden Soeharto dari kemungkinan *sniper*.

ı : B 1907 **PRABOWO DAN SJAFRIE. Seharusnya TPF sudah bisa mengidentifikasi pelaku penculikan itu.** Bil besar

D&R
30 Mei 1998

Ketika Presiden Soeharto dan keluarga mengunjungi Dresden, Jerman, pada tahun yang sama, Sjafrie kembali ditantang ujian berat. ketika itu, seperti ramai diberitakan media massa, rombongan Presiden Soeharto dihadang sejumlah demonstran pada saat mengunjungi Museum Dresden. Bersama delapan anak buahnya, Sjafri berhasil menghalau demonstran.

Sekembalinya dari Jerman, kariernya menanjak. Saat Sutiyoso terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 1997, Sjafrie terpilih menduduki jabatan militer yang ditinggalkan: Pangdam Jaya. Kini, ia dimutasi ke Asisten teritorial (Aster) Kasum ABRI.

KOPASSUS TERLIBAT PENCULIKAN?

PERISTIWA
POLITIK

Ada indikasi, oknum Kopassus terlibat penculikan para aktivis. Bagaimana *modus operandi* dan apa motif yang melatarbelakanginya?

OKNUM ABRI terlibat penculikan dan penghilangan para aktivis. Dua bulan lalu, berita seperti ini akan menggegerkan publik. Tapi tidak di era reformasi ini. Karena sudah nyaris jadi pengetahuan – atau persisnya, desas desus – umum bahwa rangkaian kasus penculikan, penembakan Trisakti dan bahkan kerusuhan 13-14 Mei, 'didalangi' oknum ABRI.

Apalagi, pengakuan para korban penculikan yang didata tim Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), hampir seluruhnya menunjuk pada kemungkinan keterlibatan oknum-oknum militer. Indikasi itu diperoleh dari *modus operandi* penculikan, informasi yang diminta, sampai ke cara-cara penyiksaan di luar batas kemanusiaan yang dipakai untuk mengorek keterangan.

Namun pengakuan itu diucapkan sendiri oleh Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, Senin lalu (29/6). Tiga hari kemudian, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Hankam/-ABRI Mayjen Syamsul Maa'rif merincikannya. Ada sekitar 40 saksi yang sudah diperiksa Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI – di antaranya ada sejumlah oknum perwira ABRI.

Dengan demikian jelas sudah, ada 'tangan-tangan' militer di balik terjadinya dua dari tiga kasus besar yang memicu kejatuhan Orde Baru itu. Sebab, kasus penembakan mahasiswa Trisakti saat ini tengah disidangkan, dengan sejumlah terdakwa yang seluruhnya berasal dari ABRI. Kini, publik menanti, akankah 'pengakuan' serupa muncul dalam kaitan kerusuhan 13-14 Mei yang meminta ratusan korban jiwa itu. Mei lalu, ketika menerima jajaran pimpinan ABRI, Presiden BJ Habibie sudah menginstruksikan agar Wiranto mengusut adanya kelompok terorganisir yang diduga menyulut aksi keji itu. Habibie juga meminta masyarakat bersabar, karena pengusutan ketiga kasus itu ' terkait dengan proses konsolidasi internal di ABRI'.

Hanya saja, baik Wiranto maupun ketua TPF yang juga komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI Mayjen Samsu Djalal, tak merincikan nama, pangkat dan asal kesatuan para oknum tersangka pelaku penculikan itu. Namun, spekulasi sudah *kadung* marak , yang mengaitkan mutasi sejumlah jenderal Angkatan Darat (lihat : *Lain Benny, Lain Prabowo*), dengan asal kesatuan para tersangka pelaku itu. Dua jenderal yang pertama-tama diganti sehari setelah Soeharto *lengser* pada 21 Mei lalu adalah Letjen Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi PR. Prabowo adalah Pangkostrad, sedang Muchdi adalah Danjen Kopassus.

Tapi benarkah oknum Kopassus terlibat aksi penculikan itu? Keterangan sejumlah korban penculikan yang dihimpun Kontras, indikasi ke arah itu memang ada. Kesaksian Andi Arief, ketua umum SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi), misalnya. Anak muda lulusan Fakultas Filsafat UGM itu, diciduk saat menjaga ruko milik kakaknya di Bandarlampung, pada tanggal 28 Maret sekitar pukul 10.30. Sepanjang perjalanan melintas laut dari Bakauheni sampai Merak, para penculiknya saling bercerita bahwa mereka baru saja kembali dari tugas di Tim-Tim dan bahwa sang komandan baru saja pulang dari Inggris.

Keterangan serupa, juga datang dari Pius Lustrilanang, aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) dan Desmond J Mahesa, direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) - yang diculik sebelumnya. Semasa di tahanan, mereka mendapat kesan bahwa para penculik itu 'terdidik'. Ada di antaranya, yang juga bercerita baru kembali dari Inggris.

Mengapa Inggris? Pada tahun 1996 silam, semasa masih menjadi Danjen Kopassus, Prabowo memprakarsai kerjasama antara satuan elite baret merah itu dengan University of Hull, di kawasan utara Inggris. Dalam proyek yang didanai bantuan militer Inggris itu, para perwira Kopassus mengikuti program pendidikan setara S-2 di Pusat Kajian Indonesia di universitas yang meluluskan Amalia Yani (puteri alm. Jend. Ahmad Yani) itu. Data di Kementerian Luar Negeri Inggris menunjukkan, dari 10 orang perwira yang dikirim pada tahun 1997 lalu, 7 orang di antaranya berasal

PRABOWO DAN PASUKAN KOPASSUS. Sumber intelijen AS melaporkan adanya keterlibatan satuan elite AD yang pernah dilatih di AS.

KOPASSUS TER

DEMO ANTI PENCULIKAN. Kemungkinan keterlibatan oknum-oknum militer akhirnya diakui sendiri oleh pimpinan ABRI.

Tajuk
9 Juli 1998

LIBAT PENCULIKAN?

dari Kopassus.

Prabowo, memang diketahui punya hubungan dekat dengan elite militer di negeri Ratu Elizabeth itu. Masih semasa ia mengomandani Kopassus, kabarnya, suami Titik Soeharto itu berniat membeli sejumlah tank tempur dari Inggris via Yordania (awal Mei lalu ia diketahui berkunjung ke Yordania). Konon, rencana itu dilakukan tanpa sepengetahuan Wiranto, yang ketika itu menjadi KSAD, namun disetujui oleh Pangab (waktu itu) Feisal Tanjung. Tak jelas, apakah rencana itu diteruskan setelah Prabowo dipromosikan ke Pangkostrad.

Sinyalemen serupa, juga dilontarkan berbagai media di luar negeri. Harian *The Washington Post* yang mengutip sumber-sumber intelijen militer AS, misalnya, melaporkan adanya keterlibatan satuan elite Angkatan Darat Indonesia yang pernah dilatih di Amerika Serikat. Sejumlah perwira Kopassus – termasuk Prabowo – memang pernah mendapat latihan militer di satuan khusus *green berets* yang terkenal itu.

Bahkan, kabarnya, pihak TPF sejatinya juga sudah mengendus kemungkinan itu. Sumber *Tajuk*, misalnya, menceritakan sejumlah kecerobohan pelaku operasi itu, yang akhirnya menerbitkan kecurigaan aparat keamanan lainnya. Misalnya, pada kasus penculikan Andi Arief. Anak muda itu dibawa dengan mata tertutup, di sebuah mobil menuju terminal penyeberangan Bakauheni.

Nah ketika sampai di feri, si komandan operasi, kabarnya, memaksa petugas kapal agar mobil itu diparkir paling depan agar sesampai di Pelabuhan Merak, bisa keluar paling dahulu. Sempat terjadi adu mulut, sampai-sampai si petugas kapal mendatangkan aparat polisi militer setempat. Sumber-sumber lainnya, bahkan lebih spesifik lagi. Unit Kopassus yang terlibat adalah Grup 4 (Sandi Yudha) yang dikenal juga dengan sebutan Grup Mawar. Dua orang perwira menengah dari grup ini, konon, termasuk mereka yang kini diperiksa TPF itu. Kopassus yang dimekarkan semasa kepemimpinan Prabowo, memiliki 5 grup. Grup I , II dan III bermarkas masing-masing di Serang, Ja-Bar , Surakarta, Ja-Teng dan Batujajar, Ja-Bar. Sedang Grup IV dan V (dikenal sebagai Grup Anti Teror) bermarkas di Cijantung, Jakarta.

Meski begitu, tak tertutup kemungkinan bahwa ada satuan-satuan lain yang turut serta dalam operasi itu. Kesaksian Nezar Patria, Mugiyanto dan Aan Rusdianto – ketiganya aktivis SMID – yang diculik di rumah susun

Tajuk NO. 10, TH. I, 8 JULI 1998

Lalu ada pula nama Mayjen TNI Kivlan Zen dilepas dari Kepala Staf Kostrad. Ia menjadi Perwira Tinggi (Pati) Markas besar Angkatan Darat. Posisi Kepala Staf Kostrad ditempati Mayjen Ryamizard Ryacudu.

Siapa Kivlan Zen? Ia disebut-sebut dekat dengan Prabowo Subianto. Dalam soal karir kemiliteran, jalan hidup Kivlan tersendat-sendat. Bayangkan saja, pada 1981 ia sudah berpangkat mayor, tetapi pangkat itu akrab bersamanya selama enam tahun. Bahkan, pangkat letkol tujuh tahun nempel di pundaknya. Ia sudah menjadi letkol ketika bertugas di Timor Timur dan baru pada 1994 ia naik menjadi kolonel.

Namun, sesudah itu, karier lulusan Seskoad pada 1990 ini mulai lempang. Hanya dalam tempo 18 bulan, pangkatnya naik menjadi brigadir jenderal. Lulusan Akademi Militer pada 1971 ini adalah putra Minangkabau yang tamat SMA pada 1965. Sampai usianya 49 tahun, Kivlan sudah memangku 20 jabatan berbeda–dan sebagian besar pada posisi komando tempur.

Kivlan menyandang jabatan Kepala Staf Divisi I Kostrad pada 1995. Lalu, berlanjut menjadi Panglima Divisi Infanteri II di Jawa Timur. Dari situ, Kivlan ditarik sebagai Kepala Staf Kostrad di Jakarta. Salah satu reputasi Kivlan adalah ketika bertugas sebagai Komandan Kontingen Garuda XVII-2 Filipina Selatan, 20 September 1995 hingga 2 September 1996. Saat itu, bersama 32 anak buahnya, Kivlan menerima penghargaan "The Presidential Citation Badge" dari pemerintah Filipina.

26 JUNI 1998

Leonardus Nugroho Iskandar atau biasa dipanggil Gilang ditemukan tak bernyawa. Jenazahnya teronggok di semak-semak seputar obyek wisata Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Mayat anggota Serikat Pengamen Indonesia (SPI) Wilayah Surakarta itu kemudian dibawa ke Markas Kepolisian Resor Magetan. Dengan wajah cemas, Al Fatah, sang ayah, berkata, "Itu mayat anak saya." Sejak kepergiannya pada 22 Mei, Gilang sama sekali tak mengirimkan kabar. Hari itu ia pamit ke Madiun, diajak "orang penting" yang akan memberinya

NASIONAL

■ PENCULIKAN

Kisah Gilang dan Djati

Setelah hilang selama sepekan lebih, aktivis demonstrasi Solo ditemukan meninggal.

LEONARDUS Nugroho Iskandar, 24 tahun, biasa dipanggil Gilang, ditemukan tak bernyawa, Rabu pekan lalu. Jenazahnya teronggok di semak-semak seputar objek wisata Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Mayat anggota Serikat Pengamen Indonesia Wilayah Surakarta itu kemudian dibawa ke Markas Kepolisian Resor Magetan.

"Itu mayat anak saya," kata Al Fatah, 52 tahun, sang ayah, dengan sendu. Fatah, penduduk Jebres, Solo, Jawa Tengah, memang mencemaskan nasib anaknya. Sejak kepergiannya pada 22 Mei lalu, Gilang sama sekali tak mengirimkan kabar. Hari itu ia pamit pergi ke Madiun, diajak "orang penting" yang akan memberinya pekerjaan. Karena tak ada kabar, sepekan kemudian Fatah melaporkan perihal anaknya itu ke Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta. Dewan inilah yang kemudian melapor kepada polisi. Gilang ditemukan tak bernyawa, empat hari kemudian.

Menurut visum Rumah Sakit Magetan, di jenazah pemuda itu ada luka tembus pada ruang iga nomor lima. Di rongga jantungnya ditemukan pendarahan satu liter. Tepi kanan paru-paru kirinya robek sepanjang tiga sentimeter. Di bilik jantung kirinya terdapat luka iris tiga sentimeter. Visum itu menyimpulkan, luka pada dada kiri yang menembus paru-paru dan jantung itu yang mematikan. Diduga, cedera itu akibat sodokan benda tumpul.

Masih belum jelas, siapa oknum sadistis yang tega menganiaya Gilang. Johny Simanjuntak, SH, pengacara Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta, mengatakan bahwa polisi tengah mengusut perkara misterius ini. "Kami juga membentuk tim investigasi," katanya. Johny juga menegaskan, pihaknya tak mau buru-buru menuding siapa yang dinilai bertanggung jawab atas meninggalnya Gilang. Polisi Surakarta yang dihubungi GATRA juga menjawab, pihaknya tengah serius mengusut liku-liku meninggalnya pengamen itu.

Johny menduga, nasib nahas Gilang ada kaitannya dengan unjuk rasa yang dilakukannya. Meski bukan mahasiswa, pemuda tampan yang suka memakai celana robek dan kaus kutung itu ikut demo yang digelar para mahasiswa Surakarta. Ia malah ditunjuk menjadi anggota keamanan. Sehari sebelum kepergiannya ke Madiun, menurut penuturan Hida, wanita teman dekatnya, Gilang ikut berjalan jauh dari kampus Universitas Negeri Sebelas Maret menuju Balai Kota Surakarta.

Pemuda bertato di leher itu, sebagai anggota keamanan, menjinjing *handy talky* dan megafon. Demo itu cepat rampung karena hari itu Pak Harto mengumumkan dirinya berhenti dari jabatan presiden. Sehari setelah demo itulah ia pergi, memakai celana jins hitam dan kaus abu-abu. "Ia menunjukkan pada saya tiga lembar Rp 10.000, yang katanya pemberian bosnya, si orang penting itu," kata Hida. Gilang ternyata tak mendapat pekerjaan. Ia justru memperoleh kematian.

Dibandingkan dengan Gilang, Rahardjo Walujo Djati lebih beruntung. Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, angkatan 1989/1990 itu, setelah "hilang" dari 12 Maret hingga 25 April, tiba-tiba nongol tak kurang suatu apa. Pemuda yang suka puisi dan lagu-lagu romantis itu membeberkan kisah penculikan terhadap dirinya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Djati mengaku, dirinya diikuti seseorang sejak 10 Maret, seusai mengikuti konferensi pers tentang Komisi Penyelamat Kedaulatan Rakyat Komite Nasional Penegak Demokrasi (KNPD) di Kantor YLBHI Jakarta. Hari itu, ia bisa lolos karena sengaja menghindar. Sehari kemudian ia datang lagi ke Kantor YLBHI untuk merancang aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR. Keluar dari gedung itu, ia melihat seorang laki-laki gondrong berperawakan tegap mengawasinya. Djati bisa menghindar. Nasib apes ia temui hari berikutnya, 12 Maret.

Hari itu, ia mengikuti konferensi pers KNPD mengenai penolakan terhadap pertanggungjawaban Presiden Soeharto di YLBHI. Pukul 14.00, seusai konferensi pers, ia keluar bersama Faisal Reza untuk makan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sekitar 500 meter dari Kantor YLBHI. Ternyata, mereka berdua dikuntit.

Mereka mencoba lari, tapi ternyata masuk gang buntu. Waktu lari ke arah sebaliknya, Faisal tertangkap. Ia diringkus setelah dipukul di ulu hatinya. Sedangkan Djati bersembunyi di WC untuk menghindar. Namun, pintu kakus itu kemudian dijebol. Pria berkacamata minus itu lalu dipukul di bagian ulu hatinya, kemudian dimasukkan ke mobil. Sama dengan cerita Pius Lustrilanang dan Desmond Junaidi Mahisa, mata mereka ditutup, lalu dibawa ke sebuah tempat entah di mana.

Di tempat itulah Djati diinterogasi, ditanyai tentang kaitannya dengan Jenderal Benny Moerdani (mantan Panglima ABRI), Ketua PDI hasil Munas Megawati, hingga pengusaha Sofjan Wanandi. Ia mengaku sesekali dipaksa tidur tengkurap tanpa baju selama 10 menit di atas balok es. Di tempat penyekapan itu Djati mengaku bertemu dengan, antara lain, Andi Arief, Harjanto Taslam, Pius Lustrilanang, Yani Afri (belum ditemukan), Desmond Junaidi Mahisa, dan Dedi Hamdun (suami Eva Arnaz, juga belum ditemukan).

Lantas, siapa yang menculik Djati dan kawan-kawannya itu? Inilah pertanyaan penting yang belum bisa terjawab. Menurut sumber GATRA di Pusat Polisi Militer ABRI, penculikan itu kabarnya dilakukan satuan organisasi yang rapi.

Iwan Gadar Hinawan, A. Latief Siregar, dan Kastoyo Ramelan (Solo)

RAHARDJO WALUJO DJATI DI LBH, Diajak orang penting.

FATAH AGUS BSY

34 GATRA, 13 JUNI 1998

Gatra
13 Juni 1998

Menurut visum RS Magetan, di tubuh pemuda itu ada luka tembus pada ruang iga nomor lima. Di rongga jantungnya ditemukan pendarahan satu liter. Tepi kanan paru-paru kirinya robek sepanjang tiga sentimeter.

pekerjaan. Karena tak ada kabar, sepekan kemudian Fatah melaporkan perihal anaknya itu ke Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta. Dewan inilah yang kemudian melapor kepada polisi. Gilang ditemukan tak bernyawa empat hari kemudian.

Menurut visum RS Magetan, di tubuh pemuda itu ada luka tembus pada ruang iga nomor lima. Di rongga jantungnya ditemukan pendarahan satu liter. Tepi kanan paru-paru kirinya robek sepanjang tiga sentimeter. Visum itu menyimpulkan, luka pada dada kiri yang menembus paru-paru dan jantung itu mematikan. Diduga, cedera itu akibat sodokan benda tumpul.

Meski bukan mahasiswa, pemuda tampan yang suka memakai celana robek dan kaos kutung itu ikut demo yang digelar para mahasiswa Surakarta. Sehari sebelum kepergiannya ke Madiun, Gilang ikut berjalan jauh dari kampus Universitas Negeri Sebelas Maret menuju Balai Kota Surakarta. Gilang bertindak sebagai anggota keamanan dengan menjinjing *handy talky* dan megafon. Sehari setelah demo itulah ia pergi, memakai celana jins hitam dan kaus abu-abu. Kepada temannya, Gilang menunjukkan tiga lembar uang 10 ribu rupiah yang menurutnya pemberian "bos" si orang penting.

Ternyata, Gilang tak pernah mendapat pekerjaan. Ia justru memperoleh kematian.

Sekarang tentang korban lain dalam penculikan: Faisol Reza. Faisol memberikan kesaksian di YLBHI, Jakarta, di tempat yang tak jauh ketika ia diculik paksa pada 12 Maret 1998.

"Para penculik mengancam saya kalau memberikan keterangan pers atau mencoba membohongi mereka. begitu saya bohongi mereka, begitu saya memberikan keterangan pers, mereka mengatakan detik itu juga akan mereka selesaikan tugas mereka.

"Saya diberitahu bahwa saya tak akan lolos. Kalau tidak sehari dua hari, seminggu dua minggu, setahun saya tak akan bisa lolos. Mereka bilang pasti ada, saat lengah. Pada saat itu akan kami selesaikan tugas kami. Kecuali sabar,

00,00 NO 216 TAHUN KE-52

Penculik Tanyakan Koalisi Amien-Mega-Gus Dur

* Satu Lagi Korban Penculikan Bersaksi

Jakarta, Bernas

Lagi seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penculikan bersaksi atas peristiwa yang dialaminya. Faisol Reza (25) mahasiswa Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta yang hilang sejak 12 Maret 1998 dan dilaporkan telah kembali pada 26 April, Jumat (26/6) sore kemarin memberikan kesaksiannya di kantor YLBHI, Jakarta.

Reza yang hilang setelah menghadiri konferensi pers KNPD di YLBHI, mengaku diculik oleh 6 orang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di tengah perjalanan sekeluar dari YLBHI untuk menuju ke Jalan Salemba. Saat itu dia bersama rekannya Raharjo Waluyo Jati. Sejak diculik sampai menjelang pulangnya dia mengaku disiksa habis-habisan.

Dia tidak hanya sekadar dimaki-maki dengan kata-kata kasar lalu ditampar, dipukul atau ditendang. Lebih dari itu dia mendapatkan siksaan dengan cara kaki ditindih kaki meja yang diduduki penculik, atau dicabuti bulu kakinya.

Hal yang sangat menyiksa, menurutnya, ketika terus-menerus disetrom dengan sengatan listrik yang rasanya sampai menembus tulang dan pembuluh darahnya. Bagian yang distroom tidak hanya bagian badan tetapi juga alat vitalnya.

Reza juga sempat ditelanjangi dan dititurkan di atas balok es dan disiram es selama sepuluh menit sambil diinterogasi.

Reza yang sempat beberapa kali terisak mengaku tidak diijinkan melakukan sholat ketika izin untuk menjalankannya.

Selama disekap itu juga dia sempat ditanyai tentang keterlibatan mantan Pangab LB Moerdani, pengusaha Sofyan Wanandi dan mantan menteri YB Sumarlin dalam hubungannya dengan PRD. Reza juga sempat ditanyai soal penggalangan oposisi yang dilakukan oleh Amien Rais, Megawati Soekarnoputri dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur).

Berikut penjelasan Reza kepada para wartawan, dengan gaya bertutur seperti aslinya.

Saya diculik bersama Waluyo Jati setelah menghadiri konferensi pers KNPD. Sesuai konferensi pers itu saya meninggalkan LBH menuju ke arah (Jalan) Salemba. Saat itu saya merasa diikuti sebuah mobil Jimny.

Lalu saya menghindari dengan cara masuk ke RSCM. Naik ke lantai 2, tetapi kemudian mereka yang jumlahnya 6 orang itu mendapatkan saya. Saya ditangkap lalu diseret dan dipukuli. Kacamata saya jatuh dan pecah. Sesudah itu saya diseret dan dibawa ke mobil Jimny berwarna biru metalik.

Tiga puluh menit kemudian mobil berhenti di sebuah bangunan. Di tempat ini saya diskisa dengan cara dipukul, ditendang, dimaki-maki dengan kata-kata binatang seperti anjing dan kata-kata lain seperti bajingan.

Kemudian beberapa interogator masuk. Tangan kiri saya tetap diborgol dan diikat pada kaki kursi demikian juga tangan kanan saya. Pundak saya dipegangi beberapa orang. Kemudian saya tahu, cara itu untuk meredam saya kalau berontak saat distrom.

Setelah itu mereka menanyai saya mengapa saya diambil. Saya menjawab: "Mungkin karena saya menentang Soeharto karena Soeharto anti demokrasi." Lalu saya ditanyai tentang aktivitas saya di PRD.

Waktu menjawab pertanyaan itu, kalau jawaban saya tidak memuaskan mereka, pasti mereka akan menyiksa saya. Dalam posisi seperti itu beberapa orang di belakang saya bertugas memegangi saya, sehingga kalau saya distrom badan saya tidak bisa berontak.

Tetapi saya tetap berontak kalau saya tidak kuat menahan

Bersambung ke hal. 7 kol

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
Penerimaan Mahasiswa Baru
FAKULTAS TEKNIK (S1)
FAKULTAS EKONOMI (S1)
FAKULTAS BIOLOGI (S1)
FAKULTAS FILOLOGI (S1)
GELOMBANG PENDAFTARAN
- Gelombang 1: 01 Mei - 20 Juni
- Gelombang 2: 21 Juni - 31 Juli
- Gelombang 3: 01-28 Agustus
Pendaftaran On-Line:
http://www.ukdw.ac.id

Tommy "Emoh" Mundur dari MPR

Bernas
27 Juni 1998

mereka juga bilang sangat profesional. Mereka mengaku punya 100 orang yang tahu wajah saya, tetapi saya enggak tahu."

> **"Mereka bilang, saya bisa meminta bantuan pangab. Mereka bilang tidak bisa dicegah oleh kekuatan apa pun. Atau munir yang kamu andalkan? Dia punya istri dan dia juga bekerja sehingga tidak bisa melindungi kamu setiap saat."**

*| **Faisol Reza**, aktivis, korban penculikan, kepada Bernas ("Penculik Tanyakan Koalisi Amien Mega Gus Dur", 27 Juni 1998)*

Sejak komisi ini didirikan, kami menerima laporan adanya 23 orang yang hilang dan menemukan paket model penculikan. Tercatat 9 orang telah diketahui

keberadaannya, sedangkan 16 lainnya belum diketahui nasibnya.

Perlu diketahui, angka yang sampai hari ini diketahui tidak justru menurun, malah naik. itu yang menjadi fakta. Sementara itu, dari 23 laporan orang hilang itu setelah diamati pola penghilangannya terdapat tiga paket yang terjadi.

Paket I: paket pengamanan pemilu yang jumlahnya 6 orang.

Paket II: paket pengamanan SU MPR dengan jumlah 11 orang.

Paket III: paket untuk menghindari jatuhnya Soeharto, 6 orang.

Pola penghilangan ini menunjukkan adanya formasi sistematis berkaitan dengan upaya pengamanan agenda politik nasional seperti pemilu, Sidang Umum MPR, dan tuntutan pengunduran diri Soeharto. Karena itu, kasus penculikan ini haruslah dilihat secara tidak terpisah dalam kerangka sistem politik yang tidak memberikan ruang peran politik rakyat yang dibangun sepanjang Orde Baru.

Atas fakta-fakta yang ditemukan, pihak yang terlibat dalam kasus penculikan sudah jelas. Antara lain, pada tingkat tertentu Koramil di Duren Sawit, pada tingkat tertentu Kodim Jakarta Timur, dan secara lebih luas Kodam Jaya, yang kemudian beberapa polisi militer yang sempat mengawal para korban penculikan. Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Selain, ada institusi lain yang memiliki otoritas cukup bebas dan luas untuk melakukan operasi penculikan lintas wilayah yang kapasitasnya di atas Kodam. Dalam kasus penculikan ini, tingkat keterlibatan masing-masing institusi berbeda-beda karena tergantung kasus dan prosesnya.

Kami menilai pernyataan Presiden B.J. Habibie yang menegaskan bahwa untuk mengungkapkan kasus orang hilang ini masyarakat diharap menunggu selesainya konsolidasi intern ABRI.

Kami menilai bahwa kasus penculikan dengan masalah konsolidasi ABRI tidak ada relevansinya. Sangat tidak

proporsional jika persoalan orang hilang dikaitkan dengan konsolidasi intern ABRI. Karena itu, bagi kami, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda-nunda waktu untuk pengungkapan kasus ini.

> **"Kontras justru mengkhawatirkan keterlambatan penanganan dan pengungkapan atas kasus ini justru memberikan kesempatan bagi yang terlibat untuk menghilangka alat-alat bukti seperti gedung, polisi tidur dan sejumlah alat bukti lain. Kontras mengaku sudah mendengar bahwa polisi tidur itu ada yang mulai diratakan."**
>
> | ***Munir,*** *Koordinator Kontras, dalam berita Bernas ("Penculik Tanyakan Koalisi Amien-Mega-Gus Dur", 27 Juni 1998)*

Tajuk
9 Juli 1998

Buang Sial ..... hal 4

pat ibadah suatu agama dan bangunan lain milik yayasan suatu agama, NU Purworejo menyatakan tidak tahu-menahu. Pada butir ke-5 dise-

an terhadap sejumlah bangunan kompiek gereja, pastoran dan bangunan kompiek SMP Bruderan.

* Bersambung hal 5 kol 1

KASUS PENCULIKAN DAN ORANG HILANG

40 Oknum ABRI Diperiksa Intensif

SURABAYA (KR) - Sampai saat ini Puspom ABRI telah memeriksa 40 oknum ABRI yang diduga terlibat kasus penculikan dan hilangnya sejumlah aktivis. Hal itu diungkapkan Kapuspen ABRI, Mayjen TNI Syamsul Ma'arif, di sela-sela acara serah terima jabatan (Sertijab) KSAL dari Laksamana Arief Kushariadi kepada Laksamana Madya Widodo AS, di Dermaga Ujung Armatim, Surabaya, Kamis (2/7).

"Saat ini Puspom ABRI telah memeriksa dan mengusut 40 oknum ABRI terkait dengan kasus tersebut. Mereka juga sudah teridentifikasi satuan pasukannya. Tapi, identitifikasi satuan mana yang terlihat, belum saatnya diumumkan sekarang," kata Syamsul.

Acara serah terima KSAL yang dipimpin langsung oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto itu, dihadiri pula KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, para perwira tinggi ABRI, Gubernur Jatim dan para pejabat Muspida.

Kapuspen juga menjelaskan tentang pengusutan secara intensif. ABRI akan selalu memperhatikan seluruh masukan dari Komnas HAM dan Kontras (Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan). "Semua masukan dari sana (Komnas HAM, Kontras, dan lainnya) akan kami perhatikan," tegas mantan Kasdam V Brawijaya ini.

Kapuspen mengatakan, kemungkinan penanganan kasus penculikan para aktivis dan orang hilang bisa berkembang lagi. Maksudnya, saat ini tim pencari fakta terus bekerja. "Untuk itu, ABRI memberikan kesempatan kepada tim pencari fakta untuk mengembangkan pengusutan di lapangan," ujarnya.

Ditanya tentang motif dari kasus penculikan dan orang hilang, Syamsul menandaskan pengungkapan motif di balik kasus tersebut merupakan bagian pemeriksaan

* Bersambung hal 5 kol 3

2 JULI 1998

"Puspom ABRI telah memeriksa dan mengusut 40 oknum anggota ABRI terkait kasus penculikan dan hilangnya sejumlah aktivis. Oknum-oknum itu juga sudah teridentifikasi satuan pasukannya. ABRI selalu memperhatikan seluruh masukan dari Komnas HAM dan KontraS. Tim pencari fakta terus bekerja."

| ***Mayjen TNI Syamsul Ma'arif****, Kapuspen ABRI, dalam berita Kedaulatan Rakyat ("40 Oknum ABRI Dipriksa Intensif", 3 Juli 1998)*

◀ Kedaulatan Rakyat
3 Juli 1998

5 JULI 1998

Liberty
11-20 Agustus 1998

"Soeharto jelas ikut bertanggung jawab. Pemeriksaan atas mantan presiden ini sangat logis. Sebab, hierarki komando militer, tidak ada seorang perwira bahkan seorang jenderal berbintang tiga sekalipun yang bertindak sendiri, atasannya pasti mengetahui. Maka Prabowo jangan sembunyikan fakta secuil pun. Saya mendengar akan ada jenderal berbintang tiga, empat, atau lima yang harus diseret juga. Sebaiknya, Prabowo berbicara jujur. Jangan ada fakta yang dipotong-potong."

| ***Dr. M. Amien Rais**, Ketua Muhammadiyah, dalam Liberty ("Mungkinkah Prabowo 'Gigit' Pak Hartpo, 11-20 Agustus 1998)*

Dr H Amien Rais bahkan menyebut Soeharto berada di balik layar penculikan aktivis. Dia menyarankan mantan presiden itu diperiksa. Alasannya, tidak ada tindakan bintang tiga yang tak diketahui oleh bintang yang lebih tinggi. "Soeharto jelas ikut bertanggung jawab," tegasnya.

"Pemeriksaan terhadap mantan presiden itu sangat logis. Sebab, hirarki komando militer, tidak ada seorang perwira bahkan seorang jenderal berbintang tiga sekali pun yang bertindak sendiri, atasanya pasti mengetahui," kata Amien, lantang.

"Maka Prabowo jangan sembunyikan fakta secuil pun. Saya mendengar akan ada jenderal berbintang tiga, empat atau lima yang harus diseret juga," tambahnya.

Mungkinkah Prabowo 'Gigit' Pak Harto

Penculikan sejumlah aktivis semasa rezim Orde Baru, diduga kuat sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedudukan Soeharto sebagai Presiden RI. Jadi, beranikah Letjen Prabowo Subianto 'menggigit' mertuanya itu?

PRABOWO SUBIANTO: Maju ke mahkamah militer?

Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai Kasad Jenderal Subagyo HS telah menyeret 3 perwira: Letjen Prabowo Subiakto (Mantan Danjen Kopassus), Mayjen Muhdi PR (Mantan Pangdam VI/Tanjung Pura) dan Kolonel Inf Chairawan (Mantan Detasemen 81 Kopassus, anti teroris).

Selaku ketua DKP, Subagyo telah menonaktifkan ketiga perwira tersebut dari jabatannya. Langkah ini, tentu saja mengunci ketiganya sebagai 'tersangka' dalam kasus orang hilang, meskipun dalam keterangannya Subagyo menampik isyarat itu. "DKP hanya

Liberty
11-20 Agustus 1998

SOEHARTO & HABIBIE: Berteman baik?

memeriksa saja. Selanjutnya, DKP akan bersidang dan hasilnya akan disampaikan ke Pangab. Jadi, panglima ABRI kapasitasnya sebagai perwira penyelidik yang akan menentukan, apakah ketiga perwira itu diajukan ke Mahmil atau tidak," jelas Subagyo.

Seperti diungkapkan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, kewenangan DKP itu hanya sebatas administratif. Ungkapan Pangab memang didukung data 'sejarah' ketika DKM (Dewan Kehormatan Militer) dibentuk untuk tragedi pembantaian masal di Santa Cruz, Timor Timur pada 1991. Hasil kerja DKM waktu itu, antara lain pencopotan beberapa perwira ABRI seperti Mayjen Sintong Pandjaitan dkk.

Apakah pembentukan DKP ini atas saran IMF berkaitan kucuran bantuannya kepada pemerintah?

Memang tak ada jawaban resmi dari pemerintah. Namun, ketika Menteri Pertahanan Amerika William Cohen berkunjung ke Indonesia minggu lalu, Prabowo tidak termasuk daftar perwira yang menyambut kedatangan penanggungjawab keamanan Amerika ini. Padahal, dalam kunjungan Cohen Februari yang lalu, Prabowo tampak aktif menyambut petinggi AS ini.

Yang pasti Wiranto membantah anggapan para perwira yang akan di-

Liberty
11-20 Agustus 1998

SENTRAL VITALITAS DAN ALAT BANTU PRIA/ WANITA TERBARU
Distributor lengkap di Surabaya & Malang

SHEN LI

Jl. Adityawarman No.56 Sby 60241
Telp.(031) 5621783
Fax (031) 5673614 atau fax (031) 5664579
TRANSFER via BCA AC 258-018170-1 Surabaya

Kami ADA di Bali Malang & Surabaya

Jl. Arief Rahman Hakim No. 19-B
D/H Talon -Malang
Jl. Watu Renggong No. 141 Denpasar - Bali 80225

Juga sedia NAGA CINA dll.

BUKTIKAN SEKARANG JUGA !!!
MUTU DAN KHASIAT KAMI UTAMAKAN
DAN TERJAMIN IMPORT

1	JAPAN SEXUAL KAPSUL ..... Efektif obati L.syahwat,impotensi,capek-2 stres usia lanjut dll	Rp	20.000
2	SPRAY FOR MEN (Spray utk tahan lama kuatkan ereksi	Rp	25.000
3	HONGKONG OIL Oil spesial utk tahan lama tanpa side efek	Rp	17.500
4	KONDOM PLUS. kondom utk tambah besar dan panjang bisa .. untuk berulang-ulang anti aids.	Rp	17.500
5	SEACPORTE GERMANI ..... Untukpriayang mengalami gangguan seksual,ejakulasi dini,kurang ereksi akibat stres,depres,ngilu,pinggul dan pinggang.	Rp	95.000
6	TABUNG UPBERMAN OIL TAIWAN OIL	Rp210.000,/Rp	15.000
7	Alat dan minyak khusus untuk menambah ukuran kejantanan pria RING EREKSI CINA Rp 90.000 RING EREKSI JEPANG Rp 45.000 Utk memperlancar peredaran di sekitar penis supaya ereksinya lebih kuat dan tahan lama untuk segala usia		
8	KONDOM SILIKON HALUS..... Untuk menggelitik istri,awet dan tahan lama anti hamil	Rp	75.000
9	SAMBUNGAN SILIKON HALUS (Alat sambung nambah besar..... Alat sambung nambah besar dan panjang halus awet utk kepuasan istri dan tahan lama	Rp	.....
10	RING SILIKON SUPER ..... Rp 45.000 RING MAGIC..... RING NYALA Rp 40.000 Untuk menambah kenikmatan istri dan tahan lama awet dan halus	Rp	35.000
11	ROYAL JELLY CAPSUL ..... Utk menambah hormon sperma supaya tidak encer kuatkan pinggang	Rp	35.000
12	CREAM MULTI FUNGSI (Cream pelicin dtk ojang tua, Pelicin alat bantu dan untuk wanita kurang cairan.	Rp	75.000
13	SPANISH TABLET/POTENZOL Rp ..... SPANISH CAIR	Rp	30.000
	VITALITAS IMPORT TERBARU		
14	HOVOTEST (Utk pria cepat ereksi hasilnya segera 1/2 jam)	Rp	90.000
14.a	MACHO MAN: Efektif obatipremature ejakulasi, meningkatkan erection, meningkatkan gairah, ngiluh pinggul dan pinggang dll. *		
15	SUGAR SEX (Gula untuk minum teh/ kopi	Rp	
16	HYPNO LOVE - SMAK PARFUM ..... Parfum pria untuk bangkitkan gairah wanita,disemprotkan pakaian	Rp	.....
	SPECIAL ALAT BANTU IMPORT PRIA/ WANITA		
17	BONEKA HALUS SILIKON ELEKTRIK	Rp	.....
18	MULUT SILIKON ELEKTRIK	Rp	.....
19	BONEKA FULL BODY HALUS ..... Untuk pria bisa goyang, getar dan ngempot maju mundur harus baunya	Rp	.....
20	PUTRI DUYUNG ELEKTRIK.....	Rp	.....
21	VIBRATOR SILIKON HALUS (Jepang)	Rp	.....
22	VIBRATOR MUTIARA ANTIK (Jepang).....	Rp	.....
23	VIBRATOR PUTAR (Hongkong mirip asli.....	Rp	.....
24	VIBRATOR HALUS SILIKON Hongkong ada penggelinya	Rp	.....
25	VIBRATOR IKAT PINGGANG ELEKTRIK	Rp	.....
26	VANIS DUA KEPALA UKIR	Rp	55.000
27	VANIS SATU KEPALA SILIKON HALUS.....	Rp	105.000
28	VANIS HANGAT/DINGIN (untuk Pasangan Mandul).....	Rp	50.000
29	VANIS IKAT PINGGANG (untuk Pria yang loyo) ..... Semua untuk aksesoris wanita sendirian /kesepian	Rp	50.000
30	OBAT PENUMBUH KUMIS (DADA)	Rp	6.000

Pesan luar kota/Pulau Wesel/ tranfer via Bank dikirim cepat.
HUBUNGI SEGERA ALAMAT TERSEBUT DIATAS

LIBERTY 11-20Agustus 1998

8

Prabowo Se

■ KH Alawy Mochamad

Tokoh PPP

Kalau Prabowo memang terlibat penculikan dan orang-orang hilang, ya, serahkan kepada pimpinannya sekarang. Kalau dia memang bersalah, tentu harus dihukum. Tetapi, mekanismenya harus melewati persidangan. Tidak bisa begitu saja. Semua harus melalui aturan dan kesepakatan yang sudah dibuat bersama.

Saya kira itu saja yang perlu. Kalau yang tidak perlu, jangan jangan ditulis. Nanti malah berkesan banyak omong. Kalau banyak omong, banyak orang bingung. Jangan membuat rakyat bingung.

Sekarang Habibie jadi presiden, dari segi administrasi Habibie saya nilai baik. Tinggal tantangan mendatang apa? Itu yang harus kita lihat nanti. Bisa tidak menyelesaikan tantangan bangsa yang sekarang sangat sulit ini?

Bagi saya, tidak perlu ada partai lagi. Tiga partai yang ada saat ini sudah cukup: PPP, Golkar dan PDI. Kalau sampai sekarang PDI masih terpecah, ya, harus diselesaikan PDI sendiri sampai tuntas. Lewat cara-cara yang mereka inginkan dengan aturan-aturan yang mereka buat sebelum

periksa DKP itu adalah lawan-lawan politiknya. Menurutnya, lembaga yang dipimpin Kasad TNI Jenderal Subagyo HS itu bebas dari masalah politik, dan murni upaya ABRI untuk membersihkan dirinya.

Ditanya tentang pertimbangan ketiga perwira tinggi itu tidak diajukan ke mahmil, dan apa hukuman mereka hanya sebatas pemutusan karier militer, Wiranto mengatakan bisa saja mereka diajukan ke mahmil. "Tentunya dalam proses DKP nanti yang akan diputuskan Pangab Tetapi, seandainya di dalam mahmil berkembang sehingga para perwira yang sudah diproses melalui DKP memenuhi unsur pidana, maka tidak ada seorang p yang lolos dari masalah pidana," tegasnya.

Sampai saat ini, menurut Pangab memang d personel ABRI 7 perwira dan 3 bintara-- yang ke mahmil. "Tetapi kalau dalam persidan temuan-temuan baru, maka tidak menutup kem nan jumlah ini bertambah," lanjut Wiranto.

Kontras (Komite untuk Orang Hilang dan Ko Tindak Kekerasan) beranggapan adanya kemungkinan bertambahnya anggota ABRI yang mengetahui penculikan aktivis.

Dr H Amien Rais bahkan menyebut Soeharto berad di balik layar penculikan aktivis. Dia menyarankan mantan presiden itu diperiksa. Alasannya, tid tindakan bintang tiga yang tak diketahui oleh tang yang lebih tinggi. "Soeharto jelas ikut bertanggung

Liberty
11-20 Agustus 1998

rahkan ke Pimpinannya

terpecah.

Begitu juga dengan Golkar. Kalau selama ini dianggap melenceng, hanya janji-janji, sekaranglah waktunya untuk memperbarui diri. Saya tidak ingin bangsa ini terpecah-belah.

Jadi, kalau saya tetap ada di PPP dari dulu sampai sekarang, bukan berarti saya antipartai baru, atau anti Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh orang-orang NU. Kecuali, kalau NU lewat muktamarnya membuat partai sendiri, saya akan mengikuti NU. Pokoknya, apa yang diputuskan NU saya akan ikuti.

Kalau ada orang NU yang keluar dari PPP lalu mendirikan partai baru atau masuk partai lain, mungkin dia tidak cocok di PPP, biarkan saja dia memilih sesuai keinginan hatinya. Tidak boleh dipaksakan.

Sekarang yang mendirikan berbagai partai di bawah NU, itu kan kata orang-orang. Bukan hasil muktamar. Menurut saya, perjuangkan di kandangnya masing-masing. Jangan sedikit-sedikit memberi pernyataan baru yang akhirnya malah membingungkan rakyat.

Soal kemungkinan Megawati ingin jadi presiden, itu terserah Megawati. Tanyakan saja kepada dia, apakah ingin jadi presiden atau tidak. Terserah wakil-wakil rakyat, apakah bisa menerima atau tidak.

Begitu juga dengan Try Sutrisno yang juga disebut-sebut sebagai calon presiden. Try Sutrisno itu orang baik. Kalau dia ingin jadi presiden, juga bergantung rakyat. Wakil-wakil kita akan berunding di Sidang MPR untuk menentukan siapa presiden mendatang.

KH Alawy Mochamad

Saya juga dengar kalau Amien Rais ditawari masuk PPP, ya, silakan saja, terserah pimpinan partai. Sebagai orang PPP, saya juga tunduk keputusan pimpinan partai. Persoalannya, apakah partai akan mencalonkan Amien Rais, itu terserah muktamar PPP nanti. Kalau ternyata pimpinan mencalonkan dan disepakati dalam muktamar, ya, silakan saja.

● semar

jawab," tegasnya.

"Pemeriksaan terhadap mantan presiden itu sangat logis. Sebab, hirarki komando militer, tidak ada seorang perwira bahkan seorang jenderal berbintang tiga sekali pun yang bertindak sendiri, atasanya pasti mengetahui," kata Amien, lantang.

"Maka Prabowo jangan sembunyikan fakta secuil pun. Saya mendengar akan ada jenderal berbintang tiga, empat atau lima yang harus diseret juga," tambahnya.

Kalau Prabowo diperiksa DKP, sebaiknya dia berbicara jujur. "Jangan ada fakta yang dipotong-potong," katanya usai bicara pada forum International Executive Circle, di Jakarta Senin lalu, (5/7).

Mengenai komitmen ABRI yang menyatakan akan menjaga kehormatan mantan Presiden RI, Amien mengatakan hal itu bukan berarti mengamankannya dari jangkauan hukum. "Mudah-mudahan pemerintah Habibie punya keberanian moral. Kalau memang berani, tentu rakyat berada di belakangnya," sambung Amien.

Sementara itu paranormal terkenal asal Malaysia, Halijah, melihat adanya kabut gelap yang menyertai persidangan Prabowo dkk. "Prabowo memang terlibat. Tetapi, sulit untuk membuktikannya," ujarnya. Dia sependapat upaya penculikan itu sebagai langkah Pak Harto dalam mengamankan kekuasaannya. "Persoalannya sekarang, Soeharto masih punya banyak teman yang menjabat di pemerintahan. Mereka cukup setia kepada Soeharto," kata Halijah.

● semar/suara indonesia: m tohir

Liberty
11 Agustus 1998

8 JULI 1998

Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan merekomendasikan kepada Puspom ABRI agar segera memeriksa perwira tinggi yang diduga kuat sebagai pelaku dan penanggung jawab operasi penculikan, yakni Mayjen TNI Muchdi P.R., Letjen TNI Prabowo Subianto, dan Jenderal TNI (Purn) Feisal Tanjung.

*| **Munir**, koordinator Kontras, kepada wartawan, di Mebes Angkatan Darat, Jakarta, dalam berita Kedaulatan Rakyat ("DKP Rapat Tertutup Soal Prabowo Cs", 16 Agustus 1998)*

pada Yogyakarta, PJ Soewarno
an, karena secara historis peran
adap eksistensi negara RI cukup
RI masih belum menjadi negara
aulat, negara Yogyakarta yang
* Bersambung hal 8 kol 1

beradaan Gubernur DIY.

"Sebaiknya yang bicara Dirjen PUOD, karena lebih mengerti duduk persoalannya, supaya masyarakat tidak tambah bingung," katanya.

Sedang Wakil Ketua DPRD DIY dari

rakyat yang menginginkan satu
calon gubernur, yakni Sri Sultan.

Menurutnya, selama ini Fra
pun tetap konsisten dengan
yakni Sri Sultan HB X.

"Jadi tak beralasan kalau k

KONTRAS DESAK PUSPOM ABRI MENGUSUT

DKP Rapat Tertutup Soal Prabowo Cs

JAKARTA (KR) - Rapat internal Dewan Kehormatan Perwira (DKP) berlangsung Rabu (19/8) pukul 13.00-15.45 dan seluruh personil DKP terlihat menghadiri rapat yang dipimpin langsung Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo. Rapat internal tersebut untuk pendalaman dan pengambilan keputusan terhadap tiga terperiksa, Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan dilaksanakan tertutup.

Wartawan dalam kesempatan itu tidak berhasil mendapatkan keterangan hasil rapat DKP. Personil DKP yang terlihat Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Bambang Yudhoyono (Kassospol), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri), dan Letjen TNI Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam).

Begitu rapat internal itu selesai, anggota DKP langsung meninggalkan Mabesad, dan tidak bersedia menanggapi pertanyaan wartawan. Keterangan dari Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo juga gagal diperoleh. Pada kesempatan itu, Kadispenad Brigjen TNI I Dewa Putu Rai mengatakan, DKP sebenarnya tidak ingin berlama-lama dalam menuntaskan pekerjaannya, namun juga tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. "DKP ingin memberikan rekomendasi yang terbaik kepada Pangab," kata Kadispenad.

Periksa Segera

Sementara itu komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), meminta agar Puspom ABRI menempatkan institusinya sebagai lembaga penyidik serta menjalankan fungsinya untuk terus melakukan pengusutan terhadap beberapa perwira militer yang terlibat dalam kasus penculikan sesuai hukum yang berlaku.

"Kontras mengusulkan demikian agar keberadaan Puspom tidak dihambat oleh keputusan-keputusan politik pemerintah dan ABRI. Menyadari hal itu pula maka Kontras mengirimkan surat kepada Kapuspom ABRI Mayjen TNI DJ Sjamsu," kata Koordinator Kontras Munir SH kepada wartawan di

mengumumkan kepada masyarakat tentang nasib 14 korban penculikan yang hingga kini belum jelas.

"Sampai saat ini pihak Puspom belum juga melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang telah kami rekomendasi dalam pertemuan," ujar Munir seraya menyebutkan, pertemuan yang dimaksud adalah 8 Juli 1998. Padahal, perwira tinggi yang diduga knat sebagai pelaku dan penanggungjawab operasi penculikan adalah Mayjen TNI Muhdi, Letjen TNI Prabowo dan Jenderal (Purn) Feisal Tanjung.

Dalam kesempatan itu Munir menjelaskan, DKP secara hukum bukanlah lembaga penyidikan, sehingga proses DKP tidak dapat menghentikan ataupun mengakibatkan hilangnya kewajiban penyidik melakukan langkah-langkah penyidikan.

(Ful/Sim/*)/f/d

P

SECAR
mang sud
persetuju
atkan pen
sungguhn
kup langka
mun begitu
saya semp
mencari ta
akan mene
berupa bir
itu.

Setelah d
sejumlah na
berbau kon
tisme maka
mutuskan
menghadiri
hargaan itu
datang mun
hujat oleh
karena tern
yakan sesuai
saya tentan
Oleh karena
mengambil r

ikuidasi

bisa dilakukan kerjasama de
t Management Unit (AMU), pe
n modal oleh pemilik atau in
ing. "Bahkan kalau perlu kita
ntuan dari pemerintah," tu

soal bank bermasalah, Gubernur
atakan, hingga saat ini seti
Bantuan Likuidasi Bank Indo
LBI) sudah turun sebesar Rp 5

knya, kata Sjahril, itu menun

'Ciblek', Dianta

MIRA (15) — bukan nama sebenarnya — adalah seorang gadis remaja dengan wajah dan perawakan menarik. Badannya kecil tinggi dengan warna kulit putih serta rambut yang tergerai hingga pundak. Dengan postur tubuh cukup lumayan ini, tidak mengherankan jika Mira banyak menarik perhatian lawan jenisnya.

Kedaulatan Rakyat
16 Agustus 1998

Penemuan 14 mayat yang diduga korban penculikan

Kontras desak Puspom lakukan investigasi

JAKARTA (Pos Kota) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Puspom ABRI untuk segera melakukan investigasi ke lapangan dan mengecek identitas 14 mayat yang diduga korban penculikan, setelah warga menemukannya terapung di sungai di daerah Way Umpu, Lampung Utara. Bahkan

ke hal 4 kol. 4

Pos Kota
1 Agustus 1998

Syarwan Hamid menanggapi tuduhan dalam kasus PDI

'SAYA AKAN HADAPI, MATIPUN SANGGUP'

Menyangkut pemberitaan soal PDI

Beberapa media akan disomasi

Diduga ada indikasi kuat terlibat kasus 27 Juli

Feisal, Syarwan dan Dibyo dilaporkan ke Puspom

Penemuan 14 mayat yang diduga korban penculikan

Kontras desak Puspom lakukan investigasi

Satu dari 14 yang dilaporkan hilang

Aktivis Herman berada di Filipina

Mahasiswa 'longmarch' di jalan protokol

Tuntut pemerintah turunkan harga

Indonesia dapat pinjaman dari CGI

Habibie: Kita harus bersyukur

Bantuan dana CGI 8 miliar dolar cair tahun anggaran sekarang

POS KOTA

Semua pelaku asal Surabaya, beraksi di Gresik

9 Lelaki kepergok curi motor tewas dibantai ribuan massa

Buntut pemanggilan 5 orang penggarap lahan Tapos

Ratusan warga Ciawi protes ke Polsek

Pemilik diskotek edarkan ecstasy ditangkap polisi

Dirut baru PLN, PPD, DAMRI, Perumka dilantik

Menhub: Korupsi di PPD harus diusut

Rudini: Polri harus mandiri

Buku 'Dibawah Bendera Revolusi' dijual jutaan rupiah

Bung Karno kembali jadi pujaan

Mobil korban kabur dari kawalan petugas

Oknum polisi tembak mati PNS ABRI

Perihal pemukulan kameraman 'BS' oleh Camelia Malik

Ilham Bintang: Kami pilih jalur hukum

Suasana suka dan duka warnai pengumuman UMPTN

'Saya lulus bukan karena kolusi, lho'

'TANGISAN' PELAWAK DI TENGAH KRISMON

Memed Mini, terpaksa lelang rumah (6-habis)

INFO Keluarga

NAH, INI DIA..!

Minggu besok menampilkan

Indeks iklan

Jadwal salat Jakarta dan sekitarnya

Dzuhur	Ashar	Magrib	Isya	Subuh
11:59	15:12	17:50	19:07	04:43

(2,7 miliar dolar AS) untuk kita harapkan dapat dihasil- (na/us/14)

KONTRAS DESAK PUSPOM .....(Sambungan dari hal. 1)

salah satu mayat yang tidak diketahui identitasnya sudah dikubur warga.

"Kuburan itu harus digali untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya," kata Ketua Kontras Munir kepada wartawan, Jumat. "Setelah itu, hasilnya harus segera diumumkan secara terbuka kepada masyarakat," jelas Munir sesuai suratnya No. 037/SK/K/VII/1998 yang dikirim kemarin kepada Dan Puspom ABRI.

Hingga kemarin, baru satu dari 14 mayat lelaki dewasa yang ditemukan terapung di Way Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Lampung Utara, yang dikuburkan oleh masyarakat di Dusun Olok Haji. Sedangkan lainnya belum jelas berada dimana.

Munir mengatakan, diketemukannya 14 mayat terapung itu dianggap penting berkaitan dengan upaya membongkar segala bentuk tindak kekerasan terhadap jiwa manusia, bukan semata-mata karena kasus penculikan. "Saya masih belum berani mengambil kesimpulan apakah temuan ini berkaitan dengan korban penculikan yang belum kembali," katanya.

Dalam suratnya kepada Puspom ABRI, disebutkan, pada 6 dan 9 Juli 1998 ditemukan dua mayat di Temiang Lada. Kemudian tanggal 13 dan 14 Juli 1998 di Olok Lunding ditemukan lagi dua mayat. Pada 16 Juli 1909 di Kampung Negeri Baru, tepatnya di Simpang Empat Jembatan Lintas Sumatera, ditemukan lagi tujuh mayat.

Dua hari kemudian, 18 Juli siang ditemukan satu mayat di Olok Haji di bawah Jembatan Rel KA. Mayat ini langsung dikebumikan oleh masyarakat setempat.

Kapolres bantah

Informasi penemuan belasan mayat lelaki dewasa di Way Umpu tersebut, dibantah Kapolres Lampung Utara Letkol. Pol. Drs. P.L. Tobing. Alasan Tobing ketika dihubungi Pos Kota, pihaknya baru menerima laporan masyarakat melalui Polsek Blambangan Umpu hanya satu mayat yang ditemukan.

Ditambahkan Kapolres, berita penemuan belasan mayat itu hanya isu. "Sebab kalau ada penemuan mayat pasti dilaporkan ke Polsek setempat," jelas Tobing. Berkaitan informasi KontraS dan LBH Bandar Lampung yang menyebutkan jumlah penemuan belasan mayat, pihak Polres telah melaporkan ke Mapolda dan Mabes Polri.

Tim KontraS yang mengirim Heppy Hendrawan yang melakukan investigasi bersama Victor Da Costa, mengaku kesulitan mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Menurutnya, mereka masih trauma kejadian Petrus (Penembakan Misterius) pada 1986. "Waktu itu mereka yang menemukan mayat dan melapor ke polisi, malah dituduh sebagai pelaku," jelasnya.

Sementara Watoni Nurdin, SH staf LBH Bandar Lampung, mengatakan sampai kemarin baru menemukan satu kuburan. Tapi dirinya yakin jumlah mayat yang ditemukan lebih dari satu.

Karena, tambah Watoni kepada Pos Kota, ada saksi mata, warga Gilham yang melapor ke kantornya mengatakan pernah melihat beberapa mayat mengapung di Sungai Way Umpu. Mayat-mayat itu dalam kondisi membusuk dan pada bagian tubuhnya terdapat luka bahkan kedua telapak tangannya hilang.

(gs/yo/vy/sp/14)

PWI JAYA SESALKAN .....(Sambungan dari hal. 1)

Jurnalistik dan pasal-pasal dalam Undang-Undang ten-

Pos Kota
1 Agustus 1998

14 JULI 1998

Tujuh anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat resmi dinyatakan sebagai tersangka dan dikenai tahanan militer di Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI. Mereka terdiri atas perwira dan bintara.

> **"Keterlibatan anggota Kopassus diduga suatu kesalahan prosedur yang bermula dari perintah pimpinan Kopassus untuk mengungkap sejumlah kegiatan radikal. Namun, dalam pelaksanaannya telah melampaui kepatutan dengan menyekap para korban secara melawan hukum."**

| ***Mayjen TNI Syamsul Maarif**, Kapuspen ABRI, dalam berita Bernas ("Tujuh Anggota Kopassus Ditahan", 15 Juli 1998)*

> **"Dari pernyataan Kapuspen ABRI malah membuka rahasia, bahwa selama ini Kopassus ternyata juga melakukan operasi-operasi pengawasan masyarakat secara langsung, yang sebenarnya di luar kapasitasnya sebagai institusi militer. Jadi, bukan hanya Kodam yang melakukan melalui Bakorstanas dan Kodim melalui Posko Kewaspadaan, tapi juga Kopassus."**

| ***Munir**, Koordinator Kontras, dalam berita Bernas ("Tujuh Anggota Kopassus Ditahan", 15 Juli 1998)*

hemaviton Action
EXTRA GINSENG EXTRA ZINC
2 KALI SEHARI SIAP ACTION

BERNA

RABU LEGI, 15 JULI 1998 HARGA ECERAN Rp. 1.000,00

Tujuh Anggota Kopassus Ditahan

Jakarta, Bernas

Tujuh anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan penyekapan terhadap sejumlah aktivis. Ketujuh orang itu sejak Selasa (14/7) siang dikenai tahanan militer di Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI.

Komandan Puspom ABRI Mayjen TNI Sjamsu Djalal, di kantornya kemarin, tidak bersedia mengungkapkan nama, pangkat, maupun asal grup kejuh tersangka itu. Para tersangka ini terdiri atas perwira dan bintara.

Menurut Sjamsu, tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah, tergantung pada perkembangan hasil penyidikan. Dijelaskan, dalam upaya mengungkap kasus ini pihaknya telah memeriksa sejumlah anggota Kopassus, mulai dari pimpinan hingga prajurit terendah.

Sebelumnya, Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Maarif menjelaskan, keterlibatan anggota Kopassus itu diduga suatu kesalahan prosedur yang bermula dari perintah pimpinan Kopassus untuk mengungkap sejumlah kegiatan radikal.

Namun dalam pelaksanaannya, ternyata telah melampaui batas kepatutan dengan menyekap para korban secara melawan hukum. Kapuspen ABRI tak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pimpinan Kopassus itu.

Sejumlah pihak memuji tindakan pimpinan ABRI ini, namun mereka masih menambahinya dengan permintaan agar pimpinan ABRI mengusut tuntas kemungkinan keterlibatan atasan para tersangka.

Di tempat terpisah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menolak pernyataan Kapuspen ABRI bahwa pelaku penculikan sejumlah aktivis itu merupakan kesalahan prosedur.

"Lembaga pengatur prosedur penangkapan dan penahanan orang itu kepolisian, bukan Kopassus. Jadi, tak ada istilah salah tangkap dan salah tindakan di institusi Kopasus. Penculikan ini institusional, yang pertanggungjawabannya juga harus pada tingkat institusional," tegas Koordinator Badan Pekerja Kontras, A Munir SH di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, kemarin.

Munir didampingi anggota Kontras Dadang Trisasongko SH serta dua aktivis yang pernah diculik, Rahardjo Waluyo Jati dan Desmond J Mahendra.

Pernyataan senada disampaikan anggoat Komnas HAM, Clementino Dos Reis Amaral, pengacara senior Adnan Buyung Nasution, dan Direktur Eksekutif PBHI, Hendardi, maupun Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr HM Amien Rais.

Menurut mereka, tindakan oknum-oknum Kopassus itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab komandannya. Tak mungkin komandan yang ber-

Bersambung ke hal.8 kol 1

Penculik Pakai BMW, Masa Kopral?

DUA aktivis yang pernah menjadi korban penculikan — Rahardjo Waluyo Jati dan Desmond J Mahendra — yakin bahwa pelaku penculikan mereka beberapa bulan lalu bukan sekadar oknum Kopassus yang salah prosedur. Salah satu indikasinya, para penculik tersebut memiliki uang sangat banyak dan naik BMW, yang tidak mungkin dimiliki prajurit berpangkat rendahan.

Dikisahkan oleh Desmon lebih jauh, sebelum dirinya dilepas, para penculik menanyakan harga kaca mata Desmond yang rusak karena jatuh saat Desmond diculik. Kebetulan, kaca mata Desmond bermerk mahal, buatan luar negeri.

"Saya jawab, *frame* kaca mata itu saya beli Rp 550.000, sedangkan kacanya Rp 300.000-an. Saya juga menyatakan menolak jika diganti di bawah Rp 800.000. Ternyata, mereka memberi uang penggantiitu. Kalau cuma oknum, cuma kopral, misalnya, dapat dari mana dia uang sebanyak itu?"

Selain itu, lanjut Desmond, mereka juga membelikannya

Bersambung ke hal.8 kol 1

PROGRAM PROFESI 1 TAHUN
ANALYST PROGRAMMER WINDOWS
LEMBAGA MANAJEMEN DAN KOMPUTER YOGYAKARTA
LMK YOGYAKARTA
JL. ABUBAKAR ALI 28 TELP. (0274) 514658 FAX. (0274) 515615
JL. P. BENOPATI 11 TELP.(0274) 513995 FAX. (0274) 580324

Akbar Akui Minta Dukungan Para Gubernur

Anggota FPP DIY: Golkar Belokkan Arah Reformasi

karta, Bernas

Kekecewaan para jenderal nawirawan atas jalannya naslub Golkar yang tidak , karena ada intervensi dari d- dan Departemen Dalam ri, ditanggapi Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung. Akbar mengatakan secara omatis, "Saya tidak ingin ngatakan kekecewaan itu k realistik, tapi saya ingin ngatakan pemilihan berlangsecara demokratis. Dan k salah orang memberi dugan kepada saya, termasuk anggota kabinet," kata jung kepada wartawan di arta, Selasa (14/7).

Dgi Akbar mengaku juga sekali tidak," elaknya.

Selanjutnya ia mengaku telah mengatakan kepada para gubernur bahwa jika mereka, *setuju dengan programnya* juga bisa mendukungnya.

Seperti diberitakan media massa, ada sedikitnya 13 jenderal purnawirawan Angkatan 45 dan pasca Angkatan 45 yang membuat pernyataan sikap kecewa dan menyesalkan sikap ABRI dan Departemen Dalam Negeri. Mereka menilai ada ketidaksesuaian antara jalannya Munaslub dengan pernyataan Menhankam/Pangab bahwa ABRI akan netral dan tidak melakukan intervensi terhadap jalannya Munaslub.

Wayangnya Diperiksa, Dalangnya Masih Dicari

Yogya, Bernas

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya sebagai kuasa hukum keluarga Fuad M Syafruddin (Udin) berharap pemeriksaan atas tersangka pembunuh wartawan Bernas (Poll) Edy Wuryanto bisa mengungkap dalang kasus ini. Karena itu, diharapkan Edy memenuhi panggilan Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/2 Yogyakarta Rabu (15/7, hari ini, red).

Kepala Bidang Operasional LBH Yogyakrta, Budi Hartono SH, Selasa (14/7) menyatakan,

buka [illegible] Udin [illegible] berita yang ditulisnya. Sehingga pemeriksaan atas Edy Wuryanto diharapkan tidak hanya mengenai proses rekayasa pembelokan kasus Udin. Namun diharapkan Denpom juga dapat mengungkap pelaku pembunuh Udin yang sebe-

[illegible] saya yakin Udin terbunuh karena pemberitaannya. Sehingga pemeriksaan itu merupakan rekayasa yang harus dibongkar," kata Budi Hartono kepada *Bernas*.

Anggota Polres Bantul yang sekarang duduk dijajaran Polda DIY, Serma Edy Wuryanto, Rabu (15/7) dipanggil menghadap Denpom IV/2 Yogyakarta sebagai tersangka rekayasa pembelokkan kasus Udin.

Permintaan Denpom ini sesuai surat panggilannya yang disampaikan ke Polda DIY, Jumat (10/7) lalu, kata Kontan dan Detasemen Polisi Militer (Dan Denpom) IV/2 Yogyakarta, Letkol CPM Unggul K Yudoyono, (*Bernas*, 14/7).

Menurut Budi Hartono, Edy hanyalah sebagai wayang yang

Bersambung ke hal.8 kol 6

MUNCUL DI ANTARA K
barat Merapi pada pukul
terlihat jelas karena Mer
status aktivitas dinyatak

Ribuan

Magelang, Bernas

Paling sedikit 10.0
di lima desa, yaitu Ke
jing, Sengi dan Ng
camatan Dukun, Mag
ban hujan abu letusa
silikosis akibat men
terkandung dalam ab
merupakan infeksi p
yang ditandai sesak
Tanda-tanda awa
ditunjukkan denga
jumlah pasien yang m
dan batuk di Pusk
Dukun.
Menurut Kepala

Di Balik

Bena

HARI Senin (13/7),
lawan untuk kemanusia
dikoordinir Romo F Sand
Sumardi SJ menyamu

Bernas
16 Juli 1998

Bernas
16 Juli 1998

Tujuh - - -

Sambungan dari hal.1

sangkutan -- atau yang lebih tinggi -- tidak tahu tindakan yang jelas melibatkan personel, fasilitas, dan dana yang cukup besar seperti itu.

"Jangan lagi kita bicara soal oknum, tapi siapa komandannya. Saya yakin, kalaupun bukan orang nomor satu, paling tidak orang nomor dua, tiga, atau nomor empat di kesatuannya pasti tahu," kata Amaral.

"Masa komandannya tidak tahu. Penyekapan itu bukan satu dua hari kan? Itu dalam hitungan bulan, bahkan ada yang tahun. Ada yang dua-tiga bulan, ada yang 7 bulan, ada yang setahun. Masa jika oknum yang melakukan, yang lainnya nggak tahu," tambah Amaral.

Jadi, kata Buyung di tempat terpisah, jangan hanya anggota pasukannya yang diadili, komandannya pun harus dimintai tanggung jawab. Hal senada dikemukakan Hendardi.

Menurut Hendardi, berdasarkan berbagai pengakuan para korban serta sejumlah fakta yang terungkap selama ini, operasi penculikan tersebut dilakukan secara terencana dan terorganisasi dengan dugaan kuat menggunakan biaya besar.

Penggunakaan fasilitas sel canggih yang dilengkapi mesin pendingin udara/AC, kamera monitor, pemulangan beberapa korban ke daerah masing-masing menggunakan pesawat terbang, juga menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan.

Penggunaan besar dalam operasi semacam ini, tegas Hendardi, mustahil dilakukan tanpa rencana dan terpimpin. Mustahil operasi semacam itu dilakukan di bawah kendali dan perencanaan unit rendah dan menengah.

Sebaliknya, kendali dan perencanaan datang dari level tinggi dalam organisasi ABRI. Karena itu pula, PBHI mendesak agar dilakukan pula pemeriksaan dan pengusutan pada pimpinan ABRI, termasuk pimpinan Kopassus pada saat itu (Danjen Kopassus) maupun pimpinan ABRI lain yang secara hirarkis organisatoris dapat diduga merencanakan dan memegang kendali komando.

Di lain pihak, Buyung menduga bahwa kasus penculikan aktivis itu ada kaitan dengan kasus penembahakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan sosial yang diwarnai penjarahan, pembakaran dan perkosaan beberapa waktu lalu.

Buyung menilai pengungkapan tersangka pelaku penculikan itu sebagai langkah berani dan sikap jantan pimpinan ABRI yang patut dipuji. "Ini pengakuan yang jujur. Namun menurut saya harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut supaya semua yang terlibat diadili. Jangan hanya nanti dipindah-pindahkan saja, mesti diadili," ujar Buyung.

Wakil Ketua DPR RI (F-ABRI) Hari Sabarno meminta masyarakat bersabar menunggu hasil TPF untuk mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus penculikan tersebut.

Amien Rais mendesak agar pengusutan kasus ini dilakukan sampai tuntas. Ia juga menuntut oknum-oknum yang terlibat itu diumumkan saja nama dan pangkatnya, agar ABRI bersih kembali.

Mengenai pernyataan Kapuspen ABRI bahwa keterlibatan Kopassus itu semata untuk pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan radikal, Munir justru mempertanyakannya.

Selain itu, tambah Munir, pernyataan Kapuspen malah membuka rahasia, bahwa selama ini Kopassus ternyata juga melakukan operasi-operasi pengawasan masyarakat secara langsung, yang sebenarnya di luar kapasitasnya sebagai institusi militer.

"Jadi, bukan hanya Kodam yang melakukan operasi melalui Bakortanas, dan Kodim melalui Posko Kewaspadaan, tapi juga Kopassus."

Munir menegaskan, beberapa waktu lalu Kontras pernah menyampaikan bahwa dalam kasus orang hilang ini terlibat beberapa isntitusi militer mulai Koramil, Kodim, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri. "Kini, ada satu institusi lagi, yakni Kopassus."

Munir menghargai langkah-langkah ABRI dalam kasus ini. Namun masih ada yang harus ditindaklanjuti yakni nasib para aktivis yang masih hilang. Dalam catatan Kontras kini masih ada 14 aktivis yang nasibnya belum jelas. Padahal, ABRI tahu berbagai hal tentang mereka, termasuk tempat penyekapan mereka. (dob/son/wip/yos/nil)

Penculik - - -

Sambungan dari hal.1

Gusdur

Di

Dili, Berna

Ketua PI
Wahid, dan
sil Munas M
putri akan b
log dengan p
damaian 199
lipe Ximene
muan dan d
langsung 16
"Saya di
untuk berdi
pengalaman
pak Kiai Ab
dan Ibu Meg
banyak berb
bentukan ka
berorientasi
ta Uskup B

Belum

Dalam p
mengaku, se
dian ia minta
melaksanaka
jelas, bagaim
terlibat dala
bahkan dia
teman lagi
mengawasi j
mah korban

Ta

SATU-satu
keterangan
tangga kor
bahwa Seti
Ron dendan
Namun
Endang me
sering dima
Puncakr
dari seorang
bekas pemba
memarahiny
tidak bisa b
rukan majik
Endang
hingga pem
Ron berkata
begitu, mail

16 JULI 1998

"Ada perintah pimpinan Kopassus untuk secepatnya mengungkap beberapa gerakan yang dinilai radikal. Karena nyata-nyata dinilai membahayakan berbagai program pemerintah dan keselamatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya ternyata ada langkah-langkah di luar batas kepatutan. Ada langkah yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak tepat, entah itu kesalahan prosedur, tindakan tidak disiplin, dan tindakan yang melampaui petunjuk atasan langkah-langkah di luar batas kepatutan. Sedang dilakukan pengusutan."

| ***Jenderal TNI Wiranto**, Menhankam/Pangab, dalam berita Suara Merdeka ("Pangab: Ada Perintah Pimpinan Kopassus, 17 Juli 1998)*

Suara Merdeka
17 Juli 1998

SUARA MERDEKA

INDEPENDEN - OBJEKTIF - TANPA PRASANGKA

TAHUN XLIX No. 152 • TERBIT 12 HALAMAN • ISSN 0215-5123 HARGA ECERAN Rp 1.300

Pangab: Ada Perintah Pimpinan Kopassus

• Untuk Ungkap Gerakan Radikal

• "Nama Penculik, Sabarlah..."

JAKARTA - Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menghargakan seluruh masyarakat untuk mengikuti secara pasti langkah-langkah ABRI yang mengakui berbagai kekeliruan.

"Harus disyukuri dan dimengerti, dengan sikap ini justru ABRI ingin mengajak untuk memberitahukan seluruh yang tidak benar, meluruskan sesuatu yang tidak lurus, dan menyempurnakan sesuatu yang masih kurang sempurna, untuk kemudian menatap masa depan yang penuh tantangan dan hambatan."

Pengunan Wiranto itu dikemukakan kepada wartawan, setelah memberikan ceramah pada penyegaran Manggala BP7 Pusat, di Jakarta, kemarin. Terhadap kasus penculikan atau orang-orang yang hilang yang melibatkan oknum Kopassus, Wiranto mengakui dapat diungkapkan, ada perintah pimpinan Kopassus untuk secepatnya mengungkap beberapa gerakan yang dinilai radikal. Karena nyata-nyata dinilai membahayakan berbagai program Pemerintah dan keselamatan masyarakat luas itu.

Dalam pelaksanaannya ternyata ada langkah-langkah di luar batas kepatutan. "Ada langkah-langkah yang kita anggap merupakan sesuatu yang tidak tepat, entah itu kesalahan prosedur, tindakan tidak disiplin, atau tindakan yang melampaui petunjuk atasan. Saat ini sedang dilakukan pengusutan-pengusutan untuk pengungkapan yang lebih jauh lagi," tambahnya.

Lebih jauh Wiranto menambahkan apa yang dilakukan ABRI ini dijawab oleh semangat reformasi. Kecuali ABRI berperan menyumbangkan pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan dalam reformasi secara menyeluruh baik di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang-bidang lain kepada Pemerintah dan masyarakat. ABRI juga mereformasi dirinya sendiri.

"Reformasi itu merupakan wujud dari tekad untuk melakukan suatu pembaruan ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Tak Ada Masalah

Di tempat terpisah Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal mengungkapkan, sampai sekarang tidak ada kesulitan dan hambatan dalam pengusutan kasus ini. "Tidak ada kendala. Di ABRI, kalau sudah ada perintah pasti pimpinan, semuanya harus dilaksanakan," ujarnya, saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela rapat teknis Pam ABRI di Jakarta kemarin.

Namun, ketika disinya nama-nama ke-7 anggota Kopassus yang terlibat, jenderal berbintang dua ini enggan berkomentar. "Tunggu-lah...sabarlah. Kalau saya sebutkan, nanti komentar macam-macam. Beri kesempatan saya untuk mengusutnya," tegasnya.

Syamsu menambahkan, pimpinan ABRI tidak pernah memberikan perintah yang bertentangan dengan hukum dan HAM. "Nanti kita lihatlah. Tidak ada tugas-tugas yang tidak jelas," ujarnya.

Masih Dibutuhkan

Mantan Danpen Kopassus Letjen TNI Agum Gumelar dan Wakil Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman sependapat, keberadaan Kopassus TNI-AD tetap dipertahankan, meski tercederai tindakan oknum yang terlibat kasus penculikan sejumlah aktivis.

Menurut Marzuki, bagaimanapun Kopassus merupakan bagian dari ABRI yang dikembangkan untuk membangun kekuatan ABRI menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks, dengan memberikan kewenangan-kewenangan tertentu yang berkaitan dengan masalah politik.

"Inilah tantangan bagi ABRI harus membuat garis tegas antara fungsinya sebagai hankam dan kegiatan politik," ujar Marzuki Darusman kepada wartawan di Jakarta kemarin.

(Bersambung hlm XI kol 7-8)

Vitamin C 500 mg + Vitamin B Kompleks 1 tablet
ENERVON-C

SEKTUS MENDENGARKAN: Uskup Dili Carlos Filipe Ximenes Belo, diapit budayawan Romo Dr Mudji Sutrisno dan moderator Dahrli Yakin, serius mendengarkan pertanyaan peserta dialog yang diselenggarakan oleh PRNU hari ini

PRNU bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Perdamaian di Hotel Aziz Century Park, Jakarta, kemarin. (Foto: Suara Merdeka/Antara/-ss)

Gus Dur: Kasus Kerusuhan dan Pemerkosaan untuk Mematikan NU

Direvisi Lagi, APBN Naik 88,2%

JAKARTA - Pemerintah kembali mengajukan revisi terhadap APBN 1998/1999. Revisi yang kali kedua ini disebabkan oleh berbagai perubahan yang sangat mendasar dalam perekonomian nasional. Di antaranya melemahnya nilai tukar rupiah, inflasi, dan

menjadi Rp 149,3 triliun. Jumlah ini termasuk pembiayaan migas yang semula Rp 94,6 triliun menjadi Rp 49,7 triliun. "Perubahan itu berdasarkan dengan asumsi, kurs dan rata-rata harga ekspor minyak mentah."

Belanja Meningkat

Suara Merdeka
17 Juli 1998

Pangab...

(Sambungan hlm I)

Karena tidak terlalu terkendali, menurut Marzuki, sehingga kegiatan yang mereka lakukan menimbulkan problem dan ekses yang terjadi dalam bentuk kepelikan-kepelikan, karena keterlibatan unsur-usur ABRI.

Marzuki melihat kemampuan koreksi diri ABRI merupakan bagian dari pemulihan citranya dari pandangan masyarakat. "Pengungkapan kasus yang melibatkan oknum satuan Kopassus pada penculikan itu merupakan proses awal rehabilitasi namanya sebagai pasukan elite.''

Menanggapi pernyataan pimpinan ABRI soal keterlibatan oknum Kopassus, menurut Marzuki, ini untuk kali pertama pimpinan ABRI bisa mengatasi secara institusional pada satuan yang terimplikasi pada peristiwa penculikan yang terjadi sebelum SU MPR.

Karenanya, lanjut dia, itu salah satu titik penting dan menentukan yang menjadi titik balik pemulihan ketenteraman masyarakat. "Saat yang vakum pada 13-14 Mei, sehingga terjadi penjarahan itu, sekarang ada dalam titik kembali pulih secara penuh. Itu sumbangan besar bagi stabilitas ekonomi.''

Agum Gumelar yang kini menjabat Gubernur Lemhanas mengaku sedih mendengar keterlibatan oknum di institusi ABRI yang pernah dipimpinnya tersebut.

"Tidak hanya terpukul, tapi sedih dan sakit sekali,'' ujar Agum kepada wartawan. Namun dia mengakui tetap mencintai korps pasukan elite tersebut, karena itu dilakukan oleh oknum. (ng,di-23t)

Bernas
17 Juli 1998

BERNAS

JUMAT PON, 17 JULI 1998 — HARGA ECERAN Rp 1.000,00 — NO 235 TAHUN KE-52

Pangab: Itu di Luar Batas!

Kopassus Terlibat, Agum Gumelar Menangis

Jenderal TNI Wiranto (Menhankam/Pangab)
"Hasil sementara pengusutan menunjukkan adanya suatu perintah pimpinan Kopassus untuk secepatnya mengungkap beberapa gerakan yang dinilai radikal saat itu ..."

Letjen TNI Agum Gumelar (Mantan Danjen Kopassus)
"Saya sangat bangga dengan Kopassus tapi sedih karena kelakuan dan berbagai aksi yang meresahkan masyarakat itu dilakukan oleh oknum/oknum Kopassus..."

Pius Kembali, Triyono Hilang

Andi Arief dipanggil Puspom ABRI

Yotje: Kami Belum Koordinasi

Lisensi untuk Wartawan Berjiwa Fasis

* AJI: Gelagat Kembalinya Kaum Penindas!

NU Cemaskan Berbagai Gejolak Sosial

Belo: Wanita Timtim juga Diperkosa

Horor di Sukoharjo

Terencana dan Diyakini Ada Dalangnya

Mendagri Usul Ada PDI 1 dan PDI 2

Pacaran di Pantai, Dikeroyok, Tewas

Bebas BICARA

Prihatin pada Indonesiaku

Pengumuman

Masuk Sekolah BELAJAR di Primagama

hemaviton Action
EXTRA GINSENG EXTRA ZINC
2 KALI SEHARI SIAP ACTION

BERN

AT PON. 17 JULI 1998

HARGA ECERAN Rp. 1.000,00

Pangab: Itu di Luar Batas!

Kopassus Terlibat, Agum Gumelar Menangis

Jakarta, Bernas

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menegaskan, keterlibatan sejumlah anggota Kopassus dalam kasus penculikan aktivis, menunjukkan adanya langkah-langkah di *luar batas* kepatutan yang melampaui perintah atasan.

"Entah itu kesalahan prosedur entah itu tindakan yang tidak disiplin," katanya di Jakarta, Kamis (16/7).

Memang, katanya, kesimpulan sementara menunjukkan ada perintah pimpinan Kopassus untuk secepatnya mengungkap gerakan yang dinilai radikal dan bisa membahayakan berbagai program pemerintah dan keselamatan masyarakat.

"Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata ada yang terlampau di luar batas kepatutan dan mengambil langkah yang tidak tepat," kata Wiranto, tanpa merinci mengapa pasukan sekaliber Kopassus, bisa bertindak melampaui kepatutan, dan melenceng dari prosedur standar.

Mengenai "prosedur" yang dimaksudkannya itu dihubungkan dengan aksi penculikan, Wiranto hanya mengatakan bahwa pimpinan ABRI tidak pernah memerintahkan untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau melanggar HAM.

Mengenai kemungkinan mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI Prabowo Subianto juga diperiksa Mabes ABRI berkaitan dengan 'adanya perintah atasan Kopassus' itu, Wiranto tidak bersedia menjawab.

Sebelumnya, Komandan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal mengatakan jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Prabowo harus diperiksa, maka Pom ABRI akan memeriksanya.

Kemarin, Syamsu mengatakan, sejauh ini secara resmi Prabowo belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun tak menutup kemungkinan diriksaan sampai tuntas. Kini kita selesaikan dulu pada tingkat pelaksanaanya," ujar Syamsu.

Tentang berita yang menyebutkan bahwa Prabowo sudah dipanggil ke Mabes ABRI, Wiranto menyatakan panggilan itu memang tidak dilakukan secara tertulis, tetapi hanya lisan.

Sementara mantan komandan Kopassus sebelum Prabowo, Letjen TNI Agum Gumelar, menyatakan prihatin bahkan menangis begitu mengetahui ada anggota Kopassus yang terlibat penculikan para aktivis.

"Tak ada alasan bagi prajurit Kopassus untuk tidak melakukan darma bakti setiap hari pada bangsa. Tapi sekarang, ada kenyataan, ada oknum Baret Merah yang melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," kata Agum Gumelar.

Kepada wartawan sebelum mengikuti diskusi yang diselenggarakan Tim Lima PB NU di Hotel Century Park, kemarin, Agum mengatakan, meski dirinya sangat prihatin dengan kasus tersebut, tetapi bukan berarti mengurangi rasa cintanya terhadap lembaga itu.

"Yang melakukan hal itu kan oknumnya bukan Kopassus sebagai lembaga," ujar Agum. Itu sebabnya, citra Kopassus tidak akan terpengaruh oleh adanya kejadian tersebut. Sebab, sejak lahir Kopassus diabdikan kepada bangsa dan negara.

Mengenai oknum-oknumnya

Bersambung ke hal. 8 kol. 1

JEMBATAN STUDI & KARIR PARA MAHASISWA & SARJANA
LINGUA INTERNATIONAL
• Menulis surat lamaran kerja
• Tip lolos seleksi tes & interview kerja
• Konsultasi tes psikologi & karir dengan psikolog
• Simulasi tes interview
ENGLISH FOR

Bernas
17 Juli 1998

"Saya kecewa adanya penyelewengan yang dilakukan beberapa beberapa oknum satuan elite TNI AD, Kopassus. Sangat bangga saya dengan korps prajurit elite ini, tetapi sekaligus sedih karena kelakuan dan berbagai aksi yang menakutkan masyarakat itu dilakukan oknum-oknum Kopassus. Saya tahu betul prajurit Kopassus itu bagaimana, dan saya mohon prajurit-prajurit Kopassus jangan seperti itu.
Tidak ada alasan bagi prajurit Kopassus untuk tidak melakukan darma bakti setiap hari pada bangsa, tiada alasan tiap hari tidak melakukan bakti pada negara, tetapi sekarang ada kenyataan, ada oknum Baret Merah yang melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Menjadi personel ABRI sangat dilematis karena harus menyelesaikan berbagai masalah keamanan dengan cara-cara yang tidak bertabrakan dengan nilai-nilai kemanusiaan."

| ***Letjen TNI Agum Gumelar****, Mantan Danjen Kopassus, dalam berita Kedaulatan Rakyat ("Oknum Kopassus Menakutkan", 17 Juli 1998)*

Rakyat

Aman dan Menguntungkan
BAPINDO
HUBUNGI CABANG BAPINDO TERDEKAT

MASALAH PENCULIKAN AKTIVIS

Mayjen TNI Sjamsu Djalal:
Ketujuh oknum Kopassus yang terlibat mulai dari perwira pertama hingga perwira tinggi bintang tiga.

Letjen TNI Agum Gumelar:
Saya kecewa penyelewengan beberapa oknum Kopassus.

KR-JOS/ADIB

KE DILI

Melarang

tuk tidak tergesa mengambil keputusan untuk meninggalkan Timtim karena adanya isu bahwa di propinsi itu akan ada 'pertumpahan darah' saat peringatan HUT Integrasi tersebut. Meski ada isu untuk menggagalkan HUT, pemerintah tetap akan melaksanakan upacara bersejarah itu. (*)-e

sulit jodoh hubungi
JODOH
400033
577833
577655 SHIO : (0274) 577888
(0274) 577899

LETJEN TNI AGUM GUMELAR SEDIH

Oknum Kopassus Menakutkan

JAKARTA (KR) - Mantan Komandan Kopassus, Letjen TNI Agum Gumelar mengaku kecewa terhadap adanya penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa oknum satuan elit TNI-AD, Kopassus, belakangan ini. Ia mengaku sangat bangga dengan korps prajurit elit tersebut, tetapi sekaligus sedih karena kelakuan dan berbagai aksi yang menakutkan masyarakat itu dilakukan oleh oknum-oknum Kopassus.

"Saya tahu betul prajurit Kopassus itu bagaimana, dan saya mohon prajurit-prajurit Kopassus jangan seperti itu," katanya, saat berbicara pada dialog Membangun Kebhinekaan Dalam Kesatuan Bangsa, yang diadakan oleh Tim 5 PB NU, di Jakarta, Kamis (16/7). Ia berharap, prajurit di jajaran kesatuan itu jangan bersikap di luar garis Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Letjen Agum yang pernah memimpin Kopassus selama satu setengah tahun mengatakan, masyarakat jangan melihat masalah penyelewengan itu dari sudut lembaganya, tetapi harus dilihat dari sudut pandangan kelakuan orang perseorangan.

"Tiada alasan bagi prajurit Kopassus untuk tidak melakukan darma bakti setiap hari pada bangsa, tiada alasan tiap hari tidak melakukan bakti pada negara, tetapi sekarang ada kenyataan ada oknum Baret Merah yang melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," katanya, seperti dikutip *Antara*.

Menurut dia, menjadi personel ABRI itu sangat dilematis karena harus menyelesaikan berbagai masalah keamanan dengan cara-cara yang tidak bertabrakan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Diungkapkan, ketika menjadi Pangdam VII/Wirabuwana di Ujungpandang, ia selalu memberikan komando kepada jajarannya untuk sedapat mungkin tidak mengeluarkan sebutir peluru pun untuk menyelesaikan masalah.

Bintang Tiga

Sementara itu, Danpuspom ABRI, Mayjen TNI Syamsu Djalal, Selasa (14/7) lalu menyatakan, pihaknya mendapat bukti-bukti keterlibatan 7 oknum Kopassus dalam kasus penculikan aktivis. Ketujuh oknum Baret Merah tersebut, berpangkat mulai dari perwira pertama hingga perwira tinggi bintang tiga.

Namun Mayjen Syamsu membantah jika ada yang mengatakan Letjen Prabowo sudah diperiksa, karena saat ini yang diperiksa masih pada tingkat pelaksana. "Tetapi kalau nanti dibutuhkan, Polisi Militer bisa saja memanggilnya untuk diperiksa," kata Mayjen Syamsu, seperti dikutip *Suara Pembaruan*.

Kedaulatan Rakyat
17 Juli 1998

Jumat Pon 17 Juli 1998
22 Muhid 1931 Tahun LIII No. 282
Harian Pag Terbit 8 Halaman
Eceran Rp 1.200

BUANG BACAAN

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

30%

AKIBAT 'KESALAHAN' KONSEP NEGARA KESATUAN DAN PERSATUAN

Disintegrasi Bangsa Semakin Nyata

MASALAH PENCULIKAN AKTIVIS

Mayjen TNI Sjamsu Djalal: Kebijih oknum Kopassus yang terlibat mulai dari perwira pertama hingga perwira tinggi bintang tiga.

Letjen TNI Agum Gumelar: Saya ikhlas penyelewengan beberapa oknum Kopassus.

SOAL JAMSHID MARKER KE DILI

Belo: Saya Tak Berhak Melarang

LETJEN TNI AGUM GUMELAR SEDIH

Oknum Kopassus Menakutkan

KONTAK JODOH
(024) 3400033
(0274) 577833

BANTUAN IMF 1 MILIAR DOLAR SEGERA CAIR

HATI-HATI BERIKAN SUBSIDI

DISKUSI RUU ANTI MONOPOLI KERJASAMA KR-PUFUK-PKU EKONOMI UGM (2-HABIS)

Kedaulatan Rakyat
17 Juli 1998

Oknum

Ketika ditanya cara Puspom memanggil Letjen Prabowo, Danpuspom mengatakan, "Ah, itu gampang. Itu cuma masalah teknis saja. Yang jelas sudah ada perintah Pangab untuk mengusut kasus penculikan dan penyekapan secara tuntas."

Dalam penjelasan kepada wartawan kemarin, Danpuspom Mayjen Syamsu Djalal mengatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga tidak ada yang kebal hukum.

Pimpinan ABRI tentunya akan memberikan perintah-perintah dan tindakan selanjutnya, katanya seperti dikutip *Antara*, menanggapi pertanyaan wartawan tentang kemungkinan mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI Prabowo Subianto, juga ikut diperiksa Puspom ABRI.

Ditegaskan, pimpinan ABRI tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nanti kita lihat, apakah diberikan perintah untuk memeriksa pimpinan Kopassus, tambahnya.

Ketika wartawan menanyakan tentang "alasan prosedur" yang disebutkan sehubungan dengan terlibatnya oknum anggota Kopassus dalam penculikan para aktivis, dia mengatakan bahwa pimpinan ABRI tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar HAM.

Di Luar Batas

Di tempat terpisah, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan, pengusutan mendalam atas keterlibatan sejumlah oknum Kopassus dalam kasus penculikan aktivis hingga kini masih dilakukan oleh pihak ABRI, namun kesimpulan sementara menunjukkan kasus itu terjadi karena adanya langkah-langkah di luar kepatutan yang melanggar petunjuk atasan.

Menurut Wiranto, kesimpulan sementara hasil pengusutan menunjukkan adanya atau perintah pimpinan Kopassus untuk secepatnya mengungkap beberapa gerakan yang dinilai radikal saat yang nyata-nyata dinilai membahayakan berbagai program pemerintah dan kepentingan masyarakat.

"Di dalam pelaksanaannya ternyata ada langkah-langkah di luar batas kepatutan, langkah-langkah yang dianggap merupakan sesuatu yang tidak tepat, seperti kesalahan prosedur, tindakan tidak disiplin, atau tindakan yang melampaui petunjuk atasannya," katanya. Namun hingga kini masih dilakukan pengusutan dan pengungkapan lebih mendalam atas kesimpulan sementara tersebut.

BISA DIBELI DI 'KR'

Kaset Ceramah Amien Rais, Puisi dan Lagu

MENGEMAS empat materi dalam satu rekaman memang tidak mudah. Tapi itulah yang dilakukan Ali Akbar. Selaku produser, dia meramu ceramah Ketua PP Muhammadiyah Dr HM Amien Rais dengan lagu 'Panji Reformasi', pembacaan puisi, serta rekaman unjukrasa mahasiswa, dalam satu kaset selama 45 menit, pada pengajian di Masjid PP Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, 24 1998. Dengan jernih, tajam dan rada ko Amien Rais memaparkan secara rinci merg Soeharto *lengser keprabon*.

17 JULI 1998

"Saya percaya ABRI akan secara sistematis, bijaksana, dan arif menyelesaikan masalah yang dihadapinya: keterlibatan sejumlah anggota komando pasukan khusus (kopassus) dalam aksi penculikan"

| ***B.J. HABIBIE**, Presiden Republik Indonesia, dalam berita Kedaulatan Rakyat ("Presiden: ABRI tak Boleh Kecewakan Rakyat", 26 Juli 1998)*

Kedaulatan Rakyat
26 Juli 1998

al TNI Wiranto, Menko Ekuin, Menko Kesra Haryono Suyono, dan Menperindag Rahardi Ra-

berhasil disebarluaskan ke delapan negara, berkat stasiun radio pemancar TNI-AU di Desa Pla-

tetap berada di hati rakyat dan dicintai rakyat, karena pada rakyat itulah terletak ke-

kit) untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Tidar Magelang dan RSD Wonogiri. (als/tt/ryo)

Presiden: ABRI tak Boleh Kecewakan Rakyat

Jenderal TNI Wiranto: Tak Usah Dikomentari Dulu

Wonosari, Bernas

Presiden BJ Habibie menegaskan, ABRI adalah milik nasional yang tak dapat terpisahkan dari rakyat. Oleh karena itu, ABRI tidak boleh mengecewakan rakyat. Ia sendiri menyatakan gembira terhadap upaya yang ditempuh ABRI untuk menyelesaikan masalah yang timbul di dalam ABRI sendiri, sehingga mendapat kepercayaan lebih besar dari rakyat.

Penegasan Presiden BJ Habibie itu, disampaikan pada peringatan Hari Bakti TNI AU di Desa Gading, Kecamatan Playen, Gunungkidul, DIY, Sabtu (25/7). Ia didampingi Ibu Hasri Ainun Habibie, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, dan sejumlah menteri lain.

ABRI, katanya, harus menjadi kebanggaan dan menyatukan rakyat. Dengan demikian, ABRI akan mendapat kepercayaan makin besar dari rakyat, dan masyarakat akan merasa lebih aman.

"Apa pun wujud langkah yang diambil ABRI, pada akhirnya perasaan tenteram lahir batin itu harus benar-benar tertanam di hati rakyat, sehingga rakyat dapat tidur nyenyak dan dapat bekerja dengan penuh kegairahan, sehingga roda ekonomi dapat berputar kembali," ujar Habibie.

Sepekan lalu, tepatnya Sabtu (17/7), Presiden menyatakan kepercayaannya bahwa ABRI akan menyelesaikan masalah yang dihadapinya, antara lain keterlibatan sejumlah anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam aksi penculikan terhadap para aktivis prodemokrasi.

"Saya percaya ABRI akan secara sistematis, bijaksana dan arif menyelesaikan masalah itu," katanya, saat itu.

Dua hari berselang, Senin (20/7), Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menegaskan, jika Dewan Kehormatan Militer (DKM) memang diperlukan untuk mengusut kasus itu, maka akan diumumkan dengan jelas.

Sementara itu, Puspom ABRI telah memeriksa setidaknya 11 anggota Kopassus yang diperkirakan terlibat dalam kasus penculikan. Bahkan Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal menjanjikan bahwa berkas pemeriksaannya, sebagian sudah akan tuntas Sabtu (25/7).

Terkait dengan hal ini, kemarin Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto meminta agar masyarakat sabar dan menunggu hingga pemeriksaan terhadap oknum Kopassus itu selesai.

"Tidak usah dikomentari dulu. Percayalah, ABRI dengan segala keikhlasan dan

Bersambung ke hal.8 kol 4

Derita Korban Culik

Kulit Ngilu Selama Seminggu

LUKA jiwa yang dialami para korban penculikan tampaknya tak pudar begitu saja begitu mereka dibebaskan. "Trauma itu masih sering saya rasakan, terutama kalau lagi sendirian," kata Faisal Reza mahasiswa semester akhir Fakultas Sastra UGM, Sabtu (25/7).

Reza adalah satu di antara korban penculikan yang sudah menghirup udara bebas. Meski, ia sendiri akui, masih belum bebas betul dari rasa takut.

"Kalau sedang sendirian, atau bepergian naik kendaraan. Apalagi kalau saya mentidak melapor ke polisi, apalagi konferensi pers atau mengadu ke LBH.

Ia sama sekali dilarang menceritakan hal sebenarnya kepada siapa pun, bahkan kepada keluarga. Kalau tiga hal ini dilanggar, penculik mengatakan tidak segan-segan akan menghabisi Reza dengan cara apa pun meski ia minta pelindungan Panglima ABRI.

Mereka, katanya, akan memburu Reza tanpa menghilangkan kesempatan sedetik pun. "Mereka bilang gerakan mereka tidak bisa dicegah kekuatan apa pun.

Kodim Jakarta Timur, Kodam Jaya dan dalam batas-batas

Presiden - - -

Sambungan dari hal.1

keterbukaan akan mengusutnya secara tuntas. Karena pengusutan terhadap oknum ABRI itu, memerlukan pentahapan dan proses," ujarnya.

"Saya tidak ingin mendahului proses pengusutan. Sebab itu berarti kita menyalahi asas praduga tak bersalah dan sudah akan mempengaruhi pengusutan itu sendiri secara adil, terbuka dan jujur," ujar Wiranto kepada wartawan di Gunungkidul, Sabtu (25/7).

Wiranto menegaskan, ABRI akan transparan dan jujur serta melakukan pengusutan sesuai dengan keadaan senyatanya dalam kasus penculikan terhadap para aktivis tersebut. "Itu itikad ABRI. Kalau ada oknum ABRI yang salah, ABRI tidak ragu-ragu untuk menindak, agar legitimasi ABRI secara keseluruhan dapat dipertahankan," tegasnya.

Namun, Jenderal Wiranto juga mengingatkan, bila ada oknum ABRI yang salah, janganlah kemudian divonis bahwa ABRI semuanya jelek. "Ini yang saya sayangkan. ABRI itu milik rakyat dan ABRI tidak mungkin akan mencederai rakyatnya sendiri," tegasnya.

Bila ABRI dalam menangani permasalahan ada yang salah dan tidak pas, juga tidak akan ragu-ragu meminta maaf dan berusaha membersihkan diri. "Nah, harapannya rakyat (bersedia) membantu. Maka kalau sudah ada itikad, ya beri kesempatan," pintanya. (**ryo/als**)

mereka kesulitan menanggungnya," kata Reza. (**ff**)

Kedaulatan Rakyat
26 Juli 1998

18 JULI 1998

Puspom ABRI mengumumkan tambahan tiga oknum terlibat dalam aksi penculikan aktivis. Sudah 10 oknum pasukan elite Kopassus terlibat dalam aksi penculikan.

> **"Pengusutan dan pengungkapan kasus pen-culikan oleh oknum kopassus ini ibarat pil pahit bagi ABRI. Tapi, wa-laupun pahit, obat harus ditelan."**
>
> | ***Mayjen Syamsu Djalaluddin**, Dan Puspom ABRI, dalam laporan Tajuk ("Mengusut Pil Pahit ABRI", 23 Juli 1998)*

Tajuk
23 Juli 1998

MAYJEN SYAMSU DJALALUDDIN, S.H.:

Mengusut Pil Pahit ABRI

Pangab Wiranto menurunkan perintah pengusutan terhadap pelaku penculikan. Tujuh oknum Kopassus diketahui terlibat. Selang beberapa hari, Puspom mengumumkan tambahan tiga oknum lagi. Jadi, sampai hari Sabtu (18/7), sudah sepuluh oknum pasukan elite itu yang dipastikan terlibat dalam aksi penculikan.

HARAPAN masyarakat kini berada di tangan Mayjen (CPM) Syamsu Djalaluddin, S.H. Sebagai komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, ia ketiban tugas berat yang kini menjadi sorotan ramai di dalam dan luar negeri. Yakni, mengusut dalang kasus penculikan sejumlah aktivis, dan kerusuhan berdarah di Jakarta pada tanggal 13-14 Mei lalu. Karena Syamsu dan Puspom, orang yang diusut dalam kasus ini jelas oleh kita: oknum militer. "Siapa pun yang bersalah di negara hukum ini harus diperiksa dan diproses secara hukum," tegas Syamsu kepada wartawan.

Benar: siapa pun, kata Syamsu. Pria kelahiran Padang ini tidak sedang basa-basi. Ia dan tim pemeriksa dari Puspom segera menunjukkan hasil kerjanya, tak lama setelah

Selesai? Masih banyak hal yang perlu diklarifikasi Syamsu dan pasukannya. Adakah ini pekerjaan oknum Kopassus semata, tanpa keterlibatan satuan lain? Siapa sebenarnya penyusun skenario dan menurunkan perintah penculikan? Benarkah Letjen Prabowo Subianto, yang ketika itu menjabat danjen Kopassus? Ataukah, ada komando dari lapisan di atasnya, dalam hal ini Mabes ABRI?

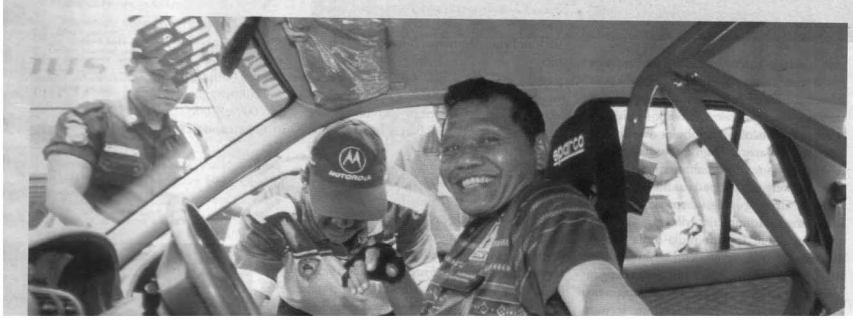

Kecuali itu, Puspom juga menyusuri di mana sebenarnya para aktivis itu ditahan. Dan, para aktivis yang belum kembali itu sekarang berada di mana, bagaimana nasibnya.

Tugas yang tak ringan, dan barangkali amat merepotkan Syamsu. Tapi, barangkali, inilah risiko yang mesti ditanggungnya lantaran kecintaannya yang kelewat berat terhadap sosok polisi militer. "Saya pilih korps ini karena saya melihat lembaga ini sebagai penegak hukum disiplin," katanya. Ini dilakukannya setelah lulus Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1965. Sebagai lulusan 10 terbaik, pria yang seangkatan dengan Letjen Yunus Yosfiah (kini menteri penerangan) dan Letjen Tarub (mantan kasum ABRI) itu berhak menentukan pilihan. Ya, korps polisi militerlah pilihannya. "Saya sendiri sejak kecil sudah dididik dalam kedisiplinan yang ketat di asrama."

Masa kecilnya memang hampir habis di asrama. Ia tinggal di situ lantaran sudah yatim piatu sejak usia delapan tahun. Kebetulan, tak jauh dari asramanya itu, berdiri asrama tentara. Lingkungan itulah yang menggugah imajinasinya. Obsesinya terhadap tentara yang selalu tampil gagah kian menjadi-jadi. Apalagi, korps polisi militer, dengan helm putihnya, tampak tegap dan rapi. Itu makanya, ketika berlayar ke Pulau Jawa dan menyelesaikan SMA-nya tahun 1962 di Cirebon — di sana ia tinggal bersama kakaknya —

Syamsu lalu memasuki AMN. Tujuannya sudah jelas, menjadi polisi militer.

Begitu tamat AMN, sulung dari empat bersaudara ini bergabung dengan satuan Pomad Para. Inilah satuan tugas khusus dari polisi militer yang berkualifikasi para. Ketika itu, Syamsu ikut serta dalam aksi penumpasan G-30-S/PKI. Dua tahun berselang, penerima enam bintang tanda jasa ini ditarik ke Istana Presiden. Yang berdinas di Istana Presiden saat itu memang korps polisi militer. Selama empat tahun di sana, ia sempat menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto.

Istana Presiden sebenarnya masih menginginkannya untuk bertugas di sana. Tapi, korps polisi militer yang menjadi kesatuannya lebih membutuhkan tenaganya. Maka, sejak 1976, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah bertugas di Kalimantan tahun 1976, ia ditarik ke Jakarta menjadi kepala biro operasi Pomdam V Jaya. Pernah pula ia bertugas di Kodam VIII/Trikora, sebagai komandan Pomdam tahun 1988. Tiga tahun kemudian, ia memegang posisi yang sama di Kodam VII/Wirabuana. Inilah posisi terakhirnya di teritorial, sebelum akhirnya ditarik ke Jakarta tahun 1995 sebagai komandan Puspom ABRI. Bintang satu di pundaknya. Pada 1 Juni 1997, jabatan ini dinaikkan pamornya menjadi bintang dua.

ADEK BERRY

MAYJEN SYAMSU DJALALUDDIN, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Padang, 22 Desember 1943
Agama : Islam

PENDIDIKAN
Akademi Militer Nasional, 1962-1965
Suslapa POM, 1973
Seskoad, 1983
Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1996

KARIER
Komandan Peleton I Pomad Para, 1967
Komandan Kompi C, 1970-1971
Komandan Satwal Denwalpri Satgas Pomad, 1972-1975
Wakil Komandan Denwalpri Satgas Pomad, 1975-1976
Dan Pomdam VIII/Trikora, 1988
Dan Pomdam VII/Wirabuana, 1991
Dan Puspom ABRI, 1995-...

Tapi, karier seseorang senantiasa mengikuti logika tua tentang sebatang pohon. Makin tinggi pohon itu, makin besar pula angin yang menerpanya. Sebagai komandan Puspom ABRI, Syamsu kini berhadapan dengan kasus dalam tubuh ABRI yang perlu diurainya dengan sepenuh hati. Jika semangatnya ala kadar, tak cuma pihak ABRI yang dirugikan, tapi juga masyarakat luas, yang kian tak percaya dengan lembaga itu. Prestasi dan reputasi Syamsu sendiri, amat mungkin, akan sirna. Padahal, gerak-gerik dan gebrakannya sejak memimpin Puspom selama ini cukup menyentak dan menyegarkan.

Masih teringat, ketika Dwi Sumaji alias Iwik dibebaskan majelis hakim PN Bantul, Syamsu langsung angkat suara. Ia memerintahkan Komandan Detasemen Polisi Militer Yogyakarta mengusut kasus dan mengungkapkan siapa pembunuh Udin sebenarnya. Tatkala pecah kasus aborsi massal yang melibatkan seorang dokter militer berpangkat letnan kolonel TNI AD, polisi militer pun langsung turun tangan.

Tak jarang, lembaga ini langsung turun ke lapangan. Menindak para prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin, terutama yang dilakukan di luar kesatuannya. Untuk itu, Puspom menggelar operasi yang diberi nama Operasi Penegakan Disiplin dan Tata Tertib (Gadtib) ABRI. Polisi Militer juga turut serta memperkuat Operasi Sapu Bersih dan Operasi Kilat Jaya yang digelar Bakorstanas. Sasarannya adalah oknum ABRI yang membekingi berbagai macam kejahatan seperti perjudian, pungli di jalan raya, juga penjualan kendaraan bermotor curian.

Sampai-sampai, pernah muncul pertanyaan dari anggota DPR, yang mempertanyakan eksistensi lembaga ini. "Puspom itu apa sih, kok melakukan penggerebekan segala?" begitu tanya si anggota Dewan. Syamsu menanggapi komentar itu dengan tenang, tidak risau. "Sebab, saya sadar, ternyata tidak semua orang mengetahui lembaga polisi militer. Mereka belum paham tugas dan wewenang lembaga ini," katanya.

Di tengah kerepotan mengurusi disiplin prajurit dan beking-bekingan ini, Syamsu kini mencoba menguak aktor intelektual di balik aksi penculikan itu. "Pengusutan dan pengungkapan kasus penculikan oleh oknum Kopassus ini ibarat pil pahit bagi ABRI. Tapi, walaupun pahit, obat harus ditelan," kata Syamsu, mantap. Semua orang berharap, Syamsu bersama timnya bisa memberikan obat yang paling pahit: tokoh puncak dari aksi penculikan ini. Hanya dengan cara begitu, citra ABRI akan membaik, dan masyarakat akan tenang. Tidurnya nyenyak, tanpa diganggu lagi oleh mimpi buruk tentang teror dari orang yang semestinya melindunginya. ▲

Suryansyah

Tajuk
23 Juli 1998

19 JULI 1998

Pada pukul 13.58 WIB, pesawat Garuda GA-827 dari Amsterdam mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Salah seorang penumpangnya, Pius Lustrilanang, segera disambut dan dieluk-elukkan penjemput. Para penjemput yang merupakan para aktivis itu mengenakan topeng ala penculik dengan mengibarkan poster besar bergambar *close up* Prabowo Subianto dengan tulisan: WANTED.

Tajuk
23 Juli 1998

nyaris tak bisa membayangkan masa depan ABRI tanpa menyebut namanya, seperti mereka hampir tak mampu melihat Indonesia tanpa kepemimpinan Soeharto – mertuanya.

Tapi, alangkah cepat pula roda masa berputar. Yang tak terbayangkan itu pun terjadi. Kamis pagi, 21 Mei, Presiden Soeharto *lengser keprabon*. Sehari sesudahnya, Prabowo kehilangan kursi Panglima Ko-mando Cadangan Strategis (Pangkostrad) yang baru dua bulan didudukinya. Sesu-dahnya, beredarlah kabar tentang segala sisi buram sang jenderal, yang dulu tertutup ke-mencorongan posisinya.

Mulai dari aksi ala Gringo Honasan yang dilakukannya ketika mengepung istana untuk memaksa Presiden B.J. Habibie menuruti kehendaknya, sampai ke pribadinya yang temperamental. Mulai dari tudingan bahwa ia berdiri di belakang aksi-aksi penculikan para aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, dan bahkan Kerusuhan 13-14 Mei, sampai ke klik dan intrik di kalangan elite ABRI yang dibangunnya.

Lebih seru lagi, kini hampir semua kekacauan dihubungkan dengan Prabowo. Di jaringan Internet apakabar@clark.net, misalnya, ada *posting* yang mengaitkan Prabowo dengan tindak intimidasi yang menyebabkan ratusan warga pendatang di Timtim melakukan eksodus. Di luar negeri, Majalah *Time* menjulukinya *the raging bull* – kerbau liar.

Dan, lihatlah bagaimana publik kini memperlakukan sang bintang yang jatuh itu. Ahad lalu (19/7), saat menjemput kepulangan Pius Lustrilanang – salah seorang korban penculikan itu – di Bandara Soekar-no-Hatta, para aktivis yang bertopeng ala para penculik mengibarkan poster besar bergambar *close-up* Prabowo dengan tu-lisan: *Wanted*. Sebuah media, menyuarakan tuntutan sebagian publik, menulis dengan judul besar-besar: Seret Prabowo ke Pengadilan.

Sejak mahkamah militer luar biasa yang mengadili para anggota militer yang terlibat Pemberontakan G-30-S/PKI, sejak Orba berdiri dan lalu runtuh, inilah kali pertama seorang jenderal aktif dituntut untuk diajukan ke pengadilan.

Namun, tuntutan itu bukannya tak beralasan. Pekan lalu, Pangab Jenderal Wiranto menyatakan, aksi penculikan para aktivis itu dilaksanakan untuk mengungkap "gerakan radikal" atas perintah pimpinan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Prabowo adalah komandan jenderal (danjen) Kopassus ketika

DAN GRUP IV KOL. CHAIRAWAN. Pernah sukses dalam operasi pembebasan sandera di Irian Jaya.

aksi-aksi penculikan itu terjadi. Sebelumnya, Wiranto mengumumkan indikasi keterlibatan oknum Kopassus dalam aksi penculikan itu.

Wiranto juga memerintahkan pembentukan Dewan Kehormatan Militer (DKM) untuk memeriksa sejumlah perwira tinggi yang diduga terlibat dalam kasus itu. Disebut-sebut, termasuk di antara anggota DKM itu adalah Kepala Staf Umum (Kasum) Letjen Fachrul Razi (Akabri 70), Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (Akabri 73), dan Gubernur Lemhannas Letjen Agum Gumelar (AMN 68). Melihat jajaran tiga bintang yang bertengger di pundak para pati itu, hampir bisa dipastikan, Prabowo (Akabri 74) akan menjadi salah satu tersangka yang akan diperiksa.

Wiranto menyampaikan rencana pembentukan DKM itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Polkam Senin pekan ini (20/7). Menurut Menkeh Prof. Muladi, Pangab membeberkan secara terbuka serangkaian kasus yang kini ditangani ABRI — dari penculikan sampai kerusuhan dan perkosaan yang memilukan hati itu (lihat: bagian perkosaan). Termasuk kasus Prabowo? "Semuanya, tak ada yang ditutup-tutupi," ujar Muladi ketika dicegat *Tajuk*. Rakor, katanya, juga menyepakati, kasus itu dituntaskan melalui dua cara: pembentukan DKM dan pengadilan militer.

DKM terakhir kali dibentuk pada akhir Desember 1991 untuk mengusut Peristiwa 12 November 1991 di Dili, Timtim. Dewan yang diketuai Dansesko AD (ketika itu) Mayjen Feisal Tanjung (kini menko polkam) itu dibentuk melalui wewenang Presiden Soeharto selaku panglima tertinggi ABRI – yang baru sekali itu digunakannya.

Salah satu rekomendasi DKM itu adalah me-*non-job*-kan Mayjen Sintong Panjaitan dan memberhentikan Brigjen Rudolf S. Warouw. Sintong (kini sesdalopbang) dan Warouw (kini ketua KONI) masing-masing adalah pangdam IX/Udayana dan pangkolakops yang bertanggung jawab atas pecahnya insiden yang menewaskan sedikitnya 50 orang itu.

Mungkinkah tindakan yang sama akan dikenakan atas Prabowo — bila ia terbukti bersalah? Menurut sumber *Tajuk*, disposisi Wiranto soal pembentukan DKM itu sebenarnya sudah turun sejak pertengahan bulan ini. Disposisi itu ditujukan kepada Kasum, dan bukannya Inspektur Jenderal (Irjen) ABRI Laksamana Madya TNI Suratmin – yang secara struktural berwenang mengusut pelanggaran prosedural di jajaran militer. Alasannya, karena Wakil Irjen saat ini dijabat oleh Mayjen Muchdi P.R., mantan danjen Kopassus yang diganti bersama Prabowo Mei lalu. Muchdi dikenal sebagai teman dekat Prabowo. Bahkan, ada kemungkinan, ia termasuk dalam sejumlah pati yang akan diperiksa DKM itu.

Rencananya, DKM itu sudah bisa bekerja mulai akhir bulan ini. Namun, belakangan, muncul rencana untuk menunda dulu sampai digelarnya pengadilan militer bagi para oknum Kopassus yang kini ditahan di Puspom itu. Penundaan tersebut, kabarnya, juga terkait dengan belum tuntasnya "konsolidasi internal" di ABRI.

Pekan ini, Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) yang juga Komandan Puspom (Danpuspom) ABRI Mayjen Syamsu Djalaluddin menyatakan, pemeriksaan berkas perkara tujuh oknum Kopassus itu bisa dilimpahkan ke Mahmil pada akhir bulan ini. Sumber-sumber *Tajuk* menyebut, para tersangka itu datang dari lapis perwira menengah. Di antaranya, Kol. Chairawan, Mayor Sembiring, dan Kapten Yulius — ketiganya dari Grup IV Kopassus. Chairawan adalah ko-mandan grup intelijen satuan elite Baret Merah, yang pernah sukses dalam operasi pembebasan sandera di Irian Jaya (lihat: boks Kopassus).

Bagaimana dengan Prabowo? Menurut Syamsu, ia sudah bertemu dengan jenderal bertubuh gempal itu di Mabes ABRI Cilangkap – saat ia menghadap Wiranto. Prabowo menyatakan kesediaannya untuk diperiksa.

Tajuk
23 Juli 1998

Pekan lalu, ketika menghadiri peresmian kursus reguler di Sesko ABRI di Bandung, Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan para perwira Kopassus tersebut. Kata Syamsu kepada pers, bila Pangab menyetujuinya, pemeriksaan itu bisa dimulai pekan depan.

Pertanyaannya kini: Apa motif penculikan itu, serta benarkah hanya Prabowo dan satuan Kopassus yang terlibat? Sampai awal pekan ini, Prabowo – sayangnya – belum bersedia memberikan keterangan. Namun, menurut se-jumlah sumber *Tajuk* yang dekat dengannya, suami Titiek Soeharto itu bukannya tak menyadari tudingan yang kini terarah kepadanya. "*I am a gutter.* Saya kini sampah. Sementara, semua orang berlagak suci," kata

Versi pertama menyebut, Prabowo bertindak sendiri. Kepada *Tajuk*, seorang mantan pati Kopassus menyampaikan dugaan: dalam serangkaian aksi yang kini ditudingkan kepadanya itu, Prabowo bertindak *one man show.*

Indikasinya, kata si pati, keterangan Wadanjen Kopassus Brigjen Idris Gasing, yang mengaku tak tahu-menahu adanya serangkaian operasi itu. Ia bilang, mengutip keterangan Gasing, "Maaf, Pak, saya betul-betul tak tahu. Ini *one man show*, Pak." Gasing, kata sang jenderal ini, baru tahu adanya keterlibatan Kopassus setelah Pius membuka mulut.

Ada gunjingan, memang, seputar kebiasaan Prabowo selama ini dalam mem-*by pass* para atasannya. Misalnya, ia pernah mendatangkan bermacam senjata canggih dari luar

DAHLAN IP

KETIKA KERUSUHAN MEI. Hampir semua kekacauan dihubungkan dengan Prabowo

jenderal yang menguasai lima bahasa asing itu, seperti ditirukan salah seorang sumber itu kepada *Tajuk.*

Bahwa Prabowo kini memilih diam, masih kata si sumber ini, itu karena, "*I don't want to rock the boat* (Saya tidak ingin mengacaukan situasi)." Sesudah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab, Prabowo kini menunggu respons dari jajaran pimpinan ABRI. Namun, bila terpaksa, ia akan siap membeberkan semuanya.

Membeberkan semuanya? Sejauh ini, memang ada dua dugaan berkenaan dengan keterlibatan Prabowo dan satuan Kopassus itu.

negeri tanpa sepengetahuan dan persetujuan atasannya. Ia juga, kabarnya, pernah mengge-rakkan pasukan dari satuan lain tanpa berkoordinasi terlebih dahulu de-ngan komandan satuan itu. Maklumlah, sebagai menantu Presiden, Prabowo adalah jenderal paling berpengaruh di ABRI.

Prabowo, kata sumber-sumber *Tajuk* lainnya, juga berpengaruh dalam pengisian pos-pos elite di jajaran ABRI. Salah satu kasus yang sering disebut adalah naiknya Mayjen Muchdi P.R. ke posisi danjen Kopassus. Kabarnya, ketika itu calon yang diajukan Wiranto (waktu itu KSAD) adalah Mayjen I Nyoman Sang Suwisma, kini pangdam VI/Tanjungpura. Namun, keputusan Wiranto ini "dipotong" Prabowo me-lalui Sjafrie Sjamsoeddin — yang dikenal sangat dekat dengan Pak Harto. Prabowo akhirnya sukses menaikkan Muchdi, dan "menukar" Suwisma mengisi posisi yang ditinggalkannya. Hal inilah yang memicu isu tentang perkubuan di ABRI (lihat: *Tajuk* No. 10 Th. I)

Masalahnya: Mungkinkah Prabowo – dengan segala pengaruhnya – mampu melakukan tindakan *one man show* itu? Sebuah sumber militer *Tajuk* lainnya memustahilkan kemungkinan itu. Dari segi motif, ia mempertanyakan niat Prabowo memerintahkan aksi penculikan tersebut. "Untuk unjuk kekuatan? Namanya tugas rahasia kok ditunjukkan, kan mustahil," ujarnya.

Karena itu ia menduga, ada kepentingan lain yang lebih besar yang mungkin melatarbelakangi aksi-aksi itu. Bahkan, aksi penculikan ini disebut-sebut merupakan rangkaian tak terpisahkan dari aksi-aksi sebelumnya; seperti Kerusuhan Situbondo, Ta-sikmalaya, dan lain-lain, serta aksi-aksi pasca-penculikan, seperti Kasus Trisakti dan penjarahan massa itu. Dan, bila itu yang terjadi, tentulah aksi tersebut tak bisa dilakukan Prabowo sendiri. Siapa kalau begitu? "Bisa Pangab sebagai atasan langsung, atau malah mungkin Presiden selaku pangti," katanya. Pangab waktu itu adalah Jenderal Feisal Tanjung, kini menko polkam.

Secara teoretis, tindak *one man show* itu juga sukar terjadi. Karena, ABRI dikenal dengan hierarki komandonya yang luar biasa ketat. Si sumber tadi mencontohkan, bila seorang kopral menerima perintah dari seorang komandan kompi, ia harus melapor kepada komandan regunya. Lalu, si komandan regu melaporkan perintah tadi ke komandan peletonnya, demikian seterusnya.

Keterangan hampir senada datang dari Mayjen (purn.) Syamsuddin. Menurut anggota Komnas HAM yang juga mantan pati Kopasandha (cikal bakal Kopassus) itu, Kopassus adalah satuan komando. Ia tidak dibenarkan bertindak sendiri tanpa koordinasi dengan panglima teritorial setempat. Apalagi menyangkut operasi intelijen, yang semestinya hanya digunakan pada kondisi darurat perang. Satuan intelijen Kopassus bisa digunakan pada operasi non-perang, bila diminta oleh sang panglima teritorial. Dengan demikian, "pemakaian" aparat Kopassus untuk

Tajuk
23 Juli 1998

operasi di kawasan DKI Jakarta, misalnya, haruslah ada koordinasi dengan pangdam Jaya.

Indikasi lain adalah beragamnya asal kesatuan para oknum ABRI yang kini diperiksa TPF itu. Kata Syamsu, 23 orang saksi militer yang diperiksa itu berasal dari Kopassus, Kodam Jaya, Kodim, dan Babinsa. Asintel Kodam Jaya Kolonel Masni Harun termasuk di antara mereka. Tak tertutup kemungkinan, status mereka akan "meningkat" menjadi tersangka. Syamsu juga tak memustahilkan kemungkinan diperiksanya mantan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin.

Sumber-sumber *Tajuk* juga menunjuk kemungkinan keterlibatan Badan Intelijen ABRI (BIA) dalam kasus itu. Kabarnya, oknum ABRI yang menyerahkan Andi Arief ke tahanan Polda Metro Jaya adalah Direktur A BIA bersama seorang kolonel dari lembaga yang dipimpin Mayjen Zaki Anwar Ma-karim itu. Zaki disebut-sebut sebagai salah seorang pati yang mungkin akan diperiksa DKM itu. Banyaknya kesatuan yang terlibat ini menunjukkan, hampir mustahil bila operasi itu dijalankan Prabowo dengan Kopassus-nya.

Jadi? Sumber-sumber dekat Prabowo juga membantah bahwa ia bertindak *one man show*. Prabowo, kata salah seorang sumber ini, tak pernah memerintahkan dilakukannya penculikan. Yang dia komandokan adalah upaya menyingkap gerakan-gerakan radikal yang ditengarai akan merongrong kepemimpinan nasional menjelang dan pada saat berlangsungnya Sidang Umum MPR Maret lalu.

Operasi itu, konon, diberi nama Operasi Pengamanan Kepemimpinan Nasional (OPKN). Tujuannya mengamankan pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden ketujuh dan naiknya B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Untuk itu, semua rintangan – ya kelompok-kelompok radikal tadi – mesti dirapikan (lihat: bagian II). Yang menarik, menurut si sumber ini, Prabowo mengaku, ia menerima Surat Perintah (Sprint) dari Pangab Feisal Tanjung untuk menjalankan operasi itu.

Feisal terlibat? Dugaan ini ditampik mantan pati Kopassus tadi. Menurutnya, OPKN – bila memang ada – bukanlah suatu operasi khusus. Melainkan, operasi yang rutin digelar setiap lima tahun. Karena, Rencana Strategis (Renstra) ABRI sendiri menggariskan, pengamanan pemilu, SU MPR, serta hasil-hasilnya, sebagai kebijakan dasar ABRI. Jawaban Danpuspom Syamsu Djalaluddin lebih tegas lagi. "Tidak ada itu perintah dari Pangab lama, Pangab baru, atau malah Pangti. Jangan *ngarang-ngarang*," tukasnya kepada pers Senin pekan ini.

Ngarang atau bukan, jelas bahwa tugas DKM untuk mengurai benang kusut Kopassus itu tak bakal bisa selesai dalam waktu semalam. DKM pimpinan Feisal Tanjung di tahun 1991 lalu membutuhkan waktu kerja 50 hari sebelum menelurkan rekomendasinya.

Namun, ada yang tak kalah penting dari sekadar mengusut dan mengadili para pelaku penculikan, penembakan, dan pemicu kerusuhan tersebut. Rangkaian peristiwa pahit yang memicu jatuhnya korban harta, kehormatan, dan jiwa, itu menjadi pelajaran sangat pahit. Bukan cuma untuk ABRI, melainkan juga kita sebagai bangsa.

ANTARA

MUCHDI, PRABOWO DAN SOEHARTO. Prabowo sukses menaikkan Muchdi ke posisi danjen Kopassus

Itulah pelajaran bahwa sudah waktunya kita membatasi kewenangan lembaga-lembaga yang berpotensi menjadi teror bagi masyarakat — apalagi bila ia bersenjata. Di masa lalu, kita mengenal lembaga Opsus (Operasi Khusus) dan Kopkamtib (Ko-mando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang *free-wheeler*, bahkan ekstra konstitusional. Rentang wewenang operasi intelijen militer yang begitu luas melahirkan pelbagai bentuk pelanggaran HAM: mulai dari Timtim, Aceh, Irja, Tanjungpriok, Lampung, sampai Insiden 27 Juli (lihat: rubrik *Politik*). Nah, semua itu pada gilirannya memburamkan citra Indonesia, sebagai negara militer tak demokratis yang gemar menindas hak-hak asasi rakyatnya.

Kini, dengan semangat reformasi dan demokratisasi yang melanda segenap lapisan masyarakat, seluruh wewenang yang nyaris tak berbatas itu mesti ditinjau kembali. Sebagai perbandingan, pecahnya Skandal Watergate, yang *melengserkan* Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat, diikuti dengan pemantauan publik atas kiprah lembaga-lembaga intelijen seperti CIA, yang dinilai telah melanggar hak-hak sipil rakyat. Di negeri itu, ada Komite Intelijen Senat yang mengawasi dan mengendalikan kiprah lembaga-lembaga semacam itu.

Kini, sejalan dengan semangat memberdayakan DPR, mungkin perlu dipikirkan pula adanya lembaga serupa di Indonesia. Sehingga, ada akuntabilitas lembaga intelijen dan militer kepada rakyat, yang – sejati-nya – adalah pemilik kedaulatan tertingi di negeri ini. Bila itu terjadi, mungkin kita tak perlu lagi memiliki – dan kehilangan – seorang bintang cemerlang, seperti Prabowo, yang justru jatuh karena tak ada kendali yang mengontrol kekuasaannya. ▲

Tim Investigasi Tajuk

Tajuk
23 Juli 1998

20 JULI 1998

Dalam Rapat Koordinasi Polkam, Pangab Jenderal Wiranto memaparkan secara terbuka serangkaian kasus yang ditangani ABRI, mulai dari penculikan hingga kerusuhan dan perkosaan. Kasus penculikan dituntaskan dengan dua cara: Pembentukan Dewan Kehormatan Militer (DKM) dan pengadilan militer.

DKM terakhir kali dibentuk pada akhir Desember 1991 untuk mengusut Peristiwa 12 November 1991 di Dili, Timor Timur. Dewan yang diketuai Danseskoad (ketika itu) Mayjen Feisal Tanjung itu dibentuk melalui wewenang Presiden Soeharto selaku panglima tertinggi ABRI yang baru sekali itu digunakannya.

Salah satu rekomendasi DKM itu adalah me-nonjobkan Mayjen TNI Sintong Panjaitan dan memberhentikan Brigjen Rudolf S. Warouw yang masing-masing adalah Pangdam IX/Udayana dan Pangkolakops yang bertanggung jawab atas pecahnya insiden yang menewaskan sedikitnya 50 orang itu.

Tajuk
23 Juli 1998

Wiranto juga memerintahkan pembentukan Dewan Kehormatan Militer (DKM) untuk memeriksa sejumlah perwira tinggi yang diduga terlibat dalam kasus itu. Disebut-sebut, termasuk di antara anggota DKM itu adalah Kepala Staf Umum (Kasum) Letjen Fachrul Razi (Akabri 70), Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (Akabri 73), dan Gubernur Lemhannas Letjen Agum Gumelar (AMN 68). Melihat jajaran tiga bintang yang bertengger di pundak para pati itu, hampir bisa dipastikan, Prabowo (Akabri 74) akan menjadi salah satu tersangka yang akan diperiksa.

Wiranto menyampaikan rencana pembentukan DKM itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Polkam Senin pekan ini (20/7). Menurut Menkeh Prof. Muladi, Pangab memberbekan secara terbuka serangkaian kasus yang kini ditangani ABRI — dari penculikan sampai kerusuhan dan perkosaan yang memilukan hati itu (lihat: bagian perkosaan). Termasuk kasus Prabowo? "Semuanya, tak ada yang ditutup-tutupi," ujar Muladi ketika dicegat *Tajuk*. Rakor, katanya, juga menyepakati, kasus itu dituntaskan melalui dua cara: pembentukan DKM dan pengadilan militer.

DKM terakhir kali dibentuk pada akhir Desember 1991 untuk mengusut Peristiwa 12 November 1991 di Dili, Timtim. Dewan yang diketuai Dansesko AD (ketika itu) Mayjen Feisal Tanjung (kini menko polkam) itu dibentuk melalui wewenang Presiden Soeharto selaku panglima tertinggi ABRI – yang baru sekali itu digunakannya.

21 JULI 1998

Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief, memberikan kesaksian atas penculikan dirinya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat. Dengan didampingi Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andi Arief menolak memberikan kesaksian kepada Puspom ABRI sebelum korban lain dikeluarkan, baik hidup maupun sudah meninggal. Aktivis yang diculik di Lampung ini menolak bila dalam operasi penculikan itu ada kesalahan prosedur. Dalam kesaksiannya, Andi Arief masih trauma untuk mengingat penyiksaan yang dialaminya selama 10 hari penyekapan: Mata ditutup, tangan diborgol, dan di bawah todongan pistol.

Andi Arief dibebaskan pada 14 Juli malam setelah melalui proses tarik ulur antara pihak kepolisian dengan Kontras selaku kuasa hukum selama dua pekan.

Kedaulatan Rakyat
6 Juli 1998

Andi Arief Dibebaskan

JAKARTA (KR) - Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief, dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya, Selasa (14/7) malam. Setelah itu, Andi langsung dibawa ke rumah orangtuanya di Lampung.

Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir SH, di Jakarta, Rabu (15/7), mengatakan, pembebasan Andi Arief merupakan hasil dari proses tarik ulur antara pihak kepolisian dengan Kontras selaku kuasa hukum selama dua minggu. "Ada pelbagai persoalan dalam masalah ini, dari ketidakmandirian kepolisian sampai masalah administratif," kata Munir.

Seperti diberitakan, Andi Arief, alumnus Fisipol UGM, diculik di Bandar Lampung 28 Maret 1998. Seperti korban lain, Andi disekap di suatu tempat, diborgol dan diinterogasi. Kemudian 17 April, Andi diserahkan ke Mabes Polri. Selama disekap, Andi mengaku bertemu dengan Haryanto Taslam, Raharjo Waluyo Jati dan Faisal Reza. Ketika itu, Dankopra Serse Mayjen Nurfaizi (kini Kapolda Jateng-red), tidak menyebutkan pihak mana yang menyerahkan Andi. Nurfaizi hanya mengatakan, Andi diambil Tim Anti Teroris Mabes Polri.

*** Bersambung hal 8 kol 8**

ersebut, sehingga perlu

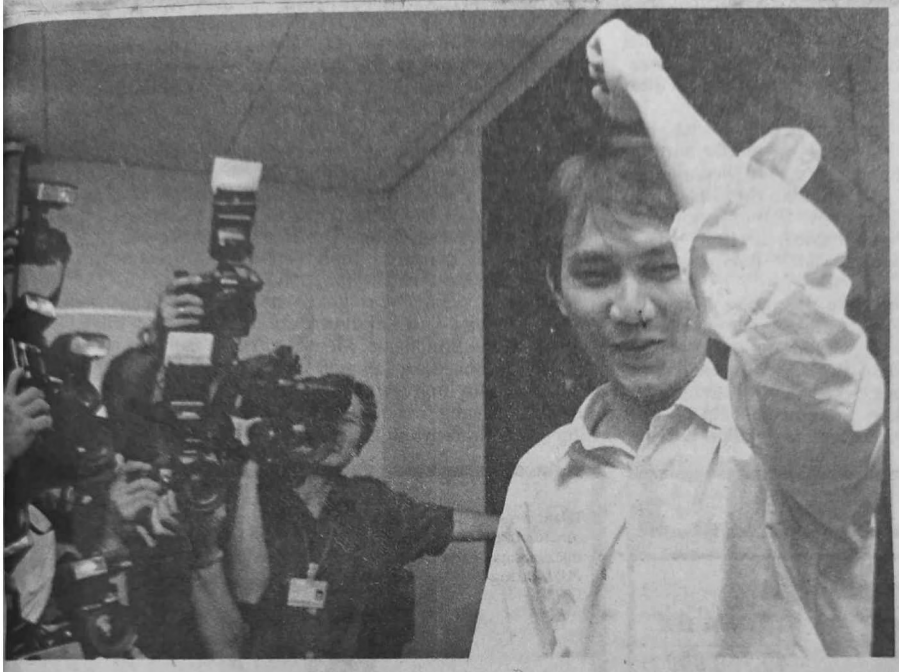

Andi Arief ketika datang ke YLBHI. KR-RTR

SEBELUM KORBAN LAIN DIKELUARKAN

Andi Takkan Beri Keterangan di Puspom

JAKARTA (KR) - Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief, yang diculik pada 28 Maret lalu, menyatakan, tidak akan memberikan keterangan kepada Puspom ABRI, sebelum korban penculikan lainnya dikeluarkan. "Saya tak akan memberikan keterangan sebelum korban lain dikeluarkan, baik hidup maupun sudah meninggal," kata Andi Arief dalam kesaksiannya kepada pers dan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (21/7).

Kendati demikian, ia sangat menghargai upaya Tim Pencari Fakta (TPF) Puspom ABRI. Andi juga mengungkapkan, dalam kasus ini pemerintah harus mengakui secara terbuka dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama.

Disinggung tentang kesalahan prosedur dalam melakukan penculikan, menurutnya, hal itu sangat tidak mungkin. Alasannya, ada beberapa aktivis yang diculik semasa pimpinan ABRI dipegang Feisal Tanjung. "Saya sendiri diculik setelah terjadi alih kepemimpinan di tubuh ABRI, yakni dipegang Wiranto. Jadi, tidak mungkin hal itu sebagai kesalahan prosedur," ujar Andi.

Ditanya mengenai penyiksaan, menurutnya, hal itu tak dialami. Namun, selama 10 hari disekap matanya ditutup, tangan diborgol, dan ditodong dengan pistol. Menghadapi kenyataan tersebut, ia hanya pasrah. Bahkan Andi mengaku masih trauma bila mengingatnya kembali.

Menanggapi kekhawatiran Andi Arief dan Pius Lustrilanang tentang korban penculikan yang meninggal, anggota Komnas HAM Clementino Dos Reis Amaral mengatakan, Komnas HAM belum memiliki data soal itu. "Namun kami punya kekhawatiran ke arah itu," kata Amaral. **(Ful)-f**

Kedaulatan Rakyat
22 Juli 1998

"Adili Prabowo! Kasus penculikan ini terjadi saat dirinya menjadi Danjen Kopassus."

| ***Bambang Widjojanto**, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, dalan berita Bernas "Adili Prabowo!", 22 Juli 1998*

Bambang: Adili Prabowo!

Jakarta, Bernas

Komandan Pusat Pom-ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal menegaskan, dari pengusutan intensif atas 10 oknum anggota Kopassus, tersangka dalam kasus penculikan para aktivis mungkin bertambah.

Sementara itu, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bambang Widjojanto SH menyatakan Letjen TNI Prabowo harus diadili dalam kasus tersebut, sebab ketika kasus itu terjadi yang bersangkutan menjabat Danjen Kopassus.

"Semua orang di muka hukum sama. Jangankan Prabowo, presiden pun bisa diadili jika terbukti melakukan tindak pidana," kata Bambang, di Ambon, Selasa (21/7).

Sebelum ini Danpuspom ABRI mengumumkan, telah memeriksa sekurang-kurangnya 40 orang termasuk 20-an anggota ABRI, terkait dengan kasus itu. Belakangan diumumkan lagi, tujuh anggota Kopassus jadi tersangka dalam kasus tersebut. Jumlah tersangka, kemudian bertambah lagi jadi sepuluh.

Menurut Bambang Widjojanto, indikasi keterlibatan oknum Kopassus dalam kasus ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Yang diperlukan sekarang apakah ada keleluasaan untuk melakukan penyidikan guna mendeteksi seberapa besar keterlibatan mereka.

Ini dimaksudkan agar kasus-kasus semacam ini tidak perlu terjadi lagi, baik di kalangan sipil maupun militer. "Terkadang orang memanfaatkan jabatan dan kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu, kendati yang dilakukan itu dengan cara-cara yang tidak lazim," katanya.

Ia mengakui, memang ada problem dalam penyelidikan kasus ini, terutama pemeriksaan terhadap perwira-perwira militer yang diduga terlibat. Karena itu, ia menganjurkan perlu dibentuk semacam tim verifikasi independen dengan tujuan apakah tindakan militer itu merugikan masyarakat sipil atau tidak.

Di tempat terpisah, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar tidak menolak kemungkinan pembentukan Dewan Kehormatan Militer (DKM) berkaitan dengan keterlibatan oknum perwira ABRI di jajaran Kopassus dalam penculikan.

Bersambung ke hal.8 kol 4

"Masih Hidupkah Suyat?"

Sragen, Bernas

Satu di antara korban penculikan yang melibatkan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), adalah Suyat (23), mahasiswa Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Solo. Hingga Selasa (21/7) orangtuanya mengaku belum menerima kabar mengenai nasib anaknya itu.

Ditemui di kediamannya, di Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Sragen, kemarin, keluarga Suyat mendesak ABRI segera membongkar kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM, termasuk Suyat.

Seorang korban penculikan, Pius Lustrilanang, setibanya dari luar negeri, Minggu (19/7) menyatakan khawatir, bahwa lima di antara korban penculikan itu mungkin telah meninggal.

Ist

Suyat tahun 1994

Sedangkan anggota Komnas HAM, Bambang W Soeharto, bahkan curiga, ke-12 orang yang kini masih tak jelas rimbanya itu, justru sudah meninggal. Hal serupa, juga dikemukakan Andi Arief, korban penculikan yang telah dikembalikan ke orangtuanya di Lampung.

Sementara itu, Andi Arief di kantor YLBHI Jakarta, kemarin menyatakan pernah diancam. "Kalau memberi keterangan jangan berbelit-belik, jika tidak mau di Deddy Hamdun'kan," kata Andi Arief, me-

Bersambung ke hal.8 kol 5

Bernas
22 Juli 1998

22 JULI 1998

Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI menjaring 11 oknum Kopassus sebagai tersangka. Tersangka ke-11 adalah komandan "Tim Lampung" yang menculik Andi Arief.

(22/7) menanggapi kasus Kepala pi pembubaran DPC PDI Sala- Bersambung ke hal. 8 kol. 6

Puspom ABRI Periksa Dan Grup IV Kopassus

Dua Belas Aktivis Belum Jelas Rimbanya

Jakarta, Bernas

Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI sudah menjaring 11 oknum Kopassus sebagai tersangka. Bahkan Rabu (22/7) kemarin telah memeriksa Komandan Grup IV Sandi Yudha Kopassus, Kol Inf Chairawan, walau hasilnya belum dijelaskan. Namun masih belum jelas nasib 12 aktivis yang menjadi korban penculikan.

Hal itu terungkap pada pertemuan antara keluarga enam "orang hilang" dengan Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal, di Markas Puspom ABRI, Jakarta, Rabu petang.

Sejauh ini tidak ada penjelasan, apakah ke-12 orang yang diyakini Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) masih disekap itu dipindahkan tempat penyekapannya, sudah dibebaskan, atau malah sudah meninggal dunia. Yang pasti, menurut

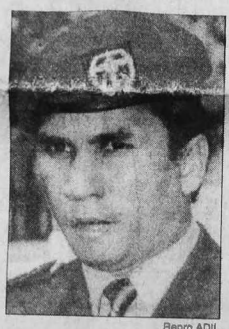

Repro ADIL

Kol Inf Chairawan

Syamsu, mereka tidak ditemukan di tempat penyekapan yang berada di kompleks Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. "Yang ditahan di sana tidak ada lagi," kata Syamsu tentang hasil pemeriksaan tim penyidik.

Seperti diketahui, Kopassus yang tadinya 3 grup, pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto (1996) dimekarkan menjadi 5 grup. Dengan pemekaran itu, Kopassus yang mulanya dipimpin Dankopassus dengan pangkat Brigjen menjadi dipimpin Danjen Kopassus dengan pangkat Mayjen.

Kelima grup itu adalah Grup I (para-komando) di Serang; Grup II (para-komando) di Kartasura; Grup III (pusdik) di Batujajar, Bandung; Grup IV (sandi yudha, intelijen) di Cijantung, dan Grup V (antiteror) di Cijantung.

Menjawab wartawan, Syamsu mengakui khusus untuk penangkapan empat aktivis PRD — Andi Arief, Nezar Patria, Mugiyanto, dan Aan Rusdiyanto — terdapat indikasi keterlibatan Badan Intelijen ABRI (BIA), Kodam Jaya, Kodim Jakarta Timur, dan Koramil Duren Sawit Jakarta Timur.

Sebelumnya, kecurigaan tentang keterlibatan jajaran di luar Kopassus itu memang telah diungkapkan beberapa korban penculikan yang telah dilepas, antara lain Andi Arief.

Seperti diberitakan, hingga Ahad lalu jumlah tersangka baru 10 orang. Menurut Kol CPM Sudirman Panigoro, tersangka ke-11 adalah komandan "Tim Lampung" (kasus penculikan Andi Arief red).

Sudirman tidak mengungkapkan pangkat tersangka, kecuali menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang perwira. "Bisa mayor, bisa letkol, bisa kolonel," kilahnya seraya menambahkan bahwa ber-

Bersambung ke hal. 8 kol. 6

Puspom - - -

Sambungan dari hal. 1

kas perkara ke-11 tersangka diharapkan selesai Sabtu mendatang.

Rabu kemarin keluarga enam korban penculikan datang ke Puspom ABRI untuk mendesak Danpuspom ABRI agar memberikan kepastian tentang nasib 12 korban penculikan sekaligus membebaskannya.

Para keluarga korban yang didampingi aktivis Kontras itu antara lain aktris Eva Arnaz (istri Dedi Hamdun), ibunda Yani Apri dan orangtua Petrus Bhimo Nugraha. Keenam wakil keluarga membawa foto korban berukuran besar, seperti yang lazim terlihat pada upacara pemakaman.

Kedatangan para keluarga keenam korban itu didasari asumsi bahwa Puspom ABRI yang telah memeriksa 11 tersangka oknum Kopassus tentu telah mengetahui pelaku penculikan, tempat penyekapan, dan nasib korban yang belum kembali. Namun jawaban yang didapat hanya sebatas bahwa di tempat penyekapan yang berlokasi di kompleks Kopassus tidak ditemukan lagi orang yang ditahan. **(dob/wip)**

Bernas
23 Juli 1998

"Perwira ABRI yang diajukan ke Dewan Kehormatan Militer (DKM) bisa diseret ke Mahkamah Militer jika perbuatannya dinyatakan mengandung unsur pidana.
Pembentukan DKM biasanya dilaksanakan untuk mengetahui dan mengusut sejauh mana keterlibatan perwira ABRI, pengetahuannya akan etika perwira, atau kemungkinan sebagai pemberi restu sehingga aktivitas kesatuannya melenceng dari norma-norma yang berlaku, misalnya melakukan tindakan penculikan.
Seorang perwira ABRI yang diajukan ke Dewan Kehormatan Militer, harga diri dan integritasnya akan rusak. Dia akan kehilangan muka meski dalam sidang DKM itu dia dinyatakan tidak bersalah. Jika bersalah, tentu dia akan lebih kehilangan muka lagi.
Tindakan penculikan biasanya hanya dikenal dalam operasi intelijen tempur, dan biasanya dilaksanakan dalam suatu medan pertempuran. Performance operasi intelijen itu berbeda-beda sehingga tingkatan operasi intelijen tempur tidak bisa dilaksanakan jika yang diperintahkan adalah operasi intelijen teritorial. Kalau operasi intelijen teritorial yang dilaksanakan, namun ditempuh tindakan penculikan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, hal itu suatu hal yang aneh."

| ***Letjen TNI Hari Sabarno**, Wakil Ketua DPR/MPR dari Fraksi ABRI, dalam berita Kedaulatan Rakyat ("Penculik Bisa Diseret ke Mahkamah Militer", 22 Juli 1998)*

akan berciri Islam. * Bersambung hal 8 kol 7 mungkinan jumlahnya bisa bertambah, demikian *Antara*. (*)-e

PERWIRA YANG DIAJUKAN KE DKM

Bisa Diseret ke Mahkamah Militer

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua DPR/MPR dari Fraksi ABRI, Letjen TNI Hari Sabarno menegaskan, perwira ABRI yang diajukan ke Dewan Kehormatan Militer (DKM) bisa juga diseret ke Mahkamah Militer jika perbuatannya dinyatakan mengandung unsur pidana. "Jika perwira itu diajukan ke DKM, dan perbuatannya juga dinyatakan mengandung unsur pidana, maka perwira itu bisa diajukan ke Mahkamah Militer," katanya.

Pembentukan DKM biasanya dilaksanakan untuk mengetahui dan mengusut sejauh mana keterlibatan perwira ABRI, pengetahuannya akan etika perwira, atau kemungkinannya sebagai pemberi restu, sehingga aktivitas kesatuannya melenceng dari norma-norma yang berlaku, misalnya melakukan tindakan penculikan.

"Seorang perwira ABRI yang diajukan ke Dewan Kehormatan Militer, harga diri dan integritasnya akan rusak. Dia akan kehilangan muka meski dalam sidang DKM itu dia dinyatakan tidak bersalah. Jika bersalah, tentu dia akan lebih kehilangan muka lagi," katanya, seperti dikutip *Antara*.

Ketika diminta pendapatnya tentang mekanisme pembentukan susunan personel DKM jika yang diperiksa perwira tinggi, misalnya berbintang tiga, Letjen TNI Hari Sabarno mengatakan, Pati ABRI serendah-rendahnya harus berpangkat bintang tiga.

Jika Pati berbintang tiga tidak mencukupi untuk diangkat sebagai anggota DKM, maka personil DKM bisa diambil dari luar struktur ABRI, seperti anggota DPR/MPR atau personil lainnya yang dikaryakan. Selain itu, Pati yang sudah purnawirawan bisa juga dititulerkan sampai sidang DKM.

Perwira yang diajukan ke DKM itu bisa direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif, dinyatakan tidak terbukti terlibat atau diajukan ke Mahkamah Militer. "Semuanya itu tergantung hasil sidang DKM," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Hari Sabarno menjelaskan, operasi intelijen strategis mencakup operasi intelijen teritorial, operasi intelijen tempur,

* Bersambung hal 8 kol 3

Kedaulatan Rakyat
22 Juli 1998

Keluarga enam korban penculikan mendatangi Puspom ABRI untuk mendesak agar MEMBERIKAN KEPASTIAN tentang nasib 12 korban penculikan sekaligus membebaskannya. Didampingi KontraS, terdapat Eva Arnaz (istri Dedi Hamdun), ibunda Yani Apri, dan orang tua Petrus Bimo Nugroho. Kedatangan keluarga ini didasarkan asumsi bahwa Puspom telah memeriksa dan mengetahui 11 pelaku penculik, tempat penyekapan, dan nasib korban yang belum kembali. Namun, jawaban yang diberikan Puspom adalah di ruang penyekapan di kompleks Kopassus Cijantung itu telah kosong, tak ditemukan lagi orang yang ditahan.

> **"12 Korban penculikan yang belum kembali itu sudah dilepas. Tidak ada lagi di markas Kopassus Cijantung."**
>
> | ***Kolonel Sudirman Panigoro**, Ka Idik Puspom ABRI, dalam berita Suara Merdeka ("Dan Puspom ABRI: Para Aktivis Disekap di Markas Kopassus", 23 Juli 1998)*

sis moneter. Ia tak ingin Pemerintah. Pemerintah dan bangsa

PT Meiji Farma Laboratories SATU BUTIR SEHARI VITAMIN B-KOMPLEKS dengan 500 mg VITAMIN C

Dan Puspom ABRI: Para Aktivis Disekap di Markas Kopassus

JAKARTA - Komandan Puspom ABRI, Mayjen Syamsu Djalal, mengatakan para aktivis yang diculik, selama ini disekap di markas Kopassus di Cijantung, Jakarta. Sedangkan 12 aktivis yang hingga kini belum kembali dan tak diketahui keberadaannya, ketika dicek tak berada di sana.

Sementara itu, jumlah tersangka dalam kasus ini bertambah satu orang sehingga menjadi 11 orang. Tambahan seorang tersangka itu adalah Kolonel Herawan yang menyerahkan Andi Arief ke Mabes ABRI.

Keterangan itu dikemukakan Dan Puspom ABRI kepada wartawan seusai menerima keluarga korban penculikan yang hingga kini belum kembali. Ka Idik Puspom ABRI, Kolonel Sudirman Panigoro, menambahkan, "Menurut keterangan tersangka, ke-12 korban penculikan yang hingga kini belum kembali itu sudah dilepas. Karena itu, tidak ada lagi di markas Kopassus di Cijantung,"

Kemarin, 12 keluarga korban penculikan yang belum kembali menemui Syamsu untuk mendesak agar mereka dapat segera dipertemukan para korban, sehubungan dengan telah ditemukannya sejumlah tersangka. Mereka didampingi Munir SH dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Keluarga yang datang adalah para orang tua Herman Hendrawan, Ucok Munandar Siahaan, Muhammad Yusuf, Suyat, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, Yani Avri, Noval Said, Petrus Bimo Anugerah, Ismail, Sonny, dan Dedy Oemar Hamdun. Istri Dedy Oemar Hamdun, artis Eva Arnaz, juga tampak di antara rombongan tersebut.

Mereka telah tiba di Puspom ABRI sejak pukul 11.00 WIB. Namun Syamsu secara mendadak dipanggil Kasum ABRI di Cilangkap. Ia baru tiba kembali dan menerima mereka sekitar pukul 14.20 WIB.

Tak Puas

Ayah Petrus Bimo, D Utomo Rahardjo, membacakan sur[illegible]i desakan agar Puspom ABRI segera menemukan anggota keluarga mereka. Namun sejauh itu, Syamsu belum bisa menjanjikan apa-apa. Pihaknya mengaku belum mengetahui keberadaan para korban penculikan tersebut, kendati sudah mengetahui di mana mereka selama ini disekap. "Ketika dicek di Cijantung, ternyata para

(Bersambung hlm XII kol 1-2)

Suara Merdeka
23 Juli 2023

Selama dua jam keluarga korban berdialog langsung dengan Komandan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin:

Misiati D. Utomo (Ibu dari Petrus Bimo Anugerah): Bagaimana kabar anak kami sekarang Pak, tolong kembalikan anak kami. Kami tidak ingin yang lain. Kembalikan anak kami.

Mayjen Syamsu: Kami sedang mengusut dan menyelidikinya. Sabarlah Bu, kalau sudah ketemu kami akan segera jawab.

D. Utomo Rahardjo (Ayah dari Petrus Bimo Anugerah): Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan singkat. Apakah anak kami masih ada atau tidak?

Mayjen Syamsu: Pertanyaan Bapak sederhana. Tetapi saya belum bisa memberi jawaban sekarang. Sekarang kami tengah memeriksa 11 tersangka berkaitan dengan penculikan itu. Mohon tunggu perkembangannya. itu dari kami dan sekali lagi mohon maaf, bukan kami membatasi.

Kami tidak akan menutup-nutupi. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita ini, baik jenderal, presiden, atau siapa pun. Saya juga cukup stres diburu wartawan tiap hari, saya mau ngomong apa lagi.

Luthfi (Adik Dedy Hamdun): Detik demi detik kami hidup dalam stres Pak. Lebih baik kami dieksekusi mati daripada disiksa begini. Bahkan, ibu saya semalam kejang. Karena itu, omongkan saja keadaan mereka sekarang. Kalau benar mereka sudah tewas seperti yang diduga Pius, di mana kuburan mereka?

Mayjen Syamsu: Saya juga ingin mendengar dari Pius soal ini. Kami sudah mengontak Pius ke Palembang. Inilah akibatnya kalau ekspos terlalu berlebihan. Sehingga membuat banyak orang bingung. Bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat, sebagai ketua Tim Pencari Fakta (TPF), setiap fakta yang saya temukan, saya lapor kepada pimpinan. Makanya terbongkarlah orang-orang yang diduga melakukan perbuatan tercela ini. Saya mengerti dan menyadari dan saya akan berusaha sekuat ternaga. Kami tidak akan menutup-nutupi. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita ini, baik jenderal, presiden, atau siapa pun. Saya juga cukup stres diburu wartawan tiap hari, saya mau ngomong apa lagi.

Eva Arnaz (Istri Dedy Hamdun): Jadi Bapak nggak sependapat dengan Pius, artinya masih ada kabar baik?

Kedaulatan Rakyat
23 Juli 1998

Para ibu 'orang hilang' Rabu (22/7) datang ke Puspom ABRI meminta agar anaknya dikembalikan atau ditunjukkan di mana anaknya berada. KR-RTR

Aktivis Disekap di Kompleks Kopassus

KOLOM - 9

JAKARTA (KR) - Teka-teki lokasi penyekapan para aktivis yang diculik oknum Kopassus akhirnya terkuak. Ternyata, para aktivis itu disekap di Komplek Kopassus di Cijantung. Namun para aktivis yang belum dilepas sekarang sudah dipindahkan, atau dengan kata lain, aktivis yang tersisa tidak ada lagi di tempat itu (di Cijantung-red). Di samping itu, Puspom menahan lagi satu oknum Kopassus berpangkat perwira. Sehingga sampai kemarin, tersangka penculik yang ditahan sudah 11 orang.

Demikian penegasan Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal kepada wartawan seusai menerima keluarga korban penculikan, Rabu (22/7) sore. Menurut dia, setelah adanya keterangan tempat penyekapan, anak buahnya menuju ke lokasi yang ditunjuk. Tetapi sesampai di lokasi, tidak satu pun sisa korban penculikan ditemukan.

"Menurut keterangan sementara, penculik sudah ada yang dilepas. Tapi ke mana mereka, itu yang masih kita cek lagi," kata Syamsu dikutip *kantor...*

Dan Puspom mengungkapkan, informasi soal lokasi penyekapan diperoleh dari tersangka yang juga mengatakan, korban sudah ada yang dilepas. "Kita akan cari terus tempat penyekapan yang baru," tegasnya. Ditambahkan, Puspom ABRI tetap berjuang keras untuk mengetahui keberadaan para korban.

Diungkapkan pula, Puspom ABRI sudah memeriksa Komandan Grup IV Sandi Yudha Kopassus, Kolonel Inf Chairawan. Selain itu, Puspom juga akan menyelidiki keterlibatan oknum ABRI dari kesatuan lain, seperti Koramil, Kodim, Kodam Jaya, Polisi Militer, Polri sampai pada Badan Intelijen ABRI (BIA). Jika ada keterlibatan, maka oknum tersebut juga akan diperiksa.

Selain itu, jumlah tersangka penculik yang ditahan di Puspom ABRI terus bertambah. Semula tujuh oknum, lalu membengkak menjadi 10. Terakhir tambah satu oknum lagi, dan berpangkat perwira. Sehingga, menurut Mayjen Syamsu, pihaknya sudah menahan 11 oknum anggota Kopassus yang dinyatakan sebagai tersangka penculikan para aktivis. Jumlah tersangka masih bisa bertambah karena penyelidikan kasus itu tetap diintensifkan. (*/Jon)-d

7 Jaksa Ditindak

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Bintoro mengatakan, sudah 7 oknum jaksa ditindak karena melakukan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang. Selain jaksa, masih ada 6 pegawai Kejaksaan dari TU ditindak. Mereka selain melakukan pelanggaran disiplin juga melakukan perbuatan asusila. Sanksi terhadap jaksa maupun pegawai TU itu, bisa berupa teguran, penurunan pangkat dan penundaan gaji. Namun hingga kini belum ada yang dipecat. Soal sanksi yang berhak menjatuhkan Kejagung, sedang pihak Kejati hanya melaporkan dan memberi saran. (Tri)-f

Evaluasi 2 Bulan Pemerintahan Habibie

Eva Arnaz (Istri Dedy Hamdun): Jadi Bapak nggak sependapat dengan Pius, artinya masih ada kabar baik?

Mayjen Syamsu: Makanya kami tunggu keterangan Pius.

Luthfi (Adik Dedy Hamdun): Maksudnya, omongan Pius itu benar?

Mayjen Syamsu: Belum bisa saya katakan. Saya berbicara selalu dengan fakta. Nggak bisa saya bilang kata Pius begini, lalu saya bilang benar. Nggak bisa. harus ada fakta berdasarkan keadilan.

Luthfi (Adik Dedy Hamdun): Apakah Bapak juga belum tahu di mana letak penyekapannya?

Mayjen Syamsu: Sudah, sudah. Kami sudah tahu lokasi penyekapannya.

Abdullah Hamdun (Ayah Dedy Hamdun): Dulu, kami siap hadapi penjajah, walaupun senjata mereka lengkap. Apakah sekarang ini kami harus berhadapan dengan oknum Kopassus dan aparatnya yang tak bermoral itu?

Mayjen Syamsu: Betul sekali apa yang Bapak katakan. Walaupun pil itu pahit tetapi kalau untuk obat ya harus ditelan. Namun, walaupun madu itu manis kalau itu racun ya jangan ditelan. itu tugas saya, kewajiban saya. Dan sekarang tersangka sudah kami tahan dan kami siapkan pasal yang akan dituduhkan terhadap mereka.

Said Alkatiri (Ayah Novel Alkatiri): Saya akan menanyakan pada Pak Syamsu hanya dua patah kata saja. Pertama, tolong anak saya ini berada di mana dan dalam keadaan bagaimana. Kedua, meminta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ke-12 orang ini dikembalikan kepada keluarganya yang sudah sangat merindukan mereka kembali. Lalu, apakah para penculik ini tidak mempunyai perasaaan, bagaimana kalau anaknya hilang semacam kita punya anak.

Mayjen Syamsu: Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kami baru saja memeriksa, dan sekarang sudah ada 11 tersangka. Dan kami akan melakukan pemeriksaan dan pengusutan selanjutnya. Yang baru terbongkar sekarang ini baru kasus Andi Arief dan rumah susun Klender. Ini

Mayjen Syamsu: "Betul sekali apa yang Bapak katakan. Walaupun pil itu pahit tetapi kalau untuk obat ya harus ditelan. namun, walaupun madu itu manis kalau itu racun ya jangan ditelan. itu tugas saya, kewajiban saya..."

kita gali terus, makanya kami minta bantuan. Saya juga mau secepat mungkin pengharapan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya pengharapan saya juga cepat terselesaikan. Dan ini tugas mulia bagi saya, bukan tugas main-main. Saya akan mengusut tuntas.

Ny. Tuti (Ibu Yani Afri/Ryan): Saya harap kepada Pak Syamsu, kalau bisa beritahu di mana anak saya berada sekarang. Saya ingin tahu. Biarpun ia cacat, atau berbentuk apa, saya ingin tahu di mana dia. Soalnya, salah seorang keluarga saya, begitu mendengar ada lima orang yang meninggal, ia langsung kejang.

Mayjen Syamsu: Saya nggak bisa berkata sebentar lagi. Nggak bisa bilang oh, ini terlibat, oh itu PM terlibat. betul, ikut serta, maksudnya, dalam proses apanya. Memang benar ada beberapa institusi. Ada oknum Babinsa, Koramil, Kodim, Kodam, ada BIA, dan ada Polri yang diduga terlibat. Tapi, itu kan harus berdasarkan fakta dan bukti nanti. Lalu, pasal mana yang bisa memenuhi unsur-unsur untuk kita ajukan ke pengadilan militer. jadi, kita tidak asal main tuduh-tuduh saja.

Adil
4 Agustus 1988

Adil
4 Agustus 1988

SELAMATKAN MEREKA, PAK WIRANTO!

Dialog Mayjen TNI Syamsu - Keluarga korban

"Kembalikan Anak Kami, Apapun Bentuknya"

yang dilontarkan Syamsu sangat klise).

Luthfi (Adik Deddy Hamdun): Detik demi detik kami hidup dalam stres Pak. Lebih baik kami dieksekusi mati dari pada disiksa begini. Bahkan ibu saya semalam kejang. Karena itu, omongkan saja keadaan mereka sekarang. Kalau benar mereka sudah tewas seperti yang diduga Pius, di mana kuburan mereka?

Syamsu: Saya juga ingin mendengar dari Pius soal ini. Kami sudah mengontak Pius ke Palembang. Inilah akibatnya kalau ekpos terlalu berlebihan. Sehingga membuat banyak orang bingung. Bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat, sebagai ketua Tim Pencari Fakta, setiap fakta yang saya temukan, saya lapor kepada pimpinan. Makanya terbongkarlah orang-orang yang diduga melakukan perbuatan tercela ini. Saya mengerti dan menyadari dan saya akan berusaha sekuat tenaga. Kami tidak akan menutup-nutupi. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita ini, baik jenderal, presiden, atau siapapun. Saya juga cukup stres diburu wartawan tiap hari, saya mau ngomong apa lagi.

Eva Arnaz (Istri Deddy Hamdun): Jadi Bapak *nggak* sependapat dengan Pius, artinya masih ada kabar baik?

Syamsu: Makanya kami tunggu keterangan Pius.

Luthfi: Maksudnya, omongan Pius itu benar?

Syamsu: Belum bisa saya katakan. Saya berbicara selalu dengan fakta. *Nggak* bisa saya bilang kata Pius begini, lalu saya bilang benar. *Nggak* bisa. Harus ada fakta berdasarkan keadilan.

Luthfi: Apakah bapak juga belum tahu di mana tempat penyekapannya?

Syamsu: Sudah, sudah. Kami sudah tahu lokasi penyekapannya.

(Dari bisik-bisik dengan Kolonel CPM Mungkono, perwira penyidik 11 tersangka, Syamsu membenarkah jika penyekapan korban penculikan itu dilakukan di Cijantung, markas Kopassus).

Abdullah Hamdun (Ayah Deddy Hamdun): Dulu, kami siap menghadapi penjajah, walaupun senjata mereka lengkap. Apakah sekarang ini kami harus berhadapan dengan oknum Kopassus dan aparatnya yang tak bermoral itu?

Syamsu: Betul sekali apa yang bapak katakan. Walaupun pil itu pahit tetapi kalau untuk obat ya harus ditelan. Namun walaupun madu itu manis kalau itu racun ya jangan ditelan. Ini tugas saya, kewajiban saya. Dan sekarang tersangka sudah kami tahan dan kami siapkan pasal yang akan dituduhkan terhadap mereka.

Said AlKatiri (Ayah Noval Alkatiri): Saya akan menanyakan pada Pak Syamsu hanya dua patah kata saja. Pertama, tolong anak saya ini berada di mana dan dalam keadaan bagaimana. Kedua, meminta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ke 12 orang ini dikembalikan kepada keluarganya masing-masing yang sudah sangat merindukan mereka kembali. Lalu, apakah para penculik itu tidak mempunyai perasaan, bagaimana kalau anaknya hilang semacam kita punya anak.

Syamsu: Saya sudah berkali-kali mengatakan

23 JULI 1998

"I am a gutter. Saya kini sampah. Sementara, semua orang berlagak suci. I don't want to rock the boat."

| ***Letjen TNI Prabowo Subianto**, menurut penuturan kalangan dekatnya, kepada Tajuk ("Kisah Sebuah Bintang Jatuh", 23 Juli 1998)*

Pertanyaannya kini: Apa motif penculikan itu, serta benarkah hanya Prabowo dan satuan Kopassus yang terlibat? Sampai awal pekan ini, Prabowo – sayangnya – belum bersedia memberikan keterangan. Namun, menurut se-jumlah sumber *Tajuk* yang dekat dengannya, suami Titiek Soeharto itu bukannya tak menyadari tudingan yang kini terarah kepadanya. "*I am a gutter.* Saya kini sampah. Sementara, semua orang berlagak suci," kata jenderal yang menguasai lima bahasa asing itu, seperti ditirukan salah seorang sumber itu kepada *Tajuk*.

KETIKA KERUSI
pir semua ke
bungkan denga

Bahwa Prabowo kini memilih diam, masih kata si sumber ini, itu karena, "*I don't want to rock the boat* (Saya tidak ingin mengacaukan situasi)." Sesudah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab, Prabowo kini menunggu respons dari jajaran pimpinan ABRI. Namun, bila terpaksa, ia akan siap membeberkan semuanya.

Membeberkan semuanya? Sejauh ini, memang ada dua dugaan berkenaan dengan keterlibatan Prabowo dan satuan Kopassus itu.

Tajuk
23 Juli 1998

24 JULI 1998

"Saya tidak pernah memberikan perintah penculikan dan tidak mengetahuinya. Saya minta kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk mengambil tindakan sehubungan kasus penculikan ini."

| ***Feisal Tanjung**, Menko Polkam, dalam berita Bernas ("Feisal Tanjung Bantah Terlibat Penculikan", 25 Juli 1988)*

Bernas
25 Juli 1988

Feisal Tanjung Bantah Terlibat Penculikan

Jakarta, Bernas

Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Purn Feisal Tanjung menyatakan tak pernah memerintahkan operasi penculikan. "Saya baru tahu justru saat jadi Menko Polkam," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7).

"Tidak, saya tidak tahu. Saya tahu setelah mendengar laporan dari Pak Wiranto Saya mendengar laporan dan penjelasan dari Pak Wiranto (Menhankam/Pangab, **red**)," lanjutnya saat didesak wartawan seusai memberi sambutan atas persetujuan Konvensi Anti Penyiksaan dan Kekejaman Hukum dalam sidang pleno DPR.

Di tempat terpisah, salah satu korban penculikan, Andi Arief mengajak pihak berwenang -- dan wartawan -- untuk bersama-sama mencek lokasi yang dijadikan tempat penahanan untuk mendapat kejelasan penculikan itu.

"Danpuspom sudah mengaku keterlibatan instansi itu. Katanya ke-12 orang itu sudah dikeluarkan, kalau pakai alasan seperti ini agak sulit, karena saya yakin ada yang cacat atau bahkan mati. Usul saya, warta-

BIH DINI
EUTRON YOGYAKARTA
NAS - UMPTN
NAS
Daftar mulai Sekarang ...!
NALARAN

"Saya yakin keterlibatan ABRI dalam kasus andi arief, trisakti, maupun kasus marsinah, dan kasus udin. Karena itu sulit diungkap. Saya tahu persis karena saya sudah jadi anggota komnas ham sehingga dapat melakukan penyidikan ke lokasi, ke kantor polisi, sampai mengikuti persidangan. Dalam kasus penculikan Andi Arief, polisi yang menangani saya tanya, kenapa begitu. Dia menjawab, demi Merah Putih. Masak berjuang kok begitu caranya."

| ***Mayjen Pol (Purn.) Koesparmono Irsan**, mantan Deputi Operasi (Deops) Kapolri,*

Bernas
25 Juli 1988

... ini oleh utusan daerah dan utusan golongan secara harafiah maupun jiwanya.

Feisal Tanjung - - -

Sambungan dari hal. 1

kan itu di Cijantung (Jakarta) untuk tempat penyekapan.

Kesaksian korban-korban penculikan seperti Pius Lustrilanang, Desmon J Mahesa dan Andi Arief pun, mengarahkan ciri-ciri tempat ke fasilitas khusus militer.

Karena itu, Andi Arief mengajak Danpuspom mencek tempat-tempat itu. Ia juga menuntut kejelasan mengenai 12 korban penculikan yang masih hilang, apakah memang sudah mati atau ada di suatu tempat.

Pihak militer, kata Andi Arief, harus menjelaskan dulu apakah orang yang masih ditahan itu menjadi cacat atau meninggal, jika tidak ada penjelasan seperti itu, bisa saja dikenakan pidana hanya untuk empat kasus tanpa dakwaan pembunuhan.

Sementara itu di Surabaya, Mantan Deputi Operasi (Deops) Kapolri Mayjen Pol (Purn) Drs *Koesparmono Irsan MBA* menyatakan keyakinannya mengenai keterlibatan ABRI dalam kasus-kasus Andi Arief, Trisakti, maupun kasus Marsinah, dan kasus Udin. Karena itu pula kasus-kasus tersebut sulit diungkap.

"Saya tahu persis, karena saya sudah jadi anggota Komnas HAM sehingga dapat melakukan penyelidikan ke lokasi, ke kantor polisi, sampai mengikuti persidangan," katanya.

"Dalam kasus penculikan, juga sama. Polisi yang menangani Andi Arief sempat saya tanya, kenapa begitu. Dia menjawab, demi merah-putih. Masak berjuang kok begitu caranya," katanya.

Keterlibatan yang sama juga ada dalam kasus kematian wartawan Udin. "Di kantor polisi, saya katakan kenapa pakai dilarung, soalnya prosedurnya 'kan nggak begitu urut-urutannya," katanya.

"Sewaktu kasus Marsinah dibicarakan, saya menjadi Deops, jadi saya tahu persis kasus sebenarnya. Saya sempat menunjuk tiga tim yang dipimpin Muharsipin, Roesdihardjo, dan Hartawi. Tapi, saya ditelepon. Ya itu, maka jadinya sulit diungkap," katanya di Universitas Surabaya (Ubaya).

Sementara itu anggota DPR Usman Ermulan mengatakan sangat ganjil apabila Pangab ketika itu tidak tahu menahu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Kopassus yang di bawah koordinasinya.

"Hal itu justru harus lebih intensif dituntaskan sebab ini menyangkut instansi ABRI, yang kita kenal dengan sistim komando. Kalau tidak ada komando dari Pangab sendiri, lha dari mana datangnya perintah penculikan itu," katanya.

Kalau tidak begitu, berarti ada intervensi kekuatan lain di luar komando ABRI. "Dalam sistem ketahanan keamanan kita, ini berbahaya. Bayangkan, anggota ABRI bisa diperintah oleh yang bukan dalam struktural jalur komando," tegasnya.

Sedangkan tentang Dewan Kehormatan Militer (DKM), Menko Polkam Feisal Tanjung hanya berkomentar singkat, "Tunggu saja. Tanya saja Syamsu (Danpuspom ABRI, red). Danpuspom itu lagi bekerja, jangan kalian kacaukan, tidak baik".

Sementara itu, sekitar 100 pemuda kemarin menda... Puspom ABRI, memprotes ... jakan ABRI yang dianggap ... kriminatif dalam penanga... kasus yang melibatkan oknu... ABRI atau institusi ABRI.

Para pemuda yang te... bung dalam Gerakan Pem... Islam (GPI) Jakarta, Fo... Komunikasi Generasi Mud... lam (FKGMI) Bekasi, Ger... Mahasiswa (Gema) PTDI... rum Komunikasi Remaja M... Jakarta Utara, dan Sontak... daritas untuk Korban Peris... Tanjung Priok), menyata... ada sikap diskriminatif ... pinan ABRI itu sangat ... terlihat akhir-akhir ini.

Pangab melalui Puspo... RI, kata mereka, dengan g... melancarkan upaya peng... kapan kasus orang hilang u... memenuhi tuntutan ber... kalangan, khususnya LS... lam negeri dan luar negeri... mun pada saat yang ... Pangab dan jajarannya ... baikan aspirasi dan tu... umat Islam Indonesia ... pengungkapan kasus ... Priok dan kasus Lampu...

(son/d...

Akbar: Try dan - - -

Sambungan dari hal. 1

Majalah *Panji Masyarakat* menurunkan rangkuman laporan majalah *Asiaweek*. Majalah mingguan berbahasa Inggris ini terbit di Hong Kong. Berikut rangkumannya:

- Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto merupakan penggerak intelektual peristiwa kerusuhan pada pertengahan Mei 1998. Indikasinya diperlihatkan oleh sosok Prabowo yang ambisius--dan ini yang penting--dia punya sarana untuk mengobarkan kerusuhan. Melalui kedudukannya yang strategis di Angkatan Darat, Prabowo bisa memerintahkan beberapa kelompok pemuda, dari anggota preman sampai organisasi kelompok pemuda, untuk melakukan segala kehendaknya.
- Mengutip sumber perwira militer, Asiaweek melaporkan bahwa Prabowo sengaja menciptakan kerusuhan dengan harapan rivalnya Pangab Jenderal Wiranto tidak mampu membendung. Ketika Presiden Soeharto tiba dari lawatannya ke Mesir, diberlakukan undang-undang darurat dan pasukan Kostrad yang diturunkan. Dia sangat yakin dirinya mampu memulihkan keadaan.
- Prabowo Subianto memanfaatkan Pemuda Pancasila (PP), organisasi Satria Muda Indonesia (SMI), dan ratusan pemuda Timor Timur yang sudah mendapatkan latihan militer. Mereka, bersama para gangster dari Lampung, menjadi penggerak kerusuhan. Saat bergerak, mereka dipandu dari instalasi Angkatan Darat dengan menggunakan frekuensi khusus via *handy talky* (HT).
- Di Satria Muda Indonesia, Prabowo Subianto adalah patron perguruan dengan 15 ribu anggota. Di antara mereka sudah lama terjalin kerja sama. SMI melatih beladiri anggota Kopassus, SMI sering mendapat pelatihan kedisiplinan dari anggota korps Baret Merah.

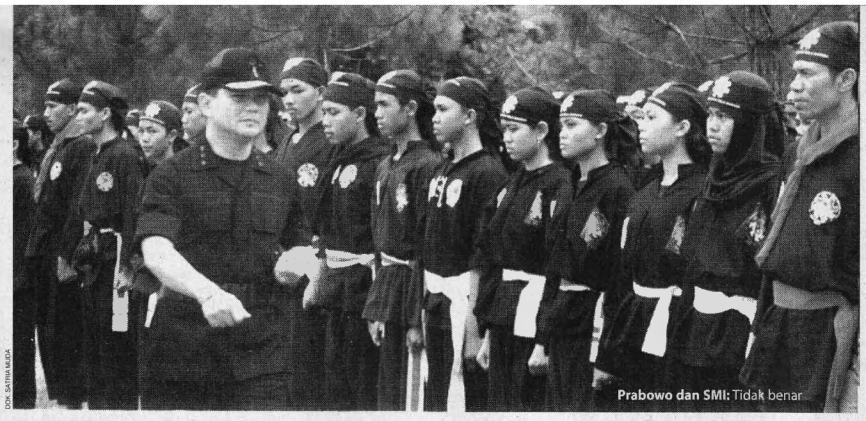

DOK. SATRIA MUDA

Prabowo dan SMI: Tidak benar

PASUKAN SIPIL SAAT RUSUH

Prabowo dan Kerusuhan: Ada yang mengidentifikasi, Prabowo tersangkut kerusuhan Mei. Satria Muda Indonesia, PP, dan pemuda Timor Timur dikabarkan ikut terlibat.

Entah apa yang dirasakan Letnan Jenderal Prabowo Subianto hari-hari ini. Resah, gelisah, jengkel, atau justru tetap tegar? Apa pun, jenderal yang baru kehilangan jabatan ini bagai tak habis-habisnya dirundung azab. Belum lagi kasus penculikan yang menyeret namanya tuntas, sekarang sudah muncul tudingan baru.

Majalah *Asiaweek*, edisi 24 Juli, mengungkapkan bahwa Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto merupakan penggerak intelektual peristiwa kerusuhan pada pertengahan Mei lalu. Indikasinya antara lain diperlihatkan oleh sosok Prabowo yang ambisius dan—ini yang penting—dia punya sarana untuk mengobarkan kerusuhan. Melalui kedudukannya yang strategis di Angkatan Darat, Prabowo bisa memerintahkan beberapa kelompok pemuda, dari anggota preman sampai organisasi kelompok pemuda, untuk melakukan segala kehendaknya.

Dengan mengutip sumber perwira militer senior, *Asiaweek* melaporkan bahwa Prabowo sengaja menciptakan kerusuhan dengan harapan rivalnya Pangab Jenderal Wiranto tidak mampu membendung. Ketika Presiden Soeharto tiba dari lawatannya ke Mesir, diberlakukan undang-undang darurat dan pasukan Kostrad yang diturunkan. Dia sangat yakin dirinya mampu memulihkan keadaan.

Untuk melaksanakan niat tersebut, masih menurut majalah yang terbit di Hong Kong ini, Prabowo memanfaatkan Pemuda Pancasila (PP), organisasi silat Satria Muda Indonesia (SMI), dan ratusan pemuda Timor Timur yang sudah mendapatkan latihan militer. Mereka, bersama para *gangster* dari Lampung, menjadi penggerak kerusuhan. Saat bergerak, mereka dipandu dari instalasi Angkatan Darat dengan menggunakan frekuensi khusus via *Handy Talky* (HT). Berita itu makin santer setelah dikutip wartawan senior Rosihan Anwar dalam rubrik Pumpunan di buletin kantor berita *Antara*. Ada pula yang menuduh Paguyuban Pendekar Banten ikut "berpartisipasi" dalam aksi itu. Organisasi-organisasi ini menjadi pendukung Soeharto (dan Habibie setelah mengambil sumpah sebagai presiden) saat aksi mahasiswa menuntut presiden mundur di gedung DPR. Dari sinilah tuduhan kepada mereka dimulai.

Keterlibatan anggota PP itu kabarnya cukup kuat. Ada beberapa kejadian saat kerusuhan yang pelakunya menggunakan seragam organisasi itu. Namun, Ketua Presidium PP Yorrys Raweyai menyangkal anggotanya terlibat tindakan makar. "Kami tidak pernah berbuat seperti itu. Bahkan, PP sejak awal mengutuk kerusuhan dan penjarahan," ujarnya. Bantahan serupa disampaikan Hercules, pemimpin preman asal Timor Timur. Ketua Satria Muda Iwan Abdurrahman juga menolak tudingan ini. "Dengan tegas saya nyatakan, itu tidak benar," ujarnya. Ratno Timoer, ketua Paguyuban Pendekar Banten Cabang Jakarta, juga menampik pihaknya ikut bersalah. "Janganlah asal tuduh begitu. Itu *nggak* benar, *nggak* tahu itu sumbernya dari mana," ujar aktor laga ini.

Lalu, apa hubungan para pemuda itu dengan Prabowo? Hercules, yang bersama kelompoknya terlibat keributan tahun lalu di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dikabarkan cukup dekat dengan petinggi militer yang pernah bertugas di Timor Timur itu.

Akan halnya di SMI, Prabowo merupakan patron perguruan yang punya 15.000 anggota ini. Di antara mereka sudah lama terjalin kerja sama. SMI melatih bela diri anggota Kopassus, sedangkan SMI sering pula mendapat pelatihan kedisiplinan dari anggota korps baret merah. Dari sinilah mungkin muncul anggapan bahwa SMI dimanfaatkan Pak Jenderal untuk tujuan tertentu.

Friksi di ABRI. Benar-tidaknya dugaan-dugaan itu akan tersingkap juga. Setidak-tidaknya beberapa LSM yang punya kepedulian terhadap kerusuhan sudah membuat kesimpulan awal. Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB), misalnya, menyimpulkan bahwa peristiwa itu tidak hanya mengandung muatan kesenjangan ekonomi, tetapi juga diwarnai politik. "Terasa ada muatan politiknya," ujar Rosita Noer dari Bakom PKB. Bakom juga berkesimpulan bahwa kerusuhan dimotori oleh organisasi tertentu—Rosita belum bisa menyebut nama. "Entah organisasi mana. Pokoknya dia punya personel, keterampilan,

Panji Masyarakat
12 Agustus 1998

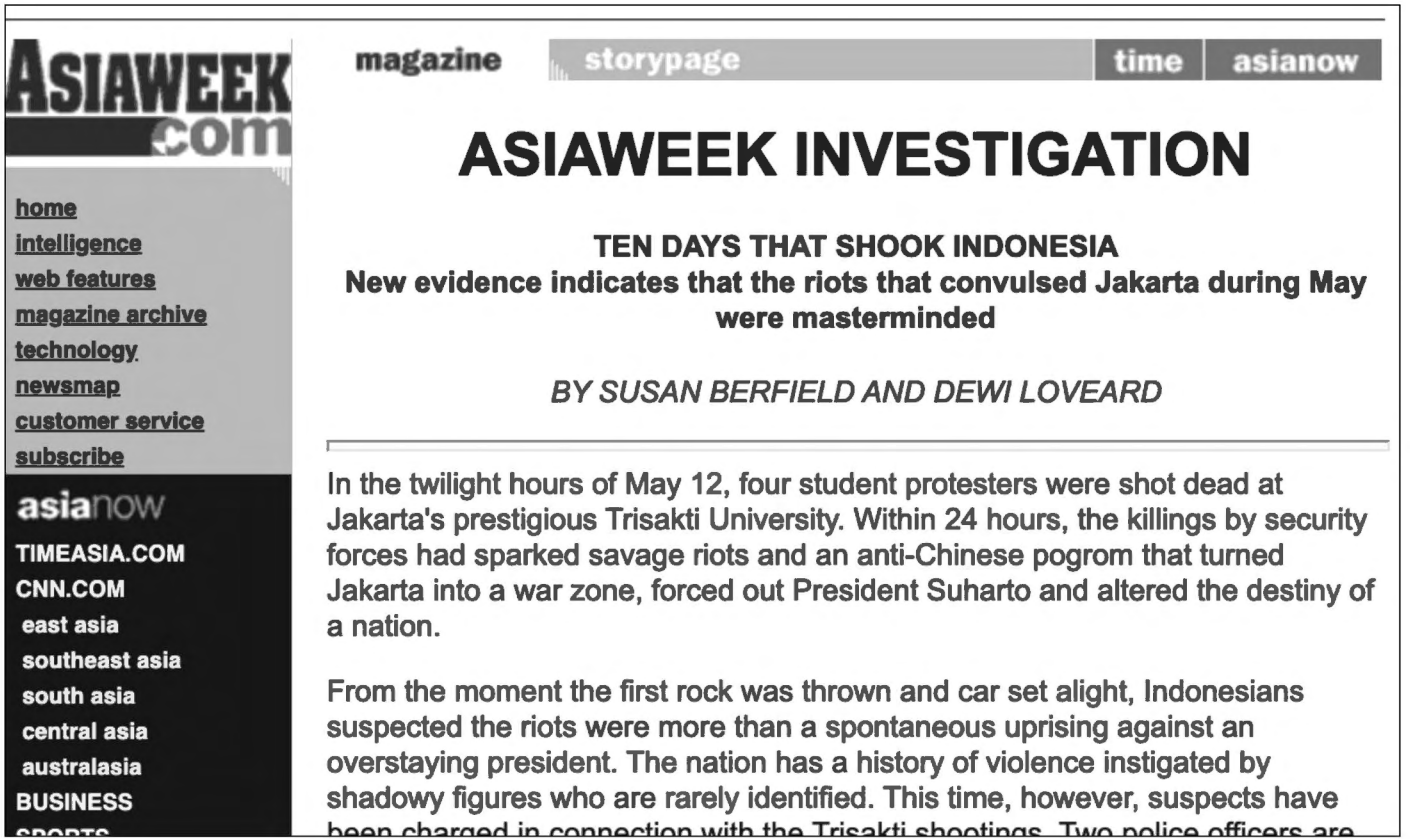

Arsip Asiaweek dalam CNN.com

Perguruan yang Mendapat Cobaan

Rabbana anta maulana fansyurna alal qaumil kaafiriin. Terdengar suara lirih tetapi tegas dari seorang lelaki berserban yang berpakaian serba hitam. Ini adalah doa penutup setelah serangkaian zikir dan doa lainnya dikumandangkan malam itu.

Dia bukan kiai, tampaknya. Paling tidak dia tidak pernah dipanggil dengan sebutan itu. Sementara ratusan anak muda yang duduk melingkarinya adalah anggota perguruan pencak silat Satria Muda Indonesia (SMI). Malam itu mereka berkumpul di markas besarnya, sebuah rumah besar bertingkat dua di Jl. Wijaya Timur Raya 7, Jakarta Selatan.

Anggota perguruan silat yang punya cabang di berbagai daerah ini rupanya perlu lebih banyak tawakal. Maklum, mereka sedang mendapat sorotan sehubungan dengan kerusuhan besar yang terjadi pada medio Mei lalu.

Menurut Iwan Abdurrahman, pihaknya sangat terpukul dengan tuduhan ini. "Itu fitnah," kata Ketua Umum SMI ini. Pendaki dan pencipta lagu ini (antara lain *Melati dari Jayagiri* yang dilantunkan kelompok Bimbo) terdiam lama sebelum berkata dengan nada getir. "Saya ngeri membayangkan betapa orang memandang kami sekarang sebagai perusuh dan pemerkosa." (Lihat: *Sudah Lama Saling Bantu*).

Iwan menduga, tuduhan itu semata didasarkan pada kedekatan perguruan silatnya dengan Prabowo Subianto. "Kami mengakui bahwa bagaimanapun Pak Prabowo adalah penggagas SMI. Benar kami punya kedekatan, tetapi itu wajar karena ada komitmen yang sama di antara kami. Kami ingin menjadikan pencak silat sebagai seni bela diri yang bermartabat di negerinya sendiri," katanya. Ia menolak ada unsur politis yang mendasari hubungan itu.

SMI semula merupakan pengembangan dari perguruan Baringin Sakti yang telah berdiri sejak 1955 atas rintisan tiga orang pemuda Minang, H Abu Zahar, H Oemar Mahtub—yang juga seorang Mayor AL—dan G.M.S. Lebe. Merekalah yang dianggap sebagai pendiri perguruan. Nama Satria Muda Indonesia sendiri lahir kemudian pada 19 Juli 1987, setelah para murid ketiga tokoh ini merasa perlu melakukan penataan dan pengembangan dalam manajemen dan cara pelatihan di perguruan. Didorong keinginan untuk melestarikan budaya leluhur, para murid yang sebagian merupakan prajurit ABRI, antara lain Prabowo, Ismet Yuzaeri (sekarang pangdam Bukit Barisan), dan Ampi Tanoedjiwa, meresmikan nama Satria Muda Indonesia.

Dalam perkembangannya, SMI kemudian dipakai sebagai salah satu pilihan para prajurit ABRI untuk berlatih pencak. Paling tidak di beberapa kesatuan seperti batalion Kostrad 321, 315, 328, 330, selain di Paskhas AU, Kopassus, Brimob, dan Korps Marinir memakai pelatih SMI dalam latihan bela diri mereka.

Kini, perguruan ini telah memiliki 20 komisariat daerah (Komda) dengan jumlah anggota sekitar 15.000 orang. Selain itu, SMI juga telah mulai mencoba berkembang di luar negeri dengan mengembangkan cabang di Chicago, California, Michigan, dan London. Prestasi yang diukirnya pun cukup mengesankan. Di dalam negeri, SMI berkali-kali muncul sebagai juara umum pada beberapa even pencak silat, sedangkan prestasi internasionalnya dibuktikan dengan prestasi beberapa kadernya. Misalnya, Taslim Azis, yang sekarang menjadi ketua pengurus harian perguruan, berkali-kali menjadi juara pertama kejuaraan dunia pencak silat di Jakarta, Den Haag, dan Bangkok. Juara I SEA Games diraihnya empat kali berturut-turut dari 1991 sampai 1997.

Meski Prabowo kini menghadapi masalah, Iwan tak hendak meninggalkannya. "Dalam ukhuwah islamiah, justru teman kita yang sedang mendapat kesusahan yang harus kita datangi dan kita besarkan moralnya. Mengapa harus lari atau pura-pura tidak kenal padahal dulu lengket?"

Iwan Abdurrahman benar: ia berpegang pada etika persahabatan. ■

DARMAWAN SEPRIYOSSA

dan dana yang cukup," ujar Rosita.

Ciri-ciri fisik pelaku yang dikemukakan pihak Bakom PKB dan Tim Relawan banyak kesamaan. Umpamanya, ada yang bertato, ada yang berambut cepak dan berbadan tegap, ada pula yang kurus. Mereka menjadi penghasut dan juga pelopor penjarahan.

Tim Relawan memang belum menyebut pelaku kerusuhan. Tapi, mereka juga melihat kelompok-kelompok terorganisasi yang menjadi pelaku. "Waktu kejadian dan isu yang dipakai untuk mengumpulkan massa sama," kata Sri Palupi, koordinator pendataan korban Tim Relawan. Komnas HAM juga sudah berkesimpulan, pelaku kerusuhan merupakan kelompok terorganisasi.

Untuk menentukan kelompok mana yang terlibat tampaknya masih harus menunggu hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai oleh Marzuki Darusman. Tim ini akan menggunakan sumber temuan dari Tim Relawan, Bakom PKB, Komnas HAM, dan polisi untuk menjadi bahan sekunder. "Kami akan mempelajari persamaan data dari temuan itu," ujar Marzuki. Selain itu, hasil investigasi media massa juga akan menjadi bahan acuan.

Menurut anggota Komnas HAM ini, TPGF akan melakukan analisa, faktor penyebab, pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Jadi, akan disimpulkan mengapa kejadian itu terjadi, mengapa itu bisa terjadi dan apa yang dilakukan untuk mengurangi dampak kerusuhan itu. "Dari situ kita akan tahu siapa yang paling bertanggung jawab." Bekas anggota DPR ini juga tak menampik bila kasus ini ada kaitannya dengan friksi di dalam tubuh ABRI. "Kita tidak bisa melepaskan analisa dari fakta."

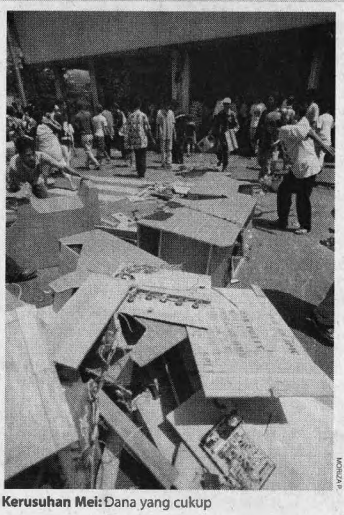

Kerusuhan Mei: Dana yang cukup

Sumber-sumber lain di TGPF menyebutkan bahwa mereka sudah mendapatkan gambaran awal mengenai peristiwa kerusuhan tersebut yang, sialnya, memojokkan Prabowo. Umpamanya kerusuhan berhubungan kronologis dengan proses suksesi 21 Mei. Jadi, ada indikasi amuk massa itu diciptakan sebagai bagian dari politik untuk mempercepat suksesi atau justru untuk mempertahankan *status quo*. Beberapa sumber menyebut Prabowo punya kepentingan di balik semua itu. "Tapi, ini baru keterangan pendahuluan," ujar sumber itu.

Mana yang benar dan yang tidak akan terjawab tiga bulan mendatang saat TGPF membuat kesimpulan akhir. Sabarlah. ■

PRACOYO WIRYOUTOMO
LAPORAN: AGUNG Y. ACHMAD, BUDIYONO, DARMAWAN SEPRIYOSSA, DAN AKMAL STANZAH

Panji Masyarakat
12 Agustus 1998

"Itu fitnah. Saya ngeri membayangkan betapa orang memandang kami sebagai perusuh dan pemerkosa... (tuduhan) itu muncul karena hubungan kami dengan Pak Prabowo baik. Apalagi, di Cibubur, kami minta bantuan mereka, pinjam tenda, pinjam lapangan. Untuk pembinaan disiplin mereka membantu dengan latihan berbaris. Saat itu, kami dilatih PHH, pengendalian huru hara. Itu karena kami menyadari suatu waktu ABRI akan kekurangan tenaga, maka wajib kami sebagai warga negara untuk membantu ... Kami akan tetap mengakui prabowo adalah penggagas SMI."

| ***Iwan Abdurrahman***, *Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (SMI), pencipta lagu "Melati dari Jayagiri", dalam Panji Masyarakat ("Perguruan yang Mendapatkan Cobaan", 12 Agustus 1988)*

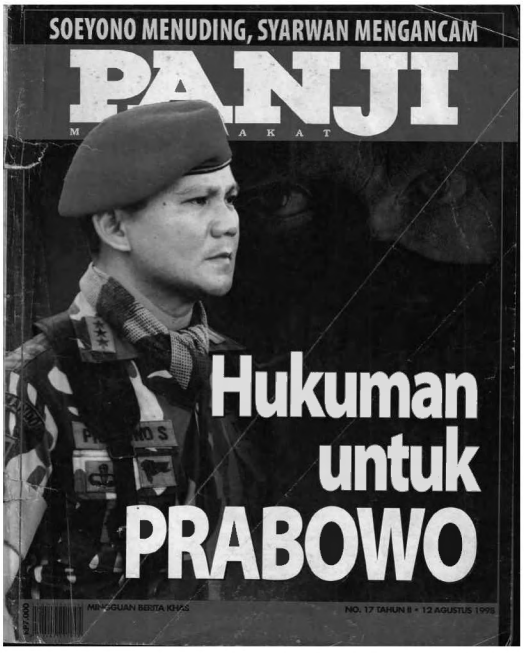

Panji Masyarakat
12 Agustus 1998

25 JULI 1998

"Apa pun wujud langkah yang diambil ABRI, pada akhirnya perasaan tentram lahir batin itu harus benar-benar tertanam di hati rakyat sehingga rakyat dapat tidur nyenyak dan dapat bekerja dengan penuh kegairahan."

| ***B.J. Habibie**, Presiden Republik Indonesia, dalam berita Bernas ("ABRI tak Boleh Kecewakan Rakyat", 27 Juli 1998)*

"Sulit jika tim pencari fakta (TPF) mempunyai problem independensi dan politik. Karena ada beberapa institusi terlibat. Tak hanya Kopassus. Pangdam jaya Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin pernah ngomong pada 18 Maret, dia bilang, dia yang menangkap Nezar Patria di Klender, lalu diserahkan ke Polda. Padahal, Nezar tadinya disekap di tempat yang sama dengan aktivis lainnya. Di pihak Kodim Jakarta Timur juga ada surat tanda serah terima orang. Koramil juga. Sebetulnya, kasus ini terlalu telanjang untuk ditutupi."

| ***Munir**, Koordinator Kontras, dalam berita Media Anu dst, belum ketemu, nanti disusulkan*

...Gunungkidul, dengan pesawat helikopter Super Puma TNI-AU nomor H 3322. Ia diserta Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, Menko Ekuin, Menko Kesra Haryono Suyono, dan Mensesneg Rahardi Ra-

...selenggarakan di Kecamatan Playen, Gunungkidul, karena keberhasilan TNI menduduki Yogyakarta 1 Maret 1949 dan berhasil disebarluaskan ke delapan negara, berkat stasiun radio pemancar TNI-AU di Desa Pla-

...dari ABRI kepada rakyat desa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya.

Pendek kata, ABRI harus tetap berada di hati rakyat dan dicintai rakyat, karena pada rakyat itulah terletak ke-

...obatan, 20 ribu masker dan 2.300 kartu sehat untuk penduduk setempat serta perangkat gawat darurat (*emergency kit*) untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Tidar Magelang dan RSD Wonogiri. (als/tt/ryo)

Presiden: ABRI tak Boleh Kecewakan Rakyat

Jenderal TNI Wiranto: Tak Usah Dikomentari Dulu

Wonosari, Bernas

Presiden BJ Habibie menegaskan, ABRI adalah milik nasional yang tak dapat terpisahkan dari rakyat. Oleh karena itu, ABRI tidak boleh mengecewakan rakyat. Ia sendiri menyatakan gembira terhadap upaya yang ditempuh ABRI untuk menyelesaikan masalah yang timbul di dalam ABRI sendiri, sehingga mendapat kepercayaan lebih besar dari rakyat.

Penegasan Presiden BJ Habibie itu, disampaikan pada peringatan Hari Bakti TNI AU di Desa Gading, Kecamatan Playen, Gunungkidul, DIY, Sabtu (25/7). Ia didampingi Ibu Hasri Ainun Habibie, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, dan sejumlah menteri lain.

ABRI, katanya, harus menjadi kebanggaan dan menyatukan rakyat. Dengan demikian, ABRI akan mendapat kepercayaan makin besar dari rakyat, dan masyarakat akan merasa lebih aman.

"Apa pun wujud langkah yang diambil ABRI, pada akhirnya perasaan tenteram lahir batin itu harus benar-benar tertanam di hati rakyat, sehingga rakyat dapat tidur nyenyak dan dapat bekerja dengan penuh kegairahan, sehingga roda ekonomi dapat berputar kembali," ujar Habibie.

Sepekan lalu, tepatnya Sabtu (17/7), Presiden menyatakan kepercayaannya bahwa ABRI akan menyelesaikan masalah yang dihadapinya, antara lain keterlibatan sejumlah anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam aksi penculikan terhadap para aktivis prodemokrasi.

"Saya percaya ABRI akan secara sistematis, bijaksana dan arif menyelesaikan masalah itu," katanya, saat itu.

Dua hari berselang, Senin (20/7), Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menegaskan, jika Dewan Kehormatan Militer (DKM) memang diperlukan untuk mengusut kasus itu, maka akan diumumkan dengan jelas.

Sementara itu, Puspom ABRI telah memeriksa setidaknya 11 anggota Kopassus yang diperkirakan terlibat dalam kasus penculikan. Bahkan Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal menjanjikan bahwa berkas pemeriksaannya, sebagian sudah akan tuntas Sabtu (25/7).

Terkait dengan hal ini, kemarin Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto meminta agar masyarakat sabar dan menunggu hingga pemeriksaan terhadap oknum Kopassus itu selesai.

"Tidak usah dikomentari dulu. Percayalah, ABRI dengan segala keikhlasan dan

Bersambung ke hal.8 kol 4

Derita Korban Culik

Bernas
27 Juli 1998

28 JULI 1998

"Kalau nanti dalam proses terbukti ada anak buah saya yang bersalah, saya siap mempertanggungjawabkannya."

| ***Letjen TNI Prabowo Subianto***, *sebagai apa, dalam berita Media Apa*

LAPORAN UTAMA

TERPERANGKAP DALAM JEBAKAN

Langkah Prabowo yang diduga memerintahkan penculikan para aktivis diperkirakan atas perintah mertuanya, H.M. Soeharto. Mengapa institusi di luar Kopassus yang mengetahui kegiatan ini memilih diam?

"Di sini tidak ada hukum. Di sini tidak ada hak asasi manusia. Orang bisa keluar hidup-hidup. Tetapi bisa pula keluar tinggal nama. Keluargamu pun tak bakal bisa menemukan tulang belulangmu."

Demikian kata-kata manusia bertopeng yang pertama kali mengintrogasi Pius Lustrilanang. Sebagai seorang aktivis, Pius merasa harus siap menghadapi segala risiko. Sebagai Sekjen Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), ia mengaku tak gentar dengan kata-kata seperti itu. Apa pun yang terjadi, ia mencoba tetap konsisten dengan sikap politiknya.

"Dari dulu saya yakin bahwa yang salah dalam sistem kehidupan kita ini adalah Soeharto," ujarnya. "Dan saya yakin," tuturnya lagi, "Prabowo hanya menjalankan perintah."

Sampai hari ini, masih ada 12 aktivis yang belum pulang. Menurut Pius, dari 12 aktivis itu, sebanyak lima orang di antaranya diperkirakan sudah meninggal. Karena, menurutnya, kala ia masih dalam sel penculikan, ia mendengar kabar dari sesama rekannya yang diculik bahwa rekannya itu sudah dilepas.

"Nah, kalau sampai kini mereka tidak pulang ke rumah, berarti mereka sudah meninggal. Dan sebagaimana diucapkan para penculik, bisa jadi tulang belulangnya pun sulit kita temukan," ujar Pius.

Apa pun, yang dikhawatirkan adalah kata-kata penculik itu mencerminkan tatanan moralitas yang berlaku di kalangan (oknum-oknum) anggota ABRI, yang secara kebetulan berkesatuan Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Bahwa di kalangan para penculik tidak berlaku apa yang disebut sebagai hukum dan hak asasi manusia. Dikhawatirkan, ketidakpulangan ke-12 aktivis itu menjadi pembenaran yang sangat otentik dari kata-kata yang menyeramkan itu.

Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI, Mayjen Syamsu Djalaluddin, menjelaskan, kini sudah ada sepuluh anggota Kopassus yang jadi tersangka. Malah, menurut sumber *SINAR*, salah seorang dari tersangka itu adalah Komandan Grup IV Kopassus, Kolonel (Inf.) Chairawan. Meskipun demikian, menurut Syamsu, oknum Kopassus itu memang semuanya berpangkat perwira. Perwira di sini, masih menurut Syamsu, berarti dari perwira menengah sampai jenderal.

PRABOWO

DOK. SINAR

SINAR Nusantara, 28 Juli 1998

37

“Sebagai komandan pasukan komando, segala yang dilakukannya juga berdasarkan komando. Prabowo sendiri, menurut saya, tidak mungkin berani bertindak seperti itu. Dia, kan, waktu itu masih mayor jenderal dan saya pikir dia juga tidak terlalu bodoh untuk melakukan aksi-aksi semacam ini kalau tidak ada perlindungan politik yang besar. Dan perlindungan politik itu adalah Soeharto sebagai kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi ABRI. Saya yakin prabowo diperintah oleh mertuanya itu.”

| ***Pius Lustrilanang***, *korban Penculikan, dalam berita Sinar ("Yang Salah Soeharto", 28 Juli 1998)*

LAPORAN UTAMA

"Yang Salah Soeharto"

PIUS Lustrilanang, salah seorang korban penculikan yang beberapa waktu lalu mengungsi ke Negeri Belanda, kini sudah kembali ke tanah air. "Saya ingin melanjutkan perjuangan saya," katanya kepada *SINAR*. Berikut penuturan pengalaman Pius selama dalam tahanan para penculik.

Penilaian Anda terhadap Tim Pencari Fakta dalam menjalankan tugasnya?

Penyidikan kasus penculikan ini sudah melangkah ke tahap yang sudah maju. Berbagai pihak menanggapinya terlalu lambat. Tetapi saya percaya bahwa pemeriksaan ini bakal menyentuh individu-individu yang memberikan perintah penculikan.

Apakah Anda masih yakin bahwa mereka yang diculik itu semuanya bakal selamat?

Mereka yang masih hilang itu jelas 12 orang aktivis. Dan lima dari ke-12 orang itu, menurut informasi yang saya terima, sudah meninggal. Sebab, pada tanggal 19 Maret 1998, ketika saya masuk, teman saya Tony dan Rian yang sudah sembilan bulan mendekam di situ dilepas. Tetapi sampai sekarang mereka belum pulang ke rumah.

Bisa saja mereka dieksekusi. Sebab, mereka selalu mengatakan bahwa di tempat itu tidak ada hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, kepada setiap orang yang diperiksa, mereka selalu mengatakan, "Kamu tahu ada orang yang keluar hidup, ada yang keluar mati dari tempat ini. Dan jangan harap keluargamu bisa menemukan tulang belulangmu."

Dari situ, dapatkah Anda mencium siapa sebenarnya yang menculik Anda?

Memang, saya punya keyakinan bahwa yang menculik saya, kalau bukan kesatuan khusus, ya, institusi yang mempunyai perlindungan politik tertentu. Jika tidak memiliki perlindungan politik yang sangat kuat, sehingga mereka punya keyakinan bahwa operasi semacam ini tidak bisa disentuh. Dan untuk hal ini, saya pelajari benar, bahwa pola-pola yang digunakan adalah pola-pola yang digunakan tahun 1970-an tentang petrus (penembakan misterius).

Kira-kira, kenapa Andi Arief diantarkan ke Polda? Yang berbeda dengan Anda apa sih?

Saya melihatnya ada dua plot. Ada dua kelompok operasi dan ini terjadi bersamaan dan saling berimpitan. Pertama, penangkapan aktivis PRD karena kasus bom di Tanah Tinggi, yang kedua pengamankan Kopassus ini, kan, salah satu pasukan komando. Dan di sini terjadi ada suatu komando yang dijalankan tidak tertib. Itu tidak mungkin dilakukan jika tidak mau konyol, karena risikonya tinggi. Perwira tinggi mana yang siap mempertaruhkan masa depan kariernya hanya karena punya payung politik?

Sebagai komandan pasukan komando, segala yang dilakukannya juga berdasarkan komando. Prabowo sendiri, menurut saya, tidak mungkin berani bertindak seperti itu. Dia, kan, waktu itu masih mayor jenderal dan saya pikir dia juga tidak terlalu bodoh untuk melakukan aksi-aksi semacam ini kalau tidak ada lindungan politik yang besar. Dan perlindungan politik itu adalah Soeharto sebagai kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi ABRI. Dalam hal ini saya yakin bahwa Prabowo diperintah oleh mertuanya itu.

Sebenarnya, mayoritas pertanyaan introgator itu mengarah ke mana?

Mereka menanyakan keterlibatan saya hingga hari-hari terakhir. Mereka tanya tentang LSM, soal pandangan saya terhadap Megawati dan Amien Rais. Saya juga diintrogasi soal kesan dan hubungan saya dengan Jenderal Benny Moerdani. Sebenarnya, saya menunggu ditanya apakah saya kenal Prabowo atau tidak, tetapi sayangnya hal itu tidak pernah ditanyakan.

"Yang paling dirugikan dari aksi-aksi saya adalah Soeharto."

PIUS LUSTRILANANG

Bagaimana Anda mengidentifikasi bahwa Anda berada di sekitar Cijantung?

Saya ditempatkan di ruangan khusus. Saya mendapat kesan bahwa makanan yang diberikan kepada saya dimasak di tempat itu juga. Karena masih hangat. Kadang saya dikasih lauk daging ayam, apel.... Yang menarik, suatu ketika saya diberi nasi bungkus, yang ketika saya perhatikan betcap rumah makan padang di Jalan Raya Cijantung. Dari situ saya berpikir, membeli nasi bungkus, kan, pasti mencari tempat yang terdekat, dan bukan mencari warung yang jauhnya sepuluh kilometer.

Kembali ke soal peranan Soeharto, seberapa besar keyakinan Anda?

Dalam berbagai konferensi pers, saya katakan tidak mungkin kalau Soeharto tidak terlibat. Soeharto naik ke tampuk kekuasan ini dengan korban yang begitu banyak. Nah, dalam hal ini, yang paling dirugikan secara langsung dalam semua aksi yang saya lakukan adalah Soeharto. Dalam sejarah aktivitas saya sejak tahun 1993, saya selalu melihat Soeharto sebagai persoalan. Saya sudah sering ditangkap dan diintrogasi. Dan dalam setiap introgasi, saya selalu mengan-

Sinar
28 Juli 1998

29 JULI 1998

"Saya bisa keluar dari tahanan rahasia karena adanya tekanan dunia internasional. Untuk itu saya pikir saya harus menggalang solidaritas internasional. Apalagi soal demokrasi dan hak asasi menjadi perhatian banyak negara, khususnya Amerika. Saya lihat banyak manfaatnya saya keluar negeri. Perubahan sikap Amerika dalam melihat proses reformasi di Indonesia. Puncaknya adalah pernyataan Madeleine Albright yang meminta Soeharto mundur. Ini kan percepatan hasil kampanye kita. Di Amerika, saya bertemu dengan banyak pihak dan semuanya berpengaruh, terutama Kongres. menurut teman LSM di sana, belum pernah ada riwayatnya Republik dan Demokrat bersatu menekan pemerintah untuk menghentikan satu latihan militer."

| ***Pius Lustrilanang***, *Korban penculikan,*

Panji Masyarakat
29 Juli 1998

Ini Berat
Bagi Wiranto

PANJI UTAMA

Bambang W. Soeharto

"Ini Mencari Jarum dalam Jerami"

Wawancara: Komnas HAM sejak awal tahu Kopassus pelaku penculikan. Yang terpenting mengusut motif politiknya.

Salah seorang anggota Komnas HAM yang aktif mengikuti kasus penculikan adalah Bambang W. Soeharto. Wakil Ketua Tim Pemantauan Komnas ini malah sempat mengantarkan Pius sampai ke pesawat terbang yang

tas, ABRI juga harus melakukannya. Sekarang ada langkah maju dari Pangab untuk menyatakan yang terlibat dari Kopassus. Saya optimistis akan diungkap semuanya.

Kedua, dari masyarakat internasional. Bila kasus ini tidak terungkap tuntas, maka kita akan dicap sebagai bangsa yang tidak beradap,

M. ZAKIR SALMIN

Bambang W. Soeharto.: Bentuk DKM

Ia menculik karena ada pertentangan politik an-

Panji Masyarakat
29 Juli 1998

Berikut wawancara tampaknya Panji Masyarakat dengan Wakil Ketua Pemantauan Komnas HAM Bambang W. Soeharto ("Ini Mencari Jarum dalam Jerami", 19 Juli 1998)

T: Komnas HAM sejak awal menyebut pelaku penculikan adalah kelompok terorganisasi. Apa sebenarnya sudah tahu pelakunya Kopassus?

J: Bahasa kita harus sopan dan harus menganut asas praduga tak bersalah. Sebenarnya sudah tahu, tetapi karena kami Komnas, maka yang dipakai bahasa Komnas. Bahasa yang transparan kami sampaikan ke Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI. Jiwa dan isi statemen itu sudah mengarah ke sana.

T: Komnas sekarang akan lebih memperhatikan nasib korban yang belum dilepas atau proses pengadilan militernya?

J: Pertama kita sangat peduli kepada mereka yang belum ditemukan. Mereka mungkin nasibnya lebih buruk dari yang kami pikirkan. Artinya, bisa saja me-

reka sudah tewas. Nah, ini harus dicari dan diungkap kuburnya di mana. Itu ABRI harus berani karena menyangkut kredibilitas mereka. Ada dua yang saya nilai dari pengungkapan ini kredibel atau tidak. Pertama, dari masyarakat sendiri. Bila ini diungkap sampai tuntas, masyarakat hanya akan menilai jika semua yang terlibat ditindak. tentu orang akan bertanya-tanya bila hanya sebatas pelaku penculikan, hanya prajurit-prajuritnya saja. Itu tidak cukup. Pasti ada motif politiknya. Jadi harus diungkap pelaku dan aktor intelektual penculikan tersebut. Harus diungkap itu supaya ABRI dipercaya rakyat. Mereka kan punya moto "yang terbaik untuk rakyat, terbaik untuk ABRI". Nah, kalau rakyat menuntut diusut tuntas, ABRI juga harus melakukannya. Sekarang ada langkah maju dari Pangab untuk menyatakan yang terlibat dari kopassus. Saya optimistis akan diungkap semuanya. kedua, dari masyarakat internasional. Bila kasus ini tidak terungkap tuntas, maka kita akan dicap bangsa yang tidak beradab, bangsa yang senang menghilangkan orang secara paksa. Lain bila ABRI berhasil, tidak hanya menghadapkan pelaku ke mahkamah militer, tetapi juga mengungkap aktor intelektualnya.

T: Ada kesan pengungkapan kasus ini sangat lambat.

J: Tidak. Di Argentina dan Kolombia, kasus penculikan baru bisa terungkap setelah tim dari PBB turun tangan. Itu sudah bertahun-tahun. Pengungkapan ini berhasil karena keberanian Pius Lustrilanang. Yang nggak berani ngomong. Mereka ngomong setelah dia. Karena itu pius saya selamatkan sampai ke pesawat terbang. Di situ dia membisikkan siapa yang menculiknya.

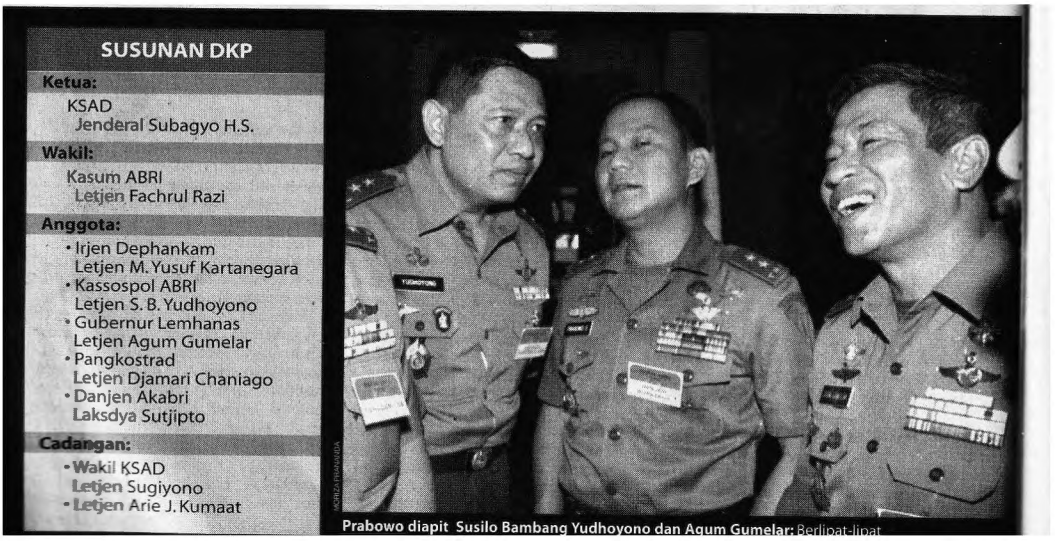

Prabowo diapit Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar: Berlipat-lipat

Panji Masyarakat
12 Agustus 1998

3 AGUSTUS 1998

Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Komposisi dewan ini adalah:

Ketua
KSAD Jenderal TNI Subagyo H.S.

Wakil Ketua:
Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara

Anggota:
Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, dan Danjen Akabri Laksdya TNI Achmad Sutjipto.

Anggota Cadangan:
Wakil KSAD Letjen TNI Sugiono, Mantan Dansesko ABRI Letjen TNI Arie J. Kumaat.

PANJI UTAMA

Prabowo dan Penculikan: Pangab akhirnya membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Komposisinya menunjukkan, Jenderal Wiranto ingin mendapatkan hasil objektif. Ada yang menghendaki atasan Prabowo juga diperiksa.

Jenderal Wiranto mengumumkan DKP: Ingin objektif

Jenderal Subagyo H.S. dan Prabowo: Siap mati mengamankan negara

GOLDEN BOY DI UJUNG TANDUK

Prabowo lagi! Tapi sekarang keadaannya sungguh tidak menyenangkan: jenderal bintang tiga ini sedang menghadapi situasi yang bisa menamatkan karier militer dan membuyarkan ambisi politiknya. Letnan Jenderal Prabowo Subianto memang harus menghadapi pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang sudah mengantongi data lengkap mengenai kasus penculikan para aktivis politik. Dia juga dibebastugaskan dari jabatannya sebagai komandan Sesko ABRI. "Kami berharap pekan ini Prabowo diperiksa," kata Kasum ABRI Letjen Fachrul Razi, yang menjadi wakil ketua DKP.

Dewan Kehormatan Perwira, diumumkan Senin lalu, merupakan tim yang bertugas memeriksa para perwira tinggi yang diduga melanggar kehormatan perwira. DKP diketuai KSAD Jenderal Subagyo H.S. Selain Fachrul Razi, lima letnan jenderal menjadi anggota DKP. Dua jenderal berbintang tiga lainnya menjadi anggota cadangan. (Lihat Susunan DKP). "DKP ini akan bersidang dan memberikan keputusan serta pertimbangan kepada Pangab," kata Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto.

Yang menarik, para perwira tinggi (pati) yang berada di DKP ini. Jenderal Wiranto tampaknya ingin DKP menghasilkan pemeriksaan yang objektif. Sebab itu, selain menempatkan pati yang disebut dekat dengan Prabowo, juga menempatkan orang yang disebut netral. Yang dekat dengan Prabowo, misalnya, Jenderal Subagyo H.S. dan Letjen Fachrul Razi.

Sementara yang dinilai netral adalah Letjen Agum Gumelar, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, dan Laksda Sutjipto. Sedangkan Letjen Djamari Chaniago disebut lebih dekat dengan Wiranto. Pertimbangan lainnya, tentu menyangkut penguasaan tentang Kopassus (diwakili Agum Gumelar), dan doktrin ABRI oleh Laksda Sutjipto.

Kenapa DKP? Menurut Jenderal Wiranto, di ABRI terdapat kode kehormatan perwira (Budi Bakti Wira Utama). Yang akan diajukan kepada DKP, lanjut Wiranto, adalah mereka yang nyata-nyata melanggar dan merugikan disiplin keprajuritan dan ABRI. Pangab Wiranto pun menyebut Letjen Prabowo, Mayjen Muchdi P.R., dan Kolonel Chairawan (Dan Grup IV Kopassus), yang diperiksa DKP. "Selain itu akan ada mahkamah militer untuk mengadili prajurit ABRI yang diduga melakukan tindak pidana terhadap kasus orang hilang," ujar Wiranto.

Pembentukan DKP menunjukkan keinginan ABRI untuk menuntaskan perkara penculikan para aktivis. Seperti diketahui, para aktivis itu kemudian disekap di markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Setidaknya, sampai kini ada 12 aktivis yang telah dilepaskan. Tapi, tim Kontras mencatat masih ada 14 aktivis yang belum jelas rimbanya. "Kasus ini memang harus diselesaikan secara transparan," kata Menhankam AS William Cohen, seusai bertemu Wiranto, Sabtu pekan lalu.

Wiranto tampaknya berusaha keras memulihkan citra instansi yang dipimpinnya. Namun, dia menepis tindakan tegasnya menyangkut soal politik. Yakni, adanya persaingan dirinya dengan Prabowo. Prabowo memang pernah disebut-sebut berpeluang menempati posisi tertinggi di ABRI. "Proses ini bebas masalah politis. ABRI itu satu jiwa," katanya.

Kabarnya, Prabowo sendiri pernah diperiksa Puspom ABRI. Pemeriksaan itu dilakukan pukul 21.00 Jumat pekan lalu. Selain itu, Mayjen Muchdi P.R. sudah datang memenuhi panggilan Puspom ABRI. "Mereka datang bergantian," kata sumber *Panji*.

Nasib Si Golden Boy. Sesungguhnya, melihat garis prestasinya, Prabowo bisa digolongan cemerlang. Dalam banyak pendidikan, dia berhasil lulus dengan sangat memuaskan.

Letjen Prabowo Subianto lulus Akabri 1974. Keinginannya menjadi tentara memang kuat. Suami Siti Hediati (putri mantan Presiden Soeharto) ini, walaupun diterima di tiga universitas di AS, lebih memilih pendidikan di Akabri. Setelah tamat, Prabowo lebih banyak berkarier di pasukan baret merah. Di kesatuan elite Angkatan Darat inilah kariernya melesat.

Ketika Timor Timur bergolak tahun 1976, Prabowo pun diterjunkan di sana. Ia tergabung dalam Tim Nanggala X. Bintang mulai bersinar, kala berpangkat letnan satu, Prabowo mendapat kesempatan memimpin Nanggala 28. Pasukan ini akhirnya berhasil menembak mati Presiden Fretilin Nicolao Lobato. Prabowo pun naik pangkat menjadi kapten. *Job* yang diembannya adalah Perwira Operasi Grup I Kopasandha (sebelum diubah menjadi Kopassus).

Kemudian Prabowo mendapat kesempatan memperdalam ilmu militernya. Tahun 1980, cucu pendiri Bank BNI '46 dan Dewan Pertimbangan Agung, Margono Djojohadikusumo ini, mengikuti pendidikan infantri di AS. Seterusnya, dia menimba ilmu di Jerman Barat tentang pasukan antiteror.

Kembali ke Indonesia, bersama beberapa perwira Prabowo mendapat tugas membentuk Detasemen 81 (pasukan antiteror). Posisinya di grup ini sebagai wakil komandan. Setelah berpangkat mayor dia mendapat jabatan baru sebagai Wadan Yon Infantri 328 Kostrad. Ia pun sempat mengikuti pendidikan perwira lanjutan di AS. Prabowo lulus dengan predikat *honor graduate advanced course*.

Maka laju Prabowo pun tak bisa dicegah. "Di sinilah Prabowo mulai ambil peranan dalam menentukan 'orang-orang' yang akan menduduki posisi di AD," kata seorang mantan atasannya. Dan, Prabowo pun mendapat julukan si Golden Boy. Banyak orang mendekat kepadanya.

Apalagi, kemudian Prabowo—saat menjabat komandan Kopassus—mendapat tugas memekarkan pasukan baret merah itu dari tiga grup menjadi lima grup pada tahun 1996. "Pemekaran ini dilakukan sesuai dengan

16 PANJI MASYARAKAT NO. 17 TAHUN II • 12 AGUSTUS 1998

PANJI MASYARAKAT NO. 17 TAHUN II • 12 AGUSTUS 1998 17

Panji Masyarakat
12 Agustus 1998

"Dewan Kehormatan Perwira (DKP) berfungsi memberikan pertimbangan kepada Pangab untuk pengambilan keputusan"

| ***Jenderal TNI Subagyo H.S.*** *KASAD*

"DKP dibentuk untuk memeriksa perwira tinggi yang diduga melanggar kehormatan perwira. Di ABRI terdapat kode kehormatan perwira (Budhi Bhakti Wira Utama). Mereka yang diajukan ke DKP adalah mereka yang nyata-nyata melanggar dan merugikan disiplin keprajuritan dan ABRI. Selain itu, ada mahkamah militer untuk mengadili prajurit ABRI yang diduga melakukan tindak pidana terhadap kasus orang hilang. Langkah ini merupakan perwujudan tekad ABRI dalam era reformasi yang mengutamakan kejujuran."

| ***Jenderal TNI Wiranto**, Menhankam/Pangab*

"Dalam kasus penculikan, pelaku bisa dikenakan pasal 333 KUHP. Bahkan, ada empat kemungkinan tindakan kepada seorang perwira. Pertama, pelanggaran kode etik yang diselidiki DKP. Kedua, dikenai hukuman pidana yang diselesaikan mahkamah militer. Ketiga, kena hukuman disiplin yang akan diselesaikan oleh atasan yang berhak menghukum. Keempat, sanksi oleh tata negara dan oleh administrasi militer. Dengan DKP, hukuman perwira tidak bisa dianggap lebih ringan."

| ***Mayjen TNI Achmad Roestandi**, Ketua Fraksi ABRI*

4 AGUSTUS 1998

Mantan Komandan Grup IV Kopassus, Kolonel Inf Chairawan diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Pemeriksaan terhadap alumni Akabri 1980 ini berlangsung sekitar delapan jam.

Grup IV Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, yang dipimpin Chairawan ini memang spesialis intelijen. Combat intelligence. Kopassus di Serang dan Kartasura, Grup I dan II, untuk parakomando. Grup III di Bandung untuk pusat dan diklat. Sementara Grup V di Cijantung dikhususkan untuk antiteror.

Kol Inf. Chairawan membawahi Detasemen Operasi Psikologis yang bertugas membantu pasukan Sandi Yudha menjalankan conditioning operation (operasi pengkondisian). Detasemen yang dilatih secara khusus di Amerika Serikat ini diberi hak melakukan operasi sendiri.

Chairawan termasuk perwira cemerlang lulusan Akabri 1980. Ia adalah orang pertama di angkatannya yang meraih pangkat kolonel. Ia mulai dikenal setelah berhasil dalam operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Irian Jaya (Papua), pada 1996.

HARIAN UMUM

MEDIA INDONESIA

PEMBAWA SUARA RAKYAT

KUIS BERHADIAH 150 JUTA di Halaman 12

Prabowo Mulai Diperiksa

■ KSAD Pimpin Langsung Sidang DKP

JAKARTA (Media): Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi serta mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Inf Chairawan, kemarin mulai diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin KSAD Jenderal TNI Subagyo.

Pemeriksaan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung di ruang rapat lantai dua Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jl Merdeka Utara No 2, Jakarta Pusat.

Seluruh anggota DKP hadir. Selain Jenderal TNI Subagyo, hadir pula Wakil Ketua Letjen TNI Fachrul Razi, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, dan lima anggota lainnya yakni Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Laksamana Madya TNI Soeratmin, dan Laksamana Madya TNI Achmad Sutjipto.

Seperti diketahui, Pangab Jenderal TNI Wiranto, Senin lalu membentuk DKP dengan tugas memeriksa keterlibatan ketiga pentolan Kopassus itu dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu. Selama diperiksa, Prabowo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Dan Sesko ABRI, Muchdi dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Wairjen ABRI, dan Chairawan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Dan Grup IV Kopassus.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Ray ketika ditemui di kantornya membenarkan adanya sidang DKP terhadap ketiga perwira yang diduga melanggar kode etik perwira itu.

"DKP sudah melaksanakan tugasnya. Kita tunggu saja hasilnya yang akan diumumkan ...

DEWAN KEHORMATAN PERWIRA: (A) Jenderal Subagyo HS (Ketua), (B) Letjen Fachrul Razi (Wakil Ketua), (C) Letjen S Bambang Yudhoyono, (D) Letjen Agum Gumelar, (E) Letjen Djamari Chaniago, (F) Laksdya Achmad Sutjipto, (G) Laksdya Soeratmin, (H) Letjen Sugiono. Foto dua anggota lainnya, Letjen Yusuf Kartanegara dan Letjen Arie Kumaat, tidak tersedia.

■ FOTO-FOTO: GINO F HADISAPUTRA & IMPRESI FOTO: IY & DUN

... ping. "Pendamping itu bisa dari ABRI, tapi bukan dari kesatuan. Saya tidak tahu siapa yang akan mendampingi mereka," katanya. ...

... kah ada pelanggaran atau kesalahan dari ketiga perwira tersebut."

Ketika ditanya apakah pendamping berhak memberikan ...

... runtukkan memberikan pengertian aspek hukum.

Ia menambahkan, pangkat dari pendamping tersebut tidak harus ...

... na hal itu merupakan penunjukan langsung dari Pangab.

Ditanya apakah DKP bersidang tiap hari, Putu Rai ...

... mengatakan pada prinsipnya sama. Antara DKP dan DKM hanya beda nama, prinsipnya sama yakni me- ...

... agar Prabowo mau terbuka dan jujur mengatakan siapa yang memberikan perintah penculikan para aktivis ini.

"Karena bagaimanapun juga pasti ada perintah dari atasan yang lebih tinggi, sebab di tentara anak buah hanya menjalankan perintah," kata mantan Dubes RI di India itu kepada *Media*, kemarin malam.

Menurut Radjagukguk, nama korps baret merah sudah tercoreng dalam kasus penculikan ini. Oleh karena itu keterbukaan Prabowo di sidang DKP dapat membuka mata para prajurit Kopassus mengenai hal-hal di balik kasus penculikan ini. Sehingga setiap prajurit Kopassus akan tetap menjalankan perintah komandannya.

"Bila Prabowo tidak terbuka akan membawa pengaruh bagi para prajurit Kopassus dalam menjalankan perintah dari komandannya. Mereka akan menjadi ragu-ragu atau takut," tandas Radjagukguk.

Radjagukguk mengaku memberikan pernyataan ini sebagai *moral force* dan tidak ada muatan politiknya. "Saya hanya ingin menekankan di ABRI tidak ada anak buah yang bersalah, karena mereka ini hanya menjalankan perintah. Semua tanggung jawab ada di komandan," papar Radjagukguk.

Sedangkan mantan Pangkopkamtib Laksamana TNI (Pur) Sudomo menegaskan jika ditemukan unsur pidana, Prabowo, Muchdi, dan Chairawan bisa diajukan ke Mahkamah Militer.

Dia menegaskan, pembentukan DKP itu bukan merupakan akal-akalan agar kasus ini tidak dilanjutkan ke Mahkamah Militer. "Masyarakat tidak perlu khawatir. Kita percayakan kepada DKP. Apalagi ini menyangkut nama ABRI," tandas Sudomo.

Sudomo menambahkan, tidak ada seorang pun yang kebal hu- ...

Media Indonesia
5 Agustus 1998

"Bagaimanapun juga pasti ada perintah dari atasan yang lebih tinggi, sebab di tentara anak buah hanya menjalankan perintah. Nama korps baret merah sudah tercoreng dalam kasus penculikan ini. Oleh karena itu, keterbukaan Prabowo di sidang DKP dapat membuka mata para prajurit Kopassus mengenai hal-hal di balik kasus penculikan ini. Sehingga, setiap prajurit Kopassus akan tetap menjalankan perintah komandannya."

| ***Letjen TNI (Purn) Sahala Rajagukguk**, Mantan Wakasad, dalam berita Media Indonesia ("Prabowo Mulai Diperiksa", 5 Agustus 1998)*

5 AGUSTUS 1998

Lokasi tempat penyekapan para aktivis demokrasi itu sebenarnya bukan tempat rahasia bagi jajaran anggota pasukan elite ini. Tempat ini merupakan tempat hukuman bagi anggota Kopassus yang desersi atau nakal.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo melihat langsung lokasi penyekapan para aktivis prodemokrasi di Grup IV Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Di kalangan pasukan elite Baret Merah, lokasi tersebut dikenal dengan nama "kapal selam" karena berada di bawah tanah.

Sebelum ke lokasi penyekapan, tim DKP pada pukul 09.00 WIB mengunjungi Markas Komando (Mako) Kopassus dan diterima langsung Danjen Kopassus Mayjen TNI Syahrir M.S. Sekitar empat jam kemudian, pada pukul 12.55 rombongan dengan menggunakan bus meluncur ke lokasi penyekapan yang jaraknya sekitar 500 meter dari Mako Kopassus.

> **"Kasus penculikan aktivis ini sangat dilematis dan berkaitan dengan citra ABRI. Karena itu, kasus ini seharusnya langsung saja diajukan ke Mahkamah Militer Tinggi yang akan memeriksanya secara pidana dan transparan. Dengan penanganan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ini citra ABRI benar-benar dipertaruhkan."**
>
> | ***Luhut M. P. Pangaribuan**, Pakar Hukum dan Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta*

Pemeriksaan lokasi tempat penyekapan itu berlangsung hanya 15 menit. Rombongan lalu kembali ke Mako untuk memeriksa jajar pasukan.

Lokasi tempat penyekapan para aktivis demokrasi itu sebenarnya bukan tempat rahasia bagi jajaran anggota pasukan elite ini. Tempat ini merupakan tempat hukuman bagi anggota Kopassus yang desersi atau nakal.

HARIAN UMUM
MEDIA INDONESIA
PEMBAWA SUARA RAKYAT

150 JUTA
di Halaman 11

DKP Periksa Lokasi Penyekapan

Tempat Itu Biasa Disebut 'Kapal Selam'

JAKARTA (Media): Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, kemarin melihat lokasi penyekapan para aktivis prodemokrasi di Grup IV Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Di kalangan pasukan elite Baret Merah, lokasi tersebut dikenal dengan nama 'kapal selam' karena berada di bawah tanah.

Sebelum ke lokasi penyekapan, Tim DKP pada pukul 08.00 WIB mengunjungi Markas Komando (Mako) Kopassus dan dilanjutkan langsung Danjen Kopassus Mayjen TNI Syahrir MS. Sekitar empat jam kemudian pada pukul 12.55 WIB rombongan dengan menggunakan bus melanjutkan ke lokasi penyekapan yang jaraknya sekitar 500 meter dari Markas Kopassus. Kendati berjarak hanya 500 meter perjalanan menuju 'kapal selam' memlah-lilah dan melewati beberapa pos juga.

Media yang berada di dekat lokasi 'kapal selam' menyaksikan seluruh anggota DKP hadir, seperti Letjen TNI Fachrul Razi, Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Laksamana Madya TNI Achmad Sutjipto, Letjen TNI Yusuf Kartanegara, dan Letjen TNI Aris Kamaat. Tampak turut serta dalam rombongan tersebut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Kiri.

Seperti diketahui, Pangab Jenderal TNI Wiranto pada Senin lalu mengumumkan pembentukan DKP dengan tujuan memeriksa mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto yang kini menjabat Dan Seskil ABRI, Mayjen TNI Muchdi yang kini menjabat Wajen ABRI, serta mantan Dan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu. Selama pemeriksaan, ketiga petinggi Kopassus tersebut dibebastugaskan dari jabatannya masing-masing.

Pemeriksaan ketiga perwira tersebut berlangsung tertutup. Juga ketika Tim DKP meminjau lokasi penyekapan. *Media* hanya bisa memyaksikan dari luar lokasi penyekapan.

Pemeriksaan lokasi tempat penyekapan itu berlangsung hanya sekitar 15 menit dan pukul 13.15 WIB rombongan kembali ke Mako Kopassus untuk memeriksa jajar pasukan.

Lokasi tempat penyekapan para aktivis demokrasi itu sebenarnya bukan tempat rahasia bagi jajaran anggota pasukan elite Baret Merah. Lokasi ini di lalangan anggota Kopassus dikenal dengan nama 'kapal selam' karena letaknya di bawah tanah. Tempat ini merupakan tempat hukuman bagi anggota Kopassus yang dinomi atau nakal.

Adalah Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu yang pertama kali secara terbuka mengatakan lokasi penyekapan para aktivis adalah Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Namun ketika ditanya-kan apakah 12 korban penculikan lain yang sampai sekarang belum bebas juga disekap di lokasi tersebut, Danpuspom ABRI itu mengatakan tidak ditemukan korban lain di tempat penyekapan tersebut.

Beberapa korban penculikan seperti Pius Lustrilanang mengerkarkan paling tidak lima korban penculikan telah tewas.

Berakhir

Sementara itu sumber Media mengatakan kasus militer mereka yang diperiksa DKP telah berakhir. Berakhirnya kasus militer itu melalui tiga cara yakni masa pensiun dipercepat, dibebastugaskan secara terhormat, dan diberhentikan dengan tidak hormat.

"Jadi perwira yang terkena DKM atau DKP sudah pasti karir militernya berakhir, karena jelas nonaktif ini telah melanggar kode etik perwira atau telah prosedur," ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, kemarin, Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengirimkan surat kepada DKP. Isi surat tersebut di antaranya meminta agar semua proses yang berkaitan dengan penyelesaian kasus penculikan harus dapat mengungkap kejelasan siapa di balik peristiwa yang sampai sekarang belum jelas nasibnya.

Sementara itu Lookman Soetrisno, Sosiolog UGM, ketika membicarakan hasil rumusan 'Strategi dan Upaya Pemyusunan Agenda Politik dalam Reformasi' di Yogyakarta, kemarin mengatakan ketidakbasan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi, dan Kol Inf Chairawan dalam kasus penculikan para aktivis, membuktikan bahwa selama ini tindakan militer Indonesia tidak profesional.

Ia mengatakan, sikap tidak profesional itu ditunjukkan dengan kebasan sekalipun kebasaan ciampur tangan dalam kehidupan sosial politik dan pendekatan kekerasan dalam konflik-konflik sosial politik, seperti penculikan aktivis.

Tidak profesionalnya militer Indonesia itu, tambahnya, juga ditunjukkan dengan merasa-lapuya konflik antara di tubuh ABRI seperti pertikaian antara Syarwan Hamid dan Soepono. (Wdh/Wss/DnD-12)

50% Bunapro tabungan dengan bunga paling menarik
hubungi customer service kami!

LANGKAH KETAKSIRAN: Jangan khawatir. Badia ini tidak bermaksud bunuh diri. Dia cuma ingin mencoba kingerahan ketika berjalan di lanai Wall of Faith Blackpool Tower. Inggris, Begitu lanai tersebut, di ketinggian sekitar 160 meter dari tanah tersebut dari lantai berlubuk pasirdang. Kendati aman, mereka yang takut ketinggian disarankan tidak mencobanya. (AP)

Polisi Izinkan Mega Mengadakan Rakernas

Warga PDI Diminta Panjatkan Doa

JAKARTA (Media): Kepolisian telah mengeluarkan izin kepada Ketua Umum DPP PDI Mutasi Megawati Soekarnoputri untuk mengadakan Rakernas di Depok, hari ini, kata Asisten Intel Mabes Polri Mayjen Pol Kuntadiyono.

Kusudiyono menjelaskan, Perpu No 2/1998 mengizinkan orang berkumpul lebih dari 50 orang asal ada izin pihak kepolisian. "Mereka sudah memberi tahu dan kita mengizinkan," katanya kepada pers di Bina Graha, kemarin. Ia didampingi oleh Direktorat Sospolmas Mayjen Pol Dai Bachtiar.

Megawati Soekarnoputri

Ditanya apakah pemberian izin ini tidak menunjukkan ambivalensi sikap pemerintah, kareta sebenarnya yang diakui adalah PDI Kongres Soerjadi, Kusudiyono menjawab, tidak. "Pemberian izin ini tidak berarti pemerintah mengakui kelompok Megawati," tuturnya.

Sementara Menko Polkam Feisal Tanjung sebelum Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin, menyiakan Megawati untuk memilih jalur mana yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah PDI. "Kalau mau jalur hukum silakan. Kalau mau jalur politik, silakan. Mau bersatu, juga silakan. Semua kita beri kesempatan agahagi sesuiah ada UU Kepartaian. Kalau mereka mau bersatu lebih bagus lagi. Itu yang kita harapkan," ujarnya.

Ditanya apakah dia bersedia mendamaikan, Feisal mengemukakan kalau ingin damai tidak usah melalui dirinya "Sesepuh mereka *kan* ada. Tetapi kalau mereka meminta saya, boleh boleh saja," katanya.

Sementara Megawati, kemarin, menyampaikan pesan harianya. "Setelah dua tahun dalam ketidakpastian, aktivitya kita ketahui melalui Tim Pembela Demokrasi Indonesia bahwa Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan pe-netapan hukum atas perkara perdata No. 299/ Pdt.G/1996/PN Jkt Pst jo No. 736/Pdt/1996/PT DKI Jakarta tentang gugatan DPP PDI terhadap pihak pihak yang melakukan konspirasi politik dan praktek pemakusan kehendak menyelenggarakan apa yang dinamakan 'Kongres IV PDI' di Medan pada tahun 1996 yang lalu."

Selubungan dengan hal tersebut, Megawati mengajak seluruh warga dan simpatisan pendukung PDI untuk memanjatkan doa agar Hakim Agung yang mengadili perkara itu mampu mengeluarkan keberanian.

"Sebagai warga bangsa yang Berkemhanan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing secara ikhlas dan penuh khidmat ke hadirat Allah Yang Maha Adil dan Yang Maha Bijaksana. Semoga para Hakim Agung yang mengadili perkara tersebut memperoleh rahmat Nur Ilahi yang menerangi jiwa dan pikiran mereka, sehingga mereka mampu menegakkan kebenaran dalam membuat penetapan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat."

Megawati juga mengajak warga dan simpatisan PDI untuk tetap tabah, dan senantiasa menunjung tinggi hukum yang berlaku.

"Walaupun sering kali mengalami perlakuan yang diskriminatif, namun tetaplah bersabar dan senantiasa mantapkan tekad untuk menghormati dan menjunjung tinggi segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), yang oleh karenanya dalam era reformasi ini, kegiatan pasti segera akan berlalu." (Rid/Aw/M-3)

Puspom ABRI Teliti Tiga Mayat tak Dikenal

JAKARTA (Media): Masyarakat Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara telah menemukan tiga mayat laki-laki tidak dikenal yang diduga sebagian dari aktivis yang hilang yang sampai sekarang belum kembali. Mayat-mayat tersebut ditemukan sekitar dua bulan lalu.

Dokter Zulhumsyah Sutanto, ahli forensik RSCM Jakarta menuturkan hal tersebut kepada pers kemarin di Jakarta usai bersama tim Puspom ABRI meneliti ketiga mayat tersebut.

Menurut dr Zulhumsyah, masyarakat menemukan mayat tersebut sejatinya pada 17 Mei 1998. Saat hendak memancing, mereka melihat gundukan pasir kemudian membongkarnya. Ketika digali, ditemukan tiga mayat tersebut berada sekitar 20 lapisan dan dilihat dari proses pembusukannya hanya mayat tersebut telah dikubur antara dua atau tiga bulan.

Seribu yang melaporkan kehilangan anak keluarga. Pemeriksaan mayat tersebut dilaporkan ke Puspom ABRI pada 30 Juli. Berbekal laporan tersebut Puspom ABRI membentuk tim dengan beranggotakan 15 orang dari Puspom dan empat dari doktor forensik. Tim tersebut datang ke Pulau Untung Jawa menyamar sebagai turis.

Pada 04 Agustus ada kepastian mengenai kebenaran adanya tiga mayat tersebut. Sore itu juga keburan tersebut langsung digali dan tiga mayat itu diangkat kembali. Dari hasil pengecekan tersebut ditemukan jaket dompet, jam tangan, serta harmonika. Namun pihak Puspom ABRI belum dapat memastikan identitas korban.

Hasil visum sementara mengungkapkan ketiga mayat tersebut berusia sekitar 20 tahun dan dilihat dari proses pembusukannya hanya mayat tersebut telah dikubur antara dua atau tiga bulan.

Semenara na koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengatakan, pihaknya sudah memperoleh informasi mengenai identitas tiga mayat tersebut. Mereka adalah Leonardus Gilang Nugroho, Yadin Muhidin, dan Petrus Bima Anugerah.

Siap bertemu

Sementara itu korban penculikan Hendrik Sirait menyatakan siap bertemu Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu dalam waktu dekat.

"Kalau kepentingannya untuk pengusutan atas kasus penculikan, Hendrik siap untuk bertemu Danpuspom," ujar Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi selaku kuasa hukum Hendrik Sirait ketika dihubungi *Media* di kantornya, kemarin. Sebelumnya Hendrik menceritakan tentang kasus penculikan dirinya yang melibatkan oknum-oknum Kodam Jaya.

Hendardi mengakui kasus penculikan yang melibatkan oknum ABRI ini harus diselesaikan melalui jalur polisi militer sebagai lembaga yang berwenang dalam proses hukumnya.

"Kita tidak keberatan untuk datang memenuhi undangan Danpuspom dan mengungkap kasus ini secara tuntas agar oknum-oknum Kodam Jaya yang terlibat dapat dihukum," tegasnya.

Sebuah sumber di Danpuspom Mayjen Syamsu menyiapkan agar Hendrik Sirait yang mengaku telah diculik oleh oknum Intel Kodam Jaya datang ke Puspom bersama pengacara. (Wdh/LIG/Wss/fb/D-12)

Mahasiswa Trisakti Tersangka Pengeboman Rumah Gubernur

JAKARTA (Media): Seorang mahasiswa Trisakti, Deny Januar Ali Bepsos, Jakarta Selatan ditangkap petugas Polres Jakarta Pusat, kemarin. Ia diduga pelaku peledakan bom di rumah Gubernur DKI Jakarta, Surdin Ishak.

"Memang kami sudah ketangkap dan diinterogasi mengenai tersangka lainnya yang ikut bersama-sama dalam kelompoknya. Kasusnya sekarang masih dalam pemeriksaan intensif," kata Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Noegroho Djajoesman di Polres Jakarta Pusat, kemarin.

Tersangka pada Selasa (04/8) malam itu yang lagi ke rumah rahasia Jakarta dan melihatnya, sambil mempersiapkan segala barang-barang yang diperlukan. Ia berada di rumah Gubernur DKI.

Para saksi hanya melihat dari luar saja karena tidak berani bertanya-tanya karena tersangka sangat sangar. Kata Kadit Serse Polda Metro Jaya Kol Pol Drs Gories Mere didampingi Kapolres Jakarta Pusat Letkol Pol Drs Imam Haryanto.

Sedangkan tersangka Dicky Pesanta (20) dalam klasifikasi Kadit Serse Polda Metro Jaya mengatakan masih dalam pemeriksaan.

Sedangkan masih dalam pemeriksaan untuk sementara motifnya pun belum ada kepastian tersangka sudah ditangkap pukul 05.00 Rabu (5/8) dan masih dimintai keterangan dibawah Satuan Serse mulai tingkat Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya termasuk Satuan Polda Metro Jaya yang dalam waktu singkat sesuai dengan kemampuan yang berhasil untuk mengungkap kasus ini. (Sas/Fb-12)

Gubernur Soetjono belum melihat 'ada provokasi' dalam peledakan bom tersebut. Ia hanya berharap agar pelakunya cepat tertangkap dan mendapat hukuman yang setimpal.

Karena itu, ia tidak berniat melihat barang buktinya. Ia hanya berharap Polda Metro Jaya yang menyelidiki dan mengungkap pelakunya.

Bukan bermedia

Gories Mere hingga kemarin belum berhasil mengungkapkan motif tersangka melakukan perbuatan mkatnya, yakni, datang dua malam berturut-turut ke Jl. Taman Suropati, Jakarta Pusat. Setelah malam, meletupe bom ke rumah Soetjono, dan kembali datang kesokan harinya (Selasa malam), dengan kendaraan yang sama, mobil Suzuki Escudo B 2132 M warna hijau.

Saat ditanyakan, apakah motifnya merupakan dendam pribadi atau bermotifkan politik, Gories Mere menolak memberi jawaban. Katanya penyelidikan masih berjalan terus di mana tersangka selama beberapa hari berkangsan ini.

Deny yang pernah sebagai mantan pejabat di Bank Indonesia ditangkap sekitar pukul 05.00 di rumah di Tebet bersama barang bukti berupa sejumlah angin pipa, Sat Nova dan beberapa kotak petasan besar kecil sesukanan panitel kisah ini.

Pengungkapan kasus ini berkat hasil laporan masyarakat tentang kendaraan yang digunakan Deny serta kerja sama pihak Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya termasuk Satuan Polda Metro Jaya yang dalam waktu singkat sesuai dengan kemampuan yang berhasil untuk mengungkap kasus ini. (Sas/Fb-12)

Kapolri Benarkan Ada Pengaduan

Syarwan Hamid Membantah

JAKARTA (Media): Kapolri Letjen Pol Roesmanhadi membenarkan, pihaknya sudah menerima pengaduan Mahfudgri Syarwan Hamid atas pemberitaan media massa yang dinilai telah mencemarkan dirinya.

"Sudah mengajukan pengaduannya kepada saya, dan sudah saya serahkan kepada Reserse. Selanjutnya akan dipelajari dulu kasusnya oleh Reserse," kata Kapolri kepada pers di Sukabumi, kemarin, tanpa merinci jumlah media cetak yang dilaporkan Syarwan.

Seperti diberitakan *Media*, kemarin, sebanyak 12 media cetak dilaporkan Syarwan ke Mabes Polri. Laporan itu langsung ditindaklanjuti Kapolri.

Namun, Syarwan yang ditemui pers sebelum mempikuti Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin di Bina Graha, kemarin, membantah pihaknya sudah mengadukan 12 media cetak.

"Nilai ada itu. Semuanya masih dievaluasi. Saya tuntut berbicara lebih detail dengan Bito Hakam. Dari media dapat apapun 12 itu. Kalau pers yang proporsional kemarin saya rapatkan dengan kuasaya.

"Benar. Bukan hanya media massa saja tetapi juga perorangan," kata Syarwan.

"Sudah berapa media massa yang dimyakinkan akan diadukan ke penyelidikan?

Belum selesai, mereka belum laporkan kepada saya Polda-lama selesai saja."

Sementara itu, saya yang bertanggung jawab atas pertanyaan 27 hal."

Saya tidak tuan mengawali perkaranya di sini, sudah serahkan ke penyidikan. Silakan saja," kata Syarwan.

Meski Syarwan membantah telah mengadukan sejumlah media massa, namun Kapolri membenarkan telah menerima laporan. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pemberitaan yang dinilai telah mencemarkan nama baik, Syarwan mengadukan media massa yang dianggap telah merugikan dirinya.

Sementara itu, Syarwan yang didampingi Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono serta sekretaris negara Akbar Tandjung, kemarin secara sekaligus mengadakan pertemuan dengan Direktur Reserse Umum Kolonel Pol Sidi Dasmo di dan sekretaris Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja. Kedua pejabat tinggi Polri tersebut dalam pertemuan tersebut diduga membicarakan masalah yang dihadapi Syarwan.

Sementara itu, Syarwan yang didampingi Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono serta sekretaris negara Akbar Tandjung, kemarin secara sekaligus mengadakan pertemuan dengan Direktur Reserse Umum Kolonel Pol Sidi Dasmo di dan sekretaris Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja. Kedua pejabat tinggi Polri tersebut dalam pertemuan tersebut diduga membicarakan masalah yang dihadapi Syarwan.

BANTUAN DARI SINGAPURA

MENGHANGAR: Dua pesawat Hercules milik Angkatan Udara Singapura mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (5/8) pagi. Kedua pesawat tersebut membawa bantuan kemanusiaan untuk para korban banjir di Jawa Timur. Bantuan tersebut berupa 10 ton beras, 1.000 selimut, 1.000 tenda, 1.000 kelambu, 1.000 kotak obat-obatan, dan 1.000 kotak makanan siap saji. (Ant/Fb-12)

Dewan kehormatan perwira (DKP) memiliki cacat hukum karena prosedur pembentukannya melanggar surat keputusan (SKEP) pangab nomor 05/kep/838/iii/1995 tertanggal 27 november 1995 tentang naskah sementara DKP ABRI. Dalam skep disebutkan, lembaga ini dibentuk setelah mahkamah militer (mahmil) mengeluarkan putusan peradilan, bukan sebaliknya yang terjadi saat ini.
Karena cacat hukum, DKP harus bersikap membatasi dalam pemeriksaan terhadap para perwira abri yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi sambil menunggu putusan peradilan dari mahmil.

| ***Munir**, Ketua Badan Pekerja Komite Untuk Orang Hilang DanKorban Tindakan Kekerasan (Kontras), dalam berita Suara Merdeka ("Munir: DKP Cacat Hukum", 6 Agustus 1998)*

Suara Merdeka
6 Agustus 1998

...bali ke Golkar?" desak wartawan.
"Seharusnya demikian," jawabnya. "Karena tujuan pendirian yayasan itu untuk kepentingan Golkar. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, seandainya ada suara-suara dari masyarakat yang menghendaki agar dana itu dikembalikan kepada negara, tentu harus diteliti dulu apakah dana-dana itu diperoleh dengan menggunakan kewenangan-kewenangan yang bersifat publik."

...didirikan untuk kepentingan Golongan Karya. Karena itu dia akan meneliti dulu sumber dana Yayasan Dakab. Dia tidak menampik kemungkinan

Sakit Kepala?
NGGAK USAH NGALOR-NGIDUL
Cari BIOGESIC Segera!
BIOGESIC
Sakit Kepala-Nyeri-Demam
Asetaminofen 500 mg
PT Mediforma Laboratories

Munir: DKP Cacat Hukum

JAKARTA- Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dianggap memiliki cacat hukum, karena prosedur pembentukannya melanggar Surat Keputusan (Skep) Pangab Nomor 05/Kep/838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang naskah sementara DKP ABRI. Dalam Skep itu disebutkan, lembaga ini dibentuk setelah Mahkamah Militer (Mahmil) mengeluarkan putusan peradilan, bukan sebaliknya yang terjadi saat ini.

Penilaian tersebut ditegaskan Munir, ketua Badan Pekerja Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) kepada para wartawan di kantor YLBHI, kemarin. Karena cacat hukum, kata dia, DKP harus bersikap membatasi diri dalam pemeriksaan terhadap para perwira ABRI yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi, sambil menunggu putusan peradilan dari Mahmil.

"DKP tetap harus mempertanyakan nasib 14 korban penculikan yang belum jelas nasibnya sampai sekarang. Selain itu, hasil kerja mereka tidak boleh berakibat menghalangi proses hukum terhadap perwira tinggi yang terlibat, serta tidak menutup kemungkinan memeriksa perwira lain di luar Kopassus. Misalnya, Pangdam Jaya, Pangab, dan Badan Intelijen ABRI, pada saat terjadi penculikan," kata Munir yang didampingi Ketua Dewan Eksekutif YLBHI Bambang Widjojanto SH dan MM Billa.

Kontras telah mengirimkan surat terbuka kepada Pangab Jenderal TNI Wiranto menyangkut pembentukan DKP yang tidak memenuhi sejumlah ketentuan dalam Skep Pangab 838/1995 itu. Kontras juga mempertanyakan pemeriksaan terhadap Komandan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan, mengingat dia bukan perwira tinggi.

Senin lalu, Pangab Jenderal Wiranto mengungkapkan pembentukan DKP sebagai wujud [illegible] untuk menuntaskan kasus penculikan dan orang hilang yang melibatkan beberapa prajurit yang patut diduga terlibat langsung atau tak langsung.

Dalam hal ini, DKP akan memeriksa dua mantan Danjen Kopassus, yakni Letjen TNI Prabowo Subianto (Komandan Sesko ABRI) dan Mayjen TNI Muchdi Purwopranjoyo (Wakil Irjen ABRI), serta Komandan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan. Selama diperiksa, mereka diskors dari jabatannya.

Materi Pelanggaran

Menurut Munir, dalam ayat a.3 Skep Pangab 838/1995 itu disebutkan tiga materi pelanggaran yang dapat diperiksa DKP, yakni pelanggaran terhadap ideologi negara, melakukan tindakan yang melanggar kehormatan perwira, dan mereka yang dikenakan hukuman lebih dari tiga bulan. Asumsinya, yang bersangkutan sudah dikenai hukuman pidana dari Mahmil.

Skep tersebut juga menjadi rujukan bagi Skep Kapolri 480/IV/1996 tentang pembentukan DKP di lingkungan Polri. Sebagaimana dalam Skep Pangab, dalam Skep Kapolri pun ada ayat yang menyebutkan DKP tidak berwenang mengoreksi putusan peradilan.

(Bersambung hlm XII kol 1-2)

Keterlibatan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi P.R., dan Kolonel Inf Chairawan dalam kasus penculikan para aktivis, membuktikan bahwa selama ini tindakan militer Indonesia tidak profesional.

| ***Loekman Soetrisno,*** *Sosiolog UGM, dalam berita Media Indonesia ("DKP Periksa Lokasi Penyekapan", 6 Agustus 1988)*

yekapan

AKARTA (Media): Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ng diketuai KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, kemarin elihat lokasi penyekapan para aktivis prodemokrasi di rup IV Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Di kalang- n pasukan elite Baret Merah, lokasi tersebut dikenal de- gan nama 'kapal selam' karena berada di bawah tanah.

Sebelum ke lokasi penyekapan, Tim DKP pada pukul 09.00 WIB engunjungi Markas Komando (Mako) Kopassus dan diterima lang- ng Danjen Kopassus Mayjen TNI Syahrir MS. Sekitar empat jam mudian pada pukul 12.55 WIB rombongan dengan menggunakan is meluncur ke lokasi penyekapan yang jaraknya sekitar 500 meter ri Markas Kopassus. Kendati hanya berjarak 500 meter perjalan- menuju 'kapal selam' meliuk-liuk dan melewati beberapa pos ga.

Media yang berada di dekat lokasi 'kapal selam' menyaksikan se- uh anggota DKP hadir, seperti Letjen TNI Fachrul Razi, Letjen NI Agum Gumelar, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Susi- Bambang Yudhoyono, Laksamana Madya TNI Achmad Sutjipto, tjen TNI Yusuf Kartanegara, dan Letjen TNI Arie Kumaat. Tampak rut serta dalam rombongan tersebut Kepala Dinas Penerangan TNI D (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Rai.

Seperti diketahui, Pangab Jenderal TNI Wiranto pada Senin lalu engumumkan pembentukan DKP dengan tujuan memeriksa man- n Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto yang kini menja- at Dan Sesko ABRI, Mayjen TNI Muchdi yang kini menjabat Wair- n ABRI, serta mantan Dan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan alam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lu. Selama pemeriksaan, ketiga pentolan Kopassus tersebut dibebas- gaskan dari jabatannya masing-masing.

Pemeriksaan ketiga perwira tersebut berlangsung tertutup. Juga etika Tim DKP meninjau lokasi penyekapan. *Media* hanya bisa me- yaksikan dari luar lokasi penyekapan.

Media Indonesia
6 Agustus 1998

"Kehadiran Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sama sekali tak bermaksud untuk mendeponir perkara atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh para perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berupa penculikan/penghilangan para aktivis demokrasi. Secara pribadi, saya setuju pembentukan DKP sebab lembaga temporal ini memeriksa, menilai, dan membuktikan apakah para perwira Kopassus ini melanggar norma etik keperwiraan dan ke-ABRI-annya. Ini sama sekali tidak berarti bahwa para perwira yang berbuat tindak pidana cukup diperiksa oleh DKP. DKP hanya melihat, apakah perwira ini masih patut atau tidak menjadi tentara. Kasus tragedi penembakan massal di Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada 12 November 1991 berbeda dengan kasus penculikan di Jakarta. Situasinya waktu itu situasi Orde baru, sedangkan sekarang Orde Reformasi. Para pelaku di lapangan waktu itu dapat perintah dari tingkat tertentu.
Waktu itu Pangab juga membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM). Untuk menghindari terjadi preseden, dua perwira tinggi AD waktu itu dicopot. Karena itu, kehadiran DKP tak perlu dicurigai dan dituduh melindungi perwira Kopassus yang nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran pidana tetap harus diselesaikan di pengadilan/ Mahmil."

| ***Bambang W. Soeharto****, Ketua Tim Pemantauan Kampus pada Komnas HAM, dalam berita Suara Pembaruan ("Pangab: Tunggu Hasil DKP", 6 Agustus 1988)*

Pembaruan/Charles Ulag

BANTUAN SINGAPURA – Menteri Pendidikan/Pertahanan Kedua Singapura Laksamana Madya Teo Chee Hean (kiri) Kamis (6/8) pagi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, secara simbolis menyerahkan sumbangan kemanusiaan dari pemerintahnya berupa beras sebanyak 10 ribu ton dan obat-obatan kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto.

Pangab: Tunggu Hasil DKP

Jakarta, 6 Agustus

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sudah mulai melaksanakan tugasnya sejak dibentuk Senin (3/8) lalu. Dalam melaksanakan tugasnya DKP selalu melaporkan perkembangan dan segala temuannya. Namun, saat ini ia belum bisa menyampaikan hasil kerja tim tersebut.

''DKP itu sudah mulai melaksanakan tugasnya. Kita tunggu saja hasilnya nanti...!'' tutur Jenderal Wiranto menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan terbaru kerja Tim DKP seusai acara penyerahan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Singapura kepada Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Pendidikan /Pertahanan II Singapura RADM Teo Chee Hean kepada Menhankam/Pangab di *Base-ops* Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (6/8).

Ditanya lagi, bagaimana pendapatnya mengenai *statement* dari Kontras bahwa SK Menhankam /Pangab tentang DKP yang cacat hukum, Jenderal Wiranto hanya bertujar, ''Ooo... dia, mau *ngomong* apa, silakan!''

Tim DKP hari Kamis ini (6/8) kembali menggelar sidang lanjutannya di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Medan Merdeka Utara/Veteran Raya Jakarta Pusat. Namun, belum diketahui siapa-siapa saja yang diperiksa atau dimintai keterangan, apakah Letjen TNI Prabowo Subianto atau Mayjen TNI Muchdi dan Letkol Inf Chairawan, demikian sumber *Pembaruan* di Mabes Angkatan Darat.

Hari Rabu (5/8) kemarin, Tim DKP juga sudah melakukan tugasnya dengan mendatangani Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Mulai sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIB, Tim ini mencari temuan baru yang diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan dalam memberikan saran-saran kepada Menhankam/Pangab nanti.

Pemeriksaan ke Markas Kopassus tersebut dipimpin Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo dan mengadakan sejumlah pemeriksaan di Markas Kopassus. Pada pemeriksaan itu turut wakil ketua DKP Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima Kostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, Danjen Akabri Laksdya TNI Achmad Sutjipto, Wakasad Letjen TNI Sugiono dan mantan Dansesko ABRI Letjen TNI Arie Kumaat.

Sementara itu, Kapuspen Hankam/ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif di sela-sela acara penyerahan bantuan kemanusiaan dari Singapura di Halim mengatakan, semua pihak hendaknya bersabar dan membiarkan dulu Tim DKP melaksanakan tugasnya dengan tenang. ''Kita serahkan kepada Tim DKP untuk mendapatkan temuannya dan melaksanakan tugasnya dengan lancar. Sehingga ia bisa segera memberikan saran-sarannya kepada Menhankam/Pangab,'' ujar Syamsul.

Bambang Soeharto

Dari Bandung dilaporkan Bambang Soeharto dari Komnas HAM mengatakan, masyarakat tak perlu kuatir terhadap kehadiran Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) /Panglima ABRI (Pangab) Jenderal TNI Wiranto, Senin lalu (3/8).

Kehadiran DKP sama sekali tak bermaksud untuk mendeponir perkara atau tindak kriminal yang dilakukan oleh para perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berupa penculikan/penghilangan para aktivis demokrasi beberapa waktu lalu.

Ketua Tim Pemantauan Kampus pada Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Bambang W Soeharto mengemukakan ini dalam wawancara khusus dengan *Pembaruan* usai acara malam sambung rasa Keluarga Besar Kosgoro, di hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (5/8) dini hari.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro itu mengungkapkan, ia pribadi, demikian pula Komnas HAM, setuju pembentukan DKP, sebab lembaga temporal itu memeriksa, menilai dan membuktikan, apakah para perwira Kopassus itu telah melanggar norma etik keperwiraan dan ke-ABRI-annya.

''Ini sama sekali tidak berarti bahwa para perwira yang berbuat tindak pidana cukup diperiksa oleh DKP. DKP hanya melihat, apakah para perwira itu masih patut atau tidak menjadi tentara,'' ujar Bambang.

Menjawab pertanyaan, Bambang menegaskan, kasus tragedi penembakan massal di Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada 12 November 1991 berbeda dengan kasus penculikan belasan/puluhan aktivis demokrasi di Jakarta.

''Situasinya waktu itu 'kan situasi Orde Baru, sedangkan sekarang Orde Reformasi. Para pelaku di lapangan waktu itu dapat perintah dari tingkat tertentu,'' ungkap Bambang tersenyum.

Waktu itu Pangab juga membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM). Untuk menghindari terjadi preseden, maka dua perwira tinggi AD waktu itu dicopot (diberhentikan dari jabatan masing-masing). Karena itu, kehadiran DKP tak perlu dicurigai dan dituduh melindungi perwira Kopassus yang nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum pidana. Lembaga semacam DKP sudah lazim dibentuk di negara-negara lain, yang bertugas membuktikan pelanggaran terhadap kode etik atau norma etik lembaga yang dilakukan anggota lembaga tersebut. Namun pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan di pengadilan/Mahmil.

(Bersamb. ke hal. 11 kol. 6-9)

gal Sepakat Diskusikan Usulan Otonomi Khusus Timtim

pihak setuju membuka *interests* ... lan Annan untuk mengintensifkan ... Belanda sedangkan Alatas menga... ngatakan, saat ini makin banyak kelompok oposisi di Timtim da...

Suara Pembaruan
6 Agustus 1988

6 AGUSTUS 1998

Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono diperiksa Dewan Kehormatan Perwira di Markas Besar AD, Jakarta Pusat. Ia adalah Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ke-16 yang menggantikan Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia menjabat Pangdam VI Tanjungpura (Kalimantan). Masa

PRABOWO DAN WIRANTO. *Memulai konsolidasi ABRI lewat DKP.*

Meski ada yang menilai cacat hukum, Dewan Kehormatan Perwira telah memeriksa Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawan. Adapun Letjen Prabowo baru memberikan keterangan tertulis. Mungkinkah DKP akan memberikan saran yang kontroversial?

Forum Keadilan
24 Agustus 1998

jabatannya sebagai Danjen dari 20 Maret hingga 22 Mei 1998. Muchdi adalah lulusan Akabri 1971.

Majalah *Forum Keadilan*, dalam tajuk "DKP: Demi Kehormatan Praabowo", menggambarkan pagi hari jelang dan rehat di hari pemeriksaan Muchdi alias "Jango":

"Jakarta masih pukul 08.00 pagi, ketika pria itu tiba di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Dengan langkah pasti, perwira yang dijuluki "Jango"—jago tembak da-

JAKARTA masih pukul 08.00 pagi, ketika pria itu tiba di Markas Besar TNI Angkatan Darat, pada Kamis, 6 Agustus 1998. Dengan langkah pasti, perwira yang dijuluki "Jango"–jago tembak dalam film cerita koboi *spaghetti* tahun 1970-an—itu keluar dari mobil Mitsubishi Galant V6 warna hijau, bernomor 3666-05. Ia langsung berjalan menuju ke gedung utama Markas Besar (Mabes). Beberapa menit kemudian, mobil bertabur bintang berdatangan. Para penumpangnya—sejumlah jenderal—pun segera menuju pintu yang sama di gedung utama itu. Apakah akan terjadi baku tembak? Suasana pun sunyi. Dan sepi terus merambat sampai hampir empat setengah jam kemudian.

Tiba-tiba, pada pukul 12.25, dengan wajah agak tegang, lelaki yang dijuluki "Jango" itu keluar dari gedung utama. Punggung bajunya tampak basah karena keringat. Sambil berjalan, ia sesekali tampak menggaruk-garuk kepala. Lalu ia memasuki mobilnya. Lima menit kemudian, ia keluar lagi dari mobilnya dan berjalan kembali ke gedung utama. Dan, ia baru keluar lagi dari gedung sunyi itu satu setengah jam kemudian. Saat itu, tangan kanannya tampak menjinjing kopor, sementara tangan kirinya menggenggam pistol, eh bukan, telepon tangan. Begitu memasuki mobilnya, ia pun langsung menghela mobil sedannya dan memacunya dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Tak ada tepuk tangan atau jeritan kematian. Semua berjalan normal, seperti tak terjadi suatu apa. Tidak terjadi apa-apa? Tidak juga.

Hari itu, Mayjen Muchdi Purwopranjono alias "Jango" yang mantan Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus ke 16 itu memang sengaja datang ke Mabes AD untuk memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Ia diperiksa lebih dari lima jam karena diduga terlibat dalam kasus penculikan para aktivis anti-Soeharto, sebelum Presiden yang berkuasa 32 tahun itu mundur pada 21 Mei lalu.

Sebelum Muchdi, pada Selasa, 4 Agustus, mantan Komandan Grup IV Kopassus, Kolonel Chairawan, pun sudah diperiksa DKP. Bahkan, pemeriksaan terhadap alumni Akabri 1980 itu berlangsung sekitar delapan jam. Sedangkan Rabu esok harinya, DKP tidak bersidang. Rupanya, para jenderal anggota DKP itu meninjau Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, yang konon dijadikan tempat penyekapan para korban penculikan.

Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto pada Senin, 3 Agustus lalu, dan diketuai KSAD Jenderal TNI Subagyo H.S., memang beranggotakan para petinggi militer terkenal. Dalam susunan DKP, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi dan Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara tercatat sebagai wakil ketua. Adapun Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, dan Danjen Akabri Laksdya TNI Achmad Sutjipto, masing-masing menjadi anggota. Sementara itu, Wakil KSAD Letjen TNI Sugiono serta mantan Danseskoko ABRI Letjen TNI Arie J. Kumaat menjadi anggota cadangan. "DKP berfungsi memberikan pertimbangan kepada Pangab untuk pengambilan keputusan," ujar Subagyo.

MUHDI DAN PRABOWO MENGHADAP SOEHARTO. *Akan menimbulkan kemarahan prajurit.*

DKP itu khusus dibentuk untuk memeriksa para perwira tinggi yang diduga melanggar kehormatan perwira, yakni terlibat serangkaian penculikan para aktivis anti-Soeharto. "Langkah itu merupakan perwujudan tekad ABRI dalam era reformasi yang menguta-makan kejujuran," ujar Wiranto. Selain Muchdi dan Chairawan, mantan Danjen Kopassus ke-15, Letjen TNI Prabowo Subiyanto, juga bakal dimintai keterangan.

Jika dirunut, DKP sebenarnya merupakan bentuk evolusi Dewan Kehormatan yang muncul di lingkungan ketentaraan tanah air, sejak zaman kemerdekaan. Dari semula yang hanya menangani sekitar kasus internal di antara tentara, lembaga itu kemudian juga menangani tindakan oknum tentara terhadap kalangan sipil.

Hingga dewan yang terakhir, tercatat sudah ada enam kasus yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan. Kasus pertama muncul usai perang gerilya kedua, pada 1949 di Yogyakarta. Ketidakpuasan terhadap salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), yaitu pengintegrasian eks-tentara KNIL dan para pegawai federal ke dalam Republik, menjadi penyebabnya. Saat itu muncul pertentangan keras karena umumnya bekas tentara reguler KNIL menduduki posisi dan pangkat lebih tinggi daripada para bekas gerilyawan. Padahal, mereka dianggap masih berbau Belanda.

Dewan Kehormatan kedua dibentuk pada 1952 oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, untuk menyelesaikan kasus surat Kolonel Bambang Supeno yang dikirimkan kepada Presiden Soekarno, DPR, dan lain-lain. Surat itu berisi mosi tidak percaya terhadap KSAD saat itu, Kolonel A.H. Nasution. Pengurus Pusat Ikatan Perwira Republik Indonesialah yang mengusulkan agar pemerintah membentuk DK untuk mengusut kasus tersebut. "Namun, dewan hanya berjalan sebentar karena persoalan itu diambil alih DPR," ujar Jenderal Besar (Purn) A.H. Nasution kepada *Tempo* enam tahun lalu.

Akibatnya, terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952. Ketika itu sejumlah perwira senior

Tiba-tiba, pada pukul 12.25, dengan wajah agak tegang, lelaki yang dijuluki "Jango" itu keluar dari gedung utama. Punggung bajunya tampak basah karena keringat. Sambil berjalan, ia sesekali tampak menggaruk-garuk kepala.

lam film koboi spaghetti 1970-an – itu keluar dari mobil Mitsubishi Galant V6 warna hijau, bernomor 3666-05. Ia langsung berjalan menuju ke gedung utama Markas Besar (Mabes). Beberapa menit kemudian, mobil bertabur bintang berdatangan. Para penumpangnya—sejumlah jenderal—pun segera menuju pintu yang sama di gedung utama itu. Apakah akan terjadi baku tembak? Suasana pun sunyi. Dan sepi terus merambat sampai hampir empat setengah jam kemudian.

"Tiba-tiba, pada pukul 12.25, dengan wajah agak tegang, lelaki yang dijuluki "Jango" itu keluar dari gedung utama. Punggung bajunya tampak basah karena keringat. Sambil berjalan, ia sesekali tampak menggaruk-garuk kepala. Lalu ia memasuki mobilnya. Lima menit kemudian, ia keluar lagi dari mobilnya dan berjalan kembali ke gedung utama. Dan, ia baru keluar lagi dari gedung sunyi itu satu setengah jam kemudian. Saat itu, tangan kanannya tampak menjinjing koper, sementara tangan kirinya menggenggam pistol, eh, bukan, telepon genggam. Begitu memasuki mobilnya, ia pun langsung menghela mobil sedannya dan memacunya dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Tak ada tepuk tangan atau jeritan kematian kematian. Semua berjalan normal, seperti tak terjadi sesuatu apa. Tidak terjadi apa-apa? Tidak juga."

Majalah *Tajuk* mengeluarkan hasil *polling* yang redaksi sebut dengan "Poling Kopassus". Responden berasal dari 500 pemilik telepon yang dipilih secara acak.

Responden "menyeret" Soeharto sebagai dalang, hal itu bisa dipahami. Tetap menarik mengetahui alasan beberapa responden yang begitu yakin bahwa Soeharto merupakan

Pos Kota
7 Agustus 1998

utama, dan mahasiswa Perguruan Tinggi Dak- berunjukrasa di Balai- kota DKI. Mereka me- tempat pelacuran Kra- mat Tunggak (Kram- reka mengancam mem- bakar lokasi pelacuran jukrasa menggunakan ikat kepala ke hal 16 kol. 1

Pangab: Biarkan orang lain ragukan DKP

Mayjen Muchdi diperiksa 5 jam

JAKARTA (Pos Kota) - Biarkan orang lain mempunyai kesan meragukan independensi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang sedang memeriksa Letjen TNI Prabowo Cs, ke hal 16 kol. 3

Rumah Kol. Chairawan sepi

POLING
KOPASSUS

Mertua Pegang Kendali,
Menantu Yang Beroperasi

Tajuk
6 Agustus 1998

dalang penculikan. Mereka mengaitkannya dengan unsur nepotisme antara Soeharto sebagai mertua dan Prabowo sebagai menantu.

RESPONDEN: Prabowo diminta untuk mengamankan kekuasaan Soeharto. Jadi, siapa pun yang ingin mendongkel Presiden, oleh Prabowo akan disikat, termasuk diculik. Logis kan kalau menantu membela mertua.

RESPONDEN: Ada hal-hal yang tidak diketahui mantan panglima Angkatan Darat (Feisal Tanjung) soal sepak terjang Prabowo. Berarti, ada perintah langsung dari Pangti kepada Danjen Kopassus, tanpa melalui Pangab. Hubungan Pangti dan Danjen Kopassus tidak hanya dinas, tapi juga kekeluargaan. Menantu mana sih yang berani menolak perintah mertua, apalagi sang mertua *king of the king*.

Ada hal-hal yang tidak diketahui mantan panglima Angkatan Darat (Feisal Tanjung) soal sepak terjang Prabowo. Berarti, ada perintah langsung dari Pangti kepada Danjen Kopassus, tanpa melalui Pangab.

Mertua Pegang Kendali,

Dewan Kehormatan Perwira sudah dibentuk. Apa tindakan terhadap Prabowo? Sebagian masyarakat, menurut hasil poling CESDA dan *Tajuk*, menilai, Soeharto dalang penculikan, sementara Prabowo hanyalah wayang. Mereka ingin, Kopassus dibersihkan dari urusan politik dan oknum yang terlibat penculikan.

*"Daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perobahan UUD 1945 dan Pancasila, itu lebih baik kami menculik seorang dari 2/3 (anggota MPR — **Red.**) yang ingin mengadakan perobahan, karena 2/3 dikurangi satu sudah tidak sah sesuai UUD 1945 itu ...."* (Pidato Presiden Soeharto dikutip dari Memori Jenderal Yoga, hlm. 471).

SOEHARTO melegalkan penculikan? Bisa jadi, bila kita merujuk pidato tanpa teks di depan Rapim ABRI, 27 Maret 1983, di Pekanbaru Riau. Yang jelas, ketika itu, pernyataan Presiden Soeharto memicu perdebatan. Beberapa tokoh masyarakat, seperti Ali Sadikin, segera bereaksi dan bergegas membentuk Petisi 50 — bersama beberapa tokoh kritis lain. Kini, tuduhan bahwa Soeharto berada di balik penculikan aktivis pro demokrasi, juga, menjadi bahan gunjingan di masyarakat.

Hasil poling *Tajuk* dan CESDA-LP3ES juga menyiratkan hal yang sama. Sebagian responden menilai, Soeharto berada di balik penculikan Pius Lustrilanang, dan kawan-kawan.

Jajak pendapat yang dilakukan pada 27-31 Juli 1998 mengambil sampel 500 pemilik telepon di Jakarta. No-mor telepon dipilih secara acak dari Buku Petunjuk Telepon Jakarta (Residensial) tahun 1997/1998. Responden yang diwawancarai via telepon berusia 17 tahun ke atas, dan berpendidikan minimal SLTA. *Margin of error* dari poling ini sebesar ± 4,4%.

Kepada responden, pertama kali ditanya soal dugaan keterlibatan Letjen TNI Prabowo Subianto, seperti dilansir media massa. Apakah Prabowo dalang atau wayang penculikan itu? Terhadap pertanyaan ini, sebagian besar responden (51,6%) menduga, peran Letjen Prabowo, dalam kasus itu, hanya sebagai wayang ketimbang dalang penculikan. Artinya, putra begawan ekonomi Prof. Sumitro ini lebih dipandang sebagai pelaksana daripada aktor intelektual.

Namun, bila kita tilik berdasarkan latar belakang responden, mereka yang berumur 17-25 tahun lebih banyak (40,4%) yang menilai, Prabowo dalang penculikan. Lalu, yang menjawab hanya wayang 39,7%, dan tidak menjawab ada 19,9%. Responden usia ini sebagian besar adalah mahasiswa. Sementara, responden dari kelompok umur lain, lebih dari setengahnya tetap menilai, Prabowo, lulusan Akabri 1974, hanya wayang.

Memang, cukup banyak diulas media massa soal dalang penculikan. Prabowo sendiri menyatakan siap bertanggung jawab bila anak buahnya — semasa dia menjadi danjen Kopassus — terbukti bersalah. Namun dia menyebutkan, operasi tersebut dilakukan karena waktu itu diduga ada orang yang mengancam keselamatan negara. "Kalian sendiri tahu, ada orang yang merakit bom, ada orang yang merencanakan makar," katanya kepada pers, seusai penutupan Kursus Reguler Sesko ABRI, Jumat (17/7), di Bandung. Insiden yang dimaksud Prabowo adalah kasus peledakan bom di Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta, awal tahun ini.

Bisa jadi, pernyataan Prabowo semakin menambah keyakinan sebagian besar respon-

Prabowo dalang atau wayang?

	%
Dalang	25,0
Wayang	51,8
Tidak jawab	23,4

N = 500

Bila Prabowo wayang siapa dalangnya?

	%
Soeharto	75,5
Feisal T	11,4
Lainnya	2,0
Tidak jawab	10,2

N = 255

ILUSTRASI: ANTOK SUGIANTO

Tajuk
6 Agustus 1998

Menantu Yang Beroperasi

den poling, ada perintah terhadap dirinya untuk mengamankan negara. Seorang responden mengatakan, disiplin di militer itu ketat. Tidak mungkin seorang prajurit atau perwira bertindak tanpa ada perintah dari atasan. Dalam struktur ABRI, Kopassus — seperti juga Kostrad — termasuk bagian dari Komando Tempur Utama (Kotama) TNI AD. Mereka berada di bawah pembinaan kasad. Sementara, untuk operasi — misalnya pengerahan pasukan atau operasi militer lainnya — berada di bawah komando pangab. Dan, pangab sendiri bisa diperintah dan bertanggung jawab kepada panglima tertinggi, yakni presiden.

Jadi, bila bukan Prabowo, siapa dalangnya? Sebagian terbesar masyarakat (76,5%) menunjuk mantan Presiden Soeharto sebagai aktor intelektual. Feisal Tanjung, yang ketika itu sebagai pangab, hanya dipilih oleh 11,4% responden jajak pendapat. Kepada pers, Feisal Tanjung memang menyatakan tidak menginstruksikan penculikan para aktivis. "Saya baru tahu setelah menjadi menko polkam," ujarnya seusai rapat paripurna di DPR, Jumat (24/7). Pejabat militer lain juga menyatakan hal yang sama. "Pimpinan ABRI tak pernah memberikan perintah untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia," tegas Danpuspom ABRI, Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin.

Gerakan cuci tangan mantan Pangab Jenderal Feisal Tanjung, serta pimpinan ABRI, jadi bahan polemik di masyarakat, dan menjadi berita besar di media massa selama berhari-hari. Kontroversi itu, pasti, membentuk persepsi masyarakat mengenai siapa sesungguhnya aktor intelektual operasi penculikan para aktivis. Persepsi itu kian mengental karena Soeharto tidak bisa atau tidak mau? langsung meng-*counter* dugaan yang beredar di masyarakat. Maka, jika para responden "menyeret" Soeharto sebagai dalang, hal itu bisa dipahami.

Namun, tetap menarik mengetahui alasan beberapa responden yang begitu yakin bahwa Soeharto merupakan dalang penculikan. Mereka mengaitkannya dengan unsur nepotisme antara Soeharto sebagai mertua dan Prabowo yang jadi menantu. "Prabowo diminta untuk mengamankan kekuasaan Soeharto. Jadi, siapa pun yang ingin mendongkel Presiden, oleh Prabowo akan disikat, termasuk diculik. Logis kan kalau menantu membela mertua," papar Lambe, 59, seorang responden yang jadi pelaut.

Responden lain juga memaparkan hal yang sama. Menurut Fredy, 57 (bukan nama sebenarnya), dari pernyataan Feisal Tanjung, ada hal-hal yang tidak diketahui mantan pangab ini, soal sepak terjang Prabowo. "Berarti, ada perintah langsung dari Pangti kepada Danjen Kopassus, tanpa melalui Pangab," tutur Fredy kepada *Tajuk*. Baginya, hubungan Pangti dan Danjen Kopassus tidak hanya dinas, tapi juga kekeluargaan. "Menantu mana sih yang berani menolak perintah mertua, apalagi sang mertua *king of the king*," kata Fredy, tertawa.

Kedua responden di atas juga merujuk pada operasi ilegal rezim Soeharto, selama 30 tahun Orba. Misalnya, pada kasus penembakan misterius, Tanjungpriok, Komando Jihad, 27 Juli, dan lainnya. "Soeharto selalu mengembangkan praktik politik secara terselubung untuk mempertahankan kekuasaannya," ujar Fredy, yang telah pensium dari pegawai negeri sipil. Kepada responden yang memvonis Soeharto, ditanyakan pula hukuman yang layak untuknya. Tidak banyak masyarakat yang menuntut agar Jenderal Besar ini "dihukum mati".

Setelah diproses melalui jalur hukum, sebagian besar masyarakat (46,3%) cenderung memilih hukuman seumur hidup bagi Soeharto. Sedangkan, yang cenderung memberi hukuman lebih "ringan", yaitu 20 tahun penjara, jumlahnya mencapai 30,2%. Bila digabung, ada 76,5% responden yang meminta mantan presiden itu dimasukkan ke

Apa hukuman yang layak untuk sang dalang?

	%
Hukum mati	6,7
Hukum seumurhidup	46,3
Penjara 20 tahun	30,2
Lainnya	11,8
Tidak jawab	5,1
	N = 255

Terlepas Prabowo dalang atau wayang, apa hukuman untuknya?

	%
Diskors	5,2
Turun pangkat	11,8
Dipecat	41,4
Hukum Kurungan	37,2
Tidak jawab	4,4
	N = 500

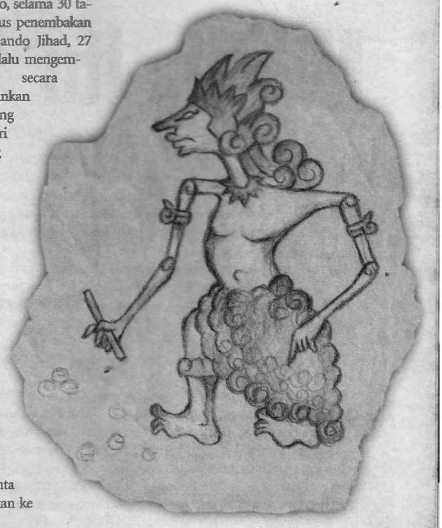

7 AGUSTUS 1998

"Komandan yang memberikan perintah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perintah yang dilakukan anak buahnya. Jika seorang komandan memberikan perintah, dia juga harus bertanggung jawab dalam pelaksanaannya."

| ***Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo***, *Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP)*

Suara Pembaruan
8 Agustus 1998

10 AUG 1998

Pemimpin Umum : HG Rorimpandey
Wakil Pemimpin Umum : Dr Albert Hasibuan SH
Pemimpin Redaksi : Dr Sutamo
Wakil Pemimpin Redaksi : Djumontang Sirait
Bonar Simorangkir

Alamat Redaksi : Jl Dewi Sartika 136-D, Jakarta 13630.
Kotak Pos 260 JKT dan 015 JNG. Telepon (021) 801-4077 (16 saluran).
Fax (021) 800-7262, 801-6131, E-Mail: pembaru@indo.net.id
Penerbit: PT Media Interaksi Utama Telepon 800-6987 (12 saluran),
(021) 3208 (18 saluran)
SIUPP No: 224/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1987 tanggal 29 Januari 1987
Nomor ISSN: 0215-4617
Cyber Pembaruan": http://www.SuaraPembaruan.com/
Penanggung jawab percetakan PT Sinar Agape Press

SUARA

Memperjuangkan

SABTU, 8 AGUSTUS 1998

TERBIT SORE

Ketua DKP Subagyo:

Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Tugas

Jakarta, 8 Agustus

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menegaskan, komandan yang memberikan perintah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perintah yang dilakukan anak buahnya.

"Komandan ini *kan* bertanggung jawab yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Arti kata termasuk anak buahnya yang melaksanakan itu menjadi tanggung jawabnya karena perintah dia," kata Subagyo kepada wartawan

Sebelumnya, Selasa (4/8) lalu, DKP telah memeriksa Kolonel Chairawan, Rabu (5/8) dilanjutkan dengan melakukan cek lapangan ke Makopassus Cijantung. Pemeriksaan terhadap Mayjen Muchdi dilakukan pada hari Kamis (6/8). Jumat (7/8) kemarin, tidak ada pemeriksaan.

Melaksanakan Tugas

Bagaimana kecenderungan dari hasil pemeriksaan sekarang ini? tanya wartawan. "Kecenderungannya, ada yang diakui, ada yang

mang tabiat dari perwira atau pelaksana. Di situ nanti kita lihat kesalahannya ataupun yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam suatu operasi, perintah dan prosedur," kata Subagyo.

Menurut yang diperiksa, mereka melaksanakan tugas. Tugas itu dari siapa pak? "Nanti dulu. *Gini* ya, berbeda yang kita maksud. Antara lain, pelaksana *kan* yang bawahan. Misalnya kita melihat tingkatannya Chairawan ke bawah itu, *kan* tingkat-tingkat pelaksana. Nah ini perintahnya dari mana. Saya

9 AGUSTUS 1998

Bagi Mayjen TNI (Purn) Syamsudin, mantan perwira Kopassus, yang kemudian menjadi anggota Komnas HAM. Ia menyebut penculikan itu sebagai coreng bagi Kopassus. Berikut nukilan wawancara *Media Indonesia* terhadap Syamsudin.

T: Sejak awal kasus ini mencuat Anda bersikeras bahwa para pelakunya tak pandang bulu, termasuk ketiga perwira itu, harus dimajukan ke mahkamah militer. Mengapa?

J: Kasus-kasus begini harus diajukan ke mahkamah militer. Walaupun diberhentikan secara terhormat dari jabatannya itu sudah merupakan hukuman yang bukan main beratnya bagi seorang perwira. Kalau yang tiga ini keputusannya sekadar diberhentikan dengan hormat, sedangkan 11 orang diambil tindakan hukum, maka akan terjadi suatu gejolak. Timbul ketidakpercayaan anggota Kopassus kepada para pemimpinnya. Sekaligus dengan pengajuan ke mahkamah militer ini fair. Kalau Prabowo salah, seberapa jauh sih kesalahannya, mungkin juga tidak salah. Atau, mungkin dia juga mendapat perintah dari atasan. Ini akan lebih jernih persoalannya, dan Prabowo juga harus kita hormati, dia sudah mengatakan, "Saya siap bertanggung jawab".

T: Jadi, benar Feisal Tanjung tak terlibat?

J: Saya katakan dia tidak tahu. Itu merupakan insubordinasi dari Prabowo. Ya, katakan mudah saja 'kan anak you berbuat salah you mau dihukum, nggak 'kan. Paling tanggung jawab moral you. Itu aja logikanya. Saya yakin, dalam hierarki ABRI siapa yang berhak memberi perintah kepada saya adalah mereka satu tingkat di atas saya. Berarti kalau saya berlaku di luar perintah kalau komandan saya tidak tahu berarti bu-

kan kesalahan komandan saya. Saya yang salah, ini hierarki. Dalam hierarki satu tingkat di atas itulah yang memerintahkan saya. Tapi dalam kasus ini saya yakin pangab, baik yang lama maupun yang baru ndak tahu. Saya sudah tanya, Pak Feisal saya kenal baik. Saya lama di Kopassus. Pak Wiranto bahkan pernah menjadi anak buah saya di pusat infanteri. Saya tahu kedua orang ini, saya yakin betul mereka itu tidak melakukan perintah untuk menculik orang.

Minggu, 9 Agustus 1998

MEDIA INDONESIA

WAWANCARA KHUSUS

Mayjen TNI (Purn) Syamsudin:

'Ini Suatu Coreng bagi Kopassus...'

"Nah, ini kesempatan bagi ABRI untuk menunjukkan betul-betul sebagai pelopor dalam menegakkan supremasi hukum di Tanah Air."

NASIONAL

Media Indonesia
9 Agustus 1998

10 AGUSTUS 1998

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus). Prabowo diperiksa dari pukul 08.00 hingga 15.30 WIB di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Seusai diperiksa, Prabowo menghindari para jurnalis dengan keluar dari ruang sidang melalui pintu belakang. Saat beberapa jurnalis melihat dan mencoba mengejar, Prabowo berjalan menuju arah lain dalam kompleks gedung Mabes AD. Dia berhasil meninggalkan Mabes dengan mobil milik salah seorang staf Mabes sekitar pukul 15.40. Sementara, mobil yang dia bawa pagi harinya baru meninggalkan kompleks Mabes 20 menit kemudian tanpa Prabowo.

Saat itu istilah BKO (Bawah Kendali Operasi) menjadi isu karena menguar wacana bahwa yang Prabowo lakukan, yakni menculik, merupakan bagian dari BKO.

> **"ABRI tidak pernah mengeluarkan perintah kepada Kopassus untuk melakukan penculikan dan penyekapan terhadap sejumlah aktivis. Apa yang dilakukan Prabowo sehubungan dengan kasus orang hilang merupakan hasil analisisnya terhadap perintah Bawah Kendali Operasi (BKO)."**
>
> | ***Jenderal TNI Subagyo HS.**, KASAD dan Ketua DKP*

Perihal BKO, inilah penjelasan Menhankam/Pangab Wiranto dalam berita *Republika* ("DKP: Prabowo tak Diperintah Menculik", 11 Agustus 1998):

Yang dimaksud BKO atau Bawah Kendali Operasi adalah jika ada satu komando atau kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu, satuan itu akan menyusun pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Dalam tugas yang akan dilaksanakan itu, satuan ini membutuhkan penguatan dari satuan-satuan tugas yang lain. Pasukan-pasukan yang lain inilah kalau masuk dalam kesatuan tadi, namanya BKO. Jadi, dia terlepas dari induk satuannya, kemudian berada di bawah kendali operasi satuan baru tempatnya bergabung.

Republika
11 Agustus 1998

REPUBLIKA

MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

Nusantara

DPRD Yogyakarta tak Sepakat Soal Tata Cara Pemilihan Gubernur

Hlm. 7

Luar Negeri

Rakyat Amerika Serikat ingin Skandal Seks Clinton Dituntaskan

Hlm. 10

2 TAHUN KE-8 ■ 12 HALAMAN

Republika online: http://www.republika.co.id/ ■ Harga eceran (P. Jawa) Rp 1.400,-

DKP: Prabowo tak Diperintah Menculik

JAKARTA — Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemarin memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto. Usai pemeriksaan, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, mengatakan bahwa Prabowo mendapat perintah hanya untuk melaporkan penculikan sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM ...

...: Yayasan Dakab ... Milik Golkar

... masuk dalam keluarga besar Golkar, jadi ada ormas-ormas lainnya [tak hanya] DPP," katanya.

Sumber dana Dakab adalah sumbangan masyarakat yang simpati terhadap tugas Dakab yang umumnya pengusaha. "Pengusaha butuh situasi aman sehingga usaha mereka lancar." Zahid tak mempertegas apa maksud situasi aman tersebut.

Ketika ditanya soal besar sumbangan yang diberikan para pengusaha itu, Zahid tak mau menyebutkan. "Tersirah, manasuka," katanya. Zahid juga memilih tutup mulut soal pengusaha yang memberikan sumbangan. Sumbangan itu bersifat insidental. "Biasanya kalau mau pemilu itu suka ada sumbangan-sumbangan," tambahnya.

Zahid tak mengelak bahwa selama ini disalurkan melalui DPP Golkar. "Kalau untuk yang ormas itu langsung. Kalau Golkar, dulu-dulu lewat DPP," katanya. "Hanya akhir-akhir ini langsung [ke DPD]. Supaya efisien, tidak makan biaya banyak, tidak belok-belok."

Apakah keputusan menyampaikan dana langsung ke daerah itu atas perintah Soeharto? Zahid buru-buru menyergah. "Jangan bilang Pak Harto, itu *policy* Dakab," ujarnya seraya menjelaskan bahwa kebijaksanaan itu bisa berubah-ubah. Pokoknya, kata Zahid, dana tetap saja disalurkan.

Bersambung ke Hlm. 3

...arti Industri ...Gantikan BPIS

...IS masih Merugi

Sebelumnya, sekitar tiga tahun lalu, telah muncul gagasan untuk menjadikan BPIS sebagai perusahaan induk. Pemikirnya, tak lama setelah IPTN meluncurkan N-250, Konsep induk dianggap sebagai sebuah terobosan untuk meningkatkan kinerja badan usaha strategis yang dinaungnya.

...

TOMMY TABUNGAN BDN
YA UANG-NYA BERAMBUT 9 MILIAH
Mulai 1 Juli 1998 SUKU BUNGA 38% p.a.
8 HADIAH UTAMA TABUNGAN BDN @ Rp. 250 JUTA
Hubungi Kantor Cabang BDN Terdekat
BDN BANK DAGANG NEGARA

Komnas HAM: Pelanggaran HAM di Aceh Lebih Besar Dibanding Timtim

JAKARTA — Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dan Irian Jaya lebih besar dibanding di Timor-Timur. Kenyataan itu menurut anggota Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral ditemukan setelah Komnas HAM melakukan penelitian langsung di tiga provinsi itu.

"Data pelanggaran itu diketahui dari jumlah korban yang ditemukan masih hidup atau sudah meninggal," kata Amaral di kantor Komnas HAM, Senin kemarin. Komnas HAM, katanya, siap memberikan data-data pelanggaran HAM di Aceh dan Irian Jaya kepada organisasi internasional, atau lembaga manapun yang meminta.

Berdasarkan data yang terkumpul, di antaranya Forum Peduli HAM di Aceh yang melakukan investigasi sejak Juli, mencatat setidaknya ada 3.000 penduduk di tiga kabupaten yang tak diketahui keberadaannya.

Kemudian di Irian Jaya, jumlah pelanggaran juga menjadi sorotan masyarakat, termasuk dunia internasional — salah satunya lewat surat parlemen AS kepada Pemerintah Indonesia.

Laporan 15 LSM; di antaranya Elsam, YLBHI, Komisi Justice and Peace KWI, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Komite Solidaritas Masyarakat Irian, mencatat adanya pelanggaran hak asasi dalam penanganan kerusuhan 2 Juli di kota seperti Biak, Sorong, dan Jayapura. Aparat dinilai terlalu keras, sehingga 31 orang harus dirawat di rumah sakit akibat luka tembak atau hantaman popor senapan.

Komnas HAM, menurut Amaral, sadar bila data pelanggaran hak asasi diberikan maka nama Indonesia menjadi buruk di mata dunia. "Tapi apa boleh buat, demi kebaikan di masa depan yang pahit itu perlu dikemukakan," kata Amaral. "Kami sendiri berkepentingan dan mempunyai citi-cita bahwa yang buruk itu bisa dihentikan serta tak usah diulang."

Tanda tanda perubahan bahwa hal itu tak terulang, katanya, sudah mulai terlihat. ABRI, misalnya, dengan berani mereka mau serta mencabut status DOM di Aceh. "Kami menyambut gembira akan adanya hal tersebut. ABRI telah berani menyikapi perubahan zaman dengan positif," katanya.

Wakil Ketua DPR RI Hari Sabarno menyatakan setuju diadakan penguasutan terhadap pelanggaran selama operasi militer di Aceh, dan akan merekomendasikannya. "Ya, kita harus merekomendasikan; Ini lho, terhadap pelanggaran supaya diadakan penindakan," kata Hari Sabarno yang juga ketua Tim Pencari Fakta (TPF) DPR untuk Aceh.

Menurut Hari, rekomendasi atas kasus Aceh tidak terbatas pada aspek hukum saja. Tetapi, lanjutnya, mencakup aspek sosial, politik, budaya, dan hankam. "Pokoknya ada rekomendasi-nya, dan tidak akan saya jelaskan secara detail," kata Hari usai rapat pimpinan DPR/MPR, Senin (10/8).

Namun, Hari tidak secara tegas menyatakan bahwa telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi semasa Aceh menjadi DOM. "*Gunawe* saya bisa mengatakan ada pelanggaran atau tidak, tapi fakanya ada operasi, ada ekses. Itu mau dilihat dari aspek apa. Aspek hukum ya melanggar."

Pernyataan lebih tegas mengenai perlunya pengusutan juga datang dari Burisan Nasional. Menurut Kemal Idris, operasi militer sejak 1989 telah menyengsarakan rakyat dan memperburuk citra bangsa, dan apa yang terjadi di Aceh cenderung merupakan tindak kekerasan dan anti-HAM.

Kemal menilai positif permohonan maaf ABRI yang disampaikan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto. "Jadi benar ABRI terlibat," katanya. "Namun itu baru awal. Baru taraf mengambil hati orang Aceh."

Bersambung ke Hlm. 3

Mochtar Riady Soal Tionghoa:

Mungkin Hanya 170 Konglomerat Bermasalah

JAKARTA — Sentimen negatif terhadap warga Tionghoa jangan *di-gebyah-uyah*. Karena, menurut tarpan papan atas, Mochtar Riady, yang bermasalah barangkali hanya sebagian kecil dari mereka, yaitu segelintir konglomerat.

"Yang bermasalah mungkin hanya sekitar 170 pengusaha besar saja, termasuk saya. Jadi, jangan dikaitkan dengan tujuh juta warga keturunan Tionghoa lainnya," ungkap *Chairman* Grup Lippo itu, di sela-sela seminar "*Apa yang Salah di Negeri ini*" yang digelar Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), di Jakarta, kemarin.

Mochtar memaparkan bahwa warga keturunan Tionghoa terdiri atas berbagai strata ekonomi dan sosial. Sekitar 170 orang, menurutnya, memang berhasil menjadi konglomerat. Bahkan, masuk dalam daftar 200 pengusaha besar Indonesia. Kemudian, 5.000 orang masih tergolong pengusaha menengah, dengan berbagai macam jenis aktivitas bisnis, malai dari pemilik toko hingga jasa ekspor-impor. Dan, setidaknya 250 ribu orang adalah pengusaha kecil.

Sisanya, yang tujuh juta lagi adalah petani, pelayan, guru, dan pegawai. Mereka juga banyak yang miskin, tak beda dengan sebagian warga pribumi."

Citra negatif yang tertanam di masyarakat mengenai pengusaha besar Tionghoa saat ini, jelas Abdillah, kepongahan mereka dalam menguasai perekonomian. Padahal, secara kuantitas, jumlah mereka adalah minoritas. Inilah yang

Adapun menurut Mayjen TNI Abdul Wahab Mokodongan, Staf Ahli Bidang Ideologi Politik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dalam suatu BKO itu orang satuan A, yang satuannya di-BKO-kan ke satuan B, menjadi tanggung jawab satuan B, "Mau diapakan saja terserah si B."

NO. 045 TAHUN KE-34

Wiranto Tolak Ungkap yang Perintah Prabowo

Jakarta, Kompas

Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) Jenderal TNI Wiranto berharap semua pihak menunggu hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang siapa yang membuat perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto sehubungan dengan Kasus Orang Hilang (KOH).

"Saya tidak mau menjelaskan sepotong-sepotong. Kita tunggu nanti hasil pemeriksaan DKP," kata Wiranto menjawab wartawan, hari Selasa (11/8), usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan ABRI 1998 di Markas Besar (Mabes) ABRI, Cilangkap.

Sehari sebelumnya, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengutarakan, pimpinan ABRI tidak pernah mengeluarkan perintah kepada Kopassus untuk melakukan penculikan dan penyekapan terhadap sejumlah aktivis. Apa yang dilakukan Prabowo sehubungan dengan kasus orang hilang merupakan hasil analisisnya terhadap perintah Bawah Kendali Operasi (BKO).

Siapa pun bisa

Menurut Wiranto, yang dimaksud BKO adalah jika ada satu komando atau kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu, satuan itu akan menyusun pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. "Dalam tugas yang akan dilaksanakan itu, satuan ini membutuhkan penguatan dari satuan-satuan tugas yang lain. Pasukan-pasukan yang lain inilah kalau masuk dalam kesatuan tadi — namanya BKO. Jadi dia terlepas dari induk satuannya, kemudian berada di bawah kendali operasi satuan baru tempatnya bergabung," paparnya.

Ditanya siapa yang berhak memberikan perintah BKO kepada Prabowo, Wiranto mengatakan, yang mengeluarkan perintah BKO tergantung tingkatannya. "Itu tergantung tingkatannya. Siapa pun bisa memberikan BKO," katanya.

Ditanya lagi siapa yang bisa memberikan perintah BKO kepada Kopassus, Wiranto mengatakan, "Nanti kita tunggu hasil

(Bersambung ke hlm 11 kol 6-9)

Kompas
12 Agustus 1998

Itu berarti, semua pengendalian operasi dikendalikan satuan B. Sebagian orang dari satuan A itu sekarang menjadi tanggung jawab si B. Mau diapakan saja terserah si B.

Hal itu termuat dalam berita *Kompas* ("Wiranto Tolak Ungkap yang Perintah Prabowo", 12 Agustus 1998).

Dalam struktur ABRI, memang ada prosedur bantuan yang diberikan untuk kesatuan lain yang disebut BKO.

Misalnya, ada pimpinan, sebut saja D, memberikan perintah pada satuan A agar sebagian dari pasukan yang ada pada satuannya di-BKO-kan atau ditugaskan bergabung ke kesatuan B.

Itu berarti, semua pengendalian operasi dikendalikan satuan B. Sebagian orang dari satuan A itu sekarang menjadi tanggung jawab si B. Mau diapakan saja terserah si B. Jika nanti ada orang-orang satuan A di bawah kendali B berbuat sesuatu, maka hal itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab B yang diberi kendali BKO oleh pimpinan D.

Ada beberapa kemungkinan proses keluarnya BKO itu. Pertama, karena satuan B tidak mampu mengatasi masalah, sementara masalah yang harus diselesaikan itu sangat mendesak dan harus segera diselesaikan. Kedua, karena satuan B tidak dapat melakukan tugasnya berhubung jumlah anggotanya tidak cakap atau secara profesional tidak mampu melaksanakan tugas.

Selain atas perintah pimpinan D, proses BKO bisa saja tidak diketahui pimpinan D itu. Misalnya, karena mendesak, maka atas nama D, staf-staf di lingkungan D memerintahkan BKO. Coba A, keluarkan satu regu untuk B.

Menurut prosedur, staf yang memerintahkan BKO itu seharusnya segera melapor pada pimpinan D sehingga pimpinan mengetahui proses BKO tersebut.

Pangab: DKP Bisa Memeriksa Atasan Prabowo

JAKARTA — Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menjelaskan, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bisa saja memeriksa perwira di atas mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI Prabowo Subianto, berkaitan dengan kasus orang hilang. Itu, katanya, karena siapa pun komandan satuan bisa melakukan Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada satuan lainnya.

"Bisa yang bersangkutan, bisa yang lebih tinggi lagi, bisa dari komandan-komandan yang bersangkutan," ujar Wiranto menjawab pertanyaan apakah perwira yang lebih tinggi bisa diperiksa DKP, seusai membuka Rakernis Penerangan ABRI di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta, kemarin.

Sebagai Danjen Kopassus saat terjadi penculikan terhadap sejumlah aktivis, atasan Prabowo adalah Jenderal Feisal Tanjung sebagai Pangab dan Wiranto sebagai Kepala Staf TNI-AD (KSAD). Secara administratif dia juga mempunyai atasan Presiden Soeharto sebagai Panglima Tertinggi ABRI.

Seperti diberitakan di harian ini kemarin, Ketua DKP Jenderal Subagyo Hadisiswoyo menyatakan bahwa Prabowo tidak mendapat perintah Pangab (Jenderal Feisal Tanjung) dan KSAD (Jenderal Wiranto) untuk menculik sejumlah aktivis. Dia, katanya, hanya mendapat perintah untuk memBKO-kan pasukannya yang kemudian dianalisis sendiri menjadi sebuah tindakan penculikan.

Dijelaskan Wiranto, BKO dilakukan bila ada satu komando atau kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu. Satuan tersebut, katanya, kemudian akan menyusun pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dan itu, lanjutnya, bisa dilakukan di tingkat satuan manapun.

"Dalam melaksanakan tugas-tugas itu satuan tersebut akan membutuhkan perkuatan dari pasukan-pasukan yang lain. Nah, pasukan-pasukan lain itulah yang kalau masuk ke kesatuan tadi namanya 'Bawah Kendali Operasi' atau BKO. Dia terlepas dari induk satuannya dan kemudian berada di bawah kendali satuan baru yang mendapat tugas itu," jelas Wiranto.

Ditanya siapa yang berhak memberi perintah BKO, Wiranto menjawab, "Lho, bukan begitu. Kamu itu *nggak* jelas tapi pura-pura tahu. Itu nanti [akan diketahui]."

Wiranto kemudian segera menambahkan, "Yang mengeluarkan BKO itu macam-macam, tergantung levelnya. Kalau satuan peleton ya komandan peleton. Satuan itu dalam rangka mem-BKO-kan satuan lainnya tergantung levelnya. Siapa pun bisa memberikan BKO. Siapa pun!"

Menanggapi pertanyaan tentang BKO ini, Wiranto tampak sedikit jengkel. "Saya tidak akan menjelaskan sepotong-sepotong, silakan tunggu hasil DKP ini sehingga secara utuh bisa dijelaskan. Kalau mengulas sepotong, bisa keliru. Saya ingatkan ini," katanya.

Ditanyakan apakah benar Prabowo salah menganalisis perintah BKO ini, Wiranto menjawab dengan nada tinggi, "Kamu tanya Prabowo sendiri, kok tanya saya!"

Perkembangan pemeriksaan DKP atas Prabowo juga mendapat tanggapan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Kordinator Kontras, Munir SH, menilai sangatlah janggal bila KSAD Subagyo mengatakan bahwa tindak pidana penculikan dilakukan atas dasar penafsiran dari sebuah perintah. Sepanjang yang

Bersambung ke Hlm. 3

Republika
12 Agustus 1998

11 AGUSTUS 1998

"Untuk meneliti kasus penculikan dan orang hilang dan berkait dengan pem-BKO-an pasukan, maka tidak menutup kemungkinan akan dimintai keterangan perwira yang lebih tinggi lagi. Bisa dari komandan-komandan yang bersangkutan."

| ***Jenderal TNI Wiranto**, Menhankam/Pangab*

Sangatlah janggal bila KASAD mengatakan bahwa tindak pidana penculikan dilakukan atas dasar penafsiran dari sebuah perintah. Sebuah perintah di ABRI sifatnya harus jelas dan tidak pernah memberikan peluang untuk ditafsirkan. Melihat pemeriksaan DKP, Kontras menganggap hasilnya terlalu satu arah saja. Orang luar diberikan begitu saja untuk menafsirkan apa isi dan hasil pemeriksaan. Sebagai jalan keluar terbaik kami sangat mengharapkan bila prabowo diperiksa di depan mahkamah militer saja.

| ***Munir**, Koordinator Badan Pekerja Kontras, dalam berita di Repunblika ("Pangab: DKP Bisa Periksa Atasan Prabowo", 12 Agustus 1998)*

Hendrik Dikson Sirait mendatangi Puspom ABRI dengan diapit pengacaranya dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). Hendrik adalah korban penculikan 1 Agustus 1996 terkait dengan peristiwa 27 Juli 1998.

> **"Saya punya asumsi bahwa saya dan beberapa orang yang diculik terakhir adalah sasaran antara dari sasaran sebenarnya, yakni Megawati Soekarnoputri. Ketika diinterogasi, materi pemeriksaan yang diajukan mempunyai persamaan dengan materi yang ditanyakan kepada para aktivis yang diculik belakangan, yaitu mengenai dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri."**

| ***Hendrik Dikson Sirait**, korban penculikan, dalam berita Pikiran Rakyat ("Perwira Lebih Tinggi Bisa Saja Diperiksa", 12 Agustus 1998)*

Pikiran Rakyat
12 Agustus 1998

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI/
PEMIMPIN HARIAN REDAKSI : HAM Ruslan
REDAKTUR PELAKSANA : HM Baedarus, Widodo Asmowiyoto, Deni Kahdar Gunandi, Yoyo Siswaya Adiredja.

STAF INTI REDAKSI : Dasto Suganda, H. Dadang Baitur, Suyatna Anirun, H. Iman Dharmadji, Endi Sungkono, Surachdin, Husni Agus, Fadillah Sulaeman, Djudju Sjafzudin, Bagoes Illen.

DEWAN REDAKSI : Atang Ruswita, HAM Ruslan, Yoyo Siswaya Adiredja, Widodo Asmowiyoto, Deni Kahdar Gunandi, HM Baedarus, Perdana Alamsyah, H. Amir Zainun, H. Soeharmono Tjitrosoewarno, H. Bram M. Darmaprawira, H. Syafik Umar, Bambang Triadji, HM. Ridlo Eisy.

Pikiran

DARI RAKYAT OLEH

BANDUNG - RABU (WAGE) 12 AGUSTUS 1998 Nomor 136 - Tahun

Sehubungan Adanya Perintah "Bawah Kendali Operasi"

Perwira Lebih Tinggi Bisa Saja Diperiksa

JAKARTA, (PR).-

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan, tidak tertutup kemungkinan perwira yang lebih tinggi dari Letjen Prabowo akan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perintah pem-BKO-an (Bawah Kendali Operasi) dalam kasus penculikan dan orang hilang.

"Keterangan itu bisa didapat dari yang bersangkutan (Letjen Prabowo, red), bisa yang lebih tinggi lagi, bisa juga dari komandan-komandan yang bersangkutan," kata Wiranto kepada wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan ABRI di Mabes ABRI Cilangkap Jakarta, Selasa (11/8).

Wiranto sebetulnya telah menyatakan keengganannya untuk memberikan komentar tentang kasus penculikan dan orang hilang yang melibatkan beberapa oknum dari Kopassus ini. Namun *tape* wartawan telah disorongkan sehingga setiap perkataannya bisa saja dijadikan berita oleh wartawan.

"Saya tidak bersedia memberikan penjelasan sepotong-sepotong berkaitan dengan kasus penculikan dan orang hilang ini. Saya masih menunggu hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemeriksaan terhadap Kol. Chairawan, Mayjen Muchdi dan Letjen Prabowo," ujar Wiranto.

Setelah wartawan mengajukan pertanyaan seputar BKO, akhirnya Wiranto pun menjawabnya dengan gamblang. Dijelaskannya, BKO terdiri dari macam-macam cara dan tergantung pada tingkatan operasional pasukan. Dalam rangka pelaksanaan BKO, suatu kesatuan sangat tergantung pada levelnya. Perintah BKO ini bisa diberikan oleh siapa pun.

Ia mencontohkan, bila ada satu komando atau satuan yang mendapat tugas-tugas tertentu dan akan menyusun pengorganisasian untuk melaksanaan tugas-tugas itu tapi membutuhkan perkuatan dari pasukan lain, maka pasukan lain itu mendapat perintah BKO dan terlepas dari kesatuan asalnya.

"Jadi ia lepas dari induk satuannya dan dia di bawah kendali operasi dari satuan baru yang dapat tugas itu," jelas Wiranto kepada wartawan.

Masalah BKO ini mencuat setelah Ketua DKP yang juga KSAD Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan kepada wartawan di Mabes AD, bahwa Letjen Prabowo Subianto ketika masih menjabat Danjen Kopassus mendapat perintah BKO. Perintah itu kemudian dianalisisnya dan muncullah kegiatan penculikan dan orang hilang.

Saat Prabowo menjabat Danjen Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal, jabatan KSAD dipegang oleh Jenderal TNI R. Hartono dan jabatan Panglima ABRI dipegang oleh Jenderal Feisal Tanjung. KSAD memiliki fungsi pembinaan terhadap seluruh kesatuan yang berada di bawahnya, sedangkan Pangab mempunyai hak untuk memberikan komando terhadap seluruh kesatuan dalam tubuh ABRI.

Menilik dari ucapan Pangab Jenderal Wiranto, tidak tertutup kemungkinan keduanya akan dimintai keterangan. Namun ketika Wiranto ditanya wartawan tentang siapa yang memberikan perintah BKO kepada Prabowo, ia tidak segera memberikan jawaban. "Kalian jangan begitu dong. Pemeriksaan kan belum selesai. Tunggu sajalah nanti," katanya.

Sementara itu, Selasa kemarin DKP tidak melakukan pemeriksaan terhadap para perwira terperiksa.

(Bersambung ke hlm 8 klm 1)

Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin menyatakan siap memeriksa mantan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya Sutiyoso sehubungan dengan pengakuan korban penculikan Hendrik Dikson Sirait. Sirait yang diculik 1 Agustus 1996 mengaku diculik oknum dari jajaran intel Kodam Jaya.

| **Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin**, *Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, dalam berita Kompas (" Puspom Natakan Siap Periksa Sutiyoso", 12 Agustus 1998)*

Puspom Nyatakan Siap Periksa Sutiyoso

Jakarta, Kompas

Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin menyatakan siap memeriksa mantan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya Sutiyoso sehubungan dengan pengakuan korban penculikan, Hendrik Dikson Sirait. Sirait yang diculik 1 Agustus 1996 mengaku diculik oknum dari jajaran intel Kodam Jaya.

Hal itu diungkapkan Syamsu menjawab pertanyaan wartawan seusai menerima laporan Hendrik sekaligus permintaan perlindungan Sirait kepada Puspom ABRI, Selasa (11/8), di Jakarta. Sirait datang ke Puspom ABRI diantar pengacaranya dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Menyinggung pernyataan Sirait bahwa pengusutan penculikan dirinya bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus 27 Juli 1996, Syamsu mengimbau, siapa saja yang menjadi korban pada kasus penyerbuan kantor DPP PDI melaporkan kepada Puspom ABRI sehingga pengusutan bisa segera dilakukan.

"Pengusutan ini kan bisa berkembang. Laporan dari Sirait ini bisa membuka jalan lain lagi. Tidak tertutup kemungkinan ada oknum lain di ABRI yang patut diduga terlibat. Sirait kan bilangnya ada keterlibatan Intel Kodam. Akan kita usut itu. Masukan dari Sirait ini sangat berguna," ungkap Syamsu.

Syamsu menambahkan, permasalahan Sirait ini tidak sulit karena segala sesuatunya sudah jelas, begitu juga siapa yang patut diduga sebagai pelakunya. Hanya saja Puspom ABRI tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Ekses 27 Juli

Dalam pertemuan dengan Syamsu, Sirait menyampaikan harapan agar apa yang dilaporkannya kepada Puspom bisa menjadi salah satu bahan introspeksi ABRI. Diharapkan, ada terobosan untuk menghentikan tindak kekerasan yang sering dilakukan oknum ABRI terhadap warga sipil, dalam menyelesaikan masalah sosial politik di Masyarakat.

Sirait tidak berani menyimpulkan apakah ada hubungan antara penculikan dirinya dengan penculikan sejumlah aktivis lainnya di awal tahun ini. Hanya menurut Sirait ada benang merahnya. Misalnya, penculikan dan penyiksaan dilakukan lebih rapi dan terorganisir.

Kedua, ada kesamaan dalam materi pemeriksaan, yaitu semua ditanya soal dukungannya terhadap Megawati Soekarnoputri. (oki)

TERIMA LAPORAN — *Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djaluddin Selasa kemarin menerima laporan Hendrik Dikson Sirait (kanan) berkaitan dengan kasus penculikan dirinya Bulan Agustus 1996.*

MBA
EXECUTIVE PROGRAMME PART-TIME
DE MONTFORT UNIVERSITY
ENGLAND
YAKSI
De Montfort University is one of the largest state universities in the UK
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
• 24 Month Programme ; 2 evenings per week
• Taught in English
Admission Criteria :
• S1 or professional equivalent
• Work experience professional, preferably as a manager
• Competence in English
For further details, please contact :
Lembaga Pendidikan YAKSI DM (De Montfort)
Wisma Argo Manunggal Lt. 10,
Jl. Gatot Subroto Kav.22, Jakarta Selatan
Telp. 2520803 - 2520104 Stimydmu@rad.net.id
Jl. Walter Monginsidi No.122, Jakarta
Telp. 7250113, LPMYAKSI@dnet.net.id

FINANCE MANAGER
Kriteria :
✓ Pria, usia maksimum 40 tahun
✓ Pendidikan S1 Akuntansi
✓ Pengalaman kerja minimal 5 tahun di Manajerial Keuangan
✓ Menguasai penyusunan dan pengendalian Anggaran & Arus Kas
✓ Menguasai manajemen pengelolaan dana Perusahaan
✓ Menguasai sistem Akuntansi dan perpajakan
✓ Dapat dipercaya, pekerja keras dan berambisi untuk maju
✓ Bisa bekerja menggunakan komputer
Fasilitas :
• Penghasilan sampai 10 juta/bulan (minimal 15 kali setahun)
• Kendaraan dinas Perusahaan
Kirimkan surat lamaran beserta daftar riwayat hidup ke :
The Director
PO. Box 3920 JKP 10039

In Bed with
AYU UTAMI
Kisah 1001 malam

bayangin...

Kompas
12 Agustus 1998

Ketua Majelis Hakim, Is Sudaryono, menilai Mendagri salah menerapkan hukum sehingga keputusan untuk melarang organisasi PRD wajib dibatalkan. Mestinya, PRD diukur dengan parameter UU Kepartaian, bukan UU Keormasan.

Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid akhirnya mengakui SK Mendagri No. 210-221 Tahun 1997 tentang pembubaran dan pelarangan organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengandung kelemahan. Perubahan sikap pemerintah itu disebabkan oleh status Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai partai terlarang telah dibatalkan oleh pengadilan.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada 10 Agustus 1998 mengabulkan gugatan Ketua PRD, Budiman Sudjatmiko, dengan membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 210-221 Tahun 1997–waktu itu dijabat Yogie S. Memed–yang menyatakan sebagai partai terlarang. Ketua Majelis Hakim, Is Sudaryono, menilai Mendagri salah menerapkan hukum sehingga keputusan untuk melarang organisasi PRD wajib dibatalkan. Mestinya, PRD diukur dengan parameter UU Kepartaian, bukan UU Keormasan.

> **"Kami tidak mencari legalitas dari pemerintah. Sebab, yang penting bagi kami, rakyat mengakui keberadaan PRD. Bagi PRD, yang terpenting sekarang adalah pencabutan lima undang-undang parpol."**

| ***Wilson**, Ketua Divisi Kepal PRD, dalam berita Jawa Pos (" PRD Menangkan Gugatan atas Mendagri", 11 Agustus 1998)*

Jawa Pos

SELASA PON 11 AGUSTUS 1998

PRD Menangkan Gugatan atas Mendagri

SK Pelarangan dan Pembubaran Harus Dicabut

gugat diwakili kuasa hukumnya dari Kantor LBH Jakarta, Paulus R. Mahulette SH. Kuasa hukum Mendagri diwakili Indan Dahlan SH.

Menurut Paulus, gugatan PRD terhadap Mendagri itu diajukan karena SK yang dikeluarkan Mendagri bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional. Antara lain, pasal 19 dan 20 Deklarasi HAM serta pasal 21 naskah internasional tentang hak-hak sipil dan hak politik.

Berkaitan dengan status Budiman Sudjatmiko (ketua PRD) dan aktivis PRD lain yang kini masih berstatus tapol di berbagai LP di Jakarta dan Surabaya, Paulus mengatakan bahwa pihaknya

Wilson yang pernah divonis hukuman lima tahun bersama-sama aktivis PRD lain.

BUKU MUCHTAR

Di tempat yang sama, PTUN menolak gugatan kuasa hukum Muchtar Pakpahan berkaitan dengan gugatan ganti rugi dilarang beredarnya buku *Muchtar Pakpahan* yang berjudul *Rakyat Menggugat*.

Meski gugatan ganti rugi tidak dipenuhi, majelis hakim yang dipimpin Marina Sidabutar SH itu mencabut penetapan majelis hakim tentang penundaan pelaksanaan SK Jakgung RI tentang pelarangan buku tersebut.

Terhadap putusan itu, kami menyatakan pikir-pikir. Sebab,

Budiman Sudjatmiko (berkacamata) bersama tokoh PRD lainnya di LP Cipinang Jakarta.

Jawa Pos
11 Agustus 1998

Setelah bebas, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) diwawancarai *Forum Keadilan* ("Perolehan Kursi Bukan Target Utama", 5 April 1999). Berikut ini nukilan penuturan Budiman.

Saya beserta semua pemimpin dan anggota PRD di penjara tak pernah merasa melakukan kejahatan dan kesalahan politik. Dengan menerima tawaran grasi dari pemerintah, berarti kami harus meminta maaf. Justru sejak semula kami berpandangan bahwa pemerintah Orde Baru-lah yang melakukan kesalahan politik dengan memenjarakan kami. Pemerintah Habibie juga bersalah ketika menolak membebaskan kami secara segera dan tanpa syarat begitu terjadi pergantian kekuasaan dari Soeharto.

Alasan memenjarakan kami tidak kuat. Kami dituduh melanggar pasal-pasal dalam UU Anti Subversi karena pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sejak mendirikan PRD. Padahal, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam setahun terakhir ini justru membenarkannya. Misalnya, soal tuntutan kami agar Soeharto diadili karena kejahatan politik dan ekonominya. Lalu, soal perlunya

WAWANCARA

Budiman Soedjatmiko:

"Perolehan Kursi Bukan Target Utama"

Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang semasa Orde Baru dianggap berhaluan "kiri", ternyata tak hanya terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman. Tapi, belakangan, partai yang dituding sebagai reinkarnasi komunisme di Indonesia itu pun kini dinilai lolos dalam seleksi Tim Sebelas. Artinya, bolek ikut berkompetisi dalam Pemilihan Umum 1999. Tak mengherankan bila pemerintah B.J. Habibie kemudian menawarkan grasi kepada Ketua Umum PRD, Budiman Soedjatmiko, yang kini tengah mendekam dalam penjara.

Namun, tawaran itu ditolak narapidana politik yang divonis sebagai pelanggar UU Antisubversi itu. Apa latar belakang sikap Budiman ini? Berikut ini adalah petikan penuturannya kepada FORUM

Mengapa Anda menolak tawaran grasi pemerintah?

Saya beserta semua pemimpin dan anggota PRD di penjara tak pernah merasa melakukan kejahatan atau kesalahan politik. Dengan menerima tawaran itu, berarti kami harus meminta maaf. Justru sejak semula kami berpandangan bahwa pemerintah Orde Barulah yang melakukan kesalahan politik dengan memenjarakan kami. Pemerintahan Habibie juga bersalah ketika menolak membebaskan kami secara segera dan tanpa syarat begitu terjadi pengantian kekuasaan dari Soeharto.

Alasan memenjarakan kami tidak kuat. Kami dituduh melanggar pasal-pasal dalam UU Antisubversi karena pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sejak mendirikan PRD. Padahal, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam setahun terakhir ini justru membenarkannya. Misalnya, soal tuntutan kami agar Soeharto diadili karena kejahatan politik dan ekonominya. Lalu, soal perlunya membangun sistem multipartai, pencabutan dwifungsi ABRI, pembentukan pemerintahan koalisi demokrasi sebagai alternatif dari pemerintahan Orde Baru, komisi pemilu yang independen yang terdiri dari partai-partai peserta pemilu, dialog terbuka dengan pemimpin-pemimpin informal masyarakat Aceh dan Irianjaya untuk membicarakan pergolakan-pergolakan yang terjadi, penolakan asas tunggal, dan lain-lain. Semua sudah kami ungkapkan dalam Manifesto PRD. Tapi, dengan manifesto itu pula kami dituduh subversif. Kalau melihat keadaan sekarang, seharusnya ada ribuan orang yang dipenjarakan karena mengeluarkan pernyataan, melakukan perbuatan, yang persis sama subversifnya dengan saya dan PRD.

Soal tuduhan bahwa kami mendalangi Kerusuhan 27 Juli, pada semua tingkat pengadilan, tidak ada buktinya. Begitu juga dengan tuduhan bahwa kami komunis. Itu semua rekayasa intelijen. Kami adalah korban kejahatan dan rekayasa politik sebuah pemerintahan yang hendak mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara otoriter. Bukan pelakunya. Jangan korban yang dipersalahkan, dong. Kesalahan kami adalah bersuara lebih dulu saat Orde Baru masih amat kuat, saat banyak pihak yang kini merasa paling reformis tengah mencari selamat dan ikut-ikutan mengutuk kami.

Semua soal itu perlu diperjelas dulu. Saya dan kawan-kawan PRD tak bisa menerima pembebasan dengan syarat mengakui dan meminta ampun atas kesalahan yang tidak kami lakukan. Sejarah berpihak kepada kami, bukan pemerintah Orde Baru atau sisanya. Kebenaran itu memang pahit. Sepahit bara kami akibat dituduh macam-macam semasa Orde Baru. Yang kami tuntut kini adalah amnesti umum bagi semua narapidana politik di Indonesia.

Benarkah rencana pembebasan Anda karena ada permintaan dari Komisi HAM dan Bantuan Kemanusiaan Jerman, Gerd Poppe?

Tidak. Bahkan, saya baru mendengar tentang lembaga itu dari televisi, setelah mereka mempersoalkan pemenjaraan saya kepada H
bie. PRD memang punya perwakilan di Eropa, yang berkedudukan
Belanda. Tapi, kami tak pernah menjalin hubungan bilateral sec
khusus dengan lembaga itu. Mereka mungkin mendapat informasi
tang kami dari Amnesty International. Saya tidak tahu. Yang jelas
dak langsung dari kami.

Apa yang akan Anda lakukan jika dibebaskan?

PRD sudah lolos seleksi dan sah secara hukum sebagai partai pe
ta pemilu. Jadi, tentunya saya akan terlibat dalam konsolidasi pa
menghadapi pemilu. Saat mendaftar di Departemen Kehakiman, P
sudah ada di 12 provinsi dan 86 cabang di daerah tingkat II. Semua
hang itu kami kembangkan pada masa-masa sulit, bahkan pada peri

KERUSUHAN 27 JULI 1996. Tak ada bukti kami dalangnya.

74 FORUM KEADILAN Nomor 28, Tahun VII, 5 April 1999

FORUM KEADILAN Nomor 28, Tahun VII, 5 April 1999

Forum Keadilan
5 April 1999

membangun sistem multipartai, pencabutan dwifungsi ABRI, pembentukan pemerintahan koalisi demokrasi sebagai alternatif dari pemerintahan Orde Baru, komisi pemilu yang independen yang terdiri dari partai-partai peserta pemilu, dialog terbuka dengan pemimpin-pemimpin informal masyarakat Aceh dan Irian Jaya untuk membicarakan pergolakan-pergolakan yang terjadi, penolakan asas tunggal, dan lain-lain. Semua sudah kami ungkapkan dalam Manifesto PRD. Tapi, dengan manifesto itu pula kami dituduh subversif. Kalau melihat keadaan sekarang, seharusnya ada ribuan orang yang dipenjarakan karena mengeluarkan pernyataan, melakukan perbiuatan, yang persis sama subversifnya dengan saya dan PRD.

Soal tuduhan bahwa kami mendalangi Kerusuhan 27 Juli (1996), pada semua tingkat pengadilan, tidak ada buktinya. Begitu juga dengan tuduhan bahwa kami komunis. Itu semua rekayasa intelijen. Kami adalah korban kejahatan dan rekayasa politik sebuah pemerintahan yang hendak mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara otoriter. Bukan pelakunya. Jangan korban yang dipersa-

lahkan, dong. Kesalahan kami adalah bersuara lebih dulu saat Orde baru masih amat kuat, saat banyak pihak yang kini merasa paling reformis tengah mencari selamat dan ikut-ikutan mengutuk kami.

Dewan Kehormatan Perwira kembali melakukan sidang. Agendanya adalah pemeriksaan berkas-berkas hasil sidang sebelumnya atas Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan. Tidak seperti biasanya seharian, sidang kali ini lebih singkat. Pukul 12.30 sudah selesai. Letjen TNI Agum Gumelar dan Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono tidak tampak. Gubernur Lemhanas Agum berada di Malang, sementara Kassospol Susilo Bambang Yudhoyono memberikan ceramah di Lemhanas. Sidang yang digelar di Mabesad ini hanya diikuti Danjen Akabri Laksdya Achmad Sutjipto, Irjen Dephankam Yusuf Kartanegara, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Pati Mabes ABRI Letjen TNI Ary Kumaat, dan Pangkostrad Djamari Chaniago.

Bersama Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), para anggota keluarga korban mendatangi Dewan Kehormatan Perwira di Mabes AD, Jakarta Pusat. Yang datang adalah keluarga Yadin Muhidin, Muhammad Yusuf, Noval Said, Yani Afri, herman Hendrawan, Suyat, Ucok Munandar Siahaan, hendra Hambali, Deddy Omar Hamdun, Petrus Bima Anugrah, Sonny, dan Ismail. Begitu tiba di Mabes AD, mereka langsung berdiri di depan pagar dan menenteng foto keluarga mereka yang menjadi korban penculikan dan sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Keluarga ini hanya ditemui Kolonel CPM Supardi dari Mabes AD.

> **"Apa prioritas kerja dewan kehormatan perwira? Jika hanya memprioritaskan soal administrasi dan ketiga terperiksa saja, bagaimana dengan nasib 14 teman kami yang hilang?"**
>
> | ***Rahardjo Waluyo Jati***, *korban penculikan.*

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

Pangab: BKO adalah penambahan pasukan

ATASAN PRABOWO BISA DIPERIKSA

JAKARTA (Pos Kota) - Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bisa saja memeriksa atasan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan ke hal 16 kol. 5

Keluarga korban penculikan yang ingin bertemu Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo HS, di Markas Besar AD, kemarin. (ba)

Syamsu: Sutiyoso bisa dimintai keterangan

Hendrikson melapor ke Puspom

JAKARTA (Pos Kota) - Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu D, SH mengatakan dalam mengusut kasus penculikan/orang hilang, Puspom ABRI bisa saja meminta keterangan dari mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI ke hal 16 kol. 2

Hendrikson Sirait melapor ke Puspom ABRI di. terima Dan Puspom Syamsu D, SH. (ip)

Pelaksanaan kongres di Palu dipersilakan

Syarwan: PDI Soerjadi yang sah

JAKARTA (Pos Kota) - Rencana kongres PDI Soerjadi di Palu pada 25 -29 Agustus mendapat persetujuan dari pemerintah. Kemarin, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid menyatakan silakan mengadakan kongres karena PDI Soerjadi yang sah. "Kalau ia ke hal 4 kol. 4

Dessy Syarief terpilih jadi None 1998

'Saya bersyukur pada Tuhan'

JAKARTA (Pos Kota) - Setelah menyisihkan 699 peserta, Leonard Abdul A.D. dan Dessy Syarief ke hal 2 kol. 1

Axis lupa dicekal. (mk)

Bill Clinton tetap berikan kesaksian soal Lewinsky

WASHINGTON (CNN) - Para pembantu terdekat Presiden AS menyarankan Clinton tetap akan memberikan kesaksiannya, menyangkut hubungannya dengan Monica Lewinsky, di muka ke hal 2 kol. 3

Kalau tak disampaikan melalui DPP Golkar

Akbar: Dana Dakab hentikan saja

JAKARTA (Pos Kota) -

Mompok, Serang, Selasa siang. Ia dibubarkan karena dinilai menunda-nunda penyerahan uang insentif untuk pekerjanya. ke hal 4 kol. 3

Pos Kota
12 Agustus 19998

12 AGUSTUS 1998

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) memeriksa kembali mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan. Pemeriksaan kembali itu berlangsung mulai pukul 09.00–11.30 WIB. Seperti biasa, sidang dilakukan secara tertutup. Jurnalis melihat Letjen TNI Prabowo Subianto memasuki Mabes TNI AD pukul 08.25 WIB.

Sementara itu, tampak anggota DKP seperti Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Jusuf Kertanegara, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Agum Gumelar, Laksdya TNI Achmad Sutjipto, dan Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi memasuki ruang sidang dari pintu depan Mabes TNI AD.

> **"Prabowo secara jantan siap bertanggung jawab atas risiko apa pun dari kesalahan yang dia lakuka."**

| ***Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo**, KASAD dan Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP)*

> **Ini semua demi negara. Jika anak buah saya salah, saya siap bertanggung jawab. Jabatan dan pangkat itu cuma sampiran. Setiap saat saya siap menerima resiko tugas. Demi negara, mati pun saya siap**

| ***Letjen TNI Prabowo Subianto***

"BKO atau apa pun namanya, bagi saya, nama-nama seperti itu tidak saya mengerti. Untuk saya sederhana saja. Satu gerakan itu direncanakan, lalu dibicarakan, dan kemudian diputuskan. Kalau ada yang kurang jelas, ya, harus ditanyakan oleh penanggung jawab operasi. Ia tidak boleh menganalisis sendiri. karena kalau analisis dia tidak sesuai dengan yang dimiliki komandannya, maka siapa yang salah? Ya salah bawahan. Bila atasan menyetujui, maka hal itu bukan tanggung jawab bawahan lagi."

| ***Letjen TNI (Purn) Kemal Idris***, *dalam berita Kompas (" Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS: Prabowo Akui Salah Analisis Perintah", 13 Agustus 1998)*

"(Untuk merehabilitasi nama baik Kopassus) yang pertama dengan pengadilan. Indonesia betul-betul bisa menjadi negara demokratis di mana semua tindakan oleh setiap bagian pemerintah akan terungkapkan dengan cepat. BUKAN SESUATU YANG TERJADI PADA 1990 BARU TERUNGKAP PADA 1998. Saya kira reputasi Kopassus akan bisa kembali"

| ***Robert William Liddle***, *guru besar ilmu politik Ohio State University, dalam Panji Masyarakat ("Saya Kecewa Kopassus", 12 Agustus 1988)*

Kompas
13 Agustus 1998

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS:

Prabowo Akui Salah Analisis Perintah

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, dalam sidang pemeriksaan DKP, Rabu (12/8), mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui telah membuat kesalahan analisis terhadap perintah Bawah Kendali Operasi (BKO). Selanjutnya, Prabowo telah mengakui melakukan kesalahan menganalisis. Untuk itu DKP memeriksa hal-hal yang berkisar pada disiplin, prosedur, kejujuran ataupun tabiat keperwiraannya. Ini 'kan ditanya, diuji kemudian untuk dimintai pertanggungjawaban," papar Subagyo, yang juga mantan Komandan Kopassus ini.

Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang mengeluarkan perintah BKO yang kemu-

Panji Masyarakat
12 Agustus 1998

PANJI UTAMA

William Liddle

SAYA KECEWA KOPASSUS

Wawancara: Pembentukan DKP dinilainya sebagai sikap jujur ABRI. Meski kecewa, setelah dilakukan perbaikan, dia percaya nama Kopassus akan harum kembali.

Tidak cuma pejabat Indonesia yang masygul dengan tindakan penculikan terhadap para aktivis. Robert William Liddle, guru besar Ilmu Politik di Ohio State University, AS, juga ikut uring-uringan. Berikut wawancara wartawan *Panji* Rifwan Hendri dengan Liddle lewat telepon. Petikannya.

Dalam usaha mengungkap kasus penculikan aktivis, ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Apa pendapat Anda?

Saya kira itu langkah tepat. Pemberi dana di luar negeri memang ingin melihat ABRI yang jujur dan berperilaku sebagai tentara profesional. Itu dari segi politik internasional. Dari segi politik dalam negeri saya kira juga tepat. Sebagian dari orang yang diangkat di DKP dianggap oleh umum sebagai temannya Jenderal Prabowo atau cukup dekat dengan Prabowo. Jenderal Wiranto yang cukup berani mengangkat orang-orang itu mengisyaratkan bahwa dia betul-betul menguasai tentaranya.

Jadi menurut Anda jenderal yang duduk di DKP adalah orang dekatnya Prabowo?

Kalau saya bilang dekat mungkin terlalu keras. Yang saya maksudkan selama ini mereka punya reputasi yang bisa dikatakan lebih dekat kepada Prabowo ketimbang kepada Wiranto.

DKP kan baru yang pertama kali dibentuk untuk jenderal berbintang tiga?

Bagi saya ini menandakan Wiranto menguasai ABRI.

Kalau dilihat dari langkah politik apakah ini bernilai positif bagi Presiden Habibie?

Sulit sekali diramalkan. Dalam jangka pendek mungkin ya. Saya lihat memang telah terbentuk koalisi antara ABRI-nya Wiranto dan kekuatan politik Habibie, termasuk Akbar Tandung dan Golkarnya. Jadi saya kira sebelum pemilu koalisi ini akan berkuasa di Indonesia. Tapi kalau Anda tanya dampaknya terhadap pemerintahan Habibie, sulit sekali untuk meramalkannya dalam jangka panjang. Kalau ABRI menjadi kuat dan utuh siapa tahu mereka ingin berkuasa lagi seperti dulu.

Atau apakah ini juga bernilai positif bagi langkah politik Wiranto?

Bagi saya terlalu pagi. Saya mau melihat hasil pemilu terlebih dahulu.

Apakah pembentukan DKP karena tekanan dari pemerintah AS sehubungan dengan kunjungan Cohen ke Indonesia?

Saya tidak melihat dalam hubungan kunjungan Menhan Amerika, tetapi lebih luas dari itu. Memang sudah lama berkembang tekanan dari luar negeri, tidak hanya dari Amerika. Tapi Amerika sebagai "pemimpin moral dunia" mungkin sedikit sarkastis. Suasana internasional sekarang memang memerlukan tentara yang bersih di mana-mana.

William Liddle: Tekanan dari luar negeri

Sejauh mana pembentukan DKP mempunyai citra positif di dunia internasional?

Ya akan membaik. Sebetulnya, terus terang saja, saya melihat Habibie sejak langkah pertama (menjadi presiden) menunjukkan sikap positif. Hampir semua yang dilakukan Habibie sejak menjadi presiden adalah hal yang positif. Tapi yang kita lihat di pasar keuangan internasional misalnya, tidak ada dampak. Saya tidak tahu kenapa pasar internasional, investor, dan para pembeli rupiah tidak melihat bahwa pemerintahan Habibie cukup stabil.

Kira-kira kenapa?

Saya kira karena kebodohan internasional. Krisis di Indonesia, khususnya di Amerika atau saya kira juga di seluruh dunia Barat, tidak terlalu dikenal. Saya baru saja membicarakan masalah ini di Ohio State University dengan seorang dosen ekonomi yang kebetulan orang Jepang. Kami sependapat bahwa orang Amerika tahu banyak tentang pasar di Jepang. Ada tingkat kecanggihan. Pasar di sini (Amerika) akan menilai apa yang terjadi dalam ekonomi Jepang dengan cukup wajar. Namun kalau pasar Indonesia tidak diketahui sama sekali. Dulu para investor itu terdorong, boleh dikatakan, karena desas-desus bahwa Asia Tenggara adalah tempat yang baik untuk investasi. Kalau sekarang mereka bukan mendengar desas-desus lagi tapi mereka punya kesan bahwa Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia khususnya bukan tempat yang baik. Jadi mereka sepakat untuk enggan.

Untuk mengatasi hal itu kira-kira apa yang mesti dilakukan pemerintah?

Seperti yang sedang dilakukan Widjojo dulu pada awal Orde Baru. Ginanjar harus pergi ke mana-mana untuk meyakinkan dunia. Dengan IMF dan Bank Dunia mereka harus sepakat. Memang itu yang sedang mereka lakukan.

Menurut Anda, apakah AS akan mengevaluasi latihan militer yang diadakan dengan Kopassus?

Saya dulu mendukung itu. Menurut saya lebih baik ada hubungan antara tentara Indonesia dan pemerintah Amerika daripada tidak ada hubungan. Tapi kalau kita menemukan kuburan massal, umpamanya di Aceh, dan ada indikasi Kopassus terlibat di dalamnya, itu kan sangat jauh dari kesan kami tempo hari mengenai ABRI. Jadi pasti akan ada evaluasi dan saya pun sangat kecewa dengan itu.

Kira-kira bagaimana cara merehabilitasi nama baik Kopassus?

Yang pertama dengan pengadilan. Kedua, jika semua lebih terbuka, Indonesia betul-betul bisa menjadi negara demokratis di mana semua tindakan oleh setiap bagian pemerintah akan terungkapkan dengan cepat. Bukan sesuatu yang terjadi pada 1990 baru terungkap pada 1998. Saya kira reputasi Kopassus akan bisa kembali. ■

13 AGUSTUS 1998

Terungkapnya kasus orang hilang yang kemudian diduga besar pelakunya adalah oknum anggota Kopassus telah merusak citra ABRI di mata rakyat. ABRI harus melakukan perbaikan ke dalam.

| ***Letjen TNI Agum Gumelar***, *Gubernur Lemhanas, dalam berita Kompas (" DKP Mash akan Periksa Prabowo Muchdi dan Chairawan", 14 Agustus 1998)*

Kompas
14 Agustus 1988

DKP Masih akan Periksa

Prabowo, Muchdi dan Chairawan

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, DKP masih akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan.

"Maksud DKP menghadirkan kembali ketiganya itu untuk melakukan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan DKP selama ini agar saran yang nantinya akan diserahkan kepada Menhankam/Pangab akan lebih baik," kata Subagyo menjawab wartawan usai sidang lanjutan DKP hari Kamis (13/8) siang di Markas Besar TNI AD (Mabes AD) Jakarta.

Sidang DKP berlangsung tiga jam. Tampak hadir antara lain Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Yusuf Kertanegara, Letjen TNI Fachrul Razi, Letjen TNI Bambang S Yudhoyono,

Subagyo mengatakan, sidang pemeriksaan DKP kemarin adalah untuk evaluasi beberapa sidang sebelumnya. "Dari evaluasi itu kita menentukan apa yang akan dilakukan DKP pada sidang berikutnya," katanya.

Sidang berikutnya akan dilaksanakan setelah 17 Agustus 1998, karena menurut Subagyo, selama 14-16 Agustus para pejabat anggota DKP sangat sibuk dengan kegiatan lain.

Pulihkan citra

Agum Gumelar yang dihubungi secara terpisah mengatakan, tak dapat disangkal bahwa terungkapnya Kasus Orang Hilang (KOH) yang kemudian diduga besar pelakunya adalah oknum anggota Kopassus telah merusak citra ABRI di mata rakyat. "Betul itu. Cara ABRI yakni harus melakukan perbaikan ke dalam," katanya.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini mengatakan, pimpinan ABRI harus memberikan tindakan tegas terhadap mereka yang ber-

Setelah Letjen Prabowo mengakui kesalahannya dan terbukti kecerobohan-nya, ia harus segera dimahmilubkan. Walau penculikan yang disertai dengan penganiayaan terhadap aktivis prodemokrasi akibat kesalahannya, tidak tertutup kemungkinan Prabowo hanya menjalankan perintah dari atasannya. Bisa Soeharto atau Feisal Tanjung. Jika terbukti bersalah, ia juga harus dituntut. Saya menolak pernyataan Feisal Tanjung bahwa dalam Kopassus ada bagian yang tidak dapat dimasukinya saat ia menjadi Pangab. Bohong itu. Semua operasi intelijen dapat diketahui. Sebagai Pangab, Feisal dapat mengetahui segala hal dalam tubuh Kopassus.

| ***Letjen TNI (Purn) Kemal Idris****, Ketua Barisan Nasional (Barnas), ringkasan dari berita Kedaulatan Rakyat ("Letjen [Purn] Kemal: Segera Mahmilubkan Prabowo", 14 Agustus 1998)*

Pemerintahan Daerah D.I.Y.

Jumat Legi 14 Agustus 1998
20 Bakdamulud 1931
Tahun LIII No. 310

Kedaulatan Rakyat on line: http://www.kedaulatan-rakyat.com

Kedaulatan

Suara Hati Nurani Ra

LETJEN (PURN) KEMAL: BOHONG KALAU PANGAB TAK TAHU

Segera Mahmilubkan Prabowo

YOGYA (KR) - Ketua Barisan Nasional Letjen Purn Kemal Idris mengatakan, setelah Letjen Prabowo mengakui kesalahannya dan terbukti kecerobohannya, ia harus segera di-Mahmilubkan. Namun demikian, walaupun penculikan yang disertai dengan penganiayaan terhadap aktivis prodemokrasi akibat kesalahannya, tidak tertutup kemungkinan Prabowo hanya menjalankan perintah dari atasannya.

"Yang memberikan perintah penculikan kemungkinan bisa Soeharto atau Feisal Tanjung atau lainnya. Jika Soeharto memang terbukti bersalah, ia juga harus dituntut," tandas Kemal kepada wartawan di sela-sela pelaksanaan Semiloka "Mencari Platform Gerakan Reformasi Menuju Kesatuan dan Persatuan Bangsa" di Auditorium Graha Sabha Pramana (IKIM, Kamis (13/8).

Diakui Kemal, perintah resmi penculikan dan berbagai tindak pelanggaran HAM di Aceh, Irian Jaya dan lainnya tidak mungkin keluar dari ABRI. Kemal sendiri menolak pernyataan Feisal Tanjung bahwa dalam Kopassus ada bagian yang tidak dapat dimasukinya saat ia menjabat Pangab. "Bohong itu. Semua operasi intelijen dapat diketahui. Sebagai Pangab, Feisal dapat mengetahui segala hal dalam tubuh Kopassus," tegas Kemal dengan nada tinggi.

Dijelaskan Kemal, BKO sebelum diputuskan, dibicarakan dulu dalam staf. Setelah itu komandan mengambil keputusan dan memberikan perintah kepada bawahannya untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, komandan memang diizinkan untuk menganalisa operasinya.

Tetapi sekiranya operasi ini akan menimbulkan gejolak, ia harus mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada yang memberikan perintah. Dan jika benar terjadi gejolak akibat operasi ini, maka yang bertanggungjawab adalah yang memberikan perintah.

Kemal mengatakan, akibat dari tindakannya menculik dan menyiksa para aktivis, Prabowo dapat dihukum puluhan tahun atau hukuman mati. "Dan jika ia dihukum lebih dari tiga tahun saja, ia akan dikeluarkan secara tidak hormat dari ABRI sehingga karir militernya akan habis," tambah Kemal.

Dalam pandangan Kemal, proses penyelesaian kasus penculikan melalui pembentukan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) belum berjalan transparan sehingga citra ABRI yang terpuruk saat ini sulit dikembalikan. Menurutnya, dalam penyelesaian kasus penculikan, DKP harus mengikutsertakan pihak Komnas HAM dan LSM. Dengan demikian proses penyelesaian oleh DKP dapat terkesan dilaksanakan secara serius.

Diminta pendapatnya, mantan Danrem 072/Pamungkas Kolonel (Purn) Soemarto menjelaskan, istilah itu memang sudah ada sejak dulu. Namun BKO itu baru dilaksanakan belakangan ini saja. "Sewaktu saya jadi Danrem, belum pernah ada perintah BKO," jelas Soemarto, Danrem 072 pertama.

Dijelaskan, BKO tersebut dapat dilaksanakan untuk mengatasi suatu kejadian di suatu daerah, baik yang bersifat teritorial maupun tempur. Pimpinan ABRI dapat menerjunkan satuan dari tetiga angkatan dan Polri untuk pelaksanaan BKO itu. Pimpinan ABRI kemudian membentuk salah satu komandan dari kesatuan, untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas operasi. "Perintah itulah yang disebut Bawah Kendali Operasi," tambahnya.

* Bersambung hal 8 kol 7

BERAPA JAM ANDA TAHAN?
SAAT KRISMON SAATNYA KERJA KERAS, JANGAN SAMPAI ANDA KEKURANGAN VITAMIN
TINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH DENGAN
ENERVON-C
MENGAKTI MENGAKTIKAN DAYA TAHAN & STAMINA TUBUH

PENGUSAHA YOGYA SIAP TURUN KE JALAN

Sultan: Apa Maunya Pemerintah Pusat?

Kedaulatan Rakyat
14 Agustus 1988

Di mata Letjen TNI Yunus Yosfiah, mantan komandannya ketika bertugas di Timor Timur, Prabowo adalah sosok pribadi yang baik dan memiliki antu-siasme yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.
"Waktu itu Prabowo menjadi anak buah saya, ia masih bujangan. Pangkatnya Letnan Dua," kata Yunus, yang kini menjabat Menteri Penerangan itu belum lama ini mengomentari sosok Prabowo.
Menurut Yunus, Prabowo memiliki kepan-daian yang menonjol diban-ding rekan- rekan seangkatannya.
"Intelegensianya cukup tinggi," ujarnya.

| ***Letjen TNI Yunus Yosfiah**, Menteri Penerangan, tentang Prabowo, disalin dari tiga paragraf dalam laporan Media Indonesia ("Nasib Prabowo Dibahas Pekan Depan", 14 Agustus 1998)*

MEDIA INDONESIA

PEMBAWA SUARA RAKYAT

NO. 6681
TAHUN XXIX
12 HALAMAN

Nasib Prabowo Dibahas Pekan Depan

■ Subagyo:Temuan DKP Makin Maju

Jenderal TNI Subagyo HS

Prabowo Subianto

SUBAGYO

Media Indonesia
14 Agustus 1998

Setelah Prabowo dan anak buahnya diproses oleh korpsnya, bagaimana dengan para korban penculikan? Berikut laporan *Jawa Pos* (14 Agustus 1998).

Setelah tak menemui hasil, dengan didampingi Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), para keluarga korban penculikan menemui ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Keluarga korban yang mengadu ke kediaman Gus Dur di Ciganjur, antara lain orang tua Noval; orang tua Yani Afri; dan keluarga Herman Hendrawan, Hendra Hambali, Ismail, dan M. Yusuf. Tampak pula Faisol Reza dan Walujo Djati, dua aktivis yang diculik dan dibebaskan.

Said Alkatiri, orang tua Noval, mengakui mereka datang ke Gus Dur untuk meminta bantuan sebagai upaya bisa bertemu kembali dengan anggota keluarga yang diculik. Sejauh ini, keluarga korban sudah mengadu ke berbagai instansi militer dan lembaga pemerintah lain. Namun, tidak ada jawaban memuaskan dari pertemuan dengan para pemimpin institusi tersebut.

Mendengar aduan keluarga korban penculikan itu, Gus Dur tampaknya cukup larut dalam kesedihan. Apalagi, suasana yang semula hening itu berubah menjadi isak tangis yang tertahan.

> **"Saya sendiri sangat tergetar mendengar anak-anak terbaik kita disembunyikan orang atau dibuat tidak bisa bertemu kita. Harus diingat, semua itu dalam perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip kehidupan kita yang baik untuk rakyat semua. Tidak selayaknya mereka menjadi korban penculikan apalagi disembunyikan sekian lama."**

| ***K.H. Abdurrahman Wahid**, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU), dalam berita Jawa Pos ("Lagi, Keluarga Orang Hilang Mengadu ke Gus Dur" , 14 Agustus 1998)*

Jawa Pos
14 Agustus 1998

Lagi, Keluarga Orang Hilang Mengadu ke Gus Dur

Jakarta, JP.-

Meraja berbagai upaya mereka tak menemui hasil, keluarga para korban penculikan mengadu ke KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mereka hadir di rumah ketua umum PB NU itu didampingi tim Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).

Keluarga korban yang mengadu ke Gus Dur itu, antara lain, orang tua Noval, orang tua Yani Afri, dan keluarga Herman Hendrawan, Hendra Hambali, Ismail, dan M Yusuf. Mereka diantar Faisol Reza dan Walujo Jati yang pernah diculik. "Kami datang kemari untuk minta bantuan Gus Dur sebagai upaya kami agar bisa bertemu kembali dengan anak saya dan keluarga lain yang diculik," kata Said Al Katiri, orang tua Noval, sambil menahan isak tangisnya.

Menurut Said, sampai sejauh ini, keluarga korban penculikan sudah mengadu ke berbagai instansi militer dan lembaga pemerintah lain. Namun, tidak ada jawaban memuaskan dari pertemuan dengan para pimpinan institusi tersebut.

Mendengar pernyataan-pernyataan masing-masing keluarga dan orang tua korban, Gus Dur tampaknya cukup larut dalam kesedihan. Apalagi, suasana yang semula hening itu berubah menjadi isak tangis yang tertahan. "Saya sendiri sangat tergetar mendengar anak-anak terbaik kita disembunyikan orang atau dibuat tidak bisa bertemu dengan kita. Namun demikian, harus diingat, semua itu dalam perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip kehidupan kita yang baik untuk rakyat semua," ujarnya.

Menurut Gus Dur, yang saat itu menerima mereka di ruang tamu, tidak selayaknya mereka menjadi korban penculikan, apalagi disembunyikan sekian lama. (mdk)

14 AGUSTUS 1998

Siapa pun orangnya, kalau sudah dihadirkan ke hadapan DKP, dapat dipastikan telah ada pelanggaran terhadap Kode Etik Perwira. Dan setiap pelanggaran atas poin-poin kode tersebut, maka akan ada sanksi administratif terhadap perwira pelanggar. Termasuk dalam kasus kesalahan analisis BKO yang dilakukan Prabowo Subianto.

| ***Jenderal TNI Subagyo H.S.**, KASAD dan Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP), dalam berita di Kedaulatan Rakyat ("Ketua DKP Jenderal Tni Subagyo HS: Prabowo Direkomendasikan ke Mahmil", 15 Agustus 1998)*

KETUA DKP JENDERAL TNI SUBAGYO HS:

Prabowo Direkomendasikan ke Mahmil

JAKARTA (KR) - Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan, tugas DKP akan segera berakhir. Menyusul Letjen Prabowo Subianto Cs direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi administratif dan diproses melalui Mahkamah Militer (Mahmil).

Menurut Subagyo, siapa pun orangnya kalau sudah dihadirkan ke hadapan DKP, dapat dipastikan telah ada pelanggaran terhadap Kode Etik Perwira. Dan setiap pelanggaran atas poin-poin kode tersebut, jelas Subagyo, maka akan ada sanksi administratif terhadap perwira pelanggar. "Termasuk dalam kasus kesalahan analisis BKO yang dilakukan Prabowo Subianto," katanya kepada pers seusai salat Jumat (14/8) di Mabes TNI-AD.

Dalam beberapa sidang yang digelar DKP, jelas Subagyo HS, ternyata Prabowo telah mengakui bahwa ia salah melakukan analisis atas BKO. Menantu mantan Presiden Soeharto itu jelas Subagyo HS, telah menyatakan pula akan bertanggungjawab.

Yang terpenting, jelas Subagyo HS, pihak DKP sendiri hanya berkonsentrasi kepada bagaimana memberikan rekomendasi yang jujur dan apa adanya kepada Pangab. Soal apakah rekomendasi itu akan dijadikan sikap dan keputusan Pangab, jelas Subagyo, itu sudah bukan lagi wewenang DKP untuk mencampuri.

Dihubungi terpisah, Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Rudini mengatakan, mestinya sehari setelah turunnya BKO (Bawah Kendali Operasi), Pangab langsung menanyakan hasil analisisnya. Ini dalam kaitannya dengan kesalahan analisis BKO yang dilakukan Prabowo.

T: *Bagaimana anda menjelaskan soal istilah BKO yang telah menyebabkan Letjen TNI Prabowo salah menganalisis?*

J: ABRI itu punya unit dari bawah sampai ke atas. Kalau Pangdam punya wilayah, misalnya kacau, ia harus mengatasinya. Kalau kekacauan besar, dan pasukannya kurang, ia minta bantuan ke atas. Ke atas itu bisa bantuan pasukan, di pertempuran bisa bantuan tembakan. Kalau bantuan pasukan, atasannya Pangdam itu Pangab, lalu memerintahkan Kostrad, atau Kopassus, untuk mengirimkan satu batalyon. Bantuannya bisa bawah perintah (BP). Kalau BP, dipakai *nggak* tahu sampai kapan ia (Pangdam-red) harus mengurusi logistik. Yang diperintah itu hanya mengirim saja. BKO, bawah kendali operasi. Pasukan yang dikirim, dilengkapi dengan logistik itu untuk waktu tertentu. **(Edi)-f**

AMIEN RAIS DAN GUS DUR TAK HADIR

2 Tokoh Petisi 50 Dapat Mahaputra

JAKARTA (KR)- Presiden BJ Habibie dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-53 ini menyematkan tanda kehormatan Republik "Sebenarnya Amien Rais sudah menyatakan akan hadir dalam acara itu, tetapi hingga penyematan berlangsung, Ketua PP Muhammadiyah itu tidak hadir hidupan bernegara.

Sedangkan Gus Dur, tambah Akbar Tandjung, memang sudah memberi tahu tidak bisa datang karena alasan kese-

Kedaulatan Rakyat
15 Agustus 1998

Kenapa kesalahan analisis dalam perintah BKO bisa berlangsung lama. Mestinya sudah diketahui satu hari kalau ada kesalahan. Misalnya, pasukan ini ditempatkan di Irian Jaya untuk membebaskan sandera, ini harus dilaporkan setiap harinya misalnya, hasilnya apa, yang luka berapa.

| ***Jenderal TNI Rudini**, Mantan KASAD, dalam berita Pos Kota, sudah disarikan ("KASAD Subagyo: Prabowo Cs Bisa Dimahmilkan Tergantung Pangab", 15 Agustus 1998)*

38 Putera terbaik Indonesia dapat bintang anugerah
AMIEN RAIS DAN GUS DUR TIDAK HADIR
Inilah putera terbaik Indonesia
Kasad Subagyo: Prabowo Cs bisa dimahmilkan tergantung Pangab
Sejumlah cabang PDI sepakat PDI Soerjadi diubah jadi PNI
Jenderal-jenderal yang tersisih selama Soeharto berkuasa
SOLICHIN GP: DIINGATKAN TAPI TAK DIGUBRIS
POS KOTA
Utang untuk tambahan modal digasak
5 Rampok bertopeng satroni dealer mobil
Gubernur/wakil ada kuburan massal 60 Orang hilang di Aceh
15 Tokoh PDI Perjuangan datangi Mabes Polri
Habibie sebaiknya tak hadiri kongres
Perampok 100 kilogram emas batangan ditembak
Gubernur tinjau pengamanan swakarsa
Jakarta pagi hari sempat lengang
Jumlah pemohon meningkat 100 persen
Isu rusuh, mobil Jakarta dimutasi
Keluhan disampaikan ke Gubernur Suttiyoso
Nelayan dipungli di tengah laut
Diskotek di Puncak ditutup
Menyongsong HUT Kemerdekaan di Jakarta
Patung Proklamator RI dicuci
Gubernur agar segera menutup (6-habis)
NAH, INI DIA..!

Pos Kota
15 Agustus 1998

"Prabowo mengakui kesalahannya dan dia sudah menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkannya. Hal seperti itu adalah sikap keperwiraan dan setiap kesalahan memang harus dipertanggungjawabkan."

| ***Ketua Dewan Kehormatan Perwira,*** *KSAD Jenderal TNI Subagyo H.S., dalam berita Kedaulautan Rakyat (Mantan KSAD Kemungkinan Akan Diperiksa: Prabowo Mengaku Salah, 14 Agustus 1998)*

Kedaulatan Rakyat
14 Agustus 1998

tan Rakyat
ra Hati Nurani Rakyat

Harian Pagi
Terbit 8 Halaman
Eceran Rp 1.200

MANTAN KSAD KEMUNGKINAN AKAN DIPERIKSA

Prabowo Mengaku Salah

JAKARTA(KR) - Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui bersalah, karenanya ia siap bertanggungjawab. Pengakuan tersebut disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memeriksanya di Markas Besar TNI AD, Rabu (12/8). "Prabowo mengakui kesalahannya dan dia sudah menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkannya. Hal seperti itu adalah sikap keperwiraan dan setiap kesalahan memang harus dipertanggungjawabkan," kata Ketua DKP yang juga KSAD Jenderal TNI Subagyo HS.

Menurut Subagyo, bentuk kesalahan yang dilakukan Prabowo yakni kesalahan dalam menganalisis Bawah Kendali Operasi (BKO). Yang jelas, lanjut Subagyo, perintah BKO itu bukan datang dari Panglima Tertinggi ABRI (saat itu dijabat Presiden Soeharto) maupun Pangab (Saat itu Jenderal Feisal Tanjung).

Ketika wartawan mendesak dari siapa BKO itu diberikan, Subagyo belum bersedia menjawab. Meski demikian ia mengisyaratkan, bisa saja perintah itu atas inisiatif Prabowo sendiri. Atau, bisa pula perintah tersebut datang dari perwira yang lebih tinggi.

Seperti diketahui, perwira tinggi yang pangkatnya lebih tinggi dari Prabowo saat menjabat Danjen Kopassus diantaranya Jenderal R Hartono (saat itu Kasad), Letjen TNI Tarub (Kasum ABRI), dan Letjen TNI Wiranto (Pangkostrad). Namun Subagyo tetap tidak mau menjawab apakah salah satu diantara mereka memberi perintah BKO.

Ketika ditanyakan tentang kemungkinan pasukan Kopassus yang di-BKO-kan itu membawa misi tertentu dari yang memberikan perintah, Subagyo hanya menegaskan bahwa yang salah adalah Letjen TNI Prabowo Subianto. Kesalahannya adalah dalam pem-BKO-an yang semestinya dikeluarkan surat perintah. "Dengan demikian telah terjadi salah penganalisaan terhadap BKO," tambah Subagyo.

Menanggapi pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto belum lama ini yang mengatakan bahwa DKP bisa saja memeriksa perwira tinggi ABRI yang pangkatnya lebih tinggi daripada Letjen Prabowo, Ketua DKP menegaskan, setiap perwira ABRI yang salah atau ada keterkaitannya tentu harus bisa diperiksa.

"Pangab tidak salah, karena tidak mengeluarkan perintah itu," katanya seraya mengatakan kemungkinan mantan Kasad akan diperiksa, masih menunggu perkembangan. Dijelaskan pula, dalam sidang DKP, pemeriksaan berkisar pada masalah disiplin, prosedur, kejujuran, tabiat dan sikap keperwiraan terperiksa.

Keterangan Tambahan

Pemeriksaan terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Inf Chairawan berlangsung mulai pukul 09.00-11.30 WIB. Seperti sebelumnya, pemeriksaan berlangsung tertutup. Wartawan hanya melihat Letjen TNI Prabowo Subianto memasuki Mabes TNI AD pukul 08.25 WIB.

Tampak anggota DKP, seperti Letjen TNI S Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Jusuf Kertanegara, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Agum Gumelar, Laksdya TNI Achmad Sutjipto, dan Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi, memasuki ruang sidang dari pintu depan Mabes TNI AD.

Subagyo menegaskan, pemeriksaan kembali mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR sebagai hal yang biasa. "DKP ingin melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi keterangan yang sudah didapatkan dan hasilnya akan disampaikan kepada Pangab berupa saran atau rekomendasi," katanya seraya mengatakan kedua perwira tersebut diperiksa kembali karena DKP masih memerlukan keterangan tambahan.

* Bersambung hal 8 kol 6

KOMNAS HAM: USUT TUNTAS KASUS 27 JULI

2 Tokoh PDI Soerjadi Gabung Mega

SEMARANG (KR) - Dua tokoh PDI Jateng, Drs Suyanto dan Soetjipto Tjipto Soewignyo, Rabu (12/8) mengundurkan diri dari kepengurusan PDI Soerjadi untuk selanjutnya bergabung dengan Megawati. Sikap kedua kader 'banteng' ini diikuti beberapa pengurus di tingkat cabang, antara lain Yusak L Diyono SPd (Sekretaris DPC PDI Kodya Semarang). Suyanto dan Yusak menyatakan bergabung setelah dijemput di rumah masing-masing untuk dibawa ke Panti Marhaens yang menjadi markas DPD PDI Jateng.

Surat pernyataan mundur Soetjipto tersebut dibacakan salah seorang aktivis DPC PDI Pro-Mega Kabupaten Semarang di depan ratusan pengunjukrasa yang menuntut 'de jure' pemerintah pusat masih mengakui PDI hasil Kongres Medan pimpinan Soerjadi. Aksi berlangsung tiga jam dan diakhiri dengan konvoi keliling kota Semarang.

Setelah pengurus PDI Soerjadi di Jateng banyak yang mundur, Suratal HW, Ketua DPD PDI Pro-Mega mengatakan sesuai pesan Ketua Umum DPP PDI Megawati, tidak perlu mengutik-utik jabatan yang bersangkutan di DPR. "Yang penting PDI bersatu, silakan jabatan di Dewan dilanjutkan," tegas Suratal menirukan pesan Megawati. Sementara Suyanto mengatakan pasrah dengan keputusan apapun yang dijatuhkan DPP Megawati tentang statusnya sebagai anggota DPR RI.

Soetjipto yang juga ketua FPDI DPRD dari pihak mana pun kecuali dengan harapan PDI bersatu kembali.

Sedangkan upaya fungsionaris DPD PDI Perjuangan membujuk Suyanto dan Yusak agar bersedia bergabung memakan waktu sekitar dua jam, setelah melalui adu argumentasi. Semula Suyanto minta waktu semalam untuk berfikir tanpa disertai intervensi. Namun Suratal cs mengatakan harus saat ini, karena waktu berfikir sudah dua tahun sejak Megawati digulingkan.

Drama penjemputan Suyanto dan Yusak berlangsung mulus, karena kedua orang tersebut tidak melakukan perlawanan. "Saya tidak takut saat dijemput, karena saya mempunyai komitmen PDI harus distukan. Saya bersedia dijemput bukan

KOLOM · 9

ONH '99 Rp 27,3 Juta

PEMERINTAH menetapkan ongkos naik haji (ONH) 1999 sebesar Rp 27,373 juta atau sama dengan 2.737 dolar. Ini berarti melonjak 3 kali lipat dibanding ONH tahun lalu yang hanya sekitar Rp 9 juta. Demikian diputuskan dalam sidang kabinet terbatas bidang Kesra di Binagraha, Rabu (12/8). **(Mgn)-a**

Fadjri Segera Bebas

MAJALAH D&R, Rabu (12/8) mengharapkan kepada Deplu RI untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar

15 AGUSTUS 1998

"Dengan penuh kesadaran dalam rangka menjunjung tinggi amanah penghormatan dan pelaksanaan HAM, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga korban."

| ***Presiden B.J. Habibie**, dalam Pidato Kenegaraan di DPR, dikutip oleh Suara Pembaruan ("Presiden B.J Habibie Minta Maaf Alis Pelanggaran HAM", 16 Agustus 1998)*

Paradigma Era Lebih Menekankan Pendekatan Demokratis

Presiden BJ Habibie Minta Maaf Atas Pelanggaran HAM

Jakarta, 15 Agustus

Presiden BJ Habibie atas nama pemerintah menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di berbagai daerah pada masa lalu, yang dilakukan oleh oknum aparat dalam operasi menghadapi gerakan separatis.

"Saya yakin kita semua merasa prihatin terhadap terjadinya pelanggaran terhadap harkat dan martabat warga negara dan kemanusiaan tersebut. Dengan penuh kesadaran untuk menjunjung tinggi amanah penghormatan dan pelaksanaan HAM, saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga korban," kata Habibie.

Pernyataan maaf Presiden atas nama pemerintah itu diucapkan untuk pertama kalinya di depan sidang paripurna DPR, ketika menyampaikan pidato kenegaraannya yang pertama setelah Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden ke-3 RI, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu pagi (15/8). Sidang Paripurna itu dibuka oleh Ketua MPR/DPR Harmoko dan dihadiri juga a.l. oleh seluruh anggota Kabinet Reformasi Pembangunan, serta para duta besar negara-negara sahabat.

Sejak era reformasi dan kepemimpinan Habibie, banyak laporan mengenai pelanggaran HAM, khususnya di Timtim, Aceh, Irian Jaya, serta kerusuhan massal di Jakarta yang terjadi pada 13-14 Mei 1998.

Presiden menegaskan, saat ini pimpinan ABRI sedang melakukan penyelidikan yang seksama atas kejadiana tersebut. Oleh karena itu semua pihak, khususnya para pimpinan masyarakat dan pemuka agama, diajak untuk mendukung dan memberi kepercayaan serta kesempatan seluas-luasnya kepada ABRI dalam menjalankan kejadian tersebut dan menyelesaikannya secara hukum.

Pemerintah termasuk pimpinan ABRI telah menegaskan bahwa di masa depan kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Pemerintah telah bertekad menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai tolok ukur dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Kita akan melaksanakan promosi dan perlindungan HAM, sejalan dengan pendekatan demokrasi dan kesejahteraan yang kita tempuh," katanya.

Habibie mengingatkan bahwa pada akhir Juni lalu dilakukan pencanangan Program Aksi Nasional tentang HAM. Di dalam program Aksi Nasional itu komitmen nasional dikukuhkan bukan saja untuk meratifikasi dan mengaksesi instrumen-instrumen HAM di PBB, tetapi juga menjabarkannya ke dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian tahap keraguraguan secara konseptual yang selama ini menganggap HAM sebagai produk budaya yang berasal dari Barat, telah ditinggalkan.

Secara tegas kita menyatakan bahwa HAM adalah komitmen kita seluruhnya untuk menghormati harkat, martabat manusia terlepas dari agama, ras, etnik, warna kulit, jenis kelamin atau status sosialnya," katanya.

Tentu saja upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus diikuti dengan tanggung jawab semua pihak. Sesungguhnya tidak ada hak yang tidak disertai oleh tanggung jawab, Presiden menambahkan.

(Bersamb. ke hal. 11 kol. 1-2)

DIRGAHAYU
HUT REPUBLIK INDONESIA KE-53
Tiffani
PT. Mastertaxi Indonesia
Jl. Jogio Raya No. 45
Jakarta Barat
LAYANAN 24 JAM
Tel. 515 4545

Suara Pembaruan
16 Agustus 1998

Dalam kemelut penculikan ramai disebut operasi intelijen. Lalu muncul pertanyaan: apakah intelijen sebatas pengumpulan informasi, apa pun caranya, ataukah sampai ke persekusi terhadap siapa pun dengan mengabaikan etika, moral, dan hukum, sebagai bagian dari tugas rahasia dengan perlindungan dari negara?

Majalah *D&R* ("Jangan Dilihat Kopassusnya...", 15 Agustus 1998) mewawancarai Letkol (Purn.) Rudolf Edward Baringbing, S.H., yang pernah menjadi instruktur Prabowo Subianto di bidang intelijen. Baringbing dahulu bertugas di Pusat Pendidikan Intelijen ABRI, Bogor, Jawa Barat. Berikut nukilannya.

T: Apa sebetulnya yang disebut operasi intelijen itu?

J: Intelijen selamanya dilakukan untuk tujuan kepentingan negara. Itu harus digarisbawahi. Keberadaannya sah. Badan intelijen di negara mana pun ada. Kalau tidak ada, bisa bubar itu negara. Sebelum seseorang itu diberikan pendidikan intelijen, dia harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji. Salah satunya tidak boleh menyalahgunakan ilmu intelijen yang diterimanya. Seleksi juga diberlakukan. Kalau intelijen menyalahgunakan ilmunya, dia memeras juga bisa, mengkhianati negara juga bisa.

T: Operasi intelijen boleh melakukan pembunuhan dan penyiksaan?

J: Boleh. Yang penting untuk digarisbawahi: (itu) untuk kepentingan negara.

T: Sebagai perwira intelijen, nurani Anda pernah terganggu ketika harus melakukan hal-hal yang ilegal, seperti menyiksa atau bahkan membunuh?

J: Oh, tidak boleh. Ketika itu sudah menjadi pekerjaan kita, sebagaimana tercermin dalam sumpah kita, harus ditiadakan keraguan semacam itu. Kawan sendiri pun, misalnya yang gagal melakukan operasi intelijen, kalau perlu harus dibunuh. Bagi orang intelijen, jenis hukuman cuma ada dua: dikeluarkan dari badan intelijen atau dibunuh.

T: Tapi, kan, sekarang zamannya sudah berbeda, ada hak asasi manusia ...

J: Sampai kiamat, tugas intelijen ada dua: legal dan ilegal. Di negara mana pun itu ada. Tujuan operasional intelijen harus rahasia dan untuk kepentingan negara. Dalam pelaksanaannya, operasi intelijen ada tiga macam: terbuka, setengah terbuka atau setengah tertutup, dan tertutup. Yang terbuka misalnya tugas atase militer. Mereka legal. Kegiatan intelijen boleh terbuka, tapi orang tidak boleh tahu tujuannya. Yang setengah tertutup misalnya operasi intelijen yang dilakukan Grup 4 Kopassus. Dia bisa menggunakan satuan intel teritorial (komando daerah militer atau komando distrik militer), tapi dia sendiri tertutup, supaya tidak ketahuan siapa yang "mengambil".

T: Andai dalam kasus penculikan sekarang ini 14 orang yang masih hilang ditemukan sudah meninggal, bisakah itu dipermasalahkan oleh publik dan pihak keluarga?

J: Sepanjang itu dilakukan dalam konteks atau lingkup intelijen, tidak bisa. Tugas intelijen dalam bentuk kegiatan operasi tidak terjangkau hukum mana pun, baik dari hukum positif maupun pembuktian. Perbuatan intelijen, membunuh misalnya, kan untuk kepentingan negara. Ini dijamin oleh Pasal 50 dan 51 KUHP. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang tidak boleh dihukum, itu pasal 51 ayat 1. Tentara bertempur,

membunuh orang, kan tidak bisa dituntut. Itu dari segi hukum. Dari segi pembuktiannya, semua kegiatan intelijen disamarkan. Motonya: "Tak ada satu pun orang yang bisa dipercaya di dunia, termasuk istri sekalipun". Moto yang lain: "Kamu berhasil, tidak akan mendapat pujian. Kamu gagal, akan dicaci maki seluruh umat manusia. Kamu mati, mayatmu tidak akan dicari". Itu moto dan selalu kita pompakan itu.

T: Anda kan pernah menjadi instruktur intelijen Prabowo. Bagaimana penilaian Anda mengenai dia?

J: Dia dulu lulus nomor satu dalam pendidikan intelijen di tahun, kalau tak salah, 1981. Lama pendidikan enam bulan. Pangkatnya waktu itu masih kapten. Dia memang cerdas. Ini semacam kursus, misalnya kursus dasar intelijen, kursus psywar, ada kursus lain pula.

T: Seandainya terbukti Prabowo yang memberi komando penculikan, apakah masih bagian dari tugas utamanya?

J: Masih, masih. Saya masih berpegang pada teori. Sumpah dia tidak boleh menyalahgunakan ilmu yang dia terima.

T: Soal kesalahan prosedur atau "di luar batas kepatutan"?

J: Itu mengada-ada. Dilihat dari kacamata mana? Kalau dari kacamata intelijen, saya katakan operasi itu berhasil. Lalu, kenapa bisa terbuka seperti ini? Yang disalahkan itu yang membuka.

T: Apakah Dewan Kehormatan Perwira harus mengakomodasi kemungkinan Prabowo sekadar menjalankan tugas?

J: Itu harus diperhitungkan. Itu tugas negara, kok. Kalau dilihat secara objektif, apa gunanya buat Prabowo menangkap Pius dan yang lain-lain? ... Sebagai pengguna, dia (Panglima ABRI) punya akses sampai ke kamar sandi, sedangkan yang lain dilarang keras masuk. Bahkan, sampai menanyakan kunci pun boleh. Jadi, kalau dikatakan dia tidak tahu menahu, salah itu. Itu sudah prosedur intelijen.

D&R
15 Agustus 1998

LIPUTAN UTAMA

Rudolf Edward Baringbing, S.H.:
"Jangan Dilihat Kopassusnya..."

ADA YANG MELIHAT KASUS PENCULIKAN dari sisi lain: dari sisi intelijen. Itulah Letnan Kolonel (Purnawirawan) Rudolf Edward Baringbing, S.H., yang pernah menjadi instruktur Prabowo Subianto di bidang intelijen. Bagi mantan instruktur intelijen di Pusat Pendidikan Intelijen ABRI di Bogor, Jawa Barat, ini, tak sedikit pun Komando Pasukan Khusus (Kopassus) bersalah dalam kasus penculikan dan penganiayaan itu.

Tugas intelijen, kata orang yang lebih dari 20 tahun berada dalam dunia intelijen ABRI ini, memang seperti itu. Bila terjadi "kesalahan prosedur", tutur lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1968 ini, yang terberat kesalahannya bukan pelaksana, melainkan yang memberi perintah.

Jadi, pengusutan terhadap 10 bintara dan perwira Kopassus serta tiga perwira tingginya tak layak dilakukan? Bukan itu soalnya, tapi siapa dan kenapa kasus ini kok terbongkar, padahal ini tugas intelijen. Lalu, kata Baringbing—yang sempat meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan kini memimpin kantor konsultan hukum—yang diperlukan Indonesia adalah undang-undang intelijen.

Bagaimana sebenarnya guru Prabowo ketika masih kapten ini melihat upaya pengungkapan kasus itu, wartawan D&R **Rachmat H. Cahyono** mewawancarainya di kantornya di bilangan Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu, 7 Agustus.

Apa sebetulnya yang disebut operasi intelijen itu?

Intelijen selamanya dilakukan untuk tujuan kepentingan negara. Itu harus digarisbawahi. Keberadaannya sah. Badan intelijen di negara mana pun ada. Kalau tidak ada, bisa bubar itu negara. Sebelum seseorang diberikan pendidikan intelijen, dia harus terlebih dulu mengucapkan sumpah dan janji. Salah satunya: tidak boleh menyalahgunakan ilmu intelijen yang diterimanya. Seleksi juga diberlakukan. Kalau intelijen menyalahgunakan ilmunya, dia memeras juga bisa, mengkhianati negara juga bisa. Untuk tujuan tertentu, seperti kup pada pemerintah, bisa. Itu bahaya intelijen.

Ada kesan intelijen kita tidak dikembangkan secara serius, sampai ada istilah *intel Melayu*....

Biaya mencetak (tenaga) intelijen tidak murah. Lalu, peralatan kita masih sangat terbelakang dan intelijen tidak di bawah korps tersendiri, sehingga pembinaannya sangat sulit. Kalau dibuat korps intelijen, pembinaannya menjadi spesial. Ada adagium, kemampuan seorang intelijen sama dengan satu divisi. Tahun 1985 sudah diusulkan intelijen di bawah satu korps tersendiri, seperti Central Intelligence Agency, juga Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnoti. Sangat sulit pembinaan intelijen kalau tidak tersendiri, karena sifat dan ciri-ciri tugasnya berbeda sekali. Makanya, dalam kasus ini (penculikan aktivis) sekarang tercoreng nama ABRI keseluruhan karena susah membedakannya. (Kasus sekarang ini), tindakan penculikan itu salah atau tidak, kalau dilihat dari kacamata prajurit umum, ya, memang (salah). Harus dilihat, tugas intelijen itu ada legal, ada ilegal. Di negara mana pun itu begitu.

Maksudnya?

Misalnya, dalam teori mengenai tahap keempat kontraintelijen ada yang namanya negasi, artinya penggulungan. Ada penetralisasi, yaitu pengeliminasian kemampuan lawan. Dalam mengeliminasi bisa dengan penculikan, pembunuhan dengan berbagai cara, atau intimidasi dengan segala macam cara. Ketika kami mengajar teori, perbuatan yang ilegal, yang pasti melanggar hukum, melanggar hak

RILLY KESUMA
PROTES PENCULIKAN AKTIFIS. Diakui saja itu operasi intelijen.

D&R
15 Agustus 1998

Letjen TNI Agum Gumelar, Gubernur Lemhanas dan Anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP), adalah orang intelijen. *D&R* mewawancarai Agum, dalam edisi yang memuat Bangbing (15 Agustus 1998), seputar dunia intelijen dan kekerasan oleh tim culik Prabowo Subianto. Berikut isi wawancara tersebut.

T: Apakah model penculikan dan penganiayaan memang bagian dari tugas Kopassus?

J: Itu bisa ada melalui suatu proses yang sangat-sangat cermat terhadap apa yang disebut sebagai musuh negara; dan kriteria musuh negara itu jelas sekali. Dan, itu pun harus ditugaskan dalam suatu perintah yang betul-betul dari komando atas, tidak bisa kita melakukan itu sendiri-sendiri berdasarkan penilaian kita sendiri. Itu namanya urakan.

T: Seberapa jauh tanggung jawab seorang komandan dalam kasus ini?

J: Besar sekali: anak buah tahunya itu perintah. Sekarang tinggal dilihat, komandan ini mengeluarkan perintah ini dari mana datangnya. Kalau perintah itu dari atas, masih harus dilihat apakah perintahnya seperti

itu atau bagaimana bunyinya. Jadi, tidak bisa seorang komandan mengambil inisiatif untuk melakukannya.

T: Menurut Prabowo, operasi penculikan dilakukan terhadap mereka yang dianggap mengancam keselamatan negara. Apa kriteria ABRI tentang mengancam negara itu?

J: Yang mengancam bangsa dan negara adalah mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan fisik dengan kekuatan bersenjata. Katakanlah di Timor Timur itu ada kekuatan bersenjata, kemudian mereka melakukan kegiatan pengacauan terhadap masyarakat di sana sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan menghambat pembangunan. Maka, di situ dilakukan operasi yang bersifat militer karena ancamannya jelas.

T: Kalau para tersangka hanya menjalankan perintah, apakah mereka bisa terlepas dari semua tanggung jawab?

J: Perintah dari mana? Siapa itu yang melaksanakan perintah? Operasi seperti ini harus jelas, bagaimana bentuk perintahnya. Bentuk perintah itu harus tertulis.

Agum Gumelar:
"Perintah dari Mana?"

APA KATA SALAH SEORANG ANGGOTA DKP, Letnan Jenderal Agum Gumelar, mantan Komandan Kopassus di awal 1990-an? Berikut petikan wawancara **Rachmat H. Cahyono** dan **Tiarma Siboro** dari D&R dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional itu, pekan lalu.

Apakah model penculikan dan penganiayaan memang bagian dari tugas Kopassus?

Itu bisa ada melalui suatu proses yang sangat-sangat cermat terhadap apa yang disebut sebagai musuh negara; dan kriteria musuh negara itu jelas sekali. Dan, itu pun harus ditugaskan dalam suatu perintah yang betul-betul dari komando atas, tidak bisa kita melakukan itu sendiri-sendiri berdasarkan penilaian kita sendiri. Itu namanya urakan.

Seberapa jauh tanggung jawab seorang komandan dalam kasus ini?

Besar sekali; anak buah tahunya itu perintah. Sekarang tinggal dilihat, komandan ini mengeluarkan perintah ini dari mana datangnya. Kalau perintah itu dari atas, masih harus dilihat apakah perintahnya seperti itu atau bagaimana bunyinya. Jadi, tidak bisa seorang komandan mengambil inisiatif untuk melakukannya.

Menurut Prabowo, operasi penculikan dilakukan terhadap mereka yang dianggap mengancam keselamatan negara. Apa kriteria ABRI tentang yang mengancam negara itu?

Yang mengancam bangsa dan negara adalah mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan fisik dengan kekuatan bersenjata. Katakanlah, di Timor Timur itu ada kekuatan bersenjata, kemudian mereka melakukan kegiatan pengacauan terhadap masyarakat di sana sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan menghambat pembangunan. Maka, di situ dilakukan operasi yang bersifat militer karena ancamannya itu jelas.

Tampaknya, sejak terbukanya kasus penculikan ini, masyarakat semakin berani mengungkap kesalahan oknum Kopassus, misalnya di Aceh....

Begini, janganlah dikatakan itu kesalahan Kopassus; itu keliru. Kesalahan di daerah operasi bukan berarti semata-mata kesalahan Kopassus. Mungkin, itu kesalahan unsur pelaksana operasi yang di antaranya ada satuan Kopassus. Jadi, masyarakat jangan terlalu emosional, tergesa-gesa menuduh. ABRI tidak akan tinggal diam kalau memang (kesalahan) itu suatu kenyataan. Panglima ABRI bersama stafnya sedang melakukan konsolidasi ke dalam terhadap segala sesuatu yang selama ini dinilai kurang baik.

Begini, pada masa-masa lalu, keadaan kita memang seperti itu. Kondisi keamanan kita pada waktu itu memang seperti itu, banyak terjadi gangguan terhadap stabilitas keamanan. Diperlukan terapi seperti itu, ibarat orang sakit mungkin perlu tiga pil sehari. Kini, kondisi kita tidak seperti yang lalu, sudah sehat, mungkin, ya, hanya perlu satu pil sehari atau bahkan tidak perlu minum pil lagi.

Nah, kalau itu (operasi militer yang kini digugat) dilakukan pada saat sekarang ini, itu tidak boleh. Tapi, bahwa pada saat itu terjadi seperti itu, ini harus bisa dimengerti, jangan kemudian masa-masa seperti itu diungkit-ungkit lagi. Kalau itu dilakukan sekarang ini, inilah yang salah.

Kalau para tersangka hanya menjalankan perintah, apakah mereka bisa terlepas dari semua tanggung jawab?

Perintah dari mana? Siapa itu yang melaksanakan perintah? Operasi seperti ini harus jelas, bagaimana bentuk perintahnya. Bentuk perintah harus tertulis.

Jadi, tidak tertutup kemungkinan DKP bisa memeriksa sampai ke tingkat yang lebih atas?

Kalau memang ada yang kasih perintah, ya, kami juga bisa menelusuri siapa yang memberi perintah. Tetapi, sampai saat sekarang ini kami tidak menemukan itu ada perintah dari atas.

Apakah kasus ini bisa mengakhiri karir militer Prabowo juga?

Itu tergantung keputusan pimpinan. ✦

D&R, 15 Agustus 1998 17

D&R
15 Agustus 1998

17 AGUSTUS 1998

Ada Kehormatan Sebelum Meja Hijau

Ummat
17 Agustus 1998

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dibentuk dalam rangka membatasi pemeriksaan agar tidak menyeret orang-orang tertentu di level perwira tinggi. Ini perlakuan diskriminatif, ada warga negara "kelas satu" yang terbebas dari ancaman hukuman, yakni perwira tinggi.

Penculikan dan penyekapan aktivis adalah kesalahan ABRI secara institusional. Penculikan ini disebabkan kemauan yang sangat luar biasa dari pemerintah untuk mengontrol politik rakyat sehingga aktivis yang kritis terhadap negara diawasi betul.

> **"Penculikan ini disebabkan kemauan yang sangat luar biasa dari pemerintah untuk mengontrol politik rakyat, sehingga aktivis yang kritis terhadap negara diawasi betul [...] Tak mungkin mayor-mayor itu berinisiatif sendiri melakukan penculikan. Ini tidak lain dari suatu kebijakan politik represif terhadap kehidupan masyarakat sipil."**

| ***Munir**, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), dalam berita Ummat ("Ada Kehormatan Sebelum Meja Hijau", 17 Agustus 1998)*

PENGUMUMAN DKP. *Masih pola lama*

19 AGUSTUS 1998

Kontras meminta Puspom ABRI menempatkan institusinya sebagai lembaga penyidik serta menjalankan fungsinya untuk terus melakukan pengusutan terhadap beberapa perwira militer yang terlibat dalam kasus penculikan sesuai hukum yang berlaku.

Kontras mengusulkan seperti itu agar keberadaan Puspom tidak dihambat oleh keputusan-keputusan politik pemerintah dan ABRI. Menyadari hal itu pula, Kontras mengirimkan surat kepada Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal.

Selain itu, Kontras juga meminta kepada Puspom ABRI untuk segera memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan beberapa perwira militer lainnya yang menjadi tersangka dalam kasus penculikan. Hasilnya, Puspom harus mengumumkan kepada masyarakat tentang nasib 14 korban penculikan yang hingga kini belum jelas.

> **"Sampai saat ini pihak Puspom belum juga melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang telah kami rekomendasi dalam pertemuan."**

| ***Munir**, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), dalam berita Kedaulatan Rakyat ("Kontras Desak Puspom ABRI Mengusut: DKP Rapat Tertutup Soal Prabowo Cs", 16 Agustus 1998)*

Kedaulatan Rakyat
16 Agustus 1998

KONTRAS DESAK PUSPOM ABRI MENGUSUT

DKP Rapat Tertutup Soal Prabowo Cs

JAKARTA (KR) - Rapat internal Dewan Kehormatan Perwira (DKP) berlangsung Rabu (19/8) pukul 13.00-15.45 dan seluruh personil DKP terlihat Sutjipto (Danjen Akabri), dan Letjen TNI Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam).

Begitu rapat internal itu selesai, anggota DKP langsung me-

mengumumkan kepada masyarakat tentang nasib 14 korban penculikan yang hingga kini belum jelas.

"Sampai saat ini pihak Pus-

20 AGUSTUS 1998

Pengambilan sikap ABRI yang hanya memberikan sanksi administrasi tidak searah dengan komitmennya mengusut tuntas kasus penculikan para aktivis. ABRI justru mengedepankan strategi defensif dengan melindungi secara kasar perilaku dan pelaku kekerasan (penculikan) dari bentuk-bentuk pertanggungjawaban. Sikap ini jadi penghalang untuk terjadinya proses hukum di mahkamah militer.

| ***Munir**, Koordinator Kontras, dalam berita Pos Kota yang telah disarikan ("Kontras Minta Prabowo Dimahmilkan", 25 Agustus 1998")*

"Tiadanya kemungkinan ketiga perwira

Pos Kota
25 Agustus 1998

san diambil demi per

JEN PRABOW

JAKARTA (Pos Kota) - Karirnya begitu cepat melesat, bagaikan bintang meteor. Sepertinya tidak ada yang berani menyangkal bahwa dia akan memegang pucuk pimpinan ABRI. Namun seperti kata pepatah, sepandai tupai melompat sekali waktu akan pernah jatuh. ke hal 4 kol. 1

Komentar dibebastugaskannya Letjen Prabowo

Seharusnya dibawa ke Mahmil

JAKARTA (Pos Kota) - "Hanya pengadilanlah yang menentukan bersalah atau tidaknya Letjen TNI Prabowo Subianto dalam menganalisis perintah atasannya. Besar kemungkinan oknum pejabat lain juga ada yang terlibat."
Demikian kometar Indria Samego, hal 3 kol. 5

Kontras minta Prabowo Cs dimahmilkan

Prabowo tak mau jadi wakil

RISING STAR, sebuah julukan manis buat mantan Danjen Kopassus Jenderal TNI Prabowo Subianto. Sebab dalam karir militernya, ia dinilai terlalu cepat meraih tiga bintang dibanding teman seangkatannya sewaktu menjadi taruna AKABRI di Magelang. Uniknya lagi, selama karirnya di ABRI, Prabowo selalu menjadi ke hal 2 kol. 7

JAKARTA (Pos Kota) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kecewa atas putusan Menhankam/Pangab Jenderal ke hal 5 kol. 5

Massa Mega ber

Bentrok

> **untuk diajukan ke pengadilan militer mempertegas kehendak abri untuk mengunci kasus ini lewat hasil yang tidak transparan."**

*| **Hendardi**, Ketua Badan Pengurus PBHI, dalam berita Pos Kota (Kontras Minta Prabowo Dimahmilkan", 25 Agustus 1998")*

Pos Kota
25 Agustus 1998

KONTRAS MINTA PRABOWO .....(Sambungan dari hal. 1)

TNI Wiranto yang hanya memberikan sanksi administratif kepada Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol TNI Chairawan.

Putusan itu dinilai Kontras belum memenuhi tuntutan rasa keadilan, sebab itu pihaknya mendesak agar ke tiganya tetap diproses sesuai hukum (di Mahmilkan). Demikian Kordinator KontraS Munir yang didampingi Dewan Penasehat KontraS Mulyana W Kusumah dan M.M. Billah kemarin kepada wartawan.

Sementara pengacara Alamsyah Hanafiah dan Gayus Lumbuun berpendapat meskipun telah mendapatkan sanksi administratif ke tiga perwira ABRI tersebut tetap harus diproses ke Pengadilan Militer karena sanksi tersebut tidak menghapuskan alasan pidananya.

Menurut Munir, pengambilan sikap ABRI yang hanya memberikan sanksi administrasi tersebut tidak searah dengan komitmennya yaitu akan mengusut tuntas kasus penculikan para aktivis. ABRI justru mengedepankan strategi defensif dengan melindungi secara kasar perilaku dan pelaku kekerasan (penculikan) dari bentuk-bentuk pertanggungjawaban. "Sikap ini justru jadi penghalang untuk terjadinya proses hukum di Mahkamah Militer," tegas Munir.

Selain itu sikap tersebut tidak menunjukkan adanya kemauan untuk mengoreksi secara substansial dan institusional terhadap kebijakan represif termasuk tindakan penculikan.

Atas dasar tersebut KontraS mendesak PUSPOM ABRI segera menjalankan fungsinya sebagai institusi penyidikan yang wajib memeriksa ke dua pati dan seorang pamen ABRI tersebut sebagai tersangka. Panglima ABRI harus tidak menghalangi proses penegakan hukum dalam menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan awal dan mendesak agar Pangab segera melepaskan korban penculikan yang sampai saat ini belum kembali.

Sementara itu ketua Badan Pengurus PBHI, Hendardi berpendapat sanksi yang dijatuhkan Menhankam/Pangab cukup berat namun hal itu belum dapat menjangkau penyelidikan atas latar belakang politik maupun pemberi tugas dalam kasus penculikan para aktivis.

"Tiadanya kemungkinan ketiga perwira untuk diajukan ke Pengadilan Militer mempertegas kehendak ABRI untuk mengunci kasus ini lewat hasil yang tidak transparan," tegas Hendardi.

Tanpa adanya pengungkapan motif politik maupun siapa pemberi tugas penculikan maka dapat diduga persolan hilangnya 14 aktivis menjadi kabur dan sukar dilacak keberadaannya.

Terbukti bersalah

Meskipun sanksi terhadap Prabowo dinilai cukup berat, namun menurut Alamsyah Hanafiah, SH, dan Drs. T. Gayus Lumbuun, SH, MH yang dihubungi secara terpisah menyatakan, tetap harus ditindak- lanjuti sampai ke Pengadilan Militer.

Sanksi terhadap Prabowo menjadi orang sipil, tidak menghalangi dirinya untuk diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Militer. "Karena hukum tidak mengenal istilah berlaku surut," jelas Alamsyah.

Ditambahkan Gayus, sanksi Pangab/Menhankam terhadap Prabowo menunjukkan menantu mantan Presiden Soeharto itu jelas melanggar disiplin militer. "Karena tindakan kriminalnya dilakukan saat masih menjabat di ABRI, maka kasusnya harus sampai di Pengadilan Militer," jelas Gayus. Karena sanksi sekarang ini sifatnya moral dan administrasi karena melanggar disiplin militer.

Alamsyah dan Gayus sependapat, sanksi dari Pangab/Menhankam terhadap Prabowo tidak akan menghapus perbuatan pidananya. "Pimpinan ABRI tersebut harus tegas untuk menghindari pro dan kontra di tubuh ABRI," tegas Alamsyah. (ta/ahi/yo/gs/27)

unggulkan tuan rumah leg setengah. Meski demikian petaruh nampaknya yakin tuan rumah akan mamapu membuat gol lagi.

Hal itu terbukti dengan gol kedua yang dibuat Charles pada menit ke 52 sehingga Villa unggul 2-0. Wajarnya pasar taruhan akan berubah mengunggulkan bawah. Namun hal itu tidak terjadi karena The Boro nampak tidak memiliki ketajaman.

Tenaga The Boro baru terlihat ketika dua stiker murni mereka Beck (menggantikan Gazza) dan Ricard (gantikan Moore) masuk pada menit ke 59. Beck pun langsung membuat kejutan dengan kepalanya mengha-silkan gol untuk memperkecil kekalahan 2-1.

Ricard juga nyaris membuat dua gol ketika tinggal berhadapan dengan Bosnich yang berada di bawah mistar gawang Villa. Kalau itu terjadi dapat dipastikan petaruh bawah yang main bertahan akan menang berlapis.

Thompson yang sempat gagal melakukan eksekusi pinalti akhirnya menebus dosa melalui tendangan bebas. Gol Thompson pada menit ke 78 membuat skor menjadi 3-1 dan itu membuat petaruh atas yang memegang Villa menang berlapis.

"Mereka yang jeli melihat jalannya pertandingan pasti beralih main atas. Sepanjang babak pertama permainan dikuasai Villa. Boro sempat melakukan penekanan namun akhirnya tidak mampu menyelesai-kannya dengan baik," ujar peminat sepak bola. (kamhas).

PARABOLA/INDOVISION
KOMPUTER
WARTEL
** RUMAH DIJUAL CEPAT (BU) **
DICARI EKSPORTIR JAHE (PEMBELI)
LOWONGAN
KOLEKSI
BUKU SOEKARNO
JUAL CEPAT
LOWONGAN
RMH. TNH. VILLA DLL
WARTEL/TUT
DIBUTUHKAN MONTIR BERPENGALAMAN
PINJAMAN TANPA BUNGA
JULIANA JAYA TELP. 4609245
KURSUS MONTIR RADIO/TV
JAKARTA-SUNGAI PENUH-PADANG
AHLI TV P. PARABOLA
RUMAH DIJUAL
DIJUAL CEPAT BUTUH UANG
DIJUAL RUMAH CEPAT (BU)
DIJUAL BUKU
BOGOR GAN DEPOK
LANGSUNG DISALURKAN

24 AGUSTUS 1998

Dalam usia 46, Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira. Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan keputusan itu di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat.

Prabowo dipecat, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan sudah dibebastugaskan dari semua jabatan tugas struktural di ABRI, tetapi nasib 14 korban lain penculikan belum diketahui keberadaannya.

Dengan keputusan ini, Prabowo Subianto resmi menjadi warga negara biasa. Prabowo dipensiunkan. Sanksi terhadap ketiga perwira Kopassus merupakan sanksi administratif dan bukan tindakan hukum sesuai UU Pidana Militer.

> **"Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu."**
>
> | ***Jenderal TNI Wiranto**, Menhankam/Pangab, dalam berita Kompas ("Prabowo Diberhentikan", 25 Agustus 1998)*

Kompas ▶
25 Agustus 1998

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I

HARIAN UNTUK UMUM

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

SELASA, 25 AGUSTUS 1998 — HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN — NO. 057 TAHUN KE-34

KOMPAS HARI INI

...SULIT dimengerti, bila tiba-tiba seorang pemimpin menjadi pelupa. Yang tidak diingat adalah nama para pembantu, dan sejumlah pejabat. Itulah yang kini terjadi dengan Pangeran Charles (49) yang sejak ditinggal istrinya, Lady Diana (almarhumah), sering menjadi lupa. 16

IFC Incar Bank Swasta

Jakarta, Kompas

IFC (International Financial Corporation) yang merupakan afiliasi Bank Dunia sudah mengincar saham sejumlah bank swasta Indonesia. Hal itu seiring dengan peran IFC yang digariskan Bank Dunia dalam mendorong kegiatan sektor swasta, termasuk di sektor keuangan.

Demikian Direktur IFC untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara, Rashad Kaldany kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/8). IFC adalah afiliasi Bank Dunia yang dikhususkan berperan dalam pengembangan sektor swasta di berbagai negara, mengimbangi peran Bank Dunia yang fokusnya lebih banyak berurusan dengan sektor pemerintahan.

Kaldany tak menyebutkan bank mana saja yang diminati. "Yang jelas kita tidak mengambil alih semua saham bank swasta, meski kami memang punya rencana melakukan investasi di beberapa bank swasta," ujarnya.

Seiring dengan itu, pemerintah kini makin membuka peluang bagi IFC dan investor asing lainnya untuk memiliki bank-bank di Indonesia. Di dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan — yang disampaikan Menkeu Bambang Subianto kepada Wakil Ketua DPR/MPR Abdul Gafur pada hari yang sama — tercakup pasal yang menyangkut peluang itu.

RUU itu menyangkut peluang bagi badan hukum asing dan warga negara asing (WNA) untuk mendirikan bank umum di Indonesia, dengan bermitrakan WNI atau badan hukum Indonesia. Hal itu juga bertujuan mempercepat restrukturisasi perbankan, terutama dalam penyuntikan modal bank.

RUU itu juga membuka kesempatan bagi pihak asing membeli saham bank melalui bursa saham, maupun melalui transaksi langsung dengan pemilik bank di Indonesia. Juga tidak ada lagi pembatasan persentase kepemilikan asing pada bank.

Menkeu juga mengatakan, kini wewenang pemberian izin pendirian bank — semula merupakan wewenang Menkeu — dialihkan ke Bank Indonesia. Hal itu dilakukan agar terdapat keutuhan serta kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam

(Bersambung ke hlm 11 kol 7-9)

Tak Ada Jalan Pintas bagi Pemulihan Ekonomi

KEPUTUSAN PANGLIMA ABRI — Di hadapan puluhan wartawan di Dephankam, Jakarta, Senin (24/8), Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, yang antara lain didampingi Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, mengumumkan sanksi administratif bagi Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel (Inf) Chairawan.

Prabowo Diberhentikan

* Muchdi dan Chairawan Bebas Tugas

KANDASNYA "SANG BINTANG"

Nama : Prabowo Subianto
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951
Pangkat terakhir : Letnan Jenderal TNI

Pendidikan
- Akademi Militer (Akabri) (1974)
- Pendidikan Perang Khusus di Amerika Serikat
- Latihan Khusus Anti-teroris di Jerman Barat

Pengalaman kerja:
- Anggota Korps Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha)
- Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus
- Komandan Batalyon (Danyon) 328 Kujang II/Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad)
- Kepala Staf (Kasbri) Brigade Infanteri Lintas Udara (Brigif Linud) 17/Kostrad
- Komandan Grup III Grup 3/Pusat Pendidikan Kopassus Batujajar, Bandung (Bandung 1993-Oktober 1994)
- Wakil Komandan Kopassus (Oktober 1994-November 1995)
- Komandan Kopassus (Desember 1995-24 Juni 1996)
- Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus (25 Juni 1996-19 Januari 1998)
- Panglima Kostrad (20 Januari 1998-22 Mei 1998)
- Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI (Dansesko ABRI), sejak tanggal 28 Mei 1998 hingga dinonaktifkan akhir Juli 1998
- Diperiksa DKP tanggal 3-21 Agustus 1998
- Diberhentikan 24 Agustus 1998

Jakarta, Kompas

Letjen TNI Prabowo Subianto (46) diberhentikan dari dinas kemiliteran. Keputusan itu diumumkan Menteri Pertahanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI Jakarta, Senin (24/8), setelah mempelajari masukan dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Selain memberhentikan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto, Jenderal Wiranto juga membebaskan mantan Danjen Kopassus (28 Maret 1996-22 Mei 1998) Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono (49) dan mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan, dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI.

Menurut Jenderal Wiranto, tidak tertutup kemungkinan bagi ketiga perwira itu untuk diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil).

Di hadapan wartawan dalam dan luar negeri di Markas Besar (Mabes) ABRI Jakarta, kemarin, Wiranto mengemukakan, "Keputusan ini saya ambil tanpa tekanan dari siapa pun ataupun dari pihak mana pun. Jangan sampai nanti ada spekulasi bahwa saya mengambil keputusan ini karena ada tekanan dari sana-sini. Tidak ada itu."

Dalam acara jumpa pers itu, Wiranto menolak melakukan tanya-jawab seputar keputusannya itu, termasuk soal nasib 14 aktivis korban penculikan lainnya yang belum diketahui keberadaannya.

Namun, ketika wartawan mencegatnya di halaman samping gedung pertemuan, Wiranto sempat menjawab bahwa dengan diakhirinya masa dinas, berarti Prabowo sudah menjadi sipil. "Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu," kata Wiranto.

Sedangkan Mayjen TNI Muchdi dan Kolonel Chairawan, menurut Wiranto, keduanya masih aktif sebagai perwira ABRI. "Muchdi dan Chairawan masih tetap berdinas di ABRI tetapi tidak diberi jabatan," kata Wiranto sambil menambahkan bahwa kemungkinan mengajukan ke Mahmil tetap terbuka.

Selesai membacakan keputusannya, Wiranto dan para anggota DKP langsung meninggalkan ruangan pertemuan lewat pintu belakang. Tidak dijelaskan alasan yang jelas serta kesalahan ketiga perwira Kopassus ini sehingga diberhentikan dan dinonaktifkan dari ABRI.

Saat mengumumkan tindakan administratif terhadap ketiga perwira Kopassus sehubungan dengan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis pro-demokrasi itu, Wiranto didampingi antara lain Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, KSAU Marsdya TNI Hanafie Hasnan dan seluruh anggota DKP.

Cendana dijaga ketat

Menyusul pengumuman Panglima ABRI itu, penjagaan keamanan di sekitar Jalan Cendana, Jakarta Pusat, menjadi

(Bersambung ke hlm 11 kol 4-7)

Sakit Kepala?
NGGAK USAH NGALOR-NGIDUL
Cari BIOGESIC Segera!
BIOGESIC

Seharusnya Langsung ke Mahmil

Jakarta, Kompas

Desmond J Mahesa - salah seorang korban penculikan - merasa heran dengan keputusan Panglima ABRI. Ia malah menduga, jangan-jangan ada kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa disentuh publik. Buktinya, ketiga perwira tinggi itu tidak langsung dibawa ke Mahkamah Militer (Mahmil).

"Sebagai korban, saya melihat *kok* bisa begini? Kita sulit *dong* untuk maju karena kesalahan masa lalu ditutupi untuk kepentingan kelompok. Seharusnya, ketiga perwira tinggi itu langsung dibawa ke Mahmil. Institusi ABRI sempat terpuruk 'kan karena tidak adanya keterbukaan dan kejujuran," tegasnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).

"Kita mungkin terlalu banyak berharap selama ini akan adanya kejujuran. Makanya, ke depan jangan berharap terlalu banyak," ujar Desmond lagi dengan nada pesimis, ketika ditanya tanggapannya tentang keputusan Panglima ABRI.

Nada pesimis juga terlontar dari ayah kandung Petrus Bimo Anugerah, DT Utomo Rahardjo, yang sampai saat ini terus berharap ada kepastian mengenai nasib anaknya yang telah hilang sejak akhir Maret lalu. Ia mengaku tidak terlalu emosional mendengar putusan Panglima ABRI itu. Namun Utomo makin tidak terlalu percaya terhadap hukum.

"Kita mengharapkan kepastiannya. Yang penting buat kami bukan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) atau apa pun. Yang penting, soal nasib anak saya dan yang senasib itu dijawab," tuturnya.

Sebab itu, Utomo menyatakan akan terus mempertanyakan hal itu kepada Panglima ABRI dan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI. "Mohonlah

(Bersambung ke hlm 11 kol 4-6)

Kongres PDI
Dibayangi Aksi Protes

Palu, Kompas

Ratusan massa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pendukung Megawati, yang datang dari berbagai daerah, Senin (24/8), mendatangi Asrama Haji Sulteng, tempat Kongres V PDI dipusatkan. Mereka meneriakkan yel-yel penolakan terhadap pelaksanaan kongres, dan mendesak agar Ketua Umum DPP PDI Soerjadi yang tiba di Palu hari Minggu malam, segera meninggalkan daerah itu.

Menanggapi kemungkinan adanya pihak yang hendak mengancam dan menggagalkan kongres dengan cara kekerasan, Soerjadi menyatakan, ia takkan melayani ancaman itu. "Itu urusan aparat keamanan. Kami tidak akan melayani segala bentuk kekerasan," ujarnya kepada wartawan.

Sepanjang pagi hingga Senin sore, suasana Kota Palu tampak lebih sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Suasana sepi dan mencekam sangat terasa di pusat pertokoan Palu Plaza di Jalan Sis Aljufri, dan pertokoan Hasanuddin di Jalan Sultan Hasanuddin. Sebagian toko tutup, dan selebihnya masih membuka sebagian pintunya. Hal serupa terjadi di Jl Gadjah Mada, Jl Imam Bonjol dan Jl Wahidin.

Sejumlah pemilik toko mengaku was-was dengan pelaksanaan kongres, meski tetap yakin petugas keamanan bisa mengatasi jika terjadi kerusuhan antara pendukung Soerjadi dengan pendukung Megawati.

Aksi jalan kaki

Massa pro-Megawati melakukan aksi jalan kaki enam kilometer dari Kampus Bumi Nyiur Universitas Tadulako menuju lokasi kongres. Dalam perjalanan beberapa kali mereka diblokir personel

(Bersambung ke hlm 11 kol 4-6)

Di Balik Kongres V PDI
Fenomena Megawati

Kisah dari Aceh
Nasib Idris dan "Cuak"

Selama DOM (1989-1998) di Aceh
Sebanyak 781 Orang Tewas, 163 Hilang

Jakarta, Kompas

Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dikirim ke Aceh dalam jumpa pers di Jakarta mengumumkan, korban tewas (tindak kekerasan selama penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989-1998 di Aceh tercatat 781 orang. Jumlah kuburan massal korban DOM yang sudah bisa dipastikan sebanyak sembilan tempat. Sedang korban orang hilang 163 orang, korban penganiayaan 368 orang, dan korban perkosaan 102 orang.

Demikian Sekjen Komnas HAM yang sekaligus juga ketua Tim Aceh Komnas HAM, Baharuddin Lopa, Senin (24/8), di Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komnas HAM, yaitu Koesparmono Irsan, Soegiri, M Salim, serta Bambang W Soeharto.

"Ini baru merupakan hasil pemantauan Tim Komnas HAM ke Aceh, jadi belum resmi merupakan pernyataan Komnas HAM. Sewaktu-waktu ada data baru ditemukan, maka data itu akan melengkapi data yang sudah ada sekarang," jelas Lopa.

EKSES DOM DI ACEH

1. Meninggal akibat tindak kekerasan	781 orang
2. Hilang (belum ada berita sampai sekarang)	163 orang
3. Dianiaya	368 orang
4. Pemerkosaan	102 orang
5. Janda akibat suami terbunuh atau hilang	3.000 orang
6. Anak yatim akibat peristiwa Aceh	15.000-20.000 orang
7. Bangunan dibakar	102 bangunan

Sumber: Hasil Pemantauan Tim Aceh, Komnas HAM

Sekaligus pembongkaran

Selama tiga hari di Aceh, menurut Lopa, tim menyaksikan pembongkaran kuburan massal di Kuala Tari, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Di sana ditemukan dua mayat. Di halaman rumah gedong (tempat penahanan dan penganiayaan) di Bili Arong, Gelumpang Tiga, Pidie, ditemukan dua mayat yang dikubur dalam satu lubang. Di Daya Tumana, Trieng Gadeng, Pidie, diangkat satu mayat dari lima mayat yang dikubur secara berurutan. Lokasi lainnya di Alue Bukit, Lhoksukon, Aceh Utara, di halaman bekas posko aparat keamanan ditemukan satu mayat.

Di Bukit Sentang, Lhoksukon, Aceh Utara, dari satu lubang ditemukan 12 jenazah

(Bersambung ke hlm 11 kol 7-9)

BERNAS

Basofi Demam Berdarah

Ribuan Massa Mega Labrak Lokasi Kongres

Dihadang Pasukan Perintis

Saksi Mata Supersemar Buka Rahasia

Bung Karno Ditodong Saat Teken SP 11 Maret

Prabowo Dipecat, Akui Culik 9 Aktivis

Prabowo Diduga Punya Kartu Truf

Kontras: Konsistensi ABRI Diragukan

Koalisi PAN Dianggap Janggal

Hikam: Cocok untuk Target Jangka Panjang

Bebas BICARA

Syukur, Aceh Bebas DOM

amanan Ketat Warnai Pelantikan Mardiyanto

Kata Syarwan Pemilihan, Dirjen Bilang Tidak

Hari Ini DPRD DIY Desak Pusat Kukuhkan Sultan HB X

oom Tak akan Memaksa Edy

Sengatan

Bernas
25 Agustus 1998

25 AUG 1998

PT Bina Media Tenggara
publishes this daily newspaper
under license no. 376/SK/MenpenRI/SIUPP/A.6/1986
dt. 4th October 1986

RAYMOND TOBIJAN, General Manager
SUSANTO PUDJOMARTONO, Editor
VINCENT LINGGA and
ENDY M. BAYUNI, Managing Editors
Editorial & General Dept.:
Jl. Palmerah Selatan 15, Jakarta 10270
P.O. Box 53 Palmerah Jakarta 11001
Phone: 5483008 ext. 4106 & 4101
Hunting system
5359408 (4 lines) 5359478 (4 lines)
5360870 (5 lines)
Fax. 5492385

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

C. JOESOEBAKSMA, Business Manager & Head of Circulation Department
CHRISTIAN TAUL Head of Advertising Dept.
Advertising & Subscription
Gedung BUMIDA FL 4, Jl. Gajahmada 119 Jakarta 11140
Ph: 5681777 (hunt), 5681234, 5651555 ext. 1275
Fax: 5681122, 5681171, Telex: 46320 BUMIDA IA
Rates (Domestic): Rp 30,000—month for Indonesia area
By aeropostmail: Rp 38,000—month for Indonesia area
SINGLE COPY PRICE (INDONESIA) Rp 1,000.
All payments in advance.
Advertisement rates (excl. tax)
Classified (B/W only):
Line Rp 7,150—/line (min. 2 line)
Display: B/W Rp 7,150—/col mm (min. 2 col x 100 mm)
Color Rp 9,900—/col mm
All payments in advance:
Bankers: BNI 1946, Jakarta Kota, Acc. 100888.003
Giro Pos A. 11764

The Jakarta Post

The journal of Indonesia today

VOL. 16 NO. 119 SIXTEEN PAGES TUESDAY, AUGUST 25, 1998

Prabowo discharged from ABRI

JAKARTA (JP): The Armed Forces (ABRI) honorably discharged Lt. Gen. Prabowo Subianto yesterday and removed two senior Army Special Force (Kopassus) officers from active duty as punishment for their role in the abductions and torture of political activists.

The Armed Forces also renamed Prabowo, a son-in-law of former president Soeharto, was entitled to his pension, but said he could face a military tribunal in the future if more damning evidence of his involvement in the kidnappings is found.

The decision, issued on the recommendation of the Officers Honor Council probing the abductions, was announced by Minister of Defense and Security/ABRI Commander Gen. Wiranto before dozens of local and foreign journalists at the Armed Forces' Merdeka Barat headquarters in Central Jakarta.

"My decision regarding Lt. Gen. Prabowo is to end his active service with the Armed Forces," Wiranto said.

Prabowo is not included in any ABRI structures anymore. He is a civilian now."

Prabowo, a 1974 graduate of the Armed Forces Academy, was considered one of the military's rising stars. He was the first among his classmates to obtain the rank of a three-star general in 24 years into his career.

More changed his ascent [illegible] from [illegible] 47, but will not get any rank promotions nor be given any positions until they reach their mandatory age of retirement."

Wiranto did not discount the possibility of bringing the three before a military tribunal.

"If the prosecution for the other 10 Kopassus officers later finds out that Prabowo, Muchdi and Chairawan were clearly involved in the abductions and torture of the activists, they could also be charged with crimes before the court-martial," he said.

"We have to respect the principle of presumption of innocence. Everything will be uncovered in court, including the officers who gave orders to the 10 Kopassus officers."

He did not mention when the tribunal for the 10 officers would start, but indicated that the dossiers were being completed by the military's fact-finding team. It is led by the National Military Police Corps Chief Maj. Gen. Syamsu Djalal.

Wiranto dismissed speculation the Armed Forces headquarters was under pressure to make the decision.

"One thing for sure is that the decision was made in the [illegible] ABRI, and the [illegible] Lt. Gen. [illegible] still [illegible]

"Should you have any evidence (disproving the decision), you could tell the ABRI's fact-finding team about it," he told reporters.

But the statement contradicted his Aug. 14 remarks that the council would recommend Prabowo be court-martialled. There was no official explanation on the inconsistency.

Subagyo, who is also the Army's chief of staff, dismissed speculation that ABRI had no evidence to court-martial Prabowo.

"Let's just wait for the opening of the court-martial (of the officers)," he said.

A member of the Honor Council, Lt. Gen. Agum Gumelar, said the council did not recommend criminal sanctions against the three officers because they would have to include considerations based on technical aspects of the abductions.

"We did not talk about technical aspects of the abductions as they were completely the Armed Forces' internal affairs," Agum told reporters after the media conference.

Discussing the 12 activists reportedly still missing, Agum said their whereabouts remained unknown.

"Prabowo only admitted to the [illegible] operations in Aceh.

Lopa, who led the four-man team which also included Koesparmono Irsan, Soegiri and M. Salim, said at least 102 women were raped. He also said disappearances and extra-judicial killings had widowed 3,000 woman and left between 15,000 and 20,000 children without their parents.

The commission confirmed earlier reports of the existence of the nine mass graves containing the bodies of [illegible]

"We may need about two more weeks to dig up all the mass graves," Lopa said, adding that excavations were sometimes hard to carry out because of the hard packed soil.

Mass graves

As reported earlier, the team found a number of skeletons in the mass graves.

"The skeletal remains of 12 bodies were dug up from a single grave at Rekil Pantanar

release all political detainees in the province.

The commission also urged the local government give the victims' relatives temporary compensation, saying the central government would need some time to devise a permanent settlement.

Amid mounting public pressure, Minister of Defense and Security/Armed Forces (ABRI) Commander Gen. Wiranto visited Aceh earlier this month and pledged to

PRABOWO'S VERDICT: Minister of Defense and Security/Armed Forces (ABRI) Commander Gen. Wiranto (right), accompanied by senior military officers, announces the discharge of Lt. Gen. Prabowo Subianto from the Army for his role in the abduction and torture of political activists. Wiranto also said at yesterday's news conference, held at the ABRI's Merdeka Barat headquarters in Central Jakarta, that two other officers investigated along with Prabowo were both released from "all structural duties".

Rights body confirms 781 people killed in Aceh

JAKARTA (JP): The National Commission on Human Rights, fresh from a visit to Aceh, confirmed yesterday that at least 781 people were killed and thousands others suffered during the nine-years of military operations in the country's western-most province.

The commission's secretary-general, Baharuddin Lopa, told a media conference that at least 368 people were tor-

Govt to allow foreign control of local banks

JAKARTA (JP): The government plans to allow foreign investors to hold controlling ownership of Indonesian banks either through direct pincement or the capital market, a senior official has said.

Minister of Finance Bambang Subianto submitted proposed amendments to the 1992 Banking Act to a plenary session of the House of Representatives yesterday, saying the new rules were part of a concerted effort to attract foreign investors to prop up the ailing banking industry.

Current law caps foreign ownership in Indonesian banks at 49 percent.

"Hopefully, the entry of foreign investors into the banking industry would become a catalyst to a new wave of capital inflow to other sectors of our battered economy," Bambang said in a statement explaining the main points of the proposed amendments.

The bill includes the easing of banking secrecy provisions to force banks to disclose more of their credits and other aspects of their operations.

"The banking secrecy stipulations will cover only bank liabilities such as deposits. But bank assets, such as credits and their recipients, will be fully transparent to the public," Bambang said.

Under the 1992 Banking Act, banks are allowed to keep all information relating to their loans secret.

The bill also stipulates a legal basis for the existence of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), which was set up in late January, and sets new limits for loans to affiliates and the amount of shares owned by individuals in a bank.

It also includes a legal framework for a deposit insurance scheme by requiring all commercial banks to insure deposits in order to protect the interests of depositors.

The insurance is currently lim- the supervisory and regulatory body for the banking industry.

The new banking legislation is part of the government overall bank restructuring program, a key component of its IMF-sponsored reform package designed to lead the country out of its worst economic crisis in three decades.

The draft legislation has come on the heels of a new package of bank restructuring measures initiated last week. The measures nationalized Bank Central Asia (BCA), the country's largest private bank, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Tiara Asia and Bank PDFCI and suspended Bank Umum Nasional (BUN) and Modern Bank. The seven banks had received Bank Indonesia liquidity support equivalent to more than 5 percent of their capital and had violated the legal lending limits.

The central bank has not disclosed the amount of liquidity support provided to these banks but official sources said BCA, Danamon and BDNI were cumulatively obliged to repay the government Rp 80 trillion from the bailout.

IBRA announced in June that Bank Tiara had received Rp 2.44 trillion ($203.3 million) converted at Rp 12,000 per dollar) in BI liquidity support while PDFCI had taken Rp 1.6 trillion and BUN had received Rp 6.6 trillion.

Allan I. Mendelowitz, executive vice president of IFC, said the World Bank, commented here yesterday that the quickest way to resolve the country's banking system problem was to welcome foreign investors into the sector.

"Foreign world class players will not only bring many

The Jakarta Post
25 Agustus 1998

REPUBLIKA

Nusantara — Aksi Unjuk Rasa Bayangi Pelantikan Gubernur Jatim — Hlm. 7

Olahraga — AC Milan Hadapi Juventus di Berlusconi Trophy — Hlm. 11

Hiwal — Peggy Melati Sukma Menunda Pemikahan — Hlm. 12

SELASA, 25 AGUSTUS 1998

Kemuliaan Islam

Letjen Prabowo Dipensiun

JAKARTA — Karier militer Letjen TNI Prabowo Subianto berakhir sudah. Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memutuskan mantan Danjen Kopassus itu diakhiri masa dinasnya di ABRI dalam kaitannya dengan kasus penculikan sejumlah aktivis beberapa waktu lalu.

"Letnan Jenderal Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia," ujar Wiranto di depan sekitar seratus wartawan dalam dan luar negeri di Markas Besar ABRI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

Wiranto juga mengumumkan sanksi terhadap dua perwira lain, yaitu Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono dan Kolonel Inf Chairawan dalam kasus yang sama. Kedua perwira itu, katanya, dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI.

Menurut Wiranto, sanksi terhadap ketiga perwira Kopassus itu merupakan sanksi administratif dan bukan tindakan hukum sesuai UU Pidana Militer. Ketika ditanyakan mengapa mereka tidak langsung diajukan ke mahkamah militer, Pangab menjelaskan, "Kita mengacu asas praduga tak bersalah, semua itu nanti tergantung Mahmil. Di Mahmil, yang langsung menjalankan misi itu satu per satu akan menjelaskan, dia disuruh siapa."

"Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan akan dilanjutkan ke mahkamah militer jika dalam proses persidangan Mahmil terhadap sepuluh anggota terperiksa yang lain nyata-nyata membuktikan ke arah itu," lanjut Wiranto menyebut 10 perwira dan bintara Kopassus yang langsung akan diajukan ke Mahmil.

Seusai membacakan keputusan, Wiranto dengan tim Dewan Kehormatan Perwira (dipimpin langsung oleh KSAD) bergegas meninggalkan tempat, namun wartawan terus memburu hingga Pangab dan tim DKP menuju gedung tempat ruang kerja Menhankam/Pangab.

"Apa pengertian dari diakhiri dinasnya di ABRI?" tanya wartawan pada Wiranto. "Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tetapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu," jawab Wiranto.

Hal yang sama disampaikan Ketua DKP Jenderal Subagyo yang menyatakan bahwa Prabowo akan mendapat hak-haknya sebagai pensiunan.

Sedangkan Muchdi dan Chairawan, kata Wiranto, masih berdinas dalam lingkungan ABRI tetapi tidak akan diberi jabatan. Ditanyakan sampai kapan, Wiranto menjawab, "Sampai nanti pensiun."

Wiranto menambahkan keputusan tersebut diambil tanpa tekanan dari mana pun sehingga diharapkan tidak berkembang spekulasi tentangnya. Yang jelas, lanjutnya, keputusan diambil untuk kepentingan ABRI sendiri, bangsa, dan negara.

Sebelumnya, ketiga perwira tersebut telah diperiksa DKP selama hampir tiga pekan. DKP kemudian menyerahkan saran kepada Pangab tentang sanksi yang akan diberikan kepada mereka, Jumat pekan lalu.

Sanksi terhadap mereka, menurut Wiranto, diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Selain aspek kesalahan yang telah dibuat oleh para perwira terperiksa, katanya, juga dipertimbangkan jasa mereka selama

PRABOWO DIPENSIUN

▲Republika
25 Agustus 1998

▼Media Indonesia
25 Agustus 1998

HARIAN UMUM

MEDIA INDONESIA

BAWA SUARA RAKYAT

• HOTLINE
Berlangganan & Customer Service
Telp/Fax: (021) 582-1303
http: //www.mediaindo.co.id/

Karier Militer Prabowo Tamat

■ Dia Menculik Sembilan Aktivis

JAKARTA (Media): Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari jajaran ABRI menyusul keputusan Pangab Jenderal TNI Wiranto yang mengakhiri masa dinas jenderal berbintang tiga itu. Sedangkan Mayjen TNI Muchdi dan Kol Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural dalam ABRI.

Keputusan Pangab Jenderal TNI Wiranto itu dibacakan kemarin dalam sebuah konferensi pers setelah Pangab mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Sebelumnya DKP telah memeriksa ketiga pentolan pasukan elite TNI-AD Kopassus masing-masing mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan mantan Dan Grup IV Kol Inf Chairawan berkaitan dengan kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi.

Ketika membacakan keputusan tersebut Jenderal Wiranto didampingi Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo yang juga KSAD serta semua anggota DKP lainnya yakni Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Laksdya TNI Soeratmin (Irjen ABRI), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam), Letjen TNI Soesilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Komandan Jenderal/Danjen) Akabri, serta Letjen TNI Sugiono (Wakasad).

Menurut Pangab, alasan dijatuhkannya sanksi tersebut karena ketiga perwira itu terbukti terlibat dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan pelanggaran HAM beberapa waktu yang lalu.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan, Letjen TNI Prabowo yang terakhir menjabat sebagai Dan Sesko ABRI itu mengaku telah memberikan perintah menculik sembilan aktivis dan semuanya sudah dibebaskan.

Mengenai nasib 12 aktivis lagi yang sampai sekarang belum ditemukan dan belum diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, Subagyo mengaku tidak tahu. "Yang 12 itu kita tidak tahu siapa yang menculik. Kasusnya sedang diselidiki Puspom ABRI," tegas Subagyo.

Jenderal Wiranto menjelaskan, hukuman yang dijatuhkan kepada tiga pentolan Kopassus itu adalah sanksi administratif. Namun, lanjut jenderal berbintang empat itu, kendati ketiga perwira terperiksa telah mendapatkan sanksi administratif, tidak tertutup kemungkinan dibawa ke Mahkamah Militer.

Menurut Wiranto, sanksi administratif itu merupakan keputusan optimal yang bisa dia ambil dalam kapasitas sebagai Pangab. Sebab menurut dia, DKP tidak berwenang memberikan rekomendasi yang bersifat pidana.

Wiranto menjelaskan pihaknya melihat dua sisi yakni kesalahan yang dibuat dan sumbangsih mereka selama aktif berdinas pada bangsa dan negara. "Perlu juga saya tegaskan bahwa keputusan yang diambil ini tidak berada dalam tekanan siapa pun. Ini perlu saya tegaskan untuk mencegah timbulnya spekulasi yang macam-macam," ujarnya.

"Jadi kapan Prabowo es dimahmilkan," kejar wartawan.

Menjawab pertanyaan ini, Wiranto mengatakan ketiganya akan dimahmilkan jika 10 anggota terperiksa oleh Mahmil memberikan penguatan bahwa ketiganya melakukan pelanggaran pidana.

"Jadi nanti dalam proses persidangan ke-10 anggota terperiksa di Mahmil itu kan terungkap siapa yang memberikan perintah, siapa yang bertanggung jawab. Nah, dari keterangan-keterangan itu bisa dikembangkan apakah Prabowo, Muchdi, dan Chairawan melakukan kesalahan pidana militer atau tidak," katanya.

Usai membacakan keputusan, Wiranto dengan tim DKP bergegas meninggalkan tempat, namun pers terus memburu. "Apa pengertian dari diakhiri dinasnya di ABRI?" tanya wartawan.

"Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tetapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu," kata Wiranto.

"Lalu bagaimana dengan hak pensiunnya," kejar wartawan.

Menurut Wiranto, Prabowo akan mendapatkan hak pensiun penuh.

"Kalau Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawan?" tanya wartawan lagi.

"Muchdi dan Chairawan masih tetap berdinas di ABRI tetapi tidak diberi jabatan," kata Wiranto.

Subagyo mengatakan, diakhirinya dinas aktif Prabowo berarti pensiunnya dipercepat dengan hormat dan tinggal menunggu SK dari Pangab. (Edi/Wdh/D-12)

Ketua F-PP: Sanksi itu tak Cerminkan Rasa Keadilan

Grup Salim Jual Usahanya di LN

■ Untuk Bayar Bantuan Likuiditas kepada Pemerintah

Pangab: Keputusan diambil demi persatuan bangsa

KARIR LETJEN PRABOWO SELESAI

Komentar dibebastugaskannya Letjen Prabowo

Seharusnya dibawa ke Mahmil

Kontras minta Prabowo Cs dimahmilkan

Prabowo tak mau jadi wakil

Massa Mega berhasil mendekati tempat kongres

Bentrokan nyaris terjadi

Sulit untuk memilih ketua umum

Hari ini Kongres PDI dibuka

Kuasa Mega dan Soerjadi bingung

POS KOTA

HARIAN INDEPENDEN

SELASA, 25 AGUSTUS 1998

ukai pedagang nasi dan rampas kalung

Penodong ditembak

erjungkal dari motor

Melahirkan di kamar mandi saat tugas

Perawat cekik bayi hingga tewas

Komnas HAM temukan 9 kuburan massal di Aceh

781 Orang tewas, 102 wanita diperkosa

2 Penambang emas tewas tertimbun

Staf Humas M-Club edarkan inex

FUD minta SI MPR agendakan pertanggungjawaban Soeharto

Gubernur BI: Bila berhak akan diberikan

Karyawan Bank Modern tuntut pesangon

Harga minyak goreng belum stabi

Biar mahal asal ada barang

96.000 Perusahaan tak mampu membayar sesuai UMR baru

EXTRA JOSS

INI Bisanya ...BUAT APA BELI BOTOLNYA!

POS KOTA & EXTRA JOSS BAGI-BAGI HADIAH

NAH, INI DIA..!

Adil (2-8 September 1998) mewawancarai Letjen TNI Agum Gumelar, anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP), seputar tim culik milik Prabowo. Berikut isi wawancara tersebut:

T: Benarkah Prabowo mengaku hanya menculik 9 orang?

J: Benar, seperti yang sudah dikatakan pada pengumuman Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Ketua DKP sudah menegaskan hal itu.

T: Bagaimana proses pemeriksaan DKP sampai Prabowo mengaku hanya menculik 9 orang?

J: Sifat pemeriksaan DKP ini bukan mengarah pada mengadili atau seperti di pengadilan. Kita tidak menekan terperiksa, kita juga tidak memojokkannya, apalagi mengarahkannya. DKP hanya melihat dari kasus yang terjadi. Sejauh mana sifat dan tabiat terperiksa. Adakah kode etik keperwiraan yang dilanggar. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu, sifat DKP tertutup, artinya pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Hasilnya, tidak bisa disebarluaskan. Hanya dilaporkan kepada pimpinan tertinggi ABRI, yaitu Pangab.

8 ● LAPORAN KHUSUS

ADA PENCULIK LAIN?

Langkah akhir Jenderal Wiranto untuk menuntaskan kasus penculikan justru mengundang protes. Prabowo mengaku hanya menculik 9 orang. Benarkah ada pelaku lain yang menculik 14 korban yang belum kembali?

"Letjen Prabowo diakhiri masa dinasnya dalam ABRI." Begitu tajuk Merdeka.com Panglah Jenderal TNI Wiranto dalam jumpa pers singkat di Mabes ABRI Jl. Merdeka Barat, Senin (27/4) lalu. Sementara dua rekannya, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Chairawan dibebastugaskan dari semua jabatan dan tugas di ABRI.

Banyak pihak tak puas dengan keputusan Wiranto yang "hanya" memperhentikan Prabowo dan Kostrad, lembaga yang selama ini getol mengurusi kasus penculikan, langsung bereaksi. "Jiwa militer dan sistem administrasi di pemerintahkan, bahwa ABRI lebih mementingkan pelaku penculikan," tegas Munir, Koordinator Badan Pekerja Kontras.

BARU SEKARANG

Menurut Kontras, sebaiknya para komandan pelaku penculikan itu diadukan ke Mahkamah Militer (Mahmil). Sebab hanya dengan cara ini, kasus penculikan itu akan kemudian dengan jelas. Para pelakunya pun akan mendapat hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, Kontras tetap mendesak Presiden ABRI untuk memeriksa Prabowo, Muchdi dan Chairawan di sidang ke Mahmil.

Tak hanya Kontras, Mayjen (Purn) Sumosoedirjo juga tidak puas. "Pemecatan Prabowo tidak cukup," tutur anggota Komnas HAM itu. Sudrajat, bukannya Prabowo lebih ringan daripada dua rekannya yang notabene posisinya lebih rendah. "Pengakuan menculik, cukup untuk memberi Prabowo ke Mahmil," tegasnya. Pendapat ini juga disetujui oleh sejumlah anggota DPR.

Memang peluang untuk membawa Prabowo dkk masih ada. Seperti disebutkan Wiranto, kedua dalam proses pemeriksaan Mahmil terhadap 11 anggota Kopassus —yang kini hanya dibuat BAP-nya oleh Pangom ABRI — bisa dibatalkan, bahwa ketiga perwira itu melakukan tindak pidana, maka akan diajukan ke pengadilan.

Setiap usaha mengadili Prabowo kecil kemungkinannya. Di manapun, dalam institusi militer, tak ada hukum yang mengalahkan penyelidikan. "Itu hanya terjadi di film," kata sumber Adil di Mabes ABRI. Apalagi, loyalitas anggota Kopassus kepada Prabowo yang-gah luar biasa. Bagi pun tahu, ia adalah jenderal yang paling dicintai anak buahnya.

Untuk memberikan kesan penculikan juga bukan hal yang mudah. Bukti-bukti hukum yang diyuntahan pengadilan, sangat sulit ditemukan, mengingat penculikan merupakan kegiatan intelijen. Barang bukti sudah tentu tak ada. Saksi pun hampir semua peristiwa dilakukan secara lisan. "Kemungkinan besar mereka yang jadi tersangka nanti malah akan dibebaskan," tutur sumber tadi.

Jadi, boleh saja masyarakat mengerjakan Prabowo dkk, tapi itu tak mudah dilakukan. Apalagi para petinggi ABRI sadar, bila Prabowo sampai dijadikan tersangka, pasti dia akan 'nyanyi'. Kalau itu terjadi, "Maka mereka akan ditarik di 'meja' tutur perwira berbintang itu. Kedal lainnya, seluruh bangunan ABRI bisa jadi berantakan.

PENCULIK LAIN

Soal lain yang membubalkan tanda tanya adalah pengakuan Prabowo di hadapan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), bahwa pihaknya hanya menculik 9 aktivis. Pengakuan Prabowo ini dianggap-kan Ketua DKP, Jenderal TNI Subagyo HS, bagai meniak? "Saya tegas bohl," tuturnya.

Kalau Prabowo cuma mengaku menculik 9 orang sementara —berdasar data Kontras— jumlah orang hilang ada 23 orang (9 orang yang sudah kembali dan 14 orang yang belum ditemukan), berarti ada pen-

Momen-Momen Penculikan

4 Februari: Pius Lustrilanang dan Desmond Junaedi Mahesa ditahlk Mereka diduga terkait dengan isu pisah yaser

10 Februari: Ratna Sarumpaet melapor ke Komnas HAM.

2 Maret 1998: Haryanto Taslam dicopot Kasie dianggap sebagai provokator yang ingin pisah yaser.

12 Maret: Herman Hendrawan, Sonyal, Faisol Reza dan Rahardja Waluyo Jati ditahlk. Diduga kerap terkait pelaksanaan dan Tanah Tinggi.

13 Maret: Nezar Patria, Mugiarto dan Aan Rusdianto ditangkap. Diduga terkait kasus penculikan dan Rusun Tanah Tinggi.

31 Maret: Pratiwi Bimo Anggoro dicopot. Diduga terkait kasus penculikan dan di Rusun Tanah Tinggi.

20 Maret: Andi Arief, Kelua SMID dicopot. Diduga terkait kasus penculikan dan di Rusun Tanah Tinggi.

2-3 April: Pius dan Desmond dilepas

15 April: Haryanto dilepas

27 April: Pius mempengaruhi kesaksian di Komnas HAM.

28 April: Faisal Reza dilepas

2 Mei: Pangab mengusulkan tak ada sanksi berat untuk penculik aktivis.

9 Mei: Tim Pencari Fakta ABRI menemui Komnas HAM

11 Mei: Desmond mengumpulkan keluarga korban penculikan di YLBHI.

9 Juni: Nezar Patria, Mugiarto dan Aan Rusdianto dilepas

14 Juli: Pangab mengakui Kopassus terlibat penculikan.

17 Juli: Prabowo menyatakan bertanggung jawab atas kasus penculikan.

3 Agustus: Pangab membentuk DKP untuk memeriksa Prabowo, Muchdi PR dan Chairawan.

26 Agustus: Prabowo dipensiunkan/diberhentikan

TABLOID BERITA MINGGUAN ADIL • NO. 48 TAHUN II • 25 – 31 MARET 1998 • 7

LAPORAN KHUSUS ● 9

Hanya Sembilan yang Diculik Prabowo?

Berdasar DKP, Prabowo mengaku hanya menculik 9 aktivis. Bagi Koordinator Kontras, Munir, pengakuan Prabowo ini, berarti ada upaya untuk melindungi dirl. Sebab angka 9 itu jauh di bawah jumlah korban yang sudah kembali. Mereka ada di Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Desmond Junaedi Mahesa, Faisol Reza, Rahardja Waluyo Jati, Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugiarto dan Nezar Patria.

Namun siapa saja yang diculik, kapan, dan di mana saja. Prabowo, tak terlalu peduli. Yang jelas, kata Prabowo, Muchdi dan Nico Pandia di Wisma Nusantara, Mugiarto dan Nezar Patria di Hotel Indonesia, Andi Arief dan Aan Rusdianto di Hotel Kartika Chandra, Haryanto Taslam dan Desmond Junaedi Mahesa di Rumah Susun Klender pada 11 Maret. Mereka kemudian dibawa dan dianiaya di Pusdik Arhanud Cijantung, Jakarta Timur.

Dan, lanjutnya lebih jauh, diculik di tempat yang sama dengan Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Desmond Junaedi Mahesa, Faisol Reza, Rahardja Waluyo Jati dan Andi Arief. Aan Gumelar juga ingin mengaku telah terlibat, atau setidaknya tahu sedikit-banyak tentang penculikan itu. Sebab, ia mengaku telah memerintahkan Prabowo untuk mengambil tindakan tegas terhadap para aktivis yang dianggap membahayakan stabilitas nasional. Tapi, Aan Gumelar tak mau merinci, apakah perintah itu termasuk penculikan atau bukan.

Sementara itu, Pangab Wiranto mengaku tak tahu menahu soal penculikan. Ia baru mengetahui setelah Prabowo mengakuinya di hadapan DKP. Wiranto pun mengaku tak tahu menahu soal penculikan. Ia baru mengetahui setelah Prabowo mengakuinya di hadapan DKP. Wiranto pun mengaku tak tahu menahu soal penculikan. Ia baru mengetahui setelah Prabowo mengakuinya di hadapan DKP.

Letjen TNI Agum Gumelar, Anggota DKP

DKP Bisa Bekerja Kembali

Benarkah Prabowo mengaku hanya menculik 9 orang?

Betul, seperti yang sudah diketahui pada pengumuman Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Ketua DKP sudah mengakui hal itu.

Bagaimana proses pemeriksaan DKP sampai Prabowo mengaku hanya menculik 9 orang?

Sejak pemeriksaan DKP ini bukan mengenai pada mengadili atau seperti di pengadilan. Kita tidak mencari kesalahan. Jadi tugas kita memang yakinkan, apakah mengapakahnya DKP hanya melihat dan kami yang tahu). Sudah mana saja dan terlibat terpelihat. Adakah lode elit kepemimpinan yang dilanggar. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu dari DKP tentang, artinya pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Hasilnya, tidak bisa disebarluaskan. Hanya disperkan sepeda pimpinan tertinggi ABRI, yaitu Pangab.

Prabowo mengaku hanya menculik 9 orang, benarkah ada penculik lain?

Pangab telah memerintahkan Pangom ABRI untuk melakukan penyelidikan. Dan sampai sekarang Pangom ABRI masih terus melakukan penyelidikan tersebut. Ini masih juga bisa dilihat dari hasil proses persidangan di Mahkamah Militer.

Anggota Kopassus lain di-BKO-kan ke Kodam. Apakah DKP tidak menganalisa pemeriksaan ke sana?

DKP itu melaksanakan kepentingan atau kebijaya berdasarkan peraturan Pangab Peraturan Pangab itu hanya melihat dan membaca siapa-siapa dan tahun dan ketiga tersebut itu. Jadi soal kasusnya, pelakunya atau penculiknya sendiri, hanya sebagai pelengkap saja.

Masih ada kemungkinan DKP bekerja lagi untuk memeriksa jenderal lain?

Bisa saja, itu tergantung dari hasil temuan dari tim penyidik. Dan pangom ABRI masih terus bekerja. Untuk sementara tugas DKP memeriksa tiga perwira sudah selesai. Laporannya sudah diserahkan ke Pangab.

Tempo

TABLOID BERITA MINGGUAN ADIL • NO. 48 TAHUN II • 25 – 31 MARET 1998 • 7

Adil
2-8 September 1998

Republika
26 Agustus 1998

REPUBLIKA

MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

Ekonomi
INACA Naikkan Tarif Penerbangan Domestik Kelas Ekonomi 60%
Hlm. 4

Hiburan
Stasiun TV Swasta tak Wajib lagi Tayangkan Film Pemberontakan PKI
Hlm. 5

Olahraga
MU berpeluang Besar Lolos dari Penyisihan Piala Champions
Hlm. 11

Republika online: http://www.republika.co.id/ e-Harga eceran (P. Jawa) Rp 1.400,-

1419 H ● NOMOR 227 TAHUN KE-6 ● 12 HALAMAN

Bentrokan Berdarah Warnai Kongres PDI

Amien Rais:

Prabowo Harus Dimahmilkan

Rupiah Menguat Jadi Rp 10.800

BCA Baru Kembalikan Rp 4,8 Triliun

▲ *Kliping ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpuasan dan rasa penasaran mengapa Prabowo hanya dicopot. Padahal, bagi banyak kalangan, Prabowo melakukan tindak pidana. Membuktikannya melalui mahkamah militer adalah jalan.*

"Penjelasan KSAD bahwa Prabowo Subianto mengaku menculik sembilan aktivis itu kan artinya dia telah melakukan tindakan pidana. Meski demikian, belum ada permintaan cekal bagi Prabowo. SAYA YAKIN PRABOWO TAK AKAN LARI KARENA ABRI ITU PUNYA SIKAP KSATRIA."

| ***Mayjen TNI Syamsu Djalal****, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI*

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Hendardi, menyatakan hasil DKP telah memutok perlakuan oknum pelaksana operasional tanpa dapat menjangkau latar belakang politik maupun pemberi tugas atau perencana aksi tersebut.

"Kendati mahkamah militer juga belum tentu menjamin terbongkarnya latar belakang politik, namun dengan tidak diikutsertakannya ketiga perwira terperiksa itu ke mahmil telah memperlihatkan itikad pimpinan ABRI untuk tidak bersikap transparan. Padahal transparansi itu harus dianut dalam penyelesaian masalah-masalah pelanggaran HAM," ujar Hendardi.

Pikiran Rakyat
25 Agustus 1998

| ***Hendardi,*** *Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dalam Pikiran Rakyat ("Pangab: Prabowo Diberhentikan", 25 Agustus 1998)*

Hal yang sama diungkapkan pula oleh Dr. Salim Said. Menurut pengamat militer ini, keputusan Pangab sangat tidak adil. "Kalau ABRI hanya memeriksa kasus penculikan dengan hasil Prabowo dipecat dan kasus lain tidak diperiksa, maka itu berarti tidak *fair* dan tidak adil terhadap Prabowo. Juga kepada para korban kasus lainnya," ujar Salim.

Pikiran Rakyat
25 Agustus 1998

| ***Salim Said,*** *Pengamat Militer, dalam Pikiran Rakyat ("Pangab: Prabowo Diberhentikan", 25 Agustus 1998)*

telah disampaikan berkali-kali bahwa ABRI akan mengusut tuntas kasus penculikan para aktivis. ABRI ternyata mengedepankan strategi defensif dengan melindungi perilaku dan pelaku kekerasan dari bentuk-bentuk pertanggungjawaban," ungkap Munir.

Kontras juga berpendapat, sikap ABRI itu menunjukkan tidak adanya kemauan untuk mengoreksi secara substansial dan institusional terhadap kebijakan represif. Ini mempertebal pesimisme dan keraguan masyarakat bahwa ABRI akan konsisten menghentikan politik kekerasan dan mereformasi dirinya untuk bersikap lebih terbuka dan demokratis.

"Langkah ABRI menjatuhkan sanksi administratif terhadap ketiga perwira tinggi itu, mengabaikan tuntutan rasa keadilan untuk mengungkapkan kasus penculikan para aktivis secara tuntas. Karena itu kami tidak melihat langkah maju ABRI dalam proses penegakan hukum secara transparan dan bertanggung jawab," kata Munir.

Pikiran Rakyat
25 Agustus 1998

| ***Munir**, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dalam Pikiran Rakyat ("Pangab: Prabowo Diberhentikan", 25 Agustus 1998)*

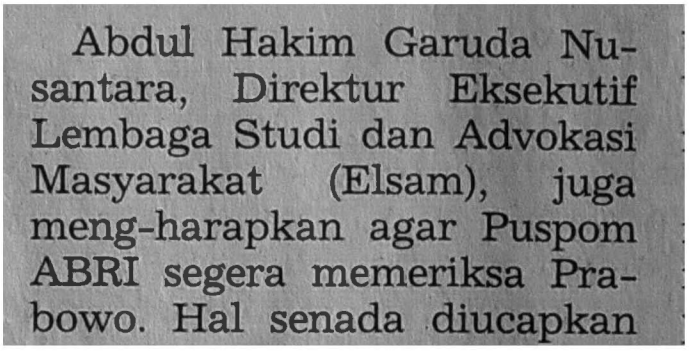

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga meng-harapkan agar Puspom ABRI segera memeriksa Prabowo. Hal senada diucapkan

Kompas
25 Agustus 1998

| ***Abdul Hakim Garuda Nusantara,*** *Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dalam Kompas ("Seharusnya Langsung ke Mahmil", 25 Agustus 1998)*

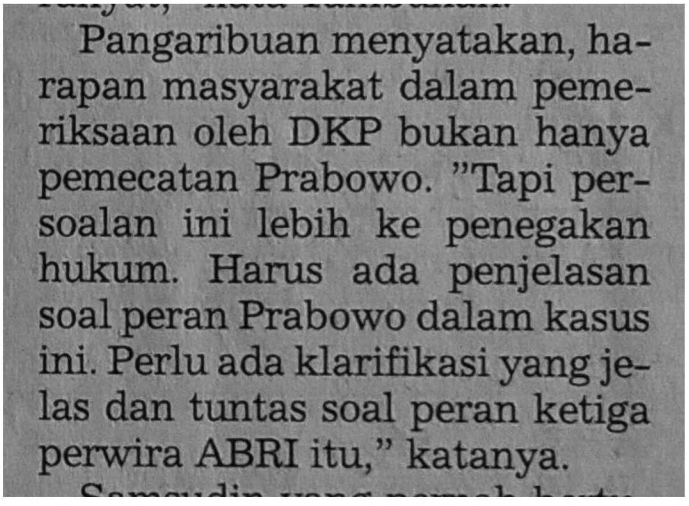

Pangaribuan menyatakan, harapan masyarakat dalam pemeriksaan oleh DKP bukan hanya pemecatan Prabowo. "Tapi persoalan ini lebih ke penegakan hukum. Harus ada penjelasan soal peran Prabowo dalam kasus ini. Perlu ada klarifikasi yang jelas dan tuntas soal peran ketiga perwira ABRI itu," katanya.

Kompas
25 Agustus 1998

| ***Luhut M.P. Pangaribuan,*** *Praktisi Hukum, dalam Kompas ("Seharusnya Langsung ke Mahmil", 25 Agustus 1998)*

Menurut Amien, Prabowo harus dibawa ke mahmilub (mahkamah militer luar biasa). "Mahkamah militer adalah sebuah keharusan. Kalau tidak, saya khawatir citra ABRI akan terpuruk di mata rakyat. ABRI sekarang sedang coreng-moreng karena peristiwa Aceh, Trisakti, penjarahan, pemerkosaan, dan lain-lain. Jadi supaya tidak berlarut-larut, sebaiknya pimpinan ABRI membawa Prabowo dan teman-temannya ke mahmilub, terbuka untuk publik," kata Amien.

Kompas
26 Agustus 1998

| ***Amien Rais**, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), dalam Kompas ("Prabowo Lakukan Tindak Pidana", 26 Agustus 1998)*

"Apa pun alasannya, penculikan itu sebenarnya merupakan kesalahan yang besar, apalagi masih ada yang hilang dan tidak ditemukan. Saya percaya bahwa semua yang dilakukan Prabowo itu diketahui Pak Harto. Pertama, yang dilakukannya adalah menyuruh Om Liem Sioe Liong memecat saya dari jabatan ketua pelaksana Prasetya Mulya dan dari juru bicara Kelompok Jimbaran. Setelah itu, saya dikerjain. Om Liem sendiri yang bercerita kepada saya. Soeharto enggak senang kepada saya karena you punya statemen sehingga you diminta untuk dipecat. Jadi, kalau ada sesuatu pekerjaan diarahkan kepada saya, saya percaya penculikan-penculikan itu Pak Harto juga tahu. Sebab, isunya sama. Mungkin karena beruntung saja saya tidak diculik. Sebagian besar yang diculik kan juga ditanya, berapa besar saya memberi uang kepada mereka? Pada Pius Lustrilanang dan lainnya, saya dilibatkan."

| **Sofjan Wanandi**, *Juru Bicara Kelompok Jimbaran, dalam Jawa Pos ("Untung Saya Tak Diculik", 26 Agustus 1998)*

Jawa Pos
26 Agustus 1998

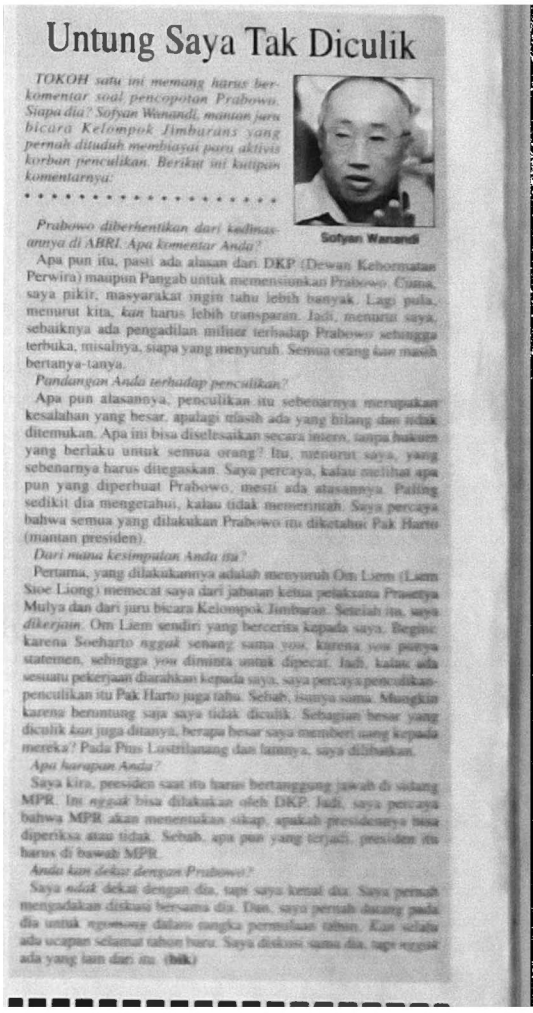

Untung Saya Tak Diculik

TOKOH satu ini memang harus berkomentar soal pencopotan Prabowo. Siapa dia? Sofyan Wanandi, mantan juru bicara Kelompok Jimbaran5 yang pernah dituduh membiayai para aktivis korban penculikan. Berikut ini kutipan komentarnya:

. . . . . .

Prabowo diberhentikan dari kedinasannya di ABRI. Apa komentar Anda?

Apa pun itu, pasti ada alasan dari DKP (Dewan Kehormatan Perwira) maupun Pangab untuk memensiunkan Prabowo. Cuma, saya pikir, masyarakat ingin tahu lebih banyak. Lagi pula, menurut kita, *kan* harus lebih transparan. Jadi, menurut saya, sebaiknya ada pengadilan militer terhadap Prabowo sehingga terbuka, misalnya, siapa yang menyuruh. Semua orang *kan* masih bertanya-tanya.

Pandangan Anda terhadap penculikan?

Apa pun alasannya, penculikan itu sebenarnya merupakan kesalahan yang besar, apalagi masih ada yang hilang dan tidak ditemukan. Apa ini bisa diselesaikan secara intern, tanpa hukum yang berlaku untuk semua orang? Itu, menurut saya, yang sebenarnya harus ditegaskan. Saya percaya, kalau melihat apa pun yang diperbuat Prabowo, mesti ada atasannya. Paling sedikit dia mengetahui, kalau tidak memerintah. Saya percaya bahwa semua yang dilakukan Prabowo itu diketahui Pak Harto (mantan presiden).

Dari mana kesimpulan Anda itu?

Pertama, yang dilakukannya adalah menyuruh Om Liem (Liem Sioe Liong) memecat saya dari jabatan ketua pelaksana Prasetya Mulya dan dari juru bicara Kelompok Jimbaran. Setelah itu, saya *dikerjain*. Om Liem sendiri yang bercerita kepada saya. Begini: karena Soeharto *nggak* senang sama you, karena you punya statemen, sehingga *you* diminta untuk dipecat. Jadi, kalau ada sesuatu pekerjaan diarahkan kepada saya, saya percaya penculikan-penculikan itu Pak Harto juga tahu. Sebab, isunya sama. Mungkin karena beruntung saja saya tidak diculik. Sebagian besar yang diculik *kan* juga ditanya, berapa besar saya memberi uang kepada mereka? Pada Pius Lustrilanang dan lainnya, saya dilibatkan.

Apa harapan Anda?

Saya kira, presiden saat itu harus bertanggung jawab di sidang MPR. Ini *nggak* bisa dilakukan oleh DKP. Jadi, saya percaya bahwa MPR akan menentukan sikap, apakah presidennya bisa diperiksa atau tidak. Sebab, apa pun yang terjadi, presiden itu harus di bawah MPR.

Anda kan dekat dengan Prabowo?

Saya *nggak* dekat dengan dia, tapi saya kenal dia. Saya pernah mengadakan diskusi bersama dia. Dan, saya pernah datang pada dia untuk *ngomong* dalam rangka pemulasan tahun. *Kan* selalu ada ucapan selamat tahun baru. Saya diskusi sama dia, tapi *nggak* ada yang lain dari itu. (bik)

Sofyan Wanandi

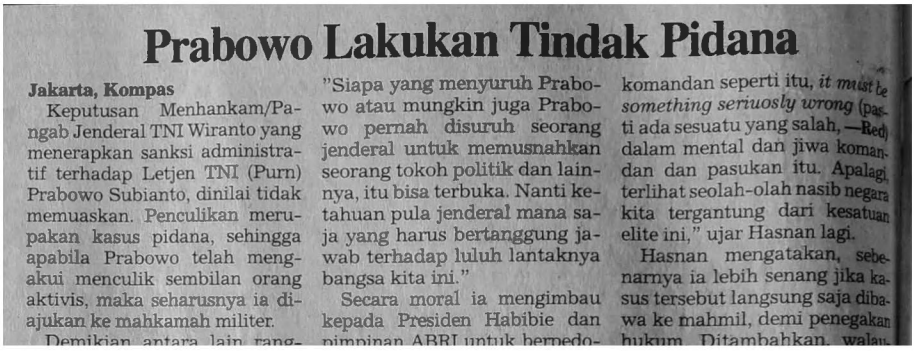

Prabowo Lakukan Tindak Pidana

Jakarta, Kompas

Keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang menerapkan sanksi administratif terhadap Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, dinilai tidak memuaskan. Penculikan merupakan kasus pidana, sehingga apabila Prabowo telah mengakui menculik sembilan orang aktivis, maka seharusnya ia diajukan ke mahkamah militer.

Demikian antara lain rang-

"Siapa yang menyuruh Prabowo atau mungkin juga Prabowo pernah disuruh seorang jenderal untuk memusnahkan seorang tokoh politik dan lainnya, itu bisa terbuka. Nanti ketahuan pula jenderal mana saja yang harus bertanggung jawab terhadap luluh lantaknya bangsa kita ini."

Secara moral ia mengimbau kepada Presiden Habibie dan pimpinan ABRI untuk berpedo-

komandan seperti itu, *it must be something seriuosly wrong* (pasti ada sesuatu yang salah, —Red) dalam mental dan jiwa komandan dan pasukan itu. Apalagi, terlihat seolah-olah nasib negara kita tergantung dari kesatuan elite ini," ujar Hasnan lagi.

Hasnan mengatakan, sebenarnya ia lebih senang jika kasus tersebut langsung saja dibawa ke mahmil, demi penegakan hukum. Ditambahkan, walau-

Kompas
26 Agustus 1998

"Saya membaca surat kabar bahwa Prabowo Subianto mengaku bahwa ia telah menculik sembilan orang. Jika telah mengakui terlibat, Prabowo telah melakukan tindak pidana. Kalau yang dilakukan komandan seperti itu, it must be something seriously wrong dalam mental dan jiwa komandan dan pasukan itu. Apalagi, terlihat seolah-olah nasib negara kita tergantung dari kesatuan elite ini."

| ***Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib****, Pengamat Politik dan Militer, dalam Kompas ("Prabowo Lakukan Tindak Pidana", 26 Agustus 1998)*

"Keputusan yang paling tepat adalah mengajukannya (Prabowo Subianto) ke mahmil sehingga dapat diungkap apa yang terjadi sebenarnya. Dari situ bisa dinilai apakah itu merupakan kebijakan orang yang bersangkutan atau merupakan kebijakan negara."

| ***Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro****, Ketua Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK), dalam Kompas ("Prabowo Lakukan Tindak Pidana", 26 Agustus 1998)*

Sabtu, 25 Agustus 1998
Jumadil Awal 1419 H

HARIAN PELITA

Harga Eceran Jakarta Rp.1.000,-
No. 7834 THN. XXV Terbit 8 Halaman

SUARA PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

PENJELASAN PANGAB - Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto didampingi Kepala DKP Jenderal TNI Soeharto HS dan anggota Wantanpangsa, Sonni kemarin di ruang Urip Sumoharjo Hankam memberikan penjelasan mengenai keputusan tentang Letjen TNI Prabowo. Letjen TNI Muchdi dan Kol Chairawan. ● tan

Mayjen Muchdi PR dan Kol Chairawan Dibebastugaskan

Letjen TNI Prabowo Diberhentikan

Jakarta, Pelita

Setelah mengaku bersalah di depan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan melakukan pengamanan dengan mencuitik serta menyekap sembilan aktivis, mantan Dansesko ABRI Letjen TNI Prabowo Subianto akhirnya dislipikan atau diakhiri masa dinasnya dari ABRI.

Sedangkan dua perwira lainnya, yakni mantan Danjen Kopassus pengganti Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Dan Grup IV/Kopassus Kol Inf Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI.

"Meski demikian, ketiga perwira yang dijatuhi sanksi administratif ini tidak tertutup kemungkinannya untuk diajukan ke Mahkamah Militer, "kata Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, kepada wartawan, Senin (24/8) ketika membacakan keputusan hasil sidang yang digelar DKP sejak akhir Juli lalu.

Menjawab pertanyaan wartawan mengapa Pangab tidak langsung memahmikan Prabowo, dengan tegas Wiranto mengatakan bahwa semua mengaku kepada atasan praduga tak bersalah. Semua akan berhuka saat sidang Mahmil nanti, satu persatu akan terungkap. "Jika 10 anggota terperiksa nyata-nyata membuktikan ke arah itu, tentu tiga perwira akan dimahmilkan," paparnya.

Keputusan ini, menurut Wiranto, didasarkan berbagai pertimbangan apa, kesalahan yang diperbuat ketiga perwira, di samping mempertimbangkan jasa dan prestasi kerjanya. Keputusan yang diambil tanpa ada penekanan dari pihak lain, semata-mata demi kepentingan ABRI khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya. "Jangan apeksalsai, ya," pintanya.

Seusai jumpa pers yang didahiri pimpinan tiga Angkatan dan Polri, Wiranto kembali menegaskan bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto tidak lagi menjadi anggota ABRI, diberhentikan dengan hormat alias kembali menjadi sipil. Sedangkan Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol Inf Chairawan tidak akan diberikan jabatan apapun, dalam tugas jabatan struktural ABRI, termasuk kenaikan pangkatnya.

Menculik sembilan aktivis

Dalam kesempatan itu, Wiranto sangat berterima kasih atas perhatian masyarakat dan kalangan pers terhadap ABRI. Tetapi pihaknya juga meminta agar koreksi yang tidak konstruktif, tidak proporsional dan memiliki tujuan negatif, tidak dikembangkan karena akan

Letjen TNI Prabowo Subianto

BERSAMBUNG KE HAL. 7 KOL. 1

Habibie: Singkirkan Semua Peraturan Berbau KKN

...ta, Pelita
...residen BJ Habibie menekankan, ...peraturan dan kebijaksanaan ...berpotensi membuka peluang ...alisasi, korupsi dan nepotisme ...harus disingkirkan jauh-jauh ...kepentingan rakyat Indonesia.
...pada Negara menyatakan hal itu ...ia membuka Musyawarah Kerja ...nasional (Mukernas) Gabungan Pe... ...ama Konstruksi Nasional Indone... ...di Jiana Negara, Senin (24/8).
...lah menjadi tekad kita bersama ...a memberikan peluang yang sama ...semua warganegara untuk me... ...akan usaha. Tekad ini adalah ...gunakan terhadap Undang-undang ...ar, bahwa semua warganegara ...ah untuk memperoleh pekerjaan ...layak bagi kemanusiaan," kata ...ah.
...gan terbukanya peluang kesem... ...ja bagi semua orang, tam... ...nya, kita berharap roda pereko... ...kita kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama. Tentu, katanya lagi, semua itu memerlukan kerja keras dari kita semua.

Ditambahkan pula, diharapkan Mukernas Gapensi ini dapat memberikan berbagai masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kebijakan yang selama ini dirasakan masih mengandung segi-segi kelemahan.

Dikatakan oleh Presiden, krisis ekonomi yang berkepanjangan juga menyerang sektor konstruksi. Kita menyadari dengan sungguh-sungguh kesulitan yang dihadapi. Usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan itu tidak dapat dilakukan secara sektoral.

"Sebab, kegiatan usaha jasa konstruksi terkait erat dengan situasi perekonomian nasional yang dewasa ini menghadapi tantangan-tantangan berat. Karena itulah, kita berusaha keras untuk menstabilkan roda perekonomian kita, yang pokok kendalannya terletak di bidang moneter," katanya.

Perjuangan keras untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, terutama terhadap dolar AS, belum menampakkan tanda-tanda yang menggembirakan. Namun, kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkannya; mésipun kita dihadapkan pada kendala-kendala yang tidak mudah untuk diatasi.

Dalam situasi yang serba sulit ini, kata Presiden lagi, kita harus pandai-pandai menempatkan diri dan mencari cara-cara baru untuk mengatasi masalah berat yang dihadapi. "Insyah Allah, berkat usaha dan kerja keras yang tidak mengenal lelah, kita akan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan ini," kata Habibie lagi.

Presiden

Diakui oleh Presiden, dunia usaha jasa konstruksi memang memerlukan iklim usaha yang kondusif, dengan

BERSAMBUNG KE HAL 7 KOL 5

Aminullah Ibrahim: Tamparan Keras Bagi ABRI

Kontras: Keputusan Pangab Abaikan Tuntutan Rasa Keadilan

Jakarta, Pelita

Sanksi yang dijatuhkan Pangab Jenderal TNI Wiranto kepada tiga orang perwira ABRI yaitu Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol Chairawan merupakan tamparan keras bagi ABRI. Dengan demikian, diharapkan ABRI bisa lebih profesionalnya.

Wakil Ketua Komisi I yang juga mantan Danjen Martair Masjen (Purn) Aminullah Ibrahim menyatakan hal itu kepada *Pelita* di Jakarta, kemarin, menanggapi pengumuman Pangab yang memutuskan sanksi kepada ketiga perwira ABRI tersebut.

Sedangkan, lanjutnya, Presiden B. Lukman Harun menyatakan, sanksi itu menunjukkan bahwa ABRI sangat responsif dan tanggap atas tuntutan masyarakat. "Kita menghargahan ini akan menjadi pelajaran bagi ABRI di masa depan," katanya.

Menurut Aminullah, walaupun tidak tertutup kemungkinan dimahmilkan, sanksi itu merupakan tamparan yang keras bagi ketiganya. Sebab, bagi seorang prajurit kehormatan di atas segala-galanya. Sanksi ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bisa dihormati.

"Tanpa dimahmilkan pun, sanksi itu sangat memukul sehab diambil dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira. Kehormatan harus dibela sampai mati. Dengan jatuhnya sanksi itu maka bisa dikatakan, ketiga orang itu tidak lagi dihargai karir militernya. Ini yang mepukulnya," kata Amin.

Ini juga merupakan tamparan bagi ABRI sebab, pertama terbaliknya sampai salah mengalisasi perintah-dari atasannya. "Sikap dan kehormatan prajurit dipertaruhkan di situ. Jika pertama saja, ansikan di antaranya perwira tinggi, salah menganalisa perintah, bagaimana mungkin bisa dihargainya lebih dari tingkatan di bawahnya," katanya lagi.

Ini berarti, lanjut Aminullah, Pangab menjatuhkan sanksi itu dengan berat hati sebab mencoreng nama ABRI secara keseluruhan. Karena itu, pada masa yang akan datang, pimpinan ABRI sebaiknya melakukan perbaikan-perbaikan dalam tatanan dan struktur pemberian pertimbangan sehingga kesalahan seperti saat ini bisa diperkecil.

Dijelaskannya, kejadian ini memperlihatkan kesalahan sejak lama bahwa ABRI sudah tidak melaksanakan amanat Sumpah Prajurit dan Saptamarga. Dua doktrin ABRI itu jelas jelas menggariskan bahwa kesetiaan ABRI itu hanya kepada bangsa dan negara.

"Terlihat sekali bahwa ABRI selama ini hanya menjadi alat rejim yang memerintah. Begitu rejim itu represif maka ABRI pun represif. Kita harapkan ABRI mengubah orientasi, yaitu hanya setia kepada bangsa dan negara. Serahkan kepada pemerintah hanya diberikan, jika pemerintah itu setia kepada bangsa dan negara," katanya.

ABRI mestinya mempunyai motto: *My loyalty to everything ends, when my loyalty to country begins* (kesetiaanku kepada siapa pun berakhir, begitu kesetiaanku kepada negara mulai). Motto itu seharusnya sudah tidak ada lagi. Ini yang harus dipejelas," kata Aminullah lagi.

Ditambahkan pula, dengan jatuhnya sanksi itu tidak berarti ketiganya tidak bisa dijukan ke Mahkamah Militer. "Seperti yang dikatakan Pangab, jika Mahmil menemukan data dalam persidangan 10 anggota Kopassus bahwa ketiganya terlibat maka Mahmil untuk mereka mungkin saja digelar," demikian Aminullah Ibrahim.

Pertimbangan matang

Sedangkan Lukman Harun hanya berkomentar singkat. Apa pun keputusan yang diambil Pangab terhadap ketiga perwira tersebut, tentunya salah melalui pertimbangan-pertimbangan yang mang dan lama.

"Karena itu, berarti keputusan itu adalah yang terbaik. Saya mendukung langkah yang diambil itu. Kita harapkan, langkah itu bisa memperbaiki keadaan. Hanya itu kita rasakan sangat berat," kata Wakil Ketua FP Muhammadiyah itu.

Ditambahkannya, biarkanlah ABRI menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Kita harapkan, dengan demikian suasana aman bisa terlaksana, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah lain yang juga menuntut penanganan segera.

Tak Searah

Sementara Koordinator Kontras Indonesia

BERSAMBUNG KE HAL. 7 KOL. 3

Ismael Hassan: Tarbiyah Islamiyah Tetap Dukung dan Menangkan Golkar

Jakarta, Pelita

Meskipun dalam alam reformasi ini bermunculan partai-partai politik, tetapi Tarbiyah Islamiyah sampai kini tidak goyah, akan tetap menyalurkan aspirasinya ke Golkar.

"Tarbiyah tidak akan menjadi partai politik," kata Ketua Umum DPP Tarbiyah Islamiyah H Ismael Hassan, seusai diterima Menteri Agama H Malik Fadjar di Departemen Agama, Senin (24/8). DPP Tarbiyah akan diterima Menag sehubungan akan diadakan Muktamar yang akan dibuka oleh Presiden Habibie. Muktamar dijadwalkan berlangsung di Wisma Jayanya Cipayung, Bogor pada 9-12 Oktober 1998. Pengurus DPP Tarbiyah lainnya adalah H Basri Bermanda, KH Zainul Abidin Adjim, H Azmi Abubhmsil, Ny Nelly Hasan, Hj Charuni.

Menurut Ismael Hassan, Tarbiyah lahir di Sumatera sejak Pemilu 1971 mendukung Golkar. Kemudian pada Pemilu berikutnya tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. "Aspirasi anggota Tarbiyah ke Golkar, sampai sekarang tidak berubah yaitu memenangkan Golkar."

Tarbiyah Islamiyah, lanjut Ismael, akan tetap memegang ikrarnya, kembali kepada khittah tahun 1928, yang berarti akan terus berkecimpung pada pendidikan, dakwah Islamiyah, dan sosial.

Sementara Menteri Agama H Malik Fadjar mengatakan organisasi yang khusus berkecimpung dalam bidang pendidikan, alangkah baiknya tidak lupa pada pendidikan. "Pendidikan itu sangat penting. Sumber daya manusia sendiri akan menjadi dewasa yang sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Jadi jangan sampai dilupakan," ujar Ismael Hassan menirukan pernyataan Menag.

Tak ada tawaran

Ditanya tentang adanya tawaran dari partai lain, Ismael Hassan menjelaskan, hingga saat ini tidak ada yang menawarkan Tarbiyah untuk mendukung aspirasinya. "Mereka tahu kemana aspirasi Tarbiyah sejak dulu. Kita memang sejak dulu bahnya pendidikan, dakwah, dan sosial. Sedangkan aspirasi politiknya ke Golkar," ucap Ismael sambil menambahkan anggota Tarbiyah kini sekitar 12 juta orang. Kepengurusan ada di 26 Propinsi kecuali Timtim.

"Ismael menjelaskan, walaupun Muktamar akan berlangsung Oktober, tetapi belum ada calon ketua umum yang muncul ke permukaan. "Kita akan mengadakan reformasi dalam memilih kepengurusan. Selama ini sistem formatur, tapi nanti bisa saja sistem pemilihan langsung."

Dalam pemilihan ketua umum nanti, Ismael tidak bersedia dipilih lagi. "Saya kan sudah dua kali jadi ketua umum. Ada aturan di Tarbiyah bahwa ketua umum hanya dua periode. Saya juga membuat ketentuan itu."

Ismael Hassan mengakui bahwa dalam kepengurusannya masih jauh dari harapan anggota. Hal tersebutkan masih kurangnya konsolidasi bidang organisasi. Belum semua Daerah Tingkat II terjangkau. "Terutama konsolidasi dibidang pendidikan, dakwah dan sosial yang lahir dari Tarbiyah lahir dari bawah. Ditumbuhkan oleh ulama-ulama setempat, kemudian berguru pada Tarbiyah, hal-hal semacam inilah yang belum kita dapatkan secara maksimal." **(dik)**

Tim Komnas HAM Temukan Sembilan Kuburan Massal

781 Tewas Ditembak dan Dianiaya 163 Orang Masih Hilang di Aceh

...kta, Pelita
...nyarakat Aceh yang menyaksikan ...temuan Tim Komnas HAM atas ...ya pelanggaran HAM di provinsi ...dikarakan tidak melakukan balas ...an kepada petugas keamanan ...pun para GPK. Sebab, dengan ...akan balas dendam tidak akan ...pkan masalah yang dihadapi.
...egasan tersebut dikemukakan ...ruddin Lapa yang mewakili Tim ...as HAM untuk mengusut kasus ...saat menyampaikan hasil pe... ...asannya, di Kantor Komnas HAM ...ta, Senin (24/8). Lapa yang baru ...g dari kunjungan ke Aceh ini, ...mpingi Koesparmono Irsan, M ...dan Soegiri. Juga hadir anggota ...as HAM Bambang W Suharto.
...nurut Lapa, balas dendam akan ...dai buruk bagi masyarakat Aceh. ...gi cara tersebut tidak akan ...na oleh Tuhan.

Menurutnya, saat ini Tim Komnas HAM menemita kepada unsur-unsur pemerintah dan aparat keamanan untuk segera menelusuri kembali dengan seksama beberapa orang yang masih ditahan dalam rangka operasi militer di Aceh dan jika mereka tak terbukti melakukan tindak pidana segera dibebaskan. "Sebab sejauh ini sejumlah ihu melaporkan *suami* atau anaknya masih ditahan tanpa alasan."

Tim Komnas HAM usai mengadakan pertemuan dengan Bupati Aceh Utara, Wakil gubernur dan Dandim Aceh Utara mewakili Danrem, juga mupnida setempat dan para pimpinan DPRD serta pejabat lainnya juga meminta agar Pemda DI Aceh segera memberi bantuan darurat kepada para janda dan anak yatim serta anggota masyarakat yang menjadi korban agar mereka memperoleh sumber hidup dan dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Kepala pihak kepolisian diharapkan para pelaper palsu (*fusuk*) diusut sesegainya lewat jalur hukum. Sejauh ini, menurut Lapa, pemda telah menangani untuk membicarakan masalah tersebut lewat kepada gubernur.

102 kasus perkosaan

Dalam penjelasan rinci mengenai peristiwa Aceh dari tahun 1989 sampai Agustus 1998, Lapa mengungkapkan terdapat 781 orang yang meninggal akibat tindak kekerasan berupa penembakan dan penganiayaan, sedangkan 163 orang hilang dan belum ada beritanya sampai sekarang.

Sedangkan untuk wilayah tersebut, Tim Komnas HAM juga mencatat ada 368 orang dianiaya dan sebanyak 7.000 janda ukibat suaminya meninggal dan hilang. Yang paling mengejutkan adalah adanya kasus pemerkosaan sebanyak

BERSAMBUNG KE HAL. 9 KOL. 6

Tanggapan Atas Pemboman Afghanistan dan Sudan

Tindakan AS Dinilai Barbar dan Biadab

Jakarta, Pelita

Ketua Komite Solidaritas Dunia Islam Lukman Harun mengecam keras serangan AS terhadap Sudan dan Afghanistan yang dianggapnya dilakukan secara gegabah dan tidak memperhangkan hari nurani masyarakat internasional.

"Dunia Islam harus mengutuk serangan itu sebagai tindakan barbar yang dilupkan kepada dua negara berdaulat. Tindakan AS itu merupakan agresi biadab," kata Lukman kepada *Pelita* di Jakarta, Senin.

Tidak ada bukti bahwa kedua negara itu telah melakukan serangan terhadap Kedubes AS di Kenya dan Tanzania. Serangan itu sangat membabi-buta dan ditujukan kepada sasaran sipil, yaitu pabrik obat di Sudan.

"Jika pun ada bukti, mestinya AS melakukan tindakan secara benar, yaitu meminta Dewan Keamanan PBB untuk bersidang memutuskan. Bukan dengan jalan semena-mena untuk menunjukkan bahwa ia bisa berbuat apa pun," kata anggota Komisi II DPR itu.

Tindakan AS itu jelas-jelas melanggar wanan terhadap AS harus dilakukan oleh kedua negara itu. Sebab, menurut dia, telah terjadi pelanggaran kedaulatan.

"Walau pun kita tahu bahwa pengeruh AS terhadap badan dunia itu sangat besar dan tidak akan mungkin keluar keputusan karena lampir pasti diveto AS, tetapi dengan mengirimkan DK bersidang berarti kedua negara itu sudah melawan," kata Wakil Ketua PP Muhammadiyah itu.

Ia sependapat dengan pandangan umum, serangan itu dilakukan Clinton untuk mengalihkan pandangan rakyat nya atas skandal seks yang dilakukannya. "Jelas ini merupakan cara kuji dan tidak patut dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan negara adidaya," katanya lagi.

Harus dikecam

Sedangkan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Zambarir AR mengatakan, tindakan AS itu merupakan sesatau yang keji dan tidak bisa dibenarkan dalam keadaan bagaimana pun juga. Karena itu dunia harus mengecamnya.

Pelita Hikmah

Allah ta'ala berfirman : "Hendaklah orang yang ampu menberi nafkah menurut kemampuannya. n orang yang disempitkan rezkinya hendaklah emberi nafkah, dari harta yang diberikan Allah padanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan apa yang telah Allah berikan padanya".

Jadwal Shalat

Jakarta dan Sekitarnya

Selasa, 25 Agustus 1998

Subuh	04.40
Syuruk	11.55
Dzuhur	18.18
Ashar	17.57
Maghrib	19.07

Rabu, 26 Agustus 1998

Subuh	04.40

Harian Pelita
25 Agustus 1998

Jawa Pos
26 Agustus 1998

Jawa Pos, Rabu Pon 26 Agustus 1998 LAPORAN KHUSUS Halaman 3

Membunuh Satu Matahari Bernama Prabowo

Untung Saya Tak Diculik

Tak Dipecat, tapi Diberhentikan dengan Hormat

"Bukti-bukti untuk menyeret Prabowo ke mahmil sudah cukup kuat … Omong kosong kalau Prabowo masih punya kekuatan untuk melakukan perlawanan."

| ***Mayjen TNI (Purn) Samsuddin**, Anggota Komnas HAM, Anggota Kopassus, dan Mantan Pangdam X/Lambung Mangkurat, dalam Jawa Pos ("Membunuh Satu Matahari Bernama Prabowo", 26 Agustus 1998)*

Jawa Pos
26 Agustus 1998

"Karena ini menyangkut masalah pidana, mestinya juga berkait dengan itu. Saya menilai, ya boleh dibilang (sekarang) masih setengah-setengah," ujar Edi Sudradjat menanggapi keputusan Pangab memecat Prabowo dan menonjobkan Muchdi Pr serta Chairawan.

Edi menyatakan, DKP memang hanya berwenang memberikan rekomendasi sanksi administratif. Namun, karena tindakan Prabowo cs adalah perbuatan pidana, maka setelah terkena sanksi administratif, yang bersangkutan harus diajukan ke pengadilan.

| ***Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat**, Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), dalam Jawa Pos ("Prabowo Cs Akan Diperiksa Puspom Lagi", 26 Agustus 1998)*

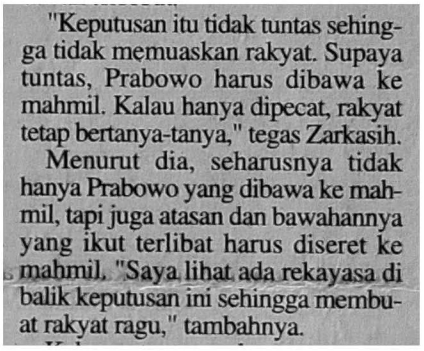

"Keputusan itu tidak tuntas sehingga tidak memuaskan rakyat. Supaya tuntas, Prabowo harus dibawa ke mahmil. Kalau hanya dipecat, rakyat tetap bertanya-tanya," tegas Zarkasih.

Menurut dia, seharusnya tidak hanya Prabowo yang dibawa ke mahmil, tapi juga atasan dan bawahannya yang ikut terlibat harus diseret ke mahmil. "Saya lihat ada rekayasa di balik keputusan ini sehingga membuat rakyat ragu," tambahnya.

| ***Zarkasih Nur,*** *Ketua Fraksi Partai Persatuan DPR, dalam Pikiran Rakyat ("Pangab: Prabowo Diberhentikan", 25 Agustus 1998)*

Saat ini masyarakat belum tahu sejauh mana mereka terlibat dalam kasus penculikan. Meskipun telah dijatuhi sanksi administratif tetapi itu dari segi etik keperwiraannya sedangkan dari pidananya belum jelas.

Pakar hukum pidana ini berpendapat karena Prabowo sudah menjadi warga sipil maka peradilannya dapat diajukan ke pengadilan negeri sedangkan lainnya ke Mahkamah Militer. "Kalau sipil hirarki kepemimpinan sudah tidak ada dan struktur organisasi militernya sudah tidak ada," kata Loebby.

| ***Prof. Dr. Loebby Loqman****, Pakar Hukum Pidana, dalam Pos Kota ("Loebby Loqman: Prabowo bisa diajukan ke pengadilan umum", 26 Agustus 1998)*

LOEBBY LUKMAN: PRABOWO ... (sambungan dari hal 1)

dan Kol TNI Chairawan. Kasus ini tetap harus dilanjutkan ke pengadilan sehingga akan terbukti siapa yang salah dan yang terlibat.

Demikian rangkuman pendapat dari pakar hukum pidana Prof Dr Loebby Loqman SH, Ketua PAN Amien Rais, Mensesneg Akbar Tanjung dan beberapa keluarga korban penculikan.

Menurut Loebby Loqman, saat ini masyarakat masih belum puas karena proses penyelesaiannya terkesan tidak terbuka untuk itu seharusnya dilanjutkan ke pengadilan. "Apakah nanti mereka bersalah atau tidak dan ada pihak lain yang terkait masyarakat akan tahu karena prosesnya terbuka," ujarnya, kemarin kepada wartawan.

Saat ini masyarakat belum tahu sejauh mana mereka terlibat dalam kasus penculikan. Meskipun telah dijatuhi sanksi administratif tetapi itu dari segi etik keperwiraannya sedangkan dari pidananya belum jelas.

Pakar hukum pidana ini berpendapat karena Prabowo sudah menjadi warga sipil maka peradilannya dapat diajukan ke pengadilan negeri sedangkan lainnya ke Mahkamah Militer. "Kalau sipil hirarki kepemimpinan sudah tidak ada dan struktur organisasi militernya sudah tidak ada," kata Loebby.

Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Akbar Tanjung, berpendapat masyarakat tetap menginginkan penyelesaian kasus penculikan aktivis oleh oknum ABRI digelar di pengadilan secara terbuka.

"Masyarakat ingin mengetahui proses bagi mereka yang tertuduh itu diikutinya di Mahmil secara terbuka," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, kemarin.

Menurut Akbar, bila nanti kasus itu sampai ke Mahmil semua akan terbuka sehingga masyarakat bisa mengikutinya. Apalagi dalam semangat keterbukaan yang saat ini sedang dikembangkan.

"Nanti semua bisa diketahui termasuk tempat-tempat penculikan itu sehingga kita juga bisa membuktikan adanya keterbukaan itu," tambahnya.

Kemungkinan adanya tekanan dalam penyelesaian kasus ini, Akbar mengatakan mestinya hal itu tak ada lagi. Hendaknya semua menyadari dalam semangat keterbukaan ini tak perlu ada kekhawatiran untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap sebagai peristiwa sebenarnya.

"Mereka bisa mengungkapkan dan mestinya secara kesatria harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu," ujarnya.

Demikian halnya Amien Rais, juga tidak puas atas penyelesaian penculikan karena belum transparan. "Dengan hanya sanksi administratif seolah-olah masalahnya sudah selesai dan menjadi tanggung jawab Prabowo," tegasnya.

Menurut ketua Partai Amanat Nasional cara seperti ini tidak mendidik dan sangat mengecewakan masyarakat. Selain itu terkesan ada informasi yang disembunyikan dan supaya Prabowo tidak berkata banyak.

Sementara itu Menteri Kehakiman Muladi berpendapat dalam penyelesaian kasus ini hendaknya dilakukan seadil-adilnya. Masyarakat harus sabar menunggu karena prosesnya tidak hanya berhenti sampai di sini karena ini kasus besar maka perlu waktu.

Ketika disinggung apakah nantinya mereka akan diajukan ke Mahkamah Militer atau pengadilan negeri, Muladi menyatakan kalau sudah menjadi sipil tentunya tunduk kepada pengadilan negeri. "Tetapi saya belum jelas betul aturannya apakah nantinya mereka akan diajukan ke Mahkamah Militer atau pengadilan biasa," katanya.

Komite Solidaritas Muslim (KSM) menyatakan ABRI harus menegakkan keadilan tanpa pandang bulu yang diterima seluruh masyarakat sebagai syarat mengembalikan kepercayaan rakyat kepada ABRI untuk itu perlu segera membawa mereka ke pengadilan.

Tidak rela sanksi administrasi

"Rasanya kami tak rela jika Prabowo hanya dikenakan sanksi administrasi berupa pemecatan. Seharusnya Pak Wiranto (Menhamkam/Pangab, red) berani mengajukan yang bersangkutan ke Mahkamah Militer," kata Ny. Tuti, ibunda Yani Afri, salah seorang korban penculikan yang belum kembali, kemarin.

Menurutnya, pemecatan tersebut tidak seimbang dengan perbuatan Prabowo yang telah menculik anaknya pada bulan Mei 97 lalu. "Apa yang dilakukan penculik sangat kejam karena tidak memperhatikan keluarga yang ditinggal seperti istri dan anaknya."

Sementara itu keluarga Noval Alkatiri mengaku belum terpikir apakah akan menuntut Prabowo (yang kini berstatus orang sipil) untuk diajukan ke kepolisian. "Terserah, hukum yang akan bicara. Kami hanya minta kembalikan dulu 14 orang yang diculik," kata Eri, adik kandung Noval yang sejak 15 bulan lalu tak ketahuan rimbanya.

Eri menilai, tindakan Wiranto yang belum juga memberi kepastian nasib korban penculikan terkesan setengah-setengah, meski pemecatan telah dilakukan terhadap mantan Danjen Kopassus ini. "Lalu, bagaimana nasib 14 orang yang diculik ?"

Ia tak peduli, dengan pemecatan Prabowo atau kemungkinan menantu mantan Presiden Soeharto bakal dimahmilkan. Baginya, hukum yang akan menentukan nasib pelaku penculikan.

Kebesaran Tuhan

Sementara itu, aktris Eva Arnaz mengatakan, pemecatan Prabowo merupakan langkah awal yang baik bagi ABRI untuk mengusut kasus penculikan. Dirinya mengaku tak puas dengan keputusan Pangab yang tak langsung memahmilkan Prabowo.

Dirinya tetap menuntut Pangab untuk mengembalikan 14 orang yang belum kembali termasuk suaminya Deddy Hamdun. Senada dengan keluarga Noval, Eva belum terpikir untuk mengadukan perbuatan Prabowo ke kepolisian. "Sebagai rakyat kecil saya percaya pada Pak Wiranto untuk menuntaskan kasus ini," katanya. (us/ta/ba/yo/vy/10)

Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Akbar Tanjung, berpendapat masyarakat tetap menginginkan penyelesaian kasus penculikan aktivis oleh oknum ABRI digelar di pengadilan secara terbuka.

"Masyarakat ingin mengetahui proses bagi mereka yang tertuduh itu diikutinya di Mahmil secara terbuka," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, kemarin.

Menurut Akbar, bila nanti kasus itu sampai ke Mahmil semua akan terbuka sehingga masyarakat bisa mengikutinya. Apalagi dalam semangat keterbukaan yang saat ini sedang dikembangkan.

| ***Akbar Tanjung**, Menteri Sekretaris Negara, dalam Pos Kota ("Loebby Loqman: Prabowo bisa diajukan ke pengadilan umum", 26 Agustus 1998).*

"Rasanya kami tak rela jika Prabowo hanya dikenai sanksi administrasi berupa pemecatan. Seharusnya Pak Wiranto berani mengajukan yang bersangkutan ke Mahkamah Militer …. Apa yang dilakukan penculik sangat kejam karena tidak memperhatikan keluarga yang ditinggal seperti istri dan anaknya."

| ***Nyonya Tuti**, Ibunda Yani Afri, Korban Penculikan yang Belum Kembali, dalam Pos Kota ("Loebby Loqman: Prabowo bisa diajukan ke pengadilan umum", 26 Agustus 1998)*

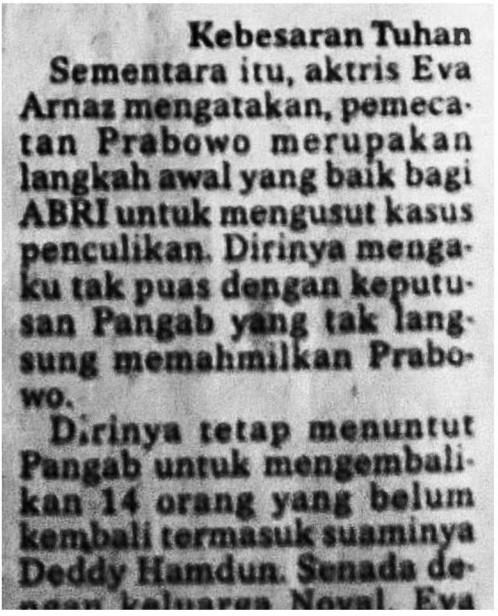

Kebesaran Tuhan

Sementara itu, aktris Eva Arnaz mengatakan, pemecatan Prabowo merupakan langkah awal yang baik bagi ABRI untuk mengusut kasus penculikan. Dirinya mengaku tak puas dengan keputusan Pangab yang tak langsung memahmilkan Prabowo.

Dirinya tetap menuntut Pangab untuk mengembalikan 14 orang yang belum kembali termasuk suaminya Deddy Hamdun. Senada de-

| ***Eva Arnaz,** Aktris dan Istri dari Deddy Omar Hamdun, Korban Penculikan yang Belum Kembali, dalam Pos Kota ("Loebby Loqman: Prabowo bisa diajukan ke pengadilan umum", 26 Agustus 1998)*

Merdeka
Reformasi Total untuk Rakyat
SABTU SIANG PAHING, 25 AGUSTUS 1998/30 RABIULAKHIR 1419 H
JAKARTA Rp 1.400,-

Ketua DKP Jenderal Subagyo HS:

"Prabowo Menculik Sembilan Aktivis"

Korban Kebiadaban di Aceh Pantauan Komnas HAM

Jakarta, Selasa, Merdeka

Tim Komnas HAM yang melakukan pemantauan terhadap kasus pelanggaran HAM selama diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh, yang kembali hari Minggu (23/8), membawa "ole-ole" mengerikan. Tim yang terdiri dari Sekjen Komnas Baharuddin Lopa, Koesparmono Irsan, M Salim dan Soegiri ini membawa data soal tindak kekerasan/kebiadaban di Aceh sejak tahun 1989 hingga Agustus 1998.

Hasil pantauan itu mereka ungkapkan kepada pers, di Jakarta, kemarin. Menurut Baharuddin Lopa, selama melakukan penindasan di lokasi kejadian (20-22/8), Tim Komnas menemukan beberapa modus tindak kebiadaban dengan puluhan ribu korbannya meliputi: meninggal karena ditembak atau disiksa, orang hilang, janda akibat suami meninggal, anak yatim, bangunan rumah dibakar, dan perkerkosaan (Lihat Tabel)

"Tetapi ini baru data sementara yang kami dapatkan selama kami di sana. Masih ada kemungkinan akan muncul data-data baru lainnya yang akan memperkaya temuan-temuan ini," kata Lopa yang didampingi oleh anggota Komnas HAM Bambang W Soehanto di samping juga anggota lainnya.

Disebutkan pula, terdapat sembilan kuburan massal yang adalah wilayah Aceh, hal tersebut berdasarkan catatan dari Forum LSM Aceh dan juga data-data dari berbagai pihak seperti masyarakat Aceh itu sendiri. "Tetapi ini bebatan temuasuk kuburan perorangan yang banyak bertebaran di berbagai desa," tegasnya.

Menurut Lopa, selama mereka menangani lokasi di Aceh, ada lima kuburan massal yang telah dibongkar oleh masyarakat atas prakarsa dan kesaksian Tim Komnas HAM.

"Kami melakukan pembongkaran kuburan massal tanggal 21 Agustus hingga tanggal 22 Agustus. Dengan disaksikan oleh ketua Pesvakum Fenuri LSM, Ir Abdul Gani Nurdin, aparat kepolisian, anggota-anggota marinir wakil Perida. Selain itu juga disaksikan oleh dokter Feervwik Rumah Sakit Pengadil, Polda Sumatera Utara, Polda Aceh dan dokter Puskesmas setempat seperti Kuala Tari dan Daya Tunsima," jelasnya.

Kelima lokasi kuburan massal tersebut adalah Kuala Tari, Kembang Tanjung Kab Pidie yang ditemukan dua jenazah. Menurut masyarakat di tempat tersebut dikuburkan beberapa puluh jenazah dalam satu lubang. Pembongkaran dilakukan 21 Agustus, pukul 10.00 sampai 14.00 siang.

Rusuh Gradong (tempat penahanan dan pengintaiyaan), Bili Aseng, Kecamatan Gelumpang Tiga, Kab Pidie ditemukan sejumlah tulang-tulang jari tangan manusia yang terdiri dua jenazah, dikubur dalam satu lubang. Pembongkaran kuburan massal tersebut, pada 21 Agustus pukul 13.00 sampai 15.00 siwe.

Sementara pada 22 Agustus pukul 17.30-19.00 di Bukit Sentang, kecamatan Lokhseumo kabupaten Aceh Utara, dalam satu lubang ditemukan 12 tulang paha, 5 tengkorak, 4 celana panjang, 2 celana dalam, 6 pasang tulang tangan yang masih terikat dalam tali rafia dan beberapa tulang lain yang berserakan.

Sesuai informasi dari masyarakat, tersebut dari orang yang dipaksa untuk mengubur, dalam satu lubang biasanya ditempati

(Bersambung ke halaman 8 kolom 1)

1. Meninggal akibat tindak kekerasan	781 orang
2. Hilang	163 orang
3. Dianiaya	368 orang
4. Janda	3.000 orang
5. Anak yatim	20.000 orang
6. Bangunan yang dibakar	102 buah
7. Perkerkosaan	102 kasus/orang

Pantomim Anak Bangsa yang merefleksikan korban-korban berbagai tindak kekerasan di tanah air,-digelar di Plaza Bapindo, Jakarta, kemar

Jadi, Apa Kesalahan Prabowo

ABRI kembali pada sesepuhan sesar ABRI mengenai pemberhentian Letjen Prabowo-Subianto dari dinas ABRI karena dianggap salah satu kasus penculikan sejumlah aktivis. Sebagaimana diketahui Panglima Kodam Jaya/Jakarta Raya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin telah mengumumkan bahwa Prabowo hanya dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dari dinas aktif ABRI.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Subagyo HS juga menyatakan bahwa Prabowo hanya dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dari dinas aktif ABRI.

Pernyataan Subagyo HS ini disampaikan kepada pers di Mabes ABRI Jalan Merdeka Barat, usai memimpin rapat pimpinan (Rapim) Angkatan Darat di Markas Komando Strategi Angkatan Darat (Mako Strad) Bandung, Jawa Barat, Senin (24/8) pukul 13.30 WIB.

Subagyo HS menyatakan, Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Kopassus, telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pangkostrad sejak Senin 11 Agustus 1998 lalu. Pembebastugasan ini berkaitan dengan kasus penculikan sejumlah aktivis yang terjadi pada bulan Maret dan April 1998.

Subagyo HS menjelaskan, pembebastugasan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad merupakan tindakan yang diambil oleh Dewan Kehormatan Perwira (Wanhor) ABRI yang diketuai oleh Subagyo HS dan beranggotakan 9 jenderal lainnya. Sidang Wanhor ini berlangsung selama 3 hari, yakni sejak Jumat (21/8) hingga Minggu (23/8).

Dalam sidang Wanhor tersebut, Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Kopassus, diperiksa sebagai terperiksa. Sedangkan yang bertindak sebagai pemeriksa adalah Letjen Fachrul Razi, Letjen Subagyo HS, Letjen Agum Gumelar, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Djamari Chaniago, Letjen Arie J Kumaat, Letjen Soeyono, Letjen Yusuf Kartanegara, dan Letjen Sutiyoso.

Subagyo HS menyatakan, Prabowo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pangkostrad karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat dalam bidang kepemimpinan. Prabowo dianggap telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik perwira.

Prabowo dianggap telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik perwira, karena telah memerintahkan anak buahnya untuk menculik sejumlah aktivis yang dituduh telah melakukan kegiatan subversif.

Tapi, Subagyo HS menyatakan, Prabowo tidak dipecat dari dinas ketentaraan. Prabowo hanya dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pangkostrad. Prabowo masih tetap menyandang status sebagai perwira aktif ABRI.

Subagyo HS menyatakan, Prabowo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pangkostrad karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat dalam bidang kepemimpinan. Prabowo dianggap telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik perwira, karena telah memerintahkan anak buahnya untuk menculik sejumlah aktivis yang dituduh telah melakukan kegiatan subversif.

Tapi, Subagyo HS menyatakan, Prabowo tidak dipecat dari dinas ketentaraan. Prabowo hanya dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pangkostrad. Prabowo masih tetap menyandang status sebagai perwira aktif ABRI.

Subagyo HS menyatakan, Prabowo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pangkostrad karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat dalam bidang kepemimpinan. Prabowo dianggap telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik perwira, karena telah memerintahkan anak buahnya untuk menculik sejumlah aktivis yang dituduh telah melakukan kegiatan subversif.

Tapi, Subagyo HS menyatakan, Prabowo tidak dipecat dari dinas ketentaraan. Prabowo hanya dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pangkostrad. Prabowo masih tetap menyandang status sebagai perwira aktif ABRI.

Subagyo HS menyatakan, Prabowo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pangkostrad karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat dalam bidang kepemimpinan. Prabowo dianggap telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik perwira, karena telah memerintahkan anak buahnya untuk menculik sejumlah aktivis yang dituduh telah melakukan kegiatan subversif.

Tapi, Subagyo HS menyatakan, Prabowo tidak dipecat dari dinas ketentaraan. Prabowo hanya dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pangkostrad. Prabowo masih tetap menyandang status sebagai perwira aktif ABRI.

▲ Massa Pendukung Mega Lakukan Long March

Gambar Soerjadi Disobek-sobek

Palu, Selasa, Merdeka

Seharl mengelang pembukaan Kongres PDI pimpinan Soerjadi, ratusan massa pendukung setia Megawati membikin "puma" kota Palu kemarin. Mereka melakukan aksi *long march* di dalam kota.

Aksi yang dimulai di depan kampus Untad Palu di Setia Budi-Bumi Nyiur Ini, bergerak pada pukul 11.00 hingga pukul 12.00 Wita. Massa pendukung Megawati dari berbagai lalu-empok ini dengan membawa beberapa poster, spanduk dan sebatang yang menghujat keberadaan pimpinan DPP PDI hasil kongres Medan, khususnya meminta pertanggungjawaban Soerjadi Cs dalam kasus 27 Juli.

Selain meminta pertanggungjawaban Soerjadi Cs dalam kasus 27 Juli, massa pro Mega itu juga berikad menggagalkan pelaksanaan Kongres V PDI di Wisma Haji Transit Palu.

Beberapa spanduk yang mencolok baik ukuran besar maupun sedang berwarna merah itu antara lain bertuliskan: "Tolak Kongres PDI Soerjadi," "Adili Dalang 27 Juli," dan "Soerjadi Cs Bertobatlah."

Sebelum melakukan aksi *long march*, massa pendukung Megawati sempat merayap pores jalan depan kampus Untad. Akibatnya, warga masyarakat tidak dapat melewati jalan tersebut dan memilih jalan alternatif yakni Jalan Tadulako, Jalan Otto Iskandar Dinata dan Jalan Hayamuru.

Penutupan jalan ini tidak berlangsung lama lantaran Kapolres Donggala, Letkol Adrial Adnan meminta kepada massa pendukung Megawati untuk membuka jalan bagi masyarakat. Permintaan itu dipenuhi, malah di antara mereka memelak bahkan membantu Kapolres sambil membuka jalan.

Tepat pukul 11.00 Wita massa pendukung Mega mulai bergerak ke arah Utara dan langsung menuju arah barat Jalan S Parman. Massa makin bertambah saat berada dipersimpangan Jalan S Parman, Jalan Sammalangi dan Jalan Suharso di mana dari arah Jalan Suharso puluhan massa pendukung Megawati dari Ujungpadang bergabung. Bukan ini saja, tampak pula beberapa pelajar SMU berbaur dengan massa Pro Mega tersebut.

Dalam long march tersebut, massa pro Mega itu sempat dihinkule dua kali oleh pasukan Dalmas

Massa pro Mega dalam suatu unjuk rasa.

buik, dari Polda Sulteng dan Polres Donggala. Dibokalderya mereka bantaran lagia melintasi arah pertokoan di Jalan Gadjah Mada.

Aksi arak-arakan mereka juga ditokoki di persimpangan Jalan Wahid Hasyim dan Watukanjal. Mereka hendak diarahkan ke Jalan Diponegoro. Namun, massa pro Mega itu nekat menerobos masuk ke Jalan Watukanjal. Tepat pukul 12.00 Wita massa tiktinnya berada di depan Wisma Haji Transit Palu, sempat pelaksanaan Kongres V PDI pimpinan Soerjadi.

Yang menarik dari arak-arakan massa pendukung Megawati ini, laniaran baru pertama kalinya melintasi Jalan Hasanuddin dan Sis Aljufri. Sebab, pores Jalan Hasanuddin dan Gadjah Mada itu merupakan lintasan "tabu" bagi pengunjuk rasa. Tak pelak lagi, massa yang melintasi sepanjang Jalan Hasanuddin hingga ke Jalan Sis Aljufri itu mendapat perhatian warga setempat.

Selain itu, selama melakukan *long march* para pendukung Megawati ini meneriakkan yel-yel yang bernada menghujat Soerjadi Cs. Bahkan di antara mereka ada yang menyebek beberapa gambar Soerjadi, yang terdapat pada poster bersama kertas folio.

Aksi penyobekan ini mereka lakukan dengan nada emosi, mencerminkan tekad untuk menggagalkan Kongres PDI yang digelar di Palu, yang rencananya secara resmi dibuka Mendagri Syarwan Hamid hari ini.(JPNN)

Tegakah Habibie Periksa Soeharto

"Dia Sangat Berutang Budi"

Habibie dalam suatu kesempatan bersama Soeharto.

Jakarta, Selasa, Merdeka

Seandainya ada Tap MPR yang menugaskan presiden untuk memeriksa bekas presiden Soeharto, mungkinkah Presiden Habibie bisa melaksanakannya?

Pertanyaan ini membuncah jawaban serius dari pakar hukum pidana Prof Dr JE Sahetapy dan Prof Dr Dimyati Hartono yang berpendapat bahwa rencana FPP MPR untuk mengajukan Tap tersebut memang harus didukung oleh fraksi lainnya di MPR, hanya soalnya Habibie tampaknya tidak mungkin melaksanakan Tap tersebut.

"Rencana FPP itu harus kita dukung, cuma saya tidak yakin pada ketulusan Habibie untuk melaksanakan itu, sebab selama 100 hari jadi presiden kelihatan sekali dia masih melakukan pola lama dari rezim Soeharto," kilanya kepada *Merdeka* di Jakarta, kemarin.

Diteknakan, dirinya tidak pesimis de-

tidak lebar dari mulutnya. p
teran menunggu. Tapi tidak
pagar Sahetapy lagi.

Sebelumnya dibentukan
MPR Pasal Bassir menya
sannya untuk mengajukan
menggiakan kepada pres
meriksa Soeharto selama
presiden dari tanggal 11 h
Maret 1998. Usulan itu s
kan dalam Sidang Istime
November mendatang.

"Kini tidak membantah
mengajukan Tap terseb
mati-matin, kita tertus, se
li," tegas Bassir.(*Merde*

Sementara itu kalangan
Utusan Daerah (FUD) M.
Soeharto menyampaika
bawahan sehingga pemba
Istimewa MPR, menda
pada, agar Presiden BJ

NATUR
PENCUCI RAMBUT
Terbuat dari Bahan Alami
Tidak Pusing
Tidak Puas
Notes Dr. Clenik
Pengadilan
Jangan sampai dinyatakan pailit, tapi masih bisa nafi Mercy dan foya-foya di mancanegara.

FEMMY PERMATASARI

Jangan-jangan Saya Dikerjain ...

Merdeka
25 Agustus 1998

Kalau Gagal, Ya Sedih, Kecewa ...

BAGAIMANA perasaan seorang prajurit kalau kariernya terputus di tengah jalan? Di bawah ini penuturan singkat para perwira ABRI dan senior ABRI, yang dihubungi *Kompas* secara terpisah, Selasa (25/8) di Jakarta. Intinya, mereka merasa kecewa, prihatin, sedih dan merasa seperti seorang yang gagal. Keputusan itu bisa tidak menjadi masalah, kalau yang bersangkutan menerima kesalahannya. Tapi kalau tidak? Ya, kecewa. Berikut penuturan mereka:

Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Arismunandar:

arb

Wah, jelas *nggak* senang. Tidak bahagia. Tapi sebagai satria, ya mesti kecewa. Tanya al Pak Prabowo sajalah. S

KSAD Jenderal TNI Subagyo HS:

ed

Sudah jelas orang kalau dibegitukan jadi *gelo*. Jangankan soal diakhiri masa tugasnya, *wong temennya* duluan naik pangkat saja, itu orang sudah *gelo*. Jadi merasa gagal. Itu manusiawilah. Lebih-lebih habis dari dinas ketentaraan. Itu 'kan suatu kekecewaan yang besar sekali. Sebagai bekas atasan Prabowo, sebagai seorang manusia, saya ikut prihatin. Pasti orang sedih, bagaimana *sih* orang yang gagal. Kamu pernah gagal, *nggak*? Saya sebagai temannya, ya, sedih juga. Kegagalan itu 'kan menyedihkan, apalagi ini situasinya dalam keadaan demikian.

Kompas
26 Agustus 1998

arb

Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro:

Terus terang, perasaan saya sebagai prajurit, diberhentikan ketika masih ada kesempatan sepuluh tahun lagi, itu sayang sekali. Karier yang sudah dirintis begitu lama, dan merambat dari bawah. Padahal, Prabowo tinggal selangkah lagi ke pucuk pimpinan ABRI. Ini adalah suatu hukuman yang memalukan. Secara psikologis, akan berat sekali bagi yang bersangkutan. Bagi saya, ini betul-betul menyedihkan. Kalau dulu memakai baret merah itu membanggakan, sekarang sepertinya tidak ada harganya. Ini keadaan yang amat menyedihkan. Merataplah kita...

hs

Letjen TNI (Purn) Harsudiyono Hartas:

Ya kecewa tentu saja, lalu mencari sebabnya dia diberhentikan. Sebelum dia kecewa, pasti ada sebabnya, karena di dalam nilai-nilai keprajuritan pasti ada sesuatu yang dilanggar. Berarti dia harus menyadari, saya kecewa karena seharusnya tidak melanggar itu. Dari aspek kehormatan saya kira merupakan suatu pukulan berat, karena ada Kode Etik Perwira. Antara lain, keberanian atas dasar kebenaran. Kode etik tadi akan menuntun semua kita. Sebagai seorang prajurit, ia harus menerima apa adanya. Ini merupakan pelajaran pahit bagi karier hidup seorang pribadi. Secara filosofis, orang kalau loncatnya terlalu jauh, ya akan terperosok. Sebab, ia tidak dibangun berdasarkan pengalaman pribadi dan mental yang tangguh untuk berkorelasi, berkomunikasi dengan sasarannya.

Kompas
26 Agustus 1998